SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PENGESAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Mengesahkan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO S.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Perikanan
19.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Badan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.	Kecamatan Donorojo

NO	PERANGKAT DAERAH
29.	Kecamatan Punung
30.	Kecamatan Pringkuku
31.	Kecamatan Pacitan
32.	Kecamatan Kebonagung
33.	Kecamatan Arjosari
34.	Kecamatan Tegalombo
35.	Kecamatan Nawangan
36.	Kecamatan Bandar
37.	Kecamatan Tulakan
38.	Kecamatan Ngadirojo
39.	Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITANTAN
JL. JA. SUPRAPTO NO.8 PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 202 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2026 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaiand alam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitandapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II 8
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah. 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 12
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 34
BAB III 36
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 36
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 36
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah 36
3.3 Program dan Kegiatan 39
BAB IV 42
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42
BAB V 59
PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan yakni ***"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA"*** untuk mencapai Misi Keempat yaitu **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani**, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dilakukan untuk mengakomodir Perubahan RKPD Tahun 2026, yang dilakukan untuk penyesuaian pagu pendanaan maupun indikator karena regulasi maupun penyesuaian target yang telah tercapai.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok sesuai dengan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka disusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan terdiri dari :

a. SEKRETARIS DAERAH
b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
    1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
    2) Bagian Hukum
    3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
c. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
    1) Bagian Perekonomian
    2) Bagian Administrasi Pembangunan
    3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
d. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
    1) Bagian Umum
    2) Bagian Organisasi
    3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

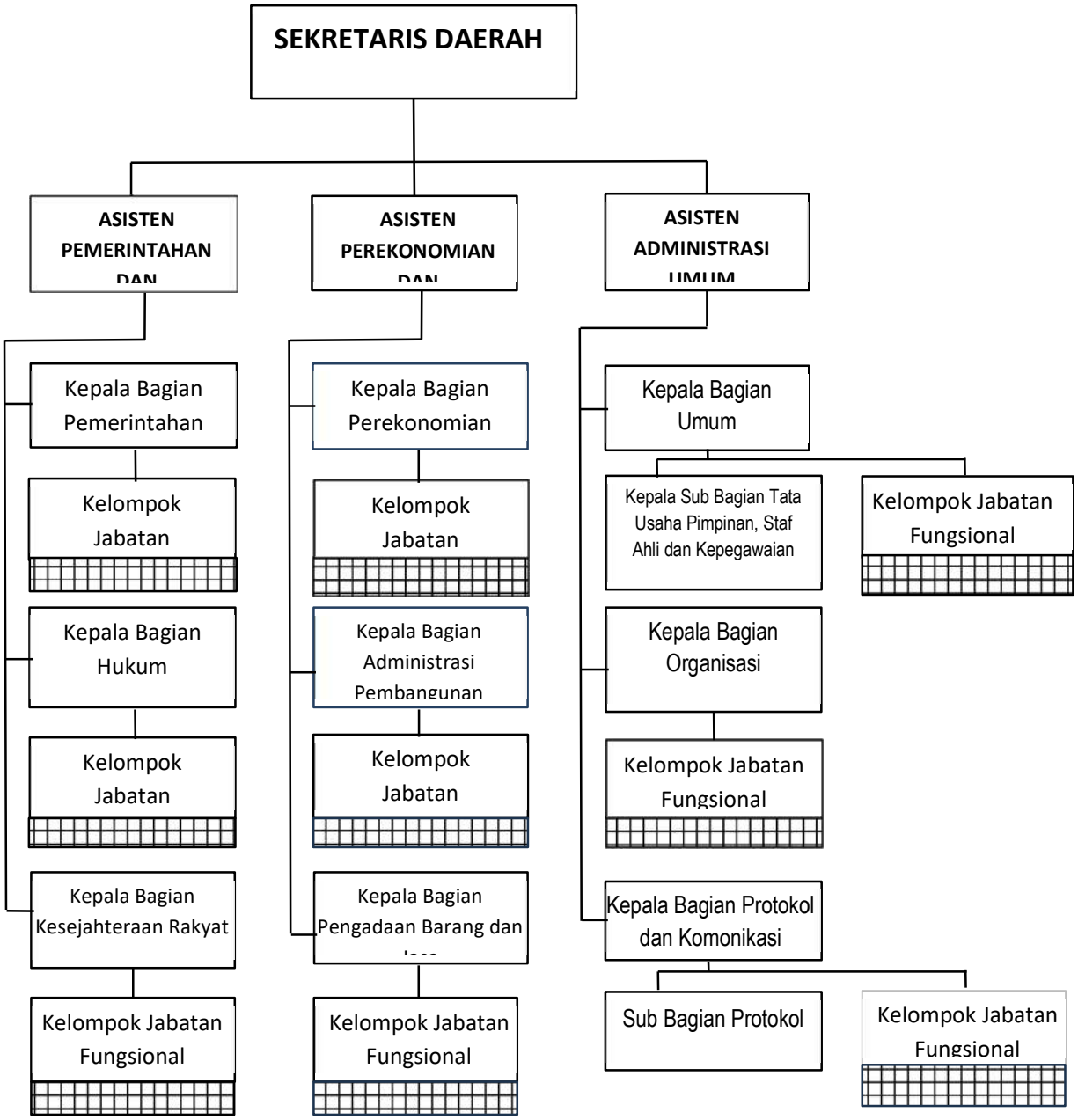

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 ini berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016 - 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rancangan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2026

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanan Renstra Sekretariat Daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaah hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi indicator sasaran yang memenuhi, kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan kinerja pelayanan, perencanaan dan

penganggaran serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 dengan capaian indikator sebagai berikut : indikator sasaran Score Nilai LPPD tercapai 3.2368 lebih tinggi dari, indicator Score Nilai target yang ditentukan sebesar 2.7500, indikator Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ tercapai 81,02 lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 66,00, indikator Score Nilai SAKIP PD tercapai 71,85 lebih rendah dari target 80 dan indikator Score Nilai IKM PD tercapai 83,59 lebih rendah dari target 84.

Matriks review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap indicator Sasaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Matrik Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2024

Sasaran dan Indikator Sasaran														
Uraian		Indikator		Target Renstra PD						Realisasi Renstra PD					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	(Sangat Baik) 2.650	(Sangat Baik) 2.7000	(Sangat Baik) 2.7500	3,2500	3,3000	3,3500	2.8600	2.8600	3.2368	3,2368		
		1.2	Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ	(Baik) 45	(Baik) 50	(Baik) 55	66	70	75	41.23	50.60	65.67	81,02		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola PD	2.1	Score Nilai SAKIP PD	(>B) 70	(>B) 72	(>B) 74	80	81	82	80.30	80.30	70.35	71,85		
		2.2	Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	85	85.5	78.78	83.18	88.31	83,59		

Sedangkan evaluasi realisasi capaian sasaran Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra dapat dilihat sebagaimana table berikut

Tabel 2.2
Realisasi capaian indicator sasaran 2024 terhadap target akhir Renstra

Sasaran		Indikator	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	3,3500	3,2368	96,62%
	1.2	Score Nilai Tata Kelola PBJ	75	81,02	108,03%
Rata - rata capaian sasaran Indikator 1					**102,32%**
2 Meningkatnya kualitas tata kelola PD	2.1	Score Nilai SAKIP PD	81,00	71,85	85,79%
	2.2	Score Nilai IKM PD	85,50	83,59	97,77%
Rata - rata capaian sasaran Indikator 2					**91,78%**
Rata - rata capaian sasaran Indikator 1 & 2					**97,05%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, tentang Standar Pelayanan Minimal maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi kinerja Program Kegiatan sampai dengan 2024 terhadap target akhir kinerja Program Kegiatan 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program		Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	1.1.1	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.1.2	% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.1.3	% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1.2.1	Persentase kebijakan di bidang perekonomian pembangunan dan SDA yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2.2	% kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2.3	% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.1.1	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	71.85	87,94%
		2.1.3	% tata kelola keuangan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.2.1	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.2.2	Nilai IKM PD	85,5	83,59	97,77%
		2.2.3	% kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%

Dari table tersebut disimpulkan hampir semua indicator program dapat tercapai, kecuali indicator Nilai Sakip dan IKM yang belum memenuhi target, hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dalam organisasi dan stage holder terkait, kedepan akan dilakukan koordinasi secara periodic baik dengan intern organisasi maupun stage holder.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada Tahun 2026 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
2) Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
3) Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
4) Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.

2. Tindak lanjut penyelesaian masalah

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1) Penataan organisasi, personil dan sarana-prasarana terus dilakukan sampai dipandang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pengisian dan mutasi pejabat dan staf merupakan salah satu upaya pemecahan yang dilakukan, penambahan sarana dan prasarana baik melalui pengadaan maupun rehabilitasi (pemeliharaan)
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan mutasi pejabat dan staf, mengusulkan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah juga dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah.
3) Selalu meningkatkan upaya-upaya koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak terkait diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kerja baik dengan PD, Kecamatan maupun Instansi Vertikal, Kunjungan Kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ke PD dalam rangka koordinasi dan pembinaan, membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.
4) Pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan sehingga lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

5) Perlu prioritas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
6) Perlu meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan tercatat secara valid.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Telaah terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Bupati selaku Kepala Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan Rancangan akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan. Indikator kinerja program/kegiatan. Tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berikut adalah Rancangan akhir RKPD Kabupaten Pacitan dengan analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Tabel 2.4
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SEKRETARIAT DAERAH				**32.447.466.880**				**36.725.000.000**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**32.447.466.880**				**36.725.000.000**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**32.447.466.880**				**36.725.000.000**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**25.835.660.389**			**-**	**27.175.000.000**	
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**100%**	**100%**	**155.000.000**			**100%**	**380.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4 Dokumen	220.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	55.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**100%**	**100%**	**13.217.203.185**			**100%**	**13.150.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1200 Orang/ bulan	1200 Orang/ bulan	12.289.079.546	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1200 Orang/ bulan	12.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	928.123.639	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4 Dokumen	1.150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**100%**	**100%**	**137.813.000**			**100%**	**235.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	200 Dokumen	200 Dokumen	137.813.000	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	200 Dokumen	235.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**100%**	**-**	**2.489.922.000**			**100%**	**3.350.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	589.922.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	16 Paket	800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	300.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	30 Paket	450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	500.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	30 Paket	700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12 Laporan	1.400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**100%**	**-**	**889.755.000**			**100%**	**1.100.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	889.755.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12 Laporan	1.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**100%**	**-**	**696.789.000**			**100%**	**1.130.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**

	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	48 Unit	400.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	4 8 Unit	700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	143.710.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	4 0 Unit	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	153.079.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		280.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**-**	**100%**	**-**	**3.295.656.204**			**100%**	**2.100.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	2.695.656.204	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28 Orang/ Bulan	1.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	600.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang/ Bulan	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**-**	**100%**	**-**	**2.720.000.000**			**100%**	**3.300.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**

	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	1.700.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	90 Paket	2.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	900.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	80 Paket	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	120.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	48 Paket	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**-**	**100%**	**-**	**617.782.000**			**100%**	**680.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	36 Dokumen	36 Dokumen	142.565.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	36 Dokumen	180.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 Laporan	8 Laporan	285.130.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	8 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									

			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen	8 Dokumen	190.087.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	8 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**-**	**100%**	**-**	**1.615.740.000**			**100%**	**1.750.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	240 Laporan	240 Laporan	1.021.718.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	240 Laporan	1.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	240 Laporan	240 Laporan	190.087.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	240 Laporan	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	403.935.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12 Laporan	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**4.719.652.208**			**-**	**6.220.000.000**	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**-**	**100%**	**-**	**718.560.208**			**100%**	**1.210.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	126.800.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Dokumen	310.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12 Dokumen	12 Dokumen	338.144.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	12 Dokumen	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	253.616.208	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	12 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**-**	**100%**	**-**	**3.282.536.000**			**100%**	**3.880.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	12 Dokumen	2.859.857.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	12 Dokumen	3.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	50.721.000	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	12 Dokumen	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	12 Dokumen	371.958.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	12 Dokumen	470.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**-**	**100%**	**-**	**591.752.000**			**100%**	**920.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	262.062.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	12 Dokumen	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	177.525.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4 Kasus	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	500 Dokumen	152.165.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	500 Dokumen	320.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**-**	**100%**	**-**	**126.804.000**			**100%**	**210.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	126.804.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	12 Dokumen	210.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**1.892.154.283**			**-**	**3.330.000.000**	
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**-**	**100%**	**-**	**252.524.358**			**100%**	**320.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen	102.522.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		12 Laporan	150.002.358	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**-**	**100%**	**-**	**488.006.425**			**100%**	**800.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		6 Dokumen	225.549.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		270.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan	143.531.425	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		320.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		12 Laporan	118.926.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		210.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**-**	**100%**	**100%**	**656.142.500**			**100%**	**1.590.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		12 Dokumen	266.029.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		580.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		12 Dokumen	153.869.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		500 Orang	236.244.500	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		610.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**-**	**100%**	**100%**	**495.481.000**			**100%**	**620.000.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	12 Dokumen	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 Dokumen	12 Dokumen	45.481.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	12 Dokumen	120.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H					**32.447.466.880**				**36.725.000.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2025 Sekretariat daerah Kabupaten Pacitan menangani program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditunjuk kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Usulan masyarakat tersebut melibuti belanja hibah kepada organisasi masyarakat dan bantuan sosial kepada individu yang kesemuanya diakomodir dalam Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 2.5
Daftar Usulan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun 2026

No	Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	Volume	Besaran Usulan	Keterangan
1	MASJID INSAN KAMIL SMAN 1 NGADIROJO DUSUN JANGKRIK RT 02 RW 06 DESA HADILUWIH KEC. NGADIROJO, Kab. Pacitan	1 Paket	150.000.000,00	
2	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PACITAN	1 Paket	150.000.000,00	
3	PC NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PACITAN	1 Paket	25.000.000,00	
4	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)KABUPATEN PACITAN	1 Paket	25.000.000,00	
5	Masjid Agung Darul Fallah Kab. Pacitan Jl.T.Imam Bonjol RT 2 RW 1 Krajan Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan	1 Paket	30.000.000,00	
6	Takmir Masjid Muttaqin Dusun Pagersari RT 01 RW 01 Desa Penggung Kec. Nawangan	1 Paket	50.000.000,00	
7	Takmir Masjid Sabilunajah RT 01 RW 08 Dusun Toyowidi Desa Karangnongko Kec.Kebonagung	1 Paket	97.000.000,00	

8	Musholla Al Hidayah RT 01 RW 04 Dusun Krajan Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kab. Pacitan	1 Paket	50.000.000,00	
9	Takmir Masjid Al fajar - 8.233727,111.132598 rt.02 rw.02 dusun watuadeg, Ds. Karangnongko Kab. Pacitan	1 Paket	80.000.000,00	
10	Masjid Nurul Hidayah Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan	1 Paket	100.000.000,00	
11	MADIN AL MA'ARIF DUSUN TLOGOREJO Lingkungan Teknologi Dusun Tlogorejo RT 03 RW 05 Desa Sudimoro , Kab. Pacitan	1 Paket	200.000.000,00	
12	MD. TEKNOLOGI NU SUDIMORO Lingkungan Teknologi Dusun Tlogorejo Rt 03 RW 05 Desa Sudimoro, Kab. Pacitan	1 Paket	150.000.000,00	
13	MTs Ma"arif Sudimoro Jl. Raya Sudimoro No. 08, Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	1 Paket	50.000.000,00	
14	TPQ DARUL ULUM REJOMULYO, Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	1 Paket	40.000.000,00	
15	Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan Jalan Nasional III Dusun Kebon Desa Sedeng Kec/Kab. Pacitan Jawa Timur, Kab. Pacitan	1 Paket	200.000.000,00	
16	PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN AR ROYYAN Desa Purwoasri Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan	1 Paket	100.000.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah- Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah **”Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel”**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan indikator kinerja :
   a. Score Nilai LPPD
   b. Score Nilai Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

2. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah Dengan indikator kinerja :
   a. Score Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   b. Score Nilai IKM Perangkat Daerah

Matriks tujuan dan sasaran serta indikator maupun target yang Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matriks Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

TUJUAN										SASARAN									
TUJUAN		INDIKATOR		Target						URAIAN		INDIKATOR		TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tata Kelola Pemerintah-an yang Efektif dan Akuntabel	1	Score Nilai SAKIP Daerah	72	75	77	79	82	84	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1	Score Nilai LPPD	(Sangat Baik) 2.650	(Sangat Baik) 2.7000	(Sangat Baik) 2.7500	3,2500	3,3000	3,3500
		2	Score Nilai IKM Daerah	83	83.5	84	84.5	85	85.5			1.1.2	Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	(Baik) 45	(Baik) 50	(Baik) 55	66	70	75
										1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	1.2.1	Score Nilai Sakip PD	(>B) 70	(>B) 72	(>B) 74	80	81	82
												1.2.2	Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	85	85.5

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini mengikuti perubahan regulasi yang sangat frontal terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif anggaran, hal ini disebabkan karena kebijakan serta pertimbangan agar program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel 3.2
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Kode Rekening	Uraian	Keterangan
1	2	3	4
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	

	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sekretariat DPRD
Kabupaten Pacitan

RENJA
RENCANA KERJA

2026

dprd.pacitankab.go.id
setwan@pacitankab.go.id
@pacitankabdprd
DPRD Pacitan

Jalan A. Yani No. 22 Pacitan

Sekretariat DPRD
Kabupaten Pacitan

RENJA
RENCANA KERJA

2026

dprd.pacitankab.go.id
setwan@pacitankab.go.id
@pacitankabdprd
DPRD Pacitan

Jalan A. Yani No. 22 Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DPRD
Jalan A. Yani No. 22 Telp. (0357) 881018 Pacitan
PACITAN

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 100.3.3/ 744 /408.25/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;

b. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke 2 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 bertujuan untuk menjamin

adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana Diktum Kesatu merupakan landasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PACITAN

DIDIK ALIH WIBOWO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680325 199202 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Renja ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai target yang sudah ditetapkan di tahun 2026.

Kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Pacitan, Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PACITAN

DIDIK ALIH WIBOWO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680325 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD . 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah .. 29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **43**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 43
3.3. Program dan Kegiatan 45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PACITAN **59**
BAB V PENUTUP **67**
4.1. Catatan Penting 67
4.2. Kaidah Pelaksanaan 67
4.3. Rencana Tindak Lanjut 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2025 Kabupaten Pacitan 8
Tabel 2.2. Realisasi kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 21
Tabel 2.3. Realisasi kegiatan Tahun 2024 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 22
Tabel 2.4. Realisasi kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 26
Tabel 2.5. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 28
Tabel 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 32
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 45
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.. 47
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatanan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dibuat dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut telah diterbitkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu memberikan layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD yang meliputi pelayanan administrasi umum, persidangan dan perundang-undangan, serta keuangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang meliputi Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan serta Bagian Keuangan akan diimplementasikan melalui berbagai program kegiatan yang direncanakan untuk periode tahunan, lima tahunan maupun jangka panjang. Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang telah disusun dengan prinsip manfaat, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien yang terukur melalui indikator keberhasilan serta dapat dipertanggungjawabkan pada periode akhir tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
m. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

n. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan maksud dan tujuan untuk suatu periode sebagai ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara keseluruhan.

a. Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk dapat merealisasikan kegiatan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur. Rencana kerja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu tahun yang diambil dari Rencana Stratergis yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.

b. Tujuan

   Adapun tujuan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan adalah :

   a. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2026 dengan tetap memperhatikan RKPD.
   b. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Transparansi pemerintahan merupakan awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan tranparansi pemerintahan maka akan mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif, efisien dan hasil yang maksimal, sehingga keberhasilan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab akan dapat dicapai. Oleh karena itu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu keharusan bagi instansi pemerintah ditengah – tengah tuntutan publik saat ini, mengingat laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja yang dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja kegiatan, program maupun kebijakan yang dilaksanakan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu memberikan layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD yang meliputi pelayanan administrasi umum, persidangan dan perundang-undangan, serta keuangan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 mengacu pada pencapaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026

terdapat 2 program, 16 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja pada Tahun 2026. Adapun Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2025
Kabupaten Pacitan

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Sekretariat DPRD									
04						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
04	**02**					**SEKRETARIAT DPRD**									
04	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**	**73,50**	**74,75**	**72,50**	**73,00**	**100,69**	**73,10**	**75,20**	**102,87**
04	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**25,00**	**24,00**	**26,00**	**26,00**	**100,00**	**25,00**	**6,00**	**24,00**
04	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	8,00	9,00	9,00	100,00	9,00	4,00	44,44
04	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	3,00	60,00
04	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	5,00	71,43
04	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**100,00**	**59,00**	**23,00**	**38,98**
04	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28,00	35,00	30,00	30,00	100,00	28,00	28,00	100,00
04	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	12,00	13,00	13,00	100,00	12,00	6,00	50,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	8,00	5,00	62,50
04	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	50,00
04	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12,00	12,00	13,00	13,00	100,00	12,00	6,00	50,00
04	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100,00**	**99,00**	**100,00**	**95,00**	**95,00**	**100,00**	**80,00**	**80,00**
04	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2,00	1,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
04	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	69,00	12,00	109,00	108,00	99,08	29,00	29,00	100,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**96,00**	**96,00**	**100,00**	**34,00**	**34,00**
04	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,00	1,00	3,00	3,00	100,00	14,00	3,00	21,43
04	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00
04	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	5,00	125,00
04	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5,00	4,00	5,00	5,00	100,00	7,00	4,00	57,14
04	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	12,00	13,00	13,00	100,00	12,00	6,00	50,00
04	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	12,00	13,00	13,00	100,00	10,00	5,00	50,00
04	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**89,00**	**89,00**	**100,00**	**21,00**	**21,00**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63,00	1,00	63,00	63,00	100,00	40,00	10,00	25,00
04	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32,00	11,00	68,00	68,00	100,00	32,00	12,00	37,50
04	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10,00	5,00	10,00	10,00	100,00	8,00	3,00	37,50
04	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	28,57
04	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**95,00**	**95,00**	**100,00**	**24,00**	**24,00**
04	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	50,00
04	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	50,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	50,00
04	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100,00**	**99,00**	**100,00**	**85,00**	**85,00**	**100,00**	**24,00**	**24,00**
04	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	2,00	40,00
04	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35,00	33,00	35,00	34,00	97,14	35,00	10,00	28,57
04	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00	36,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
04	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70,00	55,00	86,00	81,00	94,19	220,00	20,00	9,09

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	**02**	**01**	**2**	**15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**100,00**	**45,00**	**45,00**	**100,00**
04	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00
04	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7,00	1,00	5,00	5,00	100,00	6,00	2,00	33,33
04	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45,00	35,00	45,00	45,00	100,00	45,00	37,00	82,22
04	**02**	**01**	**2**	**16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Fasilitasi Kegiatan DPRD**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**100,00**	**12,00**	**6,00**	**50,00**
04	02	01	2	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	6,00	50,00
04	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12,00	11,00	13,00	13,00	100,00	11,00	6,00	54,55
04	**02**	**02**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi**	**100,00**	**99,00**	**100,00**	**96,00**	**96,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**
04	**02**	**02**	**2**	**01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi**	**100,00**	**99,00**	**100,00**	**88,00**	**88,00**	**100,00**	**7,00**	**7,00**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	02	2	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2,00	8,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00	50,00
04	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2,00	8,00	1,00	1,00	100,00	2,00	1,00	50,00
04	02	02	2	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2,00	2,00	3,00	2,00	66,67	4,00	1,00	25,00
04	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04	**02**	**02**	**2**	**02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas**	**100,00**	**98,00**	**100,00**	**99,00**	**99,00**	**100,00**	**10,00**	**10,00**
04	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	02	02	2	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
04	**02**	**02**	**2**	**03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah**	**100,00**	**93,00**	**100,00**	**90,00**	**90,00**	**100,00**	**30,00**	**30,00**
04	02	02	2	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	11,00	6,00	54,55
04	02	02	2	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	11,00	6,00	54,55
04	02	02	2	03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	11,00	6,00	54,55
04	02	02	2	03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	11,00	6,00	54,55

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	02	2	03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
04	02	02	2	03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
04	**02**	**02**	**2**	**04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi**	**100,00**	**96,00**	**100,00**	**87,00**	**87,00**	**100,00**	**24,00**	**24,00**
04	02	02	2	04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3,00	2,00	3,00	3,00	100,00	2,00	2,00	100,00
04	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	128,00	12,00	10,00	10,00	100,00	128,00	15,00	11,72
04	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6,00	7,00	6,00	6,00	100,00	5,00	5,00	100,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	02	2	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	20,00	8,00	40,00
04	02	02	2	04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12,00	0,00	12,00	12,00	100,00	11,00	4,00	36,36
04	**02**	**02**	**2**	**05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi**	**100,00**	**97,00**	**100,00**	**97,00**	**97,00**	**100,00**	**26,00**	**26,00**
04	02	02	2	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12,00	40,00	12,00	12,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2,00	3,00	2,00	2,00	100,00	2,00	1,00	50,00
04	**02**	**02**	**2**	**06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi**	**100,00**	**98,00**	**100,00**	**90,00**	**90,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**
04	02	02	2	06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00	1,00	100,00
04	02	02	2	06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
04	**02**	**02**	**2**	**08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**12,00**	**99,00**	**100,00**	**96,00**	**96,00**	**100,00**	**65,00**	**65,00**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
04	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi 0Pelaksanaan Tugas DPRD	12,00	12,00	13,00	13,00	100,00	10,00	4,00	40,00
04	02	02	2	08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
04	02	02	2	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12,00	3,00	12,00	12,00	100,00	12,00	4,00	33,33
04	02	02	2	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12,00	8,00	13,00	13,00	100,00	10,00	4,00	40,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Mengingat bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk menyusun rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka evaluasi yang dipergunakan adalah rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra tersebut mengacu pada hasil Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj.IP) dan/atau Realisasi APBD Kabupaten Pacitan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat merealisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Realisasi kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentaase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100,00	95,00	95,00
2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109,00	108,00	99.08
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100,00	96,00	96,00
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang di butuhkan	100,00	89,00	89,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang di butuhkan	100,00	95,00	95,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100,00	85,00	85,00
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35,00	34,00	97,14
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86,00	81,00	94,19
9	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100,00	96,00	96,00
10	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase pembahasan Raperda yang di fasilitasi	100,00	88,00	88,00
11	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase dokumen anggaran yang di bahas	100,00	99,00	99,00
12	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah	100,00	90,00	90,00
13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	100,00	87,00	87,00
14	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang di fasilitasi	100,00	97,00	97,00
15	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	100,00	90,00	90,00
16	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Fasilitasi tugas DPRD	100,00	96,00	96,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat merealisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Realisasi kegiatan Tahun 2024 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat Daerah	26.00	26.00	100%
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.00	9.00	100%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.00	100%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.00	100%
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.00	2.00	100%
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.00	100%
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5.00	100%
8	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7.00	100%
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Dearah	59.00	59.00	100%
10	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30.00	30.00	100%
11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.00	13.00	100%
12	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8	8.00	100%
13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	12.00	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
14	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1.00	100%
15	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.00	13.00	100%
16	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.00	2.00	100%
17	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00	3.00	100%
18	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4.00	100%
19	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4.00	100%
20	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	5.00	100%
21	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.00	13.00	100%
22	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00	13.00	100%
23	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63.00	63.00	100%
24	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	68.00	68.00	100%
25	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10.00	10.00	100%
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.00	100%
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12.00	100%
28	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12.00	100%
29	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5.00	100%
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	3.00	100%
31	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan layanan kesejahteraaan DPRD	45.00	45.00	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
32	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	45.00	100%
33	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5.00	5.00	100%
34	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	45.00	100%
35	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD	12.00	12.00	100%
36	Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	12.00	100%
37	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	13.00	13.00	100%
38	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.00	2.00	100%
39	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.00	1.00	100%
40	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1.00	100%
41	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1.00	100%
42	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1.00	100%
43	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1.00	100%
44	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1.00	100%
45	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	12.00	100%
46	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	12.00	100%
47	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	12.00	100%
48	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	12.00	100%
49	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1.00	100%
50	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1.00	100%
51	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	1.00	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
52	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3.00	3.00	100%
53	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10.00	10.00	100%
54	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	6.00	100%
55	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12.00	12.00	100%
56	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	12.00	100%
57	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	12.00	100%
58	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2	2.00	100%
59	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2.00	2.00	100%
60	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1.00	100%
61	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.00	13.00	100%
62	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	1.00	100%
63	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12.00	100%
64	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	13.00	13.00	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat merealisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Realisasi kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai Evaluasi Sakip PD	72,50	73,00	100,69

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

a. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
   1. Adanya kebutuhan dalam layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang belum tercukupi;
   2. Adanya kebutuhan dalam kegiatan penunjang Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang belum tercukupi;
   3. Kurang teliti dalam perencanaan penganggaran kegiatan, hal tersebut menyebabkan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
   4. Kurang maksimal koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
   1. Adanya perencanaan dan koordinasi yang baik;
   2. Penetapan target yang tepat.

c. Faktor pencapaian melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
   1. Meningkatnya kualitas dan kesesuaian komponen yang dinilai antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan terhadap target capaian program Renstra

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun yang lalu mempunyai kinerja yang kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja untuk diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran ataupun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir;
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA;
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan dapat tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan;
4. Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam renstra. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, mempunyai tugas membantu memberikan

layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD yang meliputi pelayanan administrasi umum, persidangan dan perundang-undangan, serta keuangan.

Untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Pemberian dukungan layanan administrasi umum DPRD;
c. Pemberian dukungan layanan administrasi persidangan DPRD;
d. Pemberian dukungan layanan administrasi keuangan DPRD;
e. Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam hal penyusunan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan;
f. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi Pembahasan Raperda	Prosentase Raperda yang ditetapkan	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai Evaluasi Sakip PD	72,50	73,00	100,69
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100,00	96,00	96,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.4, pada tahun 2024 kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan sesuai tabel diatas ada 1 (satu) indikator program yang tidak tercapai, yang pertama pada program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dikarenakan kurang optimalnya dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap DPRD. Beberapa permasalahan ditinjau dari pelayanan Perangkat Daerah diantaranya:

a. Terbatasnya sarana prasarana;
b. Dinamika Legislatif yang selalu berubah-ubah;
c. Tuntutan pelayanan yang semakin tinggi sementara SDM sangat terbatas;
d. Kurang Responsifnya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
e. Penyediaan dana yang kurang memadai; dan
f. Tuntutan pelayanan kegiatan makin tinggi sementara pengelola kegiatan harus mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas maka bisa di tarik kesimpulan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Adalah Kualitas Pelayanan yang Kurang Maksimal.

Melihat permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappedalitbang adalah:

a. Tantangan Internal

1. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum memadainya jumlah tenaga yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja;
2. Belum idealnya anggaran yang dimiliki; dan
3. Sarana prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang terbatas dan kondisi relatif yang kurang baik.

b. Tantangan Eksternal
1. Terdapatnya aspirasi Masyarakat yang bervariatif;
2. Paradigma atau kepedulian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan kegiatan legislasi, anggaran dan pengawasan.

c. Peluang
1. Peningkatan anggaran, sarana prasarana kantor dan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.;
2. Peningkatan bimbingan teknis bagi aparatur guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi pelayanan kegiatan DPRD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Setiap tahunnya Perangkat Daerah lainnya menyusun dokumen Rancangan Awal Renja yang dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Setelah Rancangan Awal Renja disempurnakan maka tahap selanjutnya yaitu penyusunan Rancangan Renja. Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Tanjungbalai. Dari rancangan awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen Renstra Sekretariat DPRD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2026 yang tercantum dalam dokumen rancangan awal Renja tidak ada perbedaan dengan analisis kebutuhan dengan yang tercantum pada rancangan RKPD.

Review program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**	**73,50**	**29.350.896.297,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**	**73,50**	**29.350.896.297,00**	
i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**25,00**	**219.320.200,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**25,00**	**219.320.200,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	65.158.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	65.158.700,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1,00	20.351.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1,00	20.351.100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	15.803.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	15.803.200,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1,00	23.806.900,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1,00	23.806.900,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	15.186.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	15.186.700,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00	49.710.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00	49.710.400,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	7,00	29.303.200,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	7,00	29.303.200,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah**	**59,00**	**3.250.555.446,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah**	**59,00**	**3.250.555.446,00**	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29,00	3.099.456.046,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29,00	3.099.456.046,00	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	37.615.600,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	37.615.600,00	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8,00	36.753.800,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8,00	36.753.800,00	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,00	10.589.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,00	10.589.200,00	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00	13.858.600,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00	13.858.600,00	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12,00	52.282.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12,00	52.282.200,00	
iii	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100,00**	**201.526.200,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100,00**	**201.526.200,00**	
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2,00	85.564.400,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2,00	85.564.400,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,00	115.961.800,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,00	115.961.800,00	
iv	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100,00**	**786.713.100,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100,00**	**786.713.100,00**	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00	49.823.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00	49.823.200,00	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	51.203.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	51.203.100,00	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	110.895.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	110.895.800,00	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	300.606.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	300.606.000,00	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	138.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	138.000.000,00	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	136.185.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	136.185.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
v	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100,00**	**645.853.300,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100,00**	**645.853.300,00**	
22	Pengadaan Mebel	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36,00	69.597.600,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36,00	69.597.600,00	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14,00	144.712.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14,00	144.712.000,00	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	431.543.700,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	431.543.700,00	
vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**100,00**	**1.457.118.500,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**100,00**	**1.457.118.500,00**	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12.600.000,00	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	386.278.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	386.278.500,00	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12,00	1.058.240.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12,00	1.058.240.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
vii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100,00**	**981.521.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100,00**	**981.521.500,00**	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00	478.700.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00	478.700.000,00	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35,00	186.850.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35,00	186.850.000,00	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	188.314.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	188.314.300,00	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36,00	127.657.200,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36,00	127.657.200,00	
viii	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD**	**45,00**	**20.803.102.351,00**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD**	**45,00**	**20.803.102.351,00**	
32	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45,00	20.583.374.351,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45,00	20.583.374.351,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
33	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3,00	164.828.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3,00	164.828.000,00	
34	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45,00	54.900.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45,00	54.900.000,00	
ix	**Layanan Administrasi DPRD**		**Fasilitasi Kegiatan DPRD**	**12,00**	**1.005.185.700,00**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Fasilitasi Kegiatan DPRD**	**12,00**	**1.005.185.700,00**	
35	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12,00	12.800.700,00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12,00	12.800.700,00	
36	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12,00	992.385.000,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12,00	992.385.000,00	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi**	**100,00**	**14.978.473.100,00**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi**	**100,00**	**14.978.473.100,00**	
x	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi**	**100,00**	**343.998.700,00**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi**	**100,00**	**343.998.700,00**	
37	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4,00	10.365.700,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4,00	10.365.700,00	
38	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2,00	154.018.400,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2,00	154.018.400,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
39	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2,00	59.443.400,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2,00	59.443.400,00	
40	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2,00	120.171.200,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2,00	120.171.200,00	
xi	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas**	**100,00**	**79.265.900,00**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas**	**100,00**	**79.265.900,00**	
41	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1,00	22.153.300,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1,00	22.153.300,00	
42	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,00	13.509.200,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,00	13.509.200,00	
43	Pembahasan APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00	10.940.600,00	Pembahasan APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00	10.940.600,00	
44	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1,00	13.600.500,00	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1,00	13.600.500,00	
45	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,00	19.062.300,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,00	19.062.300,00	
xii	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah**	**100,00**	**1.441.693.200,00**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah**	**100,00**	**1.441.693.200,00**	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
46	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12,00	327.056.900,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12,00	327.056.900,00	
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12,00	413.829.900,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12,00	413.829.900,00	
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12,00	340.359.900,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12,00	340.359.900,00	
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12,00	327.676.900,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12,00	327.676.900,00	
50	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1,00	12.149.100,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1,00	12.149.100,00	
51	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1,00	20.620.500,00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1,00	20.620.500,00	
xiii	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Pelaksanaan Peningkatan**	**100,00**	**2.493.270.900,00**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Pelaksanaan Peningkatan**	**100,00**	**2.493.270.900,00**	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kapasitas DPRD yang Difasilitasi					**Kapasitas DPRD yang Difasilitasi**			
52	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2,00	1.392.033.200,00	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2,00	1.392.033.200,00	
53	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pacitan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	128,00	217.250.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pacitan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	128,00	217.250.000,00	
54	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pacitan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5,00	150.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pacitan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5,00	150.000.000,00	
55	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12,00	253.500.000,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12,00	253.500.000,00	
56	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12,00	480.487.700,00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12,00	480.487.700,00	
xiv	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi**	**100,00**	**3.080.112.900,00**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi**	**100,00**	**3.080.112.900,00**	
57	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12,00	127.336.400,00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12,00	127.336.400,00	
58	Pelaksanaan Reses	Kab. Pacitan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3,00	2.952.776.500,00	Pelaksanaan Reses	Kab. Pacitan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3,00	2.952.776.500,00	
xv	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi**	**100,00**	**10.922.200,00**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi**	**100,00**	**10.922.200,00**	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
59	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1,00	6.860.200,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1,00	6.860.200,00	
60	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1,00	4.062.000,00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1,00	4.062.000,00	
xvi	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**100,00**	**7.529.209.300,00**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**100,00**	**7.529.209.300,00**	
61	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi 0Pelaksanaan Tugas DPRD	12,00	6.526.473.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi 0Pelaksanaan Tugas DPRD	12,00	6.526.473.000,00	
62	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1,00	7.856.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1,00	7.856.000,00	
63	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12,00	10.754.600,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12,00	10.754.600,00	
64	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12,00	984.125.700,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12,00	984.125.700,00	
JUMLAH					**44.329.369.397,00**	**JUMLAH**				**44.329.369.397,00**	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan hampir tidak ada. Namun Usulan dari masyarakat biasanya berupa masukan pada saat Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Kemudian Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan akan merangkum usulan-usulan tersebut untuk kemudian akan dibacakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD pada saat Paripurna Hasil Reses dan setelah itu usulan yang telah diubah menjadi Pokok Pikiran DPRD akan disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Pacitan. Sehingga didalam dokumen perencanaannya di Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas ganda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasiltasi Tugas dan Fungsi DPRD. Telaahan terhadap kebijakan nasional untuk rencana tahun 2026 mengacu pada RPJMN tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2026, dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026.

Menelaah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan kebijakan Kabupaten Pacitan yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Pacitan di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan di bidang pelayanan umum telah selaras dan sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan telah mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi di bidang pelayanan umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Sekretariat DPRD sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

" MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA "

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2021 - 2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa.

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya.

Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, hal ini ditunjukkan melalui:

- Pernyataan misi ke 4: **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.**

Pada misi keempat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan berperan dalam memberikan layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang yaitu:

a. Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah;
b. Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; dan
c. Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan DPRD.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	79.81	80.21	80.61	81.01	81.41	81.81

Sumber : Data Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fasilitasi Pembahasan Raperda	Prosentase Raperda yang di tetapkan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Data Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksud disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		73,50	29.350.896.297,00			73,90	31.308.730.000,00
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		25,00	219.320.200,00			25,00	232.479.412,00
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8,00	65.158.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		8,00	69.068.222,00
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	20.351.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		1,00	21.572.166,00
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	15.803.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		1,00	16.751.392,00
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Pacitan, Semua	1,00	23.806.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1,00	25.235.314,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
							Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	15.186.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		1,00	16.097.902,00
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,00	49.710.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		5,00	52.693.024,00
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,00	29.303.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		7,00	31.061.392,00
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah		59,00	3.250.555.446,00			59,00	3.445.588.772,76
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28,00	3.099.456.046,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		28,00	3.285.423.408,76
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	37.615.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	39.872.536,00
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	8,00	36.753.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA		8,00	38.959.028,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
								Semua Kel/Desa			BAGI HASIL (DBH)			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	10.589.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	11.224.552,00
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	13.858.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,00	14.690.116,00
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	52.282.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	55.419.132,00
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100,00	201.526.200,00			100,00	213.617.772,00
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	85.564.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		2,00	90.698.264,00
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,00	115.961.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		69,00	122.919.508,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100,00	786.713.100,00			100,00	833.915.886,00
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	49.823.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3,00	52.812.592,00
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,00	51.203.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4,00	54.275.286,00
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,00	110.895.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4,00	117.549.548,00
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,00	300.606.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5,00	318.642.360,00
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	138.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	146.280.000,00
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	136.185.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	144.356.100,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan		100,00	645.853.300,00			100,00	684.604.498,00
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63,00	69.597.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		63,00	73.773.456,00
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32,00	144.712.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		32,00	153.394.720,00
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,00	431.543.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10,00	457.436.322,00
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan		100,00	1.457.118.500,00			100,00	1.544.545.610,00
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	12.600.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	13.356.000,00
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	386.278.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	409.455.210,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	1.058.240.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12,00	1.121.734.400,00
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100,00	981.521.500,00			100,00	1.040.412.790,00
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,00	478.700.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5,00	507.422.000,00
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35,00	186.850.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		35,00	198.061.000,00
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	188.314.300,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3,00	199.613.158,00
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70,00	127.657.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		70,00	135.316.632,00
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD		45,00	20.803.102.351,00			45,00	22.051.288.492,06
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Pacitan, Semua	45,00	20.583.374.351,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45,00	21.818.376.812,06

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
								Kecamatan, Semua Kel/Desa						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,00	164.828.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,00	174.717.680,00
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45,00	54.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45,00	58.194.000,00
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD		12,00	1.005.185.700,00			12,00	1.065.496.842,00
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	12.800.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	13.568.742,00
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	992.385.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	1.051.928.100,00
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi		100,00	14.978.473.100,00			100,00	25.630.000.000,00
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi		100,00	343.998.700,00			100,00	488.478.154,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	10.365.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	14.719.294,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	154.018.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	218.706.128,00
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	59.443.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	84.409.628,00
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	120.171.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	170.643.104,00
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas		100,00	79.265.900,00			100,00	112.557.578,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	22.153.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	31.457.686,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	13.509.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	19.183.064,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	10.940.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	15.535.652,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	13.600.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	19.312.710,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	19.062.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	27.068.466,00
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah		100,00	1.441.693.200,00			100,00	2.047.204.344,00
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	327.056.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	464.420.798,00
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	413.829.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	587.638.458,00
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	340.359.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	483.311.058,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	327.676.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	465.301.198,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	12.149.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	17.251.722,00
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	20.620.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	29.281.110,00
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi		100,00	2.493.270.900,00			100,00	3.540.444.678,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	1.392.033.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	1.976.687.144,00
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128,00	217.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		128,00	308.495.000,00
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,00	213.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	253.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	359.970.000,00
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	480.487.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	682.292.534,00
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi		100,00	3.080.112.900,00			100,00	4.373.760.318,00
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	127.336.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	180.817.688,00
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	2.952.776.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	4.192.942.630,00
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi		100,00	10.922.200,00			100,00	15.509.524,00
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	6.860.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	9.741.484,00
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	1,00	4.062.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	5.768.040,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	6	7
								Semua Kel/Desa						
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD		12,00	7.529.209.300,00			12,00	10.691.477.206,00
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	6.526.473.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	9.267.591.660,00
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	7.856.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	11.155.520,00
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	10.754.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	15.271.532,00
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	984.125.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	1.397.458.494,00
	J U M L A H									**44.329.369.397,00**	**J U M L A H**			**56.938.730.000,00**

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PACITAN

Dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan Pacitan, Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan sudah dibahas di bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana kerja berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sebagai penjabaran prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026.

Dalam menjalankan rencana program dan kegiatan, perangkat daerah diberikan pagu indikatif program. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD). Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas rencana kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan 2021–2026.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan menguraikan dalam 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.44.329.369.397,00 *(Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)* dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Pacitan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Sekretariat DPRD						44.329.369.397,00							56.243.519.649,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						44.329.369.397,00							56.243.519.649,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						44.329.369.397,00							56.243.519.649,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75,20			73,50	29.350.896.297,00						73,90	32.056.931.291,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	25Dokumen			25Dokumen	219.320.200,00			-	-	-	25Dokumen	249.116.361,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	65.158.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	8 Dokumen	96.201.726,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	20.351.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1 Dokumen	18.018.265,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.803.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1 Dokumen	16.649.530,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	23.806.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1 Dokumen	23.123.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.186.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1 Dokumen	16.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			5 Laporan	49.710.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	5 Laporan	43.814.495,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			7 Laporan	29.303.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	7 Laporan	35.308.565,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah	59Dokumen			59Dokumen	3.250.555.446,00			-	-	-	59Dokumen	3.755.839.168,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan			29 Orang/bulan	3.099.456.046,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	28 Orang/bulan	3.602.531.790,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	37.615.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Dokumen	35.798.230,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen			8 Dokumen	36.753.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	8 Dokumen	41.062.833,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan			12 Laporan	10.589.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	9.796.275,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen			1 Dokumen	13.858.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1 Dokumen	14.020.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	52.282.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	52.629.625,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100Persentase			100Persentase	201.526.200,00			-	-	-	100Persentase	380.000.000,00	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			2 Paket	85.564.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Paket	80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang			30 Orang	115.961.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	49 Orang	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100Persentase			100Persentase	786.713.100,00			-	-	-	100Persentase	958.125.000,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			2 Paket	49.823.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	3 Paket	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	51.203.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	4 Paket	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	110.895.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	4 Paket	110.912.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			4 Paket	300.606.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	5 Paket	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	138.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	136.185.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	217.213.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100Persentase			100Persentase	645.853.300,00			-	-	-	100Persentase	1.158.340.500,00	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63 Unit			36 Unit	69.597.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	35 Unit	323.943.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit			14 Unit	144.712.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	32 Unit	434.397.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			5 Unit	431.543.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	10 Unit	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan	100Persentase			100Persentase	1.457.118.500,00			-	-	-	100Persentase	1.457.154.500,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	12.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	12.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	386.278.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	386.278.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.058.240.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	1.058.276.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100Persentase			100Persentase	981.521.500,00			-	-	-	100Persentase	1.951.240.000,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			5 Unit	478.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	5 Unit	494.061.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit			35 Unit	186.850.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	35 Unit	198.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			2 Unit	188.314.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	3 Unit	200.503.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit			36 Unit	127.657.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	70 Unit	1.058.276.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD	45Orang			45Orang	20.803.102.351,00			-	-	-	45Orang	21.232.301.772,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan			45 Orang/Bulan	20.583.374.351,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	45 Orang/Bulan	20.847.573.772,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket			3 Paket	164.828.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Paket	330.428.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang			45 Orang	54.900.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45 Orang	54.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD	12Bulan			12Bulan	1.005.185.700,00			-	-	-	12Bulan	914.813.990,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan			12 Laporan	12.800.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	14.813.990,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan			12 Laporan	992.385.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100Persentase			100Persentase	14.978.473.100,00						100Persentase	24.186.588.358,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi	100Persentase			100Persentase	343.998.700,00			-	-	-	100Persentase	362.130.500,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen			4 Dokumen	10.365.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	10.465.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	154.018.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	165.876.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen			2 Dokumen	59.443.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	65.512.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen			2 Dokumen	120.171.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	120.275.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas	100Persentase			100Persentase	79.265.900,00			-	-	-	100Persentase	102.293.300,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen			1 Dokumen	22.153.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	30.679.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen			1 Dokumen	13.509.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	13.574.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.940.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	11.057.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen			1 Dokumen	13.600.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	13.618.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	19.062.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	33.363.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	100Persentase			100Persentase	1.441.693.200,00			-	-	-	100Persentase	2.354.317.100,00	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan			12 Laporan	327.056.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	537.263.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan			12 Laporan	413.829.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	683.567.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan			12 Laporan	340.359.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	555.608.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan			12 Laporan	327.676.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	532.155.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen			1 Dokumen	12.149.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	12.149.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	20.620.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	33.573.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi	100Persentase			100Persentase	2.493.270.900,00			-	-	-	100Persentase	2.525.061.113,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen			2 Dokumen	1.392.033.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	1.391.031.813,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	128 Orang			128 Orang	217.250.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	128 Orang	228.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang			5 Orang	150.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Orang	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen			12 Dokumen	253.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	258.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen			12 Dokumen	480.487.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	497.529.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi	100Persentase			100Persentase	3.080.112.900,00			-	-	-	100Persentase	5.808.848.920,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan			12 Laporan	127.336.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	412.747.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen			3 Dokumen	2.952.776.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	5.396.101.020,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi	100Persentase			100Persentase	10.922.200,00			-	-	-	100Persentase	10.937.425,00	
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.860.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	6.875.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan			1 Laporan	4.062.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	4.062.325,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	12Dokumen			12Dokumen	7.529.209.300,00			-	-	-	12Dokumen	13.023.000.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen			12 Dokumen	6.526.473.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan			1 Laporan	7.856.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen			12 Dokumen	10.754.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen			12 Dokumen	984.125.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
											J U M L A H	**44.329.369.397,00**							**56.243.519.649,00**	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

BAB V
PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026, penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
2. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
3. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2026.
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang

memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat.

5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten ini.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten ini, diharapkan seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Rencana kerja ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten.
4. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026 ini akan dapat terwujud jika seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat pmenjalankan semua

kebijakan dan program serta memberi ridho atas terwujudnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun 2026.

Pacitan, Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PACITAN

DIDIK ALIH WIBOWO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680325 199202 1 001

RENCANA KERJA

RENJA

2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

INSPEKTORAT DAERAH

JL. A. Yani Nomor. 65 A Pacitan, Kode Pos 63512
Telp. (0357) 881164 Fax. 884879

e-mail : inspektorat@pacitankab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	
1 Latar Belakang	4
2 Landasan Hukum	4
3 Maksud & Tujuan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Capaian Renstra	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	19
2.3 Rencana Strategis Inspektorat Daerah	22
2.4 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGAM DAN KEGIATAN	33
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah	33
3.3 Progam dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN	35
BAB V PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program Penunjang 12
Tabel 2.2 Program Pengawasan Penyelenggaraan 15
Tabel 2.3 Program Perumusan Kebijakan 16
Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi 17
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama 20
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Inspektorat 21
Tabel 2.7 Rencana Strategis Inspektorat 22
Tabel 2.8 Anggaran Belanja 2026 27
Tabel 2.9 Program Penunjang Urusan Pemerintah 31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 yang memuat Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2026.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 ini yang akan menjadi pedoman bagi seluruh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pembinaan dan pengawasan sampai dengan akhir tahun 2026.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang konduktif dari semua pihak.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 ini dapat bermanfaat.

Pacitan,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MAHMUD, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196612261989011002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pada pasal 21 ayat (3) disampaikan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja tahun 2026, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD tahun 2026. Sedangkan RKPD tahun 2026 dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah. Proses perencanaan tahunan perangkat daerah diawali dengan menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran / kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

Sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah :

1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan;
17) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
18) Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 antara lain adalah :

1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026
2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1) Sebagai pedoman seluruh APIP dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2026.
2) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. **Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. **Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang regulasi yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2024 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2026 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian Level Kapabilitas APIP dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan/atau IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian atas program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dalam kelompok masyarakat yang terkait langsung dalam pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang hasil penelaahan kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan:
   a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b) Pencapaian SDGs,
   c) Pengentasan kemiskinan,
   d) Pencapaian NSPK dan SPM,
   e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   f) Pengembangan daerah terisolir,
   g) dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan,
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu),
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bagian ini dijelaskan rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026, yang memuat urusan/bidang Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, rencana tahun 2026 (lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif, sumber dana), catatan penting dan prakiraan maju rencana tahun 2026 (target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif).

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama Perangkat Daerah dan tandatangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Sebagaimana diketahui pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target yang telah ditetapkan

2.1.1 NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Penilaian dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.

Capaian kinerja tahun 2024 Inpsektorat Daerah Kabupaten Pacitan menargetkan untuk memperoleh nilai 80.05. atau sebesar 96,5 % dari target yang telah direncanakan sebesar 82,95. Adapun Penyebab tidak tercapainya target indikator program penunjang urusan pemerintah daerah adalah :

1. Target indikator program perangkat daerah belum selaras dengan target RPJMD.
2. Laporan pegukuran kinerja belum memberikan informasi bahwa strategi yang di terapkan mampu mencapai tujuan organisasi.
3. Laporan Pengukuran kinerja belum memberikan informasi tentang kebijakan yang di gunakan untuk pencapaian kinerja tersebut.
4. Pengukuran kinerja belum memberikan informasi tentang aktivitas yang di laksanakan untuk mencapai target kinerja tersebut.

Nilai Sakip merupakan target kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Penunjang

No	Program/kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1.	**Program Penunjang**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 dokumen	14 dokumen	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	2 jenis diklat tehnis diikuti 30 APIP Dua kali bimtek perundang-undangan	2 jenis diklat tehnis diikuti 30 APIP Dua kali bimtek perundang- undangan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% b. Persentase penyediaan bahan logistik kantor 100 % c. Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 % d. Persentase penyediaan bahan / material100% e. Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD12 kali.	a.Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% b.Persentase penyediaan bahan logistik kantor 100 % c.Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 % d.Persentase penyediaan bahan / material100% e.Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD12 kali.	100% 100% 100% 100% 100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeler 100 %. b. Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya 100 %. c. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 100 %.	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeler 100 %. b. Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya 100 %. b. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 100 %.	100 % 100 % 100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase penyediaan jasa surat menyurat 100 %. b. Persentase penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 100 %. c. Persentase tercukupinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100 %.	a. Persentase penyediaan jasa surat menyurat 100 %. b. Persentase penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 100 %. c. Persentase tercukupinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100 %.	100 % 100 % 100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam kondisi baik 80 %.	Persentase barang milih daerah dalam kondisi baik 80 %.	100 %

Hambatan dan tantangan pencapaian target indikator program penunjang yaitu nilai sakip perangkat daerah adalah adalah:

1) Kurangnya komitmen dalam mengedepan-kan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, pada semua elemen SKPD
2) Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
3) Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
4) Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh karyawan tentang kebijakan di bidang akuntabilitas;
5) Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah serta;
6) Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan daerah dan sistem penganggaran.

Untuk strategi ke depan dilaksanakan melalui:

1) Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas Kinerja;
2) Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada seluruh karyawan APIP inspektorat daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;

3) Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;

2.1.2 PERSENTASE REKOMENDASI TEMUAN YANG DI TINDAK LANJUTI

Indikator kinerja dari program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan yang telah ditindaklanjuti oleh Obyek Pengawasan.

Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh auditi terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan. Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK maupun APIP Kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan hal penting yang harus segera dilakukan oleh auditan guna membantu merealisasikan tujuan dan kelangsungan organisasi serta mendorong tercapainya kinerja SKPD yang lebih baik.

Dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Badan Pengawas Keuangan telah dilakukan tindak lanjut oleh obyek pengawasan per 31 Desember 2024 adalah 90 %, sehingga tidak bisa tercapai target 100 %.

Adapun kendala terpenuhinya target 100 % atas tindak lanjut hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

1) Pejabat/ASN terkait temuan belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
2) Lemahnya pengendalian internal SKPD, Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga kejadian-kejadian yang sama terulang kembali pada pelaksanaan APBD tahun berikutny
3) Adanya ketidaksepakatan hasil pemeriksaan dapat terjadi karena auditor kurang cermat dan kurang memiliki kualitas teknis dan profesi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan

Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depan antara lain

1) peningkatan Komitmen Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2) memaksimalkan fungsi pengawasan nspektorat merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut.
3) melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala.

Untuk Program Pengawasan Penyelenggaraan didukung oleh 2 kegiatan dan beberapa target dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program Pengawasan Penyelenggaraan

No	Program/kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1.	**Program Penunjang**			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 38 laporan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 38 laporan	100%
		Reviu Laporan Kinerja 38 laporan	Reviu Laporan Kinerja 38 laporan	100 %
		Reviu Laporan Keuangan 38 laporam	Reviu Laporan Keuangan 38 laporam	100 %
		Pengawasan Desa audit 74 desa	Pengawasan Desa audit 71 desa	96 %
		Kerja Sama Pengawasan Internal 2 kesepkatan	Kerja Sama Pengawasan Internal 2 kesepkatan	100 %
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 laporan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 laporan	100 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 6 Laporan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 6 laporan	100 %

2.1.3 PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG DI DAMPINGI

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi mempunyai indikator jumlah perangkat daerah yang didampingi

Indikator dari program ini adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Di Dampingi.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dalam melaksanakan program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi target yang direncanakan adalah 100 % , dengan rincian target kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

No	Program/kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Terlaksananya asistensi dan pendampingan pelaksanaan SPIP ke perangkat daerah 12 bulan	Terlaksananya asistensi dan pendampingan pelaksanaan SPIP ke perangkat daerah 12 bulan	100%
		Jumlahperangkat daerah yang melaksanakan PMPRB tervalidasi / terverifikasi MENPANRB 40 OPD.	Jumlahperangkat daerah yang melaksanakan PMPRB tervalidasi / terverifikasi MENPANRB40 OPD.	100%
		Jumlah unit kerja yang diusulkan menuju WBK / WBBM 5 unit kerja.	Jumlah unit kerja yang diusulkan menuju WBK / WBBM 5 unit kerja.	100%
		Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi saber pungli 12 bulan.	Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi saber pungli 12 bulan.	100%
		Terselenggaranya koordinasi MCP dan Stranas PK12 kali.	Terselenggaranya koordinasi MCP dan Stranas PK12 kali.	100%
		Jumlah sosialisasi Penegakan Integritas (Benturan Kepentingan, WBS, UPG, LHKSN) 2 kali.	Jumlah sosialisasi Penegakan Integritas (Benturan Kepentingan, WBS, UPG, LHKSN) 2 kali.	100%

Tahun 2024 Inpsektorat Daerah dapat mecapai target kinerja yang di rencanakan namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya, diantaranya:

a) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten;
b) Keterbatasan anggaran dan fasilitas;
c) Kurangnya infrastruktur teknologi informasi;
d) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat;
e) Keterbatasan kemampuan dan kapabilitas apartaur pemerintah daerah.

Untuk mengatasi kendala tersebut inspektorat melakukan

a) Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan dan diklat tehnis;
b) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;
c) Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder;
d) Meningkatkan koordinasi antar instansi.

TABEL 2.4
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH s/d TAHUN 2024 KABUPATEN PACITAN

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2024	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11
6	01	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Hasil Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**82,15**	**80,30**	**82,55**	**80,65**	**97,7%**	**82,95**	**80,05**	**96,5%**
6	01	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	**23 dok**	23 dok	23 dok	23 dok	100 %	23 dok	23 dok	100 %
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	59 dok	59 dok	59 dok	59 dok	100 %	59 dok	59 dok	100 %
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100 %	6 dok	6 dok	100 %
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	**01**	**01**	**2.06**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam kondisi baik	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2024	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11
6	01	02		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Rekomendasi Temuan Yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase perangkat daerah dan pemerintah desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material	92.5%	92.5%	92.5%	92.5%	100 %	92.5%	92.5%	100 %
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	**01**	**03**		**Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan Dan Asistensi**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	01	03.	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rumusan kebijakan pengawasan yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	01	03	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk mengetahui kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

TABEL 2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2024

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA PERHITUNGAN	TARGET INDIKATOR SASARAN						PROGRAM
			2021	2022	2023	2024	2026	2026	
Mwwujudkan Pengawasan yang profesioanl dan Akuntable	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan BPK	Jumlah penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK dan Inspektorat Provinsi / jumlah Tindak Lanjut atas temuan BPK	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	Berdasarkan Permenpanrb no.14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	83,66	84,66	85,66	86,66	87,66	88,66	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Terwujudnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP Pada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Kapabilitas APIP adalah kemampuan yang harus dimiliki APIP agar melaksanakan tugas- tugas pengawasan secara efektif	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	**Program Penyelenggaraan Pengawasan** **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Tabel 2.6 CAPAIN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2017 s/d 2024

No.	INDIKATOR SASARAN	SPM/ STANDAR NASIONAL	CAPAIAN SASARAN KINERJA							
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Nilai SAKIP sangat baik		80,15	80,55	80,95	81,35	81,75	80,30	80,36	80,05
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti		90,5%	91%	91,5%	92%	92,5%	92%	92,5%	90%
3	Persentase Perangkat Daerah Yang di dampingi		100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %

2.3 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

Matriks Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 Disusun berdasarkan hasil bimbingan teknis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2026	2026
Mewujudkan Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM perangkat daerah	83,66	84,66	85,66	86,66	87,66	88,66
	Terwujudnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik, meminimalkan kerugian daerah, dan sebagai *quality assurance*. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif terhadap unit kerja / satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Sedangkan upaya meminimalkan kerugian daerah dilakukan melalui peningkatan pengawasan / pemeriksaan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja / perangkat daerah, juga perlu adanya sinergi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Propinsi, Inspektorat Daerah Jendral Kementerian dan BPKP.

Peran baru yang diemban oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai *quality assurance* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, terutama dalam hal kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dinyatakan bahwa APIP melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dengan peran baru ini, Inspektorat Daerah lebih menjadi supervisor atau pendampingan bagi OPD.

Permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1) Dukungan sebagian pimpinan / manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai. Tanpa komitmen pimpinan agenda yang telah ditetapkan akan sulit di internalisasikan kepada seluruh pegawai. Saat ini masih banyak kepala OPD yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.
2) Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya, masih adanya kesenjangan jumlah riil auditor bersertifikasi masih terlalu kecil dibanding dengan jumlah ideal berdasar analisa jabatan, jumlah ideal menurut analisa jabatan 80 auditor, jumlah riil saat ini baru ada 25 auditor, tidak sesuai dengan beban kerja pemeriksaan dan ketugasan mandatori yang semakin banyak dari Pemerintah Pusat.
3) Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga (rekanan).
4) Kualitas SDM yang mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD kurang memadai karena mutasi kerja dari SDM yang telah menerima pelatihan / pembinaan hal SPIP dimutasi ke OPD lain , sulit untuk dapat kaderisasi karena keterbatasan personil.
5) Kendala dari segi peraturan, belum adanya peraturan tentang Mekanisme dan Prosedur Pengawasan yang terbaru untuk pencapaian sasaran peningkatan kapabilitas APIP, serta peraturan tentang Panduan Pemetaan Risiko bagi Perangkat Daerah (unit Kerja) yang terkait dengan maturitas SPIP masih dalam proses.
6) Dalam penanganan pengaduan masyarakat, permasalahan kesulitan mencari bukti audit karena sumber informasi sulit di identifikasi, hal tersebut juga menyebabkan ketugasan pemeriksaan melebihi waktu penugasan dalam surat tugas karena kondisi di lapangan.
7) Kedisplinan / ketelitian auditor dan SDM pendukung dalam pengisian format kendali mutu pada saat proses pemeriksaan/audit dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) masih perlu ditingkatkan.
8) Sarana prasarana penyimpanan arsip penting pemeriksaan masih perluditingkatkan.

Inspektorat Daerah dituntut untuk mereposisi fungsi dan perannya, sebagai tuntutan profesionalisme lembaga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa hal yang akan menjadi tantangan bagi Inspektorat Daerah adalah :

a) Pergeseran paradigma peran dan fungsi Inspektorat Daerah dari peran sekedar mencari-cari kesalahan (*watch dog*) menjadi penjamin mutu (*quality assurance*). Peran ini menuntut banyak hal yang "lebih" daripada masa sebelumnya. Selain peningkatan kualitas SDM, kinerja Inspektorat Daerah haruslah menunjukkan peran baru ini, bukan hanya sekedar menjadi 'yang ditakuti'.

b) Pengawalan akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Daerah, yang setiap tahun diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tentunya menjadi pemicu bagi Inspektorat Daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerja agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.
c) Peningkatan kapabilitas level APIP lebih baik, bahkan lebih sempurna dibanding SDM pada OPD lain. Mengingat posisi Inspektorat Daerah sebagai institusi pengawas, sehingga stigma ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk itu pengembangan diri mutlak diperlukan dan menjadi prioritas.
d) Adanya perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan pengembangan *e-government* yang menuntut peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
e) Adanya peningkatan jumlah obyek serta kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas-tugas nya ada banyak hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

a) Harus mampu mengikuti dan memahami regulasi yang sering berubah
b) Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis priorotas dan resiko
c) Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan BPKP, Inspektorat Daerah Propinsi, maupun Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga lain sehingga secara langsung dapat meningkatkan SDM Aparat Pengawasan.
d) Adanya kenaikan prosentase penyelesaian temuan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksa, sehingga dapat menambah kepercayaan dan mengembangkan diri sebagai instansi yang dipercaya obrik dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN *(clean government and good governance).*
e) Pembentukan pejabat fungsional, yang akan membawa nilai-nilai profesionalisme.
f) Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dengan waktu yang efisien melalui sistem berbasis teknologi informasi.
g) Penerapan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Pacitan yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang Inspektorat Daerah

Kabupaten Pacitan menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut dibawah ini :

a) *Good Government and Clean Governance*
   Adanya dorongan yang sangat kuat agar APIP berperan besar dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme melalui pengawasan Reformasi Birokrasi.
b) Peningkatan Kapabilitas APIP
   RPJMN 2016-2021 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level 3 dari skor Level 1 - 5. APIP dengan Level 3 (*integrated*) diharapkan telah menerapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit.
c) Pelayanan Publik
   Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pengawasan atau pemantauan secara lebih insentif terhadap unit kerja / satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan serta mendapatkan pelayanan yang optimal dari penyelenggara pemerintahan.
d) Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah Pada pelaksanaan TLHP diharapkan bagi Perangkat Daerah yang kurang datanya segera menyampaikan data setelah pemeriksaan.

TABEL 2.8
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN

	Program/ kegiatan	lokasi	Indicator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif
1	**6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN**		Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti	100	1.586.940.000,00
	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Hasil Penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	BB	1.204.300.000,00
	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan penegakan integritas	100 %	382.640.000,00
2	**6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan penegakan integritas	100 %	1.099.550.000,00
	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan penegakan integritas	100 %	1.099.550.000,00
3	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Hasil Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,37	10.605.618.791,00
	X.XX.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	9 dokumen	88.916.000,00
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	50 orang/bulan	6.960.338.759,00

	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	2.005.700.000,00
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase operasional dasar perangkat daerah terpenuhi	100 %	788.869.632,00
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %	5.903.461.887,00
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	276.161.000,00
	x.xx.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	299.153.400.00
	JUMLAH				**19.009.090.678,00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholders*.

TABEL 2.9 Program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah**		
1.1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	9 dokumen	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / Bulan	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100%	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**		**Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti**	**100%**	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Pacitan	Prosentase Pelaksanaan Program Pengawasan Tahunan	100 %	

2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pacitan	Persentase masyarakat yang diselesaikan	100%	
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**		**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi**	**100%**	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Pacitan	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi,Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	100%	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat Daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah maka Inspektorat Daerah mempunyai kewajiban untuk:

1. Melaksanakan pengawasan secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.
2. Menunjang peningkatan kinerja manajemen pemerintahan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusunlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah melalui pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah:

1. Peningkatan Kinerja Pengawasan.
2. Peningkatan Profesionalisme aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kinerja pengawasan.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan.
3. Tercapainya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

3.3. Program dan Kegiatan

A. Program

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

B. Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Kegiatan:

1) Pendampingan dan Asistensi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan tahun 2023.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak baik dari pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat diharapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara sinergis.

Pacitan,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MAHMUD, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196612261989011002

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak baik dari pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat diharapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara sinergis.

Pacitan,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MAHMUD,S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196612261989011002

RENJA 2025

DINAS PENDIDIKAN

KAB. PACITAN

KEMENDIKDASMEN RAMAH

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya kami dapat menuntaskan Renja 2026 dengan tepat waktu.

Renja merupakan rencana jangka pendek tahunan yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah. Terselesaikannya Renja Perubahan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak dan stakeholder terkait, melalui forum diskusi dan berbagai macam bentuk dukungan lainnya. Maka dari itu, Penyusun Renja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dilihat dari segi materi maupun teknik penulisannya, Renja ini masih harus terus disempurnakan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pacitan, 15 Juli 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196508061990031012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 yaitu Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja diatur dalam pasal 16 ayat 2, terdiri dari (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan rancangan awal, (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Perencanaan pembangunan di bidang pendidikan harus memperhitungkan faktor administrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, demografi, geografi, ekonomi dan sosial budaya. Selain itu dalam perencanaannya juga harus mengacu pada arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan Nasional yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas/ mutu dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan dalam memperolah layanan pendidikan, kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan Dinas Pendidikan dapat merencanakan perubahan secara proaktif terhadap perkembangan informasi yang lebih cepat, tuntutan pelayanan yang semakin beragam, kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, berkomitmen terhadap kegiatan di masa yang akan datang dan meningkatkan komunikasi antar unit kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 63 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Pacitan menyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pendidikan. Secara garis besar permasalahan pendidikan yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
2. Masih rendahnya harapan lama sekolah;
3. Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Kanak- Kanak)
4. Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai

kompetensinya;

5. Masih kurangnya kesejahteraan guru khususnya jenjang PAUD;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
7. Angka literasi dan numerasi meskipun mengalami kenaikan namun belum maksimal
8. Masih Tingginya angka Anak Tidak Sekolah

Dengan tersusunnya Rencana kerja setelah perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing kegiatan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan pendidikan dalam satu tahun kedepan yang efektif, efisien serta profesional.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026
6. Peraturan Bupati Pacitan nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 133 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Pacitan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Perubahan tahun 2026 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten

Pacitan tahun 2026 adalah sebagai bagian penyesuaian anggaran untuk mendukung target target Dinas Pendidikan Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja setelah Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan kerja PD perubahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pendidikan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Sasaran sampai dengan triwulan II , dan berbandingan dengan pencapaian sasaran tahun sebelumnya adah sebagi berikut :

Tabel 1 Sasaran Strategis PD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1	**2**	**3**	
1	Terjaminnya kualitas dan aksesbilitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	*Rata-rata Lama Sekolah*	**7,96** Tahun
		Harapan Lama sekolah	**12,71** Tahun
		Skor Literasi/Numerasi	**71,71**
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	90,00
		Nilai Sakip OPD	75.40

2.2. Evaluasi Kinerja Keuangan

Gambaran kinerja keuangan sampai dengan tri bulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN JUNI 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dinas Pendidikan	567.502.761.883	224.597.287.479	9.786.479.737	1.980.634.854
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**491.420.487.193**	**194.867.420.844**	**297.302.939**	**191.625.900**
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.974.002	25.122.625	0	0
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.308.120	19.364.875	0	0
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.147.200	0	0	0
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.518.682	5.757.750	0	0
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	489.181.790.309	194.037.450.347	0	0
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	488.995.210.709	193.948.998.422	0	0
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.359.900	72.888.425	0	0
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.219.700	15.563.500	0	0
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	271.300.870	86.446.000	0	0
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	271.300.870	86.446.000	0	0
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.278.588	169.539.000	0	0
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.173.933	0	0	0
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.918.000	26.460.000	0	0
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	161.186.655	143.079.000	0	0
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.283.436	111.918.621	0	0
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.271.450	29.547.004	0	0
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.001.986	36.678.148	0	0
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	26.339.250	0	0
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.010.000	19.354.219	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	634.010	0	297.302.939	191.625.900
1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	634.010	0	297.302.939	191.625.900
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.282.516	393.591.645	0	0
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.494.516	8.179.035	0	0
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.400.000	117.812.610	0	0
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.388.000	267.600.000	0	0
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.943.462	43.352.606	0	0
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.997.266	15.812.906	0	0
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	296.946.196	27.539.700	0	0
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**66.914.608.179**	**25.620.735.301**	**9.489.176.798**	**1.789.008.954**
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.919.907.636	12.026.102.785	8.202.970.473	1.693.877.468
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	295.000.000	56.504.610	1.343.000.000	58.028.450
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	25.000.000	25.000.000	50.000.000	0
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	200.792.463	0	0	0
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	348.710.148	113.965.263	0	0
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.495.719.853	58.284.900	0	0
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.958.029.527	11.495.160.012	5.049.970.473	1.558.589.828
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.161.000	0	0	0
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	25.000.000	25.000.000	0	0
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	21.727.203	0	0	0
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	298.000.000	202.188.000	100.000.000	6.419.655
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	53.768.041	0	0	0
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	50.000.000	50.000.000	1.475.000.000	70.839.535
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.113.999.400	0	0	0
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0	0	185.000.000	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.222.606.968	7.075.058.880	736.000.000	27.131.286
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000	160.000.000	280.000.000	7.548.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000	100.000.000	300.000.000	12.587.400
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0	100.000.000	6.995.886
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	50.000.000	0
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	155.000.000	0	0	0
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	161.443.932	87.902.000	0	0
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	506.388.300	30.199.400	6.000.000	0
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.615.100.000	6.371.361.860	0	0
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.343.820	3.434.340	0	0
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	150.000.000	0	0	0
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	47.850.749	41.509.465	0	0
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	37.480.167	20.651.815	0	0
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	200.000.000	0	0
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	60.000.000	60.000.000	0	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.273.264.900	5.431.032.826	206.965.000	0
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	670.280.000	323.120.977	0	0
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	17.593.900	0	0	0
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	227.340.000	27.980.171	0	0
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.558.235.000	4.799.938.000	15.965.000	0
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	30.715.000	3.840.000	0	0
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	108.485.000	106.651.638	0	0
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	48.860.000	0	25.000.000	0
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.000.000	0	0	0
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	80.000.000	52.111.170	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000	0	0	0
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.124.181.000	20.000.000	0	0
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	57.120.000	0	0	0
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	288.455.000	97.390.870	166.000.000	0
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.498.828.675	1.088.540.810	343.241.325	68.000.200
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	359.990.000	10.939.500	0	0
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.944.000.000	994.100.000	0	0
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.680.000	1.600.000	0	0
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	0	0	207.400.000	0
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	40.000.000	38.198.430	0	0
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	60.000.000	14.551.000	0	0
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	79.158.675	29.151.880	135.841.325	68.000.200
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**14.752.928**	**0**	**0**	**0**
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.386.228	0	0	0
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.386.228	0	0	0
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7.366.700	0	0	0
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7.366.700	0	0	0
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**9.145.950.000**	**4.109.131.334**	**0**	**0**
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.145.950.000	4.109.131.334	0	0
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.845.950.000	3.809.131.334	0	0
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	300.000.000	0	0
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**6.963.582**	**0**	**0**	**0**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.963.582	0	0	0
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.963.582	0	0	0
	Jumlah	567.502.761.883	224.597.287.479	9.786.479.737	1.980.634.854

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang- undang terhadap tugas dan fungsi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, maka visi Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah :

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global".

Misi Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Rentra Dinas Pendidikan. Penetapan tujuan dalam Rencana Rencana didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pendidikan di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
2. Masih rendahnya harapan lama sekolah;
3. Masih kurangnya ketersediaan guru PNS khususnya pada jenjang SD;
4. Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok

Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak)

5. Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai kompetensinya;
6. Masih kurangnya kesejahteraan guru khususnya jenjang PAUD;
7. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
8. Masih rendahnya tingkat literasi digital guru dan peserta didik

3.3.. Analisis Kinerja OPD

a) Program Pengelolaan Pendidikan

Akses dan dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar tetap menjadi isu strategis dengan faktor hambatan dan pendorong sebagai berikut

1) faktor pendorong
   - Tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi.
   - biaya pendidikan yang relatif terjangkau terutama untuk sekolah negeri
   - ketercukupan ruang kelas untuk menampung seluruh penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan anak usia dini
   - Meningkatnya peran serta pendidikan non formal dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap sekolah formal

2) faktor penghambat
   - Masih adanya anak putus sekolah dengan berbagai macam sebab
   - Ada ada keluhan masyarakat terhadap adanya beberapa pungutan yang dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian masyarakat
   - Belum semua akses jalan menuju sekolah dengan kondisi baik, karena kondisi geografis
   - transportasi publik terkaitan dengan akses menuju sekolah belum tersedia secara baik

b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Faktor Pendorong
   - Meningkatnya jumlah ASN dengan bertambahnya penerimaan PPPK

untuk mengatasi kekurangan guru ASN di sekolah negeri

- Meningkatnya jumlah guru pengerak dengan inisitif mandiri
- Meningkatnya jumlah guru Sertifikat
- Meningkatnya ketersediaan Dana untuk menunjang insentif guru Non PNS baik dari APBD Kabupaten maupaun APBD Propinsi

2) Faktor Penghambat

- Masih ditemukan guru indisipliner dengan berbagai macam kondisi
- Indisipliner karena tidak masuk kerja
- Indisipliner karena kasus perselingkuhan
- Indispliner karena kasus kekerasan terhadap anak
- Indisipliner karena kasus korupsi
- Indispliner karena kasus Ketidaknetralan pada Pilkades, Pileg, pilkada
- Penempatan Guru PPPK yang berulangkali mengalami perubahan menyebabkan pendistribusian guru terhambat
- Angka Literasi yang rendah karena disebabkan angka distribusi guru rendah

c) Program Pengembangan Kurikulum

1) Faktor Pendorong

- sudah dilakukan identifikasi kebutuhan kurikulum muatan lokal dengan materi kebencanaan, kebudayaan sosial

2) Faktor Penghambat

- muatan lokal belum diregulasikan dan belum di sosialisasikan
- adanya materi insersi tambahan terhadap muatan kurikulum utama yang dirasakan memberatkan bagi satuan pendidikan

d) Program Pengendalian Perijinan

1) Faktor Pendorong

- Sudah dilakukan perijinan terintergrasi dengan menggunakan OSS terintergrasi
- Semua lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sudah memiliki ijin operasional

- Ijin operasional dan pendirian terpantau minimal 2 kali dalam satu tahun dengan system pendataan dapodik

2) Faktor Penghambat

- OSS diharapkan dapat mempermudah proses perijinan lembaga swasta masih ada beberapa persyaratan yang dirasakan justru memberatkan dan mempersulit proses perijinan
- Masih ditemukan lembaga swasta yang sudah berijin namun habis masa ijinnya, namun tidak segera memperbarui perijinannya
- Perijinan yang harus terupload dalam system dapodik masih ada yang terlewatkan sehingga lembaga tidak mendapatkan bantuan operasional dari APBN

e) Program Penunjang Urusan Daerah

1) Faktor Pendorong

- Sudah tersedia SOP dan SP yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- Sudah tersedia sarana –prasarana penunjang
- Sudah tersedia petugas pelayanan dengan SK Kepala Dinas
- Sudah tersedia petugas pengaduan dengan SK kepala Dinas

2) Faktor Penghambat

- Beberapa SOP dan SP yang sudah waktunya direvisi disesuaikan
- dengan kondisi terbaru namun SOP dan SP tersebut belum dilakukan revisi
- Meskipun telah ada SOP dan SP, namun petugas belum memahami sepenuhnya, sehingga memeerlukan peningkatan kapasitas pengelola layanan dan pengelola aduan

3.4. Program dan Kegiatan Anggaran setelah Perubahan Tahun 2026

Rencana program dan kegiatan setelah Perubahan Dinas pendidikan tahun 2026 adalah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS PENDIDIKAN			**577.988.690.448**				**2.904.000.000**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**577.988.690.448**				**2.904.000.000**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**577.988.690.448**				**2.904.000.000**
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**493.303.805.448**			**-**	**1.364.000.000**
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	312.698.000			-	400.000.000
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	91.598.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
			DPA-SKPD						
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	35.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	36 Data	111.100.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000
	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	20.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000
	1.01.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	15 Substansi	20.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	491.105.954.498			-	-
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3989 Orang/bulan	490.880.954.498	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		-
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	150.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	75.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	232.082.896			-	-
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	232.082.896	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	197.795.280			-	-
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	197.795.280	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	306.850.000			-	100.000.000
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		100.000.000
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.850.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	254.298.114			-	-
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	254.298.114	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	678.640.000			-	564.000.000
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	344.400.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	319.240.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		564.000.000
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	215.486.660			-	300.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	61.036.160	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		50.000.000
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	154.450.500	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		250.000.000
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**75.354.885.000**			**-**	**1.440.000.000**
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka melanjutkan dari SD ke SLTP*	99,59%	39.550.250.000			85,67 persentase	810.000.000
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103,23%					
			Angka Partisipasi sekolah 7-12	0 persentase					
			Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	100%					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,02%					
			Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebinekaan SD Prosentase SD kondisi bangunan baik	64,46%					
			Skor Kemampuan Literasi SD	79,95%					
			Skor Kemampuan Numerasi SD	84,76%					
				77,56%					
				69,19 Nilai					
				55,09 Nilai					
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit	3.695.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		500.000.000
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	420 Paket	200.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7000 Peserta Didik	475.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	418 Satuan Pendidikan	1.032.250.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	419 Satuan Pendidikan	30.008.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		-
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	418 Orang	40.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK							
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	20.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	390.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	419 Satuan Pendidikan	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	125 Ruang	300.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	2 Ruang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	3.100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	45 Paket	140.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	20.066.650.000			-	170.000.000
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	1.100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	75 Ruang	200.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	70.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Peserta Didik	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	264.800.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		-
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	71 Satuan Pendidikan	256.750.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	71 Satuan Pendidikan	17.615.100.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		-
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72 Orang	30.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	150.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		-
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	71 Satuan Pendidikan	80.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	75 Paket	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK							
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	13.112.381.000			-	230.000.000
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	1.250.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD		-
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD							
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	85.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Peserta Didik	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	840 Satuan Pendidikan	215.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	810 Satuan Pendidikan	9.574.200.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD		-
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	810 Orang	32.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	350.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK							
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	20 Paket	81.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB		-
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik							
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta didik	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	10.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD		-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD							
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	200 Paket	1.040.181.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	810 Satuan Pendidikan	85.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	190.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.625.604.000			-	230.000.000
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Peserta Didik	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	1.944.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		-
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40 Orang	17.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		150.000.000
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
				Komunitas					
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK							
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	100 Paket	414.604.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB		-
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik							
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1000 Peserta Didik	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**	**-**	**150.000.000**			**-**	**100.000.000**
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	50.000.000			-	50.000.000
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			0	1 0	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar							
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		50.000.000
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	100.000.000			-	50.000.000
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		50.000.000
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**	**9.174.000.000**			**-**	**-**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	9.174.000.000			-	-
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	8.874.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		-
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**6.000.000**			**-**	**-**
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	6.000.000			-	-
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		-
	J U M L A H				**577.988.690.448**				**2.904.000.000**

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Rencana Kerja Setelah Perubahan Dinas pendidikan kabupaten Pacitan tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sebelum perubahan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196508061990031012

Lampiran

- Capaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi Simolek

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
101	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**73.00**	**491.943.510.572,00**	**0.00**	**195.047.422.042,00**	**0%**	**39.65%**
101	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**58.00**	**300.000.000,00**	**60.00**	**25.122.625,00**	**103.45%**	**8.37%**
101	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	24.00	140.000.000,00	36.00	19.364.875,00	150%	13.83%
			0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8.00	10.000.000,00	14.00	0,00	175%	0%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	26.00	150.000.000,00	29.00	5.757.750,00	111.54%	3.84%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											145,51	5,89
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
101	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**laporan**	**5.00**	**489.195.210.709,00**	**2.00**	**194.054.150.645,00**	**40%**	**39.67%**
101	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	3993	488.995.210.709,00	7986.00	193.965.698.720,00	200%	39.67%
			0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2.00	150.000.000,00	2.00	72.888.425,00	100%	48.59%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12.00	50.000.000,00	7.00	15.563.500,00	58.33%	31.13%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											119,44	39,80
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
101	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**%**	**100.00**	**300.000.000,00**	**80.00**	**86.446.000,00**	**80%**	**28.82%**
101	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4.00	300.000.000,00	1.00	86.446.000,00	25%	28.82%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	28,82
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**271.938.000,00**	**80.00**	**169.539.000,00**	**80%**	**62.34%**
101	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2.00	26.938.000,00	3.00	26.460.000,00	150%	98.23%
			0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	kegiatan	1.00	10.000.000,00	2.00	0,00	200%	0%
			0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	1.00	235.000.000,00	1.00	143.079.000,00	100%	60.88%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											150,00	53,04
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Rendah
101	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**400.000.000,00**	**80.00**	**111.918.621,00**	**80%**	**27.98%**
101	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	100.000.000,00	1.00	29.547.004,00	20%	29.55%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12.00	100.000.000,00	5.00	36.678.148,00	41.67%	36.68%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	50.000.000,00	4.00	26.339.250,00	100%	52.68%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	laporan	12	150.000.000,00	5.00	19.354.219,00	41.67%	12.9%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				SKPD	Konsultasi SKPD							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,84	32,95
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
1 01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**297.961.863,00**	**80.00**	**163.300.900,00**	**80%**	**54.81 %**
1 01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	4	297.961.863,00	0.00	163.300.900,00	0%	54.81 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	54,81
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
1 01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**938.400.000,00**	**120.00**	**393.591.645,00**	**120%**	**41.94 %**
1 01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	unit	21.00	30.000.000,00	4.00	8.179.035,00	19.05 %	27.26 %
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	344.400.000,00	5.00	117.812.610,00	41.67 %	34.21 %
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	564.000.000,00	5.00	267.600.000,00	41.67 %	47.45 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											34,13	36,31
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
1 01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80**	**240.000.000,00**	**160.00**	**43.352.606,00**	**200%**	**18.06 %**
1 01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4.00	40.000.000,00	2.00	15.812.906,00	50%	39.53 %
			000	Pemeliharaan Aset	Jumlah aset tetap lainnya	paket	4.00	200.000.000,00	0.00	27.539.700,00	0%	13.77

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7	Tetap Lainnya								%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	26,65
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/MTS**	**Prosentase**	**89.00**	**86.910.486.787,00**	**0.00**	**2.190.594.555,00**	**0%**	**2.52 %**
					APM PAUD	**Prosentase**	**79.60**		**0.00**		**0%**	
					APM SD/MI	**Prosentase**	**85.42**		**0.00**		**0%**	
101	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**Prosentase**	**99.25**	**50.243.304.450,00**	**0.00**	**666.230.413,00**	**0%**	**1.33 %**
101	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	paket	8	1.538.000.000,00	16.00	114.533.060,00	200%	7.45%
			0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	paket	3.00	75.000.000,00	6.00	25.000.000,00	200%	33.33 %
			0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	jenis lomba	100.00	450.000.000,00	185.00	113.965.263,00	185%	25.33 %
			0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	kegiatan	418	1.012.250.000,00	836.00	58.284.900,00	200%	5.76%
			0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	lembaga	418.00	30.008.000.000,00	836.00	0,00	200%	0%
			0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	lembaga	418	50.000.000,00	836.00	0,00	200%	0%
			0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang Kelas Baru yang dibangun	paket	10.00	1.013.760.000,00	20.00	208.607.655,00	200%	20.58 %
			0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				877.620.000,00		0,00	0%	0%
			0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar Bagi Peserta Didik	kegiatan	100.00	165.000.000,00	200.00	0,00	200%	0%
			0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	10.00	11.448.674.450,00	20.00	120.839.535,00	200%	1.06%
			001	Pengadaan	Jumlah Perlengkapan	paket	250.0	251.000.000,00	500.0	0,00	200%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6	Perlengkapan Sekolah	sekolah		0		0			
			0042	Penyediaan infrastruktur TIK	jumlah Intrastruktur TIK yang tersedia	paket	1.00	25.000.000,00	2.00	25.000.000,00	200%	100%
			0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Laporan layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	kegiatan	1.00	30.000.000,00	2.00	0,00	200%	0%
			0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapat Bantuan	siswa	500.00	3.114.000.000,00	1000.00	0,00	200%	0%
			0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa tersedia	paket	100.00	185.000.000,00	200.00	0,00	200%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											174,06	12,90
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
101	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**		**99**	**20.002.750.300,00**	**198.00**	**730.828.306,00**	**200%**	**3.65 %**
			0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	paket	4.00	340.000.000,00	8.00	167.548.000,00	200%	49.28 %
			0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	paket	4.00	400.000.000,00	8.00	112.587.400,00	200%	28.15 %
			0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	1.00	50.000.000,00	2.00	0,00	200%	0%
			0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	1500.00	200.000.000,00	3000.00	87.902.000,00	200%	43.95 %
			0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	71.00	226.050.300,00	142.00	30.199.400,00	200%	13.36 %
			0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	71.00	17.615.100.000,00	142.00	0,00	200%	0%
			0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	71.00	38.000.000,00	142.00	3.434.340,00	200%	9.04%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pertama								
			0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah	paket	620.00	50.000.000,00	1240.00	0,00	200%	0%
			0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah sekolah Menerima Pelatihan Aplikasi PPDB	Satuan Pendidikan	50.00	150.000.000,00	100.00	0,00	200%	0%
			0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Dokumen PEmberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Dokumen	4.00	30.000.000,00	0.00	41.509.465,00	0%	138.36%
			0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah Melaksanakan ANBK	Satuan Pendidikan	71.00	50.000.000,00	0.00	20.651.815,00	0%	41.3%
			0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	paket	2.00	793.600.000,00	4.00	200.000.000,00	200%	25.2%
			0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikdan Peraga Peserta didik tersedia	paket	1.00	60.000.000,00	0.00	60.000.000,00	0%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											164,71	34,51
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
101	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**%**	**87**	**13.573.032.037,00**	**174.00**	**631.094.826,00**	**200%**	**4.65%**
101	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	paket	66.00	656.000.000,00	0.00	323.120.977,00	0%	49.26%
			0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	paket	1.00	89.119.900,00	0.00	0,00	0%	0%
			0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	lembaga	868.00	9.574.200.000,00	1736.00	0,00	200%	0%
			0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	806.00	40.000.000,00	1612.00	3.840.000,00	200%	9.6%
			0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun	paket	100.00	1.302.800.000,00	0.00	106.651.638,00	0%	8.19%
			0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	1.00	5.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0031	Penyediaan infrastruktur TIK	jumlah Tersedianya infrastruktur TIK	paket	100.00	50.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	pak	1000.00	80.000.000,00	0.00	52.111.170,00	0%	65.14 %
			0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket	100.00	50.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	paket	23	1.110.000.000,00	0.00	20.000.000,00	0%	1.8%
			0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Satuan Pendidikan	501	60.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	100.00	295.912.137,00	0.00	97.390.870,00	0%	32.91 %
			0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dokumen	4.00	260.000.000,00	0.00	27.980.171,00	0%	10.76 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											30,77	13,67
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**		**95**	**3.091.400.000,00**	**190.00**	**162.441.010,00**	**200%**	**5.25 %**
			0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	lembaga	19.00	645.000.000,00	0.00	10.939.500,00	0%	1.7%
			0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	lembaga	19	1.944.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	orang	40.00	20.000.000,00	0.00	1.600.000,00	0%	8%
			0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	500.00	50.000.000,00	0.00	38.198.430,00	0%	76.4%
			0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik	621.00	75.000.000,00	0.00	14.551.000,00	0%	19.4%
			0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah Penyediaan infrastruktur TIK	paket	10.00	207.400.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			005	Pembangunan	Jumlah Pembangunan	paket	1.00	150.000.000,00	0.00	97.152.080,00	0%	64.77

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal							%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	24,32
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Prosentase Muatan Lokal PAUD yang tersusun Kurikulumnya**	**Prosentase**	**100.00**	**20.000.000,00**	**60.00**	**0,00**	**60%**	**0%**
					Prosentase Muatan Lokal Sekolah Dasar yang tersusun Kurikulumnya	**Prosentase**	**100.00**		**0.00**		**0%**	
101	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun sesuai standar**		**1**	**10.000.000,00**	**2.00**	**0,00**	**200%**	**0%**
101	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	kegiatan	1	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang disusun sesuai sandart**	**dokumen**	**3.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
101	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	1	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik**	**Prosentase**	**56.30**	**8.849.800.000,00**	**0.00**	**5.737.831.334,00**	**0%**	**64.84%**
101	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan**	**Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV**	**%**	**85.00**	**8.849.800.000,00**	**0.00**	**5.737.831.334,00**	**0%**	**64.84%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
101	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	dokumen	2	8.549.800.000,00	0.00	5.437.831.334,00	0%	63.6%
					Jumlah Penerima Insentif GTT	orang	507.00		0.00		0%	
					Jumlah Penerima Insentif Tutor	orang	377.00		0.00		0%	
					Jumlah Penerima Insentif PTT	orang	60.00		0.00		0%	
					Jumlah Penerima Insentif PAUD	orang	1320.00		0.00		0%	
			0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	dokumen	2	300.000.000,00	0.00	300.000.000,00	0%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	81,80
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	64,84
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Rendah
101	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase lembaga pendidikan yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan**	**Prosentase**	**100**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
101	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah ijin PAUD dan PNF yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan**	**lembaga**	**814.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
101	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh	Dokumen	1.00	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Masyarakat							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											7,50	14,01
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total								**587.733.797.359,00**		**202.975.847.931,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**34.54%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

Pacitan, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199003 1 012

RENCANA KINERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN
JL. SASUIT TUBUN NO.01 PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, maka dapat diselesaikan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya (target) serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2026 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Semoga Rencana Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN

dr. DARU MUSTIKOAJI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730628 200604 1 005

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata pengantar			i
Daftar Isi			ii
BAB I	Pendahuluan		1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Landasan Hukum	4
	C.	Maksud dan Tujuan	7
	D.	Sistematika Penulisan	7
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu		
	A.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
	B.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan	12
	C.	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	33
	D.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	37
	E.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
	F.	Penelaahan Unsur Program dan Kegiatan Masyarakat	138
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan		141
	A.	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	141
	B.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	143
	C.	Program dan Kegiatan	145
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		148
BAB V	Penutup		211

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran Negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat serta ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan Kabupaten Pacitan Sehat dan Mandiri dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupten Pacitan sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan sedang aplikasi kegiatannya dituangkan dalam rencana kinerja tahunan.

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2026 dibuat dalam rangka mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kerangka dan kebijakan anggaran yang menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2026 penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Sedangkan Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2021-2026.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dirumuskan dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2026.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

Pada tahun 2026 Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan juga harus mengakomodir program Nasional Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dana dari kapitasi BPJS.

2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
22. Perda No 09 Tahun 2021 Salinan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

24. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2026.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ini bertujuan :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2026.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2026.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 mengacu pada Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Perubahan **dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

A. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati Pacitan dalam melaksanakan urusan kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat.
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit.
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan Kesehatan;

d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sumber daya kesehatan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 135 Tahun 2021 terdiri dari :

a. Sekretariat;
    1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
    2) Kelompok Jabatan Fungsional
b. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. UOBK Dinas
    1) RSUD
g. UPT Dinas
    1) UPT Laboratorium Kesehatan
    2) UPT Gudang Farmasi
    3) UPT Puskesmas

Dinas Kesehatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit;
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pegawai yang merupakan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mempunyai peran sangat vital dalam organisasi. Susunan Pegawai kondisi sampai Januari 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terdiri dari 1 (satu) jabatan kepala dinas (pejabat eselon II.b) sudah terisi, 1 (satu) sekretaris (pejabat eselon III.a) belum terisi, 4 (Empat) kepala bidang (eselon III.b) sudah

terisi 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) kepala sub bagian (eselon IV.a). Jabatan struktural UOBK adalah Direktur RSUD (Pejabat eselon III.a) sedang jabatan struktural UPT terdiri dari dua puluh enam (26) jabatan kepala UPT (eselon IV.a) terisi 2 kepala UPT yaitu 1 Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan 1 Kepala UPT GFK. Jumlah karyawan keseluruhan 1492 orang, terdiri dari ASN sebanyak 1242 orang dan Non ASN 250 orang.

B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan perkiraan pelaksanaan DPA-Dinas Kesehatan tahun berjalan yang baru disahkan. Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melabihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Table II. 1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Rasio pencapaian (%)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
						Target Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024	Realisasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024	Target realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Hasil nilai evaluasi SAKIP PD	80.00	78.65	98.31%	80.00	80.00	100	80.1	76.35	76
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	100.00	100%	100	100	100	100	100	100
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7	7.00	100%	7	7	100	10	10	100
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.00	100%	1	1	100	3	3	100
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2.00	100%	2	2	100			
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	1.00	100%	1	1	100			
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.00	100%	2	2	100	3	3	100
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13.00	100%	13	13	100	28	28	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100.00	100%	100.00	100	100	100	100	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	934.00	928.00	99.36%	928.00	934.00	100	1200	1200	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24.00	24.00	100%	24.00	24.00	100	24	24	100
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				84	84	100	12	12	100
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84	84	100%	12	12	100	1500	1500	100
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%	3	3	100	6	6	100
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3	100%	4	4	100	3	3	100
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	4	100%	64.00	64.00	100	4	4	100
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	72	100%	72	72	100	144	144	100
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	100	100	100	100	100	100
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	6	100%	6	6	100	24	24	100
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	100	100	100	100	100	100
1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	60	100%	12	12	100	48	48	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	100	100%	100	100	100	100	100	100
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100%	12	12	100	2	2	100
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	920	1876	203.91%	920	920	100	124	124	100
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100	1	1	100
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100%	2	2	100	2	2	100
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3	100%	3	3	100	2	2	100
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	100%	5	5	100	1	1	100
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	47	156.67%	30	30	100	100	100	100
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah item Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	100%	3	3	100	138	138	100
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi dalam Kondisi Baik	6	6	100%	0	0	100	19	19	100
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Dinkes	1	1	100%	1	1	100	0	0	100
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aktifitas/Operasional Rutin yang dikelola Perangkat Daerah	100	100	100	100.00	100.00	100	100	100	100
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	100	36	36	100	36	36	100
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	13	13	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	80.00	80.00	100%	80.00	80.00	100	80	80	100
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1.00	100%	1	1	100	59	59	100
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Aktifitas/Operasional Rutin yang dikelola Perangkat Daerah	11.00	11.00	100%	13	13	100			100
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	60.00	105.26%	57	57	100	78	78	100
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.00	100%	1	1	100	1	1	100
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		40.00	40.00	100	40.00	40.00	100	40	40	100
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (24 Puskesmas dan RSUD)	40.00	40.00	100	40.00	40.00	100	25	25	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan pelayanan kesehatan UKP dan UKM sesuai standar	80	80	100	80	80	100	96	96	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar	64	67,85	106,02	65	65	100	84	84	100
		Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar							89	89	100
		Persentase Sarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar							68	68	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01.02	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4	4	100	8	8	100
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2	2	100	1	1	100
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit (RSUD)										
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas(Dinas Kesehatan)										
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12	12	100	7	7	100	19	19	100
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1	1	100	12	12	100
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	4	100						
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40	40	100						
1.02.01.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center							12	12	100
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah pengadaaan Obat, Vaksin	100	100	100	24	24	100			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan HabisPakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	50	50	100						
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg dipelihara							0	0	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipelihara							0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27	27	100	26	26	100	55	55	100
1.02.02.2.01.0022	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangk	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang							1	1	100
102.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	24	24	100	24	24	100	24	24	100
102.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	288	288	100	288	288	100	288	288	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				89,50	92,67	103,54	90.5	100	110,5
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar				86,50	94,52	109,27	87.5	100	114,29
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar				89,50	97,81	109,28	90.5	100	110,50
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar				89,50	94,76	105,88	90.5	100	110,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100	100		100	100	100
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				73	87,40	119,73	76	100	131,58
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				70	85,85	122,64	72	100	138,89
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50,50	99,21	196,46	51	100	196,08
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				78	92,45	118,53	80	100	125,00
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				88	108	122,73	89	100	112,36
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				100	85,21	85,21	100	100	100
		Persentase orang dengan resiko Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				78	75,94	97,36	81	100	123,46
		Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar				100	94,80	94,80	100	100	100
		Persentase kunjungan /visit rate				82	99,07	120,82	83	83	100
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuHamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	6678	5406	80,95	6754	6258	92,67	6513	6513	100
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuBersalin	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	6375	5.280	82,69	6375	6025	94,52	6217	6217	100
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	6071	5217	85,93	6071	5938	97,81	5921	5921	100
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan	31301	28.968	92,54	31301	29405	94,76	30545	30545	100
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	60493	64.233	106,12	61297	61297	100%	59357	59357	100
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produkitif mendapat pelayanan kesehatan	334653	259221	77,46	329818	283149	87,40	299279	299279	100
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaLanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	130360	107131	86,05	126530	110587	85,85	137911	137911	100
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	8325	4572	54,92	181238	179806	99,21	35075	35075	100
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DiabetesMelitus	Jumlah penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan	375	354	94,4	7635	7059	92,45	7320	7320	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan JiwaBerat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	45	43	95,56	1061	1061	100	920	920	100
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	5154	5467	106,07	5217	4445	85,21	1920	1920	100
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	6710	6667	99,36	6835	5190	75,94	6437	6437	100
1.02.01.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kegiatan penanganan KLB									
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	100	12	12	100	2	2	100
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	13	108,33	12	12	100	1	1	100
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan KesehatanLingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	8	133,33	12	12	100	1	1	100
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	2	200	12	12	100	5	5	100
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan KesehatanTradisional, Akupuntur,Asuhan Mandiri,dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	12	100	12	12	100	12	12	100
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan SurveilansKesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	100	12	12	100	24	24	100
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa(ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	0	0				100	100	100
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan napza				10	10	100	0	0	100
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	100	12	12	100	12	12	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	100	12	12	100	12	12	100
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) **ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan**				10	10	100	24	24	100
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7	91	1300	9	9	100	9	9	100
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)		1	1	100	1	1	100	1	1	100
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		1	24	100	12	12	100	24	24	100
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	73	73	100	12	12	100	2	2	100
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan reakreditasi	24	14	100				0	0	100
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							24	24	100
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	1	100	12	12	100	24	24	100
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	100	1	1	100	1	1	100
1.02.02.2.02.38	pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah kelurga yg sudah dikunjungi dan diinvertensi masalah kesehatanya oleh tenaga kesehatan puskesmas				600	600	100	600	600	100
102.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sesuai standard	24	24	100	12	12	100	0	0	0
1,02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1179	0	0	1079	1079	100	60	60	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0	0	0	1	12	100
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12	12	100	1	24	100
102.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				0	0	0	1	9	100
102.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				0	0	0	12	1	100
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen data kesehatan	75.00	57,14	76,19	75.00	75.00	100	80	24	100
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah dokumen data kesehatan	6.00	6	100					2	100
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah sasaran pengembangan informasi kesehatan	12	12	100	12	12	100	12	0	100
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin sarana kesehatan yang dikeluarkan	60	100	166,67	65	65	100	66	24	100
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi ijin sarana kesehatan yang dikeluarkan	26	26	100	26	26	100	24	24	100
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan FasilitasKesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yg Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	24	24	100	24	24	100	30	1	100
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	75	100	133,33	100	100	100	100	600	100
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio dokter per satuan penduduk	0.28	0,28	100	0.20	0.20	100	0.21	0	0
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah ijin tenaga kesehatan yang diterbitkan	1	1	100	1	1	100	0	60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1	1	100	4	4	100
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	75.00	100	133,33	77	77	100	79	79	100
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuaiStandar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1330	1330	100	900	900	100	200	200	100
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi	75.00	75	100	75.00	75.00	100	77	77	100
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	79	79	200	200	100	200	200	100
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan industri rumah tangga pangan yang sesuai standar kesehatan	75	100	133,33	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dibina	72.00	42	58,33	74.00	74.00	100	78	78	100
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				38	38	100	10	10	100
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah apotek,toko obat,toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dibina	40.00	45	112,5	0	0	0	0	0	100
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan NomorP-IRTsebagai Izin Produksi,untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ijin produksi IRTP yang dilakukan pengawasan	75.00	53	70,67	77.00	77.00	100	79	79	100
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yg dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	314.00	335	106,69	1	1	100	225	225	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk IRTP yang diperiksa	75	62	82,67	77	77	100	79	79	100
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	128.00	130	101,56	150	150	100	48	48	100
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**P**ersentase UKBM berstrata PURI	70	88,15	125,93	88,25	88,25	100	80	80	100
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat	75.00	56	74,67	75.00	75.00	100	80	80	100
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	13	108,33	12.00	12.00	100	5	5	100
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya media promosi kesehatan	75.00	53	70,67	75.00	75.00	100	80	80	100
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	100	12	12	100	4	4	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	75.00	41	54,67	75.00	75.00	100	80	90	100
1.02.05.2.03.01	BimbinganTeknis dan Supervisi Pengembangan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	2	200	12	12	100	3	3	100

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN

dr. DARU MUSTIKOAJI
Pembina Tk I
NIP. 19730628 200604 1 005

Berdasarkan matrik diatas sampai tahun 2025 Dinas Kesehatan melaksanakan 5 program dari 5 program yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama periode Renstra 2021 – 2026. Dalam perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 dilakukan Review Renstra kedua yang berdampak pada berubahnya Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.

1. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Realisasi program didasarkan pada capaian kinerja tahun 2024. Program yang telah memenuhi target antara lain :

   1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
      1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
      5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
      1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
      2) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
   1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
   1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
   3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   4) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
   5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
   1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. **Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 92,67%

Pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target dikarenakan terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilan setelah trimester 1 sehingga pelayanan belum memenuhi standar. Pencatatan dan pelaporan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di luar wilayah perlu ditigkatkan. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan sosialisasi dan eduksi kepada Masyarakat dan meningkatkan dukungan kebijakan di Tingkat wilayah dan pencatatan sasaran di wilayah.

2) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 94,52%

Sub kegiatan tersebut belum mencapai target dikarenakan masih adanya ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan antenatal lengkap kecuali itu sasaran menggunakan proyeksi ibu bersalin

sehingga belum sesuai dengan kondisi real di lapangan . Upaya yang telah dilakukan adalah dengan Meningkatkan kualitas pelayanan persalinan dan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan melalui kerjasama dengan jejaring, fasilitas kesehatan swasta dan fasilitas kesehatan luar daerah.

3) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 97,81%

   Sub kegiatan tersebut belum mencapai target dikarenakan Masih ada kematian neonatal sebelum mendapatkan kunjungan ke 3 kali, terutama Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) karena prematur dengan penyakit penyerta. Sehingga sasaran tidak tercapai. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemantauan ibu dan bayi baru lahir, meningkatkan ketrampilan petugas melalui pelatihan dan melakukan monitoring evaluasi secara rutin.

4) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Balita dengan capaian 94,76%

   Sub kegiatan belum mencapai target dikarenakan kurangnya pemahaman tenaga tentang definisi operasional pelayanan kesehatan balita, mobilitas penduduk yang tinggi, perbedaan sasaran real dan proyeksi serta belum optimalnya jejaring . Upaya yang dilakukan antara lain melakukan monev dan pembinaan Puskesmas tentang definisi operasional pelayanan kesehatan balita dan pencatatan serta pelaporan, mengoptimalkan kerjasama dengan jaringan dan jejaring Puskesmas, dan mengoptimalkan peran serta lintas sektor.

5) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Usia Produktif dengan capaian 87,40%

Sub kegiatan belum mencapai target dikarenakan kurangnya ketertiban petugas dalam pencatatan dan pelaporan, terdapat data yang tidak sesuai antara manual dengan data pada aplikasi ASIK, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan dan deteksi dini dan Kurangnya kerjasama dengan jejaring dan linsek di wilayah kerja Puskesmas. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembinaan dan sinkronisasi pencatatan dan pelaporan Puskesmas, Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan Masyarakat, meningkatkan inovasi terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan misalnya dengan Pemeriksaan kesehatan gratis mobile, jemput bola ke instansi pemerintah, tempat kerja, Ormas, Perkumpulan di tingkat RT,RW Desa maupun kecamatan, melakukan advokasi kepada lintas sektor dan mengintregasikan program dalam lingkup dinas kesehatan dan Puskesmas sehingga kegiatan berjalan efisien dan optimal.

6) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Usia Lanjut dengan capaian 85,85%

Sub kegiatan ini belum mencapai target dikarenakan data sasaran dibeberapa daerah masih menggunakan data proyeksi sehingga terdapat perbedaan dengan jumlah lansia yang ada di lapangan, kesadaran masyarakat yang masih rendah dan terbatasnya akses dan kemampuan lansia untuk mencapai fasilitas kesehatan. Upaya yang dilakukan antara lain bekerjasama dengan kader untuk mencari

sasaran lansia yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan, penguatan koordinasi dengan linsek dan meningkatkan keterlibatan linsek untuk mendukung program kesehatan dan melakukan jemput bola dengan membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis mobile.

7) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan hipertensi dengan capaian 99,21%

Sub kegiatan belum tercapai dikarenakan angka Proyeksi penderita hipertensi cukup tinggi, Penderita hipertensi belum maksimal melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan secara standar. Optimalisasi skrining, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pemeriksaan Hipertensi telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan baik melalui ILP maupun melalui kegiatan penyuluhan dalam dan luar Gedung lainnya. Kegiatan Prolanis juga dilakukan dalam upaya Mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator75% peserta terdaftar yang berkunjung ke FaskesTingkat Pertama memiliki hasil "baik" pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit Hipertensi sesuai Panduan Klinis terkait sehinggadapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit.

8) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan penderita Diabetes Melitus dengan capaian 92,45%.

Sub Kegiatan belum tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran Penderita Diabetes Melitus untuk melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan dalam rangka mendapatkan layanan kesehatan secara

standar. Optimalisasi skrining, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pemeriksaan Diabetes Melitus telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan baik melalui ILP maupun melalui kegiatan penyuluhan dalam dan luar Gedung lainnya. Kegiatan Prolanis juga dilakukan dalam upaya Mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal.

9) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis capaian 85,21%

Sub kegiatan belum tercapai dikarenakan proyeksi orang terduga tuberkulosis lebih tinggi dibandingkan dengan real. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan di awal tahun dan meningkatkan skrining pada kelompok berisiko dengan melibatkan lintas program, Puskesmas jaringan dan jejaringnya.

10) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV dengan capaian 75,94%

Sub kegiatan belum tercapai dikarenakan ketidaksesuaian data manual dan di aplikasi, belum semua faskes swasta melakukan screening terhadap ibu hamil dan kelompok berisiko dan melakukan pelaporan dan pencatatan, kurangnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan skrining HIV pada kelompok berisiko. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan monev dan pembinaan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan koordinasi dengan linsek terkait pemeriksaan pada kelompok berisiko

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan capaian 75%

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target adalah Pengelolaan sistem informasi kesehatan masih belum optimal dikarenakan jaringan internet di Puskesmas tidak stabil dan Pengelolaan sistem informasi kesehatan masih belum optimal dikarenakan jaringan internet di Puskesmas tidak stabil. Upaya yang telah dilakukan adalah Pengoptimalan data satu sehat dan memaksimalkan monev terhadap laporan Puskesmas. Pengoptimalan jaringan internet Puskesmas lebih ditingkatkan sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi dapat berjalan dengan

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan capaian 86,84%

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah Belum semua apoteker memberikan pelayanan informasi obat (PIO) kepada pasien/ konsumen. Upaya yang dilakukan adalah dengan Memberikan KIE kepada apoteker tentang manfaat dan pentingnya PIO kepada pasien/ konsumen.

lintas sektor belum maksimal dan peran Masyarakat belum berperan aktif dalam mendukung UKBM.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**.
   a. Perencanaan yang kurang matang dalam menyusun rencana kerja yang ditetapkan sehingga target kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan.
   b. Adanya kasus yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Seperti angka kematian ibu, bayi, balita dan Timbulnya wabah/penyakit.
5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.**
   a. Target yang telah tercapai membawa dampak positif terhadap capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
   b. Target yang belum tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan.
6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**
   a. Meningkatkan Koordinasi dan pemahaman terhadap program yang dilaksanakan sehingga program yang ada sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Dalam bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026. Uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah "Terjaminnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat". Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Angka Harapan hidup. Matrik

Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.2 Tabel Sasaran, Indikator Kinerja,Target Capaian dan Capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Terjaminnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,78	74,74	99,94
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	83,86	86,05	102,61

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan tahun 2024 berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan BPS Kabupaten Pacitan adalah 74,74. Selama periode 2020 hingga 2024 AHH Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 AHH ini mengalami peningkatan 0,16 dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Harapan hidup saat lahir diartikan sebagai perkiraan rata-rata tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung salah satunya adalah angka kematian bayi, angka kematian ibu dan persalinan di fasilitas tenaga Kesehatan. Jika jumlah kematian bayi dan ibu di suatu wilayah tinggi maka Angka Harapan Hidup di Daerah tersebut rendah begitu pula sebaliknya.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud

adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka Harapan Hidup ditetapkan oleh BPS dengan berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara beratahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung salah satunya adalah angka kematian bayi, angka kematian ibu dan persalinan di fasilitas tenaga Kesehatan. Jika jumlah kematian bayi dan ibu di suatu wilayah tinggi maka Angka Harapan Hidup di Daerah tersebut rendah begitu pula sebaliknya. Hal inilah menjadi salah satu penyebab angka harapan hidup belum sesuai dengan target yang diharapkan.

AHH kabupaten pacitan belum mencapai target dikarenakan dipengaruhi oleh peningkatan angka kematian bayi dan terdapat kematian ibu. Angka kematian ibu pada tahun 2024 mengalami trend penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya sebanyak 2 kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan tercapai 100% yang artinya semua ibu bersalin ditangani oleh tenaga Kesehatan di fasilitas tenaga Kesehatan. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pacitan dilaporkan sebanyak 51 kematian bayi. Trend angka kematian bayi Menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 55 bayi namun meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 49 bayi. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan AHH antara lain dengan meningkatkan akses dan kualitas Kesehatan sesuai standar, pemberian jaminan Kesehatan untuk Masyarakat miskin, meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan gizi balita dan anak, Meningkatkan

fasilitas pelayanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan obat obatan dan Menggiatkan kampanye PHBS dan GERMAS.

Pencapaian angka harapan hidup yang lebih tinggi memerlukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup antara lain dengan menurunkan angka kematian bayi, menurunkan perkawinan usia remaja, meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI selama 2 tahun, Persalinan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan, Pemanfaatan fasilitas Kesehatan, Meningkatkan kualitas pelayanan, Peningkatan Jamban sehat, Peningkatan cakupan Imunisasi Bayi dan balita, Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan dan tidak ada angka kematian ibu.

Nilai indeks kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan pada tahun 2024 adalah 86,05 dengan capaian 102,61%. Nilai IKM dinas Kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,01. Peningkatan Nilai indeks kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Baik dari persyaratan, system mekanisme/prosedur, biaya/tarif yang dibebankan,spesifikasi produk yang ditawarkan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penaganan pengaduan saran dan masukan dan sarana prasana sesuai dengan harapan penerima layanan.

D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Kesehatan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustanable Developmnet Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah :

1. Pada tahun 2024 total penyerapan belanja langsung Dinas Kesehatan dari APBD Kabupaten baru mencapai 96,77%, dari total APBD Kabupaten Pacitan.
2. Di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 jumlah dokter umum baik pemerintah maupun swasta tercatat sebanyak 110 orang, sedangkan jumlah penduduk adalah 588.569 jiwa sehingga rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,18. Atau rasio 1 orang dokter melayani 5.350 penduduk. Jumlah dokter gigi sebanyak 25 orang dengan rasio dokter gigi 0,042 atau 1 dokter gigi melayani 23.542 penduduk dan jumlah dokter spesialis tercatat sebanyak 32 atau 0,054 atau 1 dokter malayani 18.392 penduduk. Sedangkan standar nasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang dokter spesialis melayani 16.000 penduduk dan 1 orang dokter umum melayani 2.500 penduduk, sedangkan 1 orang dokter gigi melayani 9.000 penduduk. Secara umum jumlah tenaga medis di Kabupaten Pacitan sampai tahun 2023 masih kurang sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan adalah mengusulkan penambahan formasi tenaga dokter baik dokter umum maupun dokter gigi kepada Badan Kepegawaian Daerah.
3. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara substansi sangat baik namun dalam pelaksanaan masih ada kesulitan di tingkat Puskesmas maupun Dinas Kesehatan dalam kaitan penganggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangannya. Selain itu pelaksanaan Program JKN masih kurang promosi, masyarakat yang mendaftar secara mandiri sebagai peserta BPJS Kesehatan belum maksimal hal tersebut mempengaruhi ketercapaian UHC di Kabupaten Pacitan.

4. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi tahun 2024 mencapai 7,44% menurun dibandingakn tahun 2023 dengan capaian 9,05% Terjadinya kematian bayi menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi ibu. Peningkatan kematian bayi terjadi karena BBLR (berat bayi lahir rendah) disebabkan antara lain:
    1. Status gizi ibu bayi sebelum hamil
    2. Berat badan ibu bayi saat sedang hamil
    3. Usia Ibu saat sedang hamil
    4. Jarak waktu melahirkan anak
    5. Kondisi kesehatan ibu meliputi anemia, riwayat keguguran dan melahirkan BBLR, penyakit infeksi, komplikasi kehamilan dan pregnancy blues.
5. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting menentukan angka harapan hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Capaian AKI Kabupaten Pacitan Tahun 2024 yaitu 29,16% meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu 98,83%. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kehamilan dan melahirkan. Kematian ibu di Kabupaten Pacitan antara lain disebabkan oleh beberapa factor antara lain akses pelayanan Kesehatan, perilaku, penyebab kematian langsung dan penyebab kematian tidak langsung dan determinan proksi yang meliputi pelayanan Kesehatan masternal, akses ke pelayanan Kesehatan maternal,Tingkat Pendidikan dan ekonomi, Tingkat Pendidikan ibu, Cakupan ANC, Cakupan PNC, jarak kelahiran, paritas, usia ibu, dan kondisi Kesehatan ibu.

Balita stunting masih menjadi masalah di Masyarakat. *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Pacitan sebesar 22,7% dan tahun 2022 terdapat penurunan prevalensi stunting menjadi 20,6%. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang secara resmi telah dilaunching oleh Kementerian Kesehatan pada Mei 2025 Prevalensi stunting di Kabupaten Pacitan yaitu 11,8%. Angka stunting mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 20,9% namun perlu Upaya lebih lanjut dalam menurunkan stunting

E. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Dinas Kesehatan. Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas:

PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KESEHATAN KAB. PACITAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	15	16
		DINAS KESEHATAN				**150,658,704,904.34**		**147,999,127,197.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**150,658,704,904.34**		**147,999,127,197.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,658,704,904.34**		**147,999,127,197.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**96,700,892,197.00**	**-**	**96,600,892,197.00**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 % 100 %	-	350,000,000.00	100 % 100 %	350,000,000.00
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	15 Dokumen	150,000,000.00	28 Dokumen	150,000,000.00
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	28 Laporan	200,000,000.00	15 Laporan	200,000,000.00
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 % 100 %	-	93,755,892,197.00	100 % 100 %	93,755,892,197.00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/bulan	1200 Orang/bulan	93,475,892,197.00	1400 Orang/bulan	93,475,892,197.00
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	150,000,000.00	12 Dokumen	150,000,000.00
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000.00	4 Dokumen	10,000,000.00
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120,000,000.00	12 Laporan	120,000,000.00
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 %	-	100,000,000.00	100 % 100 %	100,000,000.00
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	24 Laporan	100,000,000.00	24 Laporan	100,000,000.00
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 %	-	35,000,000.00	100 % 100 %	35,000,000.00
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 %	-	540,000,000.00	100 % 100 %	540,000,000.00
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	140,000,000.00	1 Paket	140,000,000.00
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	50,000,000.00
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	350,000,000.00	100 Laporan	350,000,000.00
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 % 100 %	-	760,000,000.00	100 % 100 %	660,000,000.00
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		59 Unit	310,000,000.00		310,000,000.00
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	2 Unit	100,000,000.00
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	250,000,000.00	10 Unit	250,000,000.00
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 %	-	560,000,000.00	100 % 100 %	560,000,000.00
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500,000,000.00	12 Laporan	500,000,000.00
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 %	-	600,000,000.00	100 % 100 %	600,000,000.00
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50,000,000.00	50 Unit	50,000,000.00
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	550,000,000.00	1 Unit	550,000,000.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**47,164,577,707.34**	**-**	**44,605,000,000.00**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95,60 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 %	-	20,289,577,707.34	100 % 0 % 100 % 95.83 % 100 % 95.83 % 100 % 100 % 95,40 % 100 % 100 % 0 % 100 % 99 %	17,730,000,000.00
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	8,000,000,000.00	2 Unit	8,000,000,000.00
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	480 Unit	10 Unit	4,059,577,707.34	384 Unit	1,500,000,000.00
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	26 Unit	5 Unit	500,000,000.00	26 Unit	500,000,000.00
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						

			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	24 Unit	110,000,000.00	80 Unit	110,000,000.00
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	24 Paket	7,500,000,000.00	25 Paket	7,500,000,000.00
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	25 Paket	288 Paket	120,000,000.00	25 Paket	120,000,000.00
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 %	-	26,600,000,000.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 %	26,600,000,000.00
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	4961 Orang	130,000,000.00	5057 Orang	130,000,000.00
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	4961 Orang	20,000,000.00	5057 Orang	20,000,000.00
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5045 Orang	4901 Orang	30,000,000.00	4997 Orang	30,000,000.00

	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26519 Orang	27821 Orang	130,000,000.00	26947 Orang	130,000,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		64980 Orang	50,000,000.00		50,000,000.00
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	331695 Orang	327695 Orang	100,000,000.00	331695 Orang	100,000,000.00
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108763 Orang	108763 Orang	30,000,000.00	108763 Orang	30,000,000.00
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123862 Orang	114281 Orang	25,000,000.00	120668 Orang	25,000 ,000.00
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10076 Orang	10017 Orang	25,000,000.00	10055 Orang	25,000 ,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	973 Orang	30,000,000.00	992 Orang	30,000 ,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	4980 Orang	30,000,000.00	3500 Orang	30,000,000.00
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6994 Orang	6984 Orang	30,000,000.00	6990 Orang	30,000,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	12 Dokumen	50,000,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00	12 Dokumen	60,000,000.00
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1 Dokumen	24,070,000,000.00	12 Dokumen	24,070,000,000.00
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00	9 Dokumen	150,000,000.00
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	3 Dokumen	900,000,000.00	24 Dokumen	900,000,000.00
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	12 Dokumen	300,000,000.00
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00	12 Dokumen	60,000,000.00
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	94 % 79 % 94.00 % 79.00 %	-	175,000,000.00	81 % 67 % 81.00 % 67.00 %	175,000,000.00
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	175,000,000.00	12 Dokumen	175,000,000.00
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	96 % 88 % 88 % 96 % 100 % 100 %	-	100,000,000.00	92 % 83 % 83 % 92 % 100 % 100 %	100,000,000.00
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	27 Unit	24 Unit	50,000,000.00	27 Unit	50,000,000.00
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit	30 Unit	50,000,000.00	30 Unit	50,000,000.00
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**5,073,235,000.00**	**-**	**5,073,235,000.00**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	95 % 95 % 91 % 91 %	-	50,000,000.00	91 % 91 % 87.50 % 87.50 %	50,000,000.00
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	50,000,000.00
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	75 % 75 %	-	5,023,235,000.00	40 % 40 %	5,023,235,000.00
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	150 Orang	5,023,235,000.00	250 Orang	5,023,235,000.00
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**50,000,000.00**	**-**	**50,000,000.00**
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	90 % 90 %	-	25,000,000.00	90 % 90 %	25,000,000.00

	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	10 Dokumen	25,000,000.00
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	70 % 70 % 78 %	-	25,000,000.00	40 % 40 % 75 %	25,000,000.00
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	100 Dokumen	25,000,000.00
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**1,670,000,000.00**	**-**	**1,670,000,000.00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	29.94 % 29.94 %	-	1,300,000,000.00	22.14 % 22.14 %	1,300,000,000.00
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	1 Dokumen	1,300,000,000.00	4 Dokumen	1,300,000,000.00
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	32.30 % 32.30 %	-	350,000,000.00	31.30 % 31.30 %	350,000,000.00
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000.00	2 Dokumen	350,000,000.00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	20,000,000.00	100 % 100 %	20,000,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	20,000,000.00
		PUSKESMAS PACITAN				**4,569,676,678.00**		**4,569,676,678.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4,569,676,678.00**		**4,569,676,678.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**4,569,676,678.00**		**4,569,676,678.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,290,322,637.00**	**-**	**1,290,322,637.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,290,322,637.00	56 % 56 %	1,290,322,637.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,290,322,637.00	25 Unit Kerja	1,290,322,637.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**770,784,041.00**	**-**	**770,784,041.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 %	-	770,784,041.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 %	770,784,041.00

				62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	235 Orang	48,800,000.00	5057 Orang	48,800,000.00

	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3612 Orang	34,560,000.00		34,560,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	41 Orang	5,040,000.00	992 Orang	5,040,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	251 Orang	4,800,000.00	3500 Orang	4,800,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	211,360,000.00	1 Dokumen	211,360,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,940,000.00	1 Dokumen	5,940,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21,000,000.00	1 Dokumen	21,000,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	28,800,000.00	12 Dokumen	28,800,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	11,520,000.00		11,520,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	107,400,000.00	12 Dokumen	107,400,000.00

	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	244,144,041.00	24 Dokumen	244,144,041.00
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	1 Dokumen	4,680,000.00	24 Dokumen	4,680,000.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	9,200,000.00	1 Dokumen	9,200,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900,000.00	1 Dokumen	900,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,800,000.00	1 Dokumen	4,800,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	27,840,000.00	12 Dokumen	27,840,000.00
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**2,500,000,000.00**	**-**	**2,500,000,000.00**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	95 % 95 % 91 % 91 %	-	2,500,000,000.00	91 % 91 % 87.50 % 87.50 %	2,500,000,000.00
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2700 Orang	1000 Orang	2,500,000,000.00	2300 Orang	2,500,000,000.00
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**8,570,000.00**	**-**	**8,570,000.00**

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	8,570,000.00	100 % 100 %	8,570,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8,570,000.00	2 Dokumen	8,570,000.00
		PUSKESMAS TANJUNGSARI				**3,524,104,075.00**		**3,524,104,075.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3,524,104,075.00**		**3,524,104,075.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,524,104,075.00**		**3,524,104,075.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,218,816,548.00**	**-**	**2,218,816,548.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	2,218,816,548.00	56 % 56 %	2,218,816,548.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,218,816,548.00	25 Unit Kerja	2,218,816,548.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**1,295,747,527.00**	**-**	**1,295,747,527.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 %	-	1,295,747,527.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 %	1,295,747,527.00

				22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	475 Orang	61,800,000.00	5057 Orang	61,800,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8397 Orang	63,960,000.00		63,960,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	93 Orang	11,520,000.00	992 Orang	11,520,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	337 Orang	27,600,000.00	3500 Orang	27,600,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	413,980,000.00	1 Dokumen	413,980,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,220,000.00	1 Dokumen	5,220,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	28,200,000.00	1 Dokumen	28,200,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	74,640,000.00	12 Dokumen	74,640,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	12,000,000.00		12,000,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	146,940,000.00	12 Dokumen	146,940,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	349,061,527.00	24 Dokumen	349,061,527.00
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	1 Dokumen	14,426,000.00	24 Dokumen	14,426,000.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	26,100,000.00	1 Dokumen	26,100,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900,000.00	1 Dokumen	900,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	50,400,000.00	12 Dokumen	50,400,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,540,000.00**	**-**	**9,540,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,540,000.00	100 % 100 %	9,540,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,540,000.00	2 Dokumen	9,540,000.00
		PUSKESMAS KEBONAGUNG				**2,399,673,688.00**		**2,399,673,688.00**

	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,399,673,688.00**		**2,399,673,688.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,399,673,688.00**		**2,399,673,688.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,547,151,843.00**	**-**	**1,547,151,843.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,547,151,843.00	56 % 56 %	1,547,151,843.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,547,151,843.00	25 Unit Kerja	1,547,151,843.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**840,883,845.00**	**-**	**840,883,845.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup	-	840,883,845.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	840,883,845.00
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	229 Orang	20,160,000.00	5057 Orang	20,160,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						

			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2803 Orang	26,160,000.00		26,160,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	41 Orang	8,400,000.00	992 Orang	8,400,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	251 Orang	12,480,000.00	3500 Orang	12,480,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	257,460,000.00	1 Dokumen	257,460,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,800,000.00	1 Dokumen	25,800,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	26,520,000.00	12 Dokumen	26,520,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	12,240,000.00		12,240,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	97,260,000.00	12 Dokumen	97,260,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	252,643,845.00	24 Dokumen	252,643,845.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	60,480,000.00	1 Dokumen	60,480,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720,000.00	1 Dokumen	720,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,240,000.00	1 Dokumen	12,240,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	22,320,000.00	12 Dokumen	22,320,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**11,638,000.00**	**-**	**11,638,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	11,638,000.00	100 % 100 %	11,638,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	11,638,000.00	2 Dokumen	11,638,000.00
		PUSKESMAS KETROWONOJOYO				**1,767,955,500.01**		**1,767,955,500.01**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,767,955,500.01**		**1,767,955,500.01**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,767,955,500.01**		**1,767,955,500.01**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,031,926,441.01**	**-**	**1,031,926,441.01**

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,031,926,441.01	56 % 56 %	1,031,926,441.01
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,031,926,441.01	25 Unit Kerja	1,031,926,441.01
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**728,469,059.00**	**-**	**728,469,059.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % hidup	-	728,469,059.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % hidup	728,469,059.00
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	161 Orang	20,200,000.00	5057 Orang	20,200,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2161 Orang	24,600,000.00		24,600,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	31 Orang	12,240,000.00	992 Orang	12,240,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	201 Orang	8,520,000.00	3500 Orang	8,520,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	237,120,000.00	1 Dokumen	237,120,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4,320,000.00	1 Dokumen	4,320,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	19,680,000.00	1 Dokumen	19,680,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	11,880,000.00	12 Dokumen	11,880,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	1,440,000.00		1,440,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	113,040,000.00	12 Dokumen	113,040,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	235,989,059.00	24 Dokumen	235,989,059.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	6,440,000.00	1 Dokumen	6,440,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720,000.00	1 Dokumen	720,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,400,000.00	1 Dokumen	5,400,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	26,880,000.00	12 Dokumen	26,880,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**7,560,000.00**	**-**	**7,560,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	7,560,000.00	100 % 100 %	7,560,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	7,560,000.00	2 Dokumen	7,560,000.00
		PUSKESMAS ARJOSARI				**3,712,705,134.53**		**3,712,705,134.53**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3,712,705,134.53**		**3,712,705,134.53**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,712,705,134.53**		**3,712,705,134.53**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,582,110,874.53**	**-**	**2,582,110,874.53**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	2,582,110,874.53	56 % 56 %	2,582,110,874.53
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,582,110,874.53	25 Unit Kerja	2,582,110,874.53
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**1,120,916,260.00**	**-**	**1,120,916,260.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per	-	1,120,916,260.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per	1,120,916,260.00

				1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	268 Orang	88,800,000.00	5057 Orang	88,800,000.00
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	331695 Orang	3463 Orang	72,120,000.00	331695 Orang	72,120,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	50 Orang	7,200,000.00	992 Orang	7,200,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	268 Orang	10,200,000.00	3500 Orang	10,200,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	364,236,000.00	1 Dokumen	364,236,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2,880,000.00	1 Dokumen	2,880,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	37,200,000.00	1 Dokumen	37,200,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	40,620,000.00	12 Dokumen	40,620,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	24,000,000.00		24,000,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	101,980,000.00	12 Dokumen	101,980,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	312,280,260.00	24 Dokumen	312,280,260.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11,040,000.00	1 Dokumen	11,040,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360,000.00	1 Dokumen	360,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,480,000.00	1 Dokumen	9,480,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	38,520,000.00	12 Dokumen	38,520,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,678,000.00**	**-**	**9,678,000.00**

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,678,000.00	100 % 100 %	9,678,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,678,000.00	2 Dokumen	9,678,000.00
		PUSKESMAS KEDUNGBENDO				**1,125,967,831.00**		**1,125,967,831.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,125,967,831.00**		**1,125,967,831.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,125,967,831.00**		**1,125,967,831.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**509,782,314.00**	**-**	**509,782,314.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	509,782,314.00	56 % 56 %	509,782,314.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	509,782,314.00	25 Unit Kerja	509,782,314.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**606,885,517.00**	**-**	**606,885,517.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 %	-	606,885,517.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 %	606,885,517.00

				1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	100 Orang	24,400,000.00	5057 Orang	24,400,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		903 Orang	34,800,000.00		34,800,000.00

	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	15 Orang	10,800,000.00	992 Orang	10,800,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	91 Orang	9,240,000.00	3500 Orang	9,240,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	132,800,000.00	1 Dokumen	132,800,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2,160,000.00	1 Dokumen	2,160,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	29,760,000.00	1 Dokumen	29,760,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	16,800,000.00	12 Dokumen	16,800,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	8,640,000.00		8,640,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	114,320,000.00	12 Dokumen	114,320,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	202,125,517.00	24 Dokumen	202,125,517.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4,600,000.00	1 Dokumen	4,600,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360,000.00	1 Dokumen	360,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	10,080,000.00	12 Dokumen	10,080,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,300,000.00**	**-**	**9,300,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,300,000.00	100 % 100 %	9,300,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,300,000.00	2 Dokumen	9,300,000.00
		PUSKESMAS PUNUNG				**2,351,564,424.00**		**2,351,564,424.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,351,564,424.00**		**2,351,564,424.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,351,564,424.00**		**2,351,564,424.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,552,258,309.00**	**-**	**1,552,258,309.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,552,258,309.00	56 % 56 %	1,552,258,309.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,552,258,309.00	25 Unit Kerja	1,552,258,309.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**782,786,115.00**	**-**	**782,786,115.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	-	90.10 %	-	782,786,115.00	85.53 %	782,786,115.00

		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 % 152.38 % 4 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			91.86 % 152.38 % 4 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	

	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	209 Orang	52,200,000.00	5057 Orang	52,200,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2434 Orang	58,860,000.00		58,860,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	36 Orang	5,040,000.00	992 Orang	5,040,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	139 Orang	9,720,000.00	3500 Orang	9,720,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	222,222,000.00	1 Dokumen	222,222,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4,860,000.00	1 Dokumen	4,860,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13,980,000.00	1 Dokumen	13,980,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	26,760,000.00	12 Dokumen	26,760,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	17,760,000.00		17,760,000.00

	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	100,980,000.00	12 Dokumen	100,980,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	240,524,115.00	24 Dokumen	240,524,115.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	8,280,000.00	1 Dokumen	8,280,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360,000.00	1 Dokumen	360,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	8,880,000.00	1 Dokumen	8,880,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12,360,000.00	12 Dokumen	12,360,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**16,520,000.00**	**-**	**16,520,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	16,520,000.00	100 % 100 %	16,520,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	16,520,000.00	2 Dokumen	16,520,000.00
		PUSKESMAS GONDOSARI				**1,993,214,052.53**		**1,993,214,052.53**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**518,196,912.00**		**518,196,912.00**

	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**518,196,912.00**		**518,196,912.00**
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**509,816,912.00**	**-**	**509,816,912.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 %	-	509,816,912.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 %	509,816,912.00

				0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**		**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**	
					TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
1	2	3	4	5	8	9	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	91 Orang	36,960,000.00	5057 Orang	36,960,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1451 Orang	22,560,000.00		22,560,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	26 Orang	18,000,000.00	992 Orang	18,000,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	127 Orang	12,120,000.00	3500 Orang	12,120,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	102,888,000.00	1 Dokumen	102,888,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4,300,000.00	1 Dokumen	4,300,000.00

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22,400,000.00	1 Dokumen	22,400,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	23,520,000.00	12 Dokumen	23,520,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	5,760,000.00		5,760,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	43,120,000.00	12 Dokumen	43,120,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	190,988,912.00	24 Dokumen	190,988,912.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	8,960,000.00	1 Dokumen	8,960,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000.00	1 Dokumen	120,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,600,000.00	1 Dokumen	9,600,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	8,520,000.00	12 Dokumen	8,520,000.00
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**8,380,000.00**	**-**	**8,380,000.00**

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	8,380,000.00	100 % 100 %	8,380,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8,380,000.00	2 Dokumen	8,380,000.00
	X	**NON URUSAN**				**1,475,017,140.53**		**1,475,017,140.53**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1,475,017,140.53**		**1,475,017,140.53**
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,475,017,140.53**	**-**	**1,475,017,140.53**
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,475,017,140.53	56 % 56 %	1,475,017,140.53
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,475,017,140.53	25 Unit Kerja	1,475,017,140.53
		PUSKESMAS PRINGKUKU				**1,786,249,231.00**		**1,702,149,231.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,786,249,231.00**		**1,702,149,231.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,786,249,231.00**		**1,702,149,231.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,077,127,983.00**	**-**	**1,077,127,983.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,077,127,983.00	56 % 56 %	1,077,127,983.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,077,127,983.00	25 Unit Kerja	1,077,127,983.00

2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**696,401,248.00**	**-**	**612,301,248.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 %	-	696,401,248.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 %	612,301,248.00

				152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	161 Orang	23,040,000.00	5057 Orang	23,040,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2320 Orang	23,760,000.00		23,760,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	34 Orang	7,200,000.00	992 Orang	7,200,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	167 Orang	10,320,000.00	3500 Orang	10,320,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	204,720,000.00	1 Dokumen	204,720,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1,980,000.00	1 Dokumen	1,980,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,320,000.00	1 Dokumen	25,320,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	21,132,000.00	12 Dokumen	21,132,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	13,920,000.00		13,920,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	104,760,000.00	12 Dokumen	104,760,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	230,309,248.00	24 Dokumen	146,209,248.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	7,680,000.00	1 Dokumen	7,680,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360,000.00	1 Dokumen	360,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,120,000.00	1 Dokumen	9,120,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12,780,000.00	12 Dokumen	12,780,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**12,720,000.00**	**-**	**12,720,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	12,720,000.00	100 % 100 %	12,720,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						

			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	12,720,000.00	2 Dokumen	12,720,000.00
		PUSKESMAS CANDI				**1,275,957,286.00**		**1,275,957,286.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,275,957,286.00**		**1,275,957,286.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,275,957,286.00**		**1,275,957,286.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**700,317,202.00**	**-**	**700,317,202.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	700,317,202.00	56 % 56 %	700,317,202.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	700,317,202.00	25 Unit Kerja	700,317,202.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**566,940,084.00**	**-**	**566,940,084.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup	-	566,940,084.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	566,940,084.00

				8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	104 Orang	37,420,000.00	5057 Orang	37,420,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1272 Orang	27,720,000.00		27,720,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	20 Orang	7,200,000.00	992 Orang	7,200,000.00

	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	123 Orang	4,080,000.00	3500 Orang	4,080,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	130,560,000.00	1 Dokumen	130,560,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2,880,000.00	1 Dokumen	2,880,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,800,000.00	1 Dokumen	16,800,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	14,480,000.00	12 Dokumen	14,480,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	18,000,000.00		18,000,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			-	12 Dokumen	-	77,590,000.00	12 Dokumen	77,590,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	198,646,084.00	24 Dokumen	198,646,084.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	12,600,000.00	1 Dokumen	12,600,000.00

	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	724,000.00	1 Dokumen	724,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,400,000.00	1 Dokumen	5,400,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12,840,000.00	12 Dokumen	12,840,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**8,700,000.00**	**-**	**8,700,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %100 %	-	8,700,000.00	100 %100 %	8,700,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8,700,000.00	2 Dokumen	8,700,000.00
		PUSKESMAS DONOROJO				**2,113,072,496.00**		**2,113,072,496.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,113,072,496.00**		**2,113,072,496.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,113,072,496.00**		**2,113,072,496.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,397,575,433.00**	**-**	**1,397,575,433.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,397,575,433.00	56 % 56 %	1,397,575,433.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,397,575,433.00	25 Unit Kerja	1,397,575,433.00

2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**702,277,063.00**	**-**	**702,277,063.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 %	-	702,277,063.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 %	702,277,063.00

				100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	176 Orang	47,600,000.00	5057 Orang	47,600,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2469 Orang	32,520,000.00		32,520,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	36 Orang	8,640,000.00	992 Orang	8,640,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	134 Orang	5,760,000.00	3500 Orang	5,760,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	190,350,000.00	1 Dokumen	190,350,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3,960,000.00	1 Dokumen	3,960,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000.00	1 Dokumen	18,000,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	21,000,000.00	12 Dokumen	21,000,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	16,080,000.00		16,080,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	79,980,000.00	12 Dokumen	79,980,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	239,267,063.00	24 Dokumen	239,267,063.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21,840,000.00	1 Dokumen	21,840,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360,000.00	1 Dokumen	360,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,800,000.00	1 Dokumen	4,800,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12,120,000.00	12 Dokumen	12,120,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**13,220,000.00**	**-**	**13,220,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %100 %	-	13,220,000.00	100 %100 %	13,220,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	13,220,000.00	2 Dokumen	13,220,000.00

		PUSKESMAS KALAK				**1,504,439,791.00**		**1,504,439,791.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,504,439,791.00**		**1,504,439,791.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,504,439,791.00**		**1,504,439,791.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**848,047,580.00**	**-**	**848,047,580.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	848,047,580.00	56 % 56 %	848,047,580.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	848,047,580.00	25 Unit Kerja	848,047,580.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**642,652,211.00**	**-**	**642,652,211.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 %	-	642,652,211.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 %	642,652,211.00
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	117 Orang	62,400,000.00	5057 Orang	62,400,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1625 Orang	27,960,000.00		27,960,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1003 Orang	26 Orang	9,360,000.00	992 Orang	9,360,000.00

			Sesuai Standar					
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	121 Orang	11,520,000.00	3500 Orang	11,520,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	164,902,000.00	1 Dokumen	164,902,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,040,000.00	1 Dokumen	5,040,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,220,000.00	1 Dokumen	5,220,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	11,520,000.00	12 Dokumen	11,520,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	4,080,000.00		4,080,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	101,460,000.00	12 Dokumen	101,460,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	207,530,211.00	24 Dokumen	207,530,211.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000.00	1 Dokumen	1,140,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,720,000.00	1 Dokumen	6,720,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	13,800,000.00	12 Dokumen	13,800,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**13,740,000.00**	**-**	**13,740,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	13,740,000.00	100 % 100 %	13,740,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	13,740,000.00	2 Dokumen	13,740,000.00
		PUSKESMAS NGADIROJO				**4,121,398,131.52**		**22,479,067,653.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,081,214,601.00**		**1,081,214,601.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,081,214,601.00**		**1,081,214,601.00**
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**1,071,674,601.00**	**-**	**1,071,674,601.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 %	-	1,071,674,601.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 %	1,071,674,601.00

				0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN /**	**INDIKATOR PROGRAM /**	**TARGET**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA**		**PRAKIRAAN MAJU RENCANA**	

		PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PENDANAAN		TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	263 Orang	55,440,000.00	5057 Orang	55,440,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3758 Orang	53,280,000.00		53,280,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	51 Orang	8,640,000.00	992 Orang	8,640,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	300 Orang	6,000,000.00	3500 Orang	6,000,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	391,700,000.00	1 Dokumen	391,700,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	8,820,000.00	1 Dokumen	8,820,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21,960,000.00	1 Dokumen	21,960,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	27,360,000.00	12 Dokumen	27,360,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	19,200,000.00		19,200,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	93,240,000.00	12 Dokumen	93,240,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	314,295,601.00	24 Dokumen	314,295,601.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	26,640,000.00	1 Dokumen	26,640,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	579,000.00	1 Dokumen	579,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,880,000.00	1 Dokumen	5,880,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	38,640,000.00	12 Dokumen	38,640,000.00
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,540,000.00**	**-**	**9,540,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,540,000.00	100 % 100 %	9,540,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						

			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,540,000.00	2 Dokumen	9,540,000.00
	X	**NON URUSAN**				**3,040,183,530.52**		**21,397,853,052.00**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3,040,183,530.52**		**21,397,853,052.00**
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3,040,183,530.52**	**-**	**21,397,853,052.00**
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	3,040,183,530.52	56 % 56 %	21,397,853,052.00
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,040,183,530.52	25 Unit Kerja	21,397,853,052.00
		PUSKESMAS WONOKARTO				**1,366,892,168.00**		**1,366,892,168.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,366,892,168.00**		**1,366,892,168.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,366,892,168.00**		**1,366,892,168.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**765,810,329.00**	**-**	**765,810,329.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	765,810,329.00	56 % 56 %	765,810,329.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	765,810,329.00	25 Unit Kerja	765,810,329.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**592,261,839.00**	**-**	**592,261,839.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	-	90.10 %	-	592,261,839.00	85.53 %	592,261,839.00

		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran			91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran	

				hidup			hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	140 Orang	32,280,000.00	5057 Orang	32,280,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1696 Orang	29,880,000.00		29,880,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	24 Orang	8,400,000.00	992 Orang	8,400,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	173 Orang	10,680,000.00	3500 Orang	10,680,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	154,620,000.00	1 Dokumen	154,620,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4,300,000.00	1 Dokumen	4,300,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000.00	1 Dokumen	12,000,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	27,285,000.00	12 Dokumen	27,285,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	11,760,000.00		11,760,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	71,058,000.00	12 Dokumen	71,058,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	205,218,839.00	24 Dokumen	205,218,839.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	5,580,000.00	1 Dokumen	5,580,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1,440,000.00	1 Dokumen	1,440,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,120,000.00	1 Dokumen	3,120,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	14,640,000.00	12 Dokumen	14,640,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**8,820,000.00**	**-**	**8,820,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	8,820,000.00	100 % 100 %	8,820,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8,820,000.00	2 Dokumen	8,820,000.00

		PUSKESMAS TULAKAN				**6,006,191,910.00**		**6,006,191,910.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6,006,191,910.00**		**6,006,191,910.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**6,006,191,910.00**		**6,006,191,910.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4,777,263,319.00**	**-**	**4,777,263,319.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	4,777,263,319.00	56 % 56 %	4,777,263,319.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4,777,263,319.00	25 Unit Kerja	4,777,263,319.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**1,219,388,591.00**	**-**	**1,219,388,591.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000	-	1,219,388,591.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000	1,219,388,591.00

				kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	482 Orang	63,440,000.00	5057 Orang	63,440,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5570 Orang	35,940,000.00		35,940,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	106 Orang	8,640,000.00	992 Orang	8,640,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	537 Orang	24,120,000.00	3500 Orang	24,120,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	434,418,000.00	1 Dokumen	434,418,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	19,800,000.00	1 Dokumen	19,800,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	25,440,000.00	12 Dokumen	25,440,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	36,720,000.00		36,720,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	159,360,000.00	12 Dokumen	159,360,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	335,550,591.00	24 Dokumen	335,550,591.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	13,440,000.00	1 Dokumen	13,440,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000.00	1 Dokumen	1,200,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,360,000.00	1 Dokumen	9,360,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	48,960,000.00	12 Dokumen	48,960,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,540,000.00**	**-**	**9,540,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,540,000.00	100 % 100 %	9,540,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,540,000.00	2 Dokumen	9,540,000.00
		PUSKESMAS BUBAKAN				**3,129,696,399.49**		**3,129,696,399.49**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3,129,696,399.49**		**3,129,696,399.49**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,129,696,399.49**		**3,129,696,399.49**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,294,726,895.49**	**-**	**2,294,726,895.49**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	2,294,726,895.49	56 % 56 %	2,294,726,895.49
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,294,726,895.49	25 Unit Kerja	2,294,726,895.49

2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**826,629,504.00**	**-**	**826,629,504.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 %	-	826,629,504.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 %	826,629,504.00

				4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	273 Orang	43,400,000.00	5057 Orang	43,400,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2771 Orang	32,280,000.00		32,280,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	35 Orang	7,200,000.00	992 Orang	7,200,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	177 Orang	11,760,000.00	3500 Orang	11,760,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	236,490,000.00	1 Dokumen	236,490,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,220,000.00	1 Dokumen	5,220,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,300,000.00	1 Dokumen	9,300,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	23,880,000.00	12 Dokumen	23,880,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	15,840,000.00		15,840,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	142,620,000.00	12 Dokumen	142,620,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	249,039,504.00	24 Dokumen	249,039,504.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4,600,000.00	1 Dokumen	4,600,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	540,000.00	1 Dokumen	540,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			-	1 Dokumen	-	3,480,000.00	1 Dokumen	3,480,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	40,980,000.00	12 Dokumen	40,980,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**8,340,000.00**	**-**	**8,340,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	8,340,000.00	100 % 100 %	8,340,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						

			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8,340,000.00	2 Dokumen	8,340,000.00
		PUSKESMAS SUDIMORO				**1,948,254,238.31**		**1,948,254,238.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,948,254,238.31**		**1,948,254,238.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,948,254,238.31**		**1,948,254,238.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,200,565,957.31**	**-**	**1,200,565,957.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,200,565,957.31	56 % 56 %	1,200,565,957.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,200,565,957.31	25 Unit Kerja	1,200,565,957.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**738,148,281.00**	**-**	**738,148,281.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 %	-	738,148,281.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 %	738,148,281.00

				7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	167 Orang	44,400,000.00	5057 Orang	44,400,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2426 Orang	39,600,000.00		39,600,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	39 Orang	5,040,000.00	992 Orang	5,040,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	177 Orang	7,800,000.00	3500 Orang	7,800,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	231,690,000.00	1 Dokumen	231,690,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,580,000.00	1 Dokumen	5,580,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	26,040,000.00	1 Dokumen	26,040,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	9,430,000.00	12 Dokumen	9,430,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	13,680,000.00		13,680,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	91,410,000.00	12 Dokumen	91,410,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	234,678,281.00	24 Dokumen	234,678,281.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	5,520,000.00	1 Dokumen	5,520,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720,000.00	1 Dokumen	720,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,080,000.00	1 Dokumen	4,080,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	18,480,000.00	12 Dokumen	18,480,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,540,000.00**	**-**	**9,540,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,540,000.00	100 % 100 %	9,540,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,540,000.00	2 Dokumen	9,540,000.00
		PUSKESMAS SUKOREJO				**1,354,152,280.00**		**1,354,152,280.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,354,152,280.00**		**1,354,152,280.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,354,152,280.00**		**1,354,152,280.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**755,625,217.00**	**-**	**755,625,217.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	755,625,217.00	56 % 56 %	755,625,217.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	755,625,217.00	25 Unit Kerja	755,625,217.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**589,407,063.00**	**-**	**589,407,063.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per	-	589,407,063.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per	589,407,063.00

				1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	126 Orang	32,800,000.00	5057 Orang	32,800,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1226 Orang	19,200,000.00		19,200,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	16 Orang	5,760,000.00	992 Orang	5,760,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	137 Orang	5,520,000.00	3500 Orang	5,520,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	190,058,000.00	1 Dokumen	190,058,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,820,000.00	1 Dokumen	5,820,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21,120,000.00	1 Dokumen	21,120,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	11,040,000.00	12 Dokumen	11,040,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	14,880,000.00		14,880,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	63,180,000.00	12 Dokumen	63,180,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	198,049,063.00	24 Dokumen	198,049,063.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3,680,000.00	1 Dokumen	3,680,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900,000.00	1 Dokumen	900,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,520,000.00	1 Dokumen	5,520,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	11,880,000.00	12 Dokumen	11,880,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,120,000.00**	**-**	**9,120,000.00**

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,120,000.00	100 % 100 %	9,120,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,120,000.00	2 Dokumen	9,120,000.00
		PUSKESMAS TEGALOMBO				**3,820,259,294.00**		**3,820,259,294.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3,820,259,294.00**		**3,820,259,294.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,820,259,294.00**		**3,820,259,294.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,963,060,608.00**	**-**	**2,963,060,608.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	2,963,060,608.00	56 % 56 %	2,963,060,608.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,963,060,608.00	25 Unit Kerja	2,963,060,608.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**847,398,686.00**	**-**	**847,398,686.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 %	-	847,398,686.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 %	847,398,686.00

				1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	275 Orang	47,600,000.00	5057 Orang	47,600,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3045 Orang	56,280,000.00		56,280,000.00

	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	60 Orang	8,520,000.00	992 Orang	8,520,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	289 Orang	16,200,000.00	3500 Orang	16,200,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	234,390,000.00	1 Dokumen	234,390,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2,880,000.00	1 Dokumen	2,880,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21,960,000.00	1 Dokumen	21,960,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	18,960,000.00	12 Dokumen	18,960,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	3,600,000.00		3,600,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	98,940,000.00	12 Dokumen	98,940,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	277,388,686.00	24 Dokumen	277,388,686.00

	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	60 Orang	600,000.00	4 Orang	600,000.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	17,660,000.00	1 Dokumen	17,660,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900,000.00	1 Dokumen	900,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,120,000.00	1 Dokumen	9,120,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	32,400,000.00	12 Dokumen	32,400,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**9,800,000.00**	**-**	**9,800,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	9,800,000.00	100 % 100 %	9,800,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9,800,000.00	2 Dokumen	9,800,000.00
		PUSKESMAS GEMAHARJO				**2,297,376,856.00**		**2,297,376,856.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,297,376,856.00**		**2,297,376,856.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,297,376,856.00**		**2,297,376,856.00**

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,613,767,229.00**	**-**	**1,613,767,229.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,613,767,229.00	56 % 56 %	1,613,767,229.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,613,767,229.00	25 Unit Kerja	1,613,767,229.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**675,009,627.00**	**-**	**675,009,627.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 %	-	675,009,627.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 %	675,009,627.00

				100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	127 Orang	29,600,000.00	5057 Orang	29,600,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1965 Orang	24,840,000.00		24,840,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	29 Orang	5,040,000.00	992 Orang	5,040,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	141 Orang	10,080,000.00	3500 Orang	10,080,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	203,092,000.00	1 Dokumen	203,092,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,760,000.00	1 Dokumen	5,760,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13,200,000.00	1 Dokumen	13,200,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	15,720,000.00	12 Dokumen	15,720,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	10,320,000.00		10,320,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	99,300,000.00	12 Dokumen	99,300,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	230,797,627.00	24 Dokumen	230,797,627.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3,680,000.00	1 Dokumen	3,680,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			-	1 Dokumen	-	540,000.00	1 Dokumen	540,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000.00	1 Dokumen	2,400,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	20,640,000.00	12 Dokumen	20,640,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**8,600,000.00**	**-**	**8,600,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	8,600,000.00	100 % 100 %	8,600,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8,600,000.00	2 Dokumen	8,600,000.00
		PUSKESMAS NAWANGAN				**3,309,438,014.00**		**3,309,438,014.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3,309,438,014.00**		**3,309,438,014.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,309,438,014.00**		**3,309,438,014.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,561,334,607.00**	**-**	**2,561,334,607.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	2,561,334,607.00	56 % 56 %	2,561,334,607.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,561,334,607.00	25 Unit Kerja	2,561,334,607.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**739,143,407.00**	**-**	**739,143,407.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 %	-	739,143,407.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 %	739,143,407.00

				3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	221 Orang	20,600,000.00	5057 Orang	20,600,000.00

	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2699 Orang	28,560,000.00		28,560,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	48 Orang	7,200,000.00	992 Orang	7,200,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	249 Orang	18,000,000.00	3500 Orang	18,000,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	268,440,000.00	1 Dokumen	268,440,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4,620,000.00	1 Dokumen	4,620,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,920,000.00	1 Dokumen	16,920,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	18,060,000.00	12 Dokumen	18,060,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	7,200,000.00		7,200,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	51,360,000.00	12 Dokumen	51,360,000.00

	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	262,023,407.00	24 Dokumen	262,023,407.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4,600,000.00	1 Dokumen	4,600,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1,680,000.00	1 Dokumen	1,680,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,680,000.00	1 Dokumen	4,680,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	25,200,000.00	12 Dokumen	25,200,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**8,960,000.00**	**-**	**8,960,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	8,960,000.00	100 % 100 %	8,960,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8,960,000.00	2 Dokumen	8,960,000.00
		PUSKESMAS PAKISBARU				**2,453,634,187.00**		**2,453,634,187.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,453,634,187.00**		**2,453,634,187.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,453,634,187.00**		**2,453,634,187.00**

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,774,927,212.00**	**-**	**1,774,927,212.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,774,927,212.00	56 % 56 %	1,774,927,212.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,774,927,212.00	25 Unit Kerja	1,774,927,212.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**670,726,975.00**	**-**	**670,726,975.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 %	-	670,726,975.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 %	670,726,975.00

				4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	198 Orang	29,280,000.00	5057 Orang	29,280,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2251 Orang	28,920,000.00		28,920,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	40 Orang	10,080,000.00	992 Orang	10,080,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	165 Orang	8,280,000.00	3500 Orang	8,280,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	156,680,000.00	1 Dokumen	156,680,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,400,000.00	1 Dokumen	5,400,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	24,400,000.00	1 Dokumen	24,400,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	10,440,000.00	12 Dokumen	10,440,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	21,120,000.00		21,120,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	87,480,000.00	12 Dokumen	87,480,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	246,566,975.00	24 Dokumen	246,566,975.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3,680,000.00	1 Dokumen	3,680,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720,000.00	1 Dokumen	720,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000.00	1 Dokumen	2,400,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	35,280,000.00	12 Dokumen	35,280,000.00

3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**7,980,000.00**	**-**	**7,980,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	7,980,000.00	100 % 100 %	7,980,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	7,980,000.00	2 Dokumen	7,980,000.00
		PUSKESMAS BANDAR				**2,537,779,576.00**		**2,537,779,576.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,537,779,576.00**		**2,537,779,576.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,537,779,576.00**		**2,537,779,576.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,812,825,364.00**	**-**	**1,812,825,364.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,812,825,364.00	56 % 56 %	1,812,825,364.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,812,825,364.00	25 Unit Kerja	1,812,825,364.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**717,734,212.00**	**-**	**717,734,212.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 %	-	717,734,212.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 %	717,734,212.00

				22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 % 62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 % 66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	168 Orang	29,440,000.00	5057 Orang	29,440,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						

			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2534 Orang	59,160,000.00		59,160,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	36 Orang	7,200,000.00	992 Orang	7,200,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	156 Orang	12,360,000.00	3500 Orang	12,360,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	195,934,000.00	1 Dokumen	195,934,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3,780,000.00	1 Dokumen	3,780,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	24,680,000.00	1 Dokumen	24,680,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	16,440,000.00	12 Dokumen	16,440,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	12,720,000.00		12,720,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	89,520,000.00	12 Dokumen	89,520,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	234,680,212.00	24 Dokumen	234,680,212.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3,680,000.00	1 Dokumen	3,680,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000.00	1 Dokumen	1,140,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000.00	12 Dokumen	24,000,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**7,220,000.00**	**-**	**7,220,000.00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	7,220,000.00	100 % 100 %	7,220,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	7,220,000.00	2 Dokumen	7,220,000.00
		PUSKESMAS JERUK				**1,935,781,629.00**		**1,935,781,629.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,935,781,629.00**		**1,935,781,629.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,935,781,629.00**		**1,935,781,629.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,244,939,519.00**	**-**	**1,244,939,519.00**

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	1,244,939,519.00	56 % 56 %	1,244,939,519.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,244,939,519.00	25 Unit Kerja	1,244,939,519.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**679,662,110.00**	**-**	**679,662,110.00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10 % 100 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.046 % 62 % 3 % 95.6 % 22 % 40 % 4.50 % 1.56 % 90.10 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 1.15 per 1000 kelahiran hidup 6.15 per 1000 kelahiran hidup 8.54 % 100 % 1.56 % 4.50 % 40.00 % 22 % 13 %	-	679,662,110.00	85.53 % 91.86 % 152.38 % 4 % 0 % 0 % 0.050 % 66 % 2.6 % 95.4 % 18 % 30 % 4.54 % 1.60 % 85.53 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 6.19 per 1000 kelahiran hidup 6.19 per 1000 kelahiran hidup 12.14 % 100 % 1.60 % 4.54 % 30.00 % 18 % 15 %	679,662,110.00

				62 per 100.000 penduduk 0.046 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 100 % 7.32 per 1000 kelahiran hidup			66 per 100.000 penduduk 0.050 per 1.000 penduduk 0 % 0 % 4 % 152.38 % 100 % 91.86 % 7.36 per 1000 kelahiran hidup	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	195 Orang	36,000,000.00	5057 Orang	36,000,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2129 Orang	60,240,000.00		60,240,000.00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	34 Orang	9,360,000.00	992 Orang	9,360,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	189 Orang	13,800,000.00	3500 Orang	13,800,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	170,860,000.00	1 Dokumen	170,860,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,760,000.00	1 Dokumen	5,760,000.00

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	29,040,000.00	1 Dokumen	29,040,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	15,240,000.00	12 Dokumen	15,240,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	11,760,000.00		11,760,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	73,140,000.00	12 Dokumen	73,140,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	223,302,110.00	24 Dokumen	223,302,110.00
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3,680,000.00	1 Dokumen	3,680,000.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720,000.00	1 Dokumen	720,000.00
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	20,760,000.00	12 Dokumen	20,760,000.00
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**11,180,000.00**	**-**	**11,180,000.00**

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %	-	11,180,000.00	100 % 100 %	11,180,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	11,180,000.00	2 Dokumen	11,180,000.00
RSUD DR. DARSONO						**119,788,800,000.00**		**119,788,800,000.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**119,788,800,000.00**		**119,788,800,000.00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**119,788,800,000.00**		**119,788,800,000.00**
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**112,000,000,000.00**	**-**	**112,000,000,000.00**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60 % 60 %	-	112,000,000,000.00	56 % 56 %	112,000,000,000.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	112,000,000,000.00	25 Unit Kerja	112,000,000,000.00
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**6,000,000,000.00**	**-**	**6,000,000,000.00**

	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95,60 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 %	-	6,000,000,000.00	100 % 0 % 100 % 95.83 % 100 % 95.83 % 100 % 100 % 95,40 % 100 % 100 % 0 % 100 % 99 %	6,000,000,000.00
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	26 Unit	2 Unit	1,385,620,000.00	26 Unit	1,385,620,000.00
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	4,614,380,000.00	1 Unit	4,614,380,000.00
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**1,788,800,000.00**	**-**	**1,788,800,000.00**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	95 % 95 % 91 % 91 %	-	1,788,800,000.00	91 % 91 % 87.50 % 87.50 %	1,788,800,000.00
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						

			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2700 Orang	65 Orang	1,788,800,000.00	2300 Orang	1,788,800,000.00
	J U M L A H					**332,852,939,774.73**		**348,466,931,588.56**

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN

dr. DARU MUSTIKOAJI
Pembina Tk I
NIP. 19730628 200604 1 005

F. PENELAAHAN UNSUR PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dari kegiatan Musrenbang yang dibahas dalam forum perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pengadaan Alkes Pustu Desa Watupatok Bandar	Desa Watupatok Kecamatan Bandar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
2	Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Nawangan	Desa Nawangan, Nawangan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
3	Pengadaan Prasarana Puskesmas Paving Puskesmas Pringkuku	Dusun Bulu Desa Ngadirejan Kecamatan Prngkuku, Kab. Pacitan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
4	Pembangunan Pustu Desa Gemaharjo, kecamatan tegalombo	RT 08 RW 16 Dusun Bulusari	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
5	Rehabilitasi Puskesmas Gemaharjo	Desa Gemaharjo, Kecamatan Nawangan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
6	Pengadaan Alkes Pustu Desa Klepu Kecamatan Sudimoro	Desa Klepu, Kab. Pacitan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
7	Rehabilitasi Pustu Klepu Sudimoro	Desa Klepu, Kab. Pacitan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
8	Pembangunan Pustu Desa Tegalombo	Dusun Bari Desa Tegalombo, Kab. Pacitan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
9	Pengadaan Alkes Pustu Karangmulyo Sudimoro	Karangmulyo Sudimoro	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
10	Rehabilitasi Pustu Kebonsari Punung	Desa Kebonsari Punung	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
11	Pengadaan Alkes Pustu Kebonsari Punung	Desa Kebonsari Punung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
12	Pembangunan Pustu Mujing Nawangan	Desa Mujing kecamatan Nawangan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
13	Rehabilitasi Pustu Sudimoro	Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
14	Pembangunan Pustu Ploso Gemaharjo	Ploso Gemaharjo Kecamatan Tegalombo	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
15	Pengadaan Alkes Pustu Pagerlor Sudimoro	Pagerlor Sudimoro	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
16	Pembangunan Pustu Pagerlor Sudimoro	Pagerlor Sudimoro	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
17	Rehabilitasi Pustu Sanggrahan Kebonagung	Sanggrahan Kebonagung	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	

BAB III
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD propinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel III.1.

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

KABUPATEN PACITAN

NO	KEBIJAKAN NASIONAL/PROPINSI	SUMBER	KETERANGAN
A	NASIONAL	APBN	
	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;		
	percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda		
	peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit		
	pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);		
B	PROPINSI JAWA TIMUR		
	PROGRAM IKON GUBERNUR	APBD Prop.	Bantuan Keuangan
	Percepatan penurunan kematian ibu dan anak		
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan		
	Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui		
	Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan.		
	Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan		

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN

1. TUJUAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Bahagia

3.1.1 SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 – 2026 adalah :

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan.

Sedangkan target indikator sasaran untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025	SATUAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan kepada masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,48	%
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	90	Indeks

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ada ada 1 Program Wajib dan 4 program kesehatan, sebagai berikut :

Program Wajib semua OPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2. KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan jajaran pendukungnya yang diusulan untuk dibiayai dari APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melaksanakan 5 Program dan 21 kegiatan pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp.332,344,887,554.40 Rencana Program dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATANKAB. PACITAN
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16
						Dinas Kesehatan				140.294.693.004,00				148.113.027.197,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				140.294.693.004,00				148.113.027.197,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				140.294.693.004,00				148.113.027.197,00
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	96.417.457.509,10			-	96.600.892.197,00
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100% 100%	-	324.872.541,10			100% 100%	350.000.000,00
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	15 Dokumen	137.944.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28 Dokumen	150.000.000,00
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	28 Laporan	186.928.541,10	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	200.000.000,00
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100% 100%	-	94.554.328.493,00			100% 100%	93.755.892.197,00
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	94.302.328.493,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1400 Orang/bulan	93.475.892.197,00
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	124.812.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	150.000.000,00
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	10.000.000,00
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	117.187.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	120.000.000,00
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100% 100%	-	90.100.000,00			100% 100%	100.000.000,00
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	24 Laporan	90.100.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Laporan	100.000.000,00
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100% 100%	-	31.380.000,00			100% 100%	35.000.000,00
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	31.380.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	35.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% 100%	-	486.070.300,00			100% 100%	540.000.000,00
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	125.896.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	140.000.000,00
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.025.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	50.000.000,00
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	315.149.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Laporan	350.000.000,00
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100% 100%	-	14.862.900,00			100% 100%	350.000.000,00
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	100.000.000,00
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2 Unit	14.862.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	250.000.000,00
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% 100%	-	509.013.675,00			100% 100%	560.000.000,00
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	450.030.075,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	500.000.000,00
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	58.983.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	60.000.000,00
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% 100%	-	406.829.600,00			100% 100%	910.000.000,00
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 Unit	59 Unit	311.413.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	59 Unit	310.000.000,00
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	45.400.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit	50.000.000,00
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.016.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	550.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	35.583.054.094,90			-	44.575.000.000,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,60% 100% 100% 0% 100% 100%	-	9.107.001.400,00			100% 0% 100% 95.83% 100% 95.83% 100% 100% 95,40% 100% 100% 0% 100% 99%	17.730.000.000,00
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	2 Unit	8.000.000.000,00
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	480 Unit	10 Unit	2.600.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	384 Unit	1.500.000.000,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	26 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	26 Unit	500.000.000,00
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	24 Unit	99.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	80 Unit	110.000.000,00
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	24 Paket	6.000.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	25 Paket	7.500.000.000,00
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	25 Paket	288 Paket	108.001.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	25 Paket	120.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	26.228.552.694,90			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	26.570.000.000,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	4961 Orang	27.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5057 Orang	130.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	4961 Orang	18.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5057 Orang	20.000.000,00
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5045 Orang	4901 Orang	27.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	4997 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26519 Orang	27821 Orang	220.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	26947 Orang	130.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		64980 Orang	45.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	331695 Orang	327695 Orang	70.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	331695 Orang	100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108763 Orang	108763 Orang	27.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	108763 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123862 Orang	114281 Orang	22.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	120668 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10076 Orang	10017 Orang	22.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	10055 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	973 Orang	27.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	992 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	4980 Orang	27.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3500 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6994 Orang	6984 Orang	27.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	6990 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	67.500.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	75.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	75.000.000,00
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	12 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	80.976.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	12 Dokumen	60.000.000,00
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1 Dokumen	23.983.576.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT),	12 Dokumen	24.070.000.000,00
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	1 Dokumen	112.500.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	9 Dokumen	150.000.000,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	3 Dokumen	785.000.674,90	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	24 Dokumen	900.000.000,00
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	12 Dokumen	300.000.000,00
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	179.999.920,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Unit	200.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	53.998.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	12 Dokumen	60.000.000,00
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	0,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	94% 79% 94.00% 79.00%	-	157.500.000,00			81% 67% 81.00% 67.00%	175.000.000,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	157.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	12 Dokumen	175.000.000,00
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	96% 88% 88% 96% 100% 100%	-	90.000.000,00			92% 83% 83% 92% 100% 100%	100.000.000,00
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	27 Unit	24 Unit	45.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	27 Unit	50.000.000,00
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit	30 Unit	45.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	30 Unit	50.000.000,00
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	6.440.675.400,00			-	5.117.135.000,00
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	95% 95% 91% 91%	-	1.809.046.400,00			91% 91% 87.50% 87.50%	93.900.000,00
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	10.012.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	12 Dokumen	10.000.000,00
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2700 Orang	9 Orang	1.749.014.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2300 Orang	33.900.000,00
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	1 Dokumen	50.020.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	75% 75%	-	4.631.629.000,00			40% 40%	5.023.235.000,00
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	100 Orang	4.631.629.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	250 Orang	5.023.235.000,00
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	402.206.000,00			-	150.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	90% 90%	-	25.000.000,00			90% 90%	25.000.000,00
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	10 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	70% 70% 78%	-	269.089.000,00			40% 40% 75%	25.000.000,00
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	1 Dokumen	269.089.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	100 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	78% 78%	-	108.117.000,00			75% 75%	100.000.000,00
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	100 Unit	108.117.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	80 Unit	100.000.000,00
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.451.300.000,00			-	1.670.000.000,00
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	29.94% 29.94%	-	1.118.300.000,00			22.14% 22.14%	1.300.000.000,00
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	1 Dokumen	1.118.300.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	4 Dokumen	1.300.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	32.30% 32.30%	-	315.000.000,00			31.30% 31.30%	350.000.000,00
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2 Dokumen	350.000.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	18.000.000,00			100% 100%	20.000.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2 Dokumen	20.000.000,00
						Puskesmas Pacitan				2.300.882.171,00				2.069.676.678,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.300.882.171,00				2.069.676.678,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.300.882.171,00				2.069.676.678,00
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.541.528.130,00			-	1.290.322.637,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.541.528.130,00			56% 56%	1.290.322.637,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.541.528.130,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.290.322.637,00
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	750.784.041,00			-	770.784.041,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	750.784.041,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	770.784.041,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	235 Orang	48.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	48.800.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3612 Orang	34.560.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		34.560.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	41 Orang	5.040.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	251 Orang	4.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	211.360.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	211.360.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.940.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.940.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	28.800.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	11.520.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	107.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	107.400.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	224.144.041,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	244.144.041,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	1 Dokumen	4.680.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	4.680.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	9.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.200.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	900.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	27.840.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	27.840.000,00
8	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.570.000,00			-	8.570.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	8.570.000,00			100% 100%	8.570.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8.570.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	8.570.000,00
						Puskesmas Tanjungsari				4.066.993.986,00				3.524.104.075,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.066.993.986,00				3.524.104.075,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.066.993.986,00				3.524.104.075,00
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.728.706.459,00			-	2.218.816.548,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.728.706.459,00			56% 56%	2.218.816.548,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.728.706.459,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	2.218.816.548,00
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.328.747.527,00			-	1.295.747.527,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	1.328.747.527,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	1.295.747.527,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	475 Orang	61.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	61.800.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8397 Orang	63.960.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		63.960.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	93 Orang	11.520.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	337 Orang	27.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	27.600.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	413.980.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	413.980.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.220.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.220.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	28.200.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	74.640.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	74.640.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	146.940.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	146.940.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	382.061.527,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	349.061.527,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	1 Dokumen	14.426.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	14.426.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	26.100.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	26.100.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	900.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	50.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	50.400.000,00
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.540.000,00			-	9.540.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.540.000,00			100% 100%	9.540.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.540.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.540.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Puskesmas Kebonagung				2.658.822.114,00				2.399.673.688,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.658.822.114,00				2.399.673.688,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.658.822.114,00				2.399.673.688,00
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.821.300.269,00			-	1.547.151.843,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.821.300.269,00			56% 56%	1.547.151.843,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.821.300.269,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.547.151.843,00
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	825.883.845,00			-	840.883.845,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	825.883.845,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	840.883.845,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	229 Orang	20.160.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	20.160.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2803 Orang	26.160.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		26.160.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	41 Orang	8.400.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	8.400.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	251 Orang	12.480.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	12.480.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	257.460.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	257.460.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.800.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	25.800.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	26.520.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	26.520.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	12.240.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12.240.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	97.260.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	97.260.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	237.643.845,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	252.643.845,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	60.480.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	60.480.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	720.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.240.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	12.240.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	22.320.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	22.320.000,00
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	11.638.000,00			-	11.638.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	11.638.000,00			100% 100%	11.638.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	11.638.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	11.638.000,00
						Puskesmas Ketrowonojoyo				1.843.950.789,52				1.767.955.500,01
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.843.950.789,52				1.767.955.500,01
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.843.950.789,52				1.767.955.500,01
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.127.921.730,52			-	1.031.926.441,01
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.127.921.730,52			56% 56%	1.031.926.441,01
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.127.921.730,52	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.031.926.441,01
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	708.469.059,00			-	728.469.059,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	708.469.059,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	728.469.059,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	161 Orang	20.200.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	20.200.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2161 Orang	24.600.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		24.600.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	31 Orang	12.240.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	12.240.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	201 Orang	8.520.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	8.520.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	237.120.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	237.120.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4.320.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.320.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.680.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	19.680.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	11.880.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	11.880.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	1.440.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	113.040.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	113.040.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	215.989.059,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	235.989.059,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	6.440.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.440.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	720.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	26.880.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	26.880.000,00
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	7.560.000,00			-	7.560.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	7.560.000,00			100% 100%	7.560.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	7.560.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	7.560.000,00
						Puskesmas Arjosari				4.401.019.972,39				3.712.705.134,53
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.401.019.972,39				3.712.705.134,53
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.401.019.972,39				3.712.705.134,53
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.285.425.712,39			-	2.582.110.874,53

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	3.285.425.712,39			56% 56%	2.582.110.874,53
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.285.425.712,39	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	2.582.110.874,53
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.105.916.260,00			-	1.120.916.260,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	1.105.916.260,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	1.120.916.260,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	268 Orang	88.800.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	88.800.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	72.120.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	331695 Orang	3463 Orang	0,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	331695 Orang	72.120.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	50 Orang	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	268 Orang	10.200.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	10.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	364.236.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	364.236.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.880.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.200.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	37.200.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	40.620.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	40.620.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	24.000.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		24.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	101.980.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	101.980.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	297.280.260,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	312.280.260,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.040.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	11.040.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	360.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.480.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.480.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	38.520.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	38.520.000,00
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.678.000,00			-	9.678.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.678.000,00			100% 100%	9.678.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.678.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.678.000,00
						Puskesmas Kedungbendo				1.267.417.337,00				1.125.967.831,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.267.417.337,00				1.125.967.831,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.267.417.337,00				1.125.967.831,00
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	555.231.820,00			-	509.782.314,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	555.231.820,00			56% 56%	509.782.314,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	555.231.820,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	509.782.314,00
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	702.885.517,00			-	606.885.517,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	702.885.517,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	606.885.517,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	100 Orang	24.400.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	24.400.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		903 Orang	34.800.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		34.800.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	15 Orang	10.800.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	10.800.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	91 Orang	9.240.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	9.240.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	132.800.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	132.800.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.160.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.760.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	29.760.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	16.800.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	8.640.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	114.320.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	114.320.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	298.125.517,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	202.125.517,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	360.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	10.080.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
23	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.300.000,00			-	9.300.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.300.000,00			100% 100%	9.300.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.300.000,00
						Puskesmas Punung				2.989.765.779,00				2.351.564.424,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.989.765.779,00				2.351.564.424,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.989.765.779,00				2.351.564.424,00
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.210.459.664,00			-	1.552.258.309,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.210.459.664,00			56% 56%	1.552.258.309,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.210.459.664,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.552.258.309,00
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	762.786.115,00			-	782.786.115,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	762.786.115,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	782.786.115,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	209 Orang	52.200.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	52.200.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2434 Orang	58.860.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		58.860.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	36 Orang	5.040.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	139 Orang	9.720.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	9.720.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	222.222.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	222.222.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4.860.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.860.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.980.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.980.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	26.760.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	26.760.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	17.760.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		17.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	100.980.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	100.980.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	220.524.115,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	240.524.115,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	8.280.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.280.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	360.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.880.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.880.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12.360.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	12.360.000,00
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	16.520.000,00			-	16.520.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	16.520.000,00			100% 100%	16.520.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	16.520.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	16.520.000,00
						Puskesmas Gondosari				1.996.526.796,73				1.993.214.052,53
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				498.196.912,00				518.196.912,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				498.196.912,00				518.196.912,00
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	489.816.912,00			-	509.816.912,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	489.816.912,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	509.816.912,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	91 Orang	36.960.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	36.960.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1451 Orang	22.560.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		22.560.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	26 Orang	18.000.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	127 Orang	12.120.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	12.120.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	102.888.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	102.888.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.300.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.400.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	22.400.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	23.520.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	23.520.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	5.760.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	43.120.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	43.120.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	170.988.912,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	190.988.912,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	8.960.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.960.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	120.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.600.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	8.520.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	8.520.000,00
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.380.000,00			-	8.380.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	8.380.000,00			100% 100%	8.380.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8.380.000,00	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	8.380.000,00
	X					NON URUSAN				1.498.329.884,73				1.475.017.140,53
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				1.498.329.884,73				1.475.017.140,53
29	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.498.329.884,73			-	1.475.017.140,53
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.498.329.884,73			56% 56%	1.475.017.140,53
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.498.329.884,73	Kab. Pacitan, Punung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.475.017.140,53

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Puskesmas Pringkuku				1.875.400.857,00				1.702.149.231,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.875.400.857,00				1.702.149.231,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.875.400.857,00				1.702.149.231,00
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.186.280.142,00			-	1.077.127.983,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.186.280.142,00			56% 56%	1.077.127.983,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.186.280.142,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.077.127.983,00
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	676.400.715,00			-	612.301.248,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	676.400.715,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	612.301.248,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	161 Orang	23.040.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	23.040.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2320 Orang	23.760.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		23.760.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	34 Orang	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	167 Orang	10.320.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	10.320.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	204.720.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	204.720.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.980.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.320.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	25.320.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	21.132.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	21.132.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	13.920.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		13.920.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	104.760.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	104.760.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	210.308.715,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	146.209.248,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	7.680.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.680.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	360.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.120.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.120.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12.780.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	12.780.000,00
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	12.720.000,00			-	12.720.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	12.720.000,00			100% 100%	12.720.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	12.720.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	12.720.000,00
						Puskesmas Candi				1.420.880.729,66				1.275.957.286,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.420.880.729,66				1.275.957.286,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.420.880.729,66				1.275.957.286,00
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	797.240.645,66			-	700.317.202,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	797.240.645,66			56% 56%	700.317.202,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	797.240.645,66	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	700.317.202,00
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	614.940.084,00			-	566.940.084,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	614.940.084,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	566.940.084,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	104 Orang	37.420.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	37.420.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1272 Orang	27.720.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		27.720.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	20 Orang	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	123 Orang	4.080.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	4.080.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	130.560.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	130.560.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.880.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	16.800.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	14.480.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	14.480.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	18.000.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							0	12 Dokumen	1 0	77.590.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	77.590.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	246.646.084,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	198.646.084,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	12.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	724.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	724.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12.840.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	12.840.000,00
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.700.000,00			-	8.700.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	8.700.000,00			100% 100%	8.700.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8.700.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	8.700.000,00
						Puskesmas Donorojo				2.746.397.386,59				2.113.072.496,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.746.397.386,59				2.113.072.496,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.746.397.386,59				2.113.072.496,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.050.900.323,59			-	1.397.575.433,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.050.900.323,59			56% 56%	1.397.575.433,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.050.900.323,59	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.397.575.433,00
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	682.277.063,00			-	702.277.063,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	682.277.063,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	702.277.063,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	176 Orang	47.600.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	47.600.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2469 Orang	32.520.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		32.520.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	36 Orang	8.640.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	134 Orang	5.760.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	190.350.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	190.350.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.960.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	21.000.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	16.080.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		16.080.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	79.980.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	79.980.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	219.267.063,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	239.267.063,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.840.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.840.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	360.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	12.120.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	12.120.000,00
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	13.220.000,00			-	13.220.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	13.220.000,00			100% 100%	13.220.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	13.220.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	13.220.000,00
						Puskesmas Kalak				1.484.763.912,51				1.504.439.791,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.484.763.912,51				1.504.439.791,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.484.763.912,51				1.504.439.791,00
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	828.371.701,51			-	848.047.580,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	828.371.701,51			56% 56%	848.047.580,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	828.371.701,51	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	848.047.580,00
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	642.652.211,00			-	642.652.211,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	642.652.211,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	642.652.211,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	117 Orang	62.400.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	62.400.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1625 Orang	27.960.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		27.960.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	26 Orang	9.360.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	121 Orang	11.520.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	164.902.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	164.902.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.220.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.220.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	11.520.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	4.080.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4.080.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	101.460.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	101.460.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	207.530.211,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	207.530.211,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	10.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.140.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.720.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.720.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	13.800.000,00
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	13.740.000,00			-	13.740.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	13.740.000,00			100% 100%	13.740.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	13.740.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	13.740.000,00
						Puskesmas Ngadirojo				5.296.718.773,93				22.479.067.653,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.066.214.601,00				1.081.214.601,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.066.214.601,00				1.081.214.601,00
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.056.674.601,00			-	1.071.674.601,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	1.056.674.601,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	1.071.674.601,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	263 Orang	55.440.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	55.440.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3758 Orang	53.280.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		53.280.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	51 Orang	8.640.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	300 Orang	6.000.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	391.700.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	391.700.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	8.820.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.820.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.960.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.960.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	27.360.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	27.360.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	19.200.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		19.200.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	93.240.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	93.240.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	299.295.601,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	314.295.601,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	26.640.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	26.640.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	579.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	579.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.880.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.880.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	38.640.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	38.640.000,00
43	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.540.000,00			-	9.540.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.540.000,00			100% 100%	9.540.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.540.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.540.000,00
	X					NON URUSAN				4.230.504.172,93				21.397.853.052,00
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.230.504.172,93				21.397.853.052,00
44	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.230.504.172,93			-	21.397.853.052,00
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	4.230.504.172,93			56% 56%	21.397.853.052,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.230.504.172,93	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	21.397.853.052,00
						Puskesmas Wonokarto				1.685.078.322,24				1.366.892.168,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.685.078.322,24				1.366.892.168,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.685.078.322,24				1.366.892.168,00
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.055.996.483,24			-	765.810.329,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.055.996.483,24			56% 56%	765.810.329,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.055.996.483,24	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	765.810.329,00
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	620.261.839,00			-	592.261.839,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	620.261.839,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	592.261.839,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	140 Orang	32.280.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	32.280.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1696 Orang	29.880.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		29.880.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	24 Orang	8.400.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	8.400.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	173 Orang	10.680.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	10.680.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	154.620.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	154.620.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.300.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	27.285.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	27.285.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	11.760.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	71.058.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	71.058.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	233.218.839,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	205.218.839,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.580.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.580.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.120.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.120.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	14.640.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	14.640.000,00
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.820.000,00			-	8.820.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	8.820.000,00			100% 100%	8.820.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8.820.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	8.820.000,00
						Puskesmas Tulakan				6.645.898.706,01				6.006.191.910,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.645.898.706,01				6.006.191.910,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				6.645.898.706,01				6.006.191.910,00
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.383.970.115,01			-	4.777.263.319,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	5.383.970.115,01			56% 56%	4.777.263.319,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.383.970.115,01	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	4.777.263.319,00
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.252.388.591,00			-	1.219.388.591,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	1.252.388.591,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	1.219.388.591,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	482 Orang	63.440.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	63.440.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5570 Orang	35.940.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		35.940.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	106 Orang	8.640.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	537 Orang	24.120.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	24.120.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	434.418.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	434.418.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	19.800.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	25.440.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	25.440.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	36.720.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		36.720.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	159.360.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	159.360.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	368.550.591,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	335.550.591,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	13.440.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.440.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.200.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	48.960.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	48.960.000,00
50	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.540.000,00			-	9.540.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.540.000,00			100% 100%	9.540.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.540.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.540.000,00
						Puskesmas Bubakan				3.369.833.525,10				3.129.696.399,49
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.369.833.525,10				3.129.696.399,49
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.369.833.525,10				3.129.696.399,49
51	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.549.864.021,10			-	2.294.726.895,49
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.549.864.021,10			56% 56%	2.294.726.895,49
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.549.864.021,10	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	2.294.726.895,49
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	811.629.504,00			-	826.629.504,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	811.629.504,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	826.629.504,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	273 Orang	43.400.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	43.400.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2771 Orang	32.280.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		32.280.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	35 Orang	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	177 Orang	11.760.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	11.760.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	236.490.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	236.490.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.220.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.220.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.300.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	23.880.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	23.880.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	15.840.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		15.840.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	142.620.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	142.620.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	234.039.504,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	249.039.504,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	540.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	540.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							0	1 Dokumen	1 0	3.480.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.480.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	40.980.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	40.980.000,00
53	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.340.000,00			-	8.340.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	8.340.000,00			100% 100%	8.340.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8.340.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	8.340.000,00
						Puskesmas Sudimoro				2.212.027.743,34				1.948.254.238,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.212.027.743,34				1.948.254.238,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.212.027.743,34				1.948.254.238,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
54	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.484.339.462,34			-	1.200.565.957,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.484.339.462,34			56% 56%	1.200.565.957,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.484.339.462,34	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	25 Unit Kerja	1.200.565.957,00
55	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	718.148.281,00			-	738.148.281,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	718.148.281,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	738.148.281,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	167 Orang	44.400.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	44.400.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2426 Orang	39.600.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		39.600.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	39 Orang	5.040.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	177 Orang	7.800.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	7.800.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	231.690.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	231.690.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.580.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.580.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.040.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	26.040.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	9.430.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	9.430.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	13.680.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		13.680.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	91.410.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	91.410.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	214.678.281,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	234.678.281,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.520.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.520.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	720.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.080.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	18.480.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	18.480.000,00
56	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.540.000,00			-	9.540.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.540.000,00			100% 100%	9.540.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.540.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.540.000,00
						Puskesmas Sukorejo				1.639.654.985,14				1.354.152.280,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.639.654.985,14				1.354.152.280,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.639.654.985,14				1.354.152.280,00
57	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.061.127.922,14			-	755.625.217,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.061.127.922,14			56% 56%	755.625.217,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.061.127.922,14	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	755.625.217,00
58	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	569.407.063,00			-	589.407.063,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	569.407.063,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	589.407.063,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	126 Orang	32.800.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	32.800.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1226 Orang	19.200.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		19.200.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	16 Orang	5.760.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	137 Orang	5.520.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	5.520.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	190.058.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	190.058.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.820.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.820.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.120.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.120.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	11.040.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	11.040.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	14.880.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		14.880.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	63.180.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	63.180.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	178.049.063,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	198.049.063,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.680.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.680.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	900.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.520.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.520.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	11.880.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	11.880.000,00
59	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.120.000,00			-	9.120.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.120.000,00			100% 100%	9.120.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.120.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.120.000,00
						Puskesmas Tegalombo				4.200.255.454,00				3.820.259.294,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.200.255.454,00				3.820.259.294,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.200.255.454,00				3.820.259.294,00
60	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.358.056.768,00			-	2.963.060.608,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	3.358.056.768,00			56% 56%	2.963.060.608,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.358.056.768,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	2.963.060.608,00
61	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	832.398.686,00			-	847.398.686,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	832.398.686,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	847.398.686,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	275 Orang	47.600.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	47.600.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3045 Orang	56.280.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		56.280.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	60 Orang	8.520.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	8.520.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	289 Orang	16.200.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	16.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	234.390.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	234.390.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.880.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.960.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.960.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	18.960.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	18.960.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	3.600.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3.600.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	98.940.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	98.940.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	262.388.686,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	277.388.686,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	60 Orang	600.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	4 Orang	600.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.660.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	17.660.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	900.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.120.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.120.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	32.400.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	32.400.000,00
62	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.800.000,00			-	9.800.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	9.800.000,00			100% 100%	9.800.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.800.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	9.800.000,00
						Puskesmas Gemaharjo				3.477.095.319,00				2.297.376.856,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.477.095.319,00				2.297.376.856,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.477.095.319,00				2.297.376.856,00
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.808.485.692,00			-	1.613.767.229,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.808.485.692,00			56% 56%	1.613.767.229,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.808.485.692,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.613.767.229,00
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	660.009.627,00			-	675.009.627,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	660.009.627,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	675.009.627,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	127 Orang	29.600.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	29.600.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1965 Orang	24.840.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		24.840.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	29 Orang	5.040.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	141 Orang	10.080.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	10.080.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	203.092.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	203.092.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.200.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	15.720.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	15.720.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	10.320.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10.320.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	99.300.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	99.300.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	215.797.627,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	230.797.627,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.680.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.680.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							0	1 Dokumen	1 0	540.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	540.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	20.640.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	20.640.000,00
65	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.600.000,00			-	8.600.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	8.600.000,00			100% 100%	8.600.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8.600.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	8.600.000,00
						Puskesmas Nawangan				3.139.968.110,35				3.309.438.014,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.139.968.110,35				3.309.438.014,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.139.968.110,35				3.309.438.014,00
66	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.358.864.703,35			-	2.561.334.607,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.358.864.703,35			56% 56%	2.561.334.607,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.358.864.703,35	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	2.561.334.607,00
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	772.143.407,00			-	739.143.407,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	772.143.407,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	739.143.407,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	221 Orang	20.600.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	20.600.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2699 Orang	28.560.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		28.560.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	48 Orang	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	249 Orang	18.000.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	268.440.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	268.440.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	4.620.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.620.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.920.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	16.920.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	18.060.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	18.060.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	51.360.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	51.360.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	295.023.407,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	262.023.407,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.680.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.680.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.680.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	25.200.000,00
68	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.960.000,00			-	8.960.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	8.960.000,00			100% 100%	8.960.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	8.960.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	8.960.000,00
						Puskesmas Pakisbaru				2.914.832.379,63				2.453.634.187,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.914.832.379,63				2.453.634.187,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.914.832.379,63				2.453.634.187,00
69	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.256.125.404,63			-	1.774.927.212,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.256.125.404,63			56% 56%	1.774.927.212,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.256.125.404,63	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.774.927.212,00
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	650.726.975,00			-	670.726.975,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	650.726.975,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	670.726.975,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	198 Orang	29.280.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	29.280.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2251 Orang	28.920.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		28.920.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	40 Orang	10.080.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	10.080.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	165 Orang	8.280.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	8.280.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	156.680.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	156.680.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.400.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	24.400.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	10.440.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	10.440.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	21.120.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		21.120.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	87.480.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	87.480.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	226.566.975,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	246.566.975,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.680.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.680.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	720.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	35.280.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	35.280.000,00
71	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	7.980.000,00			-	7.980.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	7.980.000,00			100% 100%	7.980.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	7.980.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	7.980.000,00
						Puskesmas Bandar				2.839.856.211,28				2.537.779.576,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.839.856.211,28				2.537.779.576,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.839.856.211,28				2.537.779.576,00
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.081.901.999,28			-	1.812.825.364,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	2.081.901.999,28			56% 56%	1.812.825.364,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.081.901.999,28	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.812.825.364,00
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	750.734.212,00			-	717.734.212,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	750.734.212,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	717.734.212,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	168 Orang	29.440.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	29.440.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2534 Orang	59.160.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		59.160.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	36 Orang	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	156 Orang	12.360.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	12.360.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	195.934.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	195.934.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3.780.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.780.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.680.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	24.680.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	16.440.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	16.440.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	12.720.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12.720.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	89.520.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	89.520.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	267.680.212,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	234.680.212,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.680.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.680.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.140.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	24.000.000,00
74	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	7.220.000,00			-	7.220.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	7.220.000,00			100% 100%	7.220.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	7.220.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	7.220.000,00
						Puskesmas Jeruk				2.074.900.788,98				1.935.781.629,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.074.900.788,98				1.935.781.629,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.074.900.788,98				1.935.781.629,00
75	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.404.058.678,98			-	1.244.939.519,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	60% 60%	-	1.404.058.678,98			56% 56%	1.244.939.519,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.404.058.678,98	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	1.244.939.519,00
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	659.662.110,00			-	679.662.110,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	90.10% 100% 152.38% 4% 0% 0% 0.046% 62% 3% 95.6% 22% 40% 4.50% 1.56% 90.10% 7.32 per 1000 kelahiran hidup 8.54% 1.15per 1000 kelahiran hidup 6.15per 1000 kelahiran hidup 8.54% 100% 1.56% 4.50% 40.00% 22% 13% 62per 100.000 penduduk 0.046per 1.000 penduduk	-	659.662.110,00			85.53% 91.86% 152.38% 4% 0% 0% 0.050% 66% 2.6% 95.4% 18% 30% 4.54% 1.60% 85.53% 7.36 per 1000 kelahiran hidup 12.14% 6.19per 1000 kelahiran hidup 6.19per 1000 kelahiran hidup 12.14% 100% 1.60% 4.54% 30.00% 18% 15% 66per 100.000 penduduk 0.050per 1.000 penduduk	679.662.110,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5105 Orang	195 Orang	36.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5057 Orang	36.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2129 Orang	60.240.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		60.240.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1003 Orang	34 Orang	9.360.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	992 Orang	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	189 Orang	13.800.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3500 Orang	13.800.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	170.860.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	170.860.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.040.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	29.040.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	15.240.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 Orang	11.760.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	73.140.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	73.140.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1 Dokumen	203.302.110,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	24 Dokumen	223.302.110,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.680.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.680.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	720.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	1 Dokumen	20.760.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	20.760.000,00
77	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	11.180.000,00			-	11.180.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%	-	11.180.000,00			100% 100%	11.180.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	11.180.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	11.180.000,00
										110.000.000.000				
						Peningkatan Pelayanan BLUD		40 % 60 %					56 % 56 %	112.000.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	1	02	01	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1 Unit Kerja	110.000.000.000	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	25 Unit Kerja	112.000.000.000
	1	02	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				11,712,452,400.00			-	6,000,000,000.00
	1	02	01	2.2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95,60 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 %	-	11,712,452,400.00			100 % 0 % 100 % 95.83 % 100 % 95.83 % 100 % 100 % 95,40 % 100 % 100 % 0 % 100 % 99 %	6,000,000,000.00
	1	02	01	2.2	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	26 Unit	2 Unit	-	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	-	26 Unit	1,385,620,000.00
	1	02	01	2.2	0022	Pengembangan Rumah Sakit								
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	11,712,452,400.00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1 Unit	4,614,380,000.00
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1,788,800,000.00			-	1,788,800,000.00
	1	02	3	2.2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	95 % 95 % 91 % 91 %	95 % 95 % 91 % 91 %	1,788,800,000.00			91 % 91 % 87.50 % 87.50 %	1,788,800,000.00
	1	02	3	2.2	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2700 Orang	65 Orang	1,788,800,000.00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2300 Orang	1,788,800,000.00
	J U M L A H									**332,344,887,554.40**				**346,080,831,588.56**

PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun 2026.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target sasaran serta program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan diharapkan kegiatan–kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di bidang pelayanan kesehatan

Semoga Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

DINAS
PUPR

RENJA
2026

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pacitan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmatnya kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan selama tahun 2026 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan sasaran dan strategi kebijakan dan program kegiatan tahun 2026.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari Pimpinan dan Seluruh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai lembaga teknis di bidang Pekerjaaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pada Kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju arah perbaikan selanjutnya.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan ini dapat memberi warna bagi Perangkat Daerah di kabupaten Pacitan.

Pacitan, – 08 - 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUPARLAN, S.Sos, ST, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19670504 199202 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang no 25 tahun 2004 dan permendagri no 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan tahap penyusunan , tahap penyusunan rancangan, dan penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang Definitif.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang mengamanatkan untuk menyusun kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah peraturan pemerintah tersebut diundangkan dan Intruksi Mendagri Nomor 061/2911/ SJ Tahun 2016 Poin kedua mengintruksikan segera melakukan penyesuaian Dokumen rencana Pembangunan Daerah Sesuai dengan kelembagaan perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 18 Tahun 2016 maka Kabupaten Pacitan segera melaksanakan penyesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang diawali dengan melakukan Rencana Kerja.

1. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yakni ***"PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA"*** dan Misi ***"PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN MEMAJUKAN PARIWISATA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI"*** yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah berkurangnya beban pengeluaran masyarakat, berkurangnya kantong-kantong kemiskinan, membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing serta memajukan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terpeliharanya serta meningkatnya daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan untuk daerah yang berpeluang berkembang, berkurangnya prasarana jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi rusak berat dan sedang, tersedianya data jalan yang update sebagai bahan perencanaan dan pengambilan tindakan dalam penanganannya, meningkatnya kondisi sarana prasarana kebinamargaan yang difokuskan pada alat berat dan alat – alat ukur laboratorium, tercukupinya jaringan irigasi yang dibutuhkan, tersedianya data jaringan irigasi yang update sebagai bahan dalam perencanaan dan bahan tindakan penanganan, tersedianya kualitas dan kuantitas kondisi jalan perdesaan yang baik dan tersedianya kualitas dan kuantitas kondisi

jembatan perdesaan yang baik. Kebijakan dan strategi pembangunan bidang infrastruktur jalan dan sumber daya air pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya. Salah satu langkah utama adalah melakukan penabulasian terhadap kelompok zona pengembangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya menumbuhkan sikap profesionalisme serta kemandirian pada institusi dan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan prasarana.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran akhir dari RPJMD 2021-2026. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturasn Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 E);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan tahun 2026, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2026, meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN

  Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang landasan hukum, sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2026, Sehingga subtansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik serta maksud dan tujuan.

- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

  Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun lalu yang menjelaskan terkait capaian kinerja dan anggaran tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memeliki tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan telah dijabarkan ke dalam program pembangunan dan program prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan (RPJMD). Untuk itu diperlukan identifikasi berbagai permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam pencapaian misi Bupati di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

- BAB IV PENUTUP

  Kesimpulan dari Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2026. Tindak lanjut penanganan yang tepat sasaran.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis sampai dengan triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan Pekerjaan Umum mencakup pengelolaan sumber daya air, penanganan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan penataan ruang. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan adalah dalam upaya mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan 2021-2026. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam upaya mencapai sasaran strategis pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang baik, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemegang kegiatan. Faktor penghambat pencapaian kinerja yakni proses pengadaan barang jasa yang berubah. Tindak lanjut yang diperlukan adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, maka terdapat evaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun 2025.

Berikut disajikan tabel Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II.

Tabel 2.1

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwukan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	-2	-3		-4		-5		-6		-7		-8	
103.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**75,2**	**0**	**0.00**	**0**	**75.20**	**10.031.556.467,06**	**0**	**1.809.778.793,00**	**0**	**2.166.391.833,00**
103.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**0.00**	**0**	**23.00**	**696.089.200,06**	**3**	**33.257.419,00**	**5**	**31.491.128,00**
103.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12.00	0	0.00	0	12.00	98.277.000,00	3	21.269.419,00	15	0
103.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	158.817.200,00	3	6.580.000,00	15	19.655.828,00
103.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12.00	0	0.00	0	13.00	438.995.000,06	3	5.408.000,00	15	11.835.300,00
103.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59.00**	**6.208.107.967,00**	**3**	**1.356.513.467,00**	**27**	**1.502.243.546,00**
103.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58.00	0	0.00	0	58.00	6.051.390.967,00	58	1.334.613.467,00	0	1.502.243.546,00
		Jumlah laporan keuangan gaji dan tunjangan	Laporan	58.00	0	0.00	0	24.00		6		3	
103.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	58.00	0	0.00	0	12.00	156.717.000,00	2	21.900.000,00	2	0

103.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**Dokumen**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12.00**	**34.060.000,00**	**1**	**2.960.000,00**	**2**	**2.895.040,00**
103.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	34.060.000,00	1	2.960.000,00	2	2.895.040,00
103.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**2.055.143.227,00**	**0**	**358.343.076,00**	**30**	**465.776.637,00**
103.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	0	0.00	0	12.00	2.055.143.227,00	2	358.343.076,00	2	465.776.637,00
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0.00	0	0.00	0	122.00		1		10	
		Jumlah pegawai non ASN yang di kelola	Orang	0.00	0	0.00	0	71.00		71		0	
103.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**59.045.340,00**	**0**	**0**	**0**	**31.118.850,00**
103.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00	0	0.00	0	5	59.045.340,00	0	0	1	31.118.850,00
103.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**352.004.602,00**	**10,74**	**44.971.427,00**	**15**	**43.545.928,00**
103.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	256.822.850,00	3	35.860.027,00	2	40.943.770,00
103.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	0	0.00	0	5.00	95.181.752,00	0	9.111.400,00	1	2.602.158,00
103.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**80.00**	**627.106.131,00**	**0**	**13.733.404,00**	**0**	**89.320.704,00**
103.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64.00	0	0.00	0	64.00	349.363.845,00	0	13.733.404,00	4	28.152.616,00
103.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah laporan operasional Alat Besar	Laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	177.063.066,00	3	0	2	61.168.088,00
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15.00	0	0.00	0	15.00		0		2	
103.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	0	0.00	0	1	100.679.220,00	0	0	0	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pengadaan barang dan jasa yang belum efektif													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase tersedianya bangunan penampung air di daerah rawan kekeringan**	**%**	**80,56**	**0**	**0.00**	**3**	**71.30**	**10.920.000.000,00**	**57,41**	**379.602.409,00**	**0**	**1.260.913.090,00**

.		**Persentase luasan Daerah Irigasi dalam kondisi baik**	**%**	**69,59**		**0.00**	**3**	**67.49**		**65,85**		**0**	
103.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah**	**Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun**	**Unit**	**87.00**	**0**	**0.00**	**3**	**77.00**	**7.278.971.000,00**	**67**	**145.460.584,00**	**0**	**572.361.750,00**
103.02.2.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit	3.00	0	0.00	3	2.00	105.000.000,00	0	0	0	2.170.000,00
103.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	Km	3.00	0	0.00	0	2.54	2.090.426.000,00	0	87.958.584,00	0	330.711.000,00
103.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	3.00	0	0.00	0	4.00	75.000.000,00	0	13.575.000,00	3	9.000.000,00
103.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit	3.00	0	0.00	0	10.00	1.107.420.000,00	0	2.040.000,00	0	48.479.250,00
103.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	3.00	0	0.00	0	2.00	625.000.000,00	0	7.577.000,00	1	2.100.000,00
103.02.2.01.0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik	3.00	0	0.00	0	3.00	205.000.000,00	0	0	0	2.310.000,00
103.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	3.00	0	0.00	0	6.00	645.000.000,00	0	1.720.000,00	3	2.262.000,00
103.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	3.00	0	0.00	0	1.00	105.000.000,00	0	0	1	100.377.000,00
103.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	3.00	0	0.00	0	3.00	1.553.000.000,00	0	17.495.000,00	0	5.000.000,00
103.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	75.000.000,00	0	0	1	0
103.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	6.00	0	0.00	0	6.00	693.125.000,00	0	15.095.000,00	0	69.952.500,00
103.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah**	**Luas daerah irigasi dalam kondisi baik**	**Ha**	**5757.87**	**0**	**0.00**	**0**	**5584.12**	**3.641.029.000,00**	**5.448,00**	**234.141.825,00**	**0**	**688.551.340,00**
103.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	3.00	0	0.00	0	0.33	1.589.949.000,00	0	4.290.000,00	0	800.000,00
103.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	1.00	0	0.00	0	0.80	1.741.080.000,00	0	229.851.825,00	0	486.712.690,00

103.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	3.00	0	0.00	0	2.00	310.000.000,00	0	0	3	201.038.650,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Perubahan iklim, ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air, terutama pada musim kemarau													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota**	**%**	**81,4**	**0**	**0.00**	**0**	**80.40**	**2.367.000.000,00**	**80,33**	**174.996.800,00**	**0**	**7.419.500,00**
103.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten**	**Rumah Tangga**	**119883.00**	**0**	**0.00**	**0**	**118395.00**	**2.367.000.000,00**	**118.207,00**	**174.996.800,00**	**0**	**7.419.500,00**
103.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3.00	0	0.00	0	1.00	49.000.000,00	0	0	0	639.000,00
103.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	42.000.000,00	0	0	0	639.800,00
103.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	Liter/ detik	3.00	0	0.00	0	2.00	1.758.000.000,00	0	174.996.800,00	0	2.375.200,00
103.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Liter/ detik	0.10	0	0.00	0	0.10	131.000.000,00	0	0	0	1.437.100,00
103.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Unit	4.00	0	0.00	0	4.00	257.000.000,00	0	0	0	1.531.800,00
103.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	10.00	0	0.00	0	10.00	130.000.000,00	0	0	0	796.600,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan air bersih yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan dana untuk operasional, pemeliharaan, dan pengembangan SPAM													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase tersedianya bangunan sistem pengelolaan persampahan regional**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**1.633.000.000,00**	**0**	**180.000,00**	**0**	**13.420.700,00**
103.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah bangunan pengelolaan sampah yang dibangun/ dikembangkan**	**Unit**	**3.00**	**0**	**0.00**	**0**	**3.00**	**1.633.000.000,00**	**0**	**180.000,00**	**0**	**13.420.700,00**
103.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun	Ton/hari	0.50	0	0.00	0	0.50	1.633.000.000,00	0	180.000,00	0	13.420.700,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya infrastruktur bangunan persampahan yang memadai													

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**%**	**98,5**	**0**	**0.00**	**0**	**98.00**	**14.729.212.000,00**	**97,68**	**3.962.125,00**	**0**	**79.856.900,00**
103.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD**	**Rumah tangga**	**145068.00**	**0**	**0.00**	**0**	**144331.00**	**14.729.212.000,00**	**143.856,00**	**3.962.125,00**	**0**	**79.856.900,00**
103.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	3.00	0	0.00	0	297.00	14.729.212.000,00	0	3.962.125,00	0	79.856.900,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan sanitasi yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurang tersedianya anggaran untuk mencukupi fasilitas sanitasi di pelosok desa													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**	**%**	**84**	**0**	**0.00**	**0**	**82.00**	**2.973.000.000,00**	**81,1**	**251.312.452,00**	**0**	**298.716.944,00**
103.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Drainase Kota dalam Kondisi Baik**	**Meter**	**48661.55**	**0**	**0.00**	**0**	**52285.80**	**2.973.000.000,00**	**52.135,80**	**251.312.452,00**	**0**	**298.716.944,00**
103.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	3.00	0	0.00	0	2.00	2.281.000.000,00	0	251.312.452,00	0	297.184.144,00
103.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	3.00	0	0.00	0	2.00	650.000.000,00	0	0	0	815.800,00
103.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	42.000.000,00	0	0	0	717.000,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem drainase untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masalah finansial, kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk, dan kondisi lingkungan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung pemerintah kabupaten yang dibangun dan dipelihara sesuai standar bangunan gedung negara**	**%**	**88**	**0**	**0.00**	**0**	**86.80**	**4.883.140.000,00**	**85,75**	**24.284.000,00**	**85,9**	**258.690.112,00**
.		**Rasio Kepatuhan IMB/ PBG Kab./ Kota**	**%**	**87**		**0.00**	**0**	**86.50**		**0,05**		**86,2**	
103.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan**	**Jumlah dokumen PBG/SLF yang direkomendasi/ diterbitkan**	**Dokumen**	**70.00**	**0**	**0.00**	**0**	**70.00**	**4.883.140.000,00**	**11**	**24.284.000,00**	**9**	**258.690.112,00**

		Jumlah Gedung Pemerintah/ Sarana Prasarana yang Dibangun/ Direhab	**Unit**	**8.00**	**0**	**0.00**	**0**	**21.00**		**14**		**14,5**	
103.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	3.00	0	0.00	0	3.00	444.603.000,00	0	19.584.000,00	0,5	128.907.707,00
103.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	0	0.00	0	7.00	4.311.200.000,00	1	0	1	123.234.255,00
103.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penili	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pen	Dokumen	70.00	0	0.00	0	70.00	127.337.000,00	11	4.700.000,00	9	6.548.150,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Diperlukan segera pemeliharaan gedung pemerintah -Meningkatnya kesadaran masyarakat perlunya perijinan PBG/SLF													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Dalam tahap perencanaan - Kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses SIMBG													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah penataan kawasan yang dibangun**	**Unit**	**17**	**0**	**0.00**	**0**	**17.00**	**4.613.800.000,00**	**17**	**0**	**17**	**0**
103.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah**	**Jumlah kawasan yang ditata**	**Unit**	**17.00**	**0**	**0.00**	**0**	**17.00**	**4.613.800.000,00**	**17**	**0**	**17**	**0**
103.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	4.00	0	0.00	0	4.00	4.613.800.000,00	0	0	0	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Diperlukan penataan kawasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dalam tahap perencanaan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota**	**%**	**65,04**	**0**	**0.00**	**0**	**62.87**	**83.395.499.499,94**	**61,09**	**1.405.986.737,00**	**0**	**2.445.619.392,00**
103.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	**Km**	**893.60**	**0**	**0.00**	**0**	**863.80**	**83.395.499.499,94**	**839,35**	**1.405.986.737,00**	**0,07**	**2.445.619.392,00**
103.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3.00	0	0.00	0	2.00	745.147.500,00	2	0	0	188.300.400,00
103.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	3.00	0	0.00	0	7.00	11.469.035.000,23	0	5.780.000,00	0	570.454.086,00
103.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	3.00	0	0.00	0	2.00	49.522.541.999,68	0	4.811.737,00	0	2.880.000,00

103.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	1.00	0	0.00	0	1.00	200.000.000,67	0	0	0	640.000,00
103.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	3.00	0	0.00	0	5.00	4.133.512.507,07	0	0	0	1.440.000,00
103.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	3.00	0	0.00	0	1374.00	510.000.000,00	0	0	0	0
103.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	3.00	0	0.00	0	4.00	5.265.044.300,29	0	3.360.000,00	0	10.569.231,00
103.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	3.00	0	0.00	0	5.00	11.550.218.192,00	0	1.392.035.000,00	4,1	1.671.335.675,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antar lembaga terkait akan menghindari tumpang tindih dan mempercepat pelaksanaan program													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan sumber daya (manusia, peralatan, dan dana)													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisi s yang memiliki sertifikat kompetensi**	**%**	**67**	**0**	**0.00**	**0**	**66.00**	**53.060.000,00**	**65**	**3.600.000,00**	**65**	**0**
103.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)**	**Orang**	**15.00**	**0**	**0.00**	**0**	**20.00**	**53.060.000,00**	**0**	**3.600.000,00**	**0**	**0**
103.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	20.00	0	0.00	0	20.00	53.060.000,00	5	3.600.000,00	10	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Diperlukan tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dalam tahap perencanaan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN**	**Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang**	**%**	**89,5**	**0**	**0.00**	**0**	**89.00**	**1.690.000.000,00**	**0,06**	**13.356.634,00**	**88,9**	**500.016.150,00**
103.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RTRW/RRTR yang Dilaksanakan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan**	**Dokumen**	**4.00**	**0**	**0.00**	**0**	**4.00**	**545.000.000,00**	**0**	**4.309.684,00**	**0**	**153.951.850,00**
103.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4.00	0	0.00	0	4.00	545.000.000,00	0	4.309.684,00	0	153.951.850,00
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													
Predikat kinerja(%)													
103.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi**	**Dokumen**	**3.00**	**0**	**0.00**	**0**	**3.00**	**695.000.000,00**	**0**	**720.000,00**	**0**	**146.140.050,00**
103.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	0	0.00	0	3.00	365.000.000,00	0	0	0	0
103.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	3.00	0	0.00	0	3.00	330.000.000,00	0	720.000,00	0	146.140.050,00
103.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang**	**Dokumen**	**2.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2.00**	**295.000.000,00**	**0**	**4.506.950,00**	**0**	**100.412.750,00**
103.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	30.00	0	0.00	0	30.00	295.000.000,00	17	4.506.950,00	12	100.412.750,00
103.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah**	**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang**	**Dokumen**	**2.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**155.000.000,00**	**0**	**3.820.000,00**	**0**	**99.511.500,00**

103.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	155.000.000,00	0	3.820.000,00	1	99.511.500,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penataan ruang yang baik untuk kesejahteraan bersama dan													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses panjang dengan pemangku kepentingan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													

2.2 Isu Strategis Per Program RPJMD Baru Tahun 2025-2029

Isu-isu permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi permasalahan adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu permasalahan dan penyelesaian berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Permasalahan dan Penyelesaian Masalah

NO.	PROGRAM	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat akibat belum optimalnya kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum	Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan infrastruktur dasar
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air secara terpadu, merata, dan berkelanjutan, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan ketersediaan air baku, kerentanan terhadap kekeringan dan banjir, serta menurunnya fungsi konservasi daerah aliran sungai.	1. Ketersediaan air baku belum merata. 2. Kekeringan masih terjadi di sejumlah desa saat musim kemarau, sedangkan banjir dan longsor terjadi pada musim hujan. 3. Banyak jaringan irigasi desa belum berfungsi optimal karena kerusakan. 4. Konservasi daerah aliran sungai (DAS) belum tertangani secara sistematis. 5. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air masih terbatas.

NO.	PROGRAM	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Belum optimalnya cakupan layanan air minum yang aman dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan dan rawan kekeringan, akibat keterbatasan infrastruktur, sumber air baku, serta belum optimalnya pengelolaan terpadu.	1. Cakupan layanan air minum perpipaan masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di desa-desa pada zona sulit air. 2. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dropping air dari berbagai pihak pada saat kekeringan sehingga tak jarang mengabaikan fasilitas penyediaan air baku yang sudah ada. 3. Keberadaan sumber air baku yang tidak selalu memenuhi standar kualitas dan kuantitas. 4. Keterbatasan sumber air baku di wilayah yang rentan kekeringan, khususnya saat musim kemarau. 5. Belum optimal dimanfaatkan karena KPSPAM belum berkinerja secara maksimal di desa tersebut 6. Belum terintegrasinya pengelolaan SPAM antara pemerintah daerah, PDAM, dan masyarakat. 7. Wilayah geografis di kabupaten pacitan dengan kontur elevasi yang ekstrim, sehingga pembangunan spam

			perdesaan tidak bisa mencakup area layanan yang luas.
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Belum optimalnya ketersediaan dan kondisi infrastruktur persampahan yang mendukung sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan, akibat belum meratanya pembangunan sarana di seluruh wilayah pelayanan.	1. Belum semua wilayah memiliki infrastruktur dasar persampahan seperti TPS 3R 2. Beberpaa sarana dan prasarana eksisting mengalami kerusakan. 3. Sebagian kawasan belum terjangkau sistem persampahan berbasis kawasan karena keterbatasan pembiayaan pembangunan. 4. Koordinasi lintas sektor dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur persampahan masih perlu diperkuat.
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Belum optimalnya sistem drainase perkotaan dan permukiman akibat keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi saluran.	1. Banyak saluran drainase yang belum memenuhi kebutuhan kapasitas tampung dan aliran. 2. Kerusakan saluran, sedimentasi, dan penyumbatan oleh sampah sering terjadi. 3. Perencanaan dan pembangunan drainase belum sepenuhnya selaras dengan pola ruang dan pertumbuhan kawasan.

			4. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi saluran dan lingkungan
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan, akibat terbatasnya infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum terbangunnya sistem pengelolaan terpadu berbasis kawasan.	1.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi yang aman. 2.Kelembagaan dan pendanaan pengelolaan air limbah belum memadai. 3. Infrastruktur pengolahan air limbah, seperti septik tank komunal masih terbatas. 4. Belum terbangunnya IPLT, sehingga sanitasi masih dalam kategori layak dan belum berkategori aman
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Sarana infrasruktur pada kawasan permukiman belum tertata dengan baik sesuai dengan tata ruang.	Permukiman kumuh masih dijumpai, terutama di daerah padat penduduk
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Belum optimalnya penataan bangunan gedung negara dan perijinan bangunan gedung yang memenuhi standar	1. Kurangnya jumlah gedung negara dan sarana prasarana gedung negara yang dibangun/direhab/dipelihara 2. Belum optimalnya dalam pengelolaan aset gedung negara Rendahnya jumlah pengajuan PBG dan SLF

NO.	PROGRAM	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan dan berkualitas serta meningkatkan vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat	1. Kurangnya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah 2. Belum optimalnya pengelolaan aset bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis daerah
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Belum optimalnya tingkat kemantapan dan konektivitas jaringan jalan yang berdampak pada belum meratanya aksesibilitas antar wilayah, pelayanan publik, serta distribusi barang dan jasa khusunya di wilayah dengan topografi sulit dan tingkat kerentanan bencana yang tinggi	1. Kemantapan jalan masih rendah, khususnya di wilayah demgan topografi yang sulit. 2. Konektivitas antar wilayah belum optimal, sehingga menghambat aksesibilitas dan distribusi. 3. Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur jalan, menyebabkan banyak ruas jalan rusak belum tertangani. 4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem manajemen aset jalan, termasuk untuk pemantauan kondisi dan penentuan prioritas penanganan.

NO.	PROGRAM	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Belum optimalnya pelatihan sertifikasi tenaga operator/ teknisi/analisis di wilayah Kabupaten	1. Kurangnya pelatihan sertifikasi tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten 2. Rendahnya jumlah tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten yang bersertifikat kompetensi
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terbatasnya ketersediaan rencana tata ruang yang memadai serta belum optimalnya kepatuhan terhadap arahan pemanfaatan ruang, mengakibatkan pengendalian pembangunan wilayah belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan	1. Penetapan RTRW/RDTR membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, dsb). 2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki KKPR dalam melaksanakan kegiatan/pembangunan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal sehingga meningkatkan potensi ketidaksesuaian antara kegiatan/pembangunan

			dengan RTRW/RDTR/KKPR yang dapat menimbulkan masalah hukum. 4. Keterbatasan SDM penata ruang dalam melaksanakan penataan ruang (merencanakan ruang, memfasilitasi pemanfaatan ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan yaitu:

“Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas”

Sedangkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan Perencanaan Strategis Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik, yang didukung dengan program:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
   e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   g. Program Penataan Bangunan Gedung
   h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
   i. Program Penyelenggaraan Jalan
   j. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
2. Meningkatnya Ketaatan terhadap penyelenggaraaan Penataan Ruang, yang didukung dengan program:
   a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan yang direncanakan pada perubahan Tahun 2025-2029 meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Indikator Program: Hasil Nilai Evaluasi SAKIP PD

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen administrasi dan penilaian kinerja pegawai

1.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi

1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan: Prosentase jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan

1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Program: Persentase cakupan layanan air baku domestik dan irigasi

2.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah infrastuktur pengendali daya rusak air yang dibangun

2.1.1 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)

2.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Sungai

a. Persentase luas daerah yang terlayani infrastruktur air baku domestik

2.1.1 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)

2.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Sungai

2.1.3 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

2.1.4 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air

2.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

2.1.6 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku

2.1.7 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

2.1.8 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai

2.1.9 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

2.1.10 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

2.1.11 Rehabilitasi Embung

2.2 Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Persentase cakupan layanan air baku domestik dan irigasi

2.2.1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

2.2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

2.2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

2.2.4 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Program: Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap warga negara di seluruh kabupaten/ kota

3.1 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah warga negara yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.

3.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

3.1.2 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

3.1.3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

3.1.4 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

3.1.5 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

3.1.6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

4 PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Indikator Program: Persentase jumlah Infrastruktur Persampahan

4.1 Kegiatan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Akumulasi jumlah infrastruktur persampahan yang dibangun dan ditingkatkan

4.1.1 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

4.1.2 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Program: Persentase rumah dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)

5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota"

Indikator Kegiatan: Jumlah rumah yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik

5.1.1 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

5.1.2 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

5.1.3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

5.1.4 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

5.1.5 Penyediaan Unit pengolahan setempat

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Program: Persentase rumah dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)

6.1 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah rumah yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik

6.1.1 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

6.1.2 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

6.1.3 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Indikator Program: Persentase gedung negara dalam kondisi baik

7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator Kegiatan:

a. Akumulatif jumlah bangunan gedung negara dan sarana prasarana gedung negara yang dibangun + direhab + dipelihara
b. Akumulasi jumlah pengajuan PBG dan SLF

7.1.1 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7.1.2 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7.1.3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

7.1.4 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Indikator Program: Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten dalam kondisi baik

8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten yang dibangun +direhabilitasi + dipelihara

8.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Program:

a. Persentase jalan dalam kondisi mantap

b. Persentase jembatan dalam kondisi mantap

9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan:

a. Panjang jalan dalam kondisi mantap

b. Panjang jembatan dalam kondisi mantap

c. Jumlah ruas jalan yang terdata dan termonitor dalam data base

9.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

9.1.2 Survey kondisi jalan/ jembatan

9.1.2 Pembangunan jalan

9.1.3 Rehabilitasi jalan

9.1.4 Pemeliharaan berkala jalan

9.1.5 Pemeliharaan rutin jalan

9.1.6 Pembangunan jembatan

9.1.7 Rehabilitasi jembatan

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Indikator Program: Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi

10.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Kegiatan: Jumlah tenaga kerja konstruksi analis/teknisi/operator terlatih dan tersertifikasi

10.1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

10.1.2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang

11.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Persentase RTRW dan RDTR yang ditetapkan

11.1.1 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota

11.1.2 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

11.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Persentase RTRW dan RDTR yang disusun

11.2.1 Penyusunan Peta Dasar

11.2.2 Penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota

11.3 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan: Persentase rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

11.3.1 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

11.3.2 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

11.3.3 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

11.4 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan: Persentase pengendalian pemanfaatan ruang

11.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

11.4.2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

3.2 Review Terhadap Rancangan RKPD

Adapun review terhadap Rancangan RKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sesuai tabel sebagai berikut:

Pagu anggaran APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 80.531.598.106,00 terdiri dari:

a. Program : 11 Program
b. Kegiatan : 21 Kegiatan
c. Sub Kegiatan : 76 Sub Kegiatan

Review terhadap RKPD tahun 2026 tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
RKPD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**80.531.598.106,00**							**228.320.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**80.531.598.106,00**							**228.320.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**9.425.501.558,00**						**-**	**15.170.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	396.462.163,83			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	780.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	72.986.843,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	81.783.650,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	241.691.670,83	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.294.968.897,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	6.130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	6.208.178.897,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	86.790.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.016.039,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22.016.039,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.346.624.900,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	2.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.295.164.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	7.860.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	43.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	432.505.476,67			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	432.505.476,67	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	59.000.000,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	59.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	349.333.363,50			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	285.073.363,50	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	64.260.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	524.590.718,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	220.100.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				15 Unit	132.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	68.394.918,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	104.095.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**2.037.200.000,00**						**-**	**18.500.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.287.200.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-	-	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)														
			Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				1,6 KM	252.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				2 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air														
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 Unit	195.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi				1 Titik	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1 Titik	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung														
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	750.000.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-	-	8.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,8 KM	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,7 KM	250.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1,7 KM	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**246.500.000,00**						**-**	**6.650.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	246.500.000,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-	-	6.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2,5 Liter/Detik	62.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				0,1 Liter/Detik	51.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				2 Unit	51.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				20 SR	51.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				5 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**			**-**	**1.971.820.000,00**						**-**	**4.000.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.971.820.000,00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	5.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				0,5 Ton/hari	1.966.320.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**13.347.504.000,00**						**-**	**23.000.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.347.504.000,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-	-	23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				2 Rumah Tangga	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				20 M³/Hari	9.183.948.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				120 Rumah Tangga	4.138.556.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**1.424.414.000,00**						**-**	**30.500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.424.414.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-	-	30.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				6 Sistem Drainase Perkotaan	1.252.914.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2 Sistem Drainase Perkotaan	146.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**2.188.937.263,40**						**-**	**9.200.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	2.188.937.263,40			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-	-	9.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				5 Bangunan Gedung	424.545.288,40	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	1.684.079.579,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				36 Orang	5.179.593,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				70 Dokumen	75.132.803,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**402.103.882,60**						**-**	**2.500.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	402.103.882,60			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-	-	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				5 Kawasan	402.103.882,60	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**48.683.220.355,00**						**-**	**112.950.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	48.683.220.355,00			-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-	-	112.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	100.899.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				800 KM	361.638.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				9 KM	4.000.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				10 KM	814.324.193,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3,5 KM	42.642.792.917,64	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				50 KM	278.634.529,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		70.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				0.2 Meter	148.160.171,36	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				0.2 Meter	156.932.544,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				3,5 Meter	179.839.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**43.331.445,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	43.331.445,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				20 Orang	36.203.910,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga	7.127.535,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**761.065.602,00**						**-**	**5.700.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	123.000.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-	-	2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota														
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	112.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	364.000.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar														
			Jumlah data SHP Peta Dasar				2 Peta	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	362.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	128.500.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-	-	1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				25 Layanan	65.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	55.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	145.565.602,00			-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-	-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	45.565.602,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							**80.531.598.106,00**							**228.320.000.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan juga kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2029. Sehingga tahun berikutnya target dari rencana kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

Pacitan, – 08 - 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUPARLAN, S.Sos, ST, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19670504 199202 1 004

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Jln.Dr. Sutomo No. 37 Pacitan 63512, Telp. (0357) 881140, Fax. (0357) 881557
Website : www.perkimtan.pacitankab.go.id, e-mail : perkimtan.pacitan@gmail.com, instagram: perkimtan_pacitan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. kami telah dapat menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat (Renja SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2026 memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2026.

Materi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini.

Pacitan, 31 Juli 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PACITAN

HERU TUNGGUL WIDODO, ST., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710122 199603 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i

KATA PENGANTAR…….....…ii

DAFTAR ISI……..…iv

BAB I PENDAHULUAN……..…1

I.1. Latar Belakang…….…1

I.2. Landasan Hukum…….…2

I.3. Maksud dan Tujuan…….…7

I.4. Sistematika Penulisan……..8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024……9

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan……9

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan ……49

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan ..... ……52

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 58

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….…63

BAB III TUJUAN DAN SASARAN……..67

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……67

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan……...…70

III.3. Program dan Kegiatan……..71

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN…….……..82

BAB V PENUTUP……..90

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat Rencana kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perumusan rancangan awal Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengolahan data dan informasi.
2) Analisis gambaran pelayanan SKPD.
3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.
4) Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
6) Perumusan tujuan dan sasaran.
7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
8) Perumusan kegiatan prioritas.
9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD.
10) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
11) Pembahasan forum SKPD.
12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunaan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2026, disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sedangkan Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi kepala daerah terpilih.

I.2 . LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9) Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

18) Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;

24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

25) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;

26) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

28) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

29) Peraturan Presiden Republik Indonesia 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan Bromo Tengger Semeru Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

30) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

31) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
40) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur;
42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
43) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
44) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
45) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

46) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Ranwal Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan dan yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja yang dapat dituangkan ke dalam Renja dan RKA SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Ranwal Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan ini adalah untuk :

1) Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;
2) Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;
3) Memberikan gambaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk mencapai target pelayanan pada tahun 2026 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4) Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2026.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

I.2. Landasan Hukum.

I.3. Maksud dan Tujuan.

I.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

III.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN

Untuk memantapkan hasil penyusunan rencana kerja (RENJA) tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2025. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan melaksanakan sebanyak 2 (dua) urusan, 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) Kegiatan, 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 48.391.661.404 (empat puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan sebesar Rp. 47.551.678.017 (empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belas rupiah) atau sebesar 98,26%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 5.833.921.800 (lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 5.523.560.548 (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 94,68%.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun n-3) adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, adapun kendala-kendala yang terjadi telah dapat diupayakan untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah;

b) Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak pengguna maupun dengan penyedia.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 317.234.175 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu serratus tujuh puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 313.090.350 (tiga ratus tiga belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,69%.

Program Pengembangan Perumahan didukung dengan beberapa kegiatan antara lain:

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan indikator Tersediannya data rumah korban bencana yangtreverifikasi, realisasi 60 unit atau 100%, Realisasi anggaran Rp. 39.685.000 atau 99.21%
b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan indikator Tersediannya rumah layak huni bagi korban bencana, realisasi 9 unit atau 100%, Realisasi anggaran Rp. 203.059.000 atau 99,38%.
c. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan indikator Jumlah Laporan Pembangunan bidang perumahan yang di monitoring dan dievaluasi, realisasi 1 Laporan atau 100%, Realisasi anggaran Rp. 70.346.350 atau 96.5%

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 1.759.029.325 (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 1.754.076.200 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 99,72%.

Program Kawasan Permukiman didukung dengan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di

Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan indikator Luas penataan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan, direalisasikan sebesar 1,5 Ha atau 243.33%

4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 282.030.000 (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 279.257.500 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99,02%.

Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh didukung oleh Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terverifikasi, realisasi 115.000 unit atau 88.9%

5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 33.861.443.804 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 33.554.238.750 (tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,09%.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum (PSU) didukung oleh Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan indikator Panjang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun, direalisasikan sebesar 602.25 km dari target 618.05 km atau 127,07%

6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 165.001.085 (Seratus enam puluh lima juta seribu delapan puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 115.889.450 (seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 70,24%.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung oleh kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi, realisasi 100%

7. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 5.560.044.000 (lima milyar lima ratus enam puluh juta empat puluh empat ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 5.432.512.630 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 97,71%.

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan didukung oleh kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, direalisasi 6 Lokasi atau sebesar 100%

8. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 612.957.215 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat di realisasi sebesar Rp. 579.052.589 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,47%.

Program Penatagunaan Tanah didukung oleh kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah, direalisasikan sebesar 1372 Bidang dari target 1372 Bidang atau 100 %

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPP	Persentase %	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	14	15
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**48.391.661.404**	**47.551.678.017**	**98.26**	**839.983.387**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.833.921.800**	**5.523.560.548**	**94.68**	**310.361.252**
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.568.000	36.850.000	98,09	718.000
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.585.000	13.228.500	97.38	356.500
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.983.000	23.621.500	98.49	361.500
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.398.823.988	3.204.719.789	94.29	194.104.199
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.769.459.588	3.204.719.789	94.29	-435.260.201
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	581.914.400	552.310.838	94.91	29.603.562
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.450.000	44.245.500	93.25	3.204.500
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.311.500	12.140.000	74.43	4.171.500
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.311.500	12.140.000	74.43	4.171.500
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.406.055	70.976.000	96.69	2.430.055
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64.658.055	64.324.000	99.48	334.055
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.748.000	6.652.000	76.04	2.096.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	978.188.022	920.847.600	94.14	57.340.422
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.830.000	8.491.000	96.16	339.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Jumlah	Persentase	Sisa Pagu
		Anggaran	SPP	%	Anggaran
1	2	3	4	14	15
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.450.197	113.846.100	96.16	13.604.097
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.799.125	64.954.000	93.06	4.845.125
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.732.500	32.758.500	86.82	4.974.000
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	13.330.000	88.87	1.670.000
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.610.200	461.556.600	94.08	29.053.600
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	105.215.000	104.238.900	99.07	976.100
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	123.551.000	121.672.500	98.48	1.878.500
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	670.232.415	653.606.223	97.52	16.626.192
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	510.918.525	498.475.223	97.56	12.443.302
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.313.890	155.131.000	97.37	4.182.890
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.020.000	120.611.004	82.60	25.408.996
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.020.000	120.611.004	82.60	25.408.996
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.371.820	503.809.932	98.14	9.561.888
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.389.820	70.340.500	90.89	7.049.320
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.430.000	69.692.432	98.95	737.568
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.552.000	363.777.000	99.51	1.775.000
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**317.234.175**	**313.090.350**	**98.69**	**4.143.825**
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.000.000	39.685.000	99.21	315.000
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian	40.000.000	39.685.000	99.21	315.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Jumlah	Persentase	Sisa Pagu
		Anggaran	SPP	%	Anggaran
1	2	3	4	14	15
	Sebelumnya yang Belum Tertangani				
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	204.334.175	203.059.000	99.38	1.275.175
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	176.334.175	176.215.000	99.93	119.175
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	28.000.000	26.844.000	95.87	1.156.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.900.000	70.346.350	96.50	2.553.650
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.900.000	70.346.350	96.50	2.553.650
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.759.029.325**	**1.754.076.200**	**99.72**	**4.953.125**
1.04.03.2.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.759.029.325	1.754.076.200	99.72	4.953.125
1.04.03.2.02.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	146.240.000	146.016.200	99.85	223.800
1.04.03.2.02.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.612.789.325	1.608.060.000	99.71	4.729.325
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**282.030.000**	**279.257.500**	**99.02**	**2.772.500**
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	282.030.000	279.257.500	99.02	2.772.500
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	282.030.000	279.257.500	99.02	2.772.500
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**33.861.443.804**	**33.554.238.750**	**99.09**	**307.205.054**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Jumlah	Persentase	Sisa Pagu
		Anggaran	SPP	%	Anggaran
1	2	3	4	14	15
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	33.861.443.804	33.554.238.750	99.09	307.205.054
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100.000.000	96.357.200	96.36	3.642.800
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	30.264.643.804	30.013.150.800	99.17	251.493.004
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	43.000.000	38.882.250	90.42	4.117.750
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.453.800.000	3.405.848.500	98.61	47.951.500
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**10.003.544.000**	**7.686.126.936**	**76,83**	**2.317.417.064**
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**165.001.085**	**115.889.450**	**70.24**	**49.111.635**
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.001.085	115.889.450	70.24	49.111.635
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.001.085	115.889.450	70.24	49.111.635
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**5.560.044.000**	**5.432.512.630**	**97.71**	**127.531.370**
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.560.044.000	5.432.512.630	97.71	127.531.370
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.560.044.000	5.432.512.630	97.71	127.531.370

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Jumlah	Persentase	Sisa Pagu
		Anggaran	SPP	%	Anggaran
1	2	3	4	14	15
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**612.957.215**	**579.052.589**	**94.47**	**33.904.626**
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	612.957.215	579.052.589	94.47	33.904.626
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	612.957.215	579.052.589	94.47	33.904.626
Jumlah		**48.391.661.404**	**47.551.678.017**	**98.26**	**839.983.387**

Pada tahun 2024 (tahun n-3), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 8 (Delapan) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan yang termasuk didalamnya kegiatan rutin/program pendukung kegiatan pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan lanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Pencapaian target kinerja dan anggaran berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2024 dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2025) dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**104.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**73,95**	**2.896.812.687,00**	**73.63**	**4.437.950.952,00**	**73.75**	**5.833.921.800,00**	**0,00**	**971.043.737,00**	**74,85**	**1.600.712.478,00**	**0,00**	**1.257.858.770,00**	**0,00**	**1.693.945.563,00**	**74,85**	**5.523.560.548,00**	**101,49**	**94,68**	**148,48**	**9.961.511.500,00**	**200.78**	**190.68**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24.00**	**20.000.000,00**	**24.00**	**14.887.126,00**	**24.00**	**37.568.000,00**	**9,00**	**9.900.000,00**	**6,00**	**7.594.000,00**	**6,00**	**8.202.500,00**	**3,00**	**11.153.500,00**	**24,00**	**36.850.000,00**	**100,00**	**98,09**	**48,00**	**51.737.126,00**	**200**	**258.69**	
	104.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaa	Dokumen	11.00	10.000.000,00	11.00	7.809.026,00	11	13.585.000,00	3,00	0,00	3,00	2.080.000,00	3,00	4.995.000,00	2,00	6.153.500,00	11,00	13.228.500,00	100,00	97,38	22,00	21.037.526,00	200	210.38	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Perangkat Daerah	n Perangkat Daerah																								
	104.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13.00	10.000.000,00	13.00	7.078.100,00	13	23.983.000,00	3,00	9.900.000,00	3,00	5.514.000,00	3,00	3.207.500,00	4,00	5.000.000,00	13,00	23.621.500,00	100,00	98,49	26,00	30.699.600,00	200	307	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	97,94					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2		
	104.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**2.338.197.872,00**	**59.00**	**2.994.062.301,00**	**59.00**	**3.398.823.988,00**	**12,00**	**611.163.251,00**	**13,00**	**1.037.809.489,00**	**10,00**	**780.265.239,00**	**24,00**	**775.481.810,00**	**59,00**	**3.204.719.789,00**	**100,00**	**94,29**	**118,00**	**6.198.782.090,00**	**200**	**265.11**	
	104.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/bulan	24.00	1.818.197.872,00	24.00	2.433.718.301,00	23.00	2.769.459.588,00	22,00	465.785.984,00	23,00	893.357.048,00	23,00	629.124.674,00	23,00	619.895.745,00	23,00	2.608.163.451,00	100,00	94,18	47,00	5.041.881.752,00	195.83	277.3	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN																								
	104.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	450.000.000,00	12.00	516.664.000,00	12	581.914.400,00	3,00	134.577.267,00	3,00	137.252.441,00	3,00	136.740.565,00	3,00	143.740.565,00	12,00	552.310.838,00	100,00	94,91	24,00	1.068.974.838,00	200	237.55	
	104.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	70.000.000,00	12.00	43.680.000,00	33.00	47.450.000,00	6,00	10.800.000,00	6,00	7.200.000,00	7,00	14.400.000,00	14,00	11.845.500,00	33,00	44.245.500,00	100,00	93,25	45,00	87.925.500,00	0	125.61	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	94,11					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	104.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah**	**Dikumen**	**6.00**	**10.000.000,00**	**6.00**	**11.362.350,00**	**6.00**	**16.311.500,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2.560.000,00**	**0,00**	**2.680.000,00**	**3,00**	**6.900.000,00**	**6,00**	**12.140.000,00**	**100,00**	**74,43**	**12,00**	**23.502.350,00**	**200**	**235.02**	
	104.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6.00	10.000.000,00	6.00	11.362.350,00	6	16.311.500,00	2,00	0,00	1,00	2.560.000,00	0,00	2.680.000,00	3,00	6.900.000,00	6,00	12.140.000,00	100,00	74,43	12,00	23.502.350,00	200	235.02	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	74,43					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang		1	1		
	104.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan**	**%**	**100.00**	**45.000.000,00**	**100.00**	**65.051.600,00**	**100.00**	**73.406.055,00**	**100,00**	**45.514.000,00**	**100,00**	**1.624.000,00**	**100,00**	**5.028.000,00**	**100,00**	**18.810.000,00**	**100,00**	**70.976.000,00**	**100,00**	**96,69**	**200,00**	**136.027.600,00**	**200**	**302.28**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			kepegawaian																								
	104.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60.00	35.000.000,00	2.00	60.650.000,00	2.00	64.658.055,00	1,00	45.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18.810.000,00	2,00	64.324.000,00	100,00	99,48	4,00	124.974.000,00	6.67	357.07	
	104.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12.00	10.000.000,00	12.00	4.401.600,00	12	8.748.000,00	3,00	0,00	3,00	1.624.000,00	3,00	5.028.000,00	3,00	0,00	12,00	6.652.000,00	100,00	76,04	24,00	11.053.600,00	200	110.54	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	87,76					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Tinggi		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	104.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**225.000.000,00**	**100.00**	**463.587.663,00**	**100.00**	**978.188.022,00**	**24,90**	**124.173.500,00**	**24,90**	**112.694.000,00**	**22,60**	**391.835.100,00**	**27,60**	**292.145.000,00**	**100,00**	**920.847.600,00**	**100,00**	**94,14**	**200,00**	**1.384.435.263,00**	**200**	**615.3**	
	104.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60.00	10.000.000,00	2.00	6.301.800,00	9.00	8.830.000,00	1,00	0,00	0,00	3.530.000,00	0,00	4.961.000,00	8,00	0,00	9,00	8.491.000,00	100,00	96,16	11,00	14.792.800,00	18.33	147.93	
	104.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60.00	15.000.000,00	12.00	64.581.230,00	14.00	127.450.197,00	4,00	7.263.000,00	6,00	25.095.000,00	3,00	55.593.100,00	2,00	25.895.000,00	15,00	113.846.100,00	107,14	89,33	27,00	178.427.330,00	45	1189.52	
	104.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	60.00	10.000.000,00	2.00	27.954.700,00	7.00	69.799.125,00	0,00	0,00	1,00	28.452.500,00	0,00	12.785.500,00	6,00	23.716.000,00	7,00	64.954.000,00	100,00	93,06	9,00	92.908.700,00	15	929.09	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			yang Disediakan																								
	104.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	15.000.000,00	12.00	26.352.400,00	12	37.732.500,00	3,00	5.522.500,00	3,00	5.730.000,00	3,00	5.168.500,00	3,00	16.337.500,00	12,00	32.758.500,00	100,00	86,82	24,00	59.110.900,00	200	394.07	
	104.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Paket	60.00	15.000.000,00	2.00	7.611.736,00	2	15.000.000,00	0,00	2.073.000,00	1,00	510.000,00	0,00	1.587.000,00	1,00	9.160.000,00	2,00	13.330.000,00	100,00	88,87	4,00	20.941.736,00	6.67	139.61	
	104.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	75.000.000,00	12.00	282.188.097,00	12	490.610.200,00	3,00	9.845.000,00	3,00	47.076.500,00	3,00	191.185.600,00	3,00	213.449.500,00	12,00	461.556.600,00	100,00	94,08	24,00	743.744.697,00	200	991.66	
	104.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen	60.00	10.000.000,00	1.00	0,00	1	105.215.000,00	0,00	99.470.000,00	1,00	0,00	0,00	2.154.400,00	0,00	2.614.500,00	1,00	104.238.900,00	100,00	99,07	2,00	104.238.900,00	3.33	1042.39	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			Dinamis pada SKPD																								
	104.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	60.00	75.000.000,00	1.00	48.597.700,00	1	123.551.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1,00	118.400.000,00	0,00	972.500,00	1,00	121.672.500,00	100,00	98,48	2,00	170.270.200,00	3.33	227.03	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,89	93,23					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		8	8		
	104.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**60.000.000,00**	**100.00**	**463.203.425,00**	**100.00**	**670.232.415,00**	**24,90**	**136.264.223,00**	**24,90**	**209.711.000,00**	**22,60**	**0,00**	**27,60**	**307.631.000,00**	**100,00**	**653.606.223,00**	**100,00**	**97,52**	**200,00**	**1.116.809.648,00**	**200**	**1861.35**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	104.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60.00	50.000.000,00	20.00	340.811.065,00	23.00	510.918.525,00	15,00	30.579.223,00	3,00	207.725.000,00	5,00	0,00	3,00	260.171.000,00	26,00	498.475.223,00	113,04	97,56	46,00	839.286.288,00	76.67	1678.57	
	104.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60.00	10.000.000,00	45.00	122.392.360,00	43.00	159.313.890,00	8,00	105.685.000,00	12,00	1.986.000,00	8,00	0,00	15,00	47.460.000,00	43,00	155.131.000,00	100,00	97,37	88,00	277.523.360,00	146.67	2775.23	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					106,52	97,47					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2		
	104.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Prosentase penyediaan jasa**	**%**	**100.00**	**40.000.000,00**	**100.00**	**101.486.786,00**	**100.00**	**146.020.000,00**	**24,90**	**29.217.331,00**	**24,90**	**26.900.989,00**	**22,60**	**27.663.431,00**	**27,60**	**36.829.253,00**	**100,00**	**120.611.004,00**	**100,00**	**82,60**	**200,00**	**222.097.790,00**	**200**	**555.24**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Urusan Pemerintahan Daerah	**penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**																								
	104.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	40.000.000,00	12.00	101.486.786,00	12	146.020.000,00	3,00	29.217.331,00	3,00	26.900.989,00	3,00	27.663.431,00	3,00	36.829.253,00	12,00	120.611.004,00	100,00	82,60	24,00	222.097.790,00	200	555.24	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	82,60					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Tinggi		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	104.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**%**	**80.00**	**105.000.000,00**	**80.00**	**324.309.701,00**	**80.00**	**513.371.820,00**	**21,50**	**14.811.432,00**	**31,80**	**201.819.000,00**	**21,90**	**42.184.500,00**	**4,80**	**244.995.000,00**	**80,00**	**503.809.932,00**	**100,00**	**98,14**	**160,00**	**828.119.633,00**	**200**	**788.69**	
	104.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60.00	40.000.000,00	20.00	43.858.701,00	31.00	77.389.820,00	12,00	12.529.000,00	21,00	2.340.000,00	4,00	27.484.500,00	3,00	27.987.000,00	40,00	70.340.500,00	129,03	90,89	60,00	114.199.201,00	100	285.5	
	104.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60.00	15.000.000,00	55.00	6.420.000,00	67.00	70.430.000,00	12,00	2.282.432,00	8,00	9.900.000,00	6,00	14.700.000,00	41,00	42.810.000,00	67,00	69.692.432,00	100,00	98,95	122,00	76.112.432,00	203.33	507.42	
	104.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	Unit	1.00	50.000.000,00	2.00	274.031.000,00	1	365.552.000,00	0,00	0,00	1,00	189.579.000,00	1,00	0,00	0,00	174.198.000,00	2,00	363.777.000,00	200,00	99,51	4,00	637.808.000,00	400	1275.62	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi																								
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					143,01	96,45					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	91,99					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2	**104.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Persentase Penerapan SPM Urusan**	**%**	**100,00**	**1.040.735.845,00**	**100.00**	**338.385.500,00**	**100**	**317.234.175,00**	**0,80**	**32.110.000,00**	**85,00**	**179.339.850,00**	**2,00**	**17.440.500,00**	**100,00**	**84.200.000,00**	**100,00**	**313.090.350,00**	**100,00**	**98,69**	**200,00**	**651.475.850,00**	**200**	**30.08**	**Dinas Perumahan,**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		PERUMAHAN	**Perumahan Rakyat**																								**Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Terdata**	**Unit**	**60.00**	**151.000.000,00**	**100.00**	**30.839.500,00**	**60**	**40.000.000,00**	**15,00**	**22.080.000,00**	**35,00**	**10.070.000,00**	**13,00**	**1.800.000,00**	**12,00**	**5.735.000,00**	**75,00**	**39.685.000,00**	**125,00**	**99,21**	**175,00**	**70.524.500,00**	**291.67**	**46.7**	
	104.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang	Dokumen	60.00	151.000.000,00	10.00	30.839.500,00	1	40.000.000,00	0,00	22.080.000,00	1,00	10.070.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	5.735.000,00	1,00	39.685.000,00	100,00	99,21	11,00	70.524.500,00	18.33	46.7	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			Belum Tertangani																								
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	99,21					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
	104.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.**	**Unit**	**12.00**	**552.041.676,00**	**9.00**	**231.179.000,00**	**12.00**	**204.334.175,00**	**0,00**	**6.180.000,00**	**9,00**	**159.729.000,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**37.150.000,00**	**12,00**	**203.059.000,00**	**100,00**	**99,38**	**21,00**	**434.238.000,00**	**175**	**78.66**	
	104.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang	Unit Rumah	60.00	522.041.676,00	10.00	196.420.000,00	11.00	176.334.175,00	0,00	6.180.000,00	8,00	132.885.000,00	0,00	0,00	3,00	37.150.000,00	11,00	176.215.000,00	100,00	99,93	21,00	372.635.000,00	35	71.38	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			Terehabilitasi																								
	104.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0.00	30.000.000,00	1.00	34.759.000,00	1.00	28.000.000,00	0,00	0,00	1,00	26.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26.844.000,00	100,00	95,87	2,00	61.603.000,00	0	205.34	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	97,90					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	104.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah pembangunan bidang perumahan yang dimonitoring dan dievaluasi**	**Unit**	**180.00**	**250.000.000,00**	**1880.00**	**76.367.000,00**	**148.00**	**72.900.000,00**	**38,00**	**3.850.000,00**	**28,00**	**9.540.850,00**	**5,00**	**15.640.500,00**	**138,00**	**41.315.000,00**	**209,00**	**70.346.350,00**	**141,22**	**96,50**	**2.089,00**	**146.713.350,00**	**1160.56**	**58.69**	
			Jumlah pembangunan bidang perumahan yang dimonitoring dan dievaluasi	**Unit**	**180.00**	**250.000.000,00**	**0.00**	**76.367.000,00**	**148.00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**76.367.000,00**	**0**	**30.55**	
			Jumlah pembangunan bidang perumahan yang dimonitoring dan dievaluasi	**Unit**	**180.00**	**250.000.000,00**	**0.00**	**76.367.000,00**	**148.00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**76.367.000,00**	**0**	**30.55**	
	104.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1.00	250.000.000,00	1.00	76.367.000,00	1.00	72.900.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	9.540.850,00	0,00	15.640.500,00	1,00	41.315.000,00	1,00	70.346.350,00	100,00	96,50	2,00	146.713.350,00	200	58.69	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																								
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	96,50					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
3	**104.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**	**%**	**40,95**	**3.867.297.380,00**	**68.96**	**3.231.062.060,00**	**71.19**	**1.759.029.325,00**	**17,70**	**1.040.000,00**	**50,80**	**164.651.000,00**	**6,87**	**871.791.700,00**	**0,00**	**716.593.500,00**	**75,37**	**1.754.076.200,00**	**105,87**	**99,72**	**144,33**	**4.985.138.260,00**	**352.45**	**45.36**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																											Pertanahan
	104.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luas Peningkatan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan**	**Ha**	**3.70**	**2.491.166.703,00**	**2.30**	**3.231.062.060,00**	**1.50**	**1.759.029.325,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**0,30**	**164.651.000,00**	**1,10**	**871.791.700,00**	**1,10**	**716.593.500,00**	**2,50**	**1.754.076.200,00**	**166,67**	**99,72**	**4,80**	**4.985.138.260,00**	**129.73**	**200.11**	
	104.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	60.00	101.000.000,00	13.00	290.836.500,00	9.00	146.240.000,00	0,00	1.040.000,00	9,00	136.440.000,00	0,00	1.986.200,00	2,00	6.550.000,00	11,00	146.016.200,00	122,22	99,85	24,00	436.852.700,00	40	432.53	
	104.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	60.00	2.390.166.703,00	2.30	2.940.225.560,00	1.50	1.612.789.325,00	0,00	0,00	1,45	28.211.000,00	0,10	869.805.500,00	1,00	710.043.500,00	2,55	1.608.060.000,00	170,00	99,71	4,85	4.548.285.560,00	8.08	190.29	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					146,11	99,78					F
Predikat kinerja(%)																					Sang	Sang		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																					at Tinggi	at Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					166,67	99,72					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
4	104.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,05	4.162.943.380,00	89.21	444.490.500,00	90.52	282.030.000,00	60,26	6.020.000,00	15,00	198.064.000,00	7,00	5.412.000,00	8,97	69.761.500,00	91,23	279.257.500,00	100,78	99,02	180,44	723.748.000,00	198.18	6.71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	104.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan	Jumlah rumah layak huni diluar	Unit	120985.00	3.692.166.703,00	123580.00	444.490.500,00	129360.00	282.030.000,00	60.500,00	6.020.000,00	36.300,00	198.064.000,00	12.000,00	5.412.000,00	20.590,00	69.761.500,00	129.390,00	279.257.500,00	100,02	99,02	252.970,00	723.748.000,00	209.09	19.6	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	**kawasan permukiman kumuh yang terverifikasi**																								
	104.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	100.00	3.692.166.703,00	25.00	444.490.500,00	15.00	282.030.000,00	0,00	6.020.000,00	12,00	198.064.000,00	1,00	5.412.000,00	2,00	69.761.500,00	15,00	279.257.500,00	100,00	99,02	40,00	723.748.000,00	40	19.6	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	99,02					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,02	99,02					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
5	104.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan	%	93,00	4.162.943.380,00	82.07	24.385.117.971,00	92.87	33.861.443.804,00	82,07	22.405.500,00	1,50	1.605.669.400,00	3,70	9.736.365.600,00	5,78	22.189.798.250,00	93,05	33.554.238.750,00	100,19	99,09	175,12	57.939.356.721,00	188.3	806.02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			Kawasan Permukiman																								**Pertanahan**
	104.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Panjang PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman dan layak**	**Km**	**462.68**	**3.692.166.703,00**	**522.25**	**24.385.117.971,00**	**601.05**	**33.861.443.804,00**	**522,26**	**22.405.500,00**	**12,00**	**1.605.669.400,00**	**5,00**	**9.736.365.600,00**	**602,25**	**22.189.798.250,00**	**602,25**	**33.554.238.750,00**	**100,20**	**99,09**	**1.124,50**	**57.939.356.721,00**	**243.04**	**1569.25**	
	104.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	0.00	100.000.000,00	474.00	36.414.400,00	351.00	100.000.000,00	50,00	3.300.000,00	34,00	85.250.700,00	2,00	4.303.500,00	351,00	3.503.000,00	351,00	96.357.200,00	100,00	96,36	825,00	132.771.600,00	0	132.77	
	104.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang	Lokasi	0.00	3.442.166.703,00	747.00	24.310.542.671,00	325.00	30.264.643.804,00	7,00	13.935.500,00	77,00	1.445.768.000,00	2,00	8.360.411.200,00	325,00	20.193.036.100,00	325,00	30.013.150.800,00	100,00	99,17	1.072,00	54.323.693.471,00	0	1578.18	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			Fungsi Hunian																								
	104.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1.00	150.000.000,00	1.00	38.160.900,00	1.00	43.000.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00	4.155.200,00	0,00	5.392.900,00	1,00	24.764.150,00	1,00	38.882.250,00	100,00	90,42	2,00	77.043.150,00	200	51.36	
	104.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0.00	0,00	7.00	0,00	26.00	3.453.800.000,00	0,00	600.000,00	2,00	70.495.500,00	2,00	1.366.258.000,00	26,00	1.968.495.000,00	26,00	3.405.848.500,00	100,00	98,61	33,00	3.405.848.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	96,14					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		4	4		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,20	99,09					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
6	210.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	%	100,00	175.624.174,00	100.00	39.849.000,00	100.00	165.001.085,00	25,10	0,00	29,80	9.920.000,00	29,80	92.704.700,00	15,30	13.264.750,00	100,00	115.889.450,00	100,00	70,24	200,00	155.738.450,00	200	65.99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	210.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sengketa Pertanahan yang Diselesaikan dengan mediasi**	**Bidang**	**20.00**	**155.763.283,00**	**0.00**	**39.849.000,00**	**20.00**	**165.001.085,00**	**3,00**	**0,00**	**8,00**	**9.920.000,00**	**1,00**	**92.704.700,00**	**8,00**	**13.264.750,00**	**20,00**	**115.889.450,00**	**100,00**	**70,24**	**20,00**	**155.738.450,00**	**100**	**99.98**	
	210.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1.00	155.763.283,00	0.00	39.849.000,00	1.00	165.001.085,00	0,00	0,00	0,00	9.920.000,00	0,00	92.704.700,00	1,00	13.264.750,00	1,00	115.889.450,00	100,00	70,24	1,00	155.738.450,00	100	99.98	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	70,24					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	70,24					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang					
7	210.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam Tahun Berjalan	%	100,00	0,00	61.80	6.900.551.220,00	100	5.595.644.000,00	24,90	1.032.595.180,00	46,50	439.861.750,00	8,30	3.328.600,00	20,30	3.956.727.100,00	100,00	5.432.512.630,00	100,00	97,08	161,80	12.333.063.850,00	161.8	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	210.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangu	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Lokasi	4.00	5.769.010.473,00	0.00	6.900.551.220,00	6.00	5.595.644.000,00	1,00	1.032.595.180,00	1,00	439.861.750,00	0,00	3.328.600,00	4,00	3.956.727.100,00	6,00	5.432.512.630,00	100,00	97,08	6,00	12.333.063.850,00	150	213.78	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		nan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Tanah untuk Pembangunan**																								
	210.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	0.00	5.769.010.473,00	0.00	6.900.551.220,00	6.00	5.595.644.000,00	1,00	1.032.595.180,00	1,00	439.861.750,00	0,00	3.328.600,00	4,00	3.956.727.100,00	6,00	5.432.512.630,00	100,00	97,08	6,00	12.333.063.850,00	0	213.78	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	97,08					F
Predikat kinerja(%)																					Sang	Sang		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																					at Tinggi	at Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	97,08					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
8	210.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	%	98,06	650.459.903,00	79.24	721.226.716,00	84.76	634.707.060,00	21,42	54.227.000,00	21,30	33.873.389,00	9,12	190.452.500,00	40,82	300.499.700,00	92,66	579.052.589,00	109,32	91,23	171,90	1.300.279.305,00	175.3	89.02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	210.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparan	Jumlah Aset Tanah Pemerinta	Bidang	1172.00	576.901.047,00	1277.00	721.226.716,00	1372.00	634.707.060,00	342,00	54.227.000,00	344,00	33.873.389,00	229,00	190.452.500,00	763,00	300.499.700,00	1.678,00	579.052.589,00	122,30	91,23	2.955,00	1.300.279.305,00	252.13	225.39	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		nya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	**h Daerah Bersertifikat**																								
	210.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	0.00	576.901.047,00	0.00	721.226.716,00	1.00	634.707.060,00	0,00	54.227.000,00	0,00	33.873.389,00	0,00	190.452.500,00	1,00	300.499.700,00	1,00	579.052.589,00	100,00	91,23	1,00	1.300.279.305,00	0	225.39	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	91,23					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				122,30	91,23					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				102,21	93,72					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Total																				**48.449.011.249,00**			**47.551.678.017,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																				**98.15%**						
Predikat																				**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya waktu pelaksanaan yang cukup. 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3. Kepemimpinan yang kuat.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan teknis. 2. Kondisi geografis yang sulit di saat musim penghujan.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Percepat penyusunan dokumen perencanaan teknis. 2. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang optimal. 2. Perencaan ulang jadwal pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.																										

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan 2 urusan yaitu

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat.
2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan.

Pelaksanaan kedua urusan ini dilaksanakan dengan 8 Program dan 17 Kegiatan. Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2024 indikator kinerja pelayanan mengacu pada SPM dan IKK berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021–2026.

Dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, setelah mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai kepala daerah, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program dan Indikator Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan

No	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ NSPK	IKK	Capaian	Target Kinerja				Realisasi	Proyeksi	Realisasi	Catatan
				2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	Analisis
1	Rasio Rumah Layak Huni		√	0,2029	0,2039	0,2051	0,2064	0,2076	0,2054	0,2051	0,2534	
2	Persentase Rumah Layak Huni	√		88,08	87,59	87,78	87,97	88,16	88,57	87,78	91,23	
3	Persentase Permukiman Layak Huni		√	99,080	99,092	99,105	99,117	99,129	99,095	99,105	99,94	
4	Persentase Perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasana, Sarana dan Utilitas Umum)		√	68,98	69,09	70,29	71,49	72,69	70,25	70,29	93,05	
5	Persentase Administrasi Pertanahan yang difasilitasi		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat		√	48,26	53,79	64,86	75,93	87,00	61,37	64,86	88,18	
7	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD		√	80,50	80,21	80,61	81,01	81,41	85,71	80,61	87,84	

Grafik Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tahun 2024

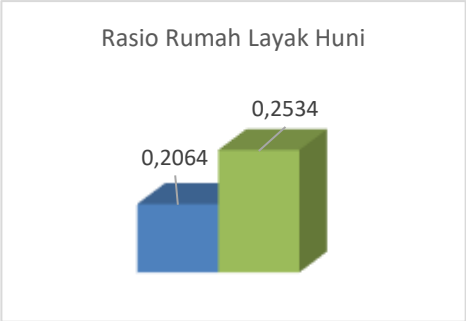

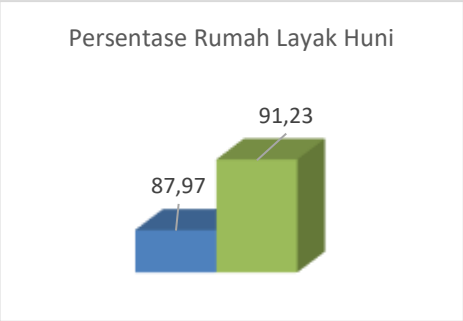

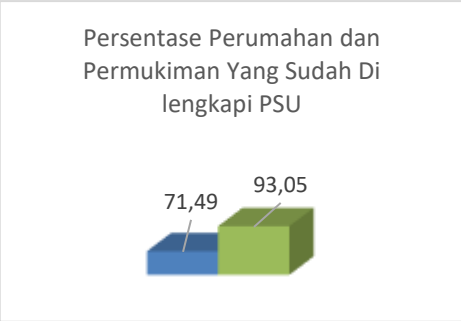

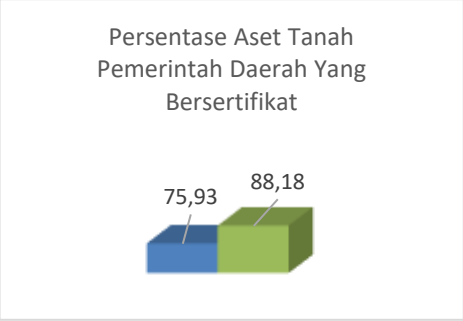

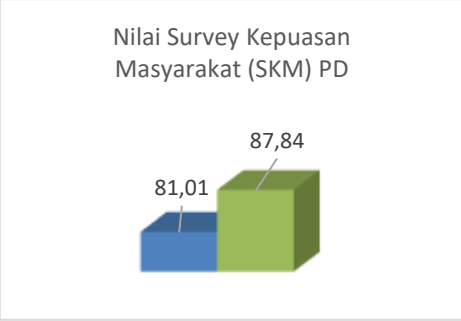

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan, bahwa seluruh indikator kinerja telah sesuai target dan beberapa indikator melampaui target. Berikut adalah indikator yang melampaui target :

1. **Persentase Rumah Layak Huni.**

   Capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni sebesar 91,23% dari target 87,97% capaian ini di dukung oleh 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan antara lain :

   a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terverifikasi dengan capaian 129.360 unit dari target 115.000 unit rumah, dengan tingkat capaian 99,02%;

      1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan indikator Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki dengan capaian 15 unit dari target 15 unit rumah dengan tingkat capaian 100%.

2. **Persentase Permukiman Layak Huni.**

Sasaran Kinerja Persentase Permukiman Layak Huni ini memperbandingkan Luas permukiman layak huni dengan luas seluruh kawasan permukiman dikalikan seratus. Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 99,94 dari target 99,117. Realisasi 99,94 ini diperoleh dari perhitungan luas kawasan permukiman yang layak huni tahun sebelumnya sebesar 30.130,20 ha di tambah luas penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 2,5 ha, sehingga luas kawasan permukiman layak huni sampai dengan tahun 2024 sebesar 30.132,7 ha dibagi luas seluruh kawasan permukiman seluas 30.151 dikalikan seratus, sehingga diperoleh hasil 99,44%.

3. **Persentase Perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasana, Sarana dan Utilitas Umum).**

   Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman, direalisasikan sebesar 93.05% dengan realisasi Anggaran Rp. 33.554.238.750. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum (PSU) didukung oleh kegiatan :

   a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan indikator PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman dan layak, direalisasikan sebesar 602.25 km dari target 601.05 km dengan tingkat capaian 100,20%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.554.238.750,00 atau 99.02%. Kegiatan ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan antara lain:
      1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, direalisasikan sebesar 351 dokumen dari target sebesar 351 dokumen dengan tingkat capaian 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 96.357.200,00 atau 96.36%.
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikator Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian dengan capaian 325 lokasi dari target 325 lokasi dengan tingkat capaian 100%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 30.013.150.800,00 atau 99,17%.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan capaian 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan tingkat capaian 100%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 38.882.250,00 atau 90,42%.

4. Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat.

Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat, direalisasikan sebesar 100%, dari target sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%. Realisasi Anggaran Rp. 579.052.589,00 atau 91,23% Program Penatagunaan Tanah didukung oleh kegiatan berikut:

a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Aset Tanah Pemerintah Daerah Bersertifikat, direalisasikan sebesar 1678 bidang dari target 1372 bidang dengan tingkat capaian 122,3%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 579.052.589,00 atau 91,23 %. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen dengan tingkat capaian 100%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 579.052.589,00 atau 91,23 %.

5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan beserta jajaran secara rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif baik layanan internal kepada pegawai dan layanan eksternal kepada masyarakat umum atas pendapat pegawai internal dan masyarakat umum saat memperoleh pelayanan. Metode pengukuran ini dilakukan dengan asumsi pegawai sebagai pemberi layanan dan juga pegawai dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Jika pegawai dan masyarakat (pengguna layanan) merasa puas atas layanan yang diberikan maka dapat dikatakan pegawai (pemberi layanan) telah bekerja dengan integritas yang

tinggi, artinya bekerja secara profesional, bebas dari gratifikasi, pungli, korupsi dan gratifikasi. Sehingga tidak heran jika konten quisioner survei meliputi budaya organisasi terkait suap/gratifikasi, sistem anti korupsi melalui Whistle Blowing System, Pengelolaan SDM terkait praktik jual beli jabatan hingga pengelolaan anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa yang bersih dari korupsi dan gratifikasi. Dengan demikian nilai Survey Kepuasan Layanan Internal dan Eksternal tepat jika diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyrakat didapatkan melalui survei secara elektronik atau dikenal dengan e-survey yang diakses pada situs laman https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=917. Keseluruhan hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Hal ini sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2024 yang diakses melalui https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=917 per 31 Desember 2024, Survey Kepuasan Masyarakat jajaran Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan menunjukkan angka indeks 87,84. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 87,84 masuk dalam kategori predikat “A” atau “Sangat Baik”, dan nilai ini juga menunjukkan tingkat kepuasan pegawai dan masyarakat terkait pelayanan administrasi dan fasilitatif organisasi serta pelayanan umum kepada masyarakat termasuk tinggi. Dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didapatkan persentase capaian kinerja pada indikator nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 109,59%, hal ini menunjukkan capaian kinerja telah “Terpenuhi” dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga masuk dalam kategori predikat penilaian “Sangat Baik”.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026, permasalahan-permasalahan yang mendasari adalah sebagai berikut :

1) Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang cukup tinggi;
2) Kewajiban pelaksanaan penerapan standart pelayanan minimal (SPM) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
3) Diperlukan dukungan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman khususnya di tingkat desa dan kawasan perdesaan.
5) Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana sarana utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman diwilayah perbatasan;
6) Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan infrastruktur permukiman.
7) Penyediaan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum seiring pertumbuhan pembangunan didaerah;
8) Dukungan dan kerjasama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dengan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah daerah.
9) Pentingnya konsolidasi tanah untuk secara optimal seimbang dan lestari dengan meningkatkan efisiensi penggunaan tanah di wilayah perkotaan dan meningkatkan produktivitas penggunaan tanah di wilayah pedesaan.
10) Pentingnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, serta mendorong sistem pemerintahan yang terbuka, inovatif dan akuntabel.
11) Pentingnya Perencanaan Pengarusutamaan Gender dalam Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
12) Pengembangan Inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

13) Pembinaan SDM untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Visi Bupati Pacitan yaitu **"Masyarakat Semakin SEJAHTERA BAHAGIA"** Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-3 yaitu **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pacitan

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				53.924.487.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.724.485.836	
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				53.924.487.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				50.724.485.836	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.469.959.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.469.958.898	
1	4	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.356.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.356.000	
1	4	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	43.779.701	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	43.779.700	
1	4	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	14.576.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	14.576.300	
1	4	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			3.519.159.133	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			3.519.159.068	
1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	28 Orang/ bulan	2.812.090.320	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	28 Orang/ bulan	2.812.090.268	
1	4	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	632.517.612	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	632.517.600	
1	4	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	74.551.201	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	74.551.200	
1	4	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			9.731.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			9.731.200	
1	4	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	9.731.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	9.731.200	
1	4	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			61.434.101	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			61.434.100	
1	4	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	39.683.401	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	39.683.400	
1	4	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	21.750.700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	21.750.700	
1	4	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			792.063.997	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan			792.063.981	
1	4	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.962.801	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.962.800	
1	4	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.104.786	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.104.781	
1	4	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	37.130.801	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	37.130.800	
1	4	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.735.801	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.735.800	
1	4	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.426.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.426.600	
1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	330.628.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	330.628.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*
							dan Konsultasi SKPD					dan Konsultasi SKPD			
1	4	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	119.075.202	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	119.075.200	
1	4	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pacitan			353.392.039	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pacitan			353.392.032	
1	4	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	257.475.050	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	257.475.045	
1	4	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	95.916.989	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	95.916.987	
1	4	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pacitan			222.244.004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pacitan			222.244.000	
1	4	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	222.244.004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	222.244.000	
1	4	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pacitan			453.578.525	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pacitan			453.578.517	
1	4	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	114.505.402	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	114.505.400	
1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	173.980.623	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	173.980.620	
1	4	1	02.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.092.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.092.497	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				8.671.703.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				8.471.702.822	
1	4	2	02.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				103.933.074	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				101.536.009	
1	4	2	02.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	12 Dokumen	103.933.074	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	12 Dokumen	101.536.009	Untuk Pendataan Wilayah Rawan Bencana untuk pencapaian Penerapan SPM
1	4	2	02.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				8.567.769.926	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				8.370.166.813	
1	4	2	02.03	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	52.841.653	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	51.622.938	Untuk Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
1	4	2	02.06	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah	8.514.928.273	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah	8.318.543.875	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				761.606.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				761.605.853	
1	4	3	02.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan				761.606.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan				761.605.853	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*
					Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
1	4	3	02.03	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Pacitan	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	8,1 Ha	761.606.000	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Pacitan	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	7,4 Ha	761.605.853	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				332.628.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				332.627.763	
1	4	4	02.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				332.628.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				332.627.763	
1	4	4	02.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Pacitan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	12 Unit Rumah;	277.595.899	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Pacitan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	12 Unit Rumah;	277.595.701	
1	4	4	2.01	7	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	12 Laporan	55.032.101	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	12 Laporan	55.032.062	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				38.688.591.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				35.688.590.500	
1	4	5	02.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				38.688.591.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				35.688.590.500	
1	4	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	133.311.797	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	122.974.500	
1	4	5	02.01	11	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	9 Lokasi	38.555.279.203	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kabupaten Pacitan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	8 Lokasi	35.565.616.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.296.689.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.296.688.778	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4.296.689.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4.296.688.778	
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				3.812.060.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				3.812.060.000	
2	10	5	02.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.812.060.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.812.060.000	
2	10	5	02.01	5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	3.723.943.226	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	3.723.943.226	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*
2	1 0	5	02.0 1	7	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupat en Pacitan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	88.116.774	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupat en Pacitan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	88.116.774	
2	1 0	1 0			PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH				484.629.000	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH				484.628.778	
2	1 0	1 0	02.0 1		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				484.629.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				484.628.778	
2	1 0	1 0	02.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kabupat en Pacitan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Dokumen	484.629.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kabupat en Pacitan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Dokumen	484.628.778	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

Dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menginventarisasi usulan tahun lalu yang belum terealisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menginventarisasi permasalah/ usulan-usulan program/ kegiatan dari masyarakat.
b. Menyesuaikan usulan-usulan tersebut apakah sudah sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
c. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan.
d. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
e. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
f. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pacitan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**		
							Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni		
1	**4**	**2**	**02.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		
1	4	2	02.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	12 Dokumen	Pendataan Rumah di jalur SUTET
1	**4**	**2**	**02.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**		
1	4	2	02.03	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	Rehabilitasi rumah korban bencana
1	4	2	02.03	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah	Rehabilitasi rumah korban bencana
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani**		
1	**4**	**3**	**02.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Kab. Pacitan**	**Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh**		
1	4	3	02.03	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Pacitan	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	8,1 Ha	
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**		
1	**4**	**4**	**02.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah rumah layak huni di luar kawasan kumuh**		

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	4	4	02.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Pacitan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	12 Unit Rumah;	
1	4	4	02.01	7	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	12 Laporan;	
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		**Prosentase Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Aman dan Layak**		
1	**4**	**5**	**02.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Kab. Pacitan**	**PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman dan layak**		
1	4	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	
1	4	5	02.01	11	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Pacitan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	9 Lokasi	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**Presentase terlaksananya fasilitasi ganti rugi tanah untuk pembangunan kepentingan umum dalam tahun berjalan**		
2	**10**	**5**	**02.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**		
2	10	5	02.01	5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	
2	10	5	02.01	7	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**Presentase tanah pemerintah daerah bersertifikat**		

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	**10**	**10**	**02.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pendaftaran hak atas tanah pemerintah daerah**		
2	10	10	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan tema pembangunan Tahun 2026 adalah "**Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial**".

Prioritas pembangunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih dan jaringan komunikasi wilayah perbatasan;
2) Intensitas penggunaan teknologi informasi dalam mewujudkan pelayanan pendidikan berkarakter dan pelayanan kesehatan yang modern;
3) Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata;
4) Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal;
5) Penguatan solidaritas sosial berbasis kearifan lokal;
6) Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

1) Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
2) Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta

didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.

2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
3) teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
5) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
6) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang

mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;

7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
8) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
9) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
10) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
11) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
12) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
13) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
14) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
15) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
16) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
17) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2023

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat. mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat :

Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat:

1) Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan
2) Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
3) Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
4) Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5) Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
6) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial;
7) Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas;
8) Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan permasalahan permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi maka ditentukan tujuan dan sasaran renja tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan Renja tahun 2026 adalah :

1) Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
2) Terciptanya keadilan dalam penguasaan , kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Sasaran Renja tahun 2026 adalah :

1) Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah
2) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
3) Meningkatnya ketersediaan kawasan permukiman yang layak
4) Meningkatnya fasilitasi administrasi pertanahan

III.3. Program Dan Kegiatan

A. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah :
   a. Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah;
   b. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik;
   c. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
   d. Pengembangan Internet Of Things (TOT) dalam segala bidang pembangunan;
   e. Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respon atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045).

B. Prioritas OPD dalam penyusunan Program dan kegiatan renja tahun 2026 adalah
   a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yaitu :

      Visi Kabupaten Pacitan adalah "Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera dan Bahagia"

      Untuk pencapaian visi tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai tugas dan fungsinya mendukung pada misi pertama Kepala Daerah yaitu : “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup ”.
   b. Pengentasan Kemiskinan.

      Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat, dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak tempat tinggal dan berkehidupan yang layak, begitu juga dengan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa Pemerintah mempunyai Kewajiban untuk

Menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, untuk pengentasan kemiskinan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan turut andil dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Pencapaian Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK).

   Dalam dokumen renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sudah di tetapkan beberapa indikator kinerja yang harus di capai setiap tahunnya, sehingga dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2026 tidak terlepas dari indikator kinerja yang sudah di tetapkan.

d. Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat.

   Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

   Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

   Fasilitasi tersebut berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

   Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan penggantian kerugian, penyusunan rencana tapak dan detail engineering design (DED) rumah susun umum atau rumah khusus, pembangunan rumah susun umum, pembangunan rumah khusus dan atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

   Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

i. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
ii. Standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
iii. Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
iv. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
v. Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
vi. Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria dan penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria.

e. Penanganan stunting.
f. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ;
g. Dukungan terhadap pelaksanaan Program Integrasi Layanan Primer Kesehatan;
h. Dukungan pelaksanaan program TMMD.

i. Pelaksanaan Reforma Agraria.

j. Tata Kelola Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan cara :

   i. Optimalisasi regulasi;

   ii. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik;

   iii. Penguatan kapasitas SDM dalam hal manajemen data dan keamanan informasi;

   iv. Peningkatan kapasitas digital SDM ASN;

   v. Peningkatan digitalisasi Arsip, digitalisasi pengelolaan aset dan digitalisasi managemen kepegawaian.

C. Dalam rangka pencapaian tujuan dan saran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2026 mencakup 7 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan yang ditampilkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2026,
Dan Prakiraan Maju tahun 2027

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**53.924.487.000**				
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**53.924.487.000**				
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.469.959.000**				
1	**4**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**58.356.001**				
1	4	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	11 Dokumen	43.779.701	DAU		11 Dokumen	
1	4	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	13 Laporan	14.576.300	DAU		13 Laporan	
1	**4**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**3.519.159.133**				
1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pacitan	28 Orang/bulan	2.812.090.320	DAU		28 Orang/bulan	
1	4	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pacitan	12 Dokumen	632.517.612	DAU		12 Dokumen	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pacitan	9 Dokumen	74.551.201	DAU		9 Dokumen	
1	**4**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**9.731.200**				
1	4	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pacitan	6 Laporan	9.731.200	DAU		6 Laporan	
1	**4**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**61.434.101**				
1	4	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	39.683.401	DAU		1 Paket	
1	4	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pacitan	12 Dokumen	21.750.700	DAU		12 Dokumen	
1	**4**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**792.063.997**				
1	4	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	57.962.801	DAU		1 Paket	
1	4	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	200.104.786	DAU		1 Paket	
1	4	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	37.130.801	DAU		1 Paket	
1	4	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	12 Paket	34.735.801	DAU		12 Paket	
1	4	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	12 Paket	12.426.600	DAU		12 Paket	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	330.628.006	DAU		12 Laporan	
1	4	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pacitan	1 Dokumen	119.075.202	DAU		1 Dokumen	
1	**4**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**353.392.039**				
1	4	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	Kabupaten Pacitan	4 Unit	257.475.050	DAU		4 Unit	
1	4	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Unit	95.916.989	DAU		1 Unit	
1	**4**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**222.244.004**				
1	4	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	222.244.004	DAU		12 Laporan	
1	**4**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**453.578.525**				
1	4	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Pacitan	64 Unit	114.505.402	DAU		64 Unit	
1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Pacitan	55 Unit	173.980.623	DAU		55 Unit	
1	4	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Pacitan	1 Unit	165.092.500	DAU		1 Unit	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**8.671.703.000**				
1	**4**	**2**	**02.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**103.933.074**				
1	4	2	02.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Pacitan	12 Dokumen	103.933.074	DAU	Untuk Pendataan Wilayah Rawan Bencana untuk pencapaian Penerapan SPM	12 Dokumen	
1	**4**	**2**	**02.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**8.567.769.926**				
1	4	2	02.03	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	1 Unit Rumah	52.841.653	DAU	Untuk Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	1 Unit Rumah	
1	4	2	02.03	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	10 Unit Rumah	8.514.928.273	DAU	Untuk Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	10 Unit Rumah	
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				**761.606.000**				
1	**4**	**3**	**02.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**Kabupaten Pacitan**		**761.606.000**				
1	4	3	02.03	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kabupaten Pacitan	8,10 Ha	761.606.000	DAU		9,50 Ha	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				**332.628.000**				
1	**4**	**4**	**02.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**332.628.000**				
1	4	4	02.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kabupaten Pacitan	12 Unit Rumah	277.595.899	DAU		12 Unit Rumah	
1	4	4	02.01	7	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	55.032.101	DAU		12 Laporan	
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**38.688.591.000**				
1	**4**	**5**	**02.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Kabupaten Pacitan**		**38.688.591.000**				
1	4	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	133.311.797	DAU		12 Laporan	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	5	02.01	11	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kabupaten Pacitan	9 Lokasi	38.555.279.203	DAU		9 Lokasi	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.296.689.000**				
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**4.296.689.000**				
2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**				**3.812.060.000**				
2	**10**	**5**	**02.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**3.812.060.000**				
2	10	5	02.01	5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Kabupaten Pacitan	2 Laporan	3.723.943.226	DAU		2 Laporan	
2	10	5	02.01	7	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	20 Laporan	88.116.774	DAU		20 Laporan	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				**484.629.000**				
2	**10**	**10**	**02.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya**		**Kabupaten Pacitan**		**484.629.000**				

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
2	10	10	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	484.629.000	DAU		12 Laporan	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan secara detail kami sajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**53.924.487.000**				**56.858.142.700**
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**53.924.487.000**				**56.858.142.700**
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.469.959.000**				**5.524.658.000**
1	**4**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**58.356.001**				**58.939.555**
1	4	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	11 Dokumen	43.779.701	DAU		11 Dokumen	44.217.493
1	4	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pacitan	13 Laporan	14.576.300	DAU		13 Laporan	14.722.062
1	**4**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**3.519.159.133**				**3.554.350.346**
1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pacitan	28 Orang/bulan	2.812.090.320	DAU		28 Orang/bulan	2.840.210.921
1	4	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pacitan	12 Dokumen	632.517.612	DAU		12 Dokumen	638.842.720

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pacitan	9 Dokumen	74.551.201	DAU		9 Dokumen	75.296.705
1	**4**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**9.731.200**				**9.828.511**
1	4	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pacitan	6 Laporan	9.731.200	DAU		6 Laporan	9.828.511
1	**4**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**61.434.101**				**62.048.435**
1	4	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	39.683.401	DAU		1 Paket	40.080.230
1	4	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pacitan	12 Dokumen	21.750.700	DAU		12 Dokumen	21.968.205
1	**4**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**792.063.997**				**799.984.550**
1	4	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	57.962.801	DAU		1 Paket	58.542.422
1	4	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	200.104.786	DAU		1 Paket	202.105.811
1	4	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Paket	37.130.801	DAU		1 Paket	37.502.105
1	4	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	12 Paket	34.735.801	DAU		12 Paket	35.083.155
1	4	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	12 Paket	12.426.600	DAU		12 Paket	12.550.865

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	330.628.006	DAU		12 Laporan	333.934.251
1	4	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pacitan	1 Dokumen	119.075.202	DAU		1 Dokumen	120.265.941
1	**4**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**353.392.039**				**356.925.921**
1	4	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	Kabupaten Pacitan	4 Unit	257.475.050	DAU		4 Unit	260.049.773
1	4	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	1 Unit	95.916.989	DAU		1 Unit	96.876.148
1	**4**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**222.244.004**				**224.466.420**
1	4	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	222.244.004	DAU		12 Laporan	224.466.420
1	**4**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kabupaten Pacitan**		**453.578.525**				**458.114.262**
1	4	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Pacitan	64 Unit	114.505.402	DAU		64 Unit	115.650.444
1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Pacitan	55 Unit	173.980.623	DAU		55 Unit	175.720.411
1	4	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Pacitan	1 Unit	165.092.500	DAU		1 Unit	166.743.407

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**8.671.703.000**				**9.105.288.150**
1	**4**	**2**	**02.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**103.933.074**				**109.129.727**
1	4	2	02.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Pacitan	12 Dokumen	103.933.074	DAU	Untuk Pendataan Wilayah Rawan Bencana untuk pencapaian Penerapan SPM	12 Dokumen	109.129.727
1	**4**	**2**	**02.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**8.567.769.926**				**8.996.158.423**
1	4	2	02.03	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	1 Unit Rumah	52.841.653	DAU	Untuk Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	1 Unit Rumah	55.483.737
1	4	2	02.03	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	10 Unit Rumah	8.514.928.273	DAU	Untuk Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	10 Unit Rumah	8.940.674.686
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				**761.606.000**				**769.222.000**
1	**4**	**3**	**02.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**Kabupaten Pacitan**		**761.606.000**				**769.222.000**
1	4	3	02.03	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kabupaten Pacitan	8,10 Ha	761.606.000	DAU		9,50 Ha	769.222.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				**332.628.000**				**835.954.000**
1	**4**	**4**	**02.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**332.628.000**				**835.954.000**
1	4	4	02.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kabupaten Pacitan	12 Unit Rumah	277.595.899	DAU		12 Unit Rumah	697.648.430
1	4	4	02.01	7	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	55.032.101	DAU		12 Laporan	138.305.570
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**38.688.591.000**				**40.623.020.550**
1	**4**	**5**	**02.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Kabupaten Pacitan**		**38.688.591.000**				**40.623.020.550**
1	4	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	133.311.797	DAU		12 Laporan	139.977.387

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	5	02.01	11	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kabupaten Pacitan	9 Lokasi	38.555.279.203	DAU		9 Lokasi	40.483.043.163
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.296.689.000**				**4.339.656.000**
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**4.296.689.000**				**4.339.656.000**
2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**				**3.812.060.000**				**3.850.181.000**
2	**10**	**5**	**02.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Kabupaten Pacitan**		**3.812.060.000**				**3.850.181.000**
2	10	5	02.01	5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Kabupaten Pacitan	2 Laporan	3.723.943.226	DAU		2 Laporan	3.761.183.049
2	10	5	02.01	7	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	20 Laporan	88.116.774	DAU		20 Laporan	88.997.951
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				**484.629.000**				**489.475.000**
2	**10**	**10**	**02.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya**		**Kabupaten Pacitan**		**484.629.000**				**489.475.000**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
2	10	10	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Pacitan	12 Laporan	484.629.000	DAU		12 Laporan	489.475.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis tahun ke-2, periode Renstra 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Pacitan, 31 Juli 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PACITAN

HERU TUNGGUL WIDODO, ST., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710122 199603 1 004

RENCANA KINERJA

TAHUN 2026

DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN

- Jl. Gatot Subroto No. 79 Pacitan
- 085967072035
- dinsos.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunianya maka Dinas Sosial Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ini dilakukan sebagai penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2026 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Rencana Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2026 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, - Agustus - 2025
Plt.KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN

KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198505202003121003

DAFTAR ISI

Kata pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 2
3. Maksud dan Tujuan 4
4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 6

2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas 10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 12

2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial 14

3 Program dan Kegiatan 16

BAB IV PENUTUP

Penutup 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 yaitu Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja diatur dalam pasal 16 ayat 2, terdiri dari (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan Rancangan akhir, (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Pembangunan sosial hakekatnya merupakan upaya merealisasikan amanat konstitusi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan "pembangunan manusia seutuhnya" yang meliputi pembangunan fisik/lahiriah, sosial dan mental/batiniah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan, baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama di dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar permasalahan Sosial yang dihadapi adalah :

1) Masih terbatasnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar;

2) Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial;
3) Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial;
4) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial;
5) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing- masing kegiatan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan Sosial dalam satu tahun kedepan yang efektif, efisien serta profesional.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

l. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2026-2045.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

o. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Pacitan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2026 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari rencana strategis Dinas Sosial.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2026 adalah sebagai bahan awal untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja PD.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuha

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d semeseter dua Tahun 2025 Kabupaten Pacitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/		Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penangg
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)		(	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+1		(13 =		(14 = (6+12))		(15 =		(16)
1	**106.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Hasil Nilai SAKIP**	**Nilai**	**77,00**	**0,00**	**75.00**	**221.856.093,00**	**75.00**	**3.742.578.141,00**	**0,00**	**638.205.049,00**	**72,00**	**1.073.181.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00**	**1.711.386.838,00**	**96,00**	**45,73**	**147,00**	**1.933.242.931,00**	**190.91**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran**	**Jumlah**	**dokumen**	**24.00**	**35.000.000,00**	**24.00**	**24.484.400,00**	**24.00**	**25.000.000,00**	**7,00**	**4.929.200,00**	**4,00**	**6.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**11.689.200,00**	**45,83**	**46,76**	**35,00**	**36.173.600,00**	**145.83**	**103.35**	
	106.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokum	Dokumen	24.00	35.000.000,00	24.00	24.484.400,00	24	25.000.000,00	7,00	4.929.200,00	4,00	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11.689.200,00	45,83	46,76	35,00	36.173.600,00	145.83	103.35	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=1
																					Predikat kinerja(%)		Sangat	Sangat			
	106.01.2.02	**Administrasi**	**Jumlah**	**dokumen**	**59.0**	**2.795.000.000,0**	**59.**	**2.386.128.548,0**	**59.**	**2.560.691.591,00**	**13,00**	**476.861.568,00**	**16,00**	**880.205.1**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**29,0**	**1.357.066.7**	**49,15**	**53,00**	**88,0**	**3.743.195.282,0**	**149.15**	**133.**	
	106.01.2.02.	Penyediaan Gaji	Jumlah	Orang	25.0	2.750.000.000,00	23.	2.348.532.848,00	22.	2.520.691.591,00	26,00	470.684.818,00	26,00	866.155.36	0,00	0,0	0,00	0,0	26,0	1.336.840.1	118,18	53,03	49,0	3.685.373.032,00	196	134.	
	106.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuan	Laporan	0.00	45.000.000,00	12.00	37.595.700,00	12.00	40.000.000,00	3,00	6.176.750,00	3,00	14.049.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	20226550	50,00	50,57	18,00	57.822.250,00	0	128.49	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		84.09	51.80			1=2
																					Predikat kinerja(%)		Tinggi	Rendah			
	106.01.2.06	**Administrasi Umum**	**Presentase**	**pers**	**100.00**	**560.000.000,00**	**100.00**	**466.323.841,00**	**100.00**	**447.409.995,00**	**25,00**	**54.724.000,00**	**25,00**	**54.967.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**	**109.691.100,00**	**50,00**	**24,52**	**150,00**	**576.014.941,00**	**150**	**102.86**	
	106.01.2.06.	Penyediaan Bahan	Jumlah	Pa	12.0	200.000.000,00	12.	140.879.000,00	1	173.035.195,00	3,00	24.240.600,00	3,00	23.451.50	0,00	0,0	0,00	0,0	6,0	47.692.10	50,00	27,56	18,0	188.571.100,00	150	94.2	
	106.01.2.06.0005	Penyediaan Barang	Jumlah	Paket	12.0	35.000.000,00	12.00	24.538.500,00	12	21.559.500,00	3,00	1.234.000,00	3,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3695000	50,00	17,14	18,00	28.233.500,00	150	80.67	
	106.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah	Laporan	24.0	325.000.000,00	24.00	300.906.341,00	24.00	252.815.300,00	6,00	29.249.400,00	6,00	29.054.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	58304000	50,00	23,06	36,00	359.210.341,00	150	110.53	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		50.00	22.59			1=3
																					Predikat kinerja(%)		Sangat	Sangat			
	106.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik**	**Presentase**	**pers**	**100.00**	**50.000.000,00**	**100.00**	**46.230.000,00**	**100.00**	**31.580.055,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**31.580.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**	**31.580.055,00**	**50,00**	**100,00**	**150,00**	**77.810.055,00**	**150**	**155.62**	
	106.01.2.07.	Pengadaan	Jumlah	Unit	24.0	50.000.000,00	50.	46.230.000,00	25.	31.580.055,00	0,00	0,00	21,00	31.580.055	0,00	0,0	0,00	0,0	21,0	31.580.055	84,00	100,00	71,0	77.810.055,00	295.83	155.	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		84.00	100.00			1=4
																					Predikat kinerja(%)		Tinggi	Sangat			
	106.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Presentase**	**pers**	**100.00**	**375.000.000,00**	**100.00**	**292.234.775,00**	**100.00**	**339.551.000,00**	**25,00**	**80.890.281,00**	**25,00**	**70.581.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**	**151.471.749,00**	**50,00**	**44,61**	**150,00**	**443.706.524,00**	**150**	**118.32**	
	106.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa	Jumlah	Laporan	12.0	100.000.000,00	12.00	70.068.302,00	12	84.115.000,00	3,00	21.646.735,00	3,00	19.654.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	41.300.990,00	50,00	49,10	18,00	111.369.292,00	150	111.37	
	106.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah	Laporan	12.0	275.000.000,00	12.00	222.166.473,00	12	255.436.000,00	3,00	59.243.546,00	3,00	50.927.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	110170759	50,00	43,13	18,00	332.337.232,00	150	120.85	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		50.00	46.12			1=5

																				Predikat kinerja(%)	Sangat	Sangat					
	106.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik**	**Persenta**	**pers**	**80.00**	**275.000.000,00**	**80.00**	**221.856.093,00**	**80.00**	**338.345.500,00**	**19,00**	**20.800.000,00**	**21,00**	**29.088.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**49.888.000,00**	**50,00**	**14,74**	**120,00**	**271.744.093,00**	**150**	**98.82**	
	106.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kend	Unit	20.00	75.000.000,00	20.00	51.382.700,00	20.00	72.075.500,00	7,00	7.650.000,00	4,00	17.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	24.928.000,00	55,00	34,59	31,00	76.310.700,00	155	101.75	
	106.01.2.09.	Pemeliharaan	Jumlah	Un	20.0	75.000.000,00	21.	70.520.000,00	20.	41.110.000,00	3,00	13.150.000,00	3,00	11.810.00	0,00	0,0	0,00	0,0	6,0	249600	30,00	60,72	27,0	95.480.000,00	135	127.	
	106.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah	Unit	1.00	125.000.000,00	1.00	99.953.393,00	1	225.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,00	99.953.393,00	100	79.96	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	28,33	31,77					1=6
																				Predikat kinerja(%)	Sangat	Sangat					
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	294,98	283,63	294,98				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat	Sangat					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
2	**106.02**	**PROGRAM PEMBERDAY**	**Persentase**	**pers**	**77,50**	**0,00**	**66.00**	**328.171.500,00**	**76.40**	**384.200.000,00**	**6,00**	**30.295.000,00**	**0,00**	**56.512.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**86.807.522,00**	**7,85**	**22,59**	**72,00**	**414.979.022,00**	**92.9**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber**	**Jumlah**	**orang**	**200.00**	**405.000.000,00**	**200.00**	**328.171.500,00**	**125.00**	**384.200.000,00**	**0,00**	**30.295.000,00**	**0,00**	**56.512.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.807.522,00**	**0,00**	**22,59**	**200,00**	**414.979.022,00**	**100**	**102.46**	
	106.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan	Jumlah	Orang	25.00	95.000.000,00	25.00	91.372.000,00	25	90.000.000,00	0,00	20.144.000,00	0,00	22.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834.000,00	0,00	47,59	25,00	134.206.000,00	100	141.27	
	106.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Lemb	Lembaga	12.00	275.000.000,00	10.00	214.723.000,00	12.00	269.200.000,00	2,00	10.151.000,00	0,00	28.529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38680500	16,67	14,37	12,00	253.403.500,00	100	92.15	
	106.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya	Jumlah Sertifikat yang dari	Sertifikat	22.00	35.000.000,00	22.00	22.076.500,00	22	25.000.000,00	2,00	0,00	0,00	5.293.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5293022	9,09	21,17	24,00	27.369.522,00	109.09	78.2	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,59	27,71					1=1
																				Predikat kinerja(%)	Sangat	Sangat					
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0,00	22,59	0/1				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat	Sangat					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
3	**106.04**	**PROGRAM**	**Pe**	**Pe**	**78,0**	**0,00**	**77.**	**422.250.900,00**	**78.**	**462.400.000,00**	**1,00**	**86.639.500,00**	**12,00**	**104.805.9**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**12,0**	**191.445.4**	**15,38**	**41,40**	**89,7**	**613.696.350,00**	**115.12**	**0**	**Dinas**
	106.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas**	**Jumlah penyandang**	**orang**	**150.00**	**700.000.000,00**	**462.00**	**320.264.500,00**	**150.00**	**367.193.485,00**	**19,00**	**62.169.000,00**	**33,00**	**77.073.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,00**	**139.242.450,00**	**34,67**	**37,92**	**514,00**	**459.506.950,00**	**342.67**	**65.64**	
	106.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Oran	Orang	25.00	250.000.000,00	10.00	51.309.500,00	25.00	104.473.985,00	0,00	12.883.600,00	0,00	7.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787.600,00	0,00	19,90	10,00	72.097.100,00	40	28.84	
	106.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Jumlah Peserta	Orang	150.00	200.000.000,00	187.00	136.504.000,00	150.00	160.940.000,00	13,00	34.557.000,00	23,00	32.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	66994000	24,00	41,63	223,00	203.498.000,00	148.67	101.75	
	106.04.2.01.0012	Pemberian Layanan	Jumlah	Oran	10.00	250.000.000,00	23.00	132.451.000,00	10	101.779.500,00	6,00	14.728.400,00	10,00	36.732.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	51460850	160,00	50,56	39,00	183.911.850,00	390	73.56	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	61,33	37,36					1=1
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub	Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1	(	(3	(4	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+1		(13 =		(14 = (6+12))		(15 =		(16)

	106.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah**	**Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan**	**orang**	**100.00**	**250.000.000,00**	**300.00**	**101.986.400,00**	**100.00**	**95.206.515,00**	**85,00**	**24.470.500,00**	**85,00**	**27.732.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**52.203.000,00**	**170,00**	**54,83**	**470,00**	**154.189.400,00**	**470**	**61.68**	
	106.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Orang	100.00	250.000.000,00	250.00	101.986.400,00	100.00	95.206.515,00	85,00	24.470.500,00	85,00	27.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	52.203.000,00	170,00	54,83	420,00	154.189.400,00	420	61.68	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	170.00	54.83					1=2
																					Predikat kinerja(%)	Sangat	Renda					
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	204.67	92.75	204.67/1				
																					Predikat kinerja(%)	Sangat	Sanga					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
4	**106.05**	**PROGRAM PERLINDU**	**Persentase PPKS yang**	**persen**	**80,00**	**0,00**	**84.87**	**8.051.655.234,00**	**80.00**	**8.300.127.200,00**	**7,00**	**225.133.357,00**	**7,00**	**232.497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**457.630.357,00**	**8,75**	**5,51**	**91,87**	**8.509.285.591,00**	**114.84**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir**	**Persentase DTKS yang**	**persen**	**80.00**	**3.050.000.000,00**	**75.00**	**8.051.655.234,00**	**77.00**	**8.300.127.200,00**	**134,51**	**225.133.357,00**	**0,00**	**232.497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,51**	**457.630.357,00**	**174,69**	**5,51**	**209,51**	**8.509.285.591,00**	**261.89**	**278.99**	
	106.05.2.02.00	Pengelolaan Data Fakir	Jumlah Keluarga yang	Keluarga	125673.00	550.000.000,00	121067.00	454.711.000,00	121067.00	484.000.000,00	160.822,00	103.650.000,00	0,00	123.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.822,00	227.236.000,00	132,84	46,95	281.889,00	681.947.000,00	224,3	123.99	
	106.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima	Keluarga	23132.00	2.500.000.000,00	27726.00	7.596.944.234,00	27980.00	7.816.127.200,00	55.538,00	121.483.357,00	0,00	108.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,00	230394357	198,49	2,95	83.264,00	7.827.338.591,00	359.95	313.09	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	165.67	24.95					1=1
																					Predikat kinerja(%)	Sangat	Sanga					
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	174.69	5.51	174.69/1				
																					Predikat kinerja(%)	Sangat	Sanga					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
5	**106.06**	**PROGRAM**	**Persentase korban**	**persen**	**100,00**	**0,00**	**100.00**	**204.003.475,00**	**100.00**	**170.000.000,00**	**12,00**	**20.510.000,00**	**23,00**	**50.177.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**70.687.500,00**	**23,00**	**41,58**	**123,00**	**274.690.975,00**	**123**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.06.2.01	**Perlindungan Sosial**	**Jumlah korban**	**orang**	**150.00**	**175.000.000,00**	**350.00**	**91.002.725,00**	**100.00**	**85.000.000,00**	**142,00**	**1.600.000,00**	**27,00**	**39.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,00**	**41.075.000,00**	**169,00**	**48,32**	**519,00**	**132.077.725,00**	**346**	**75.47**	
	106.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Orang	150.00	75.000.000,00	0.00	1.788.900,00	100.00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.900,00	0	2.39	
	106.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan	Jumlah Korban	Orang	0.00	100.000.000,00	165.00	89.213.825,00	100.00	50.000.000,00	142,00	1.600.000,00	27,00	39.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	41075000	169,00	82,15	334,00	130.288.825,00	0	130.29	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	84.50	41.08					1=1
																					Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sanga					
	106.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberday**	**Jumlah peningkatan kemampuan**	**orang**	**150.00**	**135.000.000,00**	**271.00**	**113.000.750,00**	**150.00**	**85.000.000,00**	**70,00**	**18.910.000,00**	**12,00**	**10.702.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,00**	**29.612.500,00**	**54,67**	**34,84**	**353,00**	**142.613.250,00**	**235.33**	**105.64**	
	106.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan	Jumlah Kampung yang	Kampung	6.00	50.000.000,00	6.00	34.691.950,00	6.00	25.000.000,00	4,00	7.800.000,00	6,00	5.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13.442.500,00	166,67	53,77	16,00	48.134.450,00	266.67	96.27	
	106.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan	Jumlah Orang yang Melaksanakan	Orang	71.00	85.000.000,00	70.00	78.308.800,00	70.00	60.000.000,00	15,00	11.110.000,00	40,00	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	16170000	78,57	26,95	125,00	94.478.800,00	176.06	111.15	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	122.62	40.36					1=2
																					Predikat kinerja(%)	Sangat	Sanga					
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	223.67	83.16	223.67/1				
																					Predikat kinerja(%)	Sangat	Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												

6	**106.07**	**PROGRAM**	**Persentase Taman Makam**	**persen**	**100,00**	**0,00**	**100.00**	**82.872.055,00**	**100.00**	**25.000.000,00**	**25,00**	**11.698.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**11.698.250,00**	**25,00**	**46,79**	**125,00**	**94.570.305,00**	**125**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.07.2.01	**Pemeliharaan**	**Jumlah taman**	**lokasi**	**1.00**	**85.000.000,00**	**1.00**	**82.872.055,00**	**1.00**	**25.000.000,00**	**1,00**	**11.698.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**11.698.250,00**	**100,00**	**46,79**	**2,00**	**94.570.305,00**	**200**	**111.26**	
	106.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman	Jumlah Makam yang Terpenuhi	Makam	1.00	85.000.000,00	1.00	82.872.055,00	1.00	25.000.000,00	1,00	11.698.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11.698.250,00	100,00	46,79	2,00	94.570.305,00	200	111.26	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100.00	46.79					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat	Sanga					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100.00	46.79	100/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat	Sanga					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					29.33	33.93					
Predikat kinerja(%)																					Sangat	Sanga					
Total																					**13.084.305.341.00**			**2.529.655.917.0**			
Persentase Realisasi Anggaran																								**19.33%**			
Predikat																								**Sangat Rendah**			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memiliki tujuan yaitu meningkatnya kebahagiaan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Sosial memiliki sasaran yaitu meningkatkan pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk mencapai target sasaran dan mencapai tujuan dari Dinas Sosial, pada tahun 2025 Dinas Sosial telah melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	SPM Bidang Sosial		70%	75%	75%	77%	70%	75%	75%	77%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Sosial yang masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan Sosial masih kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan sosial, sarana penunjang, dan sarana transportasi pelayanan.
3. Sistem Informasi Data Sosial yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.

4. Anggaran pembiayaan Dinas Sosial masih sangat minim perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Sosial dan peningkatan sarana prasarana Sosial.
5. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan pelayanan sosial. Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah
6. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan dan semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan social.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Sosial. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Sosial						15.316.142.731,00							17.165.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.316.142.731,00							17.165.000.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						15.316.142.731,00							17.165.000.000,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.268.231.003,00						-	4.190.000.000,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24dokumen			-	30.000.000,00			-	-	-	24dokumen	45.000.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen			24 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Dokumen	45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59dokumen			-	2.477.244.441,00			-	-	-	59dokumen	3.045.000.000,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan			27 Orang/bulan	2.445.648.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	26 Orang/bulan	3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59 Laporan			12 Laporan	31.596.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	59 Laporan	45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100persen			-	356.993.915,00			-	-	-	100persen	485.000.000,00	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	181.240.315,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	175.000.000,00	DINAS SOSIAL

													Kel/Desa							
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	13.975.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			12 Laporan	161.778.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100persen			-	5.123.094,00			-	-	-	100persen	50.000.000,00	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			11 Unit	5.123.094,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	100persen			-	303.450.000,00			-	-	-	100persen	365.000.000,00	

						Pemerintahan Daerah														
	1	0 6	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	110.390.000,0 0	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	120.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	193.060.000,0 0	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	245.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	85persen			-	95.419.553,00			-	-	-	85persen	200.000.000,0 0	
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit			20 Unit	50.752.740,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Unit	85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			25 Unit	34.510.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			2 Unit	10.156.813,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	355.716.493,00						-	450.000.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	14lembaga			-	355.716.493,00			-	-	-	13lembaga	450.000.000,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga			12 Lembaga	299.810.636,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14 Lembaga	325.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang			10 Orang	16.223.277,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang			35 Orang	39.682.580,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	685.454.603,00						-	1.005.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	450Orang			-	685.454.603,00			-	-	-	425Orang	1.005.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang			125 Orang	46.808.903,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250 Orang	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang			20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang			35 Orang	118.054.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			10 Orang	7.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Orang	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang			50 Orang	222.773.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	350 Orang	425.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang			25 Orang	1.994.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	55 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang			15 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			20 Orang	128.653.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Orang	185.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														

							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang			10 Orang	2.980.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	10.825.010.727,00						-	11.180.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	90persen			-	10.825.010.727,00			-	-	-	85persen	11.180.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2800 Orang			34200 Orang	10.275.789.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-	2790 Orang	10.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	150 Usulan			100 Usulan	549.221.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	130 Usulan	680.000.000,00	DINAS SOSIAL

5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	159.975.000,00						-	315.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	250orang			-	55.935.000,00			-	-	-	225orang	110.000.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang			50 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	70 Orang	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang			50 Orang	48.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	165 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	200orang			-	104.040.000,00			-	-	-	175orang	205.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Kampung			6 Kampung	24.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Kampung	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang			70 Orang	79.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75 Orang	155.000.000,00	DINAS SOSIAL
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	21.754.905,00						-	25.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	1lokasi			-	21.754.905,00			-	-	-	1lokasi	25.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	79 Makam			79 Makam	21.754.905,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	79 Makam	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H											**15.316.142.731,00**							**17.165.000.000,00**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yang melibatkan masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Se - Kabupaten Pacitan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan	100 alat bantu	Alokasi disesuaikan dengan Pagu Anggaran

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan berhasil diturunkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu : bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program-program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu :

1. Penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan
2. Adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok dimasyarakat maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis praktis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 kebijakan afirmatif yang lebih komperehensif, integratif dan bertarget spesifik, yaitu :

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif,
2. Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, serta
3. Mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan. Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif integratif dan bertarget spesifik terkait dengan upaya mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada

tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis tahun 2021-2026. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2026 :

Tujuan : Terjaminnya ketenangan Masyarakat dalam menjalankan kehidupan; Sasaran yang akan dicapai dalam mendukung tujuan tersebut adalah: Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.3. Program dan Kegiatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Sosial						13.581.444.439,00							14.230.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.581.444.439,00							14.230.000.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						13.581.444.439,00							14.230.000.000,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.634.717.239,00						-	4.230.000.000,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24dokumen			-	25.000.000,00			-	-	-	24dokumen	35.000.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59Dokumen			-	2.672.482.189,00			-	-	-	59Dokumen	3.055.000.000,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.642.830.689,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				59 Laporan	29.651.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100persen			-	456.445.250,00			-	-	-	100persen	495.000.000,00	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	167.584.150,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		185.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	16.559.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	272.301.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100persen			-	3.248.700,00			-	-	-	100persen	50.000.000,00	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	3.248.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	356.456.000,00			-	-	-	100persen	375.000.000,00	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.220.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	251.236.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80persen			-	121.085.100,00			-	-	-	80persen	220.000.000,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	69.975.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	41.110.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL

2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	474.200.000,00						-	530.000.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	230orang			-	474.200.000,00			-	-	-	230orang	530.000.000,00	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	70.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	364.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	40.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	675.400.000,00						-	560.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	250Orang			-	597.850.000,00			-	-	-	250Orang	435.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	125.550.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	301.750.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		185.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	170.550.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	200Orang			-	77.550.000,00			-	-	-	200Orang	125.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	77.550.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	8.527.957.200,00						-	8.625.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	80persen			-	8.527.957.200,00			-	-	-	80persen	8.625.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				121067 Keluarga	661.830.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK	-	-	-		625.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				27726 Keluarga	7.866.127.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		8.000.000.000,00	DINAS SOSIAL

5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	244.170.000,00						-	240.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	450orang			-	68.000.000,00			-	-	-	450orang	125.000.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	58.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	150orang			-	176.170.000,00			-	-	-	150orang	115.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Kampung	30.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	145.670.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK	-	-	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	25.000.000,00						-	45.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	1lokasi			-	25.000.000,00			-	-	-	1lokasi	45.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
											J U M L A H	**13.581.444.439,00**							**14.230.000.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada renstra Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Pacitan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N					Tahun + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Sosial													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Rp. 341.736.893,00	Rp. 13.979.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 355.716.493,00	Rp. 450.000.000,00
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 341.736.893,00	Rp. 13.979.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 355.716.493,00	Rp. 450.000.000,00
1	06	02	2,03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 285.831.036,00	Rp. 13.979.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 299.810.636,00	Rp. 325.000.000,00
1	06	02	2,03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.223.277,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.223.277,00	Rp. 75.000.000,00
1	06	02	2,03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 39.682.580,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.682.580,00	Rp. 50.000.000,00

1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Rp. 685.454.603,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 685.454.603,00	Rp. 1.005.000.000,00
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Rp. 685.454.603,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 685.454.603,00	Rp. 1.005.000.000,00
1	06	04	2,01	0001	Penyediaan Permakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 46.808.903,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 46.808.903,00	Rp. 125.000.000,00
1	06	04	2,01	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
1	06	04	2,01	0003	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 118.054.480,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 118.054.480,00	Rp. 150.000.000,00
1	06	04	2,01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.190.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.190.000,00	Rp. 35.000.000,00
1	06	04	2,01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 222.773.620,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 222.773.620,00	Rp. 425.000.000,00
1	06	04	2,01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.994.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.994.500,00	Rp. 15.000.000,00
1	06	04	2,01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.000.000,00	Rp. 20.000.000,00

							Semua Kel/Desa						
1	06	04	2,01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 128.653.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 128.653.100,00	Rp. 185.000.000,00
1	06	04	2,01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.980.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.980.000,00	Rp. 25.000.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Rp. 10.825.010.727,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.825.010.727,00	Rp. 11.180.000.000,00
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 10.825.010.727,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.825.010.727,00	Rp. 11.180.000.000,00
1	06	05	2,02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.275.789.027,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.275.789.027,00	Rp. 10.500.000.000,00
1	06	05	2,02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 549.221.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 549.221.700,00	Rp. 680.000.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Rp. 159.975.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 159.975.000,00	Rp. 315.000.000,00
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Rp. 55.935.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.935.000,00	Rp. 110.000.000,00
1	06	06	2,01	0001	Penyediaan Makanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.000.000,00	Rp. 35.000.000,00

							Semua Kel/Desa						
1	06	06	2,01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 48.935.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 48.935.000,00	Rp. 75.000.000,00
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Rp. 104.040.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 104.040.000,00	Rp. 205.000.000,00
1	06	06	2,02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.064.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.064.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	06	06	2,02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 79.976.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 79.976.000,00	Rp. 155.000.000,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Rp. 21.754.905,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.754.905,00	Rp. 25.000.000,00
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Rp. 21.754.905,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.754.905,00	Rp. 25.000.000,00
1	06	07	2,01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 21.754.905,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.754.905,00	Rp. 25.000.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 3.263.107.909,00	Rp. 5.123.094,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.268.231.003,00	Rp. 4.190.000.000,00
1	06	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 45.000.000,00

1	06	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 45.000.000,00
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 2.477.244.441,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.477.244.441,00	Rp. 3.045.000.000,00
1	06	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.445.648.041,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.445.648.041,00	Rp. 3.000.000.000,00
1	06	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 31.596.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 31.596.400,00	Rp. 45.000.000,00
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 356.993.915,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 356.993.915,00	Rp. 485.000.000,00
1	06	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 181.240.315,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 181.240.315,00	Rp. 175.000.000,00
1	06	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 13.975.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.975.600,00	Rp. 35.000.000,00
1	06	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 161.778.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 161.778.000,00	Rp. 275.000.000,00
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 0,00	Rp. 5.123.094,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.123.094,00	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 5.123.094,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.123.094,00	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 303.450.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 303.450.000,00	Rp. 365.000.000,00

1	06	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 110.390.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 110.390.000,00	Rp. 120.000.000,00
1	06	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 193.060.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 193.060.000,00	Rp. 245.000.000,00
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 95.419.553,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 95.419.553,00	Rp. 200.000.000,00
1	06	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.752.740,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.752.740,00	Rp. 85.000.000,00
1	06	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 34.510.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.510.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.156.813,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.156.813,00	Rp. 65.000.000,00
							Jumlah	**Rp. 15.297.040.037,00**	**Rp. 19.102.694,00**			**Rp. 15.316.142.731,00**	**Rp. 17.165.000.000,00**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial tahun 2025- 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, - Agustus - 2025
Plt.KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN

KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198505202003121003

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Induk

TAHUN 2026

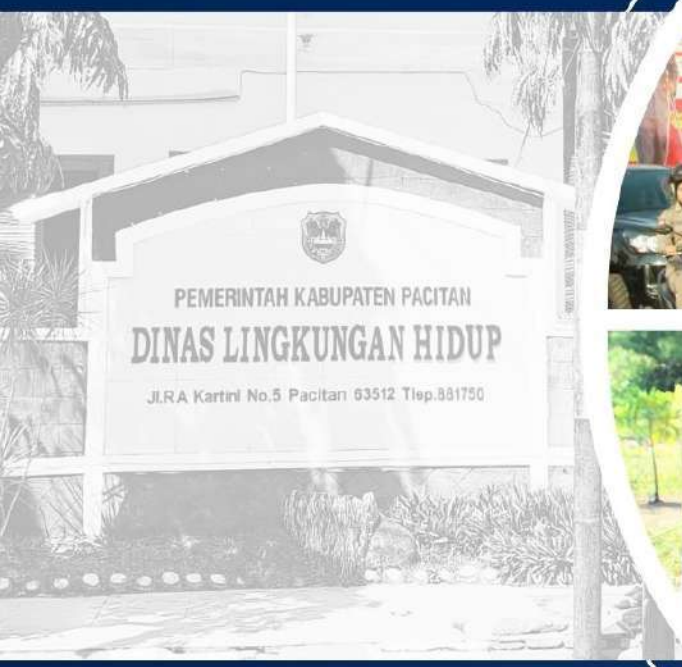

dlh@pacitankab.go.id

dlh.pacitankab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatanan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dibuat dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut telah diterbitkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bidang pembangunan yang langsung menyentuh aspek kehidupan masyarakat dan hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dikaji, direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, terukur dan berkesinambungan yang diselaraskan dengan kemampuan anggaran pemerintah dan potensi masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang meliputi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Bidang Pengelolaan dan Peningkatan Kapsitas Lingkungan akan diimplementasikan melalui berbagai program kegiatan yang direncanakan untuk periode tahunan, lima tahunan maupun jangka panjang. Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang telah disusun dengan prinsip manfaat, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien yang terukur melalui indikator keberhasilan serta dapat dipertanggungjawabkan pada periode akhir tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Program Adipura;
l. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
p. Perbup Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dengan susunan organisasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan maksud dan tujuan untuk suatu periode sebagai ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara keseluruhan.

a. Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk dapat merealisasikan kegiatan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur. Rencana kerja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu tahun yang diambil dari Rencana Stratergis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
b. Tujuan

   Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan adalah :

   a. Menyelenggarakan tugas-tugas dibidang lingkungan hidup daerah.

b. Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah.
c. Melaksanakan pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
d. Melaksanakan fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang tata lingkungan dan amdal.
e. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan selama Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan Program & Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 mengacu pada pencapaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 terdapat 10 program, 14 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja pada Tahun 2026. Adapun Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2024
Kabupaten Pacitan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
211	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**74.10**	**6.606.589.659,00**	**74.85**	**2.658.834.461,00**	**101.01%**	**40.25%**
211	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**145.000.000,00**	**10.00**	**3.938.500,00**	**43.48%**	**2.72%**
211	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	45.000.000,00	4.00	3.938.500,00	100%	8.75%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1.00	100.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	4,38
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
211	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**5.228.732.287,00**	**21.00**	**2.335.890.545,00**	**35.59%**	**44.67%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
211	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	54.00	5.222.653.247,00	49.00	2.335.890.545,00	90.74%	44.73%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2.00	6.079.040,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											45,37	22,37
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
211	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Persentase**	**100.00**	**304.051.425,00**	**18.38**	**29.958.332,00**	**18.38%**	**9.85%**
211	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	5.000.000,00	0.00	1.764.500,00	0%	35.29%
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20.00	231.190.223,00	0.00	14.806.932,00	0%	6.4%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	13.00	8.519.500,00	0.00	779.400,00	0%	9.15%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3.00	9.719.802,00	2.00	3.200.000,00	66.67%	32.92%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50.00	49.621.900,00	14.00	9.407.500,00	28%	18.96%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											18,93	20,54
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
211	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**Persentase**	**100.00**	**537.415.947,00**	**50.00**	**228.237.009,00**	**50%**	**42.47%**
211	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	87.942.875,00	8.00	36.781.081,00	66.67%	41.82%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	449.473.072,00	8.00	191.455.928,00	66.67%	42.6%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											66,67	42,21

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sedang	Sangat Rendah
211	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Persentase**	**100.00**	**391.390.000,00**	**12.90**	**60.810.075,00**	**12.9%**	**15.54%**
211	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60.00	118.255.000,00	12.00	22.485.575,00	20%	19.01%
			0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7.00	158.135.000,00	4.00	36.574.500,00	57.14%	23.13%
			0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25.00	15.000.000,00	0.00	1.750.000,00	0%	11.67%
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	100.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	19,29	13,45
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat	Sangat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
											Rendah	Rendah
211	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**Persentase**	**100.00**	**561.020.520,00**	**100.00**	**13.008.000,00**	**100%**	**2.32%**
211	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**Dokumen**	**3.00**	**561.020.520,00**	**0.00**	**13.008.000,00**	**0%**	**2.32%**
211	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	6.00	561.020.520,00	0.00	13.008.000,00	0%	2.32%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	2,32
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	2,32
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
211	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**Persentase**	**52.50**	**274.668.000,00**	**0.00**	**93.915.280,00**	**0%**	**34.19%**
					Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan	**Persentase**	**36.34**		**0.00**		**0%**	
					Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	**Persentase**	**92.06**		**0.00**		**0%**	
211	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**Persentase**	**100.00**	**274.668.000,00**	**0.00**	**93.915.280,00**	**0%**	**34.19%**
211	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	28.00	230.518.000,00	0.00	93.375.280,00	0%	40.51%
			0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	Dokumen	1.00	35.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					yang Dilaksanakan							
			0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1.00	9.150.000,00	1.00	540.000,00	100%	5.9%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											33,33	15,47
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	34,19
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
211	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang Meningkat**	**m2**	**140120.80**	**2.186.143.000,00**	**124135.20**	**685.663.328,00**	**88.59%**	**31.36%**
211	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**Persentase**	**44.45**	**2.186.143.000,00**	**44.14**	**685.663.328,00**	**99.3%**	**31.36%**
211	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	242.00	1.841.955.000,00	89.00	639.923.328,00	36.78%	34.74%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	8.00	344.188.000,00	3.00	45.740.000,00	37.5%	13.29%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											37,14	24,02
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											99,30	31,36
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
211	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah sarana dan prasaran Limbah B3 skala Kabupaten**	**Tempat**	**5.00**	**6.442.219,00**	**4.00**	**0,00**	**80%**	**0%**
211	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**Rintek**	**5.00**	**6.442.219,00**	**5.00**	**0,00**	**100%**	**0%**
211	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan	45.00	6.442.219,00	7.00	0,00	15.56%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											15,56	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
211	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**Nilai**	**81.00**	**28.364.980,00**	**0.00**	**5.927.500,00**	**0%**	**20.9%**
211	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah**	**Persentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah**	**Persentase**	**100.00**	**28.364.980,00**	**0.00**	**5.927.500,00**	**0%**	**20.9%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah Kabupaten/Kota	**Daerah Kabupaten/Kota**							
211	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	100.00	28.364.980,00	16.00	5.927.500,00	16%	20.9%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											16,00	20,90
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	20,90
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
211	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Presentase Kader Lingkungan**	**Persentase**	**46.20**	**14.148.000,00**	**0.00**	**6.390.000,00**	**0%**	**45.17%**
211	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk**	**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**Orang**	**150.00**	**14.148.000,00**	**86.00**	**6.390.000,00**	**57.33%**	**45.17%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
211	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	158.00	14.148.000,00	180.00	6.390.000,00	113.92%	45.17%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											113,92	45,17
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											57,33	45,17
Predikat kinerja Per Program(%)											Rendah	Sangat Rendah
211	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase perolehan penghargaan lingkungan hiduo untuk masyarakat**	**Persentase**	**100.00**	**28.420.000,00**	**0.00**	**4.235.500,00**	**0%**	**14.9%**
211	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan**	**Jumlah penghargaan**	**Lokasi**	**196.00**	**28.420.000,00**	**186.00**	**4.235.500,00**	**94.9%**	**14.9%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**lingkungan hidup**							
211	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	5.00	28.420.000,00	0.00	4.235.500,00	0%	14.9%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	14,90
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											94,90	14,90
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
211	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**Dokumen**	**1.00**	**17.386.000,00**	**0.00**	**2.120.000,00**	**0%**	**12.19%**
211	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH**	**Persentase**	**100.00**	**17.386.000,00**	**24.99**	**2.120.000,00**	**24.99%**	**12.19%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**							
211	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	12.00	17.386.000,00	5.00	2.120.000,00	41.67%	12.19%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											41,67	12,19
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											24,99	12,19
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
211	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah yang Terkelola**	**Persentase**	**100.00**	**2.584.141.139,00**	**0.00**	**1.110.497.801,00**	**0%**	**42.97%**
211	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**Persentase**	**100.00**	**2.584.141.139,00**	**33.00**	**1.110.497.801,00**	**33%**	**42.97%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
211	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	12.00	23.095.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	12152.00	2.553.918.139,00	7137.13	1.109.057.801,00	58.73%	43.43%
			0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	6.00	7.128.000,00	0.00	1.440.000,00	0%	20.2%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											19,58	21,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat	Sangat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Rendah	Rendah
						Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	33,00	42,97
						Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
						Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)	30,80	26,05
						Predikat kinerja seluruh program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
				Total	**12.307.323.517,00**	**4.580.591.870,00**		
						Persentase Realisasi Anggaran	**37.22%**	
						Predikat	**Sangat Rendah**	

Mengingat bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk menyusun rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka evaluasi yang dipergunakan adalah rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra tersebut mengacu pada hasil Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj.IP) dan/atau Realisasi APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2023 terdapat 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2023. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Realisasi Kinerja tidak bisa terealisasi 100% dikarenakan terjadi penurunan kualitas lingkungan yang diduga akibat akitivitas manusia

maupun vegetasi alam di titik pengambilan sampel air permukaan yang telah ditetapkan, sehingga terdapat beberapa parameter baku mutu air permukaan yang tidak tercapai seperti BOD, COD, DO dan TDS. Sehingga dari target kinerja prosentase status mutu air permukaan 50,60 terealisasi 50 atau 98,81%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Realisasi Kinerja tidak bisa terealisasi 100% dikarenakan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sampai akhir tahun mencapai 90 orang atau 90% dari target kinerja 100 orang.

3. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Realisasi Kinerja tidak bisa terealisasi 100% dikarenakan dalam pengusulan 176 lokasi kegiatan untuk dilakukan penilaian ada 1 lokasi kegiatan dinyatakan tidak lolos sehingga hanya 175 lokasi kegiatan yang memperoleh penghargaan lingkungan.

Tabel 2.2.
Realisasi kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Status Mutu Air Permukaan	50,60	50	98,81
2.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat	100	90	90
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
	1. Kegiatan Pemberian Penghargaan	Jumlah	176	175	99,43

	Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan lingkungan hidup			

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat merealisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Realisasi kegiatan Tahun 2023 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23	23	100
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59	59	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	12	100
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan akhir tahun	2	2	100
	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguanan	Jumlah jenis komponen listrik penerangan	9	9	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kantor				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	20	20	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	325	325	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	30	30	100
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45	45	100
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100	100	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen jasa pelayanan umum kantor	12	12	100
	5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	60	60	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	7	7	100
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	20	20	100
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguanan Lainnya	Jumlah item/ ruang kantor Dinas Lingkungan yang	1	1	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
		dipelihara			
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi	100	100	100
	1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup	3	3	100
	- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten	3	3	100
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
	1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan	100	100	100
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah koordinasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan	100	100	100
	2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100	100	100
	- Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penghentian pencemaran	12	12	100
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat	108.149,60	108.149,60	100
	1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan	43,55	43,55	100
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	% taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	65	65	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	% taman kota dan jalur hijau yang terpelihara	84,33	84,33	100
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten	4	4	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah izin lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100	100	100
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kader lingkungan	150	150	100
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	1	1	100
	1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan dalam 1 Tahun	100	100	100
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota	99	99	100
	1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi	100	100	100
	- Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen Jakstrada	1	1	100
	- Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan yang layak fungsi	23	23	100
	- Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan rakor	2	2	100

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat merealisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Realisasi kegiatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Nilai SAKIP PD	72,30	73,15	101,87
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan	30,02	36,34	121,05
		Prosentase Pemenuhan Kualitas Udara	84,25	91,89	109,07
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
	1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3				
	- Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara %;Limbah B3	Jumlah usaha dan atau kegiatan penghasil Limbah B3	35	40	114,29
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	75	77,14	102,85
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Presentase Kader Lingkungan	43,86	44,72	101,96
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
	1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18	37	205,56
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
	1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
	- Pengelolaan Pengaduan	- Jumlah	12	14	117

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab./Kota yang Dikelola/Terfasilitasi dalam 1 Tahun			

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

a. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
   1. Adanya perubahan kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan hasil pengujian sampel air permukaan menurun;
   2. Kurang teliti dalam perencanaan penganggaran kegiatan, hal tersebut menyebabkan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
   3. Kurang maksimal koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
   1. Adanya perencanaan dan koordinasi yang baik;
   2. Penetapan target yang tepat.

c. Faktor pencapaian melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
   1. Meningkatnya kualitas dan kesesuaian komponen yang dinilai antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
   2. Adanya penambahan luasan tutupan lahan dan perubahan kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan hasil pengujian sampel udara membaik/meningkat;
   3. Permohanan izin lingkungan yang meningkat;
   4. Meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya lingkungan hidup; dan
   5. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap aktivitas yang diduga dapat merusak lingkungan hidup.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan terhadap target capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun yang lalu mempunyai kinerja yang kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja untuk diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran ataupun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir;
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA;
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan dapat tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan;
4. Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan;
5. Menambah atau mengganti titik pengambilan sampel air permukaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah Kabupaten Pacitan ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan – ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta indikator kinerja RPJMD Kabupaten Pacitan yang menggambarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Tolok ukur dan indikator kinerja didasarkan pada perhitungan teknis, selanjutnya hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pacitan

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	√		58,94	59,33	59,72	60,09	60,46	60,83	71,68	64,96	63,97	60,09	60,46	
2	Hasil Nilai SAKIP PD			70,50	71,40	72,30	73,20	74,10	75,00	70,50	78,65	73,65	73,20	74,10	
3	Prosentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Prosentase Status Mutu Air Permukaan		√	50,5	50,55	50,6	50,6	50,65	50,65	50,5	60	50	50,6	50,65	
5	Prosentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan			26,99	28,49	30,02	31,52	33,02	34,52	26,99	29,49	36,34	31,52	33,02	
6	Prosentase Pemenuhan Kualitas Udara		√	84,05	84,15	84,25	84,35	84,45	84,5	84,05	88,74	91,89	84,35	84,45	
7	Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat		√	76.178,35	92.163,95	108.149,60	124.135,20	140.120,80	156.107,40	76.178,35	92.163,95	108.149,60	124.135,20	140.120,80	
8	Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten			2	4	4	4	4	4	2	7	4	4	4	
9	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha			70	75	75	80	80	85	70	80	77,14	80	80	
10	Presentase Kader Lingkungan			42,11	42,98	43,86	45,03	46,20	47,66	42,11	43,27	44,72	45,03	46,20	
11	Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota		√	98	99	99	99	100	100	98	97,96	99	99	100	

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

   Tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercapai 107,1% yang berasal dari perhitungan target 59,72 dengan realisasi 63,97 pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

   a. Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari perhitungan IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL).
   b. Data pada Tahun 2023 Indeks Kualitas Air sejumlah 50, Indeks Kualitas Udara sejumlah 91,89 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sejumlah 36,34.
   c. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 59,72 dengan Capaian Kinerja 107,1% berasal dari perhitungan 0,376 dikali jumlah IKA ditambah 0,405 dikali jumlah IKU ditambah 0,219 dikali dengan hasil 63,97.

2. Indikator Hasil Nilai SAKIP PD

   Tingkat hasil nilai SAKIP PD tercapai 101,87% yang berasal dari perhitungan target 72,30 dengan realisasi 73,65 pada Tahun 2023. Nilai realisasi diperoleh dari nilai yang diperoleh perangkat daerah.

3. Indikator Prosentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi

   Tingkat Prosentase dokumen informasi lingkungan hidup yang terpenuhi tercapai 100% yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 100% pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

   a. Formulasi perhitungan Prosentase dokumen informasi lingkungan hidup yang terpenuhi dari perhitungan :

$$\frac{\textit{Jumlah dok. perencanaan dan dok. kajian lingkungan}}{\textit{Jumlah seluruh dokumen lingkungan}} \times 100\%$$

   b. Data pada Tahun 2023 dokumen informasi lingkungan hidup diperoleh sejumlah 3 dokumen.

c. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 100% dengan capaian Kinerja 100% berasal dari perhitungan jumlah dokumen perencanaan dan dokumen kajian lingkungan sejumlah 3 dokumen dibagi seluruh dokumen lingkungan sejumlah 3 dokumen dikali 100% dengan hasil 100%.

4. Indikator Prosentase Status Mutu Air Permukaan

Tingkat Prosentase status mutu air permukaan tercapai 98,81% yang berasal dari perhitungan target 50,6 dengan realisasi 50 pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 50,6 dengan capaian kinerja 50 berasal dari formulasi perhitungan Prosentase status mutu air permukaan dari perhitungan :

$$IP = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2 Rata\ rata\ + (Ci/Lij)^2\ Maksimum}{2}}$$

5. Indikator Prosentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan

Tingkat Prosentase pemenuhan kualitas tutupan lahan tercapai 121,05% yang berasal dari perhitungan target 30,02 dengan realisasi 36,34 pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

a. Target Kinerja pada Tahun 2023 adalah 30,02 dengan capaian kinerja 36,34 berasal dari formulasi perhitungan Prosentase pemenuhan kualitas tutupan lahan dari perhitungan :

$$100 - \{984{,}3 - \left(\left(\frac{ltl}{lw} - \mathrm{DKK}\right) \mathrm{x}\ 100\right) \mathrm{x}\ \frac{50}{54{,}3}$$

6. Indikator Prosentase Pemenuhan Kualitas Udara

Tingkat Prosentase pemenuhan kualitas udara tercapai 109,07% yang berasal dari perhitungan target 84,25 dengan realisasi 91,89 pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 84,25 dengan capaian kinerja 91,89 berasal dari formulasi perhitungan Prosentase pemenuhan kualitas udara dari perhitungan :
100 – { 50 / 0.9 x (leu – 0,1)}.

7. Indikator Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat

Tingkat luas area keanekaragaman hayati yang meningkat tercapai 100% yang berasal dari perhitungan target 108.149,60 m^2 dengan realisasi 108.149,60 m^2 pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

a. Target Kinerja pada Tahun 2023 adalah 108.149,60 m^2 dengan capaian kinerja 108.149,60 m^2 berasal dari luas area keanekaragaman hayati yang terbangun/ terpelihara tahun yang bersangkutan.

8. Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Limbah B3 Sekala Kabupaten

Jumlah sarana dan prasarana limbah B3 sekala Kabupaten tercapai 100% yang berasal dari perhitungan target 4 tempat dengan realisasi 4 tempat pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 4 tempat dengan capaian kinerja 4 tempat berasal dari dari jumlah TPS limbah B3 dan IPAL.

9. Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha

Tingkat indeks kepuasan pelaku usaha tercapai 102,85% yang berasal dari perhitungan target 75 dengan realisasi 77,14 pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut:

a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 75 dengan capaian kinerja 77,14 berasal dari formulasi perhitungan indeks kepuasan pelaku usaha dari perhitungan :
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha = (Jumlah nilai total respon/Jumlah indikator)/Jumlah responden

10. Indikator Presentase Kader Lingkungan

Tingkat presentase kader lingkungan tercapai 101,96% yang berasal dari perhitungan target 43,86 dengan realisasi 44,72 pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut:

a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 43,86 dengan capaian kinerja 44,72 berasal dari formulasi perhitungan presentase kader lingkungan dari perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ kader\ lingkungan\ ada}{Jumlah\ seluruh\ kader\ lingkungan\ se\ kabupaten\ Pacitan} \times 100\%$$

11. Indikator Prosentase Perolehan Penghargaan Lingkungan untuk Masyarakat

Tingkat prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat tercapai 100% yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 100% pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 100% dengan capaian Kinerja 100% berasal dari formulasi perhitungan prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat dari perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ penghargaan\ yang\ diperoleh}{Jumlah\ penghargaan} \times 100\%$$

12. Indikator Jumlah Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Tingkat jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk masyarakat tercapai 100% yang berasal dari perhitungan target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen berasal dari formulasi perhitungan jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

13. Indikator Prosentase Sampah yang Terkelola di Wilayah Kota

    Tingkat prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota tercapai 100% yang berasal dari perhitungan target 99% dengan realisasi 99% pada Tahun 2023. Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :

    a. Target kinerja pada Tahun 2023 adalah 99% dengan capaian kinerja 99% berasal dari formulasi perhitungan prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota dari perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ sampah\ terkelola}{Jumlah\ timbulan\ sampah} \times 100\%$$

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan selama Tahun 2023 berhasil dengan nilai capaian kinerja 101,63%. Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
    a. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang telah sesuai dengan Perbup Nomor 207 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
    b. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
2. Faktor Penghambat
    a. Sumber daya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal, selain itu juga belum memadainya jumlah tenaga yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan;

b. Sarana prasarana yang terbatas dan kondisi kurang layak sehingga berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
c. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.

3. Faktor Eksternal
   a. Masyarakat Kabupaten Pacitan yang semakin ”kritis” dan “sadar” akan lingkungan hidup.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif (Widodo, 2001:75). Terkait dengan hal tersebut maka tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan sedangkan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah koordinasi dan sinergisitas dengan dinas instansi terkait yang mempunyai hubungan dalam mewujudkan pemberdayaan pengelolaan lingkungan, pemantauan dan pengawasan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ditemui beberapa permasalahan dan hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana kerja dan terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan dan hambatan tersebut diusahakan untuk

dapat diatasi dengan memafaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance). Permasalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan kondisi yang baik serta masih rendahnya penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sedangkan volume timbulan sampah pertahun yang meningkat.
2. Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan pada operasionalnya menimbulkan penurunan kualitas lingkungan serta belum melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya alih fungsi lahan untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan mengancam jumlah keanekaragaman hayati serta meningkatkan pemanasan global.
4. Masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan.
5. Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangannya sehingga dalam operasional usaha dan/atua kegiatannya berpotensi terjadi penurunan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah.
6. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan pelepasan limbah tanpa treatment ke badan air permukaan, udara maupun ke tanah yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

7. Belum optimalnya penanganan air limbah baik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan maupun rumah tangga/domestik secara terpadu sesuai dengan baku mutu masing-masing karakteristik air limbah.
8. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional / internasional yaitu dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator kinerja yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

Tantangan :

a. Tantangan Internal :
   1. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum memadainya jumlah tenaga yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja;
   2. Belum idealnya anggaran yang dimiliki;
   3. Sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang terbatas dan kondisi relatif yang kurang baik;
   4. Keterbatasan volume yang dimiliki di tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
   5. Adanya peraturan perudangan terbaru di sektor lingkungan hidup.
b. Tantangan Eksternal :
   1. Jumlah luasan Kabupaten Pacitan yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;

2. Munculnya kegiatan/usaha baru yang belum berwawasan lingkungan hidup; dan
3. Paradigma atau kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang.

c. Peluang :

1. Luasan wilayah Kabupaten Pacitan;
2. Adanya pegiat, kelompok peduli lingkungan hidup yang membantu pengembangan kepedulian lingkungan hidup kepada masyarakat;
3. Adanya partisipasi masyarakat, kelompok usaha dalam kegiatan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan
4. Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap peraturan perundangan antar stakeholder.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 telah disusun pada akhir bulan Desember tahun 2024. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD terdapat 10 nomenklatur program yang dicantumkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, yaitu:

1. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Dari 10 (sepuluh) nomenklatur program pada Tahun 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan menjabarkan dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Pogram, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap dinas berdasarkan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

I. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pagu indikatif yakni Rp. 6.365.284.010,00 *(Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 5.000.000,00 *(Lima Juta Rupiah)* terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 5.000.000,00 *(Lima Juta Rupiah)* untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 100.000.000,00 *(Seratus Juta Rupiah)* untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 5.283.140.787,00 *(Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta*

Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 5.278.140.787,00 *(Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)* untuk Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp. 5.000.000,00 *(Lima Juta Rupiah)* untuk Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 371.610.206,00 *(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Seppuluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah)* terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 5.000.000,*00 (Lima Juta Rupiah)* untuk Penyediaan Komponen Listrik Penerangan.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 240.610.206,00 *(Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah)* untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 50.000.000,00 *(Lima Puluh Juta Rupiah)* untuk Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 11.000.000,00 *(Sebelas Juta Rupiah)* untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 65.000.000,00 *(Enam Puluh Lima Juta Rupiah)* untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 533.084.875,00 *(Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 87.942.875,00 *(Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 445.142.000,00 *(Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Serratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)* untuk Penyusunan Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 391.390.000,00 *(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)* terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 118.255.000,*00 (Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* untuk Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 158.135.000,00 *(Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seatus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)* untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 15.000.000,00 *(Lima Belas Juta Rupiah)* untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 100.000.000,00 *(Seratus Juta Rupiah)* untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Item/Ruang Kantor Dinas Lingkungan.

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup dalam pagu indikatif yakni Rp. 600.000.000,00 *(Enam Ratus Juta Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Rp. 600.000.000,00 *(Enam Ratus Juta Rupiah)* terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Rp. 600.000.000,00 *(Enam Ratus Juta Rupiah)* untuk Koordinasi Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten.

III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pagu indikatif yakni Rp. 282.411.000,00 *(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Rp. 282.411.000,00 *(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)* terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp. 234.151.000,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)* untuk Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan.
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim Rp. 35.000.000,00 *(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)* untuk Koordinasi, Sinkronisasi Desa yang Melakukan Pengendalian Emisi Gas Rumah, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Rp. 13.260.000,00 *(Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* untuk Pelaksanaan Pengujian yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan.

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dalam pagu indikatif yakni Rp. 2.028.233.000,00 *(Dua Milyar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Rp. 2.028.233.000,00 *(Dua Milyar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)* terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Rp. 1.863.233.000,00 *(Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)* untuk Pengelolaan Taman Kota dan Jalur Hijau.
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Rp. 165.000.000,00 *(Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)* untuk Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.

V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam pagu indikatif yakni Rp. 15.250.000,00 *(Lima Belas Juta Dua Ratus Lima*

Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Rp. 15.250.000,00 *(Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)* terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp. 15.250.000,00 *(Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)* untuk Verifikasi Lapangan Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam pagu indikatif yakni Rp. 50.830.000,00 *(Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 50.830.000,00 *(Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)* terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Rp. 50.830.000,00 *(Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)* untuk Fasilitasi Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dalam pagu indikatif yakni Rp.

25.000.000,00 *(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 25.000.000,00 *(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)* terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat Rp. 25.000.000,00 *(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)* untuk Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dalam pagu indikatif yakni Rp. 45.000.000,00 *(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 45.000.000,00 *(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)* terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp. 45.000.000,00 *(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)* untuk Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dalam pagu indikatif yakni Rp. 25.000.000,00 *(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Rp. 25.000.000,00 *(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)* terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Rp. 25.000.000,00 *(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)* untuk Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab./Kota yang Dikelola/Terfasilitasi dalam 1 Tahun.

X. Program Pengelolaan Persampahan

Pada Program Pengelolaan Persampahan dalam pagu indikatif yakni Rp. 4.189.529.919,00 *(Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)*. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah Rp. 4.189.529.919,00 *(Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)* terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp. 46.500.000,00 *(Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)* untuk Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi.
   - Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Rp. 4.128.029.919,00 *(Empat Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)* untuk Penanganan Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA.

- Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Rp. 15.000.000,00 *(Lima Belas Juta Rupiah)* untuk Penyusunan Dokumen Jakstrada.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan disajikan sebagaimana dalam Tabel 2.6. di bawah ini :

Tabel 2.6.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pacitan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil nilai evaluasi SAKIP PD**	**74,10**	**6.684.225.868,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil nilai evaluasi SAKIP PD**	**74,10**	**6.684.225.868,00**	
i	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD**	**23**	**105.000.000,00**	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD**	**23**	**105.000.000,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5.000.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100.000.000,00	
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen laporan keuangan PD**	**59**	**5.283.140.787,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen laporan keuangan PD**	**59**	**5.283.140.787,00**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	5.278.140.787,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	5.278.140.787,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	5.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	5.000.000,00	
iii	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**371.610.206,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**371.610.206,00**	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000,00	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	240.610.206,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	240.610.206,00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	50.000.000,00	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	11.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	11.000.000,00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	65.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	65.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
iv	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100**	**533.084.875,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100**	**533.084.875,00**	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	87.942.875,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	87.942.875,00	
11	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	445.142.000,00	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	445.142.000,00	
v	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100**	**391.390.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100**	**391.390.000,00**	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	118.255.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	118.255.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Dinas Jabatan					Dinas Jabatan					
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	158.135.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	158.135.000,00	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	15.000.000,00	
15	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000.000,00	
II.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**100**	**600.000.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**100**	**600.000.000,00**	
vi	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**3**	**600.000.000,00**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**3**	**600.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
16	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	6	600.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	6	600.000.000,00	
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**52,65**	**282.411.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**52,65**	**282.411.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan	**36,34**				**Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan**	**36,34**		
			Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	**92,06**				**Persentase Pemenuhan Kualitas Udara**	**92,06**		
vii	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**100**	**282.411.000,00**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**100**	**282.411.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28	234.151.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28	234.151.000,00	
18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	35.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	35.000.000,00	
19	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	13.260.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	13.260.000,00	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat**	**140.120,80**	**2.028.233.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat**	**140.120,80**	**2.028.233.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
viii	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		**% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**44,45**	**2.028.233.000,00**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		**% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**44,45**	**2.028.233.000,00**	
20	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	242	1.863.233.000,00	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	242	1.863.233.000,00	
21	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Pacitan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	165.000.000,00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Pacitan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	165.000.000,00	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten**	**5**	**15.250.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten**	**5**	**15.250.000,00**	
ix	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**		**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah**	**5**	**15.250.000,00**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**		**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**5**	**15.250.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			B3								
22	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	45	15.250.000,00	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	45	15.250.000,00	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**81**	**50.830.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**81**	**50.830.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
x	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**50.830.000,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**50.830.000,00**	
23	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100	50.830.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100	50.830.000,00	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Presentase Kader Lingkungan**	**46,20**	**25.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Presentase Kader Lingkungan**	**46,20**	**25.000.000,00**	
xi	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan**		**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**150**	**25.000.000,00**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan**		**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**150**	**25.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
24	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Pacitan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	158	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Pacitan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	158	25.000.000,00	
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat**	**100**	**45.000.000,00**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat**	**100**	**45.000.000,00**	
xii	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**196**	**45.000.000,00**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**196**	**45.000.000,00**	
25	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	5	45.000.000,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	5	45.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**1**	**25.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**1**	**25.000.000,00**	
xiii	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**	**100**	**25.000.000,00**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**	**100**	**25.000.000,00**	
26	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12	25.000.000,00	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12	25.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota**	**100**	**4.189.529.919,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota**	**100**	**4.189.529.919,00**	
xiv	**Pengelolaan Sampah**		**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**100**	**4.189.529.919,00**	**Pengelolaan Sampah**		**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**100**	**4.189.529.919,00**	
27	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12	46.500.000,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12	46.500.000,00	
28	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instansi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA,PSEL/PLTSa , RDF, Pusat Pengomposan, Biodigeter, Bank Sampah, Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan	Kab. Pacitan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	12.152	4.128.029.919,00	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instansi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA,PSEL/PLTSa , RDF, Pusat Pengomposan, Biodigeter, Bank Sampah, Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan	Kab. Pacitan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	12.152	4.128.029.919,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Peraturan Perundangan					Peraturan Perundangan					
29	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	6	15.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	6	15.000.000,00	
	JUMLAH				**13.945.479.787,00**	**JUMLAH**				**13.945.479.787,00**	

2.5. Penelaahan usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan rangkuman langkah-langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapatprogram prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

I. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untukPertumbuhan yang BerkualitasSasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan KLHK adalah:

a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator: (1) luas minimal kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar (2024) dan (2) kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024);
b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saingperekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator: (1) subsektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian dari 3,5% menjadi 6,8% (2024); (2) produksi kayu terutama darihutan produksi dari 45 juta m3/tahun menjadi 60 juta m3/tahun (2024);

Untuk merealisasikan sasaran di atas, yaitu dilakukan melalui dua pendekatan: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Rincian untuk masing-masing pendekatan dijelaskan di bawah ini.

II. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 2, yang terkait dengan KLHK adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan KLHK adalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar, (2) penyiapan

grand design forest city di Ibu Kota Negara, (3) Rehabilitasi hutandan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan Ibu Kota Negara, dan (4) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.

III. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang terkait dengan KLHK mencakup:

a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator yaitu: (1) luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dari 5,5, juta hektar menjadi 12,1 juta hektar (2024), (2) Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dari 1,5 juta hektar menjadi 4,1 juta hektar (2024), (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 4 juta hektar (2024), dan (4) Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dari 100 kelompok menjadi 500 kelompok (2024);

b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatpekerjaan, (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional, (4) Peningkatan indeks peneliti, (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan, (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha, dan (7) jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

IV. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah:

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024), (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024), (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024), dan (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024);
2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam danlingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024), (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024), (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024), (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024), (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024), dan (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut;
3. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024), (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024), dan (3) jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024);
4. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton

menjadi1.200,000 ton (2024), (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024),dan (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024);

5. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % (2024), (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari193 kasus menjadi 540 kasus (2024), (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10,000,000 hektar (2024), dan (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut.

c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi:

1. Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024), (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3% (2024), (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline padasektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024), (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019)

menjadi 2,9% (2024), dan (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 % (2024);

2. Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330,000 hektar (2024) dan (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional pertahun dari 206.000 menjadi 420,000 hektar (2024);
3. Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024), (2) jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill menjadi 3.885.755 KK, (3) jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R menjadi 409.078 RT, dan (4) jumlah rumah tangga yang terlayani TPST menjadi 494.152 RT;
4. Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu : (1) persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industri hijau/SIH menjadi 10 perusahaan, (2) jumlah rancangan standard penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024), dan (3) jumlah rancangan standard penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024);
5. Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar (2024).

Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dan sasaran strategis terkait dengan

praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan LH, meliputi:

a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
b. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran Strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup.

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan mengacu pada kebijakan Nasional, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup.

Tabel 3.1.
Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah,
		Penurunan laju Deforestasi,
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),
		Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya,
		Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2)
		Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
		Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan,
		Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria),
		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4.	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan,
		Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum,
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE),
		Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif,
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,
		Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK,
		Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
		Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

" MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA "

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2021 - 2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa.

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya.

Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, hal ini ditunjukkan melalui:

- Pernyataan misi ke 1: **Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.**

Pada misi kesatu ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan berperan dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran limbah baik itu udara, air dan tanah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang yaitu:

a. Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal;
b. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
c. Terjaganya Kebersihan di Wilayah Pacitan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksud disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						
2	**11**	**##**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**74,10**	**6.684.225.868**	**DAU**	
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**23 Dokumen**	**105.000.000**	**DAU**	
2	11	##	#	##	####	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	5.000.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU	
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU	
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU	
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU	
2	11	##	#	##	####	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	DAU	
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua**	**59 Dokumen**	**5.283.140.787**	**DAU**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Kelurahan				
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 Orang/bulan	5.278.140.787	DAU	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU	
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	5.000.000	DAU	
2	11	##	#	##	####	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan dan Analissi Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU	
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**0%**	**0**	**DAU**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	11	##	#	##	####	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	0	DAU	
I2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**371.610.206**	**DAU**	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5.000.000	DAU	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	240.610.206	DAU	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Paket	50.000.000	DAU	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	3 Paket	11.000.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Kelurahan				
2	11	##	#	##	####	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	65.000.000	DAU	
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**0%**	**0**	**DAU**	
2	11	##	#	##	####	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	DAU	
2	11	##	#	##	####	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	DAU	
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**533.084.875**	**DAU**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	87.942.875	DAU	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	445.142.000	DAU	
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**391.390.000**	**DAU**	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	118.255.000	DAU	
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	158.135.000	DAU	
2	11	##	#	##	####	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	25 Unit	15.000.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Kelurahan				
2	11	##	#	##	####	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguanan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100.000.000	DAU	
2	**11**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**600.000.000**	**DAU**	
2	**11**	**02**	**2**	**01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**3 Dokumen**	**600.000.000**	**DAU**	
2	11	02	2	01	0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	600.000.000	DAU	
2	**11**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**50,65**	**282.411.000**	**DAU**	
							Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan		**33,02**			
							Persentase Pemenuhan Kualitas Udara		**84,45**			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	**11**	**03**	**2**	**01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**282.411.000**	**DAU**	
2	11	03	2	01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Dokumen	234.151.000	DAU	
2	11	03	2	01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.000.000	DAU	
2	11	03	2	01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.260.000	DAU	
2	**11**	**03**	**2**	**02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Prosentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**0%**	**0**	**DAU**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	11	03	2	02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penghentian pencemaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Titik	0	DAU	
2	**11**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**140.120,80 M²**	**2.028.233.000**	**DAU**	
2	**11**	**04**	**2**	**01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**44,45%**	**2.028.233.000**	**DAU**	
2	11	04	2	01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	% taman kota yang tertata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ha	0	DAU	
2	11	04	2	01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242 Unit	1.863.233.000	DAU	
2	11	04	2	01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	% peningkatan taman kehati	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	0%	0	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Kelurahan				
2	11	04	2	01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	165.000.000	DAU	
2	**11**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**4**	**15.250.000**	**DAU**	
2	**11**	**05**	**2**	**01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**5 Dokumen**	**15.250.000**	**DAU**	
2	11	05	2	01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Laporan	15.250.000	DAU	
2	**11**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN**	**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua**	**80**	**50.830.000**	**DAU**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**Kelurahan**				
2	**11**	**06**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**50.830.000**	**DAU**	
2	11	06	2	01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	50.830.000	DAU	
2	11	06	2	01	0001	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Badan Usaha	0	DAU	
2	**11**	**08**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Presentase Kader Lingkungan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**46,20%**	**25.000.000**	**DAU**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	**11**	**08**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**120 Orang**	**25.000.000**	**DAU**	
2	11	08	2	01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158 Lembaga	25.000.000	DAU	
2	**11**	**09**				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**45.000.000**	**DAU**	
2	**11**	**09**	**2**	**01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**196 Lokasi**	**45.000.000**	**DAU**	
2	11	09	2	01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Entitas	45.000.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	**11**	**10**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**1 Laporan**	**25.000.000**	**DAU**	
2	**11**	**10**	**2**	**01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**25.000.000**	**DAU**	
2	11	10	2	01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Pengaduan	25.000.000	DAU	
2	**11**	**11**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**4.189.529.919**	**DAU**	
2	**11**	**11**	**2**	**01**		**Pengelolaan Sampah**	**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**4.189.529.919**	**DAU**	
2	11	11	2	01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	12 Kelompok	46.500.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Kelurahan				
2	11	11	2	01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.152 Ton	4.128.029.919	DAU	
2	11	11	2	01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	15.000.000	DAU	
							Total			**13.945.479.787**		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan Pacitan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan sudah dibahas di bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome*) suatu program. Rencana kerja berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sebagai penjabaran prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026.

Dalam menjalankan rencana program dan kegiatan, perangkat daerah diberikan pagu indikatif program. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD). Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2026.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas RENJA Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pacitan adalah percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan 2021–2026.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.945.479.787,00 *(Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)* dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Pacitan dengan uraian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.

V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
   - Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat.

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

X. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah
   - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
   - Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
   - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2026 di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	##				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai SAKIP PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	6.684.225.868	DAU		75,00	8.365.000.000
2	11	##	#	##		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Dokumen	105.000.000	DAU		23 Dokumen	60.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	##	#	##	####	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	5.000.000	DAU		4 Dokumen	10.000.000
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	10.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	##	#	##	####	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**59 Dokumen**	**5.283.140.787**	**DAU**		**59 Dokumen**	**6.535.000.000**
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 Orang/bulan	5.278.140.787	DAU		54 Orang/bulan	6.500.000.000
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	20.000.000
2	11	##	#	##	####	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	5.000.000	DAU		2 Dokumen	10.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	##	#	##	####	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan dan Analissi Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**0%**	**0**	**DAU**		**100%**	**45.000.000**
2	11	##	#	##	####	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	0	DAU		170 Paket	45.000.000
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**371.610.206**	**DAU**		**100%**	**390.000.000**
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5.000.000	DAU		1 Paket	10.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	240.610.206	DAU		20 Paket	300.000.000
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Paket	50.000.000	DAU		13 Paket	10.000.000
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	11.000.000	DAU		3 Paket	10.000.000
2	11	##	#	##	####	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	65.000.000	DAU		50 Laporan	60.000.000
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**0%**	**0**	**DAU**		**100%**	**260.000.000**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	##	#	##	####	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	DAU		25 Unit	110.000.000
2	11	##	#	##	####	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	DAU		15 Unit	150.000.000
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**533.084.875**	**DAU**		**100%**	**610.000.000**
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	87.942.875	DAU		12 Laporan	110.000.000
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	445.142.000	DAU		12 Laporan	500.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**##**	**#**	**##**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**391.390.000**	**DAU**		**100%**	**465.000.000**
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	118.255.000	DAU		60 Unit	160.000.000
2	11	##	#	##	####	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	158.135.000	DAU		7 Unit	135.000.000
2	11	##	#	##	####	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	15.000.000	DAU		25 Unit	20.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	##	#	##	####	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguanan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100.000.000	DAU		1 Unit	150.000.000
2	**11**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**600.000.000**	**DAU**		**100%**	**580.000.000**
2	**11**	**02**	**2**	**01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**3 Dokumen**	**600.000.000**	**DAU**		**3 Dokumen**	**580.000.000**
2	11	02	2	01	0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	600.000.000	DAU		6 Dokumen	580.000.000
2	**11**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**50,65**	**282.411.000**	**DAU**		**50,65**	**470.000.000**
							Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan		**33,02**				**34,52**	
							Persentase Pemenuhan Kualitas		**84,45**				**84,5**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Udara							
2	**11**	**03**	**2**	**01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**282.411.000**	**DAU**		**100%**	**425.000.000**
2	11	03	2	01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Dokumen	234.151.000	DAU		28 Dokumen 160	250.000.000
2	11	03	2	01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.000.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
2	11	03	2	01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.260.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**03**	**2**	**02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Prosentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**0%**	**0**	**DAU**		**100%**	**45.000.000**
2	11	03	2	02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penghentian pencemaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Titik	0	DAU		12 Titik	45.000.000
2	**11**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**140.120,80 M²**	**2.028.233.000**	**DAU**		**156.107,40 M²**	**2.470.000.000**
2	**11**	**04**	**2**	**01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**44,45%**	**2.028.233.000**	**DAU**		**44,85%**	**2.470.000.000**
2	11	04	2	01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	% taman kota yang tertata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ha	0	DAU		57,17 Ha	250.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	04	2	01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242 Unit	1.863.233.000	DAU		242 Unit	1.700.000.000
2	11	04	2	01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	% peningkatan taman kehati	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0	DAU		72,80%	350.000.000
2	11	04	2	01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	165.000.000	DAU		8 Unit	170.000.000
2	**11**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**4**	**15.250.000**	**DAU**		**4**	**25.000.000**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**05**	**2**	**01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**5 Dokumen**	**15.250.000**	**DAU**		**5 Dokumen**	**25.000.000**
2	11	05	2	01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Laporan	15.250.000	DAU		45 Laporan	15.250.000
2	**11**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**80**	**50.830.000**	**DAU**		**85**	**125.000.000**
2	**11**	**06**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang**	**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua**	**100%**	**50.830.000**	**DAU**		**100%**	**125.000.000**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan**						
2	11	06	2	01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	50.830.000	DAU		100 Dokumen	80.000.000
2	11	06	2	01	0001	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Badan Usaha	0	DAU		200 Badan Usaha	45.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**08**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Presentase Kader Lingkungan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**46,20%**	**25.000.000**	**DAU**		**47,66%**	**45.000.000**
2	**11**	**08**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**120 Orang**	**25.000.000**	**DAU**		**130 Orang**	**45.000.000**
2	11	08	2	01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158 Lembaga	25.000.000	DAU		163 Lembaga	45.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**09**				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**45.000.000**	**DAU**		**100%**	**55.000.000**
2	**11**	**09**	**2**	**01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**196 Lokasi**	**45.000.000**	**DAU**		**200 Lokasi**	**55.000.000**
2	11	09	2	01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Entitas	45.000.000	DAU		5 Entitas	55.000.000
2	**11**	**10**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**1 Laporan**	**25.000.000**	**DAU**		**1 Laporan**	**35.000.000**
2	**11**	**10**	**2**	**01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**25.000.000**	**DAU**		**100%**	**35.000.000**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
2	11	10	2	01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Pengaduan	25.000.000	DAU		12 Pengaduan	35.000.000
2	**11**	**11**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**4.189.529.919**	**DAU**		**100%**	**4.870.000.000**
2	**11**	**11**	**2**	**01**		**Pengelolaan Sampah**	**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**100%**	**4.189.529.919**	**DAU**		**100%**	**4.870.000.000**
2	11	11	2	01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kelompok	46.500.000	DAU		12 Kelompok	50.000.000
2	11	11	2	01	0017	Penanganan sampah melalui	Jumlah sampah yang tertangani melalui	Semua Kab/Kota,	12.152 Ton	4.128.029.919	DAU		12.152 Ton	4.800.000.00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	11	11	2	01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	15.000.000	DAU		6 Dokumen	20.000.000
Total										**13.945.479.787**				**17.040.000.000**

BAB V
PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paciten Tahun 2026, penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
2. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang direncanakan melalui program-program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2026.
5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat.
6. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ini.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ini, diharapkan seluruh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Rencana kerja ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

4. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini akan dapat terwujud jika seluruh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat pmenjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Pacitan, Agustus 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PACITAN

CICIK ROUDLOTUL JANNAH, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740408 199803 2 008

PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

dispendukcapilpacitan@gmail.com

JL. Veteran No.15 Pacitan

SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PENGESAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Mengesahkan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO S.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Perikanan
19.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Badan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.	Kecamatan Donorojo

NO	PERANGKAT DAERAH
29.	Kecamatan Punung
30.	Kecamatan Pringkuku
31.	Kecamatan Pacitan
32.	Kecamatan Kebonagung
33.	Kecamatan Arjosari
34.	Kecamatan Tegalombo
35.	Kecamatan Nawangan
36.	Kecamatan Bandar
37.	Kecamatan Tulakan
38.	Kecamatan Ngadirojo
39.	Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Veteran No. 15 Telp. (0357) 885271, 885272
P A C I T A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188.45/ 21 **/KPTS/408.42/2025**

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2026 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** sebagai pedoman bagi unit kerja dalam menyusun RKA dan DPA pelaksanaan kegiatan Tahun 2026

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680524 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 serta Perubahan Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2026 mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Pacitan, 1 Agustus 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680524 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan……..... 6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tw. II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 25

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 26

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 31

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana 31

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan….. 33

BAB IV PENUTUP 41

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 41

5.2 Rencana Tindak Lanjut 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra Perangka Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pacitan..... 10

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan..... 17

Tabel 2.2.2 Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan……... 18

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pacitan..... 21

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 DISDUKCAPIL Kabupaten Pacitan..... 24

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil……. 27

Tabel 4.1.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana 31

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Pacitan..... 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2026 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2026 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2026 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat provinsi

dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Pacitan sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang PedomanPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
j. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan memberikan arah kebijakan keuangan strategis dan program pembangunan, kebijakan serta sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

1.3.1 Maksud :

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dalam jangka pendek (satu tahun);

2. Menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing yang diemban oleh seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinasi terpadu agar terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah, meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

1.3.2 Tujuan :

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menjaga konsistensi rencana kerja Pengelola Daerah dengan anggaran kerja Pengelola Daerah;
3. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dari rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025;
4. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana
4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Pacitan

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja dalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja uang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Adapun hasil evaluasi terhadap target dan realisasi capaian indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:

   Rata-rata pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada saat ini sampai dengan triwulan II (bulan juni) tahun 2025

untuk realisasi program/kegiatan belum mencapai target yang telah di tetapkan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:

   Untuk perubahan RKPD tahun 2025 diharapkan untuk triwulan selanjutnya dapat menyelesaikan target yang sudah ditetapkan dan dianggarkan sesuai dengan perencanaan RKPD Perubahan tahun 2025.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:

   Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan capaian sampaidengan triwulan II (bulan juni) tahun 2025 sudah melebihi dari target yaitu sudah mencapai 105%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

   Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah direncanakan dapat mencapai target dengan melakukan kegiatan pelayanan terpadu jemput bola ke desa-desa dan sekolah yang dirasa cukup efektif dalam pencapaian target.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

   Implikasi capaian program Renstra Perangkat Daerah diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target kinerja perencanaan, walaupun untuk mencapai kriteria maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat kekurangan SDM. Selain itu adanya efisiensi anggaran dapat membuat kinerja pada pelayanan kependudukan kurang optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

   a. Dengan adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan lebih memprioritaskan anggaran yang urgent/penting dan mengoptimalkan serapan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

b. Melaksanakan dan melanjutkan pelayanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online maupun offline yang sudah berjalan baik di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan maupun pelayanan yang berada di Kecamatan dan di MPP.
c. Melakukan Koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Pacitan untuk pengusulan penambahan SDM untuk pengadaan CPNS maupun PPPK.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 atau (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024 atau n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan		REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**> B**	**72,75**	**73,00**	**74,25**	**101,71**	**74,25**	**74,55**	**100,40**	**76,40**
2.12.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun***	***100%***	***10***	***10***	***10***	***100***	***10***	***10***	***100***	***5***

	Perangkat Daerah										
2.12.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12	10	10	100	10	10	100	5
2.12.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	***12***	***10***	***10***	***100***	***10***	***10***	***100***	***3***
		Gaji dan tunjangan ASN yang Tersedia	***14 Bulan***	***14***	***14***	***14***	***100***	***14***	***14***	***100***	***6***
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	21	26	20	76,92	26	18	69,23	19
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	12	10	10	100	10	10	100	3
2.12.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100	0
2.12.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***28,27***
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	1

2.12.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	4	4	100	4	5	125	6
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	2
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	2
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30	30	30	100	30	30	100	6
2.12.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***93,13***
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3	3	3	100	3	3	100	18
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	7	7	7	100	7	7	100	6
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11	11	11	100	11	11	100	6
2.12.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	***80%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***23,01***
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14	14	14	100	14	14	100	7

2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5	5	5	100	5	5	100	70
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100	0
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Presentase Perekaman KTP Elektronik**	**94,60%**	**99,81**	**96,50**	**99,82**	**103,44**	**99,82**	**99,83**	**102,86**	**99,83**
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA Presentase	**30,00%**	**46,00**	**46,82**	**48,62**	**150,25**	**48,62**	**56,68**	**170,67**	**68,02**
		Presentase Penerbitan KK	**97,75%**	**100**	**98,25**	**100**	**101,78**	**97,25**	**100**	**101,52**	**100**
2.12.02.2.01	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	***Persentase cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16 Dokumen	1	16	16	100	16	16	100	19
2.12.02.2.03	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***	***Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk***	***100%***	***-***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***80***
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	-	10	10	100	10	10	100	18

2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	50 Orang	-	60	60	100	50	60	120	30
2.12.02.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	***100%***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***0***
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**86,35%**	**87,00**	**87,65**	**87,75**	**100,00**	**88,15**	**88,16**	**100,01**	**88,40**
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	**56,40%**	**100**	**57,15**	**100**	**174,98**	**57,60**	**100**	**173,61**	**100**
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	**100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Presentase Penerbitan Akta Perceraian	**100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.12.03.2.01	***Pelayanan Pencatatan Sipil***	***Persentase terlaksanannya pelayanan pencatatan sipil***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Paket	1	1	1	100	330	639	193	357
2.12.03.2.02	***Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***	***Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil***	***100 %***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1	16	16	100	23	23	100	8

2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	2	1	1	100	2	2	100	1
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Kondisi Baik**	**85,71%**	**94,66**	**89,85**	**98,39**	**109,50**	**90.05**	**100**	**111,05**	**100**
2.12.04.2.01	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***	***Tersedianya Data Kependudukan Per Bulan/Semester***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***50***
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5	5	5	100	5	5	100	0
2.12.04.2.03	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***50***
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Dokumen	3	3	3	100	3	3	100	5
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100	0
2.12.04.2.04	***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***100%***	***-***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***105***

2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 Laporan	-	12	12	100	15	15	100	9
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**	**90 Buku**	**100**	**90**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100**	**0**
2.12.05.2.01	***Penyusunan Profil Kependudukan***	***Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan***	***90 Buku***	***100***	***90***	***90***	***100***	***90***	***90***	***100***	***0***
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	**100**	**0**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Tabel 2.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2021	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan :**	**80,73**	**81,34**	**81,70**	**82,07**	**82.41**	**85.50**	**92,10**	**112,21**	**93,75**
	Persentase Perekaman KTP Elektronik	94,60	95,95	96,5	97,05	97,65	98.15	99,83	102,86	**99,83**
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang (satu) Hari yang memiliki KIA	30,00	31,61	32,36	33,21	33,86	34.21	56,68	170,67	
	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	97,75	98	98,25	98,5	98,75	99,00	100	101,52	100
	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	86.,35	87	87,65	88,15	88,65	89.00	88,16	100,01	88,40
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	56,40	56,8	57,15	57,6	57,95	58.20	100	173,61	100
	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penerbitan Akte Perceraian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II.	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan**	**84,03**	**85,99**	**86,63**	**87,27**	**87.27**	**87.91**	**87,64**	**101,16**	**87,90**

Tabel 2.2.2
Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

No.	ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RPJMN 2024	% REALISASI RPJMN s/d SEMESTER II TAHUN 2024	TARGET RPJMD SEMESTER I TAHUN 2024	%REALISASI RPJMD CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024	TARGET RPJMD SEMESTER II TAHUN 2024	%REALISASI RPJMD CAPAIAN SEMESTER II TAHUN 2024	STATUS CAPAIAN S/D SEMESTER II 2022 PER INDIKATOR		
									TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
ASPEK PELAYANAN UMUM											
Fokus Layanan Urusan Wajib RPJMD											
1	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
1.	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	**80,73**			**82,07**	**91,34**	**91,53**	**92,10**	Tercapai	-	-
	- Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,60			97,05	99,82	99,82	99,83	**Tercapai**	-	-
	- Kartu Keluarga (KK)	97,75			98,50	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Kartu Identitas Anak (KIA)	30,00			33,21	51,76	52,76	56,68	Tercapai	-	-
	- Akta Kelahiran	86,35			88,15	87,81	88,15	88,16	Tercapai	-	-
	- Akta Kematian	56,40			57,60	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Akta Perkawinan	100			100	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Akta Perceraian	100			100	100	100	100	Tercapai	-	-
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan	**84,03**			**86,63**	**87,2**	**87,2**	**87,64**	Tercapai	-	-
Fokus /Aspek Layanan Urusan Wajib RPJMN											
3501	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**										
1	Perekaman KTP el		**99,78**	**99,83**					Tercapai		
2	Kartu Identitas Anak (KIA)		**67,97**	**56,68**						**Belum Tercapai**	
3	Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun		**99,65**	**99,01**						**Belum Tercapai**	
4	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)		**7,30**	**3,01**						**Belum Tercapai**	
5	Penggunaan kertas putih		**18 Dok**	**18 Dok**					Tercapai		
6	Penggunaan TTE		**20 Dok**	**20 Dok**					Tercapai		
7	Layanan Online		**Sudah**	**Sudah**					Tercapai		
8	Layanan Terintegrasi		**Sudah**	**Sudah**					Tercapai		
9	Perjanjian Kerjasama (PKS)		**10 OPD**	**10**					Tercapai		
10	Akses Data		**Sudah**	**Sudah**					Tercapai		
11	Buku Pokok Pemakaman		**250**	**220**						**Belum Tercapai**	
12	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra		**8 Mitra**	**8**					Tercapai		
13	Integrasi Pemanfaatan Data dan Dok Kependudukan dengan OPD		**5 OPD**	**5**					Tercapai		

KETERANGAN RPJMD :

1	Jumlah Indikator			**2**		**2**
2	Jumlah Indikator Tercapai			2		2
3	Jumlah Indikator Belum Tercapai			0		0
4	Jumlah Indikator Tidak Tercapai			0		0
5	Tingkat Capaian			100		100

KETERANGAN RPJMN :

1	Total Point			13	
2	Level			Level 3	
3	Jumlah Indikator Tercapai				9
4	Jumlah Indikator Belum Tercapai				4
5	Jumlah Indikator Tidak Tercapai				0

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal dimana peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor-faktor di maksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor eksternal

Faktor ekternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (Threats) yang secara spesifik dapat di gambarkan pada tabel berikut ini :

FAKTOR FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
1. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Administrasi Kependudukan. 2. Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat sehingga kepemilikan dan pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan. 3. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan 2. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit pengurusan administrasi kependudukan. 3. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data dan dokumen kependudukan.

2. Faktor-faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan dan Weakness yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Tersedianya UU, PP dan Perpres 2. Tersedianya PERDA dan PERBUP tentang administrasi kependudukan 3. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dan memberikan pelayanan prima 4. Tersedianya SDM yang memadai,di bidang tehnologi Informasi	1. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan 2. Belum optimalnya kebutuhan tenaga ASN untuk pelayanan 3. Kondisi geografis, topografis Kabupaten Pacitan yang kurang mendukung, sehingga muncul tuntutan akan pendekatan dan pelayanan masyarakat yang prima 4. Kurang terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan, sehingga kinerja pelayanan belum optimal

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**4.185.598.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**4.717.187.834**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerh**	**> B**	**3.932.502.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerh**	**> B**	**4.326.328.033**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan PD	10 Dokumen	2.385.605.169	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan PD	10 Dokumen	2.175.435.761	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %	85.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	244.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	407.159.066	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yng dibutuhkan	100 %	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yng dibutuhkan	100 %	-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	1.170.396.831	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	1.548.733.206	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	95.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	95.000.000	
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**-% anak usia 01-17 tahun kurang (satu)hari yang memiliki KIA** **-% Penerbitan KK** **-% Perekaman KTP Elektronik**	**33,21%** **98,50%** **97,05%**	**61.582.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**-% anak usia 01-17 tahun kurang (satu)hari yang memiliki KIA** **-% Penerbitan KK** **-% Perekaman KTP Elektronik**	**34,21%** **98,75%** **97,65%**	**105.000.000**	

1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	24.930.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	25.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	36.652.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	50.000.000	
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	30.000.000	
II	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		-% Penerbitan Akta Kelahiran -% Penerbitan Akta Kematian -% Penerbitan Akta Perceraian -% Penerbitan Akta Perkawinan	88,15% 57,60% 100% 100%	**69.524.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		-% Penerbitan Akta Kelahiran -% Penerbitan Akta Kematian -% Penerbitan Akta Perceraian -% Penerbitan Akta Perkawinan	88,65% 100% 100% 100%	**100.000.000**	
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	42.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	40.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	27.524.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	60.000.000	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalamkondisi baik**	90,05 %	**100.312.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalamkondisi baik**	90,25 %	**165.000.000**	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Kependudukan per bulan / semester	100%	60.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Kependudukan per bulan / semester	100%	95.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	20.477.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	38.000.000	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	19.835.000	Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	32.000.000	

IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**	90 Buku	**21.678.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**	90 Buku	**20.859.801**	
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Pacitan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan	90 Buku	21.678.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Pacitan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan	90 Buku	20.859.801	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk;
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP elektronik;
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil ”Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”.

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi keempat Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu ***“Menciptakan***

Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani", dengan tujuan ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional dan Responsif".***

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD)

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategi didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pacitan.

Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Indikator Tujuan	:	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran :` Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Indikator Sasaran :
1. Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2021	TARGET				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83.00**	**83.50**	**84.00**	**84.50**	**85.00**	**85.50**
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	**Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	**80,73**	**81,34**	**81,70**	**82,07**	**82.41**	**85.50**
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan	**84,03**	**85,99**	**86,63**	**87,27**	**87.27**	**87.91**

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, didukung dari dana APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026.

Beberapa faktor permasalahan yang di hadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran / target dalam menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, maka dalam periode 2021-2026, Visi Kabupaten Pacitan adalah: “

Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA " Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir dan batin.

Berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan maka Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pacitan masuk dalam misi ke empat yaitu: "Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani". Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Pacitan diharapkan dapat melayani masyarakat kabupaten pacitan dalam pemenuhan administrasi dokumen kependudukan dengan profesional sesuai SOP yang ada dan membuat inovasi pelayanan kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

b) Pencapaian MDGS

Pencapaian MDGS menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

c) Pengembangan Pusat data base kependudukan

Pengembangan Pusat data base kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana data base kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d) Pengurangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya program pengentasan kemiskinan akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk, terkait dengan hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui perekaman KTP elektronik dengan melakukan kegiatan pelayanan jemput

bola ke Desa-Desa baik perekaman regular maupun bagi penduduk rentan (Lansia, ODGJ dan Disabilitas), serta Perekaman KIA dan penerbitan KIA untuk usia anak 0-17 tahun kurang satu hari dengan melakukan kegiatan jemput bola perekaman ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah. Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penanganan kemiskinan untuk kebutuhan data pembangunan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Transmigrasi, BPJS dan lain-lain.

e) Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Pacitan melaksanakan program dan kegiatan yang terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Penyelesaian perekaman KTP-el pemula maupun penduduk rentan (Lansia/sakit, ODGJ dan Penyandang Disabilitas) serta aktivasi IKD melalui petugas pelayanan terpadu dengan kegiatan jemput bola door to door ataupun ke desa-desa dan kegiatan/event yang diadakan oleh pemerintah atau Lembaga tertentu di Kabupaten Pacitan;
2. Pelayanan terintegrasi di Dinas, Kecamatan dan MPP dan kegiatan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah dan atau Lembaga lainnya;
4. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi baik melalui iklan, website, media social maupun sosialisasi secara langsung dengan melibatkan masyarakat atau[un pemangku kemepntingan;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
6. Penambahan SDM baik melalui pengadaan CPNS maupun PPPK;

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan mengacu pada rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu

pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu didukung kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada Tahun 2026 merencanakan untuk kegiatan/pengadaan : Printer, Scanner KIA, Iris mata, Monitor, Alat Perekaman KTP, Alat Pencetakan KTP, Server KTP dan Tinta/Ribbon KTP melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor, dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, dan untuk mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan pagu anggaran sebagimana tertera pada Matrik rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2025.

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana

Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arah prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telahaan Kebijakan Nasional.

Pada Rencana Awal Tahun 2026 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengelola pagu sebesar **Rp. 4.717.187.834,00.** Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tahun 2026 merencanakan : 5 Program, 15 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**4.717.187.834**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.326.328.033**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000**
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.175.435.761**
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.165.435.761
	2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**85.000.000**
	1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85.000.000
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**407.159.066**
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000
	3) Penyediaan bahan logistik kantor	41.496.348
	4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000

	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.662.718
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.548.733.206**
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.659.131
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	971.074.075
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.000.000
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.000.000**
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000
	3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000
II.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**105.000.000**
1.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**25.000.000**
	1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	25.000.000
2.	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**50.000.000**
	1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000
	2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000
3.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**30.000.000**
	1) Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000
III.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**100.000.000**
1.	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**40.000.000**
	1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	40.000.000
2.	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**60.000.000**
	1) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	25.000.000
	2) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	35.000.000
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**165.000.000**
1.	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**95.000.000**
	1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	95.000.000
2.	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**38.000.000**
	1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	28.000.000
	2) Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	10.000.000
3.	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**32.000.000**
	1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	32.000.000
V.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**20.859.801**

1.	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**20.859.801**
	1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	20.859.801

Dari kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan khususnya pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adanya penambahan pagu anggaran pada tahun 2026 yang digunakan untuk kebutuhan prioritas pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

TINTA RIBBON : Rp 800.000.000,00

PRINTER E-KTP (1 UNIT) : Rp 66.923.900,00

CETAK KIA 15700 LEMBAR : Rp 100.480.000,00

Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pada tahun 2026, mengingat untuk mendukung pencapaian target pelayanan yang ditetapkan pada tahun 2026.

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Pacitan

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.717.187.834,00**				**4.915.000.000,00**	
1	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD**	**77,25**	**74,55**	**74,75**	**75,25**	**4.326.328.033,00**			**-**	**4.390.000.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	15.000.000,00			-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	2.385.605.169,00			-	2.515.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	18 Orang	24 Orang	24 Orang	2.378.105.169,00	-	-		2.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	30.000.000,00			-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	244.000.000,00			-	360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	6 Paket	6 Paket	61.503.652,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket	41.496.348,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	1.170.396.831,00			-	1.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	3 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	177.659.131,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	631.459.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	361.277.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	95.000.000,00			-	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	137 Unit	137 Unit	137 Unit	45.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik**	**99,40%**	**99,83%**	**99,83%**	**99,00%**	**61.582.000,00**			**-**	**165.000.000,00**	
			Persentase penerbitan Kartu Keluarga	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	**90%**	**56,68%**	**95%**	**70%**						
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	24.930.000,00			-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7 Dokumen	16 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	24.930.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	36.652.000,00			-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk											

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	36.652.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk											
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	0			-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk											
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	0	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun**	**99,95%**	**99,01%**	**99,80%**	**99,83%**	**69.524.000,00**			**-**	**170.000.000,00**	
			Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						
			Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						
			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraiannya dilaporkan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						

	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%	42.000.000,00			-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	765 Dokumen	639 Dokumen	434 Dokumen	565 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	27.524.000,00			-	95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil											
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	23 Laporan	15 Laporan	2 Laporan	14.524.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil											
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan**	**50,00%**	**41,66%**	**43,16%**	**44,66%**	**100.312.000,00**			**-**	**155.000.000,00**	
			Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Tersedianya Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	60.000.000,00			-	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan											
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	20.477.000,00			-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	14.175.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan											
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	6.302.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	19.835.000,00			-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	19.835.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan***	100%	90 buku	90 buku	100%	**21.678.000,00**			**-**	**35.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan	65 Buku	90 buku	90 buku	65 Buku	21.678.000,00			-	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain											
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.678.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama satu tahun kedepan. Dimana Renja ini disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan berkesinambungan dari Rencana Kerja Perubahan tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, serta kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta mengacu pada prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan).

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangnannya menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai fungsi dan tugasnya.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan berupaya melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat bermanfaat dan membahagiakan masyarakat serta stakeholder yang membutuhkan data kependudukan. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Demikian Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

Pacitan, 1 Agustus 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680524 199603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Letjend. Suprapto No.46 Pacitan, Telp/Fax (0357)881070

RENJA 2026

Rencana Kerja

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

Nomor : 000.7.2.4 / 21 / 408.53 / 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan senada dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih periode 2025-2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyelaraskan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 secara terpadu dan terukur. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 mengacu pada dokumen Renja tersebut.

Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, Kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pacitan, Agustus 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730803 199302 1 002

Pendahuluan 1

`

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), dan rencana pembagunan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun propinsi.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholders atau pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut

teknis dari dokumen perencanan makro di daerah yangn berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis sesuai dengan tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan yaitu “Pacitan Semakin Bahagia Sejahtera” sedangkan misi nya adalah:

Misi 1 : Pemberantasan Kemiskinan

Misi 2 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 3 : Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Misi 4 : Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pemabngunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, khususnya pada Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021– 2025.
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor: 139 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai berikut:

a. Sebagai panduan dalam menyusun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah:

a. Rencana Kerja (Renja) menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD;
b. Renja sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD Tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan pada tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026. Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 sesuai rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-PD Induk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan sebesar Rp 7.574.723.963,00

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan s/d Tahun 2025 Semester II

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
213	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**72.00**	**3.389.469.447,00**	**72.75**	**1.716.402.105,00**	**101.04%**	**50.64%**
213	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**25.00**	**64.000.000,00**	**13.00**	**14.836.280,00**	**52%**	**23.18%**
213	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	52.000.000,00	5.00	13.562.000,00	38.46%	26.08%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	12.00	12.000.000,00	8.00	1.274.280,00	66.67%	10.62%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											52,57	18,35
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
213	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**37.00**	**2.617.622.981,00**	**15.00**	**1.411.564.379,00**	**40.54%**	**53.93%**
213	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	27.00	2.571.755.311,00	0.00	1.388.219.179,00	0%	53.98%
			0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	25.00	45.867.670,00	14.00	23.345.200,00	56%	50.9%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											28,00	52,44
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
213	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**19.700.000,00**	**100.00**	**0,00**	**100%**	**0%**
213	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	19.700.000,00	2.00	0,00	100%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
213	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**284.000.903,00**	**59.26**	**121.170.244,00**	**59.26%**	**42.67%**
213	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2.00	19.000.000,00	1.00	11.283.990,00	50%	59.39%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	20.000.000,00	7.00	9.717.000,00	58.33%	48.59%
			0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1.00	50.000.000,00	1.00	43.286.590,00	100%	86.57%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	195.000.903,00	7.00	56.882.664,00	58.33%	29.17%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											66,67	55,93
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Rendah
213	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**76.853.340,00**	**100.00**	**32.478.600,00**	**100%**	**42.26%**
213	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	76.853.340,00	25.00	32.478.600,00	208.33%	42.26%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											208,33	42,26
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
213	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**268.016.400,00**	**58.33**	**111.926.802,00**	**58.33%**	**41.76%**
213	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	21.219.000,00	7.00	10.930.120,00	58.33%	51.51%
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000,00	7.00	30.093.067,00	58.33%	30.09%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	146.797.400,00	7.00	70.903.615,00	58.33%	48.3%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											58,33	43,30

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Rendah	Sangat Rendah
213	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**59.275.823,00**	**50.00**	**24.425.800,00**	**62.5%**	**41.21%**
213	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	34.200.000,00	5.00	14.071.800,00	41.67%	41.15%
			0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	25.075.823,00	7.00	10.354.000,00	58.33%	41.29%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	50,00	41,22
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
213	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	**%**	**84.00**	**30.000.000,00**	**75.00**	**0,00**	**89.29%**	**0%**
213	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan penataan desa**	**Desa**	**12.00**	**30.000.000,00**	**9.00**	**0,00**	**75%**	**0%**
213	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	12.00	30.000.000,00	9.00	0,00	75%	0%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	75,00	0,00
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sedang	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	75,00	0,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sedang	Sangat Rendah
213	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Kerjasama Desa**	**%**	**26.40**	**50.000.000,00**	**66.66**	**22.991.960,00**	**252.5%**	**45.98%**
213	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa**	**Desa**	**9.00**	**50.000.000,00**	**6.00**	**22.991.960,00**	**66.67%**	**45.98%**
213	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	50.000.000,00	1.00	22.991.960,00	100%	45.98%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	45,98
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	66,67	45,98
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sedang	Sangat Rendah
213	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang Berkualitas**	**%**	**100**	**3.064.483.832,00**	**50.11**	**1.547.036.972,00**	**50.11%**	**50.48%**
213	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku**	**Desa**	**167.00**	**3.064.483.832,00**	**167.00**	**1.547.036.972,00**	**100%**	**50.48%**
					Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Desa	**Desa**	**167.00**		**0.00**		**0%**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Persentase Peningkatan Klasifikasi BUMDesa	**%**	**19.23**		**10.00**		**52%**	
213	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokummen	1.00	2.590.483.832,00	1.00	1.343.830.492,00	100%	51.88%
			0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	167.00	100.000.000,00	0.00	39.329.020,00	0%	39.33%
			0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	4.00	144.000.000,00	2.00	67.714.700,00	50%	47.02%
			0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1.00	30.000.000,00	0.00	15.263.800,00	0%	50.88%
			0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	12.00	75.000.000,00	12.00	15.190.630,00	100%	20.25%
			0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	167.00	75.000.000,00	334.00	35.108.400,00	200%	46.81%
			0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	30.00	50.000.000,00	30.00	30.599.930,00	100%	61.2%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											68,75	45,34
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,67	50,48
Predikat kinerja Per Program(%)											Rendah	Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
213	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terlibat dalam pembangunan desa**	**%**	**87.84**	**1.040.770.684,00**	**42.31**	**172.291.126,00**	**48.17%**	**16.55%**
213	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembagunan Desa yang Mendapatkan Pembinaan**	**Lembaga**	**26.00**	**1.040.770.684,00**	**11.00**	**172.291.126,00**	**42.31%**	**16.55%**
					Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembinaan	**Usaha**	**13.00**		**0.00**		**0%**	
					Jumlah desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna secara optimal	**Desa**	**0.00**		**0.00**		**0%**	
213	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	26.00	138.261.000,00	11.00	20.121.000,00	42.31%	14.55%
			0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Unit	1.00	150.000.000,00	1.00	16.282.000,00	100%	10.85%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
			0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1.00	32.509.684,00	0.00	0,00	0%	0%
			0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1.00	40.000.000,00	1.00	566.100,00	100%	1.42%
			0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1.00	680.000.000,00	0.00	135.322.026,00	0%	19.9%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											48,46	9,34
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											14,10	16,55
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											108,22	32,73
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Total		7.574.723.963,00		3.458.722.163,00		
		Persentase Realisasi Anggaran				45.66%		
		Predikat				Sangat Rendah		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat;
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 139 Tahun 2021 terdiri dari:

a. Sekretariat;
b. Bidang Pemerintahan Desa;
c. Bidang Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
d. Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa; dan

e. UPT Dinas.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

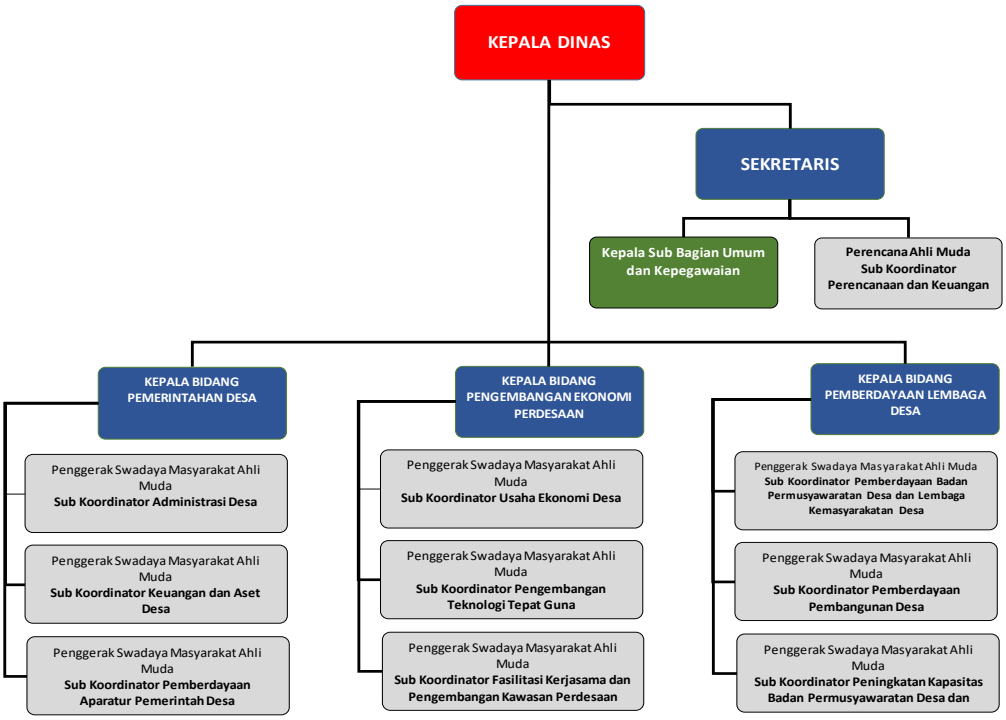

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi PD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang merupakan permasalahan dan hambatan pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- Terbatasnya jumlah SDM/aparatur pelaksana program/ kegiatan;
- Masih kurangnya fasilitas penunjang (Sarpras) guna mobilitas pelaksanaan kegiatan;
- Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Belum terintegrasinya data di tingkat desa;

- Belum sinkronnya perencaan pembangunan daerah dengan perencanaan Pembangunan desa;
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan regulasi;
- Kurangnya inovasi dan keberanian desa untuk berkomitmen dalam pengembangan BUMDesa;
- Masih kurangnya penetapan kawasan perdesaan serta pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) sehingga kerjasama antar desa belum optimal dilaksanakan;
- Kurang optimalnya peran BPD dan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- Masih rendahnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Minimnya data Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional

Akibat terbatasnya anggaran/ kegiatan pendukung maka realisasi pelaksanaan kegiatan masih ada yang belum sesuai perencanaan.

3. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD.

Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan pelayanan PD sangat komplek antara lain:

1. SDM Aparatur Pemerintah Desa yang masih rendah sehingga perlu adanya peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan.
2. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
3. Sumberdaya alam dan potensi desa yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
4. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2024 tentang Desa perubahan UU 6 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional dalam pengelolaan pemerintahan desa;

Sedangkan peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan pelayanan PD adalah sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat lebih berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
2. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Keterbukaan Informasi Publik dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

Dalam menyikapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- Strategi

  Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan merumuskan strategi sebagai berikut:

  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD dan Kerjasama Desa.

- Kebijakan

  Dalam rangka mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

  1. Mengoptimalkan upaya penataan desa yang efektif dan efisien;
  2. Mengoptimalkan penyediaan sarpras Siskeudes;

3. Mengupayakan penerapan pengelolaan dan pelayanan Desa dengan Teknologi Informasi agar dapat lebih cepat mudah dan murah;
4. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat dan pendamping masyarakat;
5. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat.

4. Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis

Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, mohon kepada pihak yang berkepentingan antara lain: Pemerintah Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pembina Kepegawaian untuk memberi perhatian dan solusi dan memberikan solusi terbaik guna mengatasi permasalahan dimaksud.

1. Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan untuk mengalokasikan anggaran yang cukup guna pelaksanaan program/kegiatan;
2. Kepada Pembina Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan SDM aparatur melalui diklat dan lain-lain ;
3. Kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan;
4. Kepada Camat di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan di wilayah masing-masing;
5. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa.

Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi dijadikan acuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan upaya menyelaraskan dari salah satu agenda prioritas nasional dalam Asta Cita dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksnakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola Ekonomi dan Lingkungan, adapun lokus pemberdayaan masyarakat dan desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atas perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis.

Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan peroleha gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perangkat desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana desa yang besar diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atas perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 201, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan kepala desa. Kepala desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang-undang desa membuka ruang selebar-lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang-undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama.

Dari sekian banyak Undang-undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif guna mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan pnyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagi unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, hal ini menjadikan organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

- **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri	Penguatan penataan administrasi pemerintahan desa yang meliputi aspek penamaan dan kodefikasi desa, aspek kewilayaan, kewenangan desa dan produk hukum desa serta manajemen pemerintahan desa	Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan desa
		Penguatan desa melalui kerjasama antar desa	Memfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa
		Penguatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan tata kelola pemerintahan desa	Memfasilitasi peningkatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa
		Penguatan lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kemandirian desa	Memfasilitasi peningkatan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pacitan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu "Pemberantasan Kemiskinan" dari RPJMD Kabupaten Pacitan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2025 – 2029 seperti pada tabel di bawah ini:

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1	Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET 2025
1.	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat	1.1	Berkurangnya Kantong-Kantong Kemiskinan	1.1.1	Persentase Desa Mandiri	72%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Hasil nilai IKM Perangkat Daerah:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Program Penataan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Penyelenggaraan Penataan Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

(5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Selengkapnya Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabpaten Pacitan
Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			**7.406.600.547,00**				**13.018.593.690,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.406.600.547,00**				**13.018.593.690,00**
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**7.406.600.547,00**				**13.018.593.690,00**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.182.375.000,00**				**3.822.193.690,00**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**9.289.700,00**				**25.000.000,00**
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.866.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.000.000,00
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	4.423.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	10.000.000,00
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.616.430.265,00**				**2.666.786.180,00**
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.587.461.828,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.751.242.603,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 Dokumen	28.966.437,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 Dokumen	46.000.000,00
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**11.999.800,00**				**30.000.000,00**
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	11.999.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.000.000,00
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**148.426.900,00**				**538.000.000,00**
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.963.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.847.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material							
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.999.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	106.617.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000,00
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**97.764.000,00**				**200.000.000,00**
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	97.764.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	200.000.000,00
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**269.843.335,00**				**272.707.510,00**
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.046.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	31.959.093,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104.999.635,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97.966.017,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	146.797.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	142.782.400,00
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**28.621.000,00**				**69.700.000,00**
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	19.774.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	44.700.000,00
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.847.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	25.000.000,00
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**			**14.195.000,00**				**200.000.000,00**
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**			**14.195.000,00**				**200.000.000,00**
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa							
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	14.195.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	100.000.000,00
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	167 Desa	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	167 Desa	100.000.000,00
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**30.000.000,00**				**206.700.000,00**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**			**30.000.000,00**				**206.700.000,00**
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	206.700.000,00
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**3.243.051.832,00**				**6.264.700.000,00**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			**3.243.051.832,00**				**6.264.700.000,00**
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencaan Pembangunan Desa	167 Desa	17.034.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencaan Pembangunan Desa	167 Desa	120.000.000,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	167 Dokumen	2.465.647.832,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	167 Dokumen	3.500.000.000,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	334 Orang	146.668.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	334 Orang	1.537.700.000,00
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	167 Dokumen	17.034.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	167 Dokumen	120.000.000,00
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	28 Dokumen	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	28 Dokumen	270.000.000,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	405.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	200.000.000,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	167 Dokumen	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	167 Dokumen	167.000.000,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	167 Dokumen	21.293.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	167 Dokumen	150.000.000,00
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD							
						Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	334 Orang	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	334 Orang	200.000.000,00
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**936.978.715,00**				**2.525.000.000,00**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**936.978.715,00**				**2.525.000.000,00**
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat							
						Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	75.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen	28.390.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen	200.000.000
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7121 Lembaga	35.171.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7121 Lembaga	600.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	150.000.000,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	43.417.715,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	150.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	750.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.150.000.000,00
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	167 Keluarga	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	167 Keluarga	75.000.000
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	167 Keluarga	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	167 Keluarga	75.000.000,00
							TOTAL	**7.406.600.547,00**				**13.018.593.690,00**

Penutup 5

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*rickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan seluruh jajarannya.

Rencana Kerja (Renja), juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pacitan, Agustus 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730803 199302 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Letjen Suprapto No.46, Pacitan, Jawa Timur 63512
Telp. (0357) 881070

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 000.7.2.4 / 21 / 408.53 / 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : Agustus 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

HERI SETIJONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19730803 199302 1 002

Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2026

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan

dppkbppa_pacitan Dppkbpp Kab Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. K. Umar No. 1 TELP. (0357) 881315 Fax.(0357) 881134

PACITAN

Pacitan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.13/308 /408.47/2025
Sifat : Penting/Segera
Lampiran :
Perihal : Rencana Kerja Tahun 2026

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Pacitan
di
P A C I T A N

-

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor :000.7.4/3034/408.53/2025 Tanggal 13 Juli 2025, Perihal Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026.

Bersama ini kami kirimkan Rencana Kerja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

JL. K. Umar No. 1 TELP. (0357) 881315 Fax.(0357) 881134

PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 400.13.1/309 /408.47/2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengadilan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1), Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati dengan Keputusan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PPKB dan PPPA tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan pembangunan Keluarga;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembatan Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Sistem Organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Pacitan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 196 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nimor 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
26. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor: 188/843/408.53/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengesahan ini digunakan sebagai dasar bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan dalam :

a. Menyusun program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) dan Prioritas Program dan Kegiatan dalam Penetapan Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dilingkup Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan;
b. Menyusun Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : Juli 2025

KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini adalah dokumen rencana operasional tahunan pembangunan yang merupakan fase kedua dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 sekaligus merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2021 – 2026. Selanjutnya, dokumen Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan selama Tahun 2026. Renja Tahun 2026 ini memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu, penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat, serta memuat rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2026. Dengan tersusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan pembangunan akan menjadi lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan secara berkesinambungan.

Pacitan, 18 Juli 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Rencana Renstra SKPD..... 8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan 16
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23
2.4. Permasalahan dan Hambatan..... 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 27
3.3. Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45
BAB V PENUTUP..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tuntutan pertanggung jawaban yang merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahan terakomodasi dalam Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan harus direncanakan, disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kinerja, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berbasis kinerja harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dirumuskan dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Rencana Kerja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun berjalan.

Dan Rencana Kerja ini berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mena telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengan Daerah serta Tata Cara

Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Nomor 10 Tahun 2021.
21. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor: 000.7.6.1/843/408.53/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan ini bertujuan :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan pada tahun 2026.

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas PPKB dan PPPA Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas PPKB dan PPPA Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Perubahan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PPKB & PPPA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Renstra SKPD

Evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun lalu dan pencapaian kinerja rencana strategis, ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas PPKB dan PPPA dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Dalam pelaksanaan review/evaluasi program selalu didasarkan pada laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

Adapun telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melabihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas PPKB dan PPPA dan kinerja pelayanan Dinas PPKB dan PPPA, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Matrik Pembahasan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel II.I. tersebut dibawah ini : (Lampiran Tabel II.1)

Berdasarkan matrik tersebut sampai dengan tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah melaksanakan 10 (sepuluh) program sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dari 10 (sepuluh) program yang menjadi kewenangannya. Adapun 10 (sepuluh) program dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

Dalam bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 01 tahun 2010 dan peraturan Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan renstra Tahun 2021-2026 dalam tabel II.2. berikut; (Lampiran table II.2)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas PPKB dan PPPA, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas PPKB dan PPPA serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas PPKB dan PPPA, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas PPKB dan PPPA.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas PPKB dan PPPA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas PPKB dan PPPA.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PPKB dan PPPA.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan adalah :

1. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pola asuh, pola makan, pola hidup bersih terutama dalam 1000 HPK agar terhindar dari stunting untuk membangun ketahanan keluarga menuju keluarga Bahagia Sejahtera
2. Pentingnya pemahaman terhadap Gender dan PUG
3. Pentingnya sosialisasi, KIE dan ketersediaan sarana prasarana KB MKJP (MOW dan MOP)
4. Perlunya memahami pemenuhan hak anak melalui 5 cluster
5. Masih adanya pernikahan dibawah umur

2.4 Permasalahan dan Hambatan

1. Permasalahan stunting
2. Kesetaraan Gender
3. Rendahnya kesertaan KB MKJP (MOP dan MOW)
4. Pemenuhan Hak Anak
5. Pernikahan Anak

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**208.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**80.97**	**495.000.000,00**	**0**	**29.833.000,00**	**0**	**61.079.333,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.912.333,00**	**0**	**18,37**	**0**	**90.912.333,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG**	**Orang**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**171**	**80.000.000,00**	**0**	**2.460.000,00**	**0**	**4.140.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.600,00**	**0**	**8,25**	**0**	**6.600.600,00**	**0**	**0**	
	208.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2.00	50.000.000,00	1	2.460.000,00	0	3.525.000,00	0	0	0	0	1	5.985.000,00	50	11,97	1	5.985.000,00	0	0	
	208.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0.00	0	0.00	0	90.00	30.000.000,00	0	0	0	615.600,00	0	0	0	0	0	615.600,00	0	2,05	0	615.600,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	7,01					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	208.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina**	**Organisasi**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**27**	**415.000.000,00**	**2**	**27.373.000,00**	**14**	**56.938.733,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**84.311.733,00**	**59,26**	**20,32**	**16**	**84.311.733,00**	**0**	**0**	
	208.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	5.00	415.000.000,00	3	27.373.000,00	1	56.938.733,00	0	0	0	0	4	84.311.733,00	80	20,32	4	84.311.733,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	80	20,32					F
																				Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	29,63	14,29					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	**208.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**70.00**	**75.600.000,00**	**100**	**9.900.000,00**	**100**	**9.900.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**19.800.000,00**	**142,86**	**26,19**	**100**	**19.800.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**Orang**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**58.00**	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**344,83**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	
	208.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	4.00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	208.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**Lembaga**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**55.600.000,00**	**1**	**9.900.000,00**	**0**	**9.900.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**19.800.000,00**	**100**	**35,61**	**1**	**19.800.000,00**	**0**	**0**	
	208.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0.00	0	0.00	0	3	55.600.000,00	3	9.900.000,00	3	9.900.000,00	0	0	0	0	3	19.800.000,00	100	35,61	3	19.800.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	35,61					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	222,42	17,81					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
3	**208.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio KDRT**	**Nilai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.01**	**40.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.493.000,00**	**0**	**3,73**	**0**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus KDRT yang tertangani**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**40.000.000,00**	**100**	**0**	**100**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.493.000,00**	**100**	**3,73**	**100**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	
	208.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	10.000.000,00	0	0	0	1.493.000,00	0	0	0	0	0	1.493.000,00	0	14,93	0	1.493.000,00	0	0	
	208.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1.00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	7,47					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	3,73					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
4	**208.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase tersedianya data Gender dan anak**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data gender dan anak**	**Laporan**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	208.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5	**208.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Strata Kabupaten Layak Anak**	**Skor**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**750.00**	**100.000.000,00**	**650**	**4.720.000,00**	**0**	**9.330.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**	**14.050.000,00**	**86,67**	**14,05**	**650**	**14.050.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pemerhati PHA**	**Lembaga**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**100.000.000,00**	**1**	**4.720.000,00**	**1**	**9.330.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14.050.000,00**	**100**	**14,05**	**1**	**14.050.000,00**	**0**	**0**	
	208.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	0.00	0	0.00	0	13	100.000.000,00	4	4.720.000,00	1	9.330.000,00	0	0	0	0	5	14.050.000,00	38,46	14,05	5	14.050.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	38,46	14,05					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	14,05					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
6	**208.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**72.36**	**100.000.000,00**	**100**	**26.945.000,00**	**100**	**1.994.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**28.939.000,00**	**138,2**	**28,94**	**100**	**28.939.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan**	**Orang**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**27**	**50.000.000,00**	**1.027,00**	**19.375.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.027,00**	**19.375.000,00**	**3.803,70**	**38,75**	**1.027,00**	**19.375.000,00**	**0**	**0**	
	208.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kegiatan	0.00	0	0.00	0	1.00	50.000.000,00	0	19.375.000,00	1	0	0	0	0	0	1	19.375.000,00	100	38,75	1	19.375.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	38,75					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
	208.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Standart Operasional Pelayanan Perlindungan Khusus Anak**	**SOP**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**50.000.000,00**	**1**	**7.570.000,00**	**4**	**1.994.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**9.564.000,00**	**500**	**19,13**	**5**	**9.564.000,00**	**0**	**0**	
	208.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	0.00	0	0.00	0	30.00	50.000.000,00	2	7.570.000,00	12	1.994.000,00	0	0	0	0	14	9.564.000,00	46,67	19,13	14	9.564.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	46,67	19,13					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	2.151,85	28,94					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
7	**214.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**76.70**	**2.415.669.071,00**	**0**	**504.847.517,00**	**77,7**	**533.485.963,00**	**0**	**82.718.652,00**	**0**	**0**	**77,7**	**1.121.052.132,00**	**101,3**	**46,41**	**77,7**	**1.121.052.132,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**23**	**54.440.000,00**	**10**	**5.099.000,00**	**2**	**1.280.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**6.379.000,00**	**52,17**	**11,72**	**12**	**6.379.000,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	9	46.814.900,00	4	3.184.000,00	0	0	0	0	0	0	4	3.184.000,00	44,44	6,8	4	3.184.000,00	0	0	
	214.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	3.440.700,00	2	1.120.000,00	0	680.000,00	0	0	0	0	2	1.800.000,00	100	52,31	2	1.800.000,00	0	0	
	214.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	4.184.400,00	3	795.000,00	3	600.000,00	0	0	0	0	6	1.395.000,00	50	33,34	6	1.395.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	64,81	30,82					F
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah		3	3		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59**	**1.919.820.271,00**	**16**	**412.845.589,00**	**15**	**476.260.406,00**	**0**	**82.718.652,00**	**0**	**0**	**31**	**971.824.647,00**	**52,54**	**50,62**	**31**	**971.824.647,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0.00	0	0.00	0	14.00	1.748.641.071,00	13	365.932.425,00	13	437.590.406,00	0	82.718.652,00	0	0	13	886.241.483,00	92,86	50,68	13	886.241.483,00	0	0	
	214.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12	156.739.200,00	3	40.661.664,00	3	38.670.000,00	0	0	0	0	6	79.331.664,00	50	50,61	6	79.331.664,00	0	0	
	214.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2.00	6.628.000,00	0	5.351.500,00	0	0	0	0	0	0	0	5.351.500,00	0	80,74	0	5.351.500,00	0	0	
	214.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	37.00	7.812.000,00	3	900.000,00	9	0	0	0	0	0	12	900.000,00	32,43	11,52	12	900.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	43,82	48,39					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		4	4		
	214.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**283.098.000,00**	**16**	**58.031.303,00**	**34**	**29.580.109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**87.611.412,00**	**50**	**30,95**	**50**	**87.611.412,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	12	70.302.600,00	3	23.776.500,00	3	2.964.400,00	0	0	0	0	6	26.740.900,00	50	38,04	6	26.740.900,00	0	0	
	214.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	212.795.400,00	3	34.254.803,00	3	26.615.709,00	0	0	0	0	6	60.870.512,00	50	28,61	6	60.870.512,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	33,33					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	214.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**59.915.500,00**	**10**	**15.023.378,00**	**40**	**13.598.648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**28.622.026,00**	**50**	**47,77**	**50**	**28.622.026,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	59.915.500,00	3	15.023.378,00	3	13.598.648,00	0	0	0	0	6	28.622.026,00	50	47,77	6	28.622.026,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	47,77					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	214.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**82.00**	**98.395.300,00**	**13**	**13.848.247,00**	**27**	**12.766.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**26.615.047,00**	**48,78**	**27,05**	**40**	**26.615.047,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0.00	0	0.00	0	79.00	69.478.000,00	3	13.848.247,00	2	12.766.800,00	0	0	0	0	5	26.615.047,00	6,33	38,31	5	26.615.047,00	0	0	
	214.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Gedung	0.00	0	0.00	0	2	28.917.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	3,17	19,16					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50,7	33,62					
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah					
8	**214.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Niai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**1.80**	**427.260.300,00**	**1,79**	**66.947.640,00**	**0**	**38.991.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,79**	**105.938.880,00**	**99,44**	**24,79**	**1,79**	**105.938.880,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal informal dan non formal yang melakukan pendidikan kependudukan**	**Kerjasama**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**6**	**77.460.300,00**	**0**	**26.488.300,00**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**26.488.300,00**	**50**	**34,2**	**3**	**26.488.300,00**	**0**	**0**	
	214.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kegiatan	0.00	0	0.00	0	1.00	27.305.300,00	0	7.857.000,00	0	0	0	0	0	0	0	7.857.000,00	0	28,77	0	7.857.000,00	0	0	
	214.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	0.00	0	0.00	0	3.00	50.155.000,00	0	18.631.300,00	2	0	0	0	0	0	2	18.631.300,00	66,67	37,15	2	18.631.300,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,34	32,96					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	214.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Data dan Informasi Keluarga**	**Laporan**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**349.800.000,00**	**1**	**40.459.340,00**	**0**	**38.991.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**79.450.580,00**	**100**	**22,71**	**1**	**79.450.580,00**	**0**	**0**	
	214.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	0.00	0	0.00	0	1	60.000.000,00	0	11.180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	11.180.000,00	0	18,63	0	11.180.000,00	0	0	
	214.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	145.800.000,00	3	0	3	10.500.000,00	0	0	0	0	6	10.500.000,00	50	7,2	6	10.500.000,00	0	0	
	214.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12	144.000.000,00	3	29.279.340,00	3	28.491.240,00	0	0	0	0	6	57.770.580,00	50	40,12	6	57.770.580,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	21,98					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	75	28,46					
																				Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat Rendah					
9	**214.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Unmet need**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**7.82**	**8.038.387.000,00**	**7,1**	**1.141.148.990,00**	**6,91**	**1.354.244.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,91**	**2.495.393.580,00**	**88,36**	**31,04**	**6,91**	**2.495.393.580,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	.		Persentase peserta KB aktif (CPR)	Persen	0		0.00	0	67.64		73,3		72,77		0		0		72,77		107,58		72,77		0		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
	.		Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 1519)	Nilai	0		0.00	0	29.70		27		0		0		0		27		90,91		27		0		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
	214.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan data keluarga yang beresiko stunting	Laporan	0.00	0	0.00	0	1	1.262.170.000,00	0	138.198.990,00	0	201.371.610,00	0	0	0	0	0	339.570.600,00	0	26,9	0	339.570.600,00	0	0	
	214.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	59.170.000,00	3	456.000,00	3	11.040.000,00	0	0	0	0	6	11.496.000,00	50	19,43	6	11.496.000,00	0	0	
	214.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	588.000.000,00	3	81.294.990,00	3	129.258.610,00	0	0	0	0	6	210.553.600,00	50	35,81	6	210.553.600,00	0	0	
	214.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka karya (Minilok)	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	240.000.000,00	3	2.601.000,00	3	26.548.000,00	0	0	0	0	6	29.149.000,00	50	12,15	6	29.149.000,00	0	0	
	214.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dokumen	0.00	0	0.00	0	16.00	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	0.00	0	0.00	0	2.00	250.000.000,00	1	53.847.000,00	1	34.525.000,00	0	0	0	0	2	88.372.000,00	100	35,35	2	88.372.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						F
																					Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah		5	5		
	214.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina	Orang	0.00	0	0.00	0	21.00	4.565.850.000,00	20	958.391.000,00	17	1.009.042.000,00	0	0	0	0	17	1.967.433.000,00	80,95	43,09	17	1.967.433.000,00	0	0	
	214.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	0.00	0	0.00	0	1763.00	4.565.850.000,00	408	958.391.000,00	1.763,00	1.009.042.000,00	0	0	0	0	1.763,00	1.967.433.000,00	100	43,09	1.763,00	1.967.433.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	43,09					F
																					Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
	214.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB	Event	0.00	0	0.00	0	8	1.616.767.000,00	2	34.095.000,00	4	51.062.980,00	0	0	0	0	6	85.157.980,00	75	5,27	6	85.157.980,00	0	0	
	214.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	0.00	0	0.00	0	33.00	29.700.000,00	30	8.960.000,00	8	5.920.000,00	0	0	0	0	38	14.880.000,00	115,15	50,1	38	14.880.000,00	0	0	
	214.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	0.00	0	0.00	0	1950.00	1.558.717.000,00	614	25.135.000,00	498	45.142.980,00	0	0	0	0	1.112,00	70.277.980,00	57,03	4,51	1.112,00	70.277.980,00	0	0	
	214.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Laporan	0.00	0	0.00	0	1	28.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		57,39	18,2					F
																					Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	214.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB	Organisasi	0.00	0	0.00	0	6	593.600.000,00	1	10.464.000,00	4	92.768.000,00	0	0	0	0	5	103.232.000,00	83,33	17,39	5	103.232.000,00	0	0	
	214.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga ,Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Kampung	0.00	0	0.00	0	17.00	593.600.000,00	3	10.464.000,00	7	92.768.000,00	0	0	0	0	10	103.232.000,00	58,82	17,39	10	103.232.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		58,82	17,39					F
																					Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		59,82	23,16					
																					Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah					
10	214.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga	Persen	0	0	0.00	0	84.15	3.275.919.700,00	20	138.600.000,00	25,43	412.680.000,00	0	0	0	0	25,43	551.280.000,00	30,22	16,83	25,43	551.280.000,00	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan sosialisasi atau pembinaan**	**Kelompok**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**74.00**	**292.719.700,00**	**3**	**3.000.000,00**	**18**	**5.880.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**8.880.000,00**	**28,38**	**3,03**	**21**	**8.880.000,00**	**0**	**0**	
	214.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	0.00	0	0.00	0	1.00	48.000.000,00	0	0	0	2.880.000,00	0	0	0	0	0	2.880.000,00	0	6	0	2.880.000,00	0	0	
	214.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL,,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	0.00	0	0.00	0	25.00	132.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, OIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	0.00	0	0.00	0	1.00	112.719.700,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00	0	5,32	0	6.000.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	3,77					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	214.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Organisasi**	**2098.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2098.00**	**2.983.200.000,00**	**498**	**135.600.000,00**	**766**	**406.800.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.264,00**	**542.400.000,00**	**60,25**	**18,18**	**1.264,00**	**542.400.000,00**	**60.25**	**0**	
	214.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,Ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	1.356.000.000,00	3	135.600.000,00	3	406.800.000,00	0	0	0	0	6	542.400.000,00	50	40	6	542.400.000,00	0	0	
	214.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	0.00	0	0.00	0	3379.00	1.627.200.000,00	3.543,00	0	1.389,00	0	0	0	0	0	4.932,00	0	145,96	0	4.932,00	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	97,98	20					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	44,32	10,61					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
																				Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	73,8	17,53					
																				Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat Rendah					
																				Total		**14.977.836.071,00**				**4.428.858.925,00**	
																				Persentase Realisasi Anggaran						**29.57%**	
																				Predikat						**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran kurang maksimal, Petunjuk Teknis yang baru disahkan serta banyaknya perubahan kebijakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perencanaan yang lebih matang dan lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran (terukur) agar tercapai target kinerja

Pacitan, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19661110 199312 2 002

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan PPPA

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan			80,89	80,92	80,94	80,97	81,00%	80,90	94,65	81,98			
2.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan			69,41	69,62	69,89	70	71,6	100,00	100	100			
3.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)			0,0086	0,0088	0,0089	0,009	0,0091	0,0083	0,0007	0,0042			
4.	Persentase tersedianya data gender dan anak			100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100			
5.	Strata Kabupaten Layak Anak			Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Pratama	Madya	Madya			
6.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif			71,72%	71,95%	72,20%	72,36%	72,54%	100,00	100	100			
7.	Total Fertility Rate (TFR)			1,87	1,85	1,83	1,8	1,79	1,98	1,86	1,77			
8.	Age Spesific Rate 15-19 (ASFR 15-19)			31,2%	30,8	30,3	29,70%	29,30%	36,20	31,8	25,2			
9.	Persentase peserta KB aktif (CPR)			66,46%	66,88%	67,42%	67,64%	68,09%	75,52	77,15	73,22			
10.	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) %			8,34%	8,16%	8,00%	7,82%	7,72%	10,93	10,08	7,97			
11.	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga			80,23	81,53%	82,84%	84,15%	85.,45%	97,21	84,75	100			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud, adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA.

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD propinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang saat ini sedang dikembangkan oleh BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur

adalah sebagai berikut :

Tabel III.1.

Identifikasi Kebjakan Nasional Dan Provinsi

NO	KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI	KETERANGAN /PROVINSI
1	2	4
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)	1,83
2	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraseptive Prevalence Rate/mCPR)	67,04 (all method)
3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need %)	6,84
4	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate 15-19 tahun)	22 per 1000 perempuan 15-19 tahun
5	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,2
7	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	2684 PIK R 1638 BKR
8	Persentase Kabupaten Kota yang melaksanakan Pembinaan GenRe (PIK R/M dan BKR)	100%
9	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan teregistrasi	832 Rumah Data Kependudukan
10	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayanI KB MKJP	81,04%
11	Persentase kesertaan KB Di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah	58,48%
12	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	44,1%
13	Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana	75%

14	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	38 Kabupaten Kota

Sumber : Matrik kinerja dan kerangka pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

3.2.1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi OPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan

kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Adapun rumusan tujuan didalam Rencana Strategis Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan keluarga dan keluarga berencana
2. Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan
3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang akan dicapai Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan adalah :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif
5. Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan

Sedangkan Indikator sasarannya adalah :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

   Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

   a. Jumlah jiwa tahun sekarang

   b. Jumlah jiwa tahun kemarin

   Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran pertama ini yaitu:

   1) Total Fertility Rate (TFR)

      Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

      a. Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu

      b. Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama

      c. Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ……., i=7 untuk kelompok umur 45-49)

   2) Age Spesific Rate 15-19 (ASFR 15-19)

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 – 19 tahun
b. Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama

3) Cakupan peserta KB Aktif (CPR)

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah akseptor KB,
b. Jumlah Pasangan Usia Subur.

4) Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah Unmet Need,
b. Jumlah Pasangan Usia Subur.

5) Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 Fungsi Keluarga

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan 8 Fungsi Keluarga
b. Jumlah Kelompok Kegiatan yang ada

2. Persentase keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, social dan politik

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

a. Jumlah perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik
b. Jumlah perempuan

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran kedua ini yaitu:

1) Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

   a. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan,

   b. Jumlah pekerja usia 15 tahun keatas

2) Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

   a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pelayanan terpadu,

   b. Jumlah pelayanan yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Terpadu

3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

   b. Jumlah KDRT,

   c. Jumlah kepala keluarga

3. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan

   Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

   a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani

   b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk

   Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran ketiga ini yaitu:

1) Persentase tersedianya data gender dan anak

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Data Gender

4. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

a. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang mendapatkan pelayanan
b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran ketiga ini yaitu:

1) Strata Kabupaten Layak Anak

Keberhasilan capaian indikator program ini didapat dari perolehan hasil evaluasi Kota Layak Anak dan dapat diukur dengan:

a. 1 Kelembagaan yaitu Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Persentase Anggaran PHPA, SDM Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), Keterlibatan lemabaga masyarakat dan media massa dalam PHPA, Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA dan Jumlah Kegiatan Inovatif.
b. 6 Klaster yaitu :
   - Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan
   - Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak
   - Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
   - Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
   - Klaster 5 : Perlindungan Khusus

Sehingga mendapatkan Tingkatan Kategori KLA :

- Mentor : 901-1000 → 31 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Utama : 801-900 → 28 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Nindya : 701-800 → 25 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Madya : 601-700 → 21 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Pratama : 501-600 → 17 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak

2) Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif
b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk

5. Nilai Hasil Suvey IKM

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan menghitung beberapa unsur dalam survey yaitu :

No	Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan
U2	Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran keempat ini yaitu:

1) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional
2) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah

6. Nilai Hasil SAKIP

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan menghitung beberapa unsur dalam survey yaitu :

No	Komponen
a.	Perencanaan
b.	Pengukuran
c.	Pelaporan
d.	Evaluasi

e.	Pencapaian

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran kelima ini yaitu:

1) Hasil Nilai Evaluasi Sakip PD

Sedangkan target indikator sasaran untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut

Tabel III.1

Target Indikator Kinerja Sasaran

Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2026

NO	***SASARAN***	***INDIKATOR***	***TAHUN 2026***
			TARGET
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.69
2	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik	58.74
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan.	100
		Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	100

Sedangkan target indikator Program untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Target Indikator Kinerja Program

Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		*2*		*3*
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.1	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	81.00 %
2	Program Perlindungan Perempuan	2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	70.16 %
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.1	Rasio KDRT	0,0091 %
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	4.1	Persentase Tersedianya Data Gender dan Anak	100 %
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	5.1	Strata Kabupaten Layak Anak	Nindya
6	Program Perlindungan Khusus Anak	6.1	Persentase Anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	72,54 %
7	Program Pengendalian Penduduk	7.1	Total Fertility Rate (TFR)	1,79 %
8	Program Pembinaan keluarga berencana (KB)	8.1	Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 15-19)	29,3 %
		8.2	Unmet need	7,72 %
		8.3	Persentase peserta KB aktif (CPR)	68,09 %

9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.1	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga	85,45 %

3.3. Program Dan Kegiatan

3.3.1. Program

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 ada 10 (sepuluh) program, sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

3.3.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang direncanakan untuk dilaksanakan

dan yang diusulan untuk Pembiayaannya dari APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
      - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Sosialisasi Peningkatan Patisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Program Perlindungan Perempuan
   a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      - Kerjasama para pihak dalam pencegahan Ktp Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
   a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Hak Anak
   a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
- pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah-Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Program Pengendalian Penduduk

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal

b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
   - Pencatatan dan Pengumpulan data keluarga

- Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
   a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
      - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
      - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
      - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
      - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
   b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
      - Penggerakan kader institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
   c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi sera Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

- Peningkatan Kesertaan Penggunan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB.

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2026 ditempuh melalui 10 program 23 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan ini bersumber dari berbagai pendanaan yaitu dana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pajak Rokok dengan total anggaran sebesar Rp. 14.489.075.272,00. Adapun untuk lebih jelasnya rencana kerja dan penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**14.489.075.272,00**							**15.847.967.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.489.075.272,00**							**15.847.967.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**763.846.689,00**							**1.180.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan***	**81 %**			**81 %**	**550.000.000,00**						**81 %**	**760.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG*	43 Orang			171 Orang	50.000.000,00			-	-	-	43 Orang	260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan			50 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				43 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina*	27 Organisasi			27 Organisasi	500.000.000,00			-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-	27 Organisasi	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 orang			300 orang	500.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-	50 orang	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan*** ***Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan***	**100 %**			**71,6 %** **7,16 nilai**	**60.896.640,00**						**100 %**	**95.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*	50 Orang			60 Orang	15.296.640,00			-	-	-	50 Orang	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	15.296.640,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan*	1 Dokumen			1 Lembaga	45.600.000,00			-	-	-	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				3 orang	45.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Rasio KDRT***	**0,0091 rasio**			**0,0091 rasio**	**27.868.383,00**						**0,0091 rasio**	**100.000.000,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen			-	10.000.000,00			-	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Lembaga			2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Lembaga	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	30 Keluarga			-	17.868.383,00			-	-	-	26 Keluarga	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	27 Orang			20 Orang	17.868.383,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	27 Orang	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase tersedianya data Gender dan anak***	**100 %**			**100 %**	**6.242.925,00**						**100 %**	**10.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data gender dan anak*	1 Dokumen			1 buku	6.242.925,00			-	-	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	6.242.925,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Strata Kabupaten Layak Anak***	**Nindya Strata**			**Nindya Strata**	**60.085.762,00**						**Nindya Strata**	**70.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pemerhati PHA*	1 Lembaga			1 Lembaga	60.085.762,00			-	-	-	1 Lembaga	70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	60.085.762,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif***	**72,54 %**			**72,54 %**	**58.752.979,00**						**72,54 %**	**145.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan*	50 Orang			27 Orang	20.000.000,00			-	-	-	50 Orang	85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus*	1 Dokumen			1 Lembaga	38.752.979,00			-	-	-	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	100 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	80 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	28.752.979,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**13.725.228.583,00**							**14.667.967.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP perangkat daerah***	**>B Nilai**			**>B Nilai**	**2.336.061.583,00**						**>B Nilai**	**2.875.000.000,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*	23 Dokumen			23 Dokumen	25.092.600,00			-	-	-	23 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			9 Dokumen	10.127.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	9 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	8.597.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			12 Laporan	6.368.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah*	59 Dokumen			59 Dokumen	1.966.489.297,00			-	-	-	59 Dokumen	2.015.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan			17 Orang/bulan	1.797.029.997,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	18 Orang/bulan	1.800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	156.739.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Dokumen	185.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			8 Dokumen	5.764.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			16 Laporan	6.955.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi*	100 %			100 %	187.871.600,00			-	-	-	100 %	570.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	26.253.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Paket	70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	161.618.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan*	100 %			100 %	59.916.200,00			-	-	-	100 %	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	59.916.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik*	80 %			80 %	96.691.886,00			-	-	-	80 %	170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit			80 Unit	76.664.986,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	70 Unit	110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.026.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Total Fertility Rate (TFR)***	**1,79 Nilai**			**1,79 Nilai**	**361.150.000,00**						**1,79 Nilai**	**508.400.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal informal dan nonformal yang melakukan pendidikan kependudukan*	11 Kerjasama			6 kerjasama	5.000.000,00			-	-	-	9 Kerjasama	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	8 Satuan Pendidikan			4 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	6 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Data dan Informasi Keluarga*	1 Laporan			1 Laporan	356.150.000,00			-	-	-	1 Laporan	428.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan			1 Laporan	66.950.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan			12 Laporan	145.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	12 Laporan	151.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen			12 Dokumen	144.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	1 Dokumen	217.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 1519)*** ***Persentase peserta KB aktif (CPR)*** ***Unmet Need***	**68,62 %** **7,79 %**			**29,3 Nilai** **68,09 %** **7,72 Nilai**	**7.848.167.000,00**						**68,22 %** **7,81 %**	**7.913.367.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah laporan data keluarga yang beresiko stunting*	1 Laporan			1 Laporan	1.203.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	1.213.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan			12 Laporan	588.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	1 Laporan	588.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan			12 Laporan	240.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	12 Laporan	240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	16 Dokumen			16 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	16 Dokumen	135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	50 Organisasi			2 Organisasi	250.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	50 Organisasi	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina*	20 Orang			30 Orang	4.511.800.000,00			-	-	-	19 Orang	4.567.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1763 Orang			1763 Orang	4.511.800.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	1763 Orang	4.567.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pelayanan KB*	8 Event			8 Event	1.539.767.000,00			-	-	-	8 Event	1.539.767.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan			33 Laporan	29.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	12 Laporan	29.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang			1950 Orang	1.481.717.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	1950 Orang	1.481.717.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan			1 Laporan	28.350.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	1 Laporan	28.350.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	6 Organisasi			-	593.600.000,00			-	-	-	6 Organisasi	593.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	172 Kampung			17 Kampung	593.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	172 Kampung	593.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga***	**85,45 %**			**85,45 %**	**3.179.850.000,00**						**85,45 %**	**3.371.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan*	99 Kelompok			84 Kelompok	196.650.000,00			-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	94 Kelompok	388.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen			1 Laporan / Dokumen	48.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	1 Laporan / Dokumen	48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	12 Unit			25 Unit	130.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	-	12 Unit	180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan			1 Laporan	18.650.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1250 Organisasi			-	2.983.200.000,00			-	-	-	1200 Organisasi	2.983.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan			12 laporan	1.356.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	12 laporan	1.356.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3379 laporan			3379 laporan	1.627.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-	3379 laporan	1.627.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**14.489.075.272,00**							**15.847.967.000,00**	

Target dan Capaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
Triwulan II Tahun 2025

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					TARGET CAPAIAN 2025	REALISASI CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN	STATUS CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 PER INDIKATOR		Rumus Perhitungan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		14	15	16
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar													
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**												
2.1	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,84	80,89	80,92	80,94	80,97	81,00%	80,97	0,00	0,00			Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding Jumlah pekerja usia 15 tahun-69 tahun (usia produktif) x 100
2.2	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	69,23	69,41	69,62	69,89	70	71,6	70	100,00	142,86			Jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan dibagi pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti oleh pelayanan terpadu x 100
2.3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,0085	0,0086	0,0088	0,0089	0,009	0,0091	0,009	0,0000	0,00			Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100
2.4	Persentase tersedianya data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00			Buku data gender dan anak yang tersusun dibagi Buku data gender dan anak yang direncanakan tersusun x 100
2.5	Strata Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	0	0,00			Perolehan hasil evaluasi KLA
2.6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	71,43%	71,72%	71,95%	72,20%	72,36%	72,54%	72,36%	100,00	13819,79			Jumlah pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti/ditangani oleh pelayanan terpadu dibagi jumlah pengaduan anak korban kekerasan yang masuk x 100
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**												
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	1,89	1,87	1,85	1,83	1,8	1,79	1,8	0	0,00			Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya
8.2	Age Spesific Rate 15-19 (ASFR 15-19)	31,60	31,2%	30,8	30,3	29,70%	29,30%	29,70%	0	0,00			Jumlah Kelahiran dalam kelompok umur 15-19 dibagi jumlah wanita dalam kelompok umur 15-19 dikali 1000
8.3	Persentase peserta KB aktif (CPR)	79,78	66,46%	66,88%	67,42%	67,64%	68,09%	67,64%	72,77	10758,43			Jumlah akseptor KB dibagi PUS x 100
8.4	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) %	8,52%	8,34%	8,16%	8,00%	7,82%	7,72%	7,82%	6,91	1,13			Jumlah unmeet need dibagi PUS x 100
8.5	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga	78,93	80,23	81,53%	82,84%	84,15%	85.,45%	84,15%	25,43	3021,98			Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga dibagi jumlah kelompok kegiatan yang ada * 100%

Pacitan, 1 Juli 2025
KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19661110 199312 2 002

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran dari pengelola program dimasing-masing Bidang, lingkup Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan yang diembannya, Rencana Kerja ini sekaligus juga sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kabupaten Pacitan selama tahun 2026.

Rencana Kinerja juga merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2026.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak diharapkan kegiatan–kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di

bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pelayanan pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Kabupaten Pacitan

Semoga Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah, sehingga bisa berhasil dalam mengemban amanah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang hakiki serta dapat mencapai sasaran yang optimal sesuai indikator standar pelayanan minimal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten pacitan.

Pacitan, 18 Juli 2025

Kepala Dinas PPKB dan PPPA
Kabupaten Pacitan

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

RENCANA KERJA (RENJA) 2026

DISHUB PACITAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan
www.dishub.pacitankab.go.id
dishub@pacitankab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Gatot Subroto No. – (Komplek Terminal Bus Tipe A) Pacitan 63515
Telp/Fax. (0357) 882006 *e-mail*: dishub@pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 000.3.1/ /408.39/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Tim Penyusun Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan informasi;
b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
    1) Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026
    2) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025; dan
    3) Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2027
c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN,

DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691012 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang responsif dan aspiratif

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN,

Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691012 198809 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1. LATAR BELAKANG 1
2. DASAR HUKUM 2
3. MAKSUD DAN TUJUAN 3
4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 39
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 42

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 43

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan 45
3.3 Program dan Kegiatan 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 56

BAB V PENUTUP 69

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan rencana kinerja bersifat tahunan yang meruapakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi Masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persfektif jangka Panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah daerah yang bercirikan “Good Governance” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur Negara yang Bersih, serta tanggung jawab dan professional dalam masing-masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya Masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan system dan proses Pembangunan daerah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di Tingkat daerah. Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2025, arah kebijakan, program, kegiatan dan capaian program.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program Pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Perhubungan Menterjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang di formulasikan melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku Pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi, sasaran arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam pencapaian tujuan Pembangunan Kabupaten Pacitan. Di samping itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan elumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan peng arahanggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan Pembangunan, prioritas Pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaraan sementara dan APBD. Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan sasaran serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2022 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
19. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 disusun untuk menjabarkan arah kebijakan dan pembangunan bidang Perhubungan jangka pendek pada tahun 2026

2. Tujuan

   Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2026 disusun adalah untuk :

   a. Memberikan pedoman rencana program kegiatan dan anggaran tahunan
   b. Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun anggaran 2026
   c. Sebagai dokumen guna penyusunan rencana kerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026
   d. Memberikan arah dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2026 khususnya dibidang Perhubungan

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan kerja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

Bab IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Lalu dan capaian Renja

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam perubahan Renstra Dinas Perhubungan. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan mesaukna untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 memuat 2 (dua) program, dan 7 (tujuh) kegiatan penunjang dan 9 (sembilan) kegiatan prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.703.679.656,00 pada bulan april ada pergeseraan anggaran sejumlah Rp. 6.539.665.586,00. Setelah melalui beberapa tahapan proses

perencanaan dan penganggaran, berdasarkan rekapitulasi fisik dan keuangan Dinas Perhubungan, anggaran yang terealisasi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. Sebagaimana tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

KABUPATEN PACITAN TRIWULAN TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**215.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**73.55**	**4.831.237.156,00**	**0,00**	**933.079.689,00**	**70,95**	**1.225.664.995,00**	**0,00**	**191.004.555,00**	**0,00**	**0,00**	**70,95**	**2.349.749.239,00**	**96,46**	**48,64**	**70,95**	**2.349.749.239,00**	**0**	**0**	**Dinas Perhubungan**
	215.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**23**	**66.000.000,00**	**6,00**	**6.708.000,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**6.708.000,00**	**34,78**	**10,16**	**8,00**	**6.708.000,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan		0,00	0.00	0,00	9	50.000.000,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	55,56	0,00	5,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																							
	215.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0.00	0,00	14	16.000.000,00	5,00	6.708.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6.708.000,00	50,00	41,93	7,00	6.708.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				52,78	20,97					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	215.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**59**	**3.929.167.156,00**	**15,00**	**862.192.800,00**	**8,00**	**1.007.263.698,00**	**0,00**	**191.004.555,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**2.060.461.053,00**	**38,98**	**52,44**	**23,00**	**2.060.461.053,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0.00	0,00	0.00	0,00	35.00	3.919.167.156,00	35,00	857.194.800,00	35,00	1.007.263.698,00	0,00	191.004.555,00	0,00	0,00	35,00	2.055.463.053,00	100,00	52,45	35,00	2.055.463.053,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		ASN																								
	215.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0,00	0.00	0,00	45	10.000.000,00	11,00	4.998.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4.998.000,00	44,44	49,98	20,00	4.998.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				72,22	51,22					F
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Rendah		2	2		
	215.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**86.184.000,00**	**24,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			kepegawaian																							
	215.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	86.184.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33	0,00	1,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				33,33	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**345.691.000,00**	**24,00**	**2.360.000,00**	**16,66**	**149.085.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,66**	**151.445.118,00**	**40,66**	**43,81**	**40,66**	**151.445.118,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	5.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		gan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan																							
	215.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	0,00	5.00	126.707.300,00	1,00	0,00	1,00	38.405.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38.405.118,00	40,00	30,31	2,00	38.405.118,00	0	0	
	215.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	110.323.700,00	0,00	0,00	1,00	106.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	106.100.000,00	50,00	96,17	1,00	106.100.000,00	0	0	
	215.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	103.660.000,00	3,00	2.360.000,00	3,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6.940.000,00	50,00	6,69	6,00	6.940.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				47,50	33,29					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat	Sangat		4	4		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				Rendah	Rendah					
	215.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**15.000,00**	**24,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00	0.00	0,00	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.01.2.	**Penyediaan**	**Persentase**		**0,**	**0.**	**0,**	**100**	**357.165.0**	**24,0**	**61.818.8**	**16,**	**68.988.17**	**0,**	**0,00**	**0,**	**0,**	**40,6**	**130.807.0**	**40,6**	**36,6**	**40,6**	**130.807.0**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	08	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**		**00**	**00**	**00**		**00,00**	**0**	**89,00**	**66**	**9,00**	**00**		**00**	**00**	**6**	**68,00**	**6**	**2**	**6**	**68,00**			
	215.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0,00	0.00	0,00	12	138.317.000,00	3,00	35.868.673,00	3,00	35.206.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	71.074.894,00	50,00	51,39	6,00	71.074.894,00	0	0	
	215.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0,00	0.00	0,00	12	218.848.000,00	3,00	25.950.216,00	3,00	33.781.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	59.732.174,00	50,00	27,29	6,00	59.732.174,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	39,34					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rend	Sangat Ren		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				ah	dah					
	215.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**80.00**	**47.015.000,00**	**20,00**	**0,00**	**14,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**328.000,00**	**42,50**	**0,70**	**34,00**	**328.000,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0,00	0.00	0,00	16	47.000.000,00	4,00	0,00	5,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	328.000,00	56,25	0,70	9,00	328.000,00	0	0	
	215.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	4.000,00	0,00	40,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi																							
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				2.028,13	0,35					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				37,46	20,53					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	**215.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN**	**Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**1.872.442.500,00**	**24,99**	**293.312.600,00**	**24,99**	**439.543.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**732.856.570,00**	**49,98**	**39,14**	**49,98**	**732.856.570,00**	**0**	**0**	**Dinas Perhubungan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																								
	215.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0,00	0.00	0,00	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	215.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1087**	**206.400.000,00**	**678,00**	**14.800.000,00**	**451,00**	**118.747.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,00**	**133.547.970,00**	**103,86**	**64,70**	**1.129,00**	**133.547.970,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	215.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		0.00	0,00	0.00	0,00	600.00	206.280.000,00	345,00	14.800.000,00	357,00	118.747.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	133.547.970,00	117,00	64,74	702,00	133.547.970,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				58,50	32,37					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	215.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**4**	**217.800.000,00**	**1,00**	**40.920.000,00**	**4,00**	**39.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**80.380.000,00**	**125,00**	**36,91**	**5,00**	**80.380.000,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	13.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	215.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		0.00	0,00	0.00	0,00	5.00	204.280.000,00	1,00	40.920.000,00	4,00	39.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	80.380.000,00	100,00	39,35	5,00	80.380.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	19,68					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																		Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	215.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1**	**878.497.500,00**	**0,00**	**173.922.600,00**	**0,00**	**176.275.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.198.000,00**	**0,00**	**39,86**	**0,00**	**350.198.000,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	878.497.500,00	3,00	173.922.600,00	3,00	176.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	350.198.000,00	50,00	39,86	6,00	350.198.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	39,86					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**9**	**206.400.000,00**	**0,00**	**32.300.000,00**	**0,00**	**19.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.700.000,00**	**0,00**	**25,05**	**0,00**	**51.700.000,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0.00	0,00	0.00	0,00	3500.00	31.500.000,00	1.098,00	25.000.000,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	25.000.000,00	55,80	79,37	1.953,00	25.000.000,00	0	0	
	215.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan			0,00	0.00	0,00	9	174.900.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	0,00	15,27	0,00	26.700.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Berkala Kendaraan Bermotor	Bermotor yang Terpelihara																							
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				27,90	47,32					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	215.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah manajemen dan rekayasa**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3**	**250.115.000,00**	**0,00**	**22.470.000,00**	**2,00**	**51.264.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**73.734.100,00**	**66,67**	**29,48**	**2,00**	**73.734.100,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka		0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	250.100.000,00	0,00	22.470.000,00	0,00	51.264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.734.100,00	0,00	29,48	0,00	73.734.100,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan																							
	215.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	14,74					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	215.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan**	**Peningkatan jumlah pelayanan bidang**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**130**	**107.200.000,00**	**30,00**	**7.620.000,00**	**66,00**	**33.436.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**41.056.500,00**	**73,85**	**38,30**	**96,00**	**41.056.500,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		LLAJ di Jalan	**perhubungan yang berkeselamatan**																							
	215.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	107.200.000,00	3,00	7.620.000,00	3,00	33.436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	41.056.500,00	50,00	38,30	6,00	41.056.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	38,30					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.02.2.12	**Penetapan Rencana**	**Peningkatan jumlah pelayanan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240.000,00**	**0,00**	**37,33**	**0,00**	**2.240.000,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**bidang perhubungan yang berkeselamatan**																							
	215.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0.00	0,00	1	6.000.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	37,33	0,00	2.240.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	37,33					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat	Sangat		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				Rendah	Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				41,04	30,18					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				73,22	43,89					
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah					
Total																				**6.703.679.656,00**			**3.082.605.809,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																				**45.98%**						
Predikat																				**Sangat Rendah**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Waktu Pelaksanaan yang cukup																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi geografis dengan 10% dataran dan 90% pegunungan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepat Realisasi kinerja dan anggaran																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										

Tahapan berikutnya kondisi tahun 2025 diuraikan rangkaian pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasarn strategis jangka menengah Dinas Perhubungan adalah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis kinerja pelayanan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	89,20	64,14	71,90%
		Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,08%	1,19%	1.485,09%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	60,30%	61,32%	101,69%
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	81,60	84,20	103,19%

Pelayanan transportasi mulai dari perekayasaan lalu lintas, pengoperasian terminal tipe c, perparkiran, manajemen angkutan umum, manajemen keselamatan, pelayanan uji berkala

kendaraan bermotor dan ijin trayek serta KPS untuk angkutan pedesaan, dan pengoperasian kendaraan wajib uji di Kabupaten Pacitan masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang memiliki basis pengetahuan di bidang transportasi dan kelalulintasan;
2. Belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan di lapangan;
3. Kondisi terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
4. Kurang tercukupinya fasilitas jalan seperti rambu-rambu, marka dan guardrail pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadai.
5. Adanya pergantian system Online Single Submission (OSS) dalam proses pengurusan ijin angkutan sehingga tidak ada angkutan umum yang memiliki ijin usaha angkutan umum
6. Belum diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa aturan perundangan di tingkat Nasional yang mengatur tentang Perhubungan.

Akan tetapi, meskipun ada permasalahan pelayanan transportasi juga memberikan hasil yang positif antara lain; semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen dari pengguna jalan di Kabupaten Pacitan untuk tertib berlalu lintas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

(1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
(2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
(3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi;dan
(4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan; dan
    2. Seksi Perparkiran.
d. Bidang Prasarana Transportasi terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi; dan
2. Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU).

e. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :
   1. Seksi Pengendalian dan Transportasi; dan
   2. Seksi Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi.

f. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

- Kekuatan
  1. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
  2. Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti diklat teknis fungsional/struktural;
  3. Terdapat sistem informasi yang mendukung pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
  4. Motivasi dan dedikasi karyawan cukup tinggi;
- Kelemahan
  1. Kurang optimalnya SDM pelaksana dari segi kualitas dan kuantitas;
  2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
  3. Mekanisme dan perencanaan kerja kurang optimal
  4. Belum optimalnya sistem pengelolaan administrasi dan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

- Peluang
  1. Wilayah jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Pacitan cukup luas;
  2. Adanya dukungan stacke holder (organda, BPTD, Paguyuban dll);
  3. Adanya dukungan dari APBD II, APBD I dan APBN;
  4. Berkembangnya pusat perekonomian di wilayah;
  5. Berkembangnya jumlah kendaraan sehingga meningkatkan PAD
  6. Adanya perintisan transportasi laut dan udara.
- Tantangan
  1. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien ;
  2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor, perijinan angkutan dan ketertiban lalu lintas;
  3. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
  4. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor
  5. Meningkatnya jumlah kendaraan

Bertolak pada isu-isu strategis diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD,

dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dari Kementerian Perhubungan

Rencana strategis Kementerian Perhubungan 2019-2014 mengusung visi :

"KESELAMATAN JALAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA"

Yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi :

1. Peningkatan pelayanan keselamatan transportasi dan kelengkapan sarana prasarana jalan mendukung keselamatan.
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dan berkeselamatan.
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Isu Strategis Bidang Perhubungan :

Salah satu program agenda prioritas pembangunan yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali ke dalam agenda pembangunann nasional, khususnya agenda Pembangunan tarnsportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan Pembangunan dan membangun transportasi masal perkotaan.

Isu strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar

wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

1. Mempercepat Pembangunan system transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistic nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

Isu strategis 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis Pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah

kebijakan Pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, Pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum masal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi and tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan Tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan

trasnportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu

1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan good governance,
5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan
7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

3. Kapasitas Trasnportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, Yaitu :

1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang,
3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya diwilayah timur Indonesia,
4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan
5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Arah Kebijakan Umum Perhubungan Darat 2015-2019

Arah kebijakan pengembangan Transportasi Darat untuk Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perkembangan lingkungan dan isu-isu strategis yang ada, maka secara umum arah dan kebijakan pengembangan transportasi darat dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan konektivitas system transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistic nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;
5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan,
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis dapat berasal dari skala lokal, regional maupun nasional. Sesuai Peraturan Bupati Pacitan No. 147 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang mengatur urusan perhubungan adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengakibatkan perubahan kewenangan yang sangat mendasar.

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh

organisasi atau instansi daerah. Sedangakan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA"

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 :	Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 2 :	Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa
Misi 3 :	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melaui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya
Misi 4 :	Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu "Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup". Pada misi pertama ini Dinas Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang mengampu urusan di bidang Perhubungan mendukung misi 1 "Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi operasional	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator 1. Kualitas layanan 2. Responsivitas 3. Produktivitas 4. Akuntabilitas 5. Responsibilitas Kualitas layanan meliputi : A. Pengadaan fasilitas publik B. Optimalisasi C. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan koordinasi Responsivitas Meliputi ; Produktivitas meliputi : Produktivitas meliputi : A. Teralisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas b. hasil sesuai target Akuntabilitas meliputi : A. Penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan lancar B. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas Responsibiltas meliputi : A. Pengendalian Birokrasi B. Kordinasi dengan lintas sektor	$\frac{IKM + \frac{V}{C} rasio + prosentase\ tersedianya\ sarana\ dan\ prasarana\ perhubungan}{3}$	26,57%	27,01%

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Sasaran	Inidikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{Kejadian\ kecelakaan\ angkutan\ orang/barang}{Jumlah\ kendaraan\ wajib\ uji} x100$	Survey Dinas Perhubungan	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{Jumlah\ angkutan\ orang\ yang\ berstandar\ pelayanan\ keselamatan\ minimal}{Jumlah\ angkutan\ orang} x100$		82,99%	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%	93,4%

Sasaran	Inidikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	$Rata - rata\ (\ Presentase\ pemenuhan\ sarana\ dan\ prasrana\ perhubungan\ dan$ Presentase $tersedianya\ sarana\ pengendali\ dan\ pengamanan\ lalu\ lintas)$		28,6%	39,1%	49,7%	60,3%	70,9%	81,5%	81,5%
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan $\frac{jumlah\ pemeliharaan\ sarana\ dan\ prasarana\ perhubungan}{jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ perhubungan} x100$								
		Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas $\frac{jumlah\ sarana\ perlengkapan\ jalan}{jumlah\ kebutuhan\ perlengkapan\ jalan} x100$								

Sasaran	Inidikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	IKM Internal Dinas	Survey Dinas Perhubungan	79,20	79.99	80,79	81,60	82,42	83,24	83,24

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026

Sasaran, indikator sasaran dan program dalam Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan pada renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran, indikator sasaran dan program sebagai berikut :

A. SASARAN

Rencana Kerja (Renja) merupakan materi penjabaran Rencana Strategis, yang berisi sasaran, program dan kegiatan selama satu tahun. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran sebagai berikut : **"Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan"**

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja sasaran yang dimaksud disini adalah indikator kinerja yang diukur dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, dimana untuk indikator sasaran terdiri dari :

1. Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang
2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan
3. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

C. PROGRAM

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 menjelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2026. Hal ini digunakan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung nilai dan tujuan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan yaitu Misi 1 **"Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup",** dengan tujuan **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil"**

Berikut rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN			**6.403.418.509,00**			**6.726.167.156,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.403.418.509,00**			**6.726.167.156,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**6.403.418.509,00**			**6.726.167.156,00**	
1,	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.677.475.259,00**		**-**	**4.752.167.156,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.644.800,00		22 dokumen	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	24.539.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	16.105.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.882.952.876,00		59 dokumen	3.931.167.156,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35Orang/bulan	3.872.952.876,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34Orang/bulan	3.919.167.156,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	45 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.000.000,00		20 laporan	7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	54.384.000,00		100 %	57.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	57.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	344.759.130,00		100 %	304.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.082.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	139.477.830,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	128.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	125.084.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	115.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	75.114.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	306.136.553,00		100 %	345.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168.136.553,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	46.597.900,00		80 %	48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	46.597.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Unit	48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2,	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**1.725.943.250,00**		**-**	**1.974.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	198.323.250,00		1093 unit 1093 unit	229.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	20.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	29.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	518 Unit	178.203.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	185.120.000,00		4 unit 4 unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	120.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)							
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	185.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	848.700.000,00		316200 unit 316200 unit	900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	848.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	186.500.000,00		9 unit 9 unit	205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3525 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3575 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	155.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	226.300.000,00		5 laporan	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen	226.300.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	81.000.000,00		12 laporan	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	12 Laporan	81.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H				**6.403.418.509,00**			**6.726.167.156,00**	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas perhubungan kabupaten Pacitan tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas perhubungan kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PACITAN,

Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001

RENCANA KERJA(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2026

https://kominfo.pacitankab.go.id/id

@diskominfopacitan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat,Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 telah selesai disusun sesuai dengan pedoman dan mekanisme yang ada.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada Tingkat Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan organisasi dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Pacitan, Agustus 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19761015 1996022 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematik dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2026. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian . Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026, yang merupakan masa transisi dari berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 menuju RPJMD selanjutnya

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

Maka penyusunan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, Lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Pacitan akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Pacitan. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tema : PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KEBERDAYAAN SOSIAL

Dari tema rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pacitan diatas telah ditentukan prioritas program Pembangunan yang meliputi :

1. Menguatkan kemandirian ekonomi lokal;
2. Menjaga dan meningkatkan daya beli dan pendapatan;
3. Menguatkan industry olahan yang berpotensi ekspor;
4. Penguatan society 5.0 dalam partisipasi;
5. Menguatkan kemandirian sosial dan layanan dasar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:
7) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
16) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ;
22) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
23) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan;
24) Surat Edaran Nomor : 000.7.6.1/843/408.53/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk satu periode Tahun Anggaran, dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Sedangkan Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah:

a. Menjadi pedoman bagi Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.
b. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program pelayanan publik.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dan Surat Edaran Nomor : 000.7.6.1/843/408.53/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran DinasKominfo Kabupaten Pacitan.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.

BAB V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.143.368.517,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.932.301.696,- atau sebesar 97,05%, sisa anggaran sebesar Rp. 211.066.821,-. Dengan rincian sebagai berikut untuk anggaran belanja operasional sebesar Rp. 6.911.598.697,- terealisasi sebesar Rp. 6.701.719.496,- atau 96.96 % dan anggaran modal sebesar Rp. 231.769.820,- terealisasi sebesar Rp. 230.582.200,- atau 99,49 % yang dijabarkan dalam 5 program 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan.
Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu dapat dilihat pada table.2.1 di bawah :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kominfo

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
1	216.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	77,66	0	70.40	1.445.275.913,00	76.86	4.431.860.017,00	0	679.201.388,00	0	1.178.831.661,00	72	1.009.573.296,00	0	1.396.466.574,00	72,3	4.264.072.919,00	94,07	95,78	142,7	5.709.348.832,00	183.75	0
	216.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Dok	23.00	25.750.000,00	23.00	21.177.900,00	23	33.432.000,00	5	3.000.000,00	5	9.808.200,00	6	0	7	19.958.250,00	23	32.766.450,00	100	98,01	46	53.944.350,00	200	209.49
	216.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9.00	13.750.000,00	9.00	19.868.200,00	9	21.860.000,00	3	3.000.000,00	3	4.331.200,00	1	0	2	14.428.000,00	9	21.759.200,00	100	99,54	18	32.567.400,00	200	296.87
	216.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14.00	12.000.000,00	14.00	19.309.700,00	14	11.572.000,00	2	0	2	5.477.000,00	5	0	5	5.530.250,00	12	11.007.250,00	85,71	95,12	24	21.576.950,00	185.71	179.14
																		Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)			92,85	97,33				
																		Predikat Kinerja(%)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2	
	216.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dok	59.00	65.000.000,00	59.00	283.491.320,00	59	2.661.489.717,00	13	440.330.774,00	16	863.094.499,00	15	597.091.938,00	13	624.881.925,00	57	2.525.399.136,00	96,61	94,89	116	2.808.890.456,00	196.61	4321.37
	216.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21.00	0	24.00	226.426.424,00	21	2.605.149.717,00	21	434.430.774,00	21	850.251.499,00	21	581.677.938,00	21	603.188.485,00	21	2.469.548.696,00	98,24	94,79	44	2.695.975.016,00	209.52	0
	216.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	15.000.000,00	2.00	5.416.700,00	1.00	7.720.000,00	0	0	0	3.993.000,00	0	0	1	3.484.000,00	1	7.477.000,00	100	96,79	3	12.893.700,00	300	95.96
	216.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36.00	50.000.000,00	41.00	51.648.000,00	36	48.615.000,00	11	5.900.000,00	10	8.850.000,00	10	15.414.000,00	13	18.279.440,00	34	48.373.440,00	94,44	99,5	75	100.021.440,00	208.33	206.94
																		Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)			96,76	97,03				
																		Predikat Kinerja(%)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3	

216.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100,00**	**15.500.000,00**	**100,00**	**123.413.200,00**	**100**	**172.464.575,00**	**25**	**2.420.000,00**	**24,9**	**41.640.900,00**	**25**	**123.507.000,00**	**24,3**	**4.356.000,00**	**99**	**171.923.900,00**	**99**	**99,69**	**199**	**295.337.100,00**	**199**	**190,54**
216.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0,00	10.000.000,00	55,00	15.125.000,00	1,00	47.354.575,00	0	0	1	10.378.500,00	1	38.628.000,00	0	0	3	49.006.500,00	200	99,48	57	64.131.500,00	0	641,32
216.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0,00	5.530.000,00	20,00	108.288.200,00	20,00	125.330.000,00	0	2.420.000,00	1	31.262.400,00	1	84.879.000,00	1	4.356.000,00	3	122.917.400,00	15	99,77	23	231.205.600,00	0	4203,74
																			Rata-rata capaian kinerja Perf SubKegiatan(%)	105,5	99,63				
																			Predikat kinerja(%)	Capaian Tinggi	Capaian Tinggi		2	2	
216.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100,00**	**253.752.000,00**	**100,00**	**172.633.944,00**	**100**	**650.584.036,00**	**25**	**39.820.610,00**	**24,9**	**69.739.066,00**	**25**	**122.878.380,00**	**24,3**	**403.792.756,00**	**99**	**636.231.012,00**	**99**	**97,78**	**199**	**808.864.936,00**	**199**	**318,76**
216.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0,00	7.752.000,00	1,00	3.845.750,00	1,00	6.459.645,00	1	2.529.475,00	1	0	1	3.163.500,00	1	756.000,00	1	6.441.975,00	100	99,73	3	10.299.725,00	0	132,75
216.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	12.000.000,00	7,00	33.498.625,00	8,00	55.280.055,00	2	16.748.935,00	1	810.000,00	2	18.985.125,00	2	17.616.331,00	7	54.160.441,00	87,5	97,97	14	87.554.066,00	70	730,45
216.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	20.000.000,00	5,00	37.884.795,00	5,00	37.453.150,00	1	10.794.600,00	0	0	1	13.993.205,00	1	12.509.660,00	3	37.297.555,00	100	99,56	6	75.192.550,00	300	635,1
216.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	9.000.000,00	4,00	14.238.980,00	3	31.071.135,00	0	0	1	5.231.200,00	0	0	2	25.752.000,00	3	30.983.200,00	100	99,72	7	45.907.180,00	350	510,08
216.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	135.000.000,00	16,00	85.500.274,00	12,00	520.410.000,00	3	9.784.450,00	3	63.697.866,00	3	86.936.750,00	3	347.158.775,00	12	507.347.841,00	100	97,49	178	589.480.635,00	1466,67	436,92
																			Rata-rata capaian kinerja Perf SubKegiatan(%)	97,5	98,89				
																			Predikat kinerja(%)	Capaian Tinggi	Capaian Tinggi		5	5	

2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**20.000.000,00**	**99.75**	**68.626.800,00**	**100**	**61.945.320,00**	**25**	**23.528.600,00**	**24,9**	**0**	**25**	**0**	**24,3**	**37.502.000,00**	**99**	**61.030.600,00**	**99**	**98,52**	**198,8**	**129.657.400,00**	**198.75**	**648.29**
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	5.00	20.000.000,00	15.00	68.626.800,00	5.00	61.945.320,00	2	23.528.600,00	9	0	1	0	3	37.502.000,00	6	61.030.600,00	120	98.52	15	129.657.400,00	360	648.29
																			Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)	120	98.52				
																			Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**343.000.000,00**	**99.80**	**569.859.929,00**	**100**	**650.684.849,00**	**25**	**158.904.003,00**	**24,9**	**157.345.746,00**	**25**	**147.580.283,00**	**24,3**	**156.071.628,00**	**99**	**620.001.560,00**	**99**	**95,28**	**198,8**	**1.189.861.589,00**	**198.8**	**346.9**
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	143.000.000,00	12.00	103.575.211,00	12	138.599.349,00	3	30.382.755,00	3	26.824.526,00	3	24.693.045,00	3	25.405.680,00	12	112.306.056,00	100	84,19	24	215.881.249,00	200	150.97
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	200.000.000,00	12.00	466.284.718,00	12	517.085.500,00	3	128.521.218,00	3	128.521.218,00	3	122.987.238,00	3	127.665.948,00	12	507.695.522,00	100	98,15	24	973.980.340,00	200	486.99
																			Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)	100	91,17				
																			Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**126.000.000,00**	**79.58**	**206.072.820,00**	**80**	**221.159.520,00**	**16**	**11.197.401,00**	**30**	**37.203.250,00**	**18**	**18.415.495,00**	**14**	**149.904.015,00**	**78,3**	**216.720.161,00**	**97,88**	**97,99**	**157,9**	**422.792.981,00**	**197.35**	**335.55**
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25.00	75.000.000,00	24.00	109.807.600,00	23.00	105.800.320,00	5	6.167.401,00	9	37.203.250,00	3	6.025.200,00	6	72.507.600,00	23	121.901.451,00	100	96,9	47	281.709.051,00	204.35	308.95
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37.00	15.000.000,00	30.00	38.067.220,00	37.00	16.660.000,00	9	5.030.000,00	13	0	5	0	9	11.510.700,00	36	16.540.700,00	97,3	98,11	66	54.607.920,00	175.38	341.3
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	35.000.000,00	1.00	58.158.000,00	1	78.499.200,00	0	0	0	0	1	12.390.295,00	0	65.685.715,00	1	78.075.010,00	100	99,72	2	136.476.010,00	200	389.93
																			Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)	99,1	98,24				
																			Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3	
																			Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	98,64	97,45				
																			Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

2	216.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	85	0	81.03	622.240.680,00	75.00	887.000.000,00	15	16.427.000,00	20	284.521.512,00	25	100.960.939,00	30	479.404.500,00	90	881.313.951,00	120	99,36	171	1.503.554.631,00	201.21	0
	216.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP	%	89.00	1.356.191.447,00	89.17	622.240.680,00	83.00	887.000.000,00	15	16.427.000,00	25	284.521.512,00	30	100.960.939,00	20	479.404.500,00	90	881.313.951,00	108,43	99,36	179,2	1.503.554.631,00	201.31	110.87
			Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100.00	1.356.191.447,00	109.00	622.240.680,00	100.00		42		0		0		0		42		42		151	622.240.680,00	151	45.88
			Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	84.00	1.356.191.447,00	44.52	622.240.680,00	64.00		0		0		0		0		0		0		44,52	622.240.680,00	53	45.88
	216.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12.00	76.191.447,00	33.00	68.722.500,00	12	115.200.000,00	3	11.077.000,00	3	49.673.800,00	3	28.889.200,00	3	35.548.500,00	12	115.158.500,00	100	99,96	45	153.881.000,00	375	241.34
	216.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12.00	410.000.000,00	394.00	129.764.800,00	12	117.655.000,00	3	0	3	31.201.212,00	3	3.075.000,00	3	82.658.200,00	12	116.974.412,00	100	99,42	325	246.729.212,00	2716.67	60.18
	216.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12.00	150.000.000,00	0.00	0	12.00	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	149.971.000,00	0	149.971.000,00	0	99,98	0	149.971.000,00	0	99.98
	216.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12.00	220.000.000,00	256.00	51.419.000,00	12	160.270.000,00	3	1.486.000,00	3	106.686.500,00	3	27.906.739,00	3	19.966.800,00	12	156.065.039,00	100	97,38	288	207.499.039,00	2400	94.32
	216.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	12.00	500.000.000,00	125.00	372.334.550,00	12	343.375.000,00	3	3.850.000,00	3	96.960.000,00	3	41.100.000,00	3	201.200.000,00	12	343.150.000,00	100	99,93	137	715.484.550,00	1141.67	143.09
																				Rata-rata capaian kinerja Per OU/Megatran(%)		80	99,27				
																				Predikat kinerja(%)		Tinggi	Dengan Tinggi		5	5	

3	216.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70	0	45.16	1.518.270.231,00	60.00	1.467.866.500,00	20	163.195.441,00	18,5	433.293.080,00	0	415.230.280,00	2,54	440.089.775,00	41	1.451.808.576,00	68,33	98,91	86,16	2.970.078.807,00	123,09	0
	216.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan Intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang dimanfaat, yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	1.210.000.000,00	25,81	1.226.029.276,00	64,52	1.002.761.500,00	18	139.762.496,00	20	345.769.480,00	0	247.189.480,00	26,6	259.121.580,00	64,5	991.843.036,00	100	98,91	90,33	2.217.872.312,00	90,33	183,3
	216.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	9,00	1.210.000.000,00	14,00	1.226.029.276,00	20	1.002.761.500,00	10	139.762.496,00	19	345.769.480,00	0	247.189.480,00	22	259.121.580,00	20	991.843.036,00	100	98,91	34	2.217.872.312,00	0	183,3
																				Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)	100	98,91				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1	
	216.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	37,50	496.036.308,00	6,45	292.240.955,00	25,00	465.105.000,00	10	23.432.945,00	10	87.523.600,00	0	168.040.800,00	5	180.968.195,00	25	459.965.540,00	100	98,89	31,45	752.206.495,00	83,87	151,64
	216.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1,00	150.000.000,00	1,00	65.377.000,00	1	62.715.000,00	1	0	0	62.715.000,00	0	0	1	0	1	62.715.000,00	100	100	2	130.092.000,00	200	86,73
	216.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1,00	316.036.275,00	20,00	170.425.825,00	2	319.500.000,00	2	8.591.900,00	0	2.850.000,00	0	152.595.800,00	2	155.586.300,00	4	319.031.000,00	200	99,85	24	489.456.825,00	240,0	154,94
	216.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	30.000.000,00	2,00	54.438.130,00	2	82.890.000,00	0	15.841.045,00	0	21.958.600,00	0	15.595.000,00	2	25.384.895,00	2	78.219.540,00	100	94,37	4	132.657.670,00	400	441,72
																				Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)	133,33	98,07				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3	
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	98,9				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

4	220.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	0	100.00	299.028.350,00	100.00	330.000.000,00	10	164.600.450,00	30	4.862.750,00	30	23.905.200,00	30	135.396.650,00	100	328.765.050,00	100	99,63	200	627.793.400,00	200	0
	220.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi Statistik Sektoral yang terdigitalisasi	OPD	26.00	289.588.262,00	3.00	299.028.350,00	14.00	330.000.000,00	2	164.600.450,00	4	4.862.750,00	4	23.905.200,00	4	135.396.650,00	14	328.765.050,00	100	99,63	17	627.793.400,00	65.38	216.79
	220.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1.00	164.975.222,00	1.00	53.181.650,00	1	137.195.950,00	1	38.900.700,00	1	4.862.750,00	1	11.314.200,00	1	81.383.500,00	1	130.460.150,00	100	99,63	2	180.644.750,00	200	97.27
	220.02.2.01.0002	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5.00	25.500.000,00	3.00	14.992.650,00	6	56.994.400,00	2	40.000.000,00	0	0	0	2.427.500,00	0	14.442.200,00	0	56.909.600,00	100	99,89	0	71.302.400,00	150	27.62
	220.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Organisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	200	69.113.940,00	250	231.451.150,00	2	135.812.650,00	1	85.699.750,00	1	0	0	20.103.400,00	1	39.531.950,00	2	130.905.100,00	100	99,76	4	356.846.250,00	200	300.79
																				Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)	100	99,67				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3	
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	99,63				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
5	221.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81	0	18.75	4.958.000,00	49.00	6.642.000,00	10	1.306.400,00	20	0	0	3.224.800,00	19	1.810.000,00	49	6.341.200,00	100	95,47	67,75	11.299.200,00	83.64	0
	221.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip menegement keamanan informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	%	38.46	28.202.834,00	12.50	4.958.000,00	27.27	6.642.000,00	10	1.306.400,00	10	0	0	3.224.800,00	7.27	1.810.000,00	27,3	6.341.200,00	100	95,47	39,77	11.299.200,00	103.41	40.06
	221.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	3.00	28.202.834,00	5.00	4.958.000,00	5	6.642.000,00	1	1.306.400,00	2	0	0	3.224.800,00	2	1.810.000,00	5	6.341.200,00	100	95,47	10	11.299.200,00	330.33	40.06
																				Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)	100	95,47				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1	
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	95,47				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
																				Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	96,48	97,89				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
																				Total		7.143.368.517,00			6.932.301.696,00	
																				Persentase Realisasi Anggaran						97.05%
																				Predikat						Sangat Tinggi

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Terwujudnya pelayanan data statistik secara elektronik.2. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data statistik sektoral PD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Sosialisasi terhadap OPD terkait metadata,keamanan informasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Komitmen bersama antar pimpinan OPD terkait statistik sektoral2. Menjalin komunikasi yang intensif dengan provider3. Komitmen pimpinan OPD terkait integrasi sistem elektronik dan pentingnya keamanan informasi

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
   a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika , indikator adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan target 60 % terealisasi 41 %, tingkat capainnya sebesar 68,33 % , belum tercapainya target tersebut dikarenakan topologi jaringan antar OPD yang jauh serta keterbatasan anggaran yang dikelola. Program tersebut di dukung dengan 2 kegiatan yaitu 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mengunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo terealisasi 41 % (98,91%), belum sesuai dengan target yang ditetapkan, dan 2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja adalah Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik dengan realisasi 41 % (98,89 %) belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
   b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota, dengan indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 72,30 dari target 77.66, hasil tersebut diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurang optimalnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatanya untuk perencanaan kedepannya,belum

optimalnya pemanaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan ataupun peningkatan akuntabilitas, peningkatan efektifitas efisiensi kinerja dan peningkatan kinerja. Program tersebut didukung 7 kegiatan yaitu 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
   a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan target 75 % terealisasi 143,08%, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 indikator yaitu :
      1. Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP Kabupaten/Kota dengan target 83 % terealisasi 100 %
      2. Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dengan target 100 % terealisasi sebesar 100 %.
      3. Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dengan target 64 % terealisasi 88,88 %.
   b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, indicator kinerja

adalah persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah targetnya 100 % dan terealisasi 100 %. Di dukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja adalah jumlah kompilasi statistic sectoral yang terdigitalisasi tercapai 14 OPD sesuai dengan target yang direncanakan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
   a. Topologi jaringan antar OPD yang jauh serta keterbatasan anggaran yang dikelola,
   b. Kurang optimalnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatannya untuk perencanaan kedepan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

Analisis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjabarkan capaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2008 tentag Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dat/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan Tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan dengan format tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kominfo				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	
1.	**Indikator Sasaran** Presentase layanan public yang diselenggaran secara online dan terintegrasi		V	64,52	7,50	100	100	87,50	87,50	100	Terpenuhi
2.	**Indikator Program** Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		V	70	75	80	85	111	90	85	Terpenuhi
3.	**Indikator Kegiatan** Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP		V	81	83	86	89	120,5	100	89	Terpenuhi
4	Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		V	100	100	100	100	187,80	100	100	Terpenuhi

5	Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah		V	54	64	74	84	91,83	88,8	84	Terpenuhi
6	**Indikator Program** Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		V	50	60	65	70	41	41	70	Belum terpenuhi
7	**Indikator Kegiatan** Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mengunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo		V	45,16	64,52	83,87	100	41	41	100	Terpenuhi namun belum optimal
8	Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		V	12,50	25	31,25	37,5	12,05	100	37,5	Terpenuhi
9	**Indikator Program** Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam		V	100	100	100	100	100	100	100	Terpenuhi

	menyusun perencanaan pembangunan daerah										
10	**Indikator Program** Tingkat keamanan informasi pemerintah		V	33	49	65	81	18,75	49	81	Terpenuhi
11	**Indikator Kegiatan** Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip menegement keamanan informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah		V	20	27,27	33,33	38,46	20	20	38,46	Terpenuhi

Bahwa dari table di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo dan Informatika dari 11 indikator terdapat 1 indikator sasaran yang belum terpenuhi sesuai dengan target yang direncanakan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

Adapun isu – isu penting dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo selama satu tahun berjalan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tantangan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kemenpan RB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Dalam rangka peningkatan dan penerapan SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo tetapi bersama dengan Perangkat Daerah lain Di Kabupaten Pacitan. Namun demikian masih terdapat perbedaan kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan teknologi berbasis SPBE, sehingga transformasi digital memerlukan tata kelola sistem pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana amanat pemerintah pusat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu terus mengembangkan diri baik dari sisi penyediaan SDM, infrastruktur dan suprastruktur. Pengembangan SDM, regulasi dan

infrastruktur pendukung SPBE

Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Publik

Masih adanya kesenjangan akses informasi di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan. Padahal dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan penguatan portal informasi digital pemerintah daerah untuk menyediakan akses informasi yang relevan dan tepat waktu, serta Implementasi layanan komunikasi publik berbasis teknologi yang dapat menjangkau kelompok marjinal dan difabel.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui program dialog talk show, siaran langsung wayang kulit, iklan layanan masyarakat. Sedangkan media radio melalui program dialog khusus, sementara media luar ruangan dalam berbentuk baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-umbul.

Melalui SP4N Lapor yang merupakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, dimana layanan ini sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara interaktif, dimana dapat mengadukan, melaporkan, mengkritisi, ataupun memberikan masukan tentang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan. Dinas Kominfo sebagai admin Kabupaten yang akan mengirimkan laporan aduan kepada instansi terkait. Selama Januari – Desember 2024 aduan yang masuk sebanyak 32 aduan dari berbagai jenis aduan seperti

infrastruktur jalan, ekonomi dan keuangan, pertanian dan peternakan, administrasi kependudukan

2. Urusan Statistik

Belum Optimalnya Implemetasi Satu Data Kabupaten Pacitan

Dalam kegiatan statistik sektoral fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai walidata sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2022 tetang Satu Data Kabupaten Pacitan yang memiliki beberapa tugas antara lain: melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi metadata lintas sektoral, mengelola Portal Satu Data, melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data, memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Walidata Kabupaten/Kota dan melakukan koordinasi dengan Pembina Data.

Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan untuk pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berkoordinasi dengan Koordinator Data dan Pembina Data melalui Forum Satu Data Kabupaten Pacitan.

Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan, namun sayangnya data masih tersebar di masing-masing perangkat daerah. Data yang tersimpan di masing-masing perangkat daerah ini sering menyebabkan terjadi duplikasi data, bahkan data tertentu dimiliki atau dikelola oleh lebih dari dari 1 (satu) perangkat daerah sehingga menyulitkan untuk mengetahui data mana yg lebih tepat dan akurat Seyogyanya semua perangkat daerah harus sepakat terkait dengan format dan metadata suatu data, karena dengan beragamnya format dan meta data di masing-masing perangkat daerah akan menyulitkan untuk mengintegrasikan menjadi satu data sehingga penting sekali keberadaan regulasi yang mengatur terkait dengan

implementasi satu data.

3. Urusan Persandian

Penguatan persandian untuk pengamanan informasi

Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Penyelenggara pelayanan publik terus mengalami perkembangan, sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman keamanan informasi, yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja penyelenggara pelayanan publik. Peran sumber daya informasi dan teknologi informasi dan komunikasi semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola teknologi informasi dan komunikasi mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability). Adanya ancamanterhadap sumber daya informasi tersebut tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengamanan data dan informasi

Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik pasal 26 berbunyi bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (Pemerintah Kabupaten Pacitan) wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan,ketersediaan pengamanan sistem elektroniknya. Pengamanan Informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat yang memberikan peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan

pemerintahan seperti Mobile internet, Cloud Computing, Big Data dan Internet of Thing (IoT), sehingga berdasarkan peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Urusan Persandian dalam Pengamanan Informasi di Daerah pada pasal 22 terdapat 16 (enam belas) layanan yang bisa dilakukan Pemerintahan Kabupaten Pacitan pada saat ini dalam pengamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik diantaranya layanan sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik). Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menggunakan layanan sertifikat elektronik untuk menjaga keutuhan, keauntetikan dan nirpenyangkalan. Layanan sertifikat elektronik berupa tanda tangan elektronik sudah diadopsi di aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang merupakan aplikasi surat menyurat.

4. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi, bidang statistik dan bidang persandian di perangkat daerah, baik yang ASN maupun non ASN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Pada penyusunan rencana kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan TA 2026, telah mempertimbangkan visi misi kepala daerah serta kebijakan internal Pemerintah Kab.Pacitan dan juga dilakukan proses membandingkan (review) antara Rancangan Awal RKPD TA 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dan kesesuaian dengan ketersediaan anggaran / pagu indikatif Tahun 2026. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Pacitan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.1 berikut :

Tabel 2.4.1

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			TARGET	Kebutuhan Dana	
1	3	4	8	9	10	14		15	16	17
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**9.206.725.000,00**		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**7.165.496.890,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**9.206.725.000,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.165.496.890,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**8.656.725.000,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**6.946.233.899,00**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.791.725.000,00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		-	**4.069.663.269,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13 Dokumen	150.000.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Dokumen	51.500.300,00	Perubahan target dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	35.806.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	15.694.300,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	3.057.725.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		59 Dokumen	2.911.235.160,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	3.000.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	27 Orang/bulan	2.845.596.960,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.725.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	2 Laporan	9.736.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	57 Laporan	55.902.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %	300.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	124.348.000,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	16.068.000,00	Perubahan target dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	27 Dokumen	108.280.000,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	339.000.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	225.436.369,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	70.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	57.975.700,00	Perubahan target dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	39.875.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	27.775.669,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	99.810.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	60.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	50.686.400,00	
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	12.266.200,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	38.420.200,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	750.000.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	595.327.040,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	115.799.240,00	Perubahan anggaran disesuaiakn dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	479.527.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %	135.000.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	111.030.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	20 Unit	46.050.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	22 Unit	12.880.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	52.100.000,00	

2.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**1.565.000.000,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		-	**1.207.671.232,00**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1700 Informasi	1.565.000.000,00		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1650 Informasi	1.207.671.232,00	
	Relasi Media					Relasi Media				
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2 terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	2 Laporan	300.000.000,00	
	Pelayanan Informasi Publik					Pelayanan Informasi Publik				
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		25 Permohonan	51.506.232,00	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	50 Rekomendasi	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	1 Rekomendasi	50.220.000,00	
	Diseminasi Informasi					Diseminasi Informasi				
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	55 Persentase	500.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Persentase khalayak yang terpapar informasi publik*	55 Persentase	201.945.000,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	36 Media	400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	36 Media	400.000.000,00	Perubahan target disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyusunan Konten					Penyusunan Konten				
		Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Konten Informasi Publik*	100 Konten	204.000.000,00	

3,	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**2.200.000.000,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		-	**1.668.999.398,00**	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Layanan	100.000.000,00		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	6 Layanan	70.500.000,00	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*	3 Dokumen	70.500.000,00	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	33 Perangkat Daerah 990 Mbps	2.100.000.000,00		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	29 Perangkat Daerah 870 Mbps	1.598.499.398,00	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				
		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE*	2 Dokumen	181.060.000,00	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				
		-	33 Perangkat Daerah	1.500.000.000,00	-		-	29 Perangkat Daerah	1.055.214.398,00	
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*	2 Aplikasi	362.225.000,00	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**625.000.000,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**211.320.991,00**	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**625.000.000,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		-	**211.320.991,00**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	882 Data	625.000.000,00		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	774 Data	211.320.991,00	
	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional					Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dan pembina data statistik	90 %	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik*	90%	100.000.000,00	
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	90 %	325.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk*	90%	111.320.991,00	
	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	12 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	2 Laporan	50.000.000,00	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**25.000.000,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**7.942.000,00**	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**25.000.000,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		-	**7.942.000,00**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	9 Layanan	25.000.000,00		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Layanan	7.942.000,00	Perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3 Perangkat Daerah	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian*	3 Perangkat Daerah	7.942.000,00	
				9.206.725.000,00					**7.165.496.890,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujuakan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Diskominfo sebagai Perangkat Daerah dengan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik. Oleh karena itu Diskominfo dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait. Pada saat ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kab.Pacitan yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan. Berikut tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 Kab.Pacitan

Tabel 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kab.Pacitan

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian beberapa hal, termasuk kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata. Selain itu, juga fokus pada pengurangan kesenjangan digital, peningkatan akses informasi bagi masyarakat, serta perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi ke seluruh wilayah. Untuk mendukung pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika secara rinci ada beberapa sasaran, yaitu:

a. Peningkatan Infrastruktur Digital;
b. Peningkatan Literasi Digital
c. Pengembangan Ekonomi Digital
d. Penguatan Tata Kelola

Sedangkan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 akan berfokus pada ;

a. Peningkatan Daya Saing Daerah; fokus pada pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan produktivitas.
b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Investasi dalam pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.
c. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; Peningkatan kesempatan berusaha, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar masyarakat.
d. Pembangunan Berwawasan Lingkungan; Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan

pengembangan energi terbarukan.

e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, serta program-program pengentasan kemiskinan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Recana kerja tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional maupun propinsi serta mengacu pada prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan. Tema Prioritas Ranwal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini adalah " Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial". Dari tema rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pacitan diatas telah ditentukan prioritas program Pembangunan meliputi :

1. Menguatkan kemandirian ekonomi local;
2. Menjaga dan meningkatkan daya beli dan pendapatan;
3. Penguatan industry olahan yang berpotensi ekspor;
4. Penguatan society 5.0 dalam partisipasi;
5. Menguatkan kemandirian sosial dan layanan dasar

Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan melaksanakan tugas pokok dan ungsi Perangkat Daerah mengacu pada :

1. Peraturan Daerah No.004 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Pacitan.
2. Peraturan Bupati No.74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No.144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tuga pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam 1 sekreatariat dan 3 bidang, yaitu bidang Informasi

dan Komunikasi, bidang Teknologi Informatika dan Persandian, bidang Statistik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Visi " PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA dan BAHAGIA, dan Misi Bupati Pacitan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pemberantasan Kemiskinan;
2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

Adapun misi yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah misi yang ke 4 yaitu " **Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani".** Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

" Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian "

Dengan indikator tujuan adalah Indeks SPBE. Adapun Pohon Kinerja dan pohon kinerja Urusan Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 1
Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

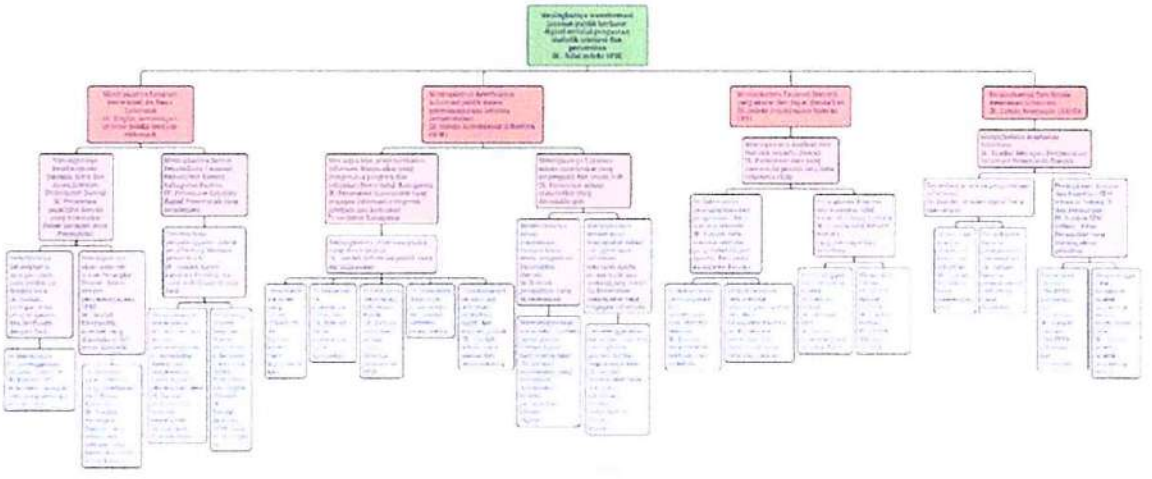

Sasaran **Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif** dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target 2026
1.	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian		Nilai indeks SPBE	3,55
2.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	94

		layanan pemerintahan		
3		Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik	4,17
4		Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembanguan Statistik (IPS)	2,42
5		Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan (KAMI)	234
6		Meningkatkan kualitas layanan tata kelola perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026, penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan bidang Informasi dan komunikasi, Statistic dan Persandian,serta mensukseskan target tujuannya

Maka untuk mencapai target tujuan Tahun 2026 melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada usulan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBHCHT. Rumusan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,** terdiri dari 7 kegiatan dan sub kegiatan. Yang meliputi :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan Mebel
   2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Relasi Media
2. Pelayanan Informasi Publik
3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
4. Diseminasi Informasi
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Penyusunan Konten

4. **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
2. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
3. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan

5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
2. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

6. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Disisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Selain rencana program,kegiatan dan sub kegiatan dibutuhkan juga pendanaan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksankan. Rencana program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan untuk mendukung tercapainya kinerja pada Tahun 2026 sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan dengan kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar Rp. 7.165.496.890.- (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan sebagai berikut di tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

RUMUSAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**7.165.496.890,00**					**5.932.725.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.165.496.890,00**					**5.932.725.000,00**
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**6.946.233.899,00**					**5.257.725.000,00**
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**4.069.563.269,00**				-	**1.492.725.000,00**
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13 Dokumen	51.500.300,00			-	13 Dokumen	0,00
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	35.806.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	13 Dokumen	0,00
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.694.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8 Laporan	0,00
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	2.911.235.160,00			-	59 Dokumen	7.725.000,00
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.845.536.960,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	27 Orang/bulan	0,00
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.736.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	7.725.000,00
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57 Laporan	55.902.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	36 Laporan	0,00

	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	2.911.235.160,00			-	59 Dokumen	7.725.000,00
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.845.596.960,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	27 Orang/bulan	0,00
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.736.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	7.725.000,00
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57 Laporan	55.902.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	36 Laporan	0,00
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %	124.348.000,00			-	100 %	300.000.000,00
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	16.068.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	50.000.000,00
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27 Dokumen	108.280.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Dokumen	250.000.000,00

	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	225.436.369,00			-	100 %	340.000.000,00
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57.975.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7 Paket	70.000.000,00
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.875.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Paket	35.000.000,00
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	27.775.669,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	35.000.000,00
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.810.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	200.000.000,00
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	50.686.400,00			-	100 %	60.000.000,00
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12.266.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	10.000.000,00
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.420.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Unit	50.000.000,00
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	595.327.040,00			-	100 %	650.000.000,00
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.799.240,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	150.000.000,00
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	479.527.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	500.000.000,00

	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %	111.030.000,00			-	80 %	135.000.000,00
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	46.050.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17 Unit	60.000.000,00
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.880.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	26 Unit	15.000.000,00
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	52.100.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	-	-	**1.207.671.232,00**				-	**1.565.000.000,00**
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1650 Informasi	1.207.671.232,00			-	1650 Informasi	1.565.000.000,00
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media								

	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media								
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	850 Laporan	300.000.000,00
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik								
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	51.506.232,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Permohonan	35.000.000,00
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	50.220.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Rekomendasi	30.000.000,00
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi								
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	55 Persentase	201.945.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Persentase	500.000.000,00
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	36 Media	400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	67 Media	400.000.000,00
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten								
			Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	204.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1650 Konten	300.000.000,00

3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-	-	**1.668.999.398,00**				-	**2.200.000.000,00**
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	6 Layanan	70.500.000,00			-	6 Layanan	100.000.000,00
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa								
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen	70.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	100.000.000,00
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	-	29 Perangkat Daerah	1.598.499.398,00			-	29 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE								
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	181.060.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	400.000.000,00
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								
			0	29 Perangkat Daerah	1.055.214.398,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	29 Perangkat Daerah	1.500.000.000,00
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE								
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	362.225.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8 Aplikasi	200.000.000,00

	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**211.320.991,00**					**650.000.000,00**
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	-	**211.320.991,00**				-	**650.000.000,00**
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	774 Data	211.320.991,00			-	774 Data	650.000.000,00
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional								
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90 %	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia								
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	90 %	111.320.991,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		350.000.000,00
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**7.942.000,00**					**25.000.000,00**
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	-	**7.942.000,00**				-	**25.000.000,00**
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Layanan	7.942.000,00			-	7 Layanan	25.000.000,00
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah								
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3 Perangkat Daerah	7.942.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Perangkat Daerah	25.000.000,00
	JUMLAH				**7.165.496.890,00**					**5.932.726.000,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai pelaksanaan atau penjabaran Renstra secara tahunan. Rencana Kerja Tahunan sangat penting karena keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun. Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Ke depan diharapkan Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengelolaan Statisti Sektoral serta pengelolaan urusan persandian di Pemerintah Daerah Kab.Pacitan

5.1 Catatan Penting

Hal – hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 antara lain:

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, kelompok sasaran, Lokasi pelaksanaan, sumber pendanaan dan kebutuhan pagu indikatif dilaksanakan sesuai situasi, kondisi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat,

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

RENJA 2026

dikuperinkabpacitan
dinaskoperasi.pacitankab.go.id
Jl. Gajahmada No.1, Purwoharjo, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63518

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita sekalian, Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap tahun pelaksanaan rencana kerja OPD. Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan acuan utama bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan program pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perindsutrian selama tahun 2026 dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2026 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2026 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Periode 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam melakukan tugasnya dan semoga Rencana Kerja Tahun 2026 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pacitan, 1 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Pasal 355 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. disebutkan bahwa penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421); KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9;

h. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2026.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2026 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2026 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN

Bab I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja triwulan II tahun 2025 dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2021-2026. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan awal Renja.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2021-2026. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustria Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1. LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
PERIODE : JUNI (TRIWULAN II)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
217	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**nilai**	**80.5**	**3.499.700.083,00**	**76.2**	**1.571.974.762,00**	**94.66%**	**44.92%**
217	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**laporan**	**19**	**47.738.785,00**	**11**	**12.646.676,00**	**57.89%**	**26.49%**
217	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	19	47.738.785,00	11	12.646.676,00	57.89%	26.49%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											28,95	26,49
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan ladministrasi keuangan Perangkat Daerah**	**laporan**	**53**	**2.758.366.238,00**	**24**	**1.347.794.873,00**	**45.28%**	**48.86%**
217	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	21	2.719.615.238,00	21	1.327.524.077,00	100%	48.81%
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	53	38.751.000,00	24	20.270.796,00	45.28%	52.31%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											48,43	50,56
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
217	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**106.000.000,00**	**100**	**11.900.000,00**	**100%**	**11.23%**
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	52	106.000.000,00	52	11.900.000,00	100%	11.23%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	11,23
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**218.766.500,00**	**48.34**	**80.008.058,00**	**48.34%**	**36.57%**

217	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	45.705.800,00	4	23.994.878,00	50%	52.50%
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	12.794.300,00	0	7.587.500,00	0%	59.30%
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	160.266.400,00	6	48.425.680,00	50%	30.22%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											33,33	47,34
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**33.987.100,00**	**30**	**0,00**	**30%**	**0%**
			6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	33.987.100,00	1	0,00	33.33%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											11,11	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**230.428.660,00**	**48**	**95.606.120,00**	**48%**	**41.49%**
217	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	95.803.060,00	6	30.837.928,00	50%	32.19%
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	134.625.600,00	6	64.768.192,00	50%	48.11%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	40,15
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80**	**104.412.800,00**	**45.14**	**24.019.035,00**	**56.43%**	**23%**
217	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	10	4.500.000,00	0	0,00	0%	0%
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	77.829.200,00	8	22.409.035,00	57.14%	28.79%
			9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	1	22.083.600,00	1	1.610.000,00	100%	7.29%

Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											52,38	12,03
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
217	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang memiliki izin usaha**	**%**	**7.5**	**20.000.000,00**	**7.4**	**47.441.800,00**	**98.67%**	**237.21%**
217	**2**	**2**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan**	**%**	**69.25**	**20.000.000,00**	**49.4**	**47.441.800,00**	**71.34%**	**237.21%**
217	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi perizinan usaha simpan pinjam bagi koperasi	orang	70	20.000.000,00	70	47.441.800,00	100%	237.21%
					Jumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terbentuk	unit usaha	172		0		0%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	237,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											71,34	237,21
Predikat kinerja Per Program(%)											Sedang	Sangat Tinggi
217	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel**	**%**	**36**	**55.000.000,00**	**27**	**11.663.840,00**	**75%**	**21.21%**
217	**3**	**2**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi**	**%**	**34.89**	**55.000.000,00**	**3.77**	**11.663.840,00**	**10.81%**	**21.21%**
217	3	2	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yng telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan (monev)	unit usahaa	40	55.000.000,00	20	11.663.840,00	50%	21.21%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	21,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											10,81	21,21
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**4.29**	**35.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**

217	**4**	**2**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya**	**%**	**4.29**	**35.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**
217	4	2	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	koperasi	25	35.000.000,00	0	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi dengan SDM terlatih**	**%**	**21.44**	**75.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**
217	**5**	**2**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian**	**%**	**0.15**	**75.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**
217	5	2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	45	75.000.000,00	0	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan modal koperasi**	**%**	**6**	**103.500.000,00**	**0**	**26.943.590,00**	**0%**	**26.03%**
217	**6**	**2**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase KUMKM yang mengakses fasilitasi pembiayaan**	**%**	**0.45**	**103.500.000,00**	**0.18**	**26.943.590,00**	**40%**	**26.03%**
217	6	2	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang meningkat Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (penagihan piutang macet dana bergulir)	unit usaha	100	103.500.000,00	56	26.943.590,00	56%	26.03%
					Jumlah Laporan Hibah Dekopinda	Laporan	1		0		0%	

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	28,00	26,03
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	40,00	26,03
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset**	**%**	**2.48**	**509.368.800,00**	**0.15**	**160.507.415,00**	**6.05%**	**31.51%**
					Persentase usaha mikro dengan kerjasama kemitraan	**%**	**0.24**		**0.12**		**50%**	
217	**7**	**2**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Usaha Mikro yang dibina**	**%**	**2.82**	**509.368.800,00**	**0.77**	**160.507.415,00**	**27.30%**	**31.51%**
217	7	2	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Business Matching)	unit usaha	120	60.000.000,00	40	3.368.000,00	33.33%	5.61%
			4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	400	298.825.600,00	245	114.792.634,00	61.25%	38.41%
			15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui PendidikanÂ danÂ Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan usaha mikro dan Kewirausahaan	orang	143	150.543.200,00	143	42.346.781,00	100%	28.13%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	48,65	24,05
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	27,30	31,51
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas dalam pengelolaannya**	**%**	**5**	**100.000.000,00**	**0**	**68.579.000,00**	**0%**	**68.58%**
217	**8**	**2**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase UM yg diberi dukungan fasilitasi pemasaran**	**%**	**0.5**	**100.000.000,00**	**0.23**	**68.579.000,00**	**46%**	**68.58%**
217	8	2	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi program pengembangan usaha mikro (pameran)	unit usaha	75	100.000.000,00	75	68.579.000,00	100%	68.58%

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	68,58
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sedang
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	46,00	68,58
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sedang
331	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten**	**%**	**1.53**	**654.734.600,00**	**0.53**	**38.166.987,00**	**34.64%**	**5.83%**
331	**2**	**2**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen dan Perda RPIK**	**dokumen**	**1**	**654.734.600,00**	**1**	**38.166.987,00**	**100%**	**5.83%**
					Jumlah sentra IKM	**IKM**	**5**		**5**		**100%**	
					Jumlah IKM yang dibina	**IKM**	**200**		**104**		**52%**	
331	2	2	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perbup RPIK	dokumen	1	11.000.000,00	0	1.180.000,00	0%	10.73%
			3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah kegiatan pengembangan produk IKM	kali	1	143.734.600,00	1	36.086.987,00	100%	25.11%
			5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah	orang	500	500.000.000,00	0	900.000,00	0%	0.18%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	33,33	12,01
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	84,00	5,83
										Predikat kinerja Per Program(%)	Tinggi	Sangat Rendah
331	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas**	**perusahaan**	**20**	**50.000.000,00**	**2**	**3.303.000,00**	**10%**	**6.61%**
331	**4**	**2**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**%**	**60**	**50.000.000,00**	**57**	**3.303.000,00**	**95%**	**6.61%**
331	4	2	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	Jumlah peserta pembinaan IKM	orang	20	50.000.000,00	13	3.303.000,00	65%	6.61%

				Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
					Jumlah peserta sosialisasi SIINas	orang	25		0		0%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											32,50	6,61
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											95,00	6,61
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											33,55	43,04
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total								**5.102.303.483,00**		**1.928.580.394,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**37.80%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

Tabel 2.2. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024 s/d Triwulan II

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi, Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35.67	30.84
2		Persentase usaha mikro yang berkualitas	4.4	2.89
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	876.29	0
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Nilai Asset Koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	14	7.81
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tata kelola yang baik				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi dengan baik (mempertahankan tata kelola yang baik, membenahi kondisi internal, membuat promosi)				
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	7.77	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :- Kemampuan, kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras. - Kesempatan dan peluang				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Rendahnya daya saing usaha mikro baik dalam segi kualitas SDM maupun kualitas produk				
Tindak lanjut yang diperlukan :Mengembangkan strategi bisnis usaha mikro				
3	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	90	87.04
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan				
4	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7.77	7.77
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Banyaknya jumlah pelaku industri				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :â€¢ Masih rendahnya daya saing dan kualitas produk â€¢ Belum optimalnya struktur industri (hulu-hilir) â€¢ Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi industri				
Tindak lanjut yang diperlukan :â€¢ Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara-hilir) â€¢ optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, dan peningkatan kualitas â€¢ penguatan sistem informasi dan teknologi industri				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. berikut ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIANKAB. PACITAN

TAHUN 2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N			Tahun + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
2	17	03	2. 01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
2	17	03	2. 01	000 4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 500.000.000

2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000.000		Rp. 15.000.000	Rp. 120.000.000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 500.000.000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						

2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 70.618.400	Rp. 4.381.600	Rp. 75.000.000	Rp. 120.000.000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 40.000.000		Rp. 40.000.000	Rp. 500.000.000
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 260.090.000		Rp. 260.090.000	Rp. 500.000.000
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 110.000.000		Rp. 110.000.000	Rp. 500.000.000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						

2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 120.000.000		Rp. 120.000.000	Rp. 240.000.000
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Rp. 8.832.788		Rp. 8.832.788	Rp. 120.000.000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.915.280.928		Rp. 2.915.280.928	Rp. 3.000.000.000
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Rp. 41.612.000		Rp. 41.612.000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.392.000		Rp. 25.392.000	Rp. 66.000.000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Rp. 60.234.900		Rp. 60.234.900	Rp. 120.000.000
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Rp. 157.434.400		Rp. 157.434.400	Rp. 180.000.000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo		Rp. 31.726.200	Rp. 31.726.200	Rp. 150.000.000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 73.091.080		Rp. 73.091.080	Rp. 96.000.000

2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 131.025.600		Rp. 131.025.600	Rp. 134.625.600
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.500.000		Rp. 3.500.000	Rp. 5.000.000
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 86.542.700		Rp. 86.542.700	Rp. 75.000.000
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.410.000		Rp. 10.410.000	Rp. 150.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						

3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000	Rp. 120.000.000
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 340.000.000
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000.000		Rp. 15.000.000	Rp. 120.000.000
							Jumlah	**Rp. 4.904.064.796**	**Rp. 36.107.800**	**Rp. 4.940.172.596**	**Rp. 8.156.625.600**

BAB V
PENUTUP

Renja Tahun 2026 memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus evaluasi jalannya penyelenggaraan perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sangat bergantung pada strategi berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tujuan "Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA ".

Pacitan, 1 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026, telah dapat disusun sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan dapat terwujud.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN

Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 5

1.4. Sistematika 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 18

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 0PD.....19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 37

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 37

3.3. Program dan Kegiatan.....38

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....42

4.1. Rencana Kerja Tahun 2026.....42

4.2. RKPD DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun 2026 45

BAB V PENUTUP.....57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan pembangunan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan secara terpadu terhadap seluruh fungsi pemerintahan di seluruh bidang pembangunan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan tersebut harus mampu menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tingkat pemerintahan, antar sektor pembangunan, antar wilayah, serta antar waktu perencanaan.

Perencanaan pembangunan nasional yang bersifat makro kemudian menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih operasional, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di daerah juga dilaksanakan secara berjenjang, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh dokumen perencanaan tersebut harus disusun secara selaras dan terpadu dengan dokumen perencanaan yang berada pada level pemerintahan di atasnya.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, peran aktif perangkat daerah sebagai pelaksana teknis sangat penting dalam menjamin kesesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan kinerja, baik jangka menengah maupun tahunan, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta mengacu pada dokumen RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai instrumen perencanaan tahunan. Penyusunan Renja tersebut bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, yang selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun perencanaan.

Adapun penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, perubahan arah kebijakan, maupun hasil evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Renja ini tetap mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029, dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, sehingga diharapkan dapat menjamin kesinambungan, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

28. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Inventarisasi Klasifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Kodefikasi Nomenklatur dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik;
38. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
39. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045;
44. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
45. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan MPP;
46. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Adapun Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Pacitan, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

4.2. RKPD DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun berjalan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan–catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan/pembinaan dan evaluasi kebijakan di bidang Penanaman Modal.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan perencanaan program, kegiatan & sub kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;

b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan tahun 2025, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja PD dan pencapaian renstra PD sampai dengan Tahun 2025 pada semester 2, terlampir.

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 pada semester 2 terealisasi 43,34 persen dari yang ditargetkan pada tahun 2025. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu :

a) Efisiensi anggaran;
b) Perencanaan yang kurang optimal, sehingga penyerapan anggaran yang dialokasikan tidak sesuai waktu yang dijadwalkan (kejar tayang di belakang); dan
c) Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Semester II

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
218	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**Nilai**	**82**	**3.435.944.794,00**	**76.85**	**1.523.402.754,00**	**93.72%**	**44.34%**
218	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**20**	**47.000.000,00**	**14**	**1.050.000,00**	**70%**	**2.23%**
218	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	42.790.000,00	3	500.000,00	42.86%	1.17%
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	760.000,00	1	0	100%	0%
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	600.000,00	0	0	0%	0%
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	600.000,00	2	0	200%	0%
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	750.000,00	0	0	0%	0%

			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	750.000,00	2	250.000,00	200%	33.33%
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	750.000,00	5	300.000,00	62.5%	40%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											86,48	10,64
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi	Sangat Rendah
218	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**69**	**2.590.483.944,00**	**37**	**1.234.233.862,00**	**53.62%**	**47.64%**
218	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2.532.868.744,00	19	1.212.233.862,00	95%	47.86%
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	52.800.000,00	6	22.000.000,00	50%	41.67%
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	529.000,00	6	0	50%	0%
			4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	685.500,00	6	0	50%	0%
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	660.000,00	0	0	0%	0%
			6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	833.700,00	1	0	100%	0%
			7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	1.698.000,00	16	0	88.89%	0%
			8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	409.000,00	0	0	0%	0%

				Anggaran								
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											54,24	11,19
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
218	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**138.542.300,00**	**61.88**	**14.918.400,00**	**61.88%**	**10.77%**
218	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.	14.931.000,00	1	14.918.400,00	50%	99.92%
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	36	123.611.300,00	0	0	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25	49,96
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**253.063.850,00**	**52.59**	**73.336.915,00**	**52.59%**	**28.98%**
218	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000,00	0.00	12.191.685,00	0%	48.77%
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.697.400,00	0.00	17.001.120,00	0%	47.63%
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.333.900,00	0.00	2.190.000,00	0%	12.63%
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Paket	1.00	52.110.000,00	0.00	14.992.010,00	0%	28.77%
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.330.350,00	0.00	1.072.000,00	0%	14.62%
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.00	7.000.000,00	0.00	5.550.000,00	0%	79.29%
			8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.00	463.500,00	0.00	0	0%	0%

			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	108.128.700,00	6.00	20.340.100,00	50%	18.81%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											6,25	31,32
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**21.793.800,00**	**16.60**	**0**	**16.6%**	**0%**
218	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4.948.500,00	0.00	0	0%	0%
			6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8.00	16.845.300,00	0.00	0	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0	0
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**318.592.000,00**	**48.42**	**178.631.766,00**	**48.42%**	**56.07%**
218	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.039.400,00	6.00	0	50%	0%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	75.000.000,00	6.00	58.622.237,00	50%	78.16%
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	14.616.200,00	4.00	9.260.000,00	33.33%	63.35%
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	227.936.400,00	5.00	110.749.529,00	41.67%	48.59%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											43,75	47,53
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**66.468.900,00**	**46.01**	**21.231.811,00**	**46.01%**	**31.94%**

218	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16.00	8.250.000,00	7.00	2.554.100,00	43.75%	30.96%
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16.00	35.645.400,00	2.00	18.677.711,00	12.5%	52.4%
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5.00	15.000.000,00	5.00	0	100%	0%
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.573.500,00	0.00	0	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											39,06	20,84
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi**	**Milyar**	**98.41**	**50.000.000,00**	**2229.47**	**2.023.950,00**	**2265.49%**	**4.05%**
218	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Potensi dan Peluang Investasi**	**Dokumen**	**1**	**50.000.000,00**	**0.00**	**2.023.950,00**	**0%**	**4.05%**
218	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	1.00	50.000.000,00	0.00	2.023.950,00	0%	4.05%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0	4,05
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0	4,05
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor**	**Investor**	**1597.00**	**150.000.000,00**	**1636.00**	**41.629.935,00**	**102.44%**	**27.75%**
218	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Promosi Penanaman Modal**	**Kali**	**2.00**	**150.000.000,00**	**1.00**	**41.629.935,00**	**50%**	**27.75%**

218	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150.000.000,00	0.00	41.629.935,00	0%	27.75%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0	27,75
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50	27,75
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Izin yang diterbitkan**	**%**	**100.00**	**223.293.000,00**	**144.40**	**36.299.915,00**	**144.4%**	**16.26%**
218	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal**	**Izin**	**1350.00**	**223.293.000,00**	**1950.00**	**36.299.915,00**	**144.44%**	**16.26%**
218	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2500.00	50.000.000,00	1658.00	2.991.800,00	66.32%	5.98%
			7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	50.00	50.000.000,00	63.00	4.391.975,00	126%	8.78%
			8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	200.00	123.293.000,00	127.00	28.916.140,00	63.5%	23.45%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											85,27	12,74
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											144,44	16,26

										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
218	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi**	**%**	**80.00**	**127.641.600,00**	**30.44**	**27.737.575,00**	**38.05%**	**21.73%**
218	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal**	**Laporan**	**19.00**	**127.641.600,00**	**9.00**	**27.737.575,00**	**47.37%**	**21.73%**
218	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	4.00	16.200.000,00	0.00	0	0%	0%
			5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	260.00	105.841.600,00	320.00	26.364.575,00	123.08%	24.91%
			6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha	4.00	5.600.000,00	8.00	1.373.000,00	200%	24.52%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	107,69	16,48
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	47,37	21,73
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
218	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Fasilitas Penanaman Modal berkondisi Baik**	**%**	**100.00**	**50.000.000,00**	**42.48**	**0**	**42.48%**	**0%**

218	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi, kabupaten/kota**	**Laporan**	**14.00**	**50.000.000,00**	**6.00**	**0**	**42.86%**	**0%**
218	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1000.00	50.000.000,00	766.00	0	76.6%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											76,6	0
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											42,86	0
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											447,76	19,02
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Total								**4.036.879.394,00**	**1.631.094.129,00**			
Persentase Realisasi Anggaran									**40.4%**			
Predikat									**Sangat Rendah**			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana bidang Penanaman Modal. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

Bahwa dalam menyusun Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang penanaman modal sebagaimana Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.
6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 (enam) Program RPJMD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator, yaitu:
   - Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Realisasi total terhadap target investasi
3. Program Promosi Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Peningkatan jumlah Investor yang berinvestasi
4. Program Pelayanan Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai Realisasi Investasi
2. Perlunya inovasi pengembangan dan promosi penanaman modal.
3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan berbasis IT.
4. Peningkatan Izin Usaha yang diterbitkan.
5. Meningkatkan Pengolahan data dan pengembangan sistem untuk mendukung investasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun yang memuat daftar program dan kegiatan Seluruh PD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal

tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam RKPD terdapat 6 (enam) nomenklatur program yang dicantumkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 2.4.1
REVIU TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

NO	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**Kab. Pacitan**			**3.659.323.872**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**Kab. Pacitan**			**3.659.323.872**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**3.231.919.379**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**3.231.919.379**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	10.828.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	10.828.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	828.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	828.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	560.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	560.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	640.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	640.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1 Dokumen	640.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1 Dokumen	640.000	

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.760.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.760.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	69 Dokumen	2.467.869.847	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	69 Dokumen	2.467.869.847	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.410.196.647	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.410.196.647	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.800	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	680.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	680.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	636.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	636.200	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	780.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	780.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	849.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	849.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	327.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	327.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	90.818.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	90.818.400	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.818.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.818.400	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	75.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	158.250.482	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	158.250.482	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.578.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.578.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.574.082	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.574.082	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	9.664.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	9.664.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	35.476.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	35.476.800	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.051.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.051.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	927.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	927.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	70.378.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	70.378.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	32.132.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	32.132.900	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.132.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.132.900	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	387.735.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	387.735.750	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	730.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	730.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.226.550	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.226.550	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215.179.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215.179.200	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	84.284.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	84.284.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	8.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	8.050.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	55.094.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	55.094.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.139.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.139.400	

	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Realisasi total terhadap target investasi	874,04 M	100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Realisasi total terhadap target investasi	874,04 M	100.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 Dokumen	100.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 Dokumen	100.000.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Peningkatan jumlah Investor yang berinvestasi	5900 Investor	83.853.213	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Peningkatan jumlah Investor yang berinvestasi	5900 Investor	83.853.213	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kali	83.853.213	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kali	83.853.213	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.853.213	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.853.213	

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	128.782.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	128.782.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1500 Izin	128.782.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1500 Izin	128.782.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	28.595.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	28.595.000	

	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	58 Pelaku Usaha	30.187.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	58 Pelaku Usaha	30.187.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	230 Kegiatan Usaha	70.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	230 Kegiatan Usaha	70.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Kab. Pacitan**	**Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam**	**100%**	**79.769.280**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab. Pacitan**	**Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam**	**100%**	**79.769.280**	

			membuka usaha					**membuka usaha**			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pacitan**	**Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha**	**20 Kegiatan Usaha**	**79.769.280**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha**	**20 Kegiatan Usaha**	**79.769.280**	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pacitan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	120 Kegiatan Usaha	14.040.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pacitan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	120 Kegiatan Usaha	14.040.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	50.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	50.000.000	

	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	52 Kegiatan Usaha	15.729.280	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	52 Kegiatan Usaha	15.729.280	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Kab. Pacitan**	**Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal**	**100%**	**35.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab. Pacitan**	**Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal**	**100%**	**35.000.000**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pacitan**	**Persentase pengelolaan data perizinan/non perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten dan kota.**	**100%**	**35.000.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Persentase pengelolaan data perizinan/non perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten dan kota.**	**100%**	**35.000.000**	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1000 Dokumen	35.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1000 Dokumen	35.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional maupun di tingkat Provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.2.1. Tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Pacitan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam misi Ketiga yang berbunyi **"Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi"**. Misi ini menempatkan sektor penanaman modal, infrastruktur, pariwisata, investasi, dan sektor unggulan lainnya seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sektor unggulan daerah.

Berdasarkan keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dan memperhatikan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 - 2029, yaitu sasaran RPJMD menjadi tujuan pada Renstra PD dan Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Maka, tujuan Rencana Strategis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 adalah :

"Meningkatkan Investasi Daerah".

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus atau aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan PD. Sehingga dalam hal ini, sasaran menggambarkan keluaran (*output*/*outcome*) berdasarkan tujuan yang ingin

dicapai dalam jangka menengah 5 (lima) tahun melalui program dan kegiatan perangkat daerah. Sebagai pendukung pencapaian tujuan yaitu **"Meningkatkan Investasi Daerah",** maka sasaran yang ditetapkan adalah **"Meningkatnya Potensi Sektor Investasi"**.

Sasaran ini mencerminkan langkah awal dan mendasar dalam mengembangkan investasi, yaitu dengan melakukan identifikasi, pemetaan, dan penguatan sektor-sektor potensial yang dapat dijadikan objek investasi di Kabupaten Pacitan. Upaya ini akan menghasilkan basis data sektor unggulan, profil komoditas, dan lokus-lokus investasi yang siap dipromosikan secara nasional maupun internasional.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
3. Pengawasan Penanaman Modal

6. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

   Kegiatan:

   A. **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

      Sub kegiatan :

      1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada tersebut diatas, selanjutnya dalam mencapai mendukung Visi dan Misi Bapak Bupati Periode 2025-2029. Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Adapun uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

4.1 RENCANA KERJA TAHUN 2026

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan meliputi 6 (Enam) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 RUMUSAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	*SASARAN*	*PROGRAM*	*KEGIATAN*	*SUB KEGIATAN*
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Potensi Sektor Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Program Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

				Pengawasan Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Fasilitas Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasii dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2026

Adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3.659.323.872,00				5.293.105.144,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.659.323.872,00				5.293.105.144,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.659.323.872,00				5.293.105.144,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.231.919.379,00			-	4.118.605.144,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.828.000,00			-	130.000.000,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	828.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	560.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	640.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	640.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.760.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.467.869.847,00			-	2.645.668.744,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.410.196.647,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2.532.868.744,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		52.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	680.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	636.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	780.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	849.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	327.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	30.000.000,00	
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	90.818.400,00			-	255.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.818.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	75.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	158.250.482,00			-	350.000.000,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.578.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.574.082,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.664.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.476.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.051.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	927.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.378.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	32.132.900,00			-	40.000.000,00	
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	11.132.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	387.735.750,00			-	567.936.400,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	730.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.226.550,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215.179.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		227.936.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	84.284.000,00			-	100.000.000,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	8.050.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	55.094.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.139.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	100.000.000,00			-	200.000.000,00	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			-	200.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	83.853.213,00			-	200.000.000,00	

	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	83.853.213,00			-	200.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.853.213,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	128.782.000,00			-	150.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	128.782.000,00			-	150.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	28.595.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	30.187.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	70.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	79.769.280,00			-	424.500.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	79.769.280,00			-	424.500.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	120 Kegiatan Usaha.	14.040.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	52 Kegiatan Usaha	15.729.280,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		14.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	35.000.000,00			-	200.000.000,00	

	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00			-	200.000.000,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1000 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**3.659.323.872,00**				**5.293.105.144,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Dengan adanya Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2026 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

Pacitan, Juli 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN

Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199503 1 003

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pacitan

Rencana Kerja Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Ahmad Yani No.76 Pacitan 63512
Telepon (0357) 884748 Laman: perpustakaan.pacitankab.go.id
Surel: disperpusip.pacitan@gmail.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 100.3.3.7/19/408.44/2025

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026, perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2026

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disahkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan tahun 2026 dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke 2 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Kesatu : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Penetapan ini menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dalam menyusun rancangan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
Tanggal:
Nomor: 100.3.3.7/19/408.44/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	AMAT TAUFAN, S.Sos.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pacitan
2.	WAWAN PUJIATMOKO, S.STP., M.Si.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pacitan
3.	Dra. KUSTIANA, M.M.	Kelompok Kerja	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
4.	Ir. DEWA AYU GEDE INDIRA INDIATI, M.M.	Kelompok Kerja	Kepala Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan
5.	NANANG ENDRAJANTO, S.E., M.M.	Kelompok Kerja	Kepala Bidang Kearsipan
6.	NURBAMBANG SUSIANTO, S.E.	Kelompok Kerja	Perencana Ahli Muda

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dapat disusun dengan pedoman dan mekanisme yang ada.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja, ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dapat terwujud.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 40

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 43

3.3. Program dan Kegiatan 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH 49

BAB V PENUTUP 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024... 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2025..... 30
Tabel 2.4 Usulan Para Pemangku Kepentingan dan Tokoh Masyarakat Tahun 2025 39
Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan 44
Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan..... 45
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintah yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan desentralisasi pengaturan sumber daya administrasi dengan mempertimbangkan penerapan pemerintah yang baik *(good governance)* dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efesien. Di samping itu pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh lapisan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pilihan guna mengembangkan kehidupan sosial ekonominya menjadi lebih baik dan maju.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala daerah, maka rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan melakukan penyempurnaan rancangan RENJA sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappedalitbang Kabupaten Pacitan untuk diverifikasi dan diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkan melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
10. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 210 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
21. Surat Edaran Nomor: 000.7.6.1/843/408.53/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan Tahun.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja tahun 2026 disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan perencanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap capaian

indikator kinerja Program dalam Renstra PD tahun 2026 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Pacitan.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja tahun 2026 ini disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pembangunan yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan;
2. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tantang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun Lalu (Tahun n-2) juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Tahun 2024 (Tahun n-2) meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan tahun lalu (n-2 atau tahun 2024) dan capaian Renstra yakni sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp3.275.578.395,00 terealisasi sebesar Rp3.190.953.612,00 atau 97,42%
b. Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp536.660.000,00 terealisasi sebesar Rp530.014.443,50 atau 98,76%
c. Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran sebesar Rp240.845.000,00 terealisasi sebesar Rp237.929.424,00 atau 98,79%
d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan anggaran sebesar Rp6.255.000,00 terealisasi sebesar Rp5.384.300,00 atau 86,08%

Evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 (n-2) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Hasil Nilai Evaluasi SAKIP PD memperoleh nilai sebesar 76,10 dengan kategori BB;
2. Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja program:
   a. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan terealisasi sebesar 8,78% dari target sebesar 1,60%
   b. Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan terealisasi sebesar 5,00% dari target sebesar 17,78%
3. Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional terealisasi sebesar 74,89% dari target sebesar 74,39%
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indikator kinerja persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 84,17%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 dalam lampiran Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024

KABUPATEN PACITAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	**23**	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
2	**23**	**01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**>B 71,35**	**BB 76,8**	**>B 76,80**	**BB 76,10**	**99,09**	**76,85**	**0**	**0**
2	**23**	**01**	**2**	**01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**15 dokumen**	**19 dokumen**	**19 dokumen**	**19 dokumen**	**100**	**19 dokumen**	**10 dokumen**	**52,63**
2	23	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	5 dokumen	45,45
2	23	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 laporan	8 laporan	100	8 laporan	5 dokumen	62,50

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	**23**	**01**	**2**	**02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 dokumen**	**59 dokumen**	**59 dokumen**	**59 dokumen**	**100**	**59 dokumen**	**30 dokumen**	**50,85**
2	23	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	26 orang/ bulan	23 orang/ bulan	23 orang/ bulan	23 orang/ bulan	100	23 orang/bulan	23 orang/bulan	100
2	23	01	2	02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	0	0
2	23	01	2	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwuIanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	100	44 dokumen	22 dokumen	50
2	**23**	**01**	**2**	**05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**-**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
2	23	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	1 paket	1 paket	**100**	1 paket	0	0
2	**23**	**01**	**2**	**06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**22,22%**	**22,22**

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	23	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	0	0
2	23	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	0	100
2	23	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	0	0
2	23	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	0	0
2	23	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	0	0
2	23	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	2 laporan	50
2	**23**	**01**	**2**	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**
2	**23**	**01**	**2**	**07**	**06**		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit	7 Unit	7 Unit	100	8 unit	8 unit	100

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	**23**	**01**	**2**	**08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**49,98%**	**49,98**
2	23	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	1 laporan	50
2	23	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 bulan	6 bulan	50
2	23	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	6 laporan	50
2	**23**	**01**	**2**	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**100**	**80**	**12,63**	**15,79**
2	23	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	13 unit	14 unit	19 unit	135,71%	14 unit	3 unit	18,75
2	23	01	2	09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	0	0

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	**23**	**02**					**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan**	**1,59%**	**26,42%**	**1,60%**	**8,78%**	**548,75**	**1,61%**	**0**	**0**
								Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	**15,98%**	**3,69%**	**17,78%**	**5,00%**	**28,12**	**19,59%**	**5,00**	**25,52**
2	**23**	**02**	**2**	**01**			**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat**	**3,02%**	**67,18%**	**67,20%**	**73,67%**	**109,63**	**67,30%**	**0**	**0**
								Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi Perpustakaan	**0,12%**	**1,23%**	**1,45%**	**1,46%**	**100,69**	**1,68%**	**0**	**0**
2	23	02	2	01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yangn Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	1.000 layanan	1.568 layanan	1.000 layanan	1308 layanan	130,80	1.000 layanan	72 layanan	7,2
								Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yangn Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-	-	-	-	-	1 perpustakaan	0	0

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	23	02	2	01	03		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 eksemplar	2 eksemplar	2 eksemplar	2 eksemplar	100	2 eksemplar	0	0
2	23	02	2	01	04		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 perpustakaan	30 perpustakaan	46 perpustakaan	46 perpustakaan	100	30 perpustakaan	24 perpustakaan	80
2	23	02	2	01	07		Pengembangan Layanan Perpustakaan rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	23.500 layanan	31.685 layanan	21.000 layanan	28.062 layanan	133,63	20.000 layanan	8.319 layanan	41,60
2	23	02	2	01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.400 eksemplar	1.400 eksemplar	1.155 eksemplar	1.155 eksemplar	100	150 eksemplar	0	0
2	23	02	2	01	10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	-	-	-
2	23	02	2	01	10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaa	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	-	-	-	-	-	3 dokumen	0	0

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	**23**	**02**	**2**	**02**			**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**3 Lokus**	**3 Lokus**	**100**	**3 Lokus**	**4 Lokus**	**133,33**
2	23	02	2	02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	3 Lokus	3 Lokus	3 Lokus	3 Lokus	100	3 Lokus	4 Lokus	133,33
2	23	02	2	02	04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100	3 perpustakaan	3 perpustakaan	100
2	23	02	2	02	04		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	1 perpustakaan	0	0
2	**24**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
2	**24**	**02**					**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional**	**74,31%**	**74,78%**	**74,39%**	**74,89%**	**100,67**	**74,49%**	**74,89%**	**100,54**

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	**24**	**02**	**2**	**01**			**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**125%**	**125**
								Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	**97,24%**	**99,12%**	**97,57%**	**99,59%**	**102,07**	**97,96%**	**0**	**0**
2	24	02	2	01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	8 berkas	8 berkas	10 berkas	12 berkas	120	12 berkas	0	0
2	24	02	2	01	03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	100	27 laporan	0	0
2	**24**	**02**	**2**	**02**			**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**0**	**0**
2	24	02	2	02	02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 arsip	3 arsip	3 arsip	4 arsip	133,33	4 arsip	2 arsip	50
2	**24**	**03**					**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban**	**80,67%**	**83,33%**	**84,17%**	**100%**	**118,81**	**88,17%**	**16,66%**	**18,90**

Kode							Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 atau (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4))
2	**24**	**03**	**2**	**01**			**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**80%**	**100%**	**85%**	**100%**	**117,65**	**90%**	**0**	**0**
2	24	03	2	01	01		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3 arsip	5 arsip	5 arsip	13 arsip	**433,33**	5 arsip	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2030 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2030 Kabupaten Pacitan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun atau sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu tersebut. Dalam Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Pacitan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	76,80 nilai	76,85 nilai	76,90 nilai	77,20 nilai	76,10 nilai	0 nilai	76,90 nilai	77,20 nilai	-
2.	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	-	-	1,60%	1,61%	1,60%	1,61%	8,78%	0%	1,60%	1,61%	-
3.	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Daerah	-	-	-	-	1,15%	1,36%	-	-	1,15%	1,36%	-
4.	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	-	-	17,78%	19,59%	17,78%	19,59%	5,00%	5,00%	17,78%	19,59%	-
5.	Persentase perpustakaan yang dibina	-	-	-	-	3,57	4,17	-	-	3,57	4,17	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
6.	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	-	-	74,39%	74,49%	75%	75%	74,89%	74,89%	74,39%	74,49%	-
7..	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	-	-	84,17%	88,17%	100%	100%	100%	16,66%	100%	100%	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan pada masa akan datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dapat diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan pada lima tahun mendatang.

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

   Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan meliputi dua urusan, yakni Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Pada urusan Perpustakaan terdiri dua Bidang, yaitu Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Urusan Kearsipan terdiri dari Bidang Kearsipan.

   1) Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan

      Layanan perpustakaan terdiri dari layanan perpustakaan umum dan layanan perpustakaan keliling. Pengunjung perpustakaan umum Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh pengunjung berdomisili kota Pacitan. Hal ini diketahui dari data alamat pengunjung yang terdaftar pada saat presensi kunjungan yakni dengan

mengisi Portal INLISLite, perangkat lunak (software) otomasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). INLISLite dapat digunakan untuk mengelola perpustakaan digital, menerapkan otomasi perpustakaan, dan menghimpun koleksi nasional.

Pada saat mengisi presensi terdapat kolom yang menunjukkan nama, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, alamat, dan tujuan kunjungan. Sehingga jumlah pengunjung dapat dikelompokkan.

Sasaran pengunjung selain pada Kecamatan Pacitan masih belum sepenuhnya terlayani sehingga belum melayani secara maksimal. Oleh karena itu, setiap Kecamatan seharusnya memiliki Perpustakaan Kecamatan yang berada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pacitan.

Sedangkan pada layanan perpustakaan keliling belum pula semua dari sasaran Titik Layanan (TL) dapat terlayani, sehingga masih banyak tempat kurang mendapat pelayanan perpustakaan keliling.

Serta belum optimalnya fungsi perpustakaan sebagai inklusi sosial sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan menjalankan kegiatan:

- Monitoring dan Pendampingan Perpustakaan Berstandar Nasional;
- Melaksanakan penghimpunan data bahan perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM);
- Pendataan Perpustakaan, Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), Pendataan Tenaga Perpustakaan.

Pendataan Perpustakaan dilakukan Pustakawan terhadap Pengelola Perpustakaan. Pengelola Perpustakaan pada umumnya lebih didominasi perempuan. Karena perempuan dipandang lebih sabar, teliti, dan cermat dalam melakukan pekerjaan sebagai Pengelola Perpustakaan;

- Melaksanakan pembudayaan gemar membaca
- Replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Merupakan replikasi dari program induk di Perpustakaan Nasional yang kemudian dilaksanakan pada wilayah Kabupaten/Kota. Tugas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan mereplikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Desa/Kelurahan. Wujud dari replikasi tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sosialisasi Replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS);
  - Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPPTIK);
  - Peer Learning Meeting (PLM) atau Monitoring Formal (dikumpulkan di satu tempat).

3) Bidang Kearsipan

a. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

Sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang dikembangkan Kemkominfo bersama ANRI, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) mendukung penciptaan naskah dinas, surat menyurat elektronik, dan pengelolaan arsip digital secara terintegrasi. Pada tahap awal implementasi ini, diperlukan dukungan perangkat pendukung yang memadai bagi setiap kepala OPD serta peningkatan keterampilan SDM pengelola arsip agar penerapan SRIKANDI dapat

berjalan optimal dan memenuhi standar kearsipan nasional.

Pada tahun 2025, pasca pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, penerapan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan berfokus pada penguatan implementasi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konsistensi penggunaan, dimana perangkat daerah masih menjalankan pengarsipan manual sehingga arsip digital yang dihasilkan belum lengkap.

Pasca Sosialisasi pada tahun 2022 dan Bimbingan Teknis pada tahun 2023 untuk Admin di Perangkat Daerah, masih diperlukan adanya Bimbingan Teknis khusus untuk akun Tata Usaha, Akun Pencatat Surat, dan akun Pengelola Arsip yang ada di SRIKANDI.

Dari sisi sarana prasarana, proses input dan disposisi arsip masih terkendala keterbatasan perangkat pendukung dan stabilitas jaringan pada Aplikasi SRIKANDI itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana prasarana yang memadai bagi pimpinan perangkat daerah maupun admin/operator agar pengelolaan arsip dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Integrasi SRIKANDI dengan aplikasi persuratan dan tanda tangan elektronik juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan keterhubungan arsip lintas OPD tanpa redundansi data. Untuk memastikan keberlanjutan penggunaan SRIKANDI yang optimal, Monitoring serta evaluasi kinerja secara berkala perlu dilaksanakan di seluruh OPD agar sistem ini benar-benar mendukung prinsip dan tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

b. Pemusnahan

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan disebutkan bahwa Pengawasan Kearsipan internal menjadi tanggung jawab Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Kementerian, Badan, Lembaga, TNI/POLRI, Komisi, BUMN/BUMD, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri pada tiap wilayah kewenangannya.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan, sedangkan Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Dari hasil kegiatan audit kearsipan internal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan rata-rata masih masih berada pada kategori nilai Kurang (C).

Berdasarkan pada hasil nilai tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan masih perlu untuk meningkatkan kualitas SDM Pengelola Kearsipan yang ditunjang dengan sarana prasarana pengelolaan arsip sehingga pengelolaan arsip dapat terlaksana sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dan diharapkan dapat

meningkatkan nilai audit kearsipan internal pada tahun berikutnya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
   1) Masih kurangnya jumlah anggota Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
   2) Belum adanya Perpustakaan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Pacitan dimana pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Umum kebanyakan dari domisili Kecamatan Pacitan saja;
   3) Masih banyak Perpustakaan yang diselenggarakan belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dimana sebagian besar pengelola perpustakaan merupakan tugas tambahan. Seperti guru merangkap menjadi pengelola Perpustakaan Sekolah dan perangkat desa merangkap pengelola Perpustakaan Desa;
   4) Kurangnya pemahaman Pemdes terhadap kegiatan Replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sehingga menemui kesulitan dalam seleksi peserta;
   5) Belum semua Perpustakaan Desa mengaplikasaikan hasil sosialisasi dan bimtek terkait Replikasi TPBIS;
   6) Masih banyak Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan yang belum secara tertib mengirimkan laporan bulanan sehingga rekap data Perpustakaan kurang maksimal;
   7) Pembinaan pengelolaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan minat budaya baca belum maksimal menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan. Karena keterbatasan personil baik untuk jabatan fungsional pustakawan maupun untuk jabatan fungsional umum serta keterbatasan anggaran yang ada;
   8) Implementasi aplikasi SRIKANDI memerlukan peran, kolaborasi, dan komitmen kuat dari seluruh *stakeholder*

di lingkungan Pemerintah Daerah agar bisa berjalan dengan maksimal. Karena melibatkan beberapa sektor untuk menjalankannya, maka diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik di level pimpinan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya LKD selaku *Leading sector* di bidang Kearsipan, Diskominfo di sektor *Technology Information (TI)*, dan Tanda Tangan Elektronik (TTE), BKPSDM di sektor informasi kepegawaian, Bagian Organisasi di sektor Struktur Organisasi, dan Bagian Hukum selaku pencipta produk hukum;

9) Server yang belum stabil menjadi kendala di akun SRIKANDI layanan. Karena seringnya *maintenance* beberapa data yang sudah diinput di aplikasi ada yang hilang;
10) Sumber Daya Manusia atau SDM Kearsipan pada setiap Perangkat Daerah masih terbatas sehingga kurang memperhatikan tentang arsip karena masih belum mengetahui pentingnya pengelolaan Kearsipan apabila tidak dikelola dengan baik;
11) Masih minim dan kurang memadainya sarana dan prasarana di Bidang Kearsipan dan Bidang Layanan Perpustakaan.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (NSPK, SPM dan SDGs)

Pada pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pacitan apabila dapat menambah koleksi buku terutama buku *best seller* yang diminati masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa akan memiliki dampak untuk menarik masyarakat untuk berkunjung baik dalam Kecamatan Pacitan sendiri ataupun Kecamatan lain. Begitupula dengan sarana prasana serta SDM pelayanan. Apabila dengan adanya sarana prasarana yang lebih memadai seperti ruang baca yang lebih nyaman, akses internet lancar, serta dengan tenaga pelayanan yang cepat tanggap dan ramah tentu saja akan memberi dampak kunjungan pemustaka.

Pada Bidang Kearsipan, apabila penilaian kearsipan pada setiap OPD semakin baik, maka akuntabilitas akan semakin tinggi dan jika aplikasi SRIKANDI telah dijalankan, maka penciptaan surat menyurat dan arsip digital tercipta secara terautomasi serta berkesinambungan.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan

   Tantangan:

   1) Meningkatkan kunjungan pada layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan cakupan pengunjung di luar domisili Kecamatan Pacitan;
   2) Menambah jumlah anggota perpustakaan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
   3) Membuka layanan di masing-masing Kecamatan dengan penempatan Pojok Baca;
   4) Menerapkan aplikasi SRIKANDI pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pacitan.

   Peluang:

   1) Pemanfaatan sebagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Penyusunan APBDes;
   2) Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi bagi pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pacitan, pengembangan Perpustakaan Kecamatan serta Desa, dan pembinaan SDM Tenaga Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   3) Pada urusan Perpustakaan, dukungan anggaran dari Perpusnas RI sangat berperan dalam pengembangan perpustakaan di daerah, sementara di urusan Kearsipan dukungan anggaran dari ANRI untuk daerah sangat kurang;
   4) Mengembangkan teknologi Perpustakaan Digital dengan cakupan jaringan yang lebih luas serta kemudahan dalam akses.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas:

   1) Ketetapan Perbup;

2) Keikutsertaan Survei Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang dilaksanakan Provinsi;
3) Peningkatan jumlah anggota pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Pacitan;
4) Tingkat keamanan arsip.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Di samping itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan. Untuk lebih jelasnya tersaji pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PERPUSTAKAAN					**4.364.316.000**	**URUSAN PERPUSTAKAAN**				**4.399.345.830**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP PD**	**76,90**	**3.586.958.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP PD**	**76,90**	**3.629.303.649**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**19 dokumen**	**30.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**19 dokumen**	**30.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	18.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	**17.330.100**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	12.669.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 dokumen**	**2.747.597.988**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 dokumen**	**2.952.443.031**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/ bulan	2.731.577.188	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/ bulan	2.937.116.931	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	7.540.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	7.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwuIanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran/ SKPD	44 laporan	8.480.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwuIanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran/ SKPD	44 laporan	7.786.100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**1 paket**	**20.600.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**1 paket**	**23.690.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	20.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	23.690.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**1 paket**	**210.594.345**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**1 paket**	**92.913.518**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.463.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.996.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	17.174.945	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.343.718	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	20.660.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	17.364.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	12.660.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	8.877.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.810.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.902.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	137.890.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	32.430.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Pacitan**	**Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100%**	**41.479.367**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100%**	**17.317.700**	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	41.479.367	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	17.317.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Pacitan**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**402.202.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**401.934.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5.840.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5.840.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.229.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.821.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	264.133.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	263.273.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Pacitan**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**75%**	**134.484.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**75%**	**111.005.400**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	94.136.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	74.801.400	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	40.348.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	36.204.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Kab. Pacitan**	**Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Daerah**	**1,15%**	**777.358.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Kab. Pacitan**	**Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Daerah**	**1,15%**	**770.042.181**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Persentase perpustakaan yang dibina	**3,57%**				**Persentase perpustakaan yang dibina**	**3,57%**		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pacitan**	**Persentase ketermanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat**	**3,70%**	**534.458.000**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Persentase ketermanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat**	**3,70%**	**522.342.081**	
			Persentase pengelola perpustakaan yang dibina	**3,36%**				**Persentase pengelola perpustakaan yang dibina**	**3,36%**		
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	22.000 layanan	391.458.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	22.000 layanan	382.467.181	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pepustakaan	Kab. Pacitan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 eksemplar	20.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pepustakaan	Kab. Pacitan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 eksemplar	23.175.000	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 eksemplar	5.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 eksemplar	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Pacitan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 perpustakaan	23.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Pacitan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 perpustakaan	11.168.100	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Pacitan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	3 dokumen	95.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Pacitan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	3 dokumen	100.531.800	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	**Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca**	**0,04%**	**242.900.000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Pacitan	**Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca**	**0,04%**	**247.700.100**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Pacitan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2 lokus	220.900.000	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Pacitan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2 lokus	23.030.600	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Pacitan	Jumlah layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 perpustakaan	22.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Pacitan	Jumlah layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 perpustakaan	224.669.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN KEARSIPAN					**139.620.000**					**132.855.090**	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Kab. Pacitan**	**Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional**	**75%**	**136.334.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Kab. Pacitan**	**Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional**	**75%**	**129.692.179**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pacitan**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**100%**	**119.300.000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**100%**	**106.017.543**	
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	**98,37%**				**Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**98,37%**		
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Pacitan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	14 berkas	96.800.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Pacitan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	14 berkas	89.352.600	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 laporan	22.500.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 laporan	16.664.943	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pacitan**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**	**100%**	**17.034.000**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**	**100%**	**23.674.636**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Pacitan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 arsip	17.034.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Pacitan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 arsip	23.674.636	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Kab. Pacitan**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban**	**100%**	**3.286.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Kab. Pacitan**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban**	**100%**	**3.162.911**	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Kab. Pacitan**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**95%**	**3.286.000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Kab. Pacitan**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**95%**	**3.162.911**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Pacitan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3 arsip	3.286.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Pacitan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3 arsip	**3.162.911**	
JUMLAH					**4.503.936.000**	**JUMLAH**				**4.532.200.920**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Forum Musrenbang PD) di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten berupa usulan program/kegiatan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Pacitan, dengan berpedoman pada Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pedoman aturan dan petunjuk teknis sebagai langkah melaksanakan program/kegiatan di daerah Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hal ini disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Pacitan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	USULAN
1	2	3	4
-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kebijakan Nasional

- Visi dan Misi Perpustakaan Nasional (Renstra Tahun 2020 – 2024)

  Visi: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi"

  Misi: "Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara"

- Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional

  Adapun arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, melalui:
   a. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling digital dan motor perpustakaan keliling;
   b. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan *influencer* literasi baik

duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta *public figure*;

c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;

d. Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.

2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui:

   a. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir;

   b. Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno.

3. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal, melalui:

   a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional yang andal, efektif dan berintegritas;

   b. Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;

   c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang profesional;

   d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Adapun Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 yaitu:

Visi: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"

Misi:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, man diri, dan berdaya saing, berbasisagrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan pe nataan ruang
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

3.1.2. Kebijakan Kabupaten Pacitan

Adapun Tema Prioritas Ranwal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026 adalah **"PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KEBERDAYAAN SOSIAL".**

Dari Tema Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka Prioritas Program Pembangunan meliputi:

1. Menguatkan kemandirian ekonomi lokal;
2. Menjaga dan meningkatkan daya beli dan pendapatan;
3. Penguatan industri olahan yang berpotensi ekspor;
4. Penguatan *society* 5.0 dalam partisipasi;
5. Menguatkan kemandirian social dan layanan dasar.

VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran atau cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai di masa depan. Visi memberikan arah dan tujuan yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Perumusan Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 pada dasarnya merupakan periode kedua

kepemimpinan kepala daerah periode 2021 – 2026. Pada periode ke 2 ini, kepala daerah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan kebijakan yang baik dan memperbaiki yang kurang pada periode pertama dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan kedua fokus tersebut berpedoman pada arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045, dengan mengikuti perkembangan pemerintahan yang dinamis.

Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 adalah **Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia.**

Misi adalah langkah-langkah atau tindakan konkret yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan bagaimana suatu organisasi atau individu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi. Misi Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1	Pemberantasan Kemiskinan
Misi 2	Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 3	Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Misi 4	Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Adapun rumusan Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan adalah **Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Arsip Daerah.**

Tabel 3.1
Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pacitan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkat-nya literasi masyarakat dan tata kelola arsip daerah	Indeks Pembangu-nan Literasi Masyarakat (IPLM)	69,70	69,80	69,85	69,90	69,95	70
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	70	71	72	73	74	75

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan yang meliputi pembinaan dan pengembangan perpustakaan, layanan dan koleksi perpustakaan serta kearsipan.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi layanan dan koleksi perpustakaan;
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kearsipan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai terkait dengan perumusan tujuan di atas yaitu:

1. Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pacitan

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	57,10	57,50	58,00	58,50	59,00	59,50
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Nilai pengawasan kearsipan internal	48,70	50	52	54	56	58

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yaitu:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwuIanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

1.2 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

1.3 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

1.5 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

2.2 Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial

C. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

1.2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun

1.1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja, pagu indikatif, dan prakiraan maju tahun 2027.

Rumusan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2026, dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PERPUSTAKAAN					**4.399.345.830**				**4.464.976.000**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD**		**76,90**	**3.629.303.649**			**77,20**	**3.669.689.000**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**		**19 dokumen**	30.000.000			**19 dokumen**	36.000.000
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 dokumen	17.330.100			11 dokumen	22.000.000
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 laporan	12.669.900			8 laporan	14.000.000
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**		**59 dokumen**	**2.952.443.031**			**59 dokumen**	**2.952.443.031**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 orang/bulan	2.937.116.931			27 orang/bulan	2.937116.931
2.23.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	7.540.000			1 dokumen	7.540.000
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwuIanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 laporan	7.786.100			44 laporan	7.786.100
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**		**100%**	**23.690.000**			**1 paket**	**23.690.000**
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	23.690.000			1 paket	23.690.000
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**92.913.518**			**100%**	**123.247.518**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	1 paket	11.996.100			1 paket	11.996.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Semua Kelurahan						
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	16.343.718			1 paket	16.343.718
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	17.364.500			1 paket	17.364.500
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	8.877.200			1 paket	8.877.200
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	5.902.000			1 paket	5.902.000
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	32.430.000			4 laporan	62.764.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah**	**Persentase keteresediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**		**100%**	**17.317.700**			**100%**	**21.369.051**
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	17.317.700			2 unit	21.369.051
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**		**100%**	**401.934.000**			**100%**	**401.934.000**
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	5.840.000			2 laporan	5.840.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	132.821.000			12 laporan	132.821.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	263.273.000			12 laporan	263.273.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**		**75%**	**111.005.400**			**80%**	**111.005.400**
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 unit	74.801.400			16 unit	74.801.400
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	36.204.000			3 unit	36.204.000
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan kunjungan Perpustakaan Daerah**		**1,15%**	**770.042.181**			**1,36%**	**795.287.000**
		Persentase perpustakaan yang dibina		**3,57%**				**4,17%**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketermanfaatan Perpustakaan Daerah oleh masyarakat**		**3,70%**	**522.342.081**			**3,75%**	**546.787.000**
		Persentase pengelola perpustakaan yang dibina		**3,36%**				**3,92%**	
2.23.02.2.01.03	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	200 eksemplar	23.175.000			900 eksemplar	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Semua Kelurahan						
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 perpustakaan	11.168.100			17 perpustakaan	12.000.000
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.000 layanan	382.467.181			22.300 layanan	267.530.000
2.23.02.2.01.09	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 eksemplar	5.000.000			100 eksemplar	25.000.000
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi Perpustakaan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	100.531.800			3 dokumen	92.257.000
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca**		**0,04%**	**247.700.100**			**0,05%**	**248.500.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokus	224.669.500			3 Lokus	225.000.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perpustakaan	23.030.600			2 Perpustakaan	23.500.000
URUSAN KEARSIPAN									**174.478.000**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional**		**75%**	**129.692.179**			**75%**	**139.478.000**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**		**100%**	**106.017.543**			**100%**	**122.979.540**
		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		**98,37%**				**100%**	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 berkas	89.352.600			16 berkas	109.505.400
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan, Semua	27 laporan	16.664.943			27 laporan	13.474.140

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kecamatan, Semua Kelurahan						
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**		**100%**	**23.674.636**			**100%**	**16.498.460**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 arsip	23.674.636			6 arsip	16.498.460
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban**		**100%**	**3.162.911**			**100%**	**35.000.000**
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**		**95%**	**3.162.911**			**100%**	35.000.000
2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 arsip	3.162.911			6 arsip	35.000.000
				TOTAL	**4.532.200.920**				**4.639.454.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan rencana jangka pendek yang berisikan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada tahun tersebut. Keberhasilan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja tergantung pada sikap, etos/semangat kerja, dan disiplin dari seluruh staf. Hal ini juga harus didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait, khususnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan tahun 2026 ini pada dasarnya berfungsi sebagai standar dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan dapat sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun sehingga dapat lebih terarah, terpadu, dan sistematis sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan:

a. Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang serta harus didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pencapaian tujuan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Penyusunan Renja tahun 2026 ini didasarkan penjabaran tahunan Renstra dalam RPJMD Kabupaten Pacitan, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan untuk menyusun Renja tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
c. Dokumen Renja tahun 2026 mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, yang realitis dan mengantisipasi masa tahun 2026 ke depan yang diinginkan serta dapat dicapai dan dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) yang merupakan komponen organisasi yang sangat vital sebagai penentu utama dalam keberhasilan suatu tujuan organisasi harus di kelola secara profesional dan perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan kompetensinya.
d. Dokumen Renja tahun 2026 ini menurut sifatnya merupakan prediksi masa 1 (satu) tahun ke depan yang tentunya masih terdapat kekurangan atau keterbatasan sehingga bilamana terjadi hal-hal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dimungkinkan adanya peninjauan kembali diseuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
e. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada sekaligus dapat dijadikan sebagai rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN

SSWW PACITAN NYAWIJI

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

2026

RENCANA KERJA (RENJA)

70 - Mile Sea Paradise

dinasperikanan.pacitan perikanan.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran OPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak agar penyusunan Rencana Kerja ini lebih sempurna di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN,

BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19680920 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i
DAFTAR ISI……... ii
BAB I : PENDAHULUAN…… 1
1.1 Latar Belakang…… 1
1.2 Landasan Hukum……... 2
1.3 Maksud Dan Tujuan……... 4
1.4 Sistematika Penulisan…… 4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024…… 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan……... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan…… 19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan……..… 22
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD……..….. 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… 99
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN……... 103
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…… 103
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan…… 104
3.3 Program dan Kegiatan……... 105
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN…… 107
BAB V : PENUTUP…….. 127

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran. Perencanaan pembangunan daerah disusun berawal dari penjabaran visi/misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJP maupun RPJM Daerah. Selanjutnya perencanaan tersebut dijabarkan dalam renstra PD dan diuraikan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dalam Renja PD. Renja PD merupakan bahan / acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu kepada:

a. Renstra Perubahan Perangkat Daerah
b. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
c. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat
d. Rencana Kerja Kementerian / lembaga (Renja –KL)
e. Rencana Kerja Provinsi

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

12. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pacitan No.149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan;
22. Keputusan Bupati pacitan Nomor: 188.45/25/408.21/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pacitan;
23. Rencana Strategis Dinas Perikanan No. 188.45/67/408.31/2018 tentang Penetapan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Menjabarkan rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026
b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan;
c. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaaha Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Sesuai dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026, indikator kinerja Sasaran Dinas Perikanan sebanyak 2 sasaran dengan indikator sasaran 2 indikator dan 3 program dengan 3 indikator kinerja program.

Capaian sasaran kinerja rata-rata tahun 2024 sebesar 93,21%. Pencapaian ini termasuk kategori MEMUASKAN. Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut,

Dinas Perikanan mempunyai 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan hasil perikanan

Didukung 3 (tiga) program antara lain:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ditunjang dengan 2 kegiatan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 3 kegiatan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ditunjang 2 kegiatan. Pada tahun 2024 total kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan sebanyak 14 kegiatan termasuk kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang meliputi Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Produksi perikanan yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya tercapai 12.529,97 ton atau 86,30 % dari target sebesar 14.519 ton. Tidak tercapainya target indikator sasaran produksi perikanan disebabkan tidak tercapainya target indikator program Pengelolaan

Perikanan Tangkap dengan capaian sebesar 92,27 % dari target sebesar 12.020 Ton dan tidak tercapainya indikator program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 57,57 % dari target sebesar 2.499 Ton.

Produksi perikanan tahun 2024 menurun sebesar 1.863,03 ton atau 12,94 % dibanding produksi perikanan tahun 2023. Penurunan produksi sebesar 12,94 % disebabkan penurunan produksi perikanan nelayan sebesar 14,29 % dari produksi 2024 sebesar 11.091,14 ton dibanding produksi tahun 2023 sebesar 12.940,45 ton dan penurunan produksi perikanan budidaya sebesar 0,95 % dari produksi 2024 sebesar 1.438,83 ton dibanding produksi tahun 2023 sebesar 1.452,56 ton. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan tercapai 33,22 % atau tercapai 100,12 % dari target sebesar 33,18 %. Indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan tahun 2024 meningkat sebesar 2 % dibanding tahun 2023 sebesar 32,53 %. Tercapainya indikator kinerja sasaran nilai tambah didukung dengan tercapainya indikator kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 1.721,97 atau 110,80 %.Adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2024 sebesar 11.091,14 ton atau mencapai 92,27% dari target RPJMD tahun 2024, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 1.849,31 ton atau 14,29% dibanding produksi perikanan tahun 2023 sebesar 12.940,45 Penurunan produksi perikanan nelayan disebabkan oleh penurunan produksi perikanan laut. Walaupun produksi PUD meningkat , namun tidak sebanding dengan penurunan produksi perikanan laut. Untuk produksi perikanan laut terjadi penurunan sebesar 15,43% disbanding tahun 2023 dengan produksi Tahun 2024 sebesar 10.219,35 ton dan produksi tahun 2023 sebesar 12.086,63 ton. Belum optimalnya usaha perikanan tangkap oleh nelayan kecil karena keterbatasan sarana penangkapan ikan.

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi perikanan kelompok nelayan didukung melalui kegiatan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

(TPI), serta kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok nelayan yang dibina Dinas Perikanan tahun 2024 sebanyak 91 KUB yang merupakan KUB nelayan laut dan KUB nelayan perairan umum daratan (PUD). Pembinaan dilakukan secara langsung dengan pertemuan ataupun sosialisasi. Disamping itu dilakukan fasilitasi terhadap nelayan untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan Provinsi maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di luar kota.

B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada tahun 2024 Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1.438,83 ton atau mencapai 57,57% dari target RPJMD tahun 2024 sebesar 2.499 ton. Produksi perikanan budidaya Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 13,73 ton atau turun 0,95% disbanding prosuksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 1.452,56 ton.

Terjadi penurunan produksi perikanan budidaya baik budidaya air tawar dan budidaya air payau (tambak). Produksi budidaya air payau (tambak) selama ini memberikan kontribusi terbesar pada produksi perikanan budidaya. Pada Tahun 2024 dengan produksi sebesar 932,488 ton terjadi penurunan produksi perikanan budidaya air payau (tambak) sebesar 17,543 ton atau 1,85% dibanding tahun 2023 950,031 ton. Penyebab turunnya produksi budidaya tambak karena banyak tambak yang terserang wabah penyakit AHPND atau EMS *(Early Mortality Syndrome)* yang menyebabkan kematian hingga 100 % serta menurunnya carrying capacity disebabkan pengelolaan lingkungan yang kurang baik, kesadaran petambak untuk mengelola limbah dengan IPAL masih rendah dan belum menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Banyak petambak akhirnya menghentikan sementara budidaya tambak udang dan ada yang mengganti komoditas nila salin sebagai cara memulihkan kolam tambak agar bisa digunakan untuk siklus budidaya udang berikutnya. Penurunan produksi perikanan budidaya juga disebabkan oleh kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual produk sehingga meningkatkan biaya operasional. Banyak

pembudidaya yang mengurangi jumlah tebar benih atau malah berhenti tidak melakukan budidaya karena keterbatasan modal untuk membeli pakan**.**

C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk produksi hasil olahan perikanan di Tahun 2024 terjadi peningkatan dibanding tahun 2023. Produksi hasil olahan perikanan Tahun 2024 sebesar 1.721,97 ton naik sebesar 33,60 ton atau 1,99% dibanding produksi hasil olahan perikanan Tahun 2023 sebesar 1.688,38 ton. Target produksi hasil olahan perikanan Tahun 2024 tercapai 110,81 % dengan target sebesar 1.554 ton.

Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan tersebut mencapai target RPJMD tahun 2024, hal ini dikarenakan penambahan dari jenis pengolahan pengesan/pendinginan dan kerupuk ikan. Hal ini dikarenakan semakin tersebar luasnya pemasaran ikan segar di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan dan permintaan luar kota, pada tahun 2024 ini produksi pengesan/pendinginan sebesar 541.780 kg. Ini juga menunjukkan semakin meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan. Selain hal tersebut juga dikarenakan upaya pemerintah dalam menumbuhkan usaha pengolahan ikan dengan memberikan pelatihan pengolahan ikan di berbagai wilayah desa sehingga tumbuh pelaku usaha yang menghasilkan produk olahan ikan yang beragam terutama produk kering seperti kerupuk ikan, ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah produksi kerupuk ikan sebesar 18.160 kg. Kenaikan produksi dibanding Tahun 2024 ini juga disebabkan banyaknya event pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yang juga berpengaruh langsung kepada meningkatnya permintaan produk olahan perikanan sebagai oleh - oleh Khas Pacitan. Untuk Nilai tambah produk olahan hasil perikanan pada tahun 2024 tercapai sebesar 33,22 % atau meningkat sebesar 0,12 % dari target tahun 2024 sebesar 33,18 %. Peningkatan nilai tambah disebabkan karena efisiensi produksi dan peningkatan produksi. Peningkatan nilai tambah produk olahan hasil perikanan Tahun 2024 disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah Unit Pengolahan Ikan yang menerapkan GMP (Good Manufacturing Proccess) atau SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) menyebabkan peningkatan efisiensi produksi olahan hasil perikanan yang berimplikasi pada

meningkatnya nilai tambah produk olahan hasil perikanan, utamanya pada jenis pengolahan pelumatan daging (ready to eat) dan selain itu kenaikan produksi juga sangat mempengaruhi kenaikan nilai tambah.

Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2024 didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Produksi Perikanan
- Terlaksananya Bimtek Diversifikasi Olahan Ikan
- Terlaksananya Bimtek WANI ASAH IKAN
- Terlaksananya Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
- Terlaksananya SeHAT Nelayan dan SeHAT Pembudidaya Ikan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai target program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan antara lain :

- Belum tersedianya bahan baku secara kontinu.
- Kurangnya penguasaan teknologi pengolahan hasil perikanan.
- Terbatasnya pemasaran pengolahan hasil perikanan.
- Pengawasan mutu hasil perikanan dan bahan asal ikan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Pengurusan izin usaha pengolahan terutama produk olahan perikanan basah masih rendah

Untuk mengoptimalkan pencapaian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Optimalisasi pembudidaya ikan terhadap setiap potensi wilayah (baik tawar, payau dan laut) dalam melaksanakan pembudidayaan ikan dengan menerapkan tehnologi yang dianjurkan sehingga luasan lahan serta produktifitasnya akan lebih meningkat.
- Peningkatan jumlah masyarakat dalam usaha budidaya perikanan untuk mencukupi kebutuhan pangan maupun peningkatan kesejahteraan.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan yang harganya semakin meningkat
- Pencegahan penyakit ikan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan pengelolaan limbah (IPAL).
- Peningkatan produksi nelayan lokal melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap.
- Peningkatan pasca panen sehingga produk perikanan yang dihasilkan berkualitas dan bernilai tinggi.
- Peningkatan produksi nelayan lokal melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap.
- Peningkatan pasca panen sehingga produk perikanan yang dihasilkan berkualitas dan bernilai tinggi.
- Diversifikasi usaha untuk mengantisipasi musim paceklik.

Sedangkan untuk mengoptimalkan pencapaian target program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Perlu adanya *cold storage* untuk menyimpan stok bahan baku;
- Perlu adanya pelatihan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- Melaksanakan terobosan pemasaran hasil pengolahan perikanan (pameran, gemarikan, kerjasama dengan stakeholder);
- Melakukan pembinaan kepada pelaku pengolahan hasil perikanan dan pedagang mengenai pengelolaan ikan secara higienis dan aman;
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian produk perikanan.
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengurusan izin usaha perikanan dan kerjasama dengan berbagai stake holder terkait.

- Kemudahan akses permodalan didukung dengan adanya berbagai program pemerintah seperti KUR, SeHAT Nelayan dan SeHAT Pembudidaya Ikan dalam rangka fasilitasi akses permodalan.
- Peningkatan pembinaan kepada masyarakat sehingga terbentuk kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.
- Peningkatan sosialisasi atas pemahaman dan penerapan peraturan perikanan

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tahun 2024 dan perkiraan pencapaian target 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024
dan Perkiraan Realisasi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Z*(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 (7+8+9)**	**11 = (10/4)**
3.01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Hasil nilai evaluasi SAKIP PD**	**>B**	**>B**	**>B**			**>B**		
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah*	*23 dokumen*	*23 dokumen*	*23 dokumen*	*23 dokumen*	*100%*	*23 dokumen*		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	0	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	23 dokumen	23 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporann Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah*	*12 dokumen*	*12 dokumen*	59 dokumen	59 dokumen	*100%*	59 dokumen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	19 orang	19 orang	23 Orang	23 Orang	*100%*	23 Orang		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	*100%*	59 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*		*100%*		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian kerja	0	0	0	0		0		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	125 paket	125 paket		125 paket		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Belanja jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak	0	5 paket	3 paket	3 paket	*100%*	3 paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja alat listrik	11 paket	12 paket	9 paket	9 paket	*100%*	9 paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja barang jasa kantor	1 paket	6 paket	6 paket	6 paket	*100%*	6 paket		
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem	Belanja pemeliharaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	*100%*	2 dokumen		

	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja perjalanan dinas	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	*100%*	12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Belanja bahan bangunan	0	1 paket	2 paket	2 paket	*100%*	2 paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja makanan dan minuman	0	12 paket	3 paket	3 paket	*100%*	3 paket		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah									
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Belanja alat kantor dan rumah tangga	12 unit	12 unit	0	0	*100%*	0		
	Sub kegiatan Peralatan daan Mesin Lainnya	Belanja Laptop dan Printer	0	0	31 unit	31 unit		31 unit		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Belanja jasa kantor, dan honorarium*	*100%*	*100%*	100%	100%	*100%*	100%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	*100%*	12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja jasa kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	*100%*	12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa ASN dan non ASN	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	*100%*	12 laporan		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Belanja jasa kantor, pemeliharaan*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*		
	Pengadaan Mabel	Belanja alat kantor dan rumah tangga	0	0	0	0		0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Laptop Belanja Printer	0	0	0	0		0		

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja barang jasa kantor, pemeliharaan	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	*100%*	30 unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	2 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit		
3. 01.01.20	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi perikanan budidaya**	**2.380**	**1.452,56**	**2.499**	**2.499**	**72,69%**	**2.499**		
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**0**	**30 kelompok**	**50 kelompok**	**50 kelompok**		**50 kelompok**		
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok pembudidaya yang terbina dan menerima paket bantuan	0	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	*100%*	30 kelompok		
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya yang terbina dan menerima paket bantuan	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	*100%*	30 kelompok		
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah Pembudidaya yang Terbina**	**20 kelompok**	**60 kelompok**	**50 kelompok**	**50 kelompok**		**50 kelompok**		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan	0	2 unit	10 unit	10 unit		10 unit		
		Jumlah kelompok pembudidaya skla kecil dan instalasi BBI penerima bantuan; Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam	2 kelompok	2 kelompok			*100%*			

		1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan yang terlatih	0	0 0 0						
		Pengadaan peralatan laboratorium	0				*0*			
		Uji laboratorium	1 paket				*0*			
		Jumlah Hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan ; Jumlah Penyakit teridentifikasi; Jumlah pokdakan terlatih; Jumlah sampel teruji	12 sampel/tahun	12 sampel/tahun	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen		
3.01.01.21	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**12.942,45**	**12.942,45**	**12.020**	**12.020**	**78,33 %**	**12.020**		
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Produksi perikanan kelompok nelayan*	*12.942,45*	*12.942,45*	*12.020*	*12.020*		*12.020*		
	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	KUB penerima sarpras perikanan tangkap berupa perahu/API/Pelampung/Kotak pendingin	0	0	1 unit	1 unit		1 unit		
	Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket fasilitasi sarana operasional (Bibit Ikan/Pakan Penyu/Papan Larangan)	0	0	3 unit	3 unit		3 unit		

		Bibit vegetasi pesisir dan PUD; Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia; Kelompok masyarakat yang terbina; Konservasi Ikan dilindungi; Restocking Ikan di Perairan Umum	*80 batang*							
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		*2.500 orang*	*2.500 orang*	*3000 orang*	*3000 orang*		*3000 orang*		
	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan	200 orang	100 orang	3000 orang	3000 orang	*100%*	3000 orang		
	Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Nelayan yang mendapatkan sosialisasi kelembagaan nelayan	3 kelompok	100 kelompok	50 kelompok	50 kelompok		50 kelompok		
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah TPI yang dikelola*	*6 TPI*	*5 TPI*	*5 TPI*	*5 TPI*		*5 TPI*		
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mendapatkan biaya operasional	6 TPI	5 TPI	5 TPI	5 TPI	*100%*	5 TPI		
3.01.01.23	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**1.523 ton**	**1.688,38 ton**	**1.554 ton**	**1.554 ton**		**1.554 ton**		
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan*	40 kelompok	40 kelompok	99 unit usaha	99 unit usaha		99 unit usaha		
	Penyediaaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklahsar yang teridentifikasi			0	0		0		

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan perizinan berusaha	*40 poklahsar*	*40 poklahsar*	87 kelompok	87 kelompok		87 kelompok		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan*	*1.523 ton*	*1.688,38 ton*	*1.554 ton*	*1.554 ton*		*1.554 ton*		
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gemarikan	*1.523 ton*	*1.688,38 ton*	1.554 ton	1.554 ton	*100%*	1.554 ton		
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	peserta sosialisasi dan finalisasi sehat	100 orang	100 orang	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	*100%*	100 pelaku usaha		
		bedah unit pengolahan ikan	0	0	0	0		0		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Pacitan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Produksi Perikanan (ton)			13.596	14.050	14.519	15.005	15.507	10.521,53	14.393	12.529,97	-	-	-	
			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	11.330	11.670	12.020	12.381	12.752	8.874,35	12.940,45	11.091,14	-	-	-	Proyeksi capaian tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 14,29 dari capaian tahun 2023
			Produksi Perikanan Budidaya	2.266	2.380	2.499	2.624	2.755	1.647,18	1.452,56	1.438,83				Proyeksi capaian tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 0,95% dari capaian tahun 2023
2	Peningkatan Prosentase Nilai Tambah Sektor Perikanan			2	2	2	2	2	2						
			Produksi produk hasil olahan	1.493	1.523	1.554	1.585	1.616	1.123,97	1.686,37	1.721,97				Proyeksi capaian tahun 2024 naik sekitar 1,99 % dari capaian tahun 2023

			perikanan (ton)												
	Nilai Tambah Produk Olahan Hasil PNILAI TAMBAH PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN														

Tujuan Dinas Perikanan sesuai dengan visi misi Bupati yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan prosentase kenikan pendapatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi difokuskan untuk peningkatan produksi sektor perikanan. Produksi perikanan dalam hal ini bisa diupayakan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Serta peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan produk perikanan.

Sasaran strategis pembangunan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi perikanan;
2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan perikanan;

Sasaran "Meningkatnya Produksi Perikanan" dengan indikator sasaran Produksi Perikanan diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, minapadi, tambak), peningkatan jumlah pembudidaya ikan, peningkatan luas areal budidaya, peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan jumlah nelayan yang bergerak dalam usaha penangkapan ikan, peningkatan jumlah kapal dan peningkatan produksi perairan umum. Dengan peningkatan produksi diharapkan akan meningkatan pendapatan pekerja sektor perikanan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diharapkan dapat dicapai melalui 2 (dua) program yaitu program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Salah satu faktor yang menentukan daya saing suatu produk pangan dalam perdagangan bebas adalah jaminan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen. Jaminan mutu dan keamanan produk tidak hanya untuk melindungi konsumen domestik namun juga untuk mengantisipasi meningkatnya persyaratan dalam perdagangan internasional. Globalisasi memaksa produsen untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan tidak terkecuali untuk pengelolaan produk perikanan. Dengan meningkatnya mutu produk maka nilai tambah untuk produk perikanan juga akan meningkat. Nilai tambah adalah selisih lebih di antara

harga jual barang dengan harga beli bahan baku, suku cadang, bahan penolong serta jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi barang tersebut.

Sasaran "Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan" dengan Indikator Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan pada peningkatan jumlah unit pengolahan, peningkatan jumlah produk olahan, tingkat konsumsi ikan dan peningkatan kualitas produk perikanan.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2024 telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan walaupun belum optimal dikarenakan terjadinya penurunan anggaran kegiatan yang sangat significant dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik, walaupun ada satu indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan sebesar 86,30 % dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan sebesar 100,12 % dengan rata – rata capaian 93,21 %.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran produksi perikanan Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 2.691.408.500,00 dan capaian kinerja 86,30 % tercapai tingkat efisiensi sebesar -12,88 %. Sedangkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan Tahun 2024 dengan anggaran sebesar 589.802.000,00 dan capaian kinerja 100,12 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 0,26 %.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran produksi perikanan Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 2.691.408.500,00 dan capaian kinerja 86,30 % tercapai tingkat efisiensi sebesar -12,8 %. Sedangkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan Tahun 2024 dengan

anggaran sebesar Rp. 589.802.000,00 dan capaian kinerja 100,12 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 0,26 %.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran produksi perikanan Tahun 2024 dengan ketersediaan SDM sebesar 51,61 % dan capaian kinerja 86,30 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 34,69 %. Sedangkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan Tahun 2024 ketersediaan SDM sebesar 51,61 % dan capaian kinerja 100,12 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 48,51 %.

Untuk indikator program Pengelolaan Perikanan Budidaya berupa produksi perikanan budidaya hanya tercapai sebesar 57,57 % atau tidak tercapai dari target yang telah ditentukan sebesar 2.499 ton dan untuk indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 92,27 % atau tidak tercapai dari target yang telah ditentukan sebesar 12.020 ton. Sedangkan untuk indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan tercapai melebihi target dengan capaian produksi olahan hasil perikanan 110,81 %.

Dari hasil capaian kinerja Tahun 2024 menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang, penentuan target kinerja serta analisa yang tepat tentang masalah-masalah dalam lingkungan internal dan eksternal yang dapat menyimpulkan asumsi organisasi, sehingga apa yang menjadi target kinerja di tahun yang akan datang bisa tercapai.

Sejalan dengan Visi, Misi Kepala Daerah diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sub sektor perikanan, akan mengalami peningkatan, dengan proyeksi kedepan kondisi masyarakat akan meningkat kemampuan ekonomi dan kesadarannya akan arti pentingnya pelayanan prima yang telah menjadi kebutuhan, maka tantangan bagi pemerintah tidaklah semakin ringan, target capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi PD akan menghadapi permasalahan antara lain yaitu:

A. Bidang Perikanan Budidaya

Permasalahan yang ada pada saat ini dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada masa mendatang Bidang Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil / tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar;
b. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya;
c. Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul;
d. Tingginya harga pakan;
e. Ketidakstabilan harga jual dan keterbatasan pasar;
f. Ketidaksiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit;
g. Peningkatan peluang pasar hasil perikanan budidaya;
h. Pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;
i. Upaya pembentukan cluster budidaya air tawar kurang didukung anggaran yang memadai karena minimnya APBD untuk bidang perikanan budidaya;
j. Upaya pengembangan pakan alternatif untuk budidaya maggot belum bisa terealisasi;
k. Belum tersedianya laboratorium yang memadai (laboratorium Dinas Level 1) sehingga terkendala dalam melakukan uji lab terkait penyakit dan sebagainya;
l. Banyak petambak yang belum mempunyai IPAL sehingga banyak yang belum memiliki dokumen LH, menjadi target dari APH terkait persyaratan operasional tambak.

B. Bidang Perikanan Tangkap

Berdasarkan kondisi pada saat ini sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan Bidang Perikanan Tangkap pada masa mendatang adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produksi melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap.
b. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (overfishing) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, bahan peledak serta Potasium.
c. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, baik berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana tangkap maupun alat tangkap, dan SDM yang memadai.
d. Rendahnya SDM dan kelembagaan nelayan terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai;
e. Peningkatan kualitas kawasan pesisir dan laut melalui :
    - Upaya perbaikan pengelolaan ekosistem pesisir yang dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat;
    - Rehabilitasi karena adanya kerusakan lingkungan, bencana dan dampak perubahan iklim serta meningkatnya aktivitas pengelolaan sumberdaya di kawasan pesisir dan pantai yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang mencemari perairan, telah mengakibatkan berbagai kerusakan pada kawasan mangrove, terumbu karang dan menurunnya kualitas perairan. Hal ini menyebabkan menurunnya potensi sumberdaya perikanan pantai dan rendahnya produktivitas perikanan tangkap;
    - Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam laut, bagi masyarakat pesisir;
    - Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan.
f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui lembaga khusus untuk penyelesaian pelanggaran yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya penegakan

Perda melalui efektifitas kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS) dalam rangka penerapan sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kewenangan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi maka harus terjalin koordinasi aktif antar instansi agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

g. Belum semua obyek yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan. Sampai saat ini prosesnya belum selesai.
h. Terjadinya sedimentasi di jalur labuh kapal
i. Fasilitas TPI kurang memadai

C. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Beberapa permasalahan terkait bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan antara lain:

1. Belum optimalnya integrasi sistem produksi hulu dan hilir;
2. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan secara memadai;
3. Rendahnya SDM dan kelembagaan pengolah terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai.
4. Penumbuhan sentra-sentra pengolahan hasil perikanan baik usaha skala rumah tangga maupun skala besar yang ditunjang dengan dukungan permodalan, pemasaran dan peningkatan sumberdaya manusia.
5. Peningkatan peran kelompok, koperasi, dan lembaga keuangan dalam memberikan; pelayanan kepada kelompok utamanya dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi serta modal usaha.
6. Belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergitas antar sektor termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk.

7. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan dan pengawasan mutu serta pengembangan sumberdaya manusia karena banyaknya persyaratan mutu yang telah ditentukan oleh konsumen baik konsumen dalam negeri maupun negara pengimpor seperti Uni Eropa, Asia Timur (Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan), dan USA terhadap keamanan pangan bebas dari antibiotik pada produk ekspor hasil perikanan dari Indonesia.
8. Belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. Pengembangan dan investasi dibidang usaha kelautan dan perikanan.
10. Legalitas usaha utamanya ijin edar MD BPOM bagi produk perikanan beku yang masih sulit diperoleh bagi poklahsar.
11. Bahan baku Ikan yang belum tersedia kontinu, ketika musim paceklik ikan bahan baku menjadi langka.
12. Tempat pengolahan produk perikanan yang sebagian besar masih jadi satu dengan dapur rumah tangga dan belum layak untuk memperoleh ijin edar MD BPOM.
13. Manajemen kelembagaan poklahsar yang masih kurang kuat dan memerlukan pembinaan yang intensif.
14. Distribusi produk perikanan belum bisa terjangkau luas (hanya tergantung trayek bis dan travel).
15. Promosi produk perikanan belum optimal.

Sesuai dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026, indikator kinerja Sasaran Dinas Perikanan tahun 2025 sebanyak 2 sasaran dengan indikator sasaran 2 indikator dan 3 program dengan 3 indikator kinerja program dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Perikanan mempunyai 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Olahan Produk Perikanan

Didukung 3 (tiga) program antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ditunjang dengan 2 kegiatan, Program Perikanan Tangkap dengan 3 kegiatan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ditunjang 2 kegiatan. Pada tahun 2025 total kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan sebanyak 13 kegiatan termasuk kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang meliputi Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan di antaranya:

	TANTANGAN	**PELUANG**
1	Usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Pacitan dihadapkan pada kondisi geografis yang sulit (pantai terjal/curam, daratan bergunung-gunung dan sumber air terbatas)	• Optimalisasi Penangkapan Ikan Pelagis dan Demersal • Pengembangan Destinasi Memancing • Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan • Penerapan Perikanan Berkelanjutan • Peningkatan Budidaya Air Payau dan Laut • Pemanfaatan Teknologi Akuakultur • Pengembangan Infrastruktur Pendukung • Peningkatan Sumber Daya Manusia

		• Meningkatkan Pemasaran dan Jaringan Distribusi
2	Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan usaha perikanan	• Meningkatkan Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan • Meningkatkan Akses Permodalan dan Inkubasi Bisnis • Pengembangan Teknologi Tepat Guna • Penguatan Kelembagaan Nelayan/Pembudidaya
3	Keterbatasan penguasaan IPTEK sehingga produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran belum optimal	• Pengembangan Teknologi Penangkapan Tepat Guna • Peningkatan pelatihan tentang Keamanan dan Keselamatan • Meningkatkan pemahaman Sistem Informasi Cuaca dan Laut • Penerapan Teknologi Budidaya Intensif dan Berkelanjutan • Pengelolaan Pakan dan Kesehatan Ikan • Pemilihan Spesies Induk Unggul • Diversifikasi Produk Olahan Bernilai Jual Tinggi • Mengadakan pelatihan Teknologi Pengawetan Modern • Mengadakan pelatihan Pengemasan Menarik dan Aman • Meningkatkan Pemanfaatan E-commerce dan Media Sosial dalam pemasaran • Pengembangan Jaringan Distribusi

		• Branding dan Pemasaran Berbasis Geografis
4	Peningkatan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume dan keragaman produk perikanan	• Meningkatkan Inovasi dan diversifikasi usaha perikanan
5	Regulasi yang mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan belum sepenuhnya diterapkan	• Penyempurnaan Kebijakan Adaptif • Pengembangan Regulasi Spesifik Lokal • Penerapan Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM) • Peningkatan Kapasitas Pengawasan • Edukasi dan Sosialisasi Komprehensif • Peningkatan Kesadaran Hukum • Pembentukan Forum Komunikasi • Pengembangan Insentif Kepatuhan
6	Legalitas usaha perikanan yang belum optimal	• Pendampingan dan fasilitasi dalam proses perijinan • Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Perikanan • Pendampingan Hukum dan Administrasi • Program Edukasi dan Sosialisasi Masif
7	Penurunan daya dukung lingkungan dan perairan yang	• Peningkatan Sistem Monitoring Lingkungan

	berpengaruh terhadap usaha perikanan	• Mengembangkan Teknologi Pengelolaan Limbah • Memperkuat kolaborasi Kolaborasi Antar Sektor antara Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, akademisi, masyarakat lokal, dan sektor swasta

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 diharapkan tidak jauh berbeda dengan tahun 2025. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 masing-masing indikator kinerja dapat dicapai 100%. Untuk lebih jelasnya Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Perikanan						5,267.402.235,00							6.492.772.543.00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5,267.402.235,00							6.492.772.543.00	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5,267.402.235,00							6.492.772.543.00	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**3.925.234.763,00**						**>B Nilai**	**4.265.370.543,00**	

3	**2 5**	**0 1**	**2. 0 1**		**Perencanaa n, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**23Dok umen**	**23Dok umen**	**23Dok umen**	**23 Doku men**	**10.049.7 40,00**			**-**	**PP1 - Pemulih an Ekonom i Kerakya tan melalui Peningk atan Nilai Tambah Sektor Sekund er dan Pariwisa ta; Menjaga Ekosiste m Produkti f Pelaku Ekonom i Lokal**	**Dinas Perikana n**	**23Dokum en**	**16.112.940,00**	**DINAS PERIKA NAN**
3	2 5	0 1	2. 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Doku men	9 Doku men	9 Doku men	9 Doku men	3.190.27 0,00	Kab. Pacita n, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	-	PP1 - Pemulih an Ekonomi Kerakyat an melalui Peningk atan Nilai Tambah Sektor Sekunde r dan	Dinas Perikanan	9 Dokumen	5.090.270.00	DINAS PERIKA NAN

															Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.829.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Dinas Perikanan	2 Dokumen	2.846.550,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD														

						Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Dinas Perikanan	2 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	4.429.570,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	Dinas Perikanan	14 laporan	8.176.120.00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 Dokumen**	**59 Dokumen**	**59 Dokumen**	**59 Dokumen**	**3.033.158.046,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**59 Dokumen**	**3.233.258.046.00**	**DINAS PERIKANAN**
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	26 orang/ bulan	26 Orang /bulan	3,029,953,176,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	26 Orang/bulan	3.229.953.176.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59 Laporan	59 Laporan	59 Laporan	59 Laporan	3,204,870.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	-	59 Laporan	3.304.870.00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	**25**	**01**	**2**	**03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**0 Laporan**					**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**			**11.000.000,00**	**DINAS PERIKANAN**
3	25	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik						Kab. Pacitan, Semu	DANA TRANSFER UMU	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi			11.000.000,00	DINAS PERIKAN

						Daerah pada SKPD						a Kecamatan, Semua Kel/Desa	M-DANA ALOKASI UMUM		Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**21,000,000.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku**	**-**	**100%**	**122.203.600,00**	**DINAS PERIKANAN**

															Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.05	0002	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administras	59 Laporan	2 paket	1 paket	12 Dokumen	43.047.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	12 Dokumen	43.047.200,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan														

						Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 orang	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	**2 5**	**0 1**	**2. 0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**147.450. 700,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga**	**-**	**100%**	**134.223.730,00**	**DINAS PERIKANAN**

															Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	11 paket	9 paket	9 paket	1.995.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	11 paket	2,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5 Paket	6 Paket	6 Paket	24.733.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	1 paket	34.733.200.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	12 Paket	2 Paket	12 Paket	67.295.130,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	-	2 paket	50.895.130,00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5 Paket	2 Paket	12 Paket	4.027.00,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	2 paket	5.100.000.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	1.995.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	1 paket	2.095.400.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	44.004.970,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	-	12 Laporan	34,000,000.00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	2 Dokumen	5.400.000,00	DINAS PERIKANAN

3	**2 5**	**0 1**	**2. 0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**42.889.0 50,00**			**-**	**PP1 - Pemulih an Ekonom i Kerakya tan melalui Peningk atan Nilai Tambah Sektor Sekund er dan Pariwisa ta; Menjaga Ekosiste m Produkti f Pelaku Ekonom i Lokal**	**-**	**100%**	**72.892.200,00**	
3	2 5	0 1	2. 0 7	00 05	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	2 unit	21.866.8 50,00	Kab. Pacita n, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	-	PP1 - Pemulih an Ekonomi Kerakyat an melalui Peningk atan Nilai Tambah Sektor Sekunde r dan	-	2 unit	41.870.000,00	DINAS PERIKA NAN

															Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		16 Unit	28 Unit	3 unit	21.022.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	3 unit	31.022.200,00	DINAS PERIKANAN

3	**2 5**	**0 1**	**2. 0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**614.833. 100.00**			**-**	**PP1 - Pemulih an Ekonom i Kerakya tan melalui Peningk atan Nilai Tambah Sektor Sekund er dan Pariwisa ta; Menjaga Ekosiste m Produkti f Pelaku Ekonom i Lokal**	**-**	**100%**	**630.533.100.00**	
3	2 5	0 1	2. 0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	1.500.040.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan	-	6 laporan	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN

															Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.719.060,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	12 laporan	58.919.100,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	559.614.000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	12 laporan	569,614.000,00	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**33.806.927,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga**	**-**	**100%**	**45.146.927,00**	

															Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	4 Unit	26.796.927,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	4 Unit	35.796.927,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya emeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 unit	4.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			5.200.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				1 unit	610.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat		1 Unit	950.000,00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2 unit	4 unit	1 Unit	2.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	1 unit	3.200.000,00	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANA**	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)**	**12.752 ton**	**12940.45 Ton**	**12381 TON**	**12.752 Ton**	**704.000.000,00**						**-**	**885.722.000.00**	

					N TANGKAP														
3	**2 5**	**0 3**	**2. 0 1**		**Pengelolaa n Penangkap an Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia**	**12.752 ton**	**12940. 45 Ton**	**12381 Ton**	**6.805 Unit**	**50.000.0 00,00**			**-**	**PP1 - Pemulih an Ekonom i Kerakya tan melalui Peningk atan Nilai Tambah Sektor Sekund er dan Pariwisa ta; Menjaga Ekosiste m Produkti f Pelaku Ekonom i Lokal**	**-**	**-**	**200.000.000,00**	
3	2 5	0 3	2. 0 1	00 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	-	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Pacita n, Ngadir ojo, Semu a Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	-	PP1 - Pemulih an Ekonomi Kerakyat an melalui Peningk atan Nilai Tambah Sektor	-		0,00	DINAS PERIKA NAN

															Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 unit	-	3 unit	5 unit	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN

												Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa							

3	**2 5**	**0 3**	**2. 0 2**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukkan dan Pengembangan Kelembagaannya jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya**	**3000nelayan**	**3000nelayan**	**3000nelayan**	**50 kelompok 3.000 nelayan**	**634.000.000,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**3000nelayan 2500orang/nelayan**	**500.000.000,00**	
3	2 5	0 3	2. 0 2	00 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	2.500 Orang	3000 Orang	3000 Orang	3.000 Orang	614,000,000.00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tulakan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	-	240,000,000.00	DINAS PERIKANAN

												Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa							
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	20,000,000.00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Arjosari,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	-	60.000.000,00	DINAS PERIKANAN

												Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa							

3	25	03	202	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				48 unit	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal		-	200.000.000,00	

												Kel/Desa Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan,							

												Sudimoro, Semua Kel/Desa							
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**5Layanan**	**5Layanan**	**5Layanan**	**5Layanan**	**20.000.000,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**-**	**185.772.000,00**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														

						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Sudimoro,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	-	185.722.000,00	DINAS PERIKANAN

												Semua Kel/Desa							
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**2755 Ton**	**1452.56 Ton**	**2499 Ton**	**2.624 Ton**	**650,000,000.00**						**2.755 Ton**	**785,000,000.00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pemberdayaan**	**172 kelompok**	**172 kelompok**	**176 kelompok**	**176 kelompok**	**21.000.000,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**172 kelompok**	**400,000,000.00**	
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														

						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	40 Kelompok	22 Kelompok	20 Kelompok	-	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	660 orang	40orang	150orang	15 kelompok	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	-	-	48.000.000,00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	**2 5**	**0 4**	**2. 0 4**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah pembudidaya yang terbina**	**176 kelompok**	**176 kelompok**	**176 kelompok**	**-**	**371.385.515,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**-**	**590.864.000,00**	
3	2 5	0 4	2 0 4	00 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal		4 Dokumen	80.000.000,00	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 paket	4 paket	8 unit	3 unit	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	-	-	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	04	204	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal		4 Dokumen	20.000.000,00	
3	25	04	204	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan														

					dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15 unit	125.385.515,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal		-	290.864.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	-	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN

												Kel/Desa			Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan hasil perikanan (ton)**	**1616Ton**	**1688.38 Ton**	**1.545 Ton**	**1.585 Ton**	**245.781.957,00**						**1.616 Ton**	**510,000,000.00**	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar dan UKM yang mendaptkan pembinaan	75 kelompok	93 kelompok	95 kelompok		125.781.957,00			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku	-	-	226.408.000,00	

															Ekonomi Lokal				
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	125.781.957,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	-	226.408.000,00	DINAS PERIKANAN

3	**2 5**	**0 6**	**2. 0 3**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersediaanya dan tersalurnya produk perikanan**	**1.616 Ton**	**1.688. 38 Ton**	**1.554 Ton**	**1.585 Ton**	**120.000. 000,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**1.616 Ton**	**260.000.000,00**	
3	2 5	0 6	2. 0 3	00 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.688. 38 Ton	1.554 Ton	1.585 Ton	2015 ton	120.000. 000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan	-	-	226.408.000,00	DINAS PERIKANAN

															Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 pelaku usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
J U M L A H											**5.267.402.235,00**							**6.492.772.543,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD					RKPD PERUBAHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3.925.234.763,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.758.990.928,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**-**	**10.049.740,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**23 Dokumen**	**106.450.753,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3.190.270,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	73.980.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	4.429.570,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Laporan	32.470.753,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.829.900,00					

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	600.000,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 dokumen**	**3.033.158.046,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**59 dokumen**	**2.663.193.678,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.029.953.176,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.657.988.808,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59 Laporan	3.204.870,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	59 Laporan	5.204.870,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**-**	**43.407.200,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100 %**	**25.505.800,00**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 paket	43.407.200,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1paket	25.505.800,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**-**	**147.450.700,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**138.665.260,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.995.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	9 Paket	2.000.220,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	24.733.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.541.560,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.295.130,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	61.002.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.027.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.342.200,00

Penyediaan Bahan/Material	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.995.400,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.004.970,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Laporan	35.603.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3.400.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	4.390.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**-**	**42.889.050,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**100 %**	**3.013.800,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	21.022.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	31 Unit	3.013.800,00
Pengadaan Meubel	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	2 unit	21.866.850,00					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa**	**-**	**614.833.100,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Unit Peralatan dan**	**100 %**	**693.708.489,00**

		penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan			**Pemerintahan Daerah**		**Mesin Lainnya yang Disediakan**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1.500.040,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	12 Laporan	2.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.719.060,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	91.190.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	559.614.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.918.489.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**-**	**33.806.927,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**100 %**	**128.453.148,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	26.796.927,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	30 Unit	54.000.000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4.200.000,00					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	610.000,00					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.200.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	349,187,580.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**12.572 Ton**	**704.000.000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**12.020 Ton**	**973.589.046,00**

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	6.805 unit	50.000.000,00	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		Produksi perikanan kelompok nelayan	5 Unit	223.909.646,00
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Pacitan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	-
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 Unit	50.000.000.00	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	223.909.646,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan**	**-**	**634.000.000,00**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia**	**3000 nelayan**	**659.272.600,00**
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	3000 Orang	614.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan	3000 Orang	622.100.000,00
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	50 Kelompok	20.000.000,00	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Kelompok	37.172.600,00

		Kelembagaannya							
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		**Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**5 Layanan**	**20.000.000,00**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya**	**5 TPI**	**90.406.800,00**
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab.Pacitan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	20.000.000,00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	90.406.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Produksi perikanan budidaya**	**-**	**392.385.515,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**2499 Ton**	**753.563.700,00**
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**jumlah pembudidaya yang mendapat pemberdayaan**	**-**	**21.000.000,00**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Produksi perikanan budidaya**	**50 Kelompok**	**360.791.816,00**
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		jumlah pembudidaya yang mendapat pemberdayaan	20 Kelompok	338.336.700,00

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	21,000,000,00	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	30 Kelompok	22.455.116,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**jumlah pembudidaya yang terbina**	**-**	**371.385.515,00**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**	**50 Kelompok**	**392.771.884,00**
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	38.000.000,00					

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah pembudidaya yang terbina	5 Unit	375.973.756,00
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.000.000,00					
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	125.385.515,00					
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**-**	**245.781.957,00**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan**	**1554 Ton**	**276.086.270,00**
					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				**20.000.000,00**

					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				20.000.000,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan**	**-**	**125.781.957,00**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**87 Kelompok**	**151.752.200,00**
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab.Pacitan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha	125.781.957,00	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan	142 Unit Usaha	151.752.200,00

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan**	**-**	**120.000.000,00**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko**	**1554 ton**	**104.334.070,00**
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2015 Ton	120.000.000,00	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan	1554 Ton	69.176.230,00
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	-	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Pelaku Usaha	35.157.840,00
				5.267.402.235,00					**5,761,729,943.96**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									**4.013.895.838**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**23 dokumen**	**10.049.740,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**23 dokumen**	**13.619.840,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	3.190.270,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	5.190.270,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.829.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	4.429.570,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	11 dokumen	5.429.570,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**43.047.200,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**47.203.600,00**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	43.047.200,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	47.203.600,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 orang	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 Dokumen**	**3.033.158.046,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 Dokumen**	**3.229.953.176,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan	26 orang/bulan	3.029.953.176,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan	26 orang/bulan	3.229.953.178,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	59 laporan	3,204,870.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	59 laporan	5,304,870.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**		**147.450.700,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**		**140.129.300,00**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	1.995.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	2.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	24.733.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlen gkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	34.733.200,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	67.295.130,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	50.895.130,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	4.027.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	5.100.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	1.995.400,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	44.049.970,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	34.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	3.400.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	5.400.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Pacitan**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**5 unit**	**42.889.050,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**62.889.050,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	21.022.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	31.022.200,00
Pengadaan Meubel	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	2 unit	21.866.850,00	Pengadaan Meubel	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	2 unit	41.870.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Pacitan**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**614.833.100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**637.894.600,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1.500.040,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,160,00.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	64.280.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	559.614.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	569.614.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**33.806.927,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**45.146.927,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	26.796.927,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	35.796.927,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.200.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.200.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	910.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	950.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)**	**12.752 tom**	**704.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)**	**12.752 tom**	**934.000.000,00**
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang**	**6.805 unit**	**50.000.000,00**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang**	**6.805 unit**	**200.000.000,00**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		**terjamin dan tersedia**			**Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**		**terjamin dan tersedia**		
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan tersedia	5 unit	50.000.000,00	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan tersedia	5 unit	200.000.000,00
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang Tersedia	0	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang Tersedia	0	0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan yang Terjamin dan Tersedia	0	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan yang Terjamin dan Tersedia	0	0
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Nelayan Kecil yang mendapat pemberdayaan**	**50 Kelompok 3.000 nelayan**	**634.000.000,00**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Nelayan Kecil yang mendapat pemberdayaan**	**50 Kelompok 3.000 nelayan**	**714.000.00,00**
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasistasnya	3.000 orang	614.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasistasnya	3.000 orang	654.000.000,00
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	50 kelompok	20.000.000,00	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	50 kelompok	60.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	48 unit	0,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	48 unit	0,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Kab. Pacitan**	**Jumla layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**5 layanan**	**20.000.000,00**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kab. Pacitan**	**Jumla layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**5 layanan**	**20.000.000,00**
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pacitan	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	20.000.000,00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pacitan	Jumla layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	20.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**2.624 Ton**	**392.385.515,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**2.624 Ton**	**400.385.515,00**
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pemberdayaan**	**176 kelompok**	**21.000.000,00**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pemberdayaan**	**176 kelompok**	**29.000.000,00**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiyaan, kemitraan usahanya	-	0,00	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiyaan, kemitraan usahanya	-	0,00
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang pereroleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	15 kelompok	21.000.000,00	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang pereroleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	15 kelompok	29.000.000,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang terbina**	**-**	**371.385.515,00**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang terbina**	**-**	**371.385.515,00**
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah data dan informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	38.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah data dan informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	38.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	200.000.000,00	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	200.000.000,00
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehata ikan dan lingkungan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.000.000,00	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehata ikan dan lingkungan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.000.000,00
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	15 unit	125.385.515,00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	15 unit	125.385.515,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Kab. Pacitan**	**Produksi Olahan hasil perikanan (ton)**	**1.585 Ton**	**245.781.957,00**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Pacitan**	**Produksi Olahan hasil perikanan (ton)**	**1.585 Ton**	**245.781.957,0**
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Pacitan**	**Jumlah poklahsar dan UKM yang mendaptkan pembinaan**	**60 Unit usaha**	**125.781.957,00**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah poklahsar dan UKM yang mendaptkan pembinaan**	**60 Unit usaha**	**125.781.957,00**
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan	60 unit usaha	125.781.957,00	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan	60 unit usaha	125.781.957,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
sesuai Skala Usaha dan Risiko		pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha			Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		**Tersediaanya dan tersalurnya produk perikanan**	**1.585 Ton**	**120.000.000,00**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**		**Tersediaanya dan tersalurnya produk perikanan**	**1.585 Ton**	**150.000.000,00**
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.585 ton	120.000.000,00	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.585 ton	150.000.000,00
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 pelaku usaha	0,00	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 pelaku usaha	0,00
JUMLAH				**5.267.402.335,00**					**5.757.003.965.00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	KEGIATAN
1	Kebonagung	Klesem	Peningkatan sarana prasarana pengolahan (Perikanan/Kelautan)	Klesem	1 Paket	20.000.000	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Sudimoro	Ketanggung	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, gabus)	Ketanggung	1 Paket	10.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	Tegalombo	Tegalombo	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, gabus)	Tegalombo	1 Paket	10.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

4	Sudimoro	Pager Kidul	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Pager Kidul	1 Paket	30.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
5	Arjosari	Jetis Kidul	Pelatihan / Bimbingan Teknis Usaha Perikanan Tangkap	Jetis Kidul	1 Paket	10.000.000	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
6	Kebonagung	Karangnongko	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas 148-Karangnongko-Pantai Bakung,Kecamatan Kebonagung	Karangnogko	1 Paket	30.000.000	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
7	Pacitan	Baleharjo	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Baleharjo	1 Paket	50.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

8	Arjosari	Jetis Kidul	Pelatihan ketrampilan teknis pelaku UM	Jetis Kidul	1 Paket	20.000.000	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
9	Nawangan	Nawangan	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Nawangan	1 Paket	50.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
10	Bandar	Bangunsari	Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Perikanan	Bangunsari	1 Paket	25.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
11	Punung	Tinatar	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Tinatar	1 Paket	35.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

12	Pacitan	Widoro	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Widoro	1 Paket	30.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan Kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDMKP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah

1 Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP.
2 Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional.
3 Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP.
4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat.
2. Ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan meningkat.
3. Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan.

4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat.
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan.
6. Tata kelola SDKP bertanggungjawab.
7. Industrialisasi KP berdaya saing.
8. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integrative.
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan:

1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN

3.2.1 Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, tugas fungsi Dinas Perikanan tercantum pada Misi ke 3 :

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya" .

Dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan dan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Indikator PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Maka tujuan pembangunan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu

"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan"

Tujuan Dinas Perikanan sesuai dengan Visi Misi Bupati yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan prosentase kenaikan pendapatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi difokuskan untuk peningkatan produksi sektor perikanan. Produksi perikanan dalam hal ini bisa diupayakan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Serta peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan produk perikanan.

3.2.2 Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis pembangunan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan

Untuk mewujudkan visi pembangunan perikanan kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 tersebut, maka misi Dinas dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Mengembangkan kawasan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatkan mutu dan pemasaran hasil olahan perikanan;
3. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perikanan memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, Program dan Kegiatan Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

2.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2.2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.1 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

4.2 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan pembangunan perikanan Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Perikanan merencanakan program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ditunjang dengan 2 kegiatan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 3 kegiatan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ditunjang 2 kegiatan. Pada tahun 2025 total kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan sebanyak 13 kegiatan termasuk kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang meliputi Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 diharapkan tidak jauh beda dengan tahun 2025 menggunakan pendanaan APBD Kabupaten Pacitan. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 indikator kinerja dapat dicapai 100 %. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dari Dinas Perikanan sebagai berikut :

Tabel 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN

Dinas Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perikanan							**5.854.000.739,00**	**10.840.000.739,00**	**5.709.729.943,96**							**6.436.935.000,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							**5.854.000.739,00**	**10.840.000.739,00**	**5.709.729.943,96**							**6.436.935.000,00**	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							**5.854.000.739,00**	**10.840.000.739,00**	**5.709.729.943,96**							**6.436.935.000,00**	
1	**3**	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**> B Nilai**	**> B Nilai 75,95 Nilai**	**> B Nilai**	**>B Nilai**	**6.436.935.000,00**	**3.850.000.739,00**	**3.836.000.739,00**	**3.731.490.927,96**						**>B Nilai**	**3.913.935.000,00**	

	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	40.000.753,00	80.000.753,00	78.950.753,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	23 Dokumen	38.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	23 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	12 Dokumen	6.480.000,00	46.480.000,00	46.480.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Dokumen	6.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan			11 Laporan	11 Laporan	33.520.753,00	33.520.753,00	32.470.753,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		11 Laporan	32.000.000,00	DINAS PERIKANAN

																		Berkeadilan					
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	2.824.879.349,00	2.770.879.349,00	2.663.193.678,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	59 dokumen	2.895.225.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	23 Orang/bulan	19 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.819.674.479,00	2.765.674.479,00	2.657.988.808,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		26 Orang/bulan	2.890.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59 Laporan	59 Laporan	12 Laporan	59 Laporan	59 Laporan	5.204.870,00	5.204.870,00	5.204.870,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		59 Laporan	5.225.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	0	0	100%	100 %	21.000.000,00	21.000.000,00	25.505.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100%	21.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						21.000.000,00	21.000.000,00	25.505.800,00						75 paket	21.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0 0	0	0	0	0	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alo	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekon				DINAS PERIKANAN

																Kel/Desa	kasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	omi lokal				
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	149.269.000,00	163.189.000,00	138.665.260,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100 %	150.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	9 Paket	9 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		9 Paket	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		6 Paket	6 Paket	5 Paket	35.204.000,00	35.204.000,00	26.469.960,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		6 Paket	35.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Tahun	12 Paket	2 Paket	2 Paket	54.360.000,00	54.360.000,00	59.860.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Paket	54.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5 paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	9.305.000,00	9.305.000,00	8.342.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		2 Paket	9.500.000,00	DINAS PERIKANAN

																		Berke adilan					
	3	2 5	0 1	2. 0 6	00 07	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.0 00,00	2.000.0 00,00	2.000.0 00,00	Kab. Pacit an, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsf er Um um- Dan a Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menj aga ekos iste m prod uktif pela ku ekon omi lokal		1 Paket	2.200.00 0,00	DINAS PERIKA NAN
	3	2 5	0 1	2. 0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	12 Lapor an	12 Lapor an	12 Lapor an	12 Lapor an	41.400. 000,00	55.320. 000,00	35.603. 000,00	Kab. Pacit an, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsf er Um um- Dan a Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menj aga ekos iste m prod uktif pela ku ekon omi lokal		12 Laporan	41.500.0 00,00	DINAS PERIKA NAN
	3	2 5	0 1	2. 0 6	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Paket	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.390.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		2 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00	0,00	3.013.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	0	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2 Unit	0	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	3.013.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal				

	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	687.008.489,00	673.088.489,00	693.708.488,96			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100 %	678.700.000,	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Laporan	2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.160.000,00	66.160.000,00	91.189.999,96	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Laporan	66.200.000,00	DINAS PERIKANAN

																		Berke adilan					
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	618.348.489,00	604.428.489,00	600.018.489,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Laporan	610.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	80%	100 %	100 %	127.843.148,00	127.843.148,00	128.453.148,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100 %	129.810.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		30 Unit	54.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					4 Unit	0,00	0,00	610.000,00								810.000,00	
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	20 hari	2 Unit	1 Unit	1 Unit	73.843.148,00	73.843.148,00	73.843.148,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		1 unit	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2	**3**	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**12.752 ton**	**8.874,35 ton**	**11.670 ton**	**12.020 Ton**	**12381 Ton**	**1.004.000.000,00**	**4.954.000.000,00**	**948.589.046,00**						**12.752 ton**	**1.413.000.000,00**	

	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 paket	3 Paket	11.670 ton	4 Unit	53 Unit	200.000.000,00	4.150.000.000,00	198.909.646,00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	4 paket	380.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	0	0	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal			0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				3 Unit	53 Unit	200.000.000,00	4.150.000.000,00	198.909.646,00							380.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	

							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Paket	3 Paket	96.000 ekor	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan	4.000 nelayan	4000 nelayan	4000 nelayan	3.000 nelayan	3000 nelayan	704.000.000,00	704.000.000,00	659.272.600,00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	3.000 nelayan	708.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	975 Orang	0	100 orang	3.000 Orang	3000 Orang	647.000.000,00	647.000.000,00	622.100.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		975 Orang	650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	114 Kelompok	40 Kelompok	100 orang	50 Kelompok	50 Kelompok	57.000.000,00	57.000.000,00	37.172.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dan	-	Menjaga ekosistem produktif pela		114 Kelompok	58.000.000,00	DINAS PERIKANAN

							Kelembagaannya									Semua Kel/Desa	a Alokasi Umum		ku ekonomi lokal				
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 TPI	5 TPI	6 TPI	6 TPI	5 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	90.406.800,00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	5 TPI	325.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	5 TPI	6 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	90.406.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		5 Layanan	325.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**2.755 Ton**	**1.647,18 ton**	**2.380 ton**	**2.499 ton**	**2624 Ton**	**650.000.000,00**	**950.000.000,00**	**753.563.700,00**						**2.755 Ton**	**570.000.000,00**	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah pembudidaya yang mendapat pemberdayaan	176 kelompok	40 Kelompok	176 kelompok	50 Kelompok	56 Kelompok	250.000.000,00	550.000.000,00	360.791.816,00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekon	-	176 kelompok	260.000.000,00	DINAS PERIKANAN

																			omi lokal				
	3	2 5	0 4	2. 0 2	00 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	200 kelom pok	40 Kelo mpok	30 Kelo mpok	20 Kelo mpok	26 Kelo mpok	210.000 .000,00	510.000 .000,00	338.336 .700,00	Kab. Pacit an, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsf er Um um- Dan a Alo kasi Um um	-	Menj aga ekos iste m prod uktif pela ku ekon omi lokal		200 kelompo k	215.000. 000,00	DINAS PERIKA NAN
	3	2 5	0 4	2. 0 2	00 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan	660 orang	60 orang	30 Kelo mpok	30 Kelo mpok	30 Kelo mpok	40.000. 000,00	40.000. 000,00	22.455. 116,00	Kab. Pacit an, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsf er Um um- Dan a Alo kasi Um um	-	Menj aga ekos iste m prod uktif pela ku ekon omi lokal		660 orang	45.000.0 00,00	DINAS PERIKA NAN
	3	2 5	0 4	2. 0 4		Pengelola an Pembudid ayaan Ikan	jumlah pembudidaya yang terbina	176 kelom pok	40 Kelo mpok	176 kelom pok	50 Kelo mpok	56 Kelo mpok	400.000 .000,00	400.000 .000,00	392.771 .884,00			Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang	Menj aga ekos iste m prod uktif pela ku ekon	-	176 kelompo k	310.000. 000,00	DINAS PERIKA NAN

																		Berkualitas dan Berkeadilan	omi lokal				
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 unit	5 Paket	2 Unit	8 Unit	8 Unit	380.000.000,00	380.000.000,00	375.973.756,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		25 unit	290.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	4 Paket	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	16.798.128,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		4 Dokumen	20,000,000.00	DINAS PERIKANAN
4	**3**	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN**	**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**1.616 ton**	**1.123,97 ton**	**1.523 ton**	**1.554 ton**	**1.585 Ton**	**350.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**276.086.270,00**						**1.616 ton**	**540.000.000,00**	

						DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																	
	3	**25**	**06**	**201**		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	20.000.000,00							30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	**25**	**06**	**201**	**0005**	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko						200.000.000,00	950.000.000,00	151.752.200,00							30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan	97 kelompok	87 Kelompok	76 kelompok	87 Kelompok	87 Kelompok	200.000.000,00	950.000.000,00	151.752.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	97 kelompok	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0001	Pembinaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	

							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha	76 0rang	40 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	104.334.070,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		60 Unit Usaha	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan	1.616 ton	1.123,97 ton	1.523 ton	1554 ton	1554 ton	150.000.000,00	150.000.000,00	104.334.070,00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	1.616 ton	260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.616 ton	2 kegiatan	1.523 ton	1554 Ton	1554 Ton	100.000.000,00	100.000.000,00	69.176.230,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		1.616 ton	175.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	2 UPI	40 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	35.157.840,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		100 Pelaku Usaha	85.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	JUMLAH												**5.854.000.739,00**	**10.840.000.739,00**	**5.709.729.943,96**							**6.436.935.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka penjabaran rencana kerja lima tahunan disusunlah rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Perikanan Tahun 2026, Renja ini memuat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perencanaan dalam Renja Tahun 2026 difokuskan pada pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan dengan target utama peningkatan produksi perikanan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dinamika situasi, kondisi kebutuhan terkini dan potensi wilayah. Perencanaan tahunan ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja dan perencanaan kegiatan selanjutnya apabila masih diperlukan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 harapannya pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan akan lebih optimal.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN,

BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19680920 199901 1 001

RENJA AWAL TAHUN 2026

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan WR. Supratman No. 20A Telephon 884535
P A C I T A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.13/ 544/ 408.35/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Mengingat :

1. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksuud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan informasi;
b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
   1) Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
   2) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
   3) Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 10 - 07 - 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1 008

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 500.13/ 544 /408.35/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA AWAL PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Turmudi, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Basuki Rachmad, SP, M.Sc	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Yuyun Wahyu Setyawati. S.Sos	Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Dona Cahyanti, S.M	Perencana Ahli Pertama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		b. Bagas Bangkit Sanjaya, A.Md	Pranata Komputer Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		c. Bayu Renggar Pamungkas. A.Md	Tenaga Non ASN

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1008

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
Nomor : 500.13 / 545 / 408.35 / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2026 bertujuan untuk menjamin

adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pacitan

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) awal Tahun 2026 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) awal Tahun 2026 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dibuat berisi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 sebagai rencana kerja atau pedoman dalam pembuatan usulan program dan Kegiatan Dinas yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta sebagai media peningkatan akuntabilitas instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Dengan segala keterbatasan, kami dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan di mana Rencana Kerja (RENJA) awal Tahun 2026 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangan pemikiran serta bantuan moril dan materiil.

Demikian semoga Rencana Kerja (RENJA) awal Tahun 2026 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Pacitan, Juni 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1 008

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan dalam suatu Daerah dibutuhkan suatu perencanaan yang berupa Rencana Kinerja dan Rencana Kinerja Perubahan dengan kata lain perencanaan adalah suatu kegiatan mempunyai kedudukan atau peran yang paling penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan wilayah diatasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD dan Rencana Kinerja Perubahan . Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Kerja (RENJA) tahun 2025.

Rancangan Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 10 dinyatakan bahwa Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059;)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Indonesian Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
24. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuata dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaandan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuata dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten PacitanTahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
45. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Rekreasi dan Olahraga

48. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja awal Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARPORA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, berisikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

4.1. RKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun berjalan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DISPARBUDPORA

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun 2024

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan IV

Pada Tahun 2024 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OLahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menerima anggaran sesudah PAK tahun 2024 sebesar Rp. 30,531,498,584,- setelah Perubahan Anggaran Kinerja (PAK) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 12 program 21 kegiatan dengan Sub Kegiatan sebanyak 46 sub, serta target PAD PAK Sebesar Rp. 10.971.644.800,- dengan capaian PAD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kebupaten Pacitan Tahun 2024 dapat kita dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PARBUDPORA KAB PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Target PAK	Realisasi	Presentase %
1	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata	10.971.644.800,-	8.587.629.500,-	78%

Tabel 2.2
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024

Program Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran PAK (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	58.000.000,-	58.000.000,-
1. Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.058.999.096,-	4.026.721.840,-
2. Adminsitrasi Keuangan	514.180.810,-	561.745.205,-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.891.365,-	281.047.349,-
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.192.676.170,-	1.304.310.960,-
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.258.050,-	228.859.755,-
2. Program pemasaran Pariwisata		
Kegiatan :		
1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Dayatarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pacitan	808.349.975,-	1.383.349.975,-
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif		
Kegiatan :		
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.382.517.500,-	2.500.517.500,-
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
Kegiatan :		
1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	362.500.000,-	2.112.500.000,-
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota	6.809.626.000,-	7.569.426.000,-
3. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1.282.800.000,-	1.123.000.000,-
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
Kegiatan :		
1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	525.000.000,-	700.000.000,-
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350.000.000,00,-	400.000.000,-

7.	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	745.000.000,- 1.800.000.000,- 455.000.000,-	300.000.000,- 1.760.000.000,- 695.000.000,-
8	**Program Pengembangan Kebudayaan** Kegiatan : 1. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	1.625.000.000,-	2.245.000.000,-
9	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional** Kegiatan : 1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100.000.000,-	463.320.000,-
10	**Program Pembinaan Sejarah** Kegiatan : 1. Pembinaan sejarah lokal dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	230.000.000,-	468.700.000,-
11	**Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya** Kegiatan : 1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	200.000.000,-	200.000.000,-
12	**Program Pengelolaan Permuseuman** Kegiatan : 1. Pengelolaan museum kabupaten/kota	100.000.000,-	100.000.000,-
	Jumlah Anggaran PAK	**24.083.798.966,-**	**30.531.498.584,-**

Dari tabel di atas hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sampai dengan Semester II Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan baik penerimaan PAD maupun melaksanakan kegiatan sesuai dengan progam dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2024 maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2025 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

REKAPITULASI EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERIODE : DESEMBER

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
219	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi**	**Orang**	**180**	**700.000.000,00**	**181**	**699.749.640,00**	**100.56%**	**99.96%**
219	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Yang Dibina**	**Organisasi**	**8**	**700.000.000,00**	**8**	**699.749.640,00**	**100%**	**99.96%**
219	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	700.000.000,00	1	699.749.640,00	100%	99.96%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,96
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,96
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Prosentase Cabang Olah Raga yang mendapatkan Prestasi**	**%**	**67**	**4.805.000.000,00**	**71**	**4.795.581.902,00**	**105.97%**	**99.80%**
219	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan**	**Kegiatan**	**4**	**1.760.000.000,00**	**4**	**1.758.813.936,00**	**100%**	**99.93%**

					Kejuaraan Tingkat Kabupaten							
219	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	200	1.760.000.000,00	200	1.758.813.936,00	100%	99.93%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,93
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Olah raga Prestasi Tingkat Daerah Yang Dibina**	**Cabor**	**20**	**2.350.000.000,00**	**20**	**2.343.579.898,00**	**100%**	**99.73%**
219	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	125	2.350.000.000,00	125	2.343.579.898,00	100%	99.73%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,73
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Yang Terpelihara**	**Kegiatan**	**3**	**695.000.000,00**	**3**	**693.188.068,00**	**100%**	**99.74%**
219	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Kegiatan	1	695.000.000,00	1	693.188.068,00	100%	99.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,74
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan**	**%**	**40**	**400.000.000,00**	**45**	**399.999.950,00**	**112.50%**	**100%**
219	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat**	**Kegiatan**	**1**	**400.000.000,00**	**1**	**399.999.950,00**	**100%**	**100%**

					Kabupaten Yang Dibina							
219	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	400.000.000,00	1	399.999.950,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi**	**%**	**70**	**2.245.000.000,00**	**76**	**2.236.804.725,00**	**108.57%**	**99.63%**
222	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pagelaran Kesenian Tradisional Kabupaten**	**Kali**	**8**	**2.245.000.000,00**	**8**	**2.236.804.725,00**	**100%**	**99.63%**
222	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	7	2.245.000.000,00	7	2.236.804.725,00	100%	99.63%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,63
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,63
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Peningkatan Kreativitas Pengembangan Kesenian Tradisional**	**%**	**91**	**463.320.000,00**	**95**	**461.323.400,00**	**104.40%**	**99.57%**

222	**3**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksannya Pembinaan Pelaku Kesenian Tradisional Kabupaten**	**Orang**	**80**	**463.320.000,00**	**80**	**461.323.400,00**	**100%**	**99.57%**
222	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	45	463.320.000,00	45	461.323.400,00	100%	99.57%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,57
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,57
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal**	**%**	**55**	**468.700.000,00**	**57**	**461.782.211,00**	**103.64%**	**98.52%**
222	**4**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah Lokal Kabupaten**	**Kegiatan**	**3**	**468.700.000,00**	**3**	**461.782.211,00**	**100%**	**98.52%**
222	4	2.01	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	2	468.700.000,00	2	461.782.211,00	100%	98.52%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,52
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	98,52
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pemeliharaan**	**%**	**68**	**200.000.000,00**	**68**	**190.812.500,00**	**100%**	**95.41%**

					BendaSitus dan Kawasan Cagar Budaya							
222	**5**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya Cagar Budaya Kabupaten**	**Kegiatan**	**5**	**200.000.000,00**	**5**	**190.812.500,00**	**100%**	**95.41%**
222	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	13	200.000.000,00	13	190.812.500,00	100%	95.41%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	95,41
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	95,41
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten**	**%**	**71**	**100.000.000,00**	**94**	**90.735.500,00**	**132.39%**	**90.74%**
222	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemeliharaan Museum Kabupaten**	**Kegiatan**	**1**	**100.000.000,00**	**1**	**90.735.500,00**	**100%**	**90.74%**
222	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	100.000.000,00	1	90.735.500,00	100%	90.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	90,74
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	90,74
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Satuan**	**77.3**	**6.460.685.109,00**	**73**	**5.959.434.128,00**	**94.44%**	**92.24%**
326	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	**Dokumen**	**23**	**58.000.000,00**	**23**	**57.027.800,00**	**100%**	**98.32%**

326	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	23.000.000,00	6	22.934.900,00	100%	99.72%
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	12.000.000,00	2	11.703.000,00	100%	97.53%
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	23.000.000,00	15	22.389.900,00	100%	97.35%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,20
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59**	**4.026.721.840,00**	**59**	**3.761.966.381,00**	**100%**	**93.43%**
326	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	4.001.721.840,00	41	3.738.232.781,00	100%	93.42%
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5.000.000,00	12	4.811.900,00	100%	96.24%
			4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	5.500.000,00	12	5.219.000,00	100%	94.89%
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.500.000,00	1	6.918.000,00	100%	92.24%
			6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	7.000.000,00	2	6.784.700,00	100%	96.92%

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	94,74
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Belanja Barang/Jasa Modal dan Belanja Lainnya**	**%**	**100**	**561.745.205,00**	**100**	**556.013.656,00**	**100%**	**98.98%**
326	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	26.574.510,00	2	26.040.600,00	100%	97.99%
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	57.835.225,00	2	56.450.715,00	100%	97.61%
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	18.166.260,00	1	17.630.561,00	100%	97.05%
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	78.191.730,00	12	77.302.780,00	100%	98.86%
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	176.110.180,00	12	174.271.295,00	100%	98.96%
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	204.867.300,00	12	204.317.705,00	100%	99.73%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	98,37
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**%**	**100**	**281.047.349,00**	**100**	**269.560.330,00**	**100%**	**95.91%**
326	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	5	242.365.775,00	5	231.135.300,00	100%	95.37%

					Mesin Lainnya yang Disediakan							
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	38.681.574,00	7	38.425.030,00	100%	99.34%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	97,36
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor**	**%**	**100**	**1.304.310.960,00**	**100**	**1.092.394.949,00**	**100%**	**83.75%**
326	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	111.788.110,00	12	111.172.599,00	100%	99.45%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	406.402.706,00	12	363.801.350,00	100%	89.52%
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	17.944.000,00	6	17.360.400,00	100%	96.75%
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	768.176.144,00	12	600.060.600,00	100%	78.11%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	90,96
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Pemeliharaan Kantor**	**%**	**80**	**228.859.755,00**	**80**	**222.471.012,00**	**100%**	**97.21%**
326	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	35	113.200.408,00	35	112.481.912,00	100%	99.37%

				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	15.350.000,00	11	11.310.100,00	100%	73.68%
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	100.309.347,00	6	98.679.000,00	66.67%	98.37%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											88,89	90,47
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi	Sangat Tinggi
326	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata**	**%**	**78**	**10.804.926.000,00**	**90**	**10.246.272.690,30**	**115.38%**	**94.83%**
326	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Destinasi**	**DTW**	**10**	**2.112.500.000,00**	**10**	**2.087.480.291,30**	**100%**	**98.82%**
326	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	9	2.112.500.000,00	9	2.087.480.291,30	100%	98.82%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,82
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Ditingkatkan**	**DTW**	**3**	**7.569.426.000,00**	**3**	**7.134.032.689,00**	**100%**	**94.25%**
326	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Lokasi	3	7.569.426.000,00	3	7.134.032.689,00	100%	94.25%

					Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	94,25
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata**	**Orang**	**250**	**1.123.000.000,00**	**250**	**1.024.759.710,00**	**100%**	**91.25%**
326	2	2.04	11	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	6	1.123.000.000,00	6	1.024.759.710,00	100%	91.25%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	91,25
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Wisata**	**%**	**37**	**1.383.349.975,00**	**27**	**1.311.336.350,00**	**72.97%**	**94.79%**
326	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Obyek Pariwisata yang dipasarkan**	**DTW**	**38**	**1.383.349.975,00**	**38**	**1.311.336.350,00**	**100%**	**94.79%**
326	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	275.000.000,00	3	204.649.200,00	100%	74.42%
			4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	8.349.975,00	2	7.722.000,00	100%	92.48%

			7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	1.100.000.000,00	4	1.098.965.150,00	100%	99.91%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	88,94
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	94,79
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan**	**%**	**37**	**2.500.517.500,00**	**45**	**2.384.644.017,00**	**121.62%**	**95.37%**
326	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pelaku Pariwisata Yang Dibina**	**Orang**	**365**	**2.500.517.500,00**	**365**	**2.384.644.017,00**	**100%**	**95.37%**
326	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	87.500.000,00	2	85.294.400,00	200%	97.48%
			6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	450	2.413.017.500,00	450	2.299.349.617,00	100%	95.29%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											150,00	96,39
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	95,37
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)			106,04	96,74
Predikat kinerja seluruh program(%)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Total	**30.531.498.584,00**	**29.238.477.013,30**		
Persentase Realisasi Anggaran		**95.76%**		
Predikat		**Sangat Tinggi**		

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran PAK tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 23.981.424.391,- terurai dalam 12 program dan 20 kegiatan,dengan 42 sub kegiatan diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 maupun perkiraan capaian tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD;
b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Pacitan tahun 2021 – 2026, maka pada tahun 2025 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis, dengan arah kebijakan :
   - Pendidikan Formal, Informal dan Pelatihan teknologi infromasi maupun media instansi;
2. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana dan pelaksana tekhnis serta pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan:
   - Pelibatan stakeholder dalam proses Perencana dan Kebijaksanaan Politik.
   - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.
3. Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan:
   - Meningkatkan Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Jawa Timur;

- Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas Kabupaten Pacitan dalam RPJMD serta RKPD;
- Pembangunan data base perencana, evaluasi dan pembiayaan baik yang dengan sistem yang eksisting di SKPD pemerintah Kabupaten Pacitan maupun sistem yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan hal ini dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasioanal dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selaku Dinas Tekhnis mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berikut kami sajikan tabel keterkaitan antara visi, misi tujuan dan sasaran renstra tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

TABEL. 2.2.1

KETERIKATAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat Daerah (MATRIKS RENSTRA)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan, Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Pelayanan PD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	76	77,08	78	78, 50
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	1. Lenght of Stay 2. % Peningkatan Desa Wisata dan POKDARWIS	Lama Hari Tinggal Wisatawan yang beraktifitas di DTW Kab.Pacitan berdasarkan Survey/ Pengamatan $\frac{\text{Jumlah Desa Wisata yang mendapat SK Bupati}}{\text{Jumlah Potensi Desa Wisata yang ada}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah POKDARWIS yang mendapatkan SK dari Kadis}}{\text{Jumlah Potensi POKDARWIS yang ada}} \times 100\%$	1,2 hari 40 %	1,3 hari 45 %	1,3 hari 57%	1,4 hari 57%	1,5 hari 58%

					❖ Dari hasil ke 2 perhitungan tersebut di bagi 2=….%					
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggarakan tahun ini – Tahan Kemarin: Tahun kemarin x 100	45 %	47 %	59%	60%	60%
			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	Jumlah Event Pemuda pemuda yang di ikuti/ selenggarakan tahun ini-Jumlah event Pemuda Tahun Kemarin: Jumlah Event tahun kemarin x 100	20 %	25 %	37%	45%	50%
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah event Olahraga yang diikuti tahun ini- tahun kemarin : Tahun kemarin x 100	55 %	60 %	63%	63%	63,5%

Tabel Capaian Kinerja Disparpora
Tahun 2017 s/d 2024

Urusan Pariwisata

No	Indikator	Capaian Kinerja								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Kunjungan Wisata	1.750.537	1.659.731	2.305.119	860.397	834.419	1.566.186	1.306.817	1.144.302	Turun
2.	Konstribusi PAD dari Sektor Pariwisata	9.985.077.500	8.707.909.000	1.305.9630.000	5.278.178.000	4.835.091.000	11.254.475.000	9.163.025.700	8.587.629.500	Turun
3.	Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	30 %	44,8 %	71.71	32,47	27,8	87,6	37%	27%	Turun
4.	Prosentase Pengelolaan Destinasi Wisata di Kabupaten Pacitan	46 %	81 %	63	63	63	67	78%	90%	Tercapai

Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Capaian Kinerja								Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah Organsasi Olahraga	25	27	27	27	28	28	28	29	Naik
2.	Jumlah Kegiatan Olahraga	32	33	33	32	34	36	36	60	Naik
3.	Jumlah Gelanggang/balai remaja selain milik swasta	186	186	187	188	190	190	190	190	Tetap
4.	jumlah Lapangan Olah Raga	175	175	176	177	181	181	181	182	Tetap
5	Prosentase Cabang Olahraga yang berprestasi	62	68	66	64,28	67	67.8	67	71	Nalk

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi serta Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. **Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata**

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan adalah sebagai berikut :

   a. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.
   b. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenitas belum memadai.
   c. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.
   d. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan
   e. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata.

2. **Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata**

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang promosi adalah sebagai berikut :

   a. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
   b. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet
   c. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik.
   d. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
   e. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi.
   f. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.
   g. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi.
   h. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan
   i. Penataan PKL yang belum maksimal. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata
   j. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan.
   k. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan

3. Permasalahan Bidang Kebudayaan

1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara
2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal
3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni

4. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pemuda adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
2. Terbatasnya penyelenggaraan kegitan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.
4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.

5. Permasalahan Bidang Olahraga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang olahraga adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan.
3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan.
4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya.
5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
A.	**Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata**		
	1. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal. 2. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenitas belum memadai. 3. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi. 4. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan 5. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata	1. Memiliki Obyek Wisata yang Unik 2. Akses jalan menuju DTW 3. Dukungan Pihak terkait 4. Kualitas SDM 5. Perlunya dukungan dari pihak lain	1. Kondisi Pendanaan 2. Bantuan Pemerintah 3. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang mudah dijangkau 4. Perubahan Minat Wisatawan dalam berkunjung 5. Perlunya Inovasi
B.	**Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata**		
	1. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi. 2. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan 3. Penataan PKL yang belum maksimal. 4. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata 5. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan. 6. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan 7. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi. 8. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet 9. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik. 10. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah. 11. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi. 12. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.	a. Masih Kurangnya Tenaga Ahli dalam membina SDM Kepariwisataan b. Kurangnya Inovasi dalam Promosi wisata c. Tenaga IT pada Dinas Budparpora Masih Kurang	d. Sulitnya Koordinasi antara pedagang dan Perangkat Daerah dalam mencapai Kesepakatan dan Kesepahaman e. Kunjungan Wisata
C.	**Permasalahan Bidang Kebudayaan**		
	1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara 2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal 3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni budaya	1. Masih Kurangnya Tenaga Ahli yang berkaitan dengan situs /cagar budaya 2. Kurangnya Kemamapuan dalam menggali potensi budaya serta kemasan budaya	1. Kurangnya promosi Seni dan Budaya ditingkat propinsi maupun pusat serta internasional

		yang bisa menarik minat para wisatawan	
D.	**Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**		
	1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif. 2. Terbatasnya penyelenggaraan kegitan guna peningkatan peran serta kepemudaan. 3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal. 4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas. 5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi	1. Masih Kurangnya kegiatan kepemudaan 2. Kurangnya Kreatifitas Pemuda dalam beriwira usaha	1. Ketrampilan Kepemudaan 2. Banyaknya pemuda yang meratau ke luar kota
	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan. 3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan. 4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya. 5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain. 6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga	1. Masih Banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang belum mendapatkan pemeliharaan dan ri Pemerintah Daerah	1. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olah raga

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan akan menambah dan menyesuaikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyaraka terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PACITAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA						**26.242.977.731**							**24.839.000.000**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.335.000.000**							**4.960.000.000**
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.975.000.000**							**3.435.000.000**
1,	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**75.000.000**						**-**	**625.000.000**

	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	80 Orang			-	75.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	80 Orang	625.000.000
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	75.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		625.000.000
2,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**2.550.000.000**						**-**	**2.450.000.000**

	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	-	775.000.000
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				6 Unit	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		775.000.000

	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	5 kegiatan			-	1.000.000.000			-	Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	5 kegiatan	825.000.000
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	1.000.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		825.000.000
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	23 Cabor			-	1.500.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	22 Cabor	850.000.000
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													

			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	1.500.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		850.000.000
3,	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**	**-**			**-**	**350.000.000**						**-**	**360.000.000**

	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	2 kegiatan			-	350.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	2 kegiatan	360.000.000
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	350.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		360.000.000

	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.360.000.000**							**1.525.000.000**
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.935.000.000**						**-**	**675.000.000**
	2.22.02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	37 Kali 37 Kali			-	1.935.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	9 Kali 9 Kali	675.000.000
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													

			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	1.935.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, HIBAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		675.000.000
2,	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000**						**-**	**150.000.000**
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	450 Orang 90 orang			-	20.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	90 Orang 90 orang	150.000.000

	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				105 Orang	20.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		150.000.000
3,	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**			**-**	**1.360.000.000**						**-**	**275.000.000**
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	4 kegiatan 16 Kegiatan			-	1.360.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-	4 kegiatan 4 Kegiatan	275.000.000
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah													

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				4 Unit	1.360.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, HIBAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		275.000.000
4,	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000**						**-**	**250.000.000**
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	6 kegiatan 26 Kegiatan			-	20.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	6 kegiatan 6 Kegiatan	250.000.000
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													

			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	20.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		250.000.000
5,	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**	**-**			**-**	**25.000.000**						**-**	**175.000.000**
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	5 Kegiatan 1 kegiatan			-	25.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	1 Kegiatan 1 kegiatan	175.000.000

	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	25.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		175.000.000
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**19.907.977.731**							**19.879.000.000**
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**19.907.977.731**							**19.879.000.000**
1,	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.465.267.731**						**-**	**7.099.000.000**

	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen			-	55.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	23 Dokumen	68.000.000
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	23.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		26.000.000

	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	14.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		16.000.000
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	18.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		26.000.000
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen			-	4.031.961.871			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	59 Dokumen	4.092.000.000
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.011.961.871	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		4.060.000.000
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		7.500.000

	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		7.500.000
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		8.500.000
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		8.500.000

	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	492.559.227			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	100 %	597.000.000
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	32.274.582	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		25.000.000

	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.639.024	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		57.000.000
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	49.930.705	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		25.000.000
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.458.516	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		75.000.000

	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	120.836.400	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		190.000.000
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	165.420.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		225.000.000
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	73.818.478			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	100 %	675.000.000
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		310.000.000
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	36.285.678	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		310.000.000

	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	37.532.800	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		55.000.000
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	1.262.128.510			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	100 %	1.357.000.000

	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	94.325.900	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		155.000.000
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	453.939.550	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		515.000.000
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	27.187.800	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		17.000.000

	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	686.675.260	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		670.000.000
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			-	549.799.645			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	80 %	310.000.000

	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	102.730.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		60.000.000
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	40.454.334	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		25.000.000
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	32.450.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		110.000.000

	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	374.165.311	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		115.000.000
2,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**9.947.426.000**						**-**	**9.100.000.000**

	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	9 DTW			-	1.855.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	9 DTW	525.000.000
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				11 Unit	1.855.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA INSENTIF DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		525.000.000

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	9 DTW			-	6.454.426.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	9 DTW	7.250.000.000
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	6.454.426.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		7.250.000.000

	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	1250 Orang			-	1.638.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	300 Orang	1.325.000.000
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1.638.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		1.325.000.000

3,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**1.100.000.000**						**-**	**1.000.000.000**
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	20 DTW			-	1.100.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	20 DTW	1.000.000.000
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		250.000.000
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	25.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		75.000.000

	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	1.025.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		675.000.000
4,	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**2.395.284.000**						**-**	**2.680.000.000**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pengembangan destinasi prioritas merupakan bentuk perwujudan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011[4]. PP inilah yang menjadi dasar dalam pembangunan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dan mewujudkan industri pariwisata yang mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pembangunan di lima destinasi super prioritas (DSP) secara umum meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berfokus pada pembangunan amenitas (amenity), aksesibilitas (accessibility), dan daya tarik wisata (attractions). Sementara itu pembangunan non-fisik termasuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengembangan travel pattern untuk upaya promosi hingga ekonomi kreatif di masing-masing destinasi.

Enam poin penting untuk dibenahi di masing-masing DSP, di antaranya:

1. Pengaturan dan pengendalian tata ruang;
2. Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata;
3. Pembangunan fasilitas di lokasi wisata termasuk penataan pedagang kaki lima hingga peningkatan kualitas dan kebersihan toilet (fasilitas sanitasi) di tempat wisata;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Pemasaran produk lokal;
6. Promosi besar-besaran.

Untuk mendukung rencana tersebut maka pembangunan infrastruktur di setiap kawasan DSP harus dilakukan secara terpadu melalui sebuah rencana induk pembangunan. Pembangunan jalan, penataan kawasan, penyediaan air baku dan bersih, pembangunan sanitasi, pengelolaan sampah, perbaikan destinasi, hingga hunian penduduk harus dilakukan secara terpadu.

Lima (5) Daerah Super Prioritas di Indonesia yang telah ditentukan oleh KEMENPAREKRAF yaitu:

1. Danau Toba (Sumatera Utara)
2. Likupang (Sulawesi Utara)
3. Borobudur (Jawa Tengah –DIY)
4. Mandalika (NTB)
5. LabuanBajo (NTT)

Dari ke Lima Daerah Super Prioritas tersebut Kabupaten Pacitan mendukung DSP Borobudur(Jawa Tengah_DIY). Untuk itu dalam penerapannya, pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada. Sejalan dengan itu melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan, serta ditambah aspek pengelolaan secara profesional dengan perintisan destinasi pariwisata, pembangunan desa wisata, pembangunan amenitas kawasan wisata, dan pembangunan dalam wilayah dan kawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan olahraga di Kabupaten Pacitan.

Tujuan

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

1) Terselenggaranya Tata kelola dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga dengan indikator tujuan Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2) Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dengan indikator tujuan Jumlah Kunjungan Wisata.
3) Meningkatkan pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah Dengan indikator :
   a) Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah
   b) Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam even kepemudaan dan keolahragaan

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria ”SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

   - **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Dinas Pariwisata, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana penunjangnya., dengan program sebagai berikut :

   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Usaha di Sektor Pariwisata**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

   1. Length of Stay
   2. % Peningkatan Jumlah Desa Wisata dan Pokdarwis

   Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Pariwisata, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata, Peningkatan sarana dan Prasarana Pariwisata, gelar atraksi wisata. yang diwujudkan dengan Program

   1. Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   3. Program Pemasaran Pariwisata

3. **Sasaran 3 Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni Budaya dan Sejarah**

   Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

   - Prosentase Peningkatan Pagelaran Seni dan Budaya yang diselenggarakan

     Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Peningkatan SDM Pelaku Seni, Budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Pacitan serta Menggali seni, budaya dan daerah untuk dilestarikan melalui pagelaran seni, pembinaan pelestari budaya dan sejarah, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

     1. Pengembangan Kebudayaan
     2. Pengembangan Kesenian Tradisional
     3. Pembinaan Sejarah
     4. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
     5. Pengelolaan Permuseuman

4. Sasaran 4 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan olahraga

Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan keikutsertaan peuda dalam event kepemudaan

   Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Peningkatan SDM Kepemudaan Melalui Pembinaan dan Pelaksanaan Paskibraka, Lomba-lomba yang bersifat Kepemudaan sehingga menumbuhkan semangat kepemudaan untuk berwirausaha dan berprestasi yang didukung dan diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

   1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   2. Program Pegembangan Kapasitas Kepramukaan

2. Prosentase Peningkatan keikutsertaan atlet dalam event keolahragaan

   Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Pemasyarakatan olah raga dan pembinaan olah raga prestasi, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

   1. Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan cascading Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga dan dalam tabel T.4.1 sebagaimana berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (MATRIKS RENSTRA)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan,Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Pelayanan PD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	76	77,08	78	78, 50
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	3. Lenght of Stay 4. % Peningkatan Desa Wisata dan POKDARWIS	Lama Hari Tinggal Wisatawan yang beraktifitas di DTW Kab.Pacitan berdasarkan Survey/ Pengamatan Jumlah Desa Wisata yang mendapat SK Bupati / Jumlah Potensi Desa Wisata yang ada X 100% = ... Jumlah POKDARWIS yang mendapatkan SK dari Kadis / Jumlah Potensi POKDARWIS yang ada X 100% = ❖ Dari hasil ke 2 perhitungan tersebut di bagi 2=….%	1,2 hari 40 %	1,3 hari 45 %	1,3 hari 57%	1,4 hari 57%	1,5 hari 58%
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta	Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggarakan tahun ini – Tahan Kemarin: Tahun kemarin x 100	45 %	47 %	59%	60%	60%

	Prestasi Pemuda dan Olah Raga	, Kepemudaan dan Olahraga								
			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	Jumlah Event Pemuda pemuda yang di ikuti/ selenggarakan tahun ini-Jumlah event Pemuda Tahun Kemarin: Jumlah Event tahun kemarin x 100	20 %	25 %	37%	45%	50%
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah event Olahraga yang diikuti tahun ini-tahun kemarin : Tahun kemarin x 100	55 %	60 %	63%	63%	63,5%

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA DISPARBUDPORA Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan dan teknis;

   Tujuan :

   Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana dan Tehnis melalui kursus jangka pendek / fungsional informal.

   Sasaran :

   Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis yang Profesional.

2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ;

   Tujuan :

   Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.

   Sasaran :

   Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

3. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu ;

   Tujuan :

   Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secaraterpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

   Sasaran :

   Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah,Regional dan Nasional.

4. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi ;

   Tujuan :

   Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten.

   Sasaran :

   Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga meliputi 12 (dua belas) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan:**

   A. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :**

      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKP-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   B. **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

      Sub Kegiatan :

      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Pelaksanaan Oenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD
      e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

   C. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

      Sub Kegiatan

      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bngunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d. Penyiediaaan Bahan Logistik Kantor
      e. Penyiediaan Barang cetakan dan Penggandaan
      f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

E. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Operasional dan Lapangan .
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kentor atau bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan

Kegiatan :

a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaann
b. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organsasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Singkornisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda aatau organisasi kepemudaan melalui
b. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan :

A. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yeng menjadi kewenangan Daerah Kabupaten kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi Singkronisasi dan pelaskanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/kota

B. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

a. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan

C. Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan :

A. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

A. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

B. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Pariwisata.
b. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

C. Pengelolaan Kawasan Stategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan

A. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan stretegis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri
b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota aik dalam dan luar negeri
c. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatfi

Kegiatan :

A. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
b. Peningkatan Peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
c. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

8. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan

A. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Perlindungan pengembangan,Pemenfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya

9. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Kegiatan :

A. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan

a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
b. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manjsia Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

10. **Program Pembinaan Sejarah**

Kegiatan :

A. Pembinaan Sejarah Lokaldalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

11. **Program Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya**

Kegiatan :

A. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Penetapan Cagar Budaya

12. **Program Pengelolaan Permuseuman**

Kegiatan

A. Pengelolaaan Museum Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada tersebut diatas, selanjutnya dalam mencapai mendukung Visi dan Misi Bapak Bupati Periode 2021-2026. Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 .

Dengan indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

4.1 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi apakah berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *benegiciaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau ”penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (*output*).

4.2 Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan kelompok sasaran ini meliputi :

Kelompok sasaran pembangunan bidang pariwisata :

1. pelaku pariwisata (seperti hotel, restoran/rumah makan, biro perjalanan wisata/travel, warnet dan sebagainya)
2. wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara
3. Pemandu Wisata

Kelompok sasaran pembangunan bidang pemuda :

1. lembaga kepemudaan dan pemuda di Pacitan
2. OSIS, BEM, Gerakan Pramuka, Pondok Pesantren, Remaja Masjid, dan Pecinta Alam di Pacitan
3. Pemuda Pelopor, SP3, dan KUPP di Pacitan
4. Penilik Pemuda

Kelompok sasaram Bidang Kebudayaan :

1. Para Seniman
2. Para Budayawan
3. Para Pelaku Pelestari Sejarah
4. Pengelolaan Museum

Kelompok sasaran pembangunan bidang olahraga :

1. Guru olahraga, pelatih, wasit cabang olahraga prestasi di Pacitan
2. Klub olahraga prestasi di Pacitan
3. Pelajar SD/MI, SMP, SMA mahasiswa di Pacitan
4. Atlet PPLD dan atlet prestasi di Pacitan
2. Penyandang cacat dan masyarakat lanjut usia di Pacitan
3. Pondok pesantren di Pacitan
4. Pengelola organisasi olahraga dan pengurus cabang olahraga di Pacitan
5. Klub-klub olahraga rekreasi yang di masyarakat

6. Penilik Olahraga
7. Industri Olahraga
8. Tokoh Olahraga

3.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pacitan dan dana DAK, yang artinya bergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten Pacitan dan Dana dari Propinsi, Maupun Pusat

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa seluruh program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pendanaan indikatif selalu dicantumkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Dengan formulasi penghitungan Program dan Kegiatan seperti tebel dibawah ini:

FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	(Jmlh prosentase Kunjungan wisata Tahun ini: Jml Prosentase Kunjungan wisata Tahun Dasar)x 100
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	(Jmlh DTW yang dikelola PEMDA yang mendapat anggaran rehabilitasi : Jml DTW Yang dikelola Oleh PEMDA)x 100
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	(Event Tahun ini – Event tahun lalu : Event tahun lalu)x 100
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi	(Jumlah Vestifal Yang difasilitasi : Jmlh Festifal yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Peningkatan Kreatifitas Pengembangan Kesenian Tradisional	(Jumlah Kreatifitas kesenian tradisional : Jmlh

		Kesenian yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	(Pelestari sejarah yang dibina tahun ini- Pelestari sejarah yang dibina tahun lalu : Pelestari sejarah tahun lalu)X 100
Program Pelestarian dan Pengelolaaan Cagar Budaya	Prosentase Pemeliharaan Benda, Situs danKawasan Cagar Budaya	(Objek yang diduga Cagar Budaya- Cagar Budaya yang dilestarikan: Objek diduga Cagar Budaya) x 100
Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten	(Benda Museum yang dipelihara tahun ini – Benda Museum yang dipelihara tahun lalu: Benda Museum yang dipelihara tahun lalu) x 100
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Rekapitulasi Pemuda Pelopor dan Berprestasi
Program Pengembangan KapasitasKepramukaan	Presentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	(Jumlah Kegiatan Kepramukaan tahun ini - Tahun lalu : Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tahun lalu)x 100
Program Pengembangan Kapsitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	(Jumlah Cabor yang mendapatkan Prestasi : Jumlah Cabor yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Nilai SAKIP PD	Hasil Penilaian SAKIP dari Inspektorat

Adapun program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan perubahan ke 2 dijelaskan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

REKAP RINCIAN BELANJA 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA						**17.459.268.469,00**							**33.009.590.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.368.721.443,00**							**11.450.030.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**4.110.082.220,00**							**8.225.030.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	-	-			-	**461.637.500,00**						-	**725.030.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	4 Kegiatan			-	461.637.500,00			-	-	-	3 Kegiatan	725.030.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan			1 Kegiatan	461.637.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	3 Kegiatan	725.030.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	-	-			-	**3.225.092.322,00**						-	**7.000.030.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Perdidikan pada Jenjang Perdidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Kegiatan			-	131.112.600,00			-	-	-	6 Kegiatan	2.600.030.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit			2 Unit	131.112.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	6 Unit	2.600.030.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Kegiatan			-	980.087.862,00			-	-	-	6 Kegiatan	1.650.030.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan			2 Kegiatan	980.087.862,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Kegiatan	1.650.030.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	-	21 Cabor			-	2.113.991.860,00			-	-	-	21 Cabor	2.750.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				35 Orang	2.113.991.860,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.750.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	-	-			-	**423.352.398,00**						-	**500.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	2 Kegiatan			-	423.352.398,00			-	-	-	2 Kegiatan	500.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	423.352.398,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.258.642.223,00**							**3.225.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**1.400.000.000,00**						-	**2.850.000.000,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.400.000.000,00			-	-	-	-	2.850.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				11 Objek	1.400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.850.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	-	-			-	**233.300.000,00**						-	**35.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Kegiatan			-	233.300.000,00			-	-	-	4 Kegiatan	35.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang			80 Orang	233.300.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	25 Orang	35.000.000,00	DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	-	-			-	**150.000.000,00**						-	**250.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Kegiatan			-	150.000.000,00			-	-	-	4 Kegiatan	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit			4 Unit	150.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	-	-			-	**12.593.007,00**						-	**35.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	13 Objek			-	12.593.007,00			-	-	-	13 Objek	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	12.593.007,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	-	-			-	**222.549.216,00**						-	**55.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	2400 Orang			-	222.549.216,00			-	-	-	2100 Orang	55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit			1 Unit	222.549.216,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Unit	55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.090.544.026,00**							**21.159.590.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**11.090.544.026,00**							**21.159.590.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**8.916.267.217,00**						-	**8.159.590.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen			-	65.000.000,00			-	-	-	23 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan			17 Laporan	55.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	17 Laporan	45.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen			-	4.037.551.163,00			-	-	-	59 Dokumen	4.022.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan			35 Orang/bulan	4.012.551.163,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	41 Orang/bulan	4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	533.164.096,00			-	-	-	100 %	631.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	42.485.028,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Paket	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	57.374.849,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Paket	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	40.722.681,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	78.941.740,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Paket	72.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	124.522.797,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Paket	122.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	189.507.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	187.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	92.789.895,00			-	-	-	100 %	124.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			12 Unit	92.789.895,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	7 Unit	124.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	3.508.109.293,00			-	-	-	100 %	3.559.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	94.364.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	87.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	417.167.869,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	419.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			12 Laporan	55.250.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	6 Laporan	53.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	2.941.337.024,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			-	309.262.771,00			-	-	-	80 %	313.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit			1 Unit	99.950.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	35 Unit	105.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit			45 Unit	70.247.867,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	11 Unit	64.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			2 Unit	32.235.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	9 Unit	34.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit			1 Unit	107.129.504,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	7 Unit	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	-	-			-	**1.273.559.130,00**						-	**11.150.000.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	10 DTW			-	977.715.924,00			-	-	-	10 DTW	5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Unit			11 Unit	977.715.924,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	10 Unit	5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	295.943.206,00			-	-	-	-	6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	295.943.206,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	-	-			-	**900.000.000,00**						-	**1.400.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	38 DTW			-	900.000.000,00			-	-	-	38 DTW	1.400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	Perguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Perguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi			5 Promosi	750.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Promosi	1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	-	-			-	**340.617.679,00**						-	**250.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	340.617.679,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	150.006.949,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				350 Orang	190.611.730,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**0,00**	
	XXX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**0,00**	
1.	**XXX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**0,00**						-	**0,00**	
	XXX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	0,00			-	JATIM SEJAHTERA Memperceat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kelimpangan	-	100 %	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	XXX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	JATIM SEJAHTERA Memperceat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kelimpangan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		J U M L A H						**17.459.268.469,00**							**33.005.500.000,00**	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) awal Tahun 2026 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

.

Rencana Kerja (RENJA) awal Tahun 2026 Dinas, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OLahraga Kabupaten Pacitan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (RENJA) awal juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OLahraga Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Ooooo00000ooooO

RENCANA KERJA

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Dewi Sartika No.19A Sidoharjo, Pacitan, Jawa Timur 63514

Telp/Fax. (0357) 881459 Web: www.pertanian.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 400.13.1/ /KPTS/408.30/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1), Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati dengan Keputusan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Mengingat :

1. INPRES Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 150 Tahun 2021 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 209 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026
10. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 000.7.6.1/843/408.53/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pengesahan ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

SUGENG SANTOSO, S.P., MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741129 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan Tahun 2026 telah dapat diselesaikan. Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan Pembangunan pada tahun 2026 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja (RENJA) yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sektor pertanian pada Tahun 2026, sehingga dapat Meningkatkan produksi pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian di Kabupaten Pacitan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Sebagai akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) ini, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pacitan, 8 Agustus 2025
Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

SUGENG SANTOSO, S.P.,M.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741129 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **4**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **41**
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 41
3.3. Program dan Kegiatan 42

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **47**
BAB V. PENUTUP **59**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat sebagai Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu tahun). Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan terdiri dari:
   a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
   b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
   d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah /lintas Perangkat Daerah;
   e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
   f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berpedoman kepada:
   a. Renstra Perangkat Daerah, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
   b. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup beberapa hal sebagai berikut:
   a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah:

11. INPRES Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
12. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
16. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 150 Tahun 2021 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 209 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
19. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
20. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 000.7.6.1/843/408.53/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Kabupaten Pacitan

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 .
2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

Bab I. Pendahuluan berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal perangkat daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Berisikan penjelasan telaahan terhadap kebijakan nasional; tujuan dan sasaran renja perangkat daerah; program dan kegiatan .

Bab IV. Penutup. Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap renja perangkat daerah dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan renja perangkat daerah dibandingkan dengan capaian target kinerja renstra perangkat daerah. Hasil evaluasi realisasi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Jumlah Program yang dilaksanakan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 adalah 11 program. Dari keseluruhan program tersebut, terdapat satu program yang indikator kinerjanya tidak mencapai target, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Dalam program ini, satu dari tujuh indikator tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni indikator persentase peningkatan ketersediaan pangan ikan, yang hanya mencapai 85,71% dari target sebesar 91%, atau setara dengan 94,19% dari target kinerja yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target terdiri dari 4 program, meliputi:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Realisasi kinerja dengan indikator desa mandiri pangan tahun 2024 sebesar 100% tercapai 1 (satu) desa dari sasaran (target) kinerja 1 (satu) desa. Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Realisasi kinerja dengan indikator Persentase peningkatan kelompok yang mendapatkan sarana tanaman pangan dan perkebunan sebesar 100% tercapai 52 % dari target 52%. Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu sebagai berikut:
    i. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
    ii. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

iii. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

c. Program Perizinan Usaha Pertanian. Realisasi kinerja dengan indikator Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi sebesar 100% tercapai 100% dari target 100%. Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Penyuluhan Pertanian. Realisasi kinerja pada program penyuluh pertanian ini memiliki 1 dari 4 indikator yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebesar 100% tercapai 10 pelaku usaha dari target 10 pelaku usaha.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target terdiri dari 8 program, meliputi:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Realisasi Kinerja dengan indikator Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Beras sebesar 112,24% tercapai 104,38% dari sasaran target 93%. Realisasi Kinerja dengan Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Jagung sebesar 119,60% tercapai 116,01% dari sasaran target 97%. Realisasi Kinerja dengan indikator Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan kedelai sebesar 112,55% tercapai 104,67% dari sasaran target 93%. Realisasi Kinerja dengan indikator Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan daging sebesar 125,56% tercapai 105,47% dari sasaran target 84%. Realisasi Kinerja dengan indikator Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan telur sebesar 140,71% tercapai 118,2% dari sasaran target 84%.

   Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

   i. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

   ii. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota.

   iii. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Realisasi Kinerja dengan indikator Persentase tertanganinya kerawanan pangan sebesar 300% tercapai 3 desa

dari target 1 desa. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan. Realisasi kinerja dengan indikator Persentase pangan yang aman sebesar 103,21% tercapai 96,5% dari target kinerja 93,5%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja dengan indikator Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 103,79% tercapai 78,80% dari target kinerja 75,92%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:
   i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   iii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   iv. Administrasi umum Perangkat Daerah
   v. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Realisasi kinerja dengan indikator Prasarana pertanian yang digunakan sebesar 125% tercapai 78,80% dari target kinerja 80%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:
   i. Pengembangan Prasarana Pertanian
   ii. Pembangunan Prasarana Pertanian

f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi kinerja dengan indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 110% tercapai 1,1% dari target kinerja 1%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:
   i. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   ii. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

g. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Realisasi kinerja dengan indikator Persentase fasilitasi penanggulangan bencana sebesar 101,33% tercapai 76% dari target kinerja 75%. Kegiatan yang mendukung

indikator ini adalah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

h. Program Penyuluhan Pertanian. Realisasi kinerja dengan Persentase Peningkatan kelas kelompok utamasebesar 413,04% tercapai 13,3% dari target kinerja 3,22%. Realisasi kinerja dengan Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Mendapat Pembinan sebesar 120% tercapai 30% dari target kinerja 25%. Realisasi kinerja dengan Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani sebesar 129,75% tercapai 4,23% dari target kinerja 3,26%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja

Pada tahun 2024 terdapat satu indikator pada satu program yang tidak tercapai target kinerjanya, yaitu Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Ikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim seperti kenaikan suhu air laut, yang memengaruhi habitat dan migrasi ikan.

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian target program

Penurunan ketersediaan pangan ikan akibat dari perubahan ikllim ini akan menjadi faktor menurunnya ketahanan pangan. Implikasi yang timbul akibat perununan ketersediaan pangan ikan adalah Penurunan asupan protein hewani pada masyarakat yang bisa menyebabkanmasyarakat akan mengalami kekurangan gizi dan stunting.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor penyebab tersebut

Pada tahun mendatang dalam sebagai upaya untuk mengatasi penurunan presentase ketersediaan pangan ikan adalah dengan mengupayakan integrasi pertanian dan perikanan seperti mina padi yang memungkinkan petani memanfaatkan lahan pertanian sekaligus untuk membudidayakan ikan, pemanfaatan Limbah organik dari pertanian dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami atau pakan alternatif untuk perikanan, infrastruktur seperti jalan pertanian dan irigasi juga kan mendukung distribusi dan manajemen tambak ikan. Hal tersebut akan membantu peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun sebelumnya terlampir pada tabel 2.1 berikut ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian s/d Tahun 2024 Kabupaten Pacitan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Mandiri Pangan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**		**4**	**80%**
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pangan Yang Berkembang	1	1	1	8	100	1	11	220%
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	1	1	1	100	2	4	66,67%
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Meningkatnya ketersediaan pangan ikan**	**87**	**100**	**91**	**85,71**	94,2	**96**	**94,2**	**102,39%**
2.09.03		**Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Kedelai**	**89**	**100**	**93**	**104,67**	112,5	**96**	**104,67**	**112,54%**
		Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Daging	80	100	84	105,47	125,6	89	105,47	122,63%
		Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Beras	92	99	93	104,38	112,2	97	104,38	111,04%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Telur	78	100	84	118,20	140,7	93	118,20	139%
		Persentase meningkatnya Ketersediaan pangan Jagung	95	100	97	116,01	119,6	98	116,01	119,59%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pangan pokok yang disalurkan	80	99,72	85	55,81	65	90	55,81	93%
2.09.03.2.01.0016	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen informasi harga pangan dan analisis neraca bahan makanan	1	1	1	1	100	2	4	80%
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pangan lokal Kabupaten	0	0	0	0	0	0		
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah stakeholder yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi	0	0	0	0	0	0		
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	1	1	1	100	-	4	80%
		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	-	-	-	-	-	2		
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota**	**Persentase peningkatan cadangan pangan**	1	1	1	1,30	130	1,34		
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan	6	5,92	21,25	15,95	101	10,6		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	2	2	5,5	7	127	3		
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen analisis target konsumsi pangan	1	1	1	1	100	1	4	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberdayakan	1	1	1	1	100	2		
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase tertanganinya kerawanan pangan**	1	1	1	3	300,0			
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Analisis desa rawan pangan	0	0	0	0	0	0		
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	0	0	0	0	0	1		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya daerah rawan pangan	1	1	1	1	100	1		
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	1	1	100	2		
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi	50	50	0	0	0	0		
2.09.05	**Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pangan yang aman**	93,5	98,7	93,5	96,5	103,2	94,5		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan segar Bebas Bahan Kimia yang berbahaya.	0	0	0	0	0	0		
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1	1	1	100	2		
3.27	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	**75,92**	**80,45**	**75,92**	**79**	104,1			
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	**23**	**23**	**54**	**12**	22,2	**23**		
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	23	23	100,0	**12**		
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	4	10	250	**11**		
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah**	**59**	**59**	**59**	**30**	50,8	**59**		
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	140	100	**100**	**100**	**142**		
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**8**	**4**	**8**	**4**	50,0	**12**		
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**1**	**1**	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan PD	12	12	1	1	100	**-**		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan belanja pegawai, barang/jasa, dan modal	12	12	1	1	100	**-**		
		Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	1	1	100	**1**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	**1**		
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	**80**	**80**	**80**	**80**	**100**	**80**		
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	3	10	333	10		
2.09.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	3	3	5	167	5		
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	1	8	800	8		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan kelompok yang mendapatkan sarana tanaman pangan dan perkebunan	**51**	**51**	**50**	**52**	104,0	**53**		
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah kelompok pengguna sarana pendukung pertanian dan perkebunan	**69**	**68**	**74**	**0**	0,0	**78**		
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	1	1	1	100	3		
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	1	1	0	0			
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Peningkatan populasi ternak	3,09	3,09	3,09	3,09	100	3,09		
		Luas areal tanam pangan dan hortikultura unggulan	50	50	52	310	596,2	53		
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	1	1	2	200	1		
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	1	1	100	1		
3.27.02.204	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Persentase pengecer yang dipantau**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75**		
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	-	-	-	-	-	1		
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang**	Jumlah budidaya ternak sesuai GFP (Good Farming Practices)	10	15	10	47	470,0	10		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain									
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	33	62,53	390	1544	396	30		
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	45	175	389	1		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	80	80	80	100	125,0	80		
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah dokumen LP2B yang tersusun	1	1	1	1	100	1		
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						1		
		Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100			
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-	-	1	3	300	1		
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase peningkatan prasarana pertanian	10	20,45	10	100	1000,0			
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/direhab	2	4	13	13	100	7		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhab	49	49	3,7	1,74	47	36		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun/direhab	1	1	0	0	0	0		
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah irigasi tanah dangkal, DAM Parit dan prasarana lain yang dibangun	1	1	1	1	100	1		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1	1,1	75	76	101,3	1		
		Persentase status kesehatan ternak	89	89,25	90	90	100	90		
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase status kesehatan ternak	89	89,25	89	90	100	89		
327.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	1	1	6	600	1		
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner	50	50	50	0	0,0	50		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	1	1	1	100	1		
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis	0	0	90	90	100,0	75		
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0	0	1	6	600	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	0	75	76	101,3	75		
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	0	0	100	100	100	-		
		Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura						100		
		Penurunan luas areal serangan OPT tanaman pangan						100		
		Penurunan luas areal serangan OPT hortikultura						100		
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0	0	1	1	100	3		
327.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100		
327.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usulan yang difasilitasi	1	1	3	37	1233,3	3		
327.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan yang dilakukan	1	1	1	1	100			
		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	-	-	-	-	-	1		
327.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Peningkatan kelas kelompok utama	3	12,6	3,22	13,3	407,98			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Persentase pelaku usaha pertanian yg didampingi			10		0,0	10		
		Persentase pelaku usaha perkebunan yg mendapat pembinaan			25		0,0	25		
		Persentase peningkatan kelas kelompok tani			3,26		0,0	3,26		
327.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	3,26	4,23	3,26	13,3	13,3	3,26		
327.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	100	340	100	229	229			
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1		
327.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan	11	11	11	201	1827,27		44	80%
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya						6		
327.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang tersedia	0	0	0	0	0			
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	80		

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian s/d Tahun 2024 Kabupaten Pacitan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun analisis kinerja pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan di Tingkat Rumah Tangga	Pola Pangan Harapan (PPH)	90,5	91,92	102,67%
		Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	93,5%	94,54%	101,11%
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan populasi ternak	3,7%	1,74%	47,0%
		Indeks Pertanaman	1,80	1,49	82,8%
3	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pertanian	Persentase peningkatan jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang ditumbuhkan	77,50%	83,49%	107,7%
4	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	84,3	84,62	100,4%

Tabel 2.2 Rekapitulasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Pencapaian ketahanan pangan suatu negara dinilai ketika tercapainya ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Distribusi pangan dengan harga terjangkau dan keamanan pangan juga merupakan salah satu faktor pemenuhan ketahanan pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Salah satu cara mengetahui kemandirian pangan melalui kualitas keragaman konsumsi pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Skor PPH maksimal, yaitu 100 menunjukkan situasi konsumsi pangan yang beragam dan baik komposisi serta mutu gizinya. Pada tahun 2024 skor PPH Kabupaten Pacitan sebesar 91.92 dari target sebesar 90.5. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah di tetapkan. Namun nilai PPH sebesar 91.92 menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sudah mendekati pola

pangan ideal, namun masih ada sedikit ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki. Penyebab skor PPH Kabupaten Pacitan kurang ideal adalah pola pangan masyarakat Kabupaten Pacitan, masih kurang dalam mengkonsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula sedangkan yang sudah cukup adalah padi-padian, buah/biji berminyak, umbi-umbian, minyak dan lemak, dan sayur buah. Komoditas yang konsumsi bahan pangan kurang maka energinya juga kurang, yang sudah cukup konsumsinya maka energinya juga cukup. Untuk meningkatkan skor PPH maka konsumsi yang perlu ditingkatkan adalah kelompok Umbi-umbian, Pangan Hewani (lauk pauknya), Kacang-kacangan (tempe, tahu) dan gula (gula kelapa dan tebu). Konsumsi masyarakat Kabupaten Pacitan baru mengkonsumsi umbi-umbian 61,4 gr/hari/kapita atau 68%, pangan hewani 86,1 gr/hari/kapita atau 71% dari PPH ideal, sedangkan pangan kacang-kacangan 38,5 gr/hari/kapita atau 99% dan gula 26,9 gr/kapita/hari atau 96% dari PPH ideal.

Pangan segar merupakan bahan pangan yang diperoleh langsung dari alam atau hasil budidaya tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Pangan segar harus memenuhi standar keamanan pangan yaitu tidak mengandung bahaya biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia. Selain itu pangan segar harus memiliki mutu pangan yang berkualitas. Pada Tahun 2024 persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebesar 94.54% dari target sebesar 93.5%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah di tetapkan. Ketercapaian ini tidak lepas dari dukungan dan monitoring dari provinsi. Adapun produk pangan segar yang tidak aman disebabkan tingginya penggunaan pupuk dan pestisida kimia, serta adanya pedagang bahan asal hewan yang tidak memenuhi standar.

Indeks Pertanaman adalah rerata masa tanam dan masa panen padi dalam satu tahun pada lahan yang sama. Beras merupakan pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia, komoditas pangan dan ekonomi nasional. Selain merupakan makanan pokok lebih dari sembilan puluh lima persen rakyat indonesia, kegiatan bercocok tanam padi juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk sekitar dua juta rumah tangga petani di pedesaan. Tekanan sistem produksi padi semakin lama semakin berat dan komplek, penyusutan luas maupun degradasi fungsi lahan irigasi, baik langsung maupun tidak langsung merupakan ancaman serius terhadap kemantapan pasokan pangan nasional. Sementara permintaan pangan terus bertambah baik dikarenakan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan maupun beralihnya makanan pokok dari non beras ke beras. Pada tahun 2024, target IP adalah 1,8 dengan realisasi 1,49. Ketidaktercapaian indeks pertanaman tahun 2024 dikarenakan mundurnya musim hujan dan kurangnya curah hujan akibat terjadinya fenomena el-nino.

Persentase peningkatan jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang ditumbuhkan terealisasi sebesar 83.49% dari target sebesar 77.5%. Ketercapaian ini dikarenakan adanya peningkatan fasilitasi sarana prasarana pertanian, kemudahan perizinan usaha, peningkatan harga komoditas, dan jaminan pasar hasil.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah, termasuk dinas atau perangkat daerah lainnya. Hasil nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah 84,62 dari target sebesar 84,3. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memang mencapai target yang ditentukan, namun masih jauh dari nilai maksimal sebesar 100.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Isu Strategis

Dalam perencanaan pembangunan terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis yang harus diperhatikan dalam bidang pertanian adalah sebagai berikut :

a. Pengentasan Kemiskinan
b. Peningkatan Daya Saing Daerah
c. Keberlanjutan dan tren pertumbuhan ekonomi positif
d. Reformasi birokrasi
e. Makan bergizi gratis
f. Swasembada pangan
g. Menguatkan kemandirian ekonomi lokal
h. Menjaga dan meningkatkan daya beli dan pendapatan
i. Menguatkan kemandirian sosial dan layanan dasar

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis hasil evaluasi dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan maka dirumuskan isu - isu penting yang terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaian. Perumusan isu tersebut dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Adapun permasalahan dan hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan
   i. Terbatasnya kegiatan terkait ketahanan pangan
   ii. Terbatasnya kapasitas penyuluh terkait ketahanan pangan
   iii. Kurangnya konsumsi protein hewani dan pangan yang beragam
   iv. Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah masih terbatas

v. Hanya menghitung pangan segar asal tumbuhan
vi. Penggunaan bahan pengawet dan tambahan makanan diatas batas ambang
vii. Kurangnya kesadaran akan dampak penggunaan pupuk dan pestisida kimia
viii. Pedagang dari luar kabupaten/pendatang
ix. Pertanaman di bulan mei dan juni tidak optimal karena curah hujan yang rendah
x. Pertumbuhan yang tidak optimal menurunkan produktivitas
xi. Minat dan antusias masyarakat untuk budidaya ternak belum kembali normal
xii. Kesadaran untuk melakukan vaksinasi pada hewan ternak masih kurang"
xiii. Irigasi perpompaan dalam proses pembangunan belum memberikan dampak yang optimal
xiv. Pelaku utama pertanian (on farm) bersifat musiman
xv. Fluktuasi harga komoditas pertanian/perkebunan yang tidak stabil"
xvi. Tidak semua penerima layanan mau disurvei

b. Hambatan
i. Menurunnya produksi tanaman pangan sebagai akibat mundurnya musim hujan dan dampak el nino
ii. Preferensi masyarakat terhadap pangan
iii. Merupakan indikator program
iv. Belum memperhitungkan bahan pangan asal hewan
v. Preferensi masyarakat
vi. Pupuk dan pestisida kimia lebih efektif dan lebih praktis
vii. Kesadaran pedagang terhadap bahan asal hewan yang ASUH masih kurang
viii. Serangan hama wereng
ix. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan
x. Pembangunan irigasi perpipaan dan perpompaan belum optimal penggunaannya
xi. Keterbatasan obat-obatan dan alat kesehatan hewan
xii. Ketergantungan terhadap musim sangat tinggi
xiii. Pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan masih kurang
xiv. Daya saing hasil produk pertanian/perkebunan masih rendah
xv. Tidak semua petani/ masyarakat penerima layanan memiliki hp yang mendukung

3. Dampak terhadap Visi Misi Kepala Daerah terhadap capaian program

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Visi Bupati Pacitan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 adalah Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung pada misi kedua, yaitu *Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa,* melalui sasaran meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan misi ketiga, yaitu *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya*, melalui sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

Rumusan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dengan sasaran Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan. Sedangkan rumusan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya yaitu Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dengan sasaran Meningkatnya Produksivitas Pertanian, Meningkatnya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, dan Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal.

4. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

   Tantangan:

   a. Gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT)
   b. Ketergantungan dalam penggunaan pestisida kimia dan bahan pengawet makanan
   c. Rendahnya curah hujan sebagai akibat fenomena el-Nino
   d. Terbatasnya kapasitas penyuluh terkait ketahanan pangan
   e. Preferensi masyarakat terhadap konsumsi pangan seimbang
   f. Fluktuasi harga komoditas pertanian
   g. Wabah penyakit PMK

   Peluang:

   a. Pangsa pasar terbuka baik lokal, regional maupun global
   b. Peningkatan produktivitas masih memungkinkan melalui penerapan teknologi pertanian
   c. Tersedianya peluang kerjasama dengan pihak lain

d. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat meningkatkan pengetahuan pertanian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan. Adapun tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 terdapat pada Tabel 2.3.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**		**Persentase Jumlah cadangan pangan**	**60.6**	**73.095.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**		**Persentase Jumlah cadangan pangan**	**60.6**	**73.095.000,00**	
2	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		***Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang berkembang***	**41,03**	**73.095.000,00**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		***Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang berkembang***	**41,03**	**73.095.000,00**	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pacitan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik*	2 Laporan	73.095.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pacitan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik*	2 Laporan	73.095.000,00	
4	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		***Skor PPH Komsumsi***	**92.78**	**301.665.878,00**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		***Skor PPH Komsumsi***	**92.78**	**301.665.878,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	
5	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		***Prosentase hasil pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan yang ditindaklanjuti***	**60**	**15.386.595,00**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		***Prosentase hasil pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan yang ditindaklanjuti***	**60**	**15.386.595,00**	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Pacitan	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis*	2 Dokumen	15.386.595,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Pacitan	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis*	2 Dokumen	15.386.595,00	
7	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		***Peningkatan jumlah cadangan pangan yang dikelola***	**25**	**190.000.000,00**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		***Peningkatan jumlah cadangan pangan yang dikelola***	**25**	**190.000.000,00**	
8	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	10,6	190.000.000,00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	10,6	190.000.000,00	
9	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		***Persentase capaian target konsumsi pangan***	**100**	**96.279.283,00**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		***Persentase capaian target konsumsi pangan***	**100**	**96.279.283,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
10	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pacitan	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	2 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pacitan	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	2 Dokumen	10.000.000,00	
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pacitan	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	2 Laporan	86.279.283,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pacitan	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	2 Laporan	86.279.283,00	
12	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Prosentase daerah rentan rawan pangan**	**61.62**	**47.327.430,00**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Prosentase daerah rentan rawan pangan**	**61.62**	**47.327.430,00**	
13	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		***Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan***	**1 Dokumen**	**15.000.000,00**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		***Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan***	**1 Dokumen**	**15.000.000,00**	
14	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Pacitan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan*	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Pacitan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan*	1 Dokumen	15.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
15	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase desa rawan pangan yang tertangani**	**17,24**	**32.327.430,00**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase desa rawan pangan yang tertangani**	**17,24**	**32.327.430,00**	
16	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 dokumen	32.327.430,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 dokumen	32.327.430,00	
17	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Prosentase Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan**	**95**	**80.000.000,00**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Prosentase Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan**	**95**	**80.000.000,00**	
18	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pengambilan sampel pangan segar**	**300**	**80.000.000,00**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pengambilan sampel pangan segar**	**300**	**80.000.000,00**	
19	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	2 Dokumen	37.678.550,00	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	2 Dokumen	37.678.550,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
20	*Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*		*Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 laporan	42.321.450,00	*Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*		*Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 laporan	42.321.450,00	
21	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**78.9**	**14.581.336.913,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**78.9**	**14.581.336.913,00**	
23	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah***	**23**	**116.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah***	**23**	**116.000.000,00**	
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	12 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	12 Dokumen	50.000.000,00	
25	Evalulasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	11	66.000.000,00	Evalulasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	11	66.000.000,00	
26	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Jumlah dokumen keuangan yang disusun***	**59 Dokumen**	**12.390.081.921,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Jumlah dokumen keuangan yang disusun***	**59 Dokumen**	**12.390.081.921,00**	
27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	134 Orang/ Bulan	12.344.001.921,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	134 Orang/ Bulan	12.344.001.921,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
28	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	46.080.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	46.080.000,00	
29	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	**334.597.400,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	**334.597.400,00**	
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1	5.457.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1	5.457.600,00	
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	200.022.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	200.022.200,00	
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	19.121.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	19.121.000,00	
33	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	9.996.100,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	9.996.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
34	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	100.000.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	100.000.500,00	
35	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Prosentase penyediaan jasa penunjang PD***	**100%**	**1.155.387.500,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Prosentase penyediaan jasa penunjang PD***	**100%**	**1.155.387.500,00**	
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	7.417.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	7.417.500,00	
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	201.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	201.000.000,00	
38	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	16.970.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	16.970.000,00	
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	930.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	930.000.000,00	
40	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	**80%**	**585.270.092,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	**80%**	**585.270.092,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	146.347.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	146.347.800,00	
42	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	3 Unit	333.922.292,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	3 Unit	333.922.292,00	
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	105.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	105.000.000,00	
44	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase peningkatan sarana pertanian**	**8.03**	**4.879.915.500,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase peningkatan sarana pertanian**	**8.03**	**4.879.915.500,00**	
45	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		***Jumlah sarana pertanian yang digunakan***	**263**	**4.137.915.500,00**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		***Jumlah sarana pertanian yang digunakan***	**263**	**4.137.915.500,00**	
46	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pacitan	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	3 Laporan	3.507.915.500,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pacitan	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	3 Laporan	3.507.915.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
47	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pacitan	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	205.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pacitan	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	205.000.000,00	
48	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan*		*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan*	**1 Laporan**	100.000.000	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan*		*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan*	**1 Laporan**	100.000.000	
49	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan*		*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan*	**1 Laporan**	25.000.000,00	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan*		*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan*	**1 Laporan**	25.000.000,00	
50	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura*		*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura*	**1 Laporan**	300.000.000,00	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura*		*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura*	**1 Laporan**	300.000.000,00	
51	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		***Prosentase peningkatan populasi ternak***	**1.4**	**45.000.000,00**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		***Prosentase peningkatan populasi ternak***	**1.4**	**45.000.000,00**	
52	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pacitan	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	25.000.000,00	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pacitan	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	25.000.000,00	
53	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pacitan	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	20.000.000,00	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pacitan	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
54	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**		***Persentase Pengecer obat hewan yang diawasi***	**30**	**10.000.000,00**	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**		***Persentase Pengecer obat hewan yang diawasi***	**30**	**10.000.000,00**	
55	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Pacitan	*Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar*	1 Laporan	10.000.000,00	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Pacitan	*Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar*	1 Laporan	10.000.000,00	
56	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		***Peningkatan Penyediaan bibit ternak dan hijauan***	**3%**	**687.000.000,00**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		***Peningkatan Penyediaan bibit ternak dan hijauan***	3%	**687.000.000,00**	
57	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pacitan	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	1	17.000.000,00	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pacitan	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	1	17.000.000,00	
58	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pacitan	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	989	670.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pacitan	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	989	670.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	
59	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1.289.605.372**	**Persentase peningkatan prasarana pertanian**	**2**	**1.453.980.200,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase peningkatan prasarana pertanian**	**2**	**1.453.980.200,00**	
60			Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	54.38				Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	54.38		
61	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		***Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian***	**3 dokumen**	**411.980.200,00**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		***Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian***	**3 dokumen**	**411.980.200,00**	
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	1 Laporan	286.980.200,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	1 Laporan	286.980.200,00	
63	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	1 Dokumen	125.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	1 Dokumen	125.000.000	
64	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		***Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian***	**2%**	**1.042.000.000,00**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		***Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian***	**2%**	**1.042.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
65	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pacitan	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	8	702.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pacitan	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	8	702.000.000,00	
66	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	40.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pacitan	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	40.000.000,00	
67	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Pacitan	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	3	300.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Pacitan	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	3	300.000.000,00	
68	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)**	**-0,11**	**201.992.400,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)**	**-0,11**	**201.992.400,00**	
69			Persentase unit usaha pangan asal hewan yg memiliki sertifikat NKV	5				Persentase unit usaha pangan asal hewan yg memiliki sertifikat NKV	5		
70	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**		***Persentase status kesehatan ternak***	**90.25**	**181.992.400,00**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**		***Persentase status kesehatan ternak***	**90.25**	**181.992.400,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
71	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	1 Laporan	181.992.400,00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	1 Laporan	181.992.400,00	
72	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		***Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner***	**1.5**	**10.000.000,00**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		***Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner***	**1.5**	**10.000.000,00**	
73	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pacitan	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pacitan	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	10.000.000,00	
74	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		***persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis***	**85**	**10.000.000,00**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		***persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis***	**85**	**10.000.000,00**	
75	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Pacitan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	1 Laporan	10.000.000,00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Pacitan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	1 Laporan	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	
76	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Persentase penanganan bencana pertanian**	**3**	**37.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Persentase penanganan bencana pertanian**	**3**	**37.000.000,00**	
77			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	32.00				Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	32.00		
78	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		***Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian***	**94,2**	**37.000.000,00**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		***Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian***	**94,2**	**37.000.000,00**	
79	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pacitan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	350	37.000.000,00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pacitan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	350	37.000.000,00	
80	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase izin usaha yang diterbitkan**	**82**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase izin usaha yang diterbitkan**	**82**	**10.000.000,00**	
81	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah izin usaha pertanian***	**42**	**10.000.000,00**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah izin usaha pertanian***	**42**	**10.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.0000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.0000)**	
82	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Pacitan	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*	1 Laporan	10.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Pacitan	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*	1 Laporan	10.000.000,00	
83	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase peningkatan kelas kelompok**	**4.23**	**1.474.837.500**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase peningkatan kelas kelompok**	**4.23**	**1.474.837.500**	
84			Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100				Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100		
85	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Persentase kelompok penerima manfaat kegiatan penyuluhan**	**27**	**1.474.837.500**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Persentase kelompok penerima manfaat kegiatan penyuluhan**	**27**	**1.474.837.500**	
86	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pacitan	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	14 Unit	95.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pacitan	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	14 Unit	95.000.000,00	
87	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pacitan	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Unit	1.001.291.500,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pacitan	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Unit	1.001.291.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	
88	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	80	378.546.000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	80	378.546.000	

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bentuk proposal maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerahdari pelaksanaan hasil musrenbang kecamatan. Usulan rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada sistem *bottom up*. Proses untuk memperoleh usulan dari pemangku kepentingan melalui identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diajukan ke desa untuk diverifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi usulan prioritas desa. Selanjutnya usulan diajukan ke tingkat kecamatan untuk dikaji melalui musrenbang kecamatan. Hasil dari musrenbang kecamatan menjadi usulan program/kegiatan kecamatan dan diajukan ke Bappeda untuk dikaji melalui musrenbang Kabupaten. Hasil dari musrenbang kabupaten tidak semua program/kegiatan kecamatan bisa disetujui karena banyaknya usulan kegiatan dan keterbatasan anggaran daerah untuk mendanai program/kegiatan. Oleh karena itu usulan prioritas kecamatan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk disinkronisasikan dengan renstra perangkat daerah, RPJMD dan Program/kegiatan baik dari Propinsi dan Pusat menjadi usulan rencana kerja perangkat daerah tahunan.

.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional dalam rangka pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi daging diperlukan dukungan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Guna mendukung terhadap kebijakan nasional Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan diprioritaskan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan tahun 2026 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2026 dan RKPD Jawa Timur Tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan akan ditopang dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui optimalisasi produk unggulan berupa kopi, kakao, kelapa dan biofarmaka yang didukung oleh program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan,program dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan tahun 2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Strategis Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Meningkatnya Kecukupan Komsumsi pangan	PoU / Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI		Nilai Tukar Petani (NTP)
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian
		Indeks Pertanaman

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan merencanakan akan melaksanakan sebanyak 4 program urusan pemerintahan bidang pangan dan 7 program urusan pemerintahan bidang pertanian dengan 24 kegiatan 48 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
   a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
   b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
      - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
   - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
   a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
      - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
   b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Pengawasan Keamanan Pangan
   a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
5. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Administrasi umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
      - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
      - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
   c. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
      - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
   d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
      - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
      - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Pengembangan Prasarana Pertanian
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
      - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
   b. Pembangunan Prasarana Pertanian
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
   - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
      - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
   a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
11. Program Penyuluhan Pertanian
   a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
      - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
      - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan meliputi :

1. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029. Tujuan yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut
   a. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran Berkurangnya Beban Pengeluaran.
   b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah dengan sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah yang Inklusif
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan 2026 dengan tema Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial.

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut

1. Jumlah 4 program urusan pemerintahan bidang pangan dan 7 program urusan pemerintahan urusan pertanian dengan 7 kegiatan urusan pemerintahan bidang pangan dan 17 kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar dan terfokus. Lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dalam arti bahwa upaya yang dilakukan dalam pembangunan pertanian merata keseluruh kabupaten Pacitan. Disamping itu dukungan lebih banyak difokuskan pada kawasan yang telah terbentuk, misalnya kawasan kambing PE, sapi perah, kakao, kopi, cabai.
2. kebutuhan dana/pagu indikatif sesuai dengan sumber pendanaannya dari dana APBD Kabupaten Pacitan sebanyak Rp **23.141.150.821,00**,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang di rencanakan memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan pada bidang Pangan dan Pertanian. Visi Kepala Daerah seperti yang tertuang pada RPJMD 2025-2026 yaitu Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan mendukung misi pertama dan ketiga. Misi pertama yaitu Pemberantasan Kemiskinan dan misi ketiga yaitu Memajukan Pariwisata Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Pada misi pertama, untuk mewujudkan sasaran “Berkurangnya Beban Pengeluaran”, arah kebijakan yang diambil adalah Perluasan Penyediaan Bantuan Sosial Peningkatan Ketahanan Pangan Terutama Bagi Kelompok Marjinal, Rentan, dan Masyarakat . Sedangkan pada misi ketiga, untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah yang Inklusif”, arah kebijakan yang diambil yaitu Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian yang Terintegrasi Dengan Upaya Penguatan Ketahanan & Kemandirian Pangan.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 23.141.150.821,00,-. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				**23.141.150.821,00**				**32.089.143.265,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**1.905.152.324,00**
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**502.088.308,00**				**1.905.152.324,00**
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Jumlah cadangan pangan		**60.6**	**73.095.000,00**				69.730.881,00
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang berkembang***		**41,03**	**73.095.000,00**			45,1%	**69.730.881,00**
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik*	Kab. Pacitan	2 Laporan	73.095.000,00	Pajak Rokok, DBH		2 Laporan	69.730.881,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Skor PPH Komsumsi***		**92.78**	**301.665.878,00**			**-**	**1.615.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	***Prosentase hasil pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan yang ditindaklanjuti***		**60**	**15.386.595,00**			-	20.000.000,00
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis*	Kab. Pacitan	2 Dokumen	15.386.595,00	Pajak Rokok, DBH			20.000.000,00
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	***Peningkatan jumlah cadangan pangan yang dikelola***		**25%**	**190.000.000,00**				1.195.000.000,00
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Kab. Pacitan	10,6 Ton	190.000.000,00	Pajak Rokok, DBH		**-**	**1.195.000.000,00**
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	***Persentase capaian target konsumsi pangan***		**100**	**96.279.283,00**			-	400.000.000,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	Kab. Pacitan	2 Dokumen	10.000.000,00	Pajak Rokok, DBH			110.000.000,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	Kab. Pacitan	2 Laporan	86.279.283,00	Pajak Rokok, DBH, DAU			290.000.000,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Prosentase daerah rentan rawan pangan		**61.62**	**47.327.430,00**				**170.421.443,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	***Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan***		**1 Dokumen**	**15.000.000,00**				96.168.166,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	Kab. Pacitan	1 Dokumen	15.000.000,00	Pajak Rokok, DBH, DAU		-	96.168.166,00
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase desa rawan pangan yang tertangani**		**17,24**	**32.327.430,00**				74.253.277,00
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Pacitan	2 dokumen	32.327.430,00	Pajak Rokok, DBH			74.253.277,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Prosentase Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan		**95**	**80.000.000,00**				50.000.000,00
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengambilan sampel pangan segar**		**300**	**80.000.000,00**				50.000.000,00
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	Kab. Pacitan	2 Dokumen	37.678.550,00	Pajak Rokok, DBH		**-**	50.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.09.05.2.01.0008	*Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	*Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*		1 laporan	42.321.450,00	DBH		-	0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								30.183.990.941,00
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**22.639.062.513,00**				30.183.990.941,00
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah		**78.9**	**14.581.336.913,00**			**-**	**14.891.952.122,00**
								-	50.000.000,00
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah***		**23**	**116.000.000,00**				21.208.000,00
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Pacitan	12 Dokumen	50.000.000,00	DBH			21.208.000,00
	Evalulasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	66.000.000,00	DBH			**0**
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen keuangan yang disusun***		**59 Dokumen**	**12.390.081.921,00**			**-**	**12.332.939.817,00**
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Pacitan	134 Orang/bulan	12.344.001.921,00	DAU			12.332.939.817,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.27.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan	1 Dokumen	46.080.000,00	PAD, DBH		-	21.208.000,00
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**100**	**334.597.400,00**				**660.157.605,00**
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Pacitan	1 paket	5.457.600,00				300.000.000,00
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Pacitan	1 Paket	200.022.200,00	PAD, Pajak Rokok, DBH, DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan			660.157.605,00
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Pacitan	1 Paket	19.121.000,00	Pajak Rokok, DBH			300.766.019,00
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Pacitan	1 Paket	9.996.100,00	PAD, Pajak Rokok, DBH		-	29.911.922,00
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Pacitan	1 Paket	100.000.500,00	Pajak Rokok, DBH			12.000.000,00
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Prosentase penyediaan jasa penunjang PD***		**100%**	**1.155.387.500,00**				1.124.034.767,00
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Pacitan	1 Laporan	7.417.500,00	PAD, DBH			21.529.657,00
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Pacitan	1 Laporan	201.000.000,00	DBH			260.111.273,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Pacitan	1 Laporan	16.970.000,00	DBH		-	89.084.360,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Pacitan	1 Laporan	930.000.000,00	PAD, DBH			753.309.477,00
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***		**80%**	**585.270.092,00**				753.611.933,00
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kab. Pacitan	6 Unit	146.347.800,00	Pajak Rokok, DBH			150.000.000,00
3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Pacitan	3 Unit	333.922.292,00	DBH			450.000.000,00
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Pacitan	1 Unit	105.000.000,00	Pajak Rokok, DBH, DAU			153.611.933,00
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan sarana pertanian		**7.7**	**4.879.915.500,00**				7.626.572.117,00
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	***Jumlah sarana pertanian yang digunakan***		**263**	**4.137.915.500,00**				5.270.050.452,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	Kab. Pacitan	3 Laporan	3.507.915.500,00	PAD, DAU, DBHCHT, DBH			2.115.882.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	Kab. Pacitan	1 Laporan	205.000.000,00	DBH, DAU		-	3.154.167.752,00
3.27.02.2.01.0006	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan*	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan*		**1 Laporan**	100.000.000	**DBH**			0
3.27.02.2.01.0014	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan*	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan*		**1 Laporan**	25.000.000,00	**DBH**			0
3.27.02.2.01.0016	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura*	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura*		**1 Laporan**	300.000.000,00	**DBH**			0
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Prosentase peningkatan populasi ternak***		**3.01**	**45.000.000,00**				1.218.401.729,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	Kab. Pacitan	1 Dokumen	25.000.000,00	DBH			880.133.538,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	Kab. Pacitan	1 Dokumen	20.000.000,00	DBH, DAU, PAD, Pajak Rokok			338.268.191,00
3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	***Persentase Pengecer obat hewan yang diawasi***		**30**	**10.000.000,00**				30.000.000,00
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	*Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar*	Kab. Pacitan	1 Laporan	10.000.000,00	DBH, Pajak Rokok		-	30.000.000,00
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	***Peningkatan Penyediaan bibit ternak dan hijauan***		**1.61 %**	**687.000.000,00**				1.108.119.936,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	Kab. Pacitan	1 Ton	17.000.000,00	DBH, Pajak Rokok			108.119.936,00
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	Kab. Pacitan	989 ekor	670.000.000,00	DBH, DAU			1.000.000.000,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan prasarana pertanian		**2**	**1.453.980.200,00**				**5.453.642.702,00**
		Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B		45.62					
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	***Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian***		**3 dokumen**	**411.980.200,00**				740.114.202,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	Kab. Pacitan	1 Laporan	286.980.200,00	*DBHCHT*		**-**	200.000.000,00
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	Kab. Pacitan	1 Dokumen	125.000.000	*DBH*			540.114.202,00
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	***Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian***		**1.4**	**1.042.000.000,00**				4.713.528.500,00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	Kab. Pacitan	8 unit	702.000.000,00	DBH, DAU			2.000.000.000,00
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	Kab. Pacitan	1 Unit	40.000.000,00	DBH, DAU, DBHCHT		-	186.626.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	Kab. Pacitan	3 unit	300.000.000,00	DBH, PAD, DAU			2.526.902.000,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)		**-0,11**	**201.992.400,00**				**506.368.000,00**
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yg memiliki sertifikat NKV		5					
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase status kesehatan ternak***		**90.25**	**181.992.400,00**				290.798.000,00
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	Kab. Pacitan	1 Laporan	181.992.400,00	DBH, Pajak Rokok		-	290.798.000,00
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner***		**1.5**	**10.000.000,00**				185.570.000,00
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	Kab. Pacitan	1 Laporan	10.000.000,00	DBH, DAU			185.570.000,00
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	***persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis***		**85**	**10.000.000,00**			-	30.000.000,00
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	Kab. Pacitan	1 Laporan	10.000.000,00	DBH, Pajak Rokok			30.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase penanganan bencana pertanian		**3**	**37.000.000,00**				215.456.000,00
		Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		32.00					
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	***Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian***		**94,2**	**37.000.000,00**			**-**	215.456.000,00
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	Kab. Pacitan	350 Ha	37.000.000,00	Pajak Rokok			215.456.000,00
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase izin usaha yang diterbitkan		**82**	**10.000.000,00**				140.000.000,00
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah izin usaha pertanian***		**42**	**10.000.000,00**				140.000.000,00
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*	Kab. Pacitan	1 Laporan	10.000.000,00	DBH			140.000.000,00
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan kelas kelompok		**4.23**	**1.474.837.500**				1.350.000.000,00
		Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan		100					
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase kelompok penerima manfaat kegiatan penyuluhan**		**27**	**1.474.837.500**			-	1.350.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kab. Pacitan	14 Unit	95.000.000,00	DBH, DAU			400.000.000,00
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kab. Pacitan	6 Unit	1.001.291.500,00	DBHCHT, DBH, Pajak Rokok			950.000.000,00
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Pacitan	80	378.546.000	DAK-NF			0

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026

dan Perkiraan Maju Tahun 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Pacitan tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN

2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rakhmat dan hidayahnya Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan dapat menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2021 -2026.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kabupaten Pacitan utamanya “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, guna mendukung agenda tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan memiliki tujuan “Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang meliputi Perdagangan dan Kemetrologian, Pengelolaan Pasar Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.”

Semoga dengan telah tersusunnya Renja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada yang Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab.Pacitan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan perencanaan strategis ini dapat terselesaikan dengan baik, disamping itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap

pejabat struktural, fungsional dan staf di lingkungan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan sehingga terwujudnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2026 ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Pacitan, Agustus 2025

Kepala Dinas
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pacitan

Drs. ACEP SUHERMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681222 198803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penyusunan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SEBELUMNYA 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sebelumnya dan Capaian Restra PD 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD 18

2.4. Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 34

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 36

3.3 Program dan Kegiatan 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

4.1 Rencana Kerja 43

BAB IV PENUTUP 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD.

Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja

OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
5. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kabupaten Pacitan Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2026 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan perioritas daerah. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan,program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan disingkat dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. RENSTRA Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2021 -

2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja Tahun 2026 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus baik di sektor perdagangan, pengelolaan pasar dan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pacitan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016);
16. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang diprioritaskan dan dimantapkan dalam pembangunan sarana perdagangan dan penyediaan serta fasilitasi ketenagakerjaan secara berkesinambungan diantaranya : Meningkatkan peran Perdagangan dan Pasar dalam perekonomian, serta peningkatan kualitas dan fasilitasi ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan. Untuk itu, pembangunan sektor Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Ketenagakerjaan sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan.

RENJA-SKPD diperinci dalam RKA-SKPD yang memuat pendapatan dan belanja OPD lebih detail. Perumusan RENJA-OPD dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya memperhatikan hasil MUSRENBANG, responsif terhadap permasalahan dan isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kebutuhan OPD saja melainkan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Industri, Perdagangan. Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada

pencapaian tujuan dan sasaran OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA OPD.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja OPD dan gambaran umum Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan ketentuan peraturan yang mengatur tentang kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari peyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sebelumnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD capaian tahun berjalan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi Kajian terhadap capain kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan dan solusi terhadapa pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan barang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PerangkatDaerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan yang berisikan Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : Penutup

Berisikan penjelasan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian,kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBELUMNYA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra, faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang. Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.Selanjutnya, hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja, target Renstra, target Renja dan perkiraan capaian Renstra disajikan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdaganagan dan Tenaga Kerja sampai dengan 2025 disajikan pada tabel berikut

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
207	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**persen**	**100.00**	**10.000.000,00**	**40.00**	**0**	**40%**	**0%**
207	**2**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja**	**dokumen**	**1.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0**	**0%**	**0%**
207	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1.00	10.000.000,00	0.00	0	0%	0%
207	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas**	**persen**	**20.00**	**3.021.986.600,00**	**6.00**	**1.588.386.091,00**	**30%**	**52.56%**
					Persentase tenagakerja terampil dan kompeten	**persen**	**45.00**		**0.00**		**0%**	
207	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja**	**orang**	**340.00**	**3.021.986.600,00**	**0.00**	**1.588.386.091,00**	**0%**	**52.56%**
207	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	peserta	340.00	2.246.986.600,00	0.00	1.232.616.602,00	0%	54.86%
			4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	96.00	775.000.000,00	0.00	355.769.489,00	0%	45.91%
207	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL dan AKAD**	**persen**	**65.00**	**185.000.000,00**	**31.00**	**78.619.600,00**	**47.69%**	**42.5%**
207	**4**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumllah tenaga kerja yang mendapatkan fasiltas pembinaan**	**orang**	**250.00**	**185.000.000,00**	**0.00**	**78.619.600,00**	**0%**	**42.5%**
207	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	200.00	185.000.000,00	0.00	78.619.600,00	0%	42.5%
207	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)**	**persen**	**86.00**	**345.000.000,00**	**14.00**	**61.031.300,00**	**16.28%**	**17.69%**
					Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	**persen**	**30.00**		**4.00**		**13.33%**	
207	**5**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta sosialisasi Hubungan Industrial, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada perusahaan**	**orang**	**140.00**	**345.000.000,00**	**0.00**	**61.031.300,00**	**0%**	**17.69%**
207	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perselisihan	3.00	25.000.000,00	0.00	1.790.000,00	0%	7.16%
			5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	2970.00	320.000.000,00	0.00	59.241.300,00	0%	18.51%
330	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**nilai**	**75.00**	**8.223.329.067,00**	**75.15**	**4.430.344.870,00**	**100.2%**	**53.88%**
330	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**23.00**	**142.243.128,00**	**9.00**	**36.621.900,00**	**39.13%**	**25.75%**
330	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7.00	73.397.555,00	0.00	11.897.500,00	0%	16.21%
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2.00	12.235.573,00	1.00	6.439.000,00	50%	52.63%
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2.00	13.000.000,00	1.00	3.163.500,00	50%	24.33%
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12.00	43.610.000,00	0.00	15.121.900,00	0%	34.68%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	25	31,96

										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**51.00**	**5.170.183.002,00**	**7.00**	**2.880.587.642,00**	**13.73%**	**55.72%**
330	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	50.00	5.150.183.002,00	0.00	2.867.501.642,00	0%	55.68%
			8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1.00	20.000.000,00	0.00	13.086.000,00	0%	65.43%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0	60,56
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Rendah
330	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**persen**	**100.00**	**473.749.946,00**	**7.00**	**152.560.307,00**	**7%**	**32.2%**
330	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	persen	100.00	113.742.174,00	80.00	79.885.887,00	80%	70.23%
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase bahan logistik kantor yang tersedia	persen	100.00	60.291.922,00	61.00	24.645.000,00	61%	40.88%
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	persen	100.00	27.223.850,00	90.00	12.624.420,00	90%	46.37%
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12.00	272.492.000,00	8.00	35.405.000,00	66.67%	12.99%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	74,42	42,62
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sedang	Sangat Rendah
330	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**persen**	**100.00**	**109.767.837,00**	**12.00**	**108.070.821,00**	**12%**	**98.45%**
330	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	unit	10.00	109.767.837,00	23.00	108.070.821,00	230%	98.45%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	230	98,45
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
330	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**persen**	**100.00**	**2.234.099.997,00**	**17.00**	**1.232.948.756,00**	**17%**	**55.19%**
330	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12.00	5.000.000,00	4.00	2.190.000,00	33.33%	43.8%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12.00	346.263.997,00	4.00	134.257.336,00	33.33%	38.77%
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	1.882.836.000,00	4.00	1.096.501.420,00	33.33%	58.24%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	33,33	46,94
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**persen**	**80.00**	**93.285.157,00**	**58.00**	**19.555.444,00**	**72.5%**	**20.96%**
330	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	67.00	51.750.091,00	2.00	19.555.444,00	2.99%	37.79%
			9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1.00	41.535.066,00	0.00	0	0%	0%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	1,5	18,9
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**persen**	**63.09**	**35.000.000,00**	**2.00**	**0**	**3.17%**	**0%**
330	**2**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase penerbitan TDG**	**persen**	**100.00**	**35.000.000,00**	**0.00**	**0**	**0%**	**0%**

330	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	5	35.000.000,00	0.00	0	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0	0
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0	0
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**persen**	**11.33**	**1.090.000.000,00**	**0.00**	**910.906.314,00**	**0%**	**83.57%**
330	**3**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana perdagangan yang di bangun/revitalisasi dan dipelihara**	**unit**	**5.00**	**1.090.000.000,00**	**0.00**	**910.906.314,00**	**0%**	**83.57%**
330	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	15.00	1.090.000.000,00	0.00	910.906.314,00	0%	83.57%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0	83,57
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0	83,57
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Tinggi
330	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya**	**persen**	**100.00**	**85.000.000,00**	**0.00**	**48.791.000,00**	**0%**	**57.4%**
330	**4**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana Perdagangan/pasar daerah yang dipantau Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**unit**	**15.00**	**85.000.000,00**	**4.00**	**48.791.000,00**	**26.67%**	**57.4%**
330	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	365.00	35.000.000,00	0.00	12.920.000,00	0%	36.91%
			3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	paket	4200.00	50.000.000,00	0.00	35.871.000,00	0%	71.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0	54,33
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											26,67	57,4
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Rendah
330	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru**	**persen**	**8.30**	**290.000.000,00**	**0.00**	**136.090.000,00**	**0%**	**46.93%**
330	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor**	**kali**	**1.00**	**290.000.000,00**	**0.00**	**136.090.000,00**	**0%**	**46.93%**
330	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	1.00	290.000.000,00	0.00	136.090.000,00	0%	46.93%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0	46,93
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0	46,93
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yangberlaku**	**persen**	**30.43**	**40.000.000,00**	**6.00**	**15.963.500,00**	**19.72%**	**39.91%**
330	**6**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang**	**unit**	**700.00**	**40.000.000,00**	**6.00**	**15.963.500,00**	**0.86%**	**39.91%**
330	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	700.00	40.000.000,00	0.00	15.963.500,00	0%	39.91%

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0	39,91
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	0,86	39,91
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk**		**13.26**	**92.735.000,00**	**6.00**	**51.782.000,00**	**45.25%**	**55.84%**
330	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**kali**	**1.00**	**92.735.000,00**	**0.00**	**51.782.000,00**	**0%**	**55.84%**
330	7	2.01	6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	5.00	92.735.000,00	0.00	51.782.000,00	0%	55.84%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0	55,84
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	0	55,84
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Rendah
332	**3**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigrasi Swakarsa**		**100**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0**	**0%**	**0%**
332	**3**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta penyuluhan Tranmigrasi**	**orang**	**50.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0**	**0%**	**0%**
332	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	10.000.000,00	0.00	0	0%	0%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0	0
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	0	0
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)	22,55	37,18
										Predikat kinerja seluruh program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
								Total	**13.428.050.667,00**	**7.321.914.675,00**		
										Persentase Realisasi Anggaran	**54.53%**	
										Predikat	**Rendah**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian/ realisasi kinerja sampai dengan akhir semester pertama tahun 2025 masih sangat rendah. Gambaran analisis tabel tersebut dipadukan dengan kondisi di lapangan sebagai berikut:

a. Realisasi kinerja pada program penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) tergolong sangat rendah, pelaksanaan kegiatan baru terealisasi akhir bulan Agustus 2025.

b. Realisasi kinerja pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah yang dikarenakan pelaksanaan pelatihan baru dimulai pada bulan Juli hingga bulan September oleh karenanya diperlukan dorongan untuk percepatan pelaksanaan pelatihan agar target bisa segera tercapai.

c. Realisasi kinerja pada program penempatan tenaga kerja masih rendah, oleh karenanya masih sedikitnya minat masyrakat untuk pembuatan kartu kuning.

d. Realisasi kinerja pada program hubungan industrial tergolong sangat rendah dikarenakan kegiatan rencananya akan dilaksanakan bulan November 2025.

e. Realisasi kinerja pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota rata-rata pada posisi rendah dimana capaian rata-rata adalah 31,96 dari target tahunan.

f. Realisasi kinerja pada program peningkatan sarana distribusi

perdagangan dalam posisi stabil dengan persentase kinerja sebesar 83,57 %.

g. Realisasi kinerja pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam kondisi sangat rendah. Hal ini diperlukan dorongan guna mempercepat capaian agar sesuai yang direncakan.

h. Realisasi kinerja pada program standarisasi dan perlindungan konsumen sebesar 39,91 persen tergolong rendah karena beberapa kegiatan tera/ tera ulang masal rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025.

i. Realisasi kinerja pada program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tergolong sangat tinggi.

j. Realisasi kinerja pada program pembangunan kawasan transmigrasi juga tergolong sedang dimana realisasi kegiatan baru akan terlaksana di bulan September 2025.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Perdagangan

   i. Kurang Optimalnya Pengembangan Produk Unggulan Pacitan

ii. Kurang lancarnya sirkulasi barang dan bahan pokok
iii. Belum optimalnya pengembangan UKM
iv. Kurang Optimalnya Pengelolaan Produk Unggulan Pacitan
v. Rendahnya akses pasar
vi. Masih rendahnya pemilik UTTP/Pedagang dam mengikuti tera/tera ulang UTTP
vii. Belum adanya pengawas kemetrologian
viii. Sarana dan Prasarana Perdagangan yang masih perlu ditingkatkan.

b. Bidang Pasar Daerah

i. Kondisi bangunan pasar daerah yang perlu banyak perbaikan
ii. Kurangnya SDM pengelola pasar daerah sehingga banyak yang diisi dengan tenaga kontrak
iii. Permasalahan parkir di beberapa pasar daerah yang mengganggu akses lalu lintas
iv. Banyaknya pedagang kaki lima di sekitar beberapa pasar daerah.

c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan antara lain meliputi :

i. Kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja kita, hal ini berdampak pada kemampuan daya saing dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
ii. Rendahnya mutu dan kompetensi SDM : karena belum optimalnya fungsi BLK pemerintah maupun swasta dalam menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing.

iii. Sistem Pendidikan Nasionl terkait dengan system Ketenagakerjaan Nasional belum link and match (masih output oriented belum job oriented).

iv. Banyak lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yang menganggur (usia muda).

v. Banyak kesempatan kerja yang tidak terserap, di kabupaten Pacitan hanya bisa terisi rata-rata 30% (job fair). Sedangkan di luar negeri banyak lowongan pekerjaan (skilled labour) yang tidak terisi dan minimnya kesempatan kerja, yang match antara persediaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja.

vi. Minimnya pendidikan/ keterampilan kewirausahaan (enterpreuner) bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja.

vii. Belum optimalnya informasi pasar kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.

viii. Belum optimalnya efektivitas tata kelola kelembagaan, pembinaan, dan mediasi dalam penerapan hubungan industrial.

ix. Sarana dan prasarana pendukung

x. Lemahnya SDM penduduk dan masyarakat transmigrasi di kawasan perbatasan

xi. Kurangnya kerja sama antar wilayah dan sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi

xii. Kurangnya fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi

xiii. Kurangnya sosialisasi transmigrasi lokal dan regional

2.4. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan dengan melakukan penyesuaian terhadap detil kegiatan.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengacu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rancangan awal RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap tugas pokok dan fungsi dinas serta kinerja kegiatan.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan. Perencanaan Program/kegiatan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
4. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
5. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
6. Program pengembangan ekspor
7. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
8. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

9. Program perencanaan tenaga kerja

10. Program penempatan tenaga kerja

11. Program hubungan industrial

12. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

a. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

Usulan dari masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2026 diantaranya adalah usulan dari Kecamatan, namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar dari masyarakat.

b. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan

Sedangkan pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir dalam Renja 2026 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan

Tabel 2.2 RANWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN PACITAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
1	**207.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**persen**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**10.000.000,00**	**16**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**40**	**0**	**40**	**0**	**40**	**0**
	207.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja**	**dokumen**	**1.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	207.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	0				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0	0				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2	**207.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas**	**persen**	**20**	**0**	**0.00**	**0**	**20.00**	**3.021.986.600,00**	**0**	**0**	**6**	**291.488.478,00**	**0**	**1.304.643.613,00**	**0**	**0**	**6**	**1.596.132.091,00**	**30**	**52,82**	**6**	**1.596.132.091,00**	**30**	**0**
	.		**Persentase tenagakerja terampil dan kompeten**	**persen**	**45**		**0.00**	**0**	**45.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	207.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja**	**orang**	**340.00**	**0**	**0.00**	**0**	**340.00**	**3.021.986.600,00**	**0**	**0**	**0**	**291.488.478,00**	**0**	**1.304.643.613,00**	**0**	**0**	**0**	**1.596.132.091,00**	**0**	**52,82**	**0**	**1.596.132.091,00**	**0**	**0**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
	207.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	peserta	340.00	0	0.00	0	340.00	2.246.986.600,00	0	0	0	252.054.752,00	0	980.561.850,00	0	0	0	1.232.616.602,00	0	54,86	0	1.232.616.602,00	0	0
	207.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	0.00	0	0.00	0	96.00	775.000.000,00	0	0	0	39.433.726,00	0	324.081.763,00	0	0	0	363.515.489,00	0	46,91	0	363.515.489,00	0	0
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	50,89				
																			Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Rendah		2	2	
																			Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	52,82				
																			Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Rendah				
3	**207.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL dan AKAD**	**persen**	**65**	**0**	**0.00**	**0**	**65.00**	**185.000.000,00**	**10**	**9.456.000,00**	**21**	**69.163.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**78.619.600,00**	**47,69**	**42,5**	**31**	**78.619.600,00**	**47.69**	**0**
	207.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumllah tenaga kerja yang mendapatkan fasiltas pembinaan**	**orang**	**250.00**	**0**	**0.00**	**0**	**250.00**	**185.000.000,00**	**0**	**9.456.000,00**	**0**	**69.163.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.619.600,00**	**0**	**42,5**	**0**	**78.619.600,00**	**0**	**0**
	207.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	200.00	0	0.00	0	200.00	185.000.000,00	0	9.456.000,00	0	69.163.600,00	0	0	0	0	0	78.619.600,00	0	42,5	0	78.619.600,00	0	0
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	42,5				
																			Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1	
																			Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	42,5				
																			Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	**207.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)**	**persen**	**86**	**0**	**0.00**	**0**	**86.00**	**345.000.000,00**	**14**	**1.790.000,00**	**0**	**9.177.300,00**	**0**	**50.064.000,00**	**0**	**0**	**14**	**61.031.300,00**	**16,28**	**17,69**	**14**	**61.031.300,00**	**16.28**	**0**
	.		**Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)**	**persen**	**30**		**0.00**	**0**	**30.00**		**4**		**0**		**0**		**0**		**4**		**13,33**		**4**		**13.33**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
	207.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta sosialisasi Hubungan Industrial, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada perusahaan**	**orang**	**140.00**	**0**	**0.00**	**0**	**140.00**	**345.000.000,00**	**0**	**1.790.000,00**	**0**	**9.177.300,00**	**0**	**50.064.000,00**	**0**	**0**	**0**	**61.031.300,00**	**0**	**17,69**	**0**	**61.031.300,00**	**0**	**0**
	207.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perselisihan	3.00	0	0.00	0	3.00	25.000.000,00	0	1.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.790.000,00	0	7,16	0	1.790.000,00	0	0
	207.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	0.00	0	0.00	0	2970.00	320.000.000,00	0	0	0	9.177.300,00	0	50.064.000,00	0	0	0	59.241.300,00	0	18,51	0	59.241.300,00	0	0
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	12,84				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2	
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	17,69				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
5	**330.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**nilai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**75.00**	**8.223.329.067,00**	**0**	**###########**	**0**	**2.048.415.093,00**	**75**	**869.558.929,00**	**0**	**0**	**75**	**4.671.127.349,00**	**100,2**	**56,8**	**75**	**4.671.127.349,00**	**0**	**0**
	330.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**23.00**	**0**	**0.00**	**0**	**23.00**	**142.243.128,00**	**5**	**9.789.200,00**	**2**	**17.377.500,00**	**2**	**9.455.200,00**	**0**	**0**	**9**	**36.621.900,00**	**39,13**	**25,75**	**9**	**36.621.900,00**	**39.13**	**0**
	330.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7.00	0	0.00	0	7.00	73.397.555,00	0	0	0	10.017.500,00	0	1.880.000,00	0	0	0	11.897.500,00	0	16,21	0	11.897.500,00	0	0
	330.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2.00	0	0.00	0	2.00	12.235.573,00	1	3.000.000,00	0	0	0	3.439.000,00	0	0	1	6.439.000,00	50	52,63	1	6.439.000,00	50	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
	330.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2.00	0	0.00	0	2.00	13.000.000,00	1	0	0	3.163.500,00	0	0	0	0	1	3.163.500,00	50	24,33	1	3.163.500,00	50	0
	330.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	43.610.000,00	0	6.789.200,00	0	4.196.500,00	0	4.136.200,00	0	0	0	15.121.900,00	0	34,68	0	15.121.900,00	0	0
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	31,96				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		4	4	
	330.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**51.00**	**0**	**0.00**	**0**	**51.00**	**5.170.183.002,00**	**3**	**###########**	**3**	**1.283.883.678,00**	**1**	**671.226.221,00**	**0**	**0**	**7**	**3.121.370.121,00**	**13,73**	**60,37**	**7**	**3.121.370.121,00**	**13.73**	**0**
	330.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	50.00	0	0.00	0	50.00	5.150.183.002,00	0	1.160.506.222,00	0	1.276.551.678,00	0	671.226.221,00	0	0	0	3.108.284.121,00	0	60,35	0	3.108.284.121,00	0	0
	330.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	20.000.000,00	0	5.754.000,00	0	7.332.000,00	0	0	0	0	0	13.086.000,00	0	65,43	0	13.086.000,00	0	0
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	62,89				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Rendah		2	2	
	330.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**persen**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**473.749.946,00**	**3**	**36.446.259,00**	**3**	**113.788.148,00**	**1**	**2.325.900,00**	**0**	**0**	**7**	**152.560.307,00**	**7**	**32,2**	**7**	**152.560.307,00**	**7**	**0**
	330.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	113.742.174,00	0	13.610.159,00	30	63.949.828,00	50	2.325.900,00	0	0	80	79.885.887,00	80	70,23	80	79.885.887,00	80	0
	330.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase bahan logistik kantor yang tersedia	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	60.291.922,00	0	0	11	24.645.000,00	50	0	0	0	61	24.645.000,00	61	40,88	61	24.645.000,00	61	0
	330.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	27.223.850,00	0	7.061.100,00	40	5.563.320,00	50	0	0	0	90	12.624.420,00	90	46,37	90	12.624.420,00	90	0
	330.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	272.492.000,00	5	15.775.000,00	2	19.630.000,00	2	0	0	0	9	35.405.000,00	75	12,99	9	35.405.000,00	75	0
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	76,5	42,62				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
																				Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sangat Rendah		4	4	
	330.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**persen**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**109.767.837,00**	**12**	**0**	**0**	**95.988.915,00**	**0**	**12.081.906,00**	**0**	**0**	**12**	**108.070.821,00**	**12**	**98,45**	**12**	**108.070.821,00**	**12**	**0**
	330.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	unit	0.00	0	0.00	0	10.00	109.767.837,00	0	0	21	95.988.915,00	2	12.081.906,00	0	0	23	108.070.821,00	230	98,45	23	108.070.821,00	0	0
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	230	98,45				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1	
	330.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**persen**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**2.234.099.997,00**	**7**	**529.368.502,00**	**10**	**529.110.552,00**	**0**	**174.469.702,00**	**0**	**0**	**17**	**1.232.948.756,00**	**17**	**55,19**	**17**	**1.232.948.756,00**	**17**	**0**
	330.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	5.000.000,00	1	1.140.000,00	2	1.050.000,00	1	0	0	0	4	2.190.000,00	33,33	43,8	4	2.190.000,00	33.33	0
	330.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	346.263.997,00	1	59.407.792,00	2	56.013.412,00	1	18.836.132,00	0	0	4	134.257.336,00	33,33	38,77	4	134.257.336,00	33.33	0
	330.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	1.882.836.000,00	1	468.820.710,00	2	472.047.140,00	1	155.633.570,00	0	0	4	1.096.501.420,00	33,33	58,24	4	1.096.501.420,00	33.33	0
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	46,94				
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3	
	330.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**persen**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**80.00**	**93.285.157,00**	**8**	**11.289.144,00**	**0**	**8.266.300,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**58**	**19.555.444,00**	**72,5**	**20,96**	**58**	**19.555.444,00**	**72.5**	**0**
	330.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	67.00	0	0.00	0	67.00	51.750.091,00	0	11.289.144,00	1	8.266.300,00	1	0	0	0	2	19.555.444,00	2,99	37,79	2	19.555.444,00	2.99	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
	330.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1.00	0	0.00	0	1.00	41.535.066,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					1,5	18,9				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					26,89	48,82				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6	**330.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**63.09**	**35.000.000,00**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3,17**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
	330.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase penerbitan TDG**	**persen**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**35.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	330.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	5.00	0	0.00	0	5	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	0				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0	0				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
7	**330.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**11.33**	**1.090.000.000,00**	**0**	**14.560.000,00**	**0**	**264.886.314,00**	**0**	**631.460.000,00**	**0**	**0**	**0**	**910.906.314,00**	**0**	**83,57**	**0**	**910.906.314,00**	**0**	**0**
	330.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana perdagangan yang di bangun/revitalisasi dan dipelihara**	**unit**	**5.00**	**0**	**0.00**	**0**	**5.00**	**1.090.000.000,00**	**0**	**14.560.000,00**	**0**	**264.886.314,00**	**0**	**631.460.000,00**	**0**	**0**	**0**	**910.906.314,00**	**0**	**83,57**	**0**	**910.906.314,00**	**0**	**0**
	330.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	15.00	0	0.00	0	15.00	1.090.000.000,00	0	14.560.000,00	0	264.886.314,00	0	631.460.000,00	0	0	0	910.906.314,00	0	83,57	0	910.906.314,00	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	83,57				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Tinggi		1	1	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0	83,57				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Tinggi				
8	**330.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya**	**persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**85.000.000,00**	**100**	**32.065.000,00**	**0**	**15.186.000,00**	**0**	**1.540.000,00**	**0**	**0**	**100**	**48.791.000,00**	**100**	**57,4**	**100**	**48.791.000,00**	**0**	**0**
	330.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana Perdagangan/pasar daerah yang dipantau Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**unit**	**15.00**	**0**	**0.00**	**0**	**15.00**	**85.000.000,00**	**4**	**32.065.000,00**	**0**	**15.186.000,00**	**0**	**1.540.000,00**	**0**	**0**	**4**	**48.791.000,00**	**26,67**	**57,4**	**4**	**48.791.000,00**	**26.67**	**0**
	330.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	365.00	0	0.00	0	365.00	35.000.000,00	0	1.540.000,00	0	9.840.000,00	0	1.540.000,00	0	0	0	12.920.000,00	0	36,91	0	12.920.000,00	0	0
	330.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	paket	4200.00	0	0.00	0	4200.00	50.000.000,00	0	30.525.000,00	0	5.346.000,00	0	0	0	0	0	35.871.000,00	0	71,74	0	35.871.000,00	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	54,33				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah		2	2	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					26,67	57,4				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
9	**330.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru**	**persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**8.30**	**290.000.000,00**	**0**	**85.530.000,00**	**0**	**610.000,00**	**0**	**49.950.000,00**	**0**	**0**	**0**	**136.090.000,00**	**0**	**46,93**	**0**	**136.090.000,00**	**0**	**0**
	330.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor**	**kali**	**1.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**290.000.000,00**	**0**	**85.530.000,00**	**0**	**610.000,00**	**0**	**49.950.000,00**	**0**	**0**	**0**	**136.090.000,00**	**0**	**46,93**	**0**	**136.090.000,00**	**0**	**0**
	330.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	1.00	0	0.00	0	1.00	290.000.000,00	0	85.530.000,00	0	610.000,00	0	49.950.000,00	0	0	0	136.090.000,00	0	46,93	0	136.090.000,00	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	46,93				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0	46,93				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
10	**330.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yangberlaku**	**persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**30.43**	**40.000.000,00**	**6**	**6.700.000,00**	**0**	**9.263.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**15.963.500,00**	**19,72**	**39,91**	**6**	**15.963.500,00**	**0**	**0**
	330.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang**	**unit**	**700.00**	**0**	**0.00**	**0**	**700.00**	**40.000.000,00**	**6**	**6.700.000,00**	**0**	**9.263.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**15.963.500,00**	**0,86**	**39,91**	**6**	**15.963.500,00**	**0.86**	**0**
	330.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	700.00	0	0.00	0	700.00	40.000.000,00	0	6.700.000,00	0	9.263.500,00	0	0	0	0	0	15.963.500,00	0	39,91	0	15.963.500,00	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	39,91				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,86	39,91				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
11	**330.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk**		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**13.26**	**92.735.000,00**	**6**	**0**	**0**	**51.782.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**51.782.000,00**	**45,25**	**55,84**	**6**	**51.782.000,00**	**0**	**0**
	330.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**kali**	**1.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**92.735.000,00**	**0**	**0**	**0**	**51.782.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.782.000,00**	**0**	**55,84**	**0**	**51.782.000,00**	**0**	**0**
	330.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	5.00	0	0.00	0	5.00	92.735.000,00	0	0	0	51.782.000,00	0	0	0	0	0	51.782.000,00	0	55,84	0	51.782.000,00	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	55,84				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah		1	1	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0	55,84				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah				
12	**332.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigrasi Swakarsa**		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	332.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta penyuluhan Tranmigrasi**	**orang**	**50.00**	**0**	**0.00**	**0**	**50.00**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	332.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1.00	0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	0				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0	0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				29,69	32,39				
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total																				**13.428.050.667,00**			**7.570.443.154,00**		
Persentase Realisasi Anggaran																				**56.38%**					
Predikat																				**Rendah**					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik dan berkualitas. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat ;
b. Pembangunan Sektor Unggulan;
c. Pemerataan dan Kewilayahan ;
d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
e. Pembangunan Ekonomi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional juga harus sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan

sesuai dalam RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025 yaitu "Membangun Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Sosial". Agar tercapai sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalaian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan yaitu sama dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan diterjemahkan kedalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Pacitan yang sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan adalah :

a. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

   Upaya Pembangunan / Rehabilitasi bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana aktifitas perdagangan yang memadai, kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan kelancaran, ketertiban peredaran barang dan jasa. Pembangunan perdagangan dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan di daerah. Perdagangan sebagai penggerak perekonomian masyarakat harus mampu dijaga perkembangannya. Distribusi barang kebutuhan pokok harus selalu tersedia dengan harga terjangkau.

b. Meningkatnya Kinerja Sektor Tenaga Kerja

Pembangunan di sector ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan seperti pengurangan tingkat pengangguran terbuka, pencari kerja yang ditempatkan, hubungan industrial dan syarat kerja yang kondusif dan penempatan transmigrasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perdagangan dan Tenaga Kerja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Adapun Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja antara lain sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Menstabilkan ketersedian bapokting	Terjaganya ketersediaan bapokting	Neraca Kebutuhan bahan pokok kabupaten Pacitan	>0	>0	>0	200.000	210.000	220.000
			Prosentase koefisien harga antar waktu	>9	>9	>9	12	12,5	13
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	PDRB perdagangan dan eceran	2.104. 005.280	2.187. 799.547	2.271. 593.814	3.510.000. 000	3.520.000. 000	3.530.000. 000
			Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha informal	6,06	7,57	9,09	17,50	17,60	17,70
			Prosentase pelaku usaha dalam pengembangan produk unggulan daerah	14,90	15,05	15,20	18,20	18,30	18,40
		Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	83,88	84,00	84,20	90,00	90,10	90,20
3	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,12	1,96	1,81	1,67	1,55	1,55

	pendapatan masyarkat								
			Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	65,67	66	66,5	77,6	77,7	77,8
			Persentase hubungan industrial dan syarat kerja yang kondusif	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penempatan Transmigran	100	100	100	100	100	100

3.3 PROGRAM KEGIATAN

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Dinas Perdaganagan dan Tenga Kerja

Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Program	Kegiatan
Program stabilisasi harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting	Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pameran Dagang Nasional
	Pameran Dagang Lokal
Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program	Kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan jasa pemelihraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program perencanaan tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Program	Kegiatan
	Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi
Program penempatan tenaga kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kot
	Pelayanan antar Kerja
	Perluasan Kesempatan Kerja
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Job Fair/Bursa Kerja
Program hubungan industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program pembangunan Kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penyuluhan Transmigrasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Program ini dilengkapi dengan indikator terukur dalam pencapaian hasilnya. Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10**	**10**	**102.357.845,00**	**93.000.000,00**
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	2	2	39.000.000,00	35.000.000,00
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	12.077.300,00	17.000.000,00
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	13.000.000,00	16.000.000,00
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2	38.280.545,00	25.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan dokumen keuangan perangkat daerah**	**14**	**14**	**20,000,000.00**	**30,000,0000.00**
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	12	5.193.384.559,00	5.160.000.000,00
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	20,000,000.00	30,000,000.00
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan kebutuhan dasar operasional perangkat daerah**	**12**	**12**	**480.075.694,00**	**438.000.000,00**
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	104.755.864,00	145.000.000,00
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	89.267.000,00	Rp. 79.000.000
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	26.052.830,00	29.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	260.000.000,00	264.000.000,00
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersediannya sarana dan prasarana kerja perangkat daerah**	**12**	**12**	**65.000.000,00**	**70.000.000,00**
3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6	6	65.000.000,00	70.000.000,00
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah**	**12**	**12**	**2.243.448.304,00**	**2.236.000.000,00**
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	5.000.000,00	6.000.000,00
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	338.999.736,00	280.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	1.899.448.568,00	1.950.000.000,00
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12**	**12**	**99.999.961,00**	**165.000.000,00**
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	65	59.999.961,00	65.000.000,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1	40.000.000,00	100.000.000,00
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Prosentase pelaku usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan**	**72.31**	**72.31**	**35.000.000,00**	**80.000.000,00**
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Jumlah pelaku usaha pergudangan yang dibina**	**80**	**80**	**35.000.000,00**	**80.000.000,00**
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	80	80	35.000.000,00	80.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Prosentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**11.33**	**11.33**	**842.262.704,00**	**1.100.000.000,00**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana perdagangan yang dibangun/revitalisasi dan dipelihara**	**5**	**5**	**842.262.704,00**	**1.100.000.000,00**
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	842.262.704,00	1.100.000.000,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Prosentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya**	**100**	**100**	**85.000.000,00**	**145.000.000,00**
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana perdagangan / pasar daerah yang dipantau harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**15**	**15**	**85.000.000,00**	**145.000.000,00**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	365	365	35.000.000,00	85.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
		Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar / jumlah paket sembako pasar daerah	2 / 4200	2 / 4200	50.000.000,00	60.000.000,00
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Prosentase pelku usaha yang menjadi eksportir baru**	**8.3**	**8.3**	**450.000.000,00**	**120.000.000,00**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan pormosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor**	**3**	**3**	**450.000.000,00**	**120.000.000,00**
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	1	1	450.000.000,00	120.000.000,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase UTTP yang ditera / tera Ulang UTTP yang sah**	**43.47**	**43.47**	**40.000.000,00**	**80.000.000,00**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, Pengawasan / penyuluhan metrologi legal**	**550/2/50**	**550/2/50**	**40.000.000,00**	**80.000.000,00**
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera dan ditera ulang	650	750	40.000.000,00	80.000.000,00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Prosentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk**	**13.65**	**13.65**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri**	**5**	**5**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5	5	75.000.000,00	100.000.000,00
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Prosentase kabupaten yang menyusun rencana tenaga kerja**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	**35.000.000,00**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**1**	**1**	**10.000.000,00**	**35.000.000,00**
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen RTK makro	1	1	10.000.000,00	35.000.000,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**50** **60**	**50** **60**	**2.242.661.400,00**	**2.242.661.400,00**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**3400**	**3400**	**2.242.661.400,00**	**2.242.661.400,00**
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan nernasis kompetensi pada tahun n	3400	3400	2.242.661.400,00	2.242.661.400,00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**66.4**	**66.4**	**245.000.000,00**	**180.000.000,00**
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**250**	**250**	**245.000.000,00**	**180.000.000,00**
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	200	200	245.000.000,00	180.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / CTKI yang diberikan fasilitas pelatihan	40	40	0.00	0.00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**100** **60**	**100** **60**	**20,000,000.00**	**80,000,000.00**
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**140**	**140**	**20,000,000.00**	**80,000,000.00**
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	80	80	20,000,000.00	80,000,000.00
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**100**	**100**	**10,000,000.00**	**15,000,000.00**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**50**	**50**		
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1	1	10,000,000.00	15,000,000.00

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2026, diharapkan Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan hasil (Outcome) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Kepala Dinas
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pacitan

Drs. ACEP SUHERMAN, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19681222 198803 1 001

KAB. PACITAN

RENJA BAPPEDALITBANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Pacitan Tahun 2026 memuat usulan program, kegiatan serta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bappedalitabng Kabupaten Pacitan Tahun 2026 serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2026 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pacitan, 8 Agustus 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660614 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 31
3.3. Program Dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 47
BAB V P E N U T U P 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024 6

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2024 Kabupaten Pacitan 7

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan 15

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pacitan 18

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pacitan 30

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang 32

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Pacitan 35

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu :

a. Persiapan penyusunan renja perangkat daerah;
b. Penyusunan rancangan awal renja perangkat daerah;
c. Penyusunan rancangan renja perangkat daerah;
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah, dan
f. Penetapan renja perangkat daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen perangkat daerah, renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Penyusunan Renja Bappedalitbang Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahn Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan tujuan dibuatnya dokumen rencana kerja ini adalah :

a. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan tahun 2026;
b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Pacitan, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Pacitan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan aatau program, maka diharapkan kebijakan ke depannya akan lebih baik. Selain daripada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Pada Tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Pacitan menerima anggaran sebesar Rp. 10.750.934.694,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 10.304.238.869,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 97,73% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,85% serta

efisiensi anggaran sebesar Rp. 446.695.825,00. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.637.136.999	5.268.544.959	93,46
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.115..000	182.072.000	98,89
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.587.838.694	3.425.774.044	95,48
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.691.545	91.485.000	94,62
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.189.725	530.306.661	98,17
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	472.166.250	464.533.000	98,38
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.377.000	313.119.765	64,91
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.758.785	261.254.489	95,43
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.828.797.6955	1.769.027.850	96,73
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.018.719.025	1.000.352.250	98,20
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	326.958.670	312.848.700	95,68
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	483.120.000	455.826.900	94,35
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.235.000.000	2.219.340.690	99,30
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.055.000.000	1.046.810.890	99,22
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	653.880.000	649.781.300	99,37
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	526.120.000	522.748.500	99,36
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.050.000.000	1.047.325.370	99,75
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	316.900.000	315.956.300	99,70
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	390.000.000	389.771.800	99,94
16	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	343.100.000	341.597.270	99,56
JUMLAH TOTAL		10.750.934.694	10.304.238.869	95,85

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2024 Kabupaten Pacitan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**>B**	**>B**	**78.20 >B**	**74 >B**	**94,63**	**74 >B**	**72,45**	**97,90%**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	23	23	18	18	100	18	10	56
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23	23	18	18	100	18	10	56
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	59	59	59	59	100	59	35	50
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	30	30	100	30	30	100
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwulananSemesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33	33	33	33	100	59	20	60
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	217	217	100	100	100	165	-	-
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	217	217	247	247	100	165	-	-
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	100	100	100	100	100	100	58	58
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12	12	12	12	100	11	6	55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	7	58
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	19	19	20	19	95	100	8	8
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19	19	20	19	95	13	0	0
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	100	100	100	96,6	100	50	50	50
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	12	12	12	100	7	6	50
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	12	12	12	100	9	9	75
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	80	75	80	80	100	100	59	59
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	23	34	34	100	33	15	45
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	33	33	66	66	100	58	51	88
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	2	2	2	100	1	-	-
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD**	100	98,24	100	100	100	100	100	100
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD**	2	2	2	2	100	2	1	50
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	1	1	100	2	2	100
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1	1	13	13	100	14	14	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	2	4	4	100	2	1	33
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis data SIPD**	2	2	2	2	100	2	-	-
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	100	1	2	2
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang Yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	100	100	100	100	50	67	67
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan	1	1	1	1	100	1	-	-
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah**	3	3	3	3	100	2	1	50
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7	7	4	7	100	4	3	75
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksnaan Pembangunan	8	8	7	10	100	8	4	50
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia**	100	100	100	99,27	99,27	100	51	51
.		**Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian dan SDA dan Infrastruktur**	100	95,79	100	96,84	96,84	100	38	38
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	50	50	50	50	100	50	30	61
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	2	2	100	2	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5	5	2	2	100	2	0	0
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12	12	2	2	100	2	1	50
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	2	2	100	2	0	0
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10	10	2	2	100	2	0	0
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan EvaluasiDalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	-	-	2	2	100	2	2	100
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	40	40	42	42	100	40	10	25
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	100	1	1	100
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	12	12	3	3	100	3	1	33
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Perekonomian	8	8	19	19	100	9	5	56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	1	1	100	1	1	100
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12	12	2	2	100	2	0	0
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8	8	16	16	100	8	3	38
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	40	40	46	46	100	40	10	25
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	1	1	1	1	100	1	1	100
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Rensta/Renja Bidang Infrastruktur	12	12	2	2	100	2	2	100
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	10	10	26	26	100	8	7	88
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	3	3	100	3	1	133
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Penelitian / Kajian Yang Dimanfaatkan Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah Dimanfaatkannya Hasil Penelitian / Kajian Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah**	**97**	**100**	**98**	**100**	**102,04**	**100**	**75**	**75**
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan**	2	2	6	6	6	3	2	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2	2	6	6	100	3	2	67
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dimanfaatkan**	4	4	7	7	100	4	6	104
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4	4	7	7	100	4	6	104
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi yang Dimanfaatkan**	1	1	1	1	100	1	-	-
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	1	1	1	1	100	1	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Total rata-rata capaian dari seluruh sub kegiatan adalah 97,43 % untuk capaian kinerja dengan predikat "sangat tinggi" dengan 95,85 % untuk capaian keuangannya dengan predikat "sangat tinggi".
2. Total rata-rata capaian dari seluruh kegiatan yang ada di Bappedalitbang mencapai 93,75 % dengan predikat "sangat tinggi" begitu juga dengan realisasi keuangannya.
3. Total rata-rata capaian dari seluruh program adalah, 98,56 % dengan predikat "sangat tinggi".

   Predikat kinerja tersebut merupakan capaian yang harus dipertahankan dan harus mendapat dukungan penuh dari seluruh karyawan karyawati Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan agar masyarakat puas dengan pelayanan yang telah dilakukan dan nilai SAKIP Kabupaten Pacitan semakin baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam renstra. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 211 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan. Tugas tersebut termasuk diantaranya menyusun seluruh dokumen perencanaan Kabupaten Pacitan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selain itu Bappedalitbang juga

melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas Bappedalitbang Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah;
3. Penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
4. Penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan innovator di dalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin komplek dan cepat. Secara umum, pelayanan yang dilakukan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan adalah :

a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
d. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Bappedalitbang;
e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA PD) Bappedalitbang;
f. Mengadakan Penelitian Untuk Kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
g. Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah;

h. Melakukan Koordinasi Perencanaan Dengan Perangkat Daerah Lain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Pacitan dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pacitan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	96	97,94	102,02
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Digunakan Dalam Rumusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100
No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	100%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia	100	99,27	99,27%
		Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	100	96,84	96,84%
3	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan Oleh PD	98	100	102,04%
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP dan IKM PD	>B	>B	>B

Berdasarkan tabel 2.3, pada tahun 2024 kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan sesuai tabel diatas program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian realisasi kinerjanya tidak mencapai target dikarenakan terdapat 4 capaian program perangkat daerah yang mendapat asistensi oleh bappedalitbang (bidang pembangunan manusia dan bidang perekonomian, SDA, infrastruktur) tidak tercapai target capaian realisasinya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam menyusun Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain :

1. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah sesuai dengan kompetensinya;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
4. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan dengan lembaga swasta (CSR) dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap pencapaian program nasional seperti norma, standart, prosedur dan kebijakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan.

Melihat permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappedalitbang adalah :

1. Peran Bappedalitbang sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.
2. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya perencana dengan berbekal keterbatasan jumlah sumber daya aparatur perencana.
3. Ketersediaan system informasi berbasis teknologi informasi sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
4. Masih adanya pemahaman sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dianggap formalitas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan, apakah sudah sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, target dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan tidak mengalami perubahan yang signifikan dan telah sesuai dengan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pacitan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				8.496.632.730,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				9.430.250.000,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.496.632.730,60	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.430.250.000,00
	PERENCANAAN				7.884.543.862,60	PERENCANAAN				8.855.250.000,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Kab. Pacitan	>B Nilai	4.875.570.275,60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Kab. Pacitan	>B Nilai	5.500.000.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		18 Dok	46.383.278,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		18 Dok	100.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18 Dok	46.383.278,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18 Dok	100.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah		40 Dok	3.748.409.610,60	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah		40 Dok	3.945.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/ bulan	3.698.060.165,60	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/ bulan	3.850.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		40 Lap	50.349.445,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		40 Lap	95.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100 %	39.786.840,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100%	90.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		155 Paket	39.786.840,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		165 Paket	90.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100 %	333.914.020,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100%	430.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	68.826.020,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11 Paket	110.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lap	265.088.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lap	320.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan		100 %	157.261.470,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan		100%	120.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	157.261.470,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 Unit	120.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan		100 %	332.060.222,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan		100%	430.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	145.382.222,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	170.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap	186.678.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap	260.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		80 %	217.754.835,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		80%	385.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		33 Unit	81.242.595,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		33 Unit	80.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		58 Unit	43.534.200,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60 Unit	85.000.000,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	44.400.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	48.578.040,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	120.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD		100 %	1.428.423.000,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	Kab. Pacitan	100 %	1.570.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD		2 Dok	778.000.000,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD		2 Dok	820.000.000,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 BA	135.000.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 BA	80.000.000,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		14 BA	266.000.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		14 BA	380.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)		4 Dok	377.000.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)		4 Dok	360.000.000,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis data SIPD		1 Dok	252.723.000,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis data SIPD		1 Dok	300.000.000,00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dok	28.000.000,00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dok	40.000.000,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		100 Orang	163.668.000,00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		50 Orang	190.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	61.055.000,00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	70.000.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah		3 Dok	297.700.000,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah		2 Dok	240.000.000,00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		7 Lap	150.000.000,00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		5 Lap	160.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		8 Lap	147.700.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		8 Lap	80.000.000,00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-		-	100.000.000,00	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-		1 Dok	210.000.000,00
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Dok	100.000.000,00	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Dok	100.000.000,00
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Dok	0,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Dok	110.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia		100 %	1.580.550.587,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia	Kab. Pacitan	100 %	1.785.250.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		50 Kali	650.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		50 Kali	900.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dok	148.479.400,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dok	275.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Lap	107.289.600,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Lap	90.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Lap	100.920.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Lap	125.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		2 Dok	114.216.600,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		2 Dok	160.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Lap	82.794.400,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Lap	120.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Lap	96.300.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Lap	130.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		40 Kali	496.391.200,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		40 Kali	458.250.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dok	91.931.600,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dok	63.250.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		3 Lap	152.832.900,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		3 Lap	75.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Lap	21.423.400,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Lap	85.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dok	104.100.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dok	70.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		2 Lap	102.707.200,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		2 Lap	90.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Lap	23.396.100,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Lap	75.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		40 Kali	434.159.387,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		40 Kali	427.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dok	89.046.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dok	42.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Lap	122.658.700,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Lap	90.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Lap	23.465.100,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Lap	75.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		3 Dok	75.373.200,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dok	65.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		2 Lap	101.602.600,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		2 Lap	80.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Lap	22.013.787,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Lap	75.000.000,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				612.088.868,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				575.000.000,00
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang Dimanfaatkan oleh PD		100 %	330.089.500,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang Dimanfaatkan oleh PD	Kab. Pacitan	100 %	400.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan		3 Dok	148.025.500,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan		3 Dok	175.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		3 Dok	148.025.500,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		3 Dok	175.000.000,00

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dimanfaatkan		4 Dok	182.064.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dimanfaatkan		4 Dok	200.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		4 Dok	182.064.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		4 Dok	200.000.000,00
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-		-	281.999.368,00	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	Kab. Pacitan	-	300.000.000,00
	Invensi dan Inovasi	-		3 Keg	281.999.368,00	Invensi dan Inovasi	-		3 Keg	240.000.000,00
	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah		3 Keg	131.829.368,00	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah		3 Keg	150.000.000,00
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		1 Lap	150.170.000,00	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		1 Lap	150.000.000,00
					8.496.632.730,60					**9.555.250.000,00**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Pacitan secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan, tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan ke Bappedalitbang Kabupaten Pacitan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang akan direncanakan pada RKPD Tahun 2025.

Perolehan usulan program dan kegiatan diperoleh dari perencanaan Teknoktratis, Politis, Top Up, Top Down. Sedangkan perencanaan secara partisipasi dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Musrenbang desa. Musrenbang desa merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang dilaksanakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
2. Musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
3. Forum Perangkat Daerah. Forum ini merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat daerah atau gabungan perangkat daerah sebagai upaya mengisi rencana kerja yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh perangkat daerah terkait.
4. Musrenbang Kabupaten. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja PD hasil Forum PD dengan cara meninjau keserasian renja PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD.

Bappedalitbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa memperhatikan usulan dari berbagai pihak termasuk dari pemangku kepentingan, LSM dan perguruan tinggi.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pacitan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrument untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu dilakukannya penyelerasan perencanaan dan penganggaran agar dapat mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun sasaran strategis nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) ;
2. Pembentukan Koperasi Merah Putih;
3. Pembangunan Sekolah Rakyat;
4. Pembangunan 3 Juta Rumah;
5. Program cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai/dihasilkan. Penetapan tujuan dalam perencanaan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang diperoleh dari proses analisis yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

Adapun implementasi dari misi yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka telah dirumuskan tujuan di dalam perencanaaan sebagai berikut :

"Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Inovatif"

Untuk mendukung terwujudnya tujuan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan, sasaran yang akan dijalankan adalah : (1) Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi dan akuntabilitas perencanaan daerah (2) Meningkatnya Kualitas

dan Kuantitas riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Inovatif	Indeks Perencanaan Pembangunan	97,94	98	98,1	98,2	98,3	98,4
	Indeks Inovasi Daerah	50	50,5	51	51,5	52	52,5

Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi dan akuntabilitas perencanaan daerah	Nilai SAKIP perencanaan	22,5	23	23,5	24	24,5	25
	Persentase Ketercapaian Indikator program dengan kategori minimal tinggi	98,06	98,11	98,16	98,21	98,26	98,31
2. Meningkatnya kualitas layanan tata kelola perangkat Daerah	Nilai IKM PD	90	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100

3.3. Program Dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan

Pada dasarnya kegiatan di Bappedalitbang Kabupaten Pacitan sebagai pengarah setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi perangkat daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat keberhasilannya.

Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, yakni terwujudnya : "PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA"
2. Pengentasan kemiskinan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam merumuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Penyelarasan isu-isu strategis bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Secara garis besar, Program dan Kegiatan yang direncanakan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
   b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
   c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
   d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui :
   a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
   b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Program Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. Invensi dan Inovasi.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
Kabupaten Pacitan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			**8.496.632.730,60**			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.496.632.730,60**			
5	**01**				**PERENCANAAN**			**7.884.543.862,60**			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Kab. Pacitan	4.875.570.275,60	DAU	72,65	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		46.383.278,00		18 Dokumen	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		46.383.278,00		18 Dok	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah		3.748.409.610,60		40 Dok	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.698.060.165,60		33 Orang / bulan	
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		50.349.445,00		40 Lap	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		39.786.840,00		100 %	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		39.786.840,00		155 Paket	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi		333.914.020,00		100 %	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		68.826.020,00		10 Paket	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		265.088.000,00		12 Lap	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan		157.261.470,00		100 %	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		157.261.470,00		10 Unit	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan		332.060.222,00		100 %	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		145.382.222,00		12 Lap	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		186.678.000,00		12 Lap	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		217.754.835,00		80 %	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		81.242.595,00		33 Unit	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		43.534.200,00		60 Unit	
5	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		44.400.000,00		1 Unit	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		48.578.040,00		1 Unit	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Pacitan	1.428.423.000,00	DAU	100 %	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan		778.000.000,00		100%	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		135.000.000,00		1 BA	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		266.000.000,00		1 BA	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)		377.000.000,00		2 Dok	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi perencanaan yang terupdate		252.723.000,00		100%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		28.000.000,00		1 Dok	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		163.668.000,00		50 Orang	
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		61.055.000,00		1 Buku	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan		297.700.000,00		100%	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		150.000.000,00		5 Lap	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		147.700.000,00		8 Lap	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang selaras dengan pemerintah pusat		100.000.000,00		100%	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		100.000.000,00		1 Dok	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Indikator Program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kategori minimal tinggi	Kab. Pacitan	1.580.550.587,00	DAU	99,32 %	
						Persentase Ketercapaian Indikator Program Bidang Perekonomian ,Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan kategori minimal tinggi				96,89%	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi perencanaan pembangunan yang terlaksana bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		650.000.000,00		100%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		148.479.400,00		2 Dok	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		107.289.600,00		2 Lap	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		100.920.000,00		2 Lap	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		114.216.600,00		2 Dok	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		82.794.400,00		2 Lap	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		96.300.000,00		2 Lap	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi perencanaan pembangunan yang terlaksana bidang Perekonomian, dan Sumberdaya Alam		496.391.200,00		100%	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		91.931.600,00		1 Dok	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		152.832.900,00		3 Lap	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		21.423.400,00		1 Lap	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		104.100.000,00		1 Dok	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		102.707.200,00		2 Lap	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		23.396.100,00		1 Lap	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kordinasi perencanaan pembangunan yang terlaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		434.159.387,00		100%	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		89.046.000,00		1 Dok	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		122.658.700,00		2 Lap	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		23.465.100,00		1 Lap	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		75.373.200,00		3 Dok	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		101.602.600,00		2 Lap	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		22.013.787,00		1 Lap	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**612.088.868,00**			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Kab. Pacitan	330.089.500,00	DAU	71%	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan		148.025.500,00		3 Dok	
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		148.025.500,00		3 Dok	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		182.064.000,00		4 Dok	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		182.064.000,00		4 Dok	
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Inovasi Daerah yang Diterapkan dan berkelanjutan	Kab. Pacitan	281.999.368,00	Kab. Pacitan	72%	
5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan		281.999.368,00		4 Keg	
5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah		131.829.368,00		3 Keg	
5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		150.170.000,00		1 Lap	
						J U M L A H		**8.496.632.730,60**			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDALITBANG KABUPATEN PACITAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2026, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			**8.496.632.730,60**				**9.430.250.000,00**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.496.632.730,60**				**9.430.250.000,00**
5	01				PERENCANAAN			7.884.543.862,60				8.855.250.000,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	72,65	4.875.570.275,60	Kab. Pacitan	DAU	72,85	5.500.000.000,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	18 Dok	46.383.278,00			18 Dok	100.000.000,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	46.383.278,00			18 Dok	100.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	40 Dok	3.748.409.610,60			40 Dok	3.945.000.000,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	3.698.060.165,60			33 Orang/ bulan	3.850.000.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Lap	50.349.445,00			40 Lap	95.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100 %	39.786.840,00			100%	90.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	39.786.840,00			165 Paket	90.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	333.914.020,00			100%	430.000.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	68.826.020,00			11 Paket	110.000.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	265.088.000,00			12 Lap	320.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100 %	157.261.470,00			100%	120.000.000,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	157.261.470,00			13 Unit	120.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan	100 %	332.060.222,00			100%	430.000.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	145.382.222,00			12 Lap	170.000.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	186.678.000,00			12 Lap	260.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	80 %	217.754.835,00			80%	385.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	81.242.595,00			33 Unit	80.000.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	43.534.200,00			60 Unit	85.000.000,00
5	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44.400.000,00			1 Unit	100.000.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.578.040,00			1 Unit	120.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.428.423.000,00	Kab. Pacitan	DAU	100 %	1.570.000.000,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	100%	778.000.000,00			100%	820.000.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	135.000.000,00			1 BA	80.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	266.000.000,00			1 BA	380.000.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	2 Dok	377.000.000,00			2 Dok	360.000.000,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi perencanaan yang terupdate	100%	252.723.000,00			100%	300.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	28.000.000,00			1 Dok	40.000.000,00
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	163.668.000,00			50 Orang	190.000.000,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	61.055.000,00			1 Buku	70.000.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan	100%	297.700.000,00			100%	240.000.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Lap	150.000.000,00			5 Lap	160.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Lap	147.700.000,00			8 Lap	80.000.000,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang selaras dengan pemerintah pusat	100%	100.000.000,00			100%	210.000.000,00
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dok	100.000.000,00			1 Dok	100.000.000,00
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dok	0,00			1 Dok	110.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Indikator Program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kategori minimal tinggi	99,32 %	1.580.550.587,00	Kab. Pacitan	DAU	99,37%	1.785.250.000,00
						Persentase Ketercapaian Indikator Program Bidang Perekonomian ,Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan kategori minimal tinggi	96,89 %				99,94 %	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi perencanaan pembangunan yang terlaksana bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	650.000.000,00			100%	900.000.000,00
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	148.479.400,00			2 Dok	275.000.000,00
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Lap	107.289.600,00			2 Lap	90.000.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Lap	100.920.000,00			2 Lap	125.000.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	114.216.600,00			2 Dok	160.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Lap	82.794.400,00			2 Lap	120.000.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Lap	96.300.000,00			2 Lap	130.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi perencanaan pembangunan yang terlaksana bidang Perekonomian, dan Sumberdaya Alam	100%	496.391.200,00			100%	458.250.000,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dok	91.931.600,00			1 Dok	63.250.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Lap	152.832.900,00			3 Lap	75.000.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Lap	21.423.400,00			1 Lap	85.000.000,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dok	104.100.000,00			1 Dok	70.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Lap	102.707.200,00			2 Lap	90.000.000,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Lap	23.396.100,00			1 Lap	75.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kordinasi perencanaan pembangunan yang terlaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	434.159.387,00			100%	427.000.000,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dok	89.046.000,00			1 Dok	42.000.000,00
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Lap	122.658.700,00			2 Lap	90.000.000,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Lap	23.465.100,00			1 Lap	75.000.000,00
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dok	75.373.200,00			1 Dok	65.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Lap	101.602.600,00			2 Lap	80.000.000,00
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Lap	22.013.787,00			1 Lap	75.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			612.088.868,00				575.000.000,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Jumlah penelitian yang dilaksanakan	71%	330.089.500,00	Kab. Pacitan	DAU	72%	335.000.000,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	3 Dok	148.025.500,00			3 Dok	175.000.000,00
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dok	148.025.500,00			3 Dok	175.000.000,00
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	4 Dok	182.064.000,00			4 Dok	160.000.000,00
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4 Dok	182.064.000,00			4 Dok	160.000.000,00
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Inovasi Daerah yang Diterapkan dan berkelanjutan	72%	281.999.368,00	Kab. Pacitan	DAU	73%	240.000.000,00
5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan	4 Keg	281.999.368,00			4 Keg	240.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	3 Keg	131.829.368,00			3 Keg	120.000.000,00
5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Lap	150.170.000,00			1 Lap	120.000.000,00
J U M L A H								**8.496.632.730,60**				**9.430.250.000,00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan terjemahan dan operasionalisasi sebagaimana yang tercantum dalam program dan kegiatan PD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi Organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Bappedalitbang selama Tahun Anggaran 2024 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19660415 199203 1 008

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAERAH

2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan , disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs.DARYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... iii
BAB PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 70
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 70
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 71
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 95
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional..... 95
3.2 Tujuan dan Sasaran 96
3.3 .Program dan Kegiatan..... 99
BAB IV PENUTUP..... 111
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 111
4.2 Rekomendasi 112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.

Tabel 2.2. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tabel 2.3. Perbandingan realisasi kenerja Tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Target Jangka Menengah dengan Target RPJMD Akhir.

Tabel 2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standart Nasional.

Tabel 2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan.

Tabel 2.7. Analisis Efisiensi Per Sasaran.

Tabel 2.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel 2.9. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

Tabel 2.10. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2026 .

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2026.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Untuk menunjang Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara stimultan/ pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan Kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan. Renja BKD Tahun Anggaran 2025 akan lebih konkrit dan terukur. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kabupaten Pacitan
c. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BKD Kabupaten Pacitan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Tujuan dan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapain target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dalam menyusun Program Kegiatan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan .BKD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**502.01.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**00.00**	**0**	**77.00.00**	**17.885.592.550,00**	**0**	**3.844.460.212,00**	**80**	**4.573.710.550,00**	**0**	**5.381.524.348,00**	**0**	**8.111.602.147,00**	**80**	**21.911.297.257,00**	**103,9**	**122,51**	**80**	**21.911.297.257,00**	**0**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Dok**	**23.00**	**0**	**00.00**	**0**	**23**	**151.265.000,00**	**6**	**0**	**6**	**22.439.000,00**	**7**	**30.150.670,00**	**8**	**127.305.965,00**	**27**	**179.895.635,00**	**117,39**	**118,93**	**27**	**179.895.635,00**	**117.39.00**	**0**	
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	05.00	0	2	55.945.000,00	2	0	0	1.639.000,00	2	3.438.370,00	1	50.739.900,00	5	55.817.270,00	250	99,77	10	55.817.270,00	0	0	
	502.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	5.000.000,00	1	0	0	0	0	4.322.800,00	0	620.000,00	1	4942800	100	98,86	1	4.942.800,00	0	0	
	502.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen		0	00.00	0	1	5.000.000,00	0	0	1	0	1	0	1	9.861.400,00	3	9861400	300	197,23	3	9.861.400,00	0	0	

			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																									
	502.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	10.320.000,00	1	0	0	0	0	0	0	10.129.300,00	1	10129300	100	98,15	1	10.129.300,00	0	0	
	502.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	10.000.000,00	0	0	1	0	1	0	1	14.779.365,00	3	14779365	300	147,79	3	14.779.365,00	0	0	
	502.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	00.00	0	14	65.000.000,00	2	0	4	20.800.000,00	3	22.389.500,00	5	41.176.000,00	14	84365500	100	129,79	14	84.365.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					191,67	128,6					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dok**	**59.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**59**	**6.892.998.170,00**	**14**	**1.008.015.799,00**	**15**	**1.760.519.283,00**	**15**	**1.953.720.772,00**	**15**	**1.709.810.258,00**	**59**	**6.432.066.112,00**	**100**	**93,31**	**59**	**6.432.066.112,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0	00.00	0	12	6.416.653.633,00	3	960.390.199,00	3	1.730.959.283,00	3	1.754.661.372,00	1	1.461.172.758,00	10	5.907.183.612,00	83,33	92,06	10	5.907.183.612,00	0	0	
	502.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0	00.00	0	1	331.335.037,00	1	10.647.600,00	0	0	0	154.438.200,00	0	148.806.700,00	1	313892500	100	94,74	1	313.892.500,00	0	0	

	502.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	145.009.500,00	1	36.978.000,00	0	29.560.000,00	0	44.621.200,00	0	99.830.800,00	1	210990000	100	145,5	1	210.990.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					94,44	110,77					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**744.275.000,00**	**100**	**154.190.000,00**	**100**	**0**	**100**	**397.866.000,00**	**100**	**290.749.900,00**	**100**	**842.805.900,00**	**100**	**113,24**	**100**	**842.805.900,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	00.00	0	220	13.695.000,00	0	0	110	0	0	0	0	31.100.000,00	110	31.100.000,00	50	227,09	110	31.100.000,00	0	0	
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	00.00	0	110	277.700.000,00	0	4.950.000,00	110	0	0	272.616.000,00	0	0	110	277566000	100	99,95	110	277.566.000,00	0	0	
	502.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	00.00	0	110	452.880.000,00	54	149.240.000,00	0	0	60	125.250.000,00	0	259.649.900,00	114	534139900	103,64	117,94	114	534.139.900,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					84,55	148,33					1=3
Predikat kinerja(%)																					Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**302.005.036,00**	**100**	**64.403.958,00**	**100**	**61.186.906,00**	**100**	**118.905.527,00**	**100**	**212.162.812,00**	**100**	**456.659.203,00**	**100**	**151,21**	**100**	**456.659.203,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	3	10.385.000,00	1	0	2	0	0	10.277.500,00	0	10.370.000,00	3	20.647.500,00	100	198,82	3	20.647.500,00	0	0	
	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	10	43.698.536,00	3	600.000,00	3	0	2	30.871.300,00	0	2.110.000,00	8	33581300	80	76,85	8	33.581.300,00	0	0	

	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	2	13.544.000,00	1	0	0	0	1	13.261.700,00	0	3.864.000,00	2	17125700	100	126,44	2	17.125.700,00	0	0	
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	2	87.840.000,00	2	35.794.500,00	0	17.223.500,00	0	6.353.500,00	0	69.496.000,00	2	128867500	100	146,71	2	128.867.500,00	0	0	
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	2	9.917.500,00	1	0	1	0	0	0	0	11.345.735,00	2	11345735	100	114,4	2	11.345.735,00	0	0	
	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	00.00	0	2	136.620.000,00	2	28.009.458,00	0	43.963.406,00	0	58.141.527,00	0	114.977.077,00	2	245091468	100	179,4	2	245.091.468,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					96,67	140,44					1=4
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**20.037.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.819.000,00**	**200**	**3.010.029.180,00**	**200**	**3.027.848.180,00**	**200**	**15.110,96**	**200**	**3.027.848.180,00**	**200**	**0**	
	502.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	00.00	0	6	20.037.430,00	0	0	0	0	5	17.819.000,00	1	170.249.180,00	6	188.068.180,00	100	938,58	6	188.068.180,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	938,58					1=5
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**9.583.016.914,00**	**100**	**2.609.820.855,00**	**100**	**2.706.164.511,00**	**100**	**2.781.535.229,00**	**100**	**2.641.184.872,00**	**100**	**10.738.705.467,00**	**100**	**112,06**	**100**	**10.738.705.467,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan		0	12.00	0	12	9.202.414.514,00	3	2.520.197.757,00	3	2.616.244.866,00	3	2.690.887.195,00	3	2.572.479.128,00	12	10.399.808.946,00	100	113,01	24	10.399.808.946,00	0	0	

			Disediakan																									
	502.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	12.00	0	12	11.336.000,00	3	1.380.000,00	3	2.070.000,00	3	1.380.000,00	3	3.886.000,00	12	8716000	100	76,89	24	8.716.000,00	0	0	
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	12.00	0	12	369.266.400,00	3	88.243.098,00	3	87.849.645,00	3	89.268.034,00	3	64.819.744,00	12	330180521	100	89,42	24	330.180.521,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	93,11					1=6
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**80**	**191.995.000,00**	**80**	**8.029.600,00**	**80**	**23.400.850,00**	**80**	**81.527.150,00**	**80**	**120.359.160,00**	**80**	**233.316.760,00**	**100**	**121,52**	**80**	**233.316.760,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	56.00.00	0	56	135.645.000,00	10	8.029.600,00	8	23.400.850,00	15	59.556.150,00	23	110.059.160,00	56	201.045.760,00	100	148,21	112	201.045.760,00	0	0	
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	01.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	2	0	0	0	
	502.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	06.00	0	8	26.350.000,00	0	0	0	0	6	21.971.000,00	2	10.300.000,00	8	32271000	100	122,47	14	32.271.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	90,23					1=7

Predikat kinerja(%)																					San gat Tin ggi	Sang at Tingg i						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					817 ,39	15.82 1,23	817.3 9/1					
Predikat kinerja(%)																					San gat Tin ggi	Sang at Tingg i						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
2	**502.02.0 0**	**PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**7**	**0**	**00.0 0**	**0**	**7**	**283.707.22 3.327,00**	**2**	**26.170.46 6.100,00**	**2**	**25.933.16 6.909,00**	**2**	**19.947.78 1.059,00**	**1**	**41.672.60 7.984,00**	**7**	**113.724.02 2.052,00**	**100**	**40,08**	**7**	**113.724.02 2.052,00**	**100**	**0**	**Badan Keuang an Daerah**
	.		**Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungj awaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**2**		**00.0 0**	**0**	**02.00**		**0**		**0**		**2**		**1**		**3**		**150**		**3**		**150**		**Badan Keuang an Daerah**
	502.02.2. 01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu**	**%**	**100.0 0.00**	**0**	**00.0 0**	**0**	**100**	**1.636.391. 500,00**	**100**	**269.507.1 92,00**	**100**	**376.574.5 30,00**	**0**	**329.365.8 75,00**	**10 0**	**941.234.1 48,00**	**100**	**1.916.681. 745,00**	**100**	**117,1 3**	**100**	**1.916.681. 745,00**	**100**	**0**	
	502.02.2. 01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokum en		0	00.0 0	0	2	583.222.85 5,00	2	116.400.0 00,00	0	116.400.0 00,00	0	111.186.5 00,00	0	556.600.4 00,00	2	900.586.90 0,00	100	154,4 2	2	900.586.90 0,00	0	0	
	502.02.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokum en		0	00.0 0	0	2	70.728.005 ,00	0	0	0	0	2	13.298.25 0,00	0	56.948.50 0,00	2	70246750	100	99,32	2	70.246.750 ,00	0	0	
	502.02.2. 01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en		0	00.0 0	0	43	11.788.000 ,00	40	0	0	0	0	0	0	11.674.15 0,00	40	11674150	93, 02	99,03	40	11.674.150 ,00	0	0	
	502.02.2. 01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en		0	00.0 0	0	43	9.991.500, 00	0	0	34	0	40	0	10	9.981.000, 00	84	9981000	195 ,35	99,89	84	9.981.000, 00	0	0	
	502.02.2. 01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en		0	00.0 0	0	43	8.892.000, 00	40	0	0	0	0	0	0	8.845.100, 00	40	8845100	93, 02	99,47	40	8.845.100, 00	0	0	

	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		0	00.00	0	43	5.025.500,00	0	0	34	0	40	4.792.000,00	10	0	84	4792000	195,35	95,35	84	4.792.000,00	0	0	
	502.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		0	00.00	0	2	422.851.190,00	2	149.357.192,00	0	11.100.000,00	0	60.047.625,00	0	149.625.789,00	2	370130606	100	87,53	2	370.130.606,00	0	0	
	502.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		0	00.00	0	2	502.892.450,00	2	0	2	245.324.530,00	2	136.291.500,00	1	143.809.209,00	7	525425239	350	104,48	7	525.425.239,00	0	0	
	502.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		0	00.00	0	1	21.000.000,00	0	3.750.000,00	0	3.750.000,00	0	3.750.000,00	1	3.750.000,00	1	15000000	100	71,43	1	15.000.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					147,42	101,21					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**471.080.000,00**	**19,03**	**111.767.873,00**	**19,81**	**70.853.600,00**	**23,09**	**105.278.100,00**	**20,9**	**256.858.650,00**	**82,83**	**544.758.223,00**	**82,83**	**115,64**	**82,83**	**544.758.223,00**	**82.83**	**0**	
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		0	00.00	0	2	114.955.000,00	1	17.859.000,00	0	18.734.000,00	0	16.286.000,00	1	74.956.750,00	2	127.835.750,00	100	111,21	2	127.835.750,00	0	0	
	502.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Dokumen		0	00.00	0	12	36.780.000,00	3	8.229.700,00	3	5.550.000,00	3	12.194.800,00	3	10.534.000,00	12	36508500	100	99,26	12	36.508.500,00	0	0	

			Lainnya																									
	502.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		0	00.00	0	2	153.877.500,00	0	58.677.000,00	1	24.591.600,00	0	45.792.450,00	1	83.676.500,00	2	212737550	100	138,25	2	212.737.550,00	0	0	
	502.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		0	00.00	0	2	13.070.000,00	1	0	0	0	0	7.830.850,00	1	4.725.000,00	2	12555850	100	96,07	2	12.555.850,00	0	0	
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	00.00	0	86	152.397.500,00	0	27.002.173,00	40	21.978.000,00	0	23.174.000,00	46	82.966.400,00	86	155120573	100	101,79	86	155.120.573,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	109,32					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP**	**%**	**00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**278.920.000,00**	**100**	**51.535.659,00**	**100**	**106.039.537,00**	**100**	**52.540.300,00**	**100**	**214.436.150,00**	**100**	**424.551.646,00**	**100**	**152,21**	**100**	**424.551.646,00**	**0**	**0**	

	502.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		0	00.00	0	5	84.860.000,00	0	37.055.600,00	3	22.207.000,00	1	29.959.600,00	1	57.112.650,00	5	146.334.850,00	100	172,44	5	146.334.850,00	0	0	
	502.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		0	00.00	0	2	153.400.000,00	0	14.480.059,00	0	82.052.537,00	0	22.580.700,00	2	58.722.000,00	2	177835296	100	115,93	2	177.835.296,00	0	0	
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		0	00.00	0	5	40.660.000,00	0	0	3	1.780.000,00	0	0	2	98.601.500,00	5	100381500	100	246,88	5	100.381.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	178,42					1=3
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**prosentase terpenuhinya belanja transfer dan belanja tidak terduga**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100.00.00**	**281.020.831.827,00**	**41,1**	**25.737.655.376,00**	**8,69**	**25.304.699.242,00**	**24,61**	**19.385.596.784,00**	**22,68**	**40.010.079.036,00**	**97,08**	**110.438.030.438,00**	**97,08**	**39,3**	**97,08**	**110.438.030.438,00**	**97.08.00**	**0**	
	502.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		0	00.00	0	1	268.863.748.800,00	0	24.470.050.000,00	0	23.696.281.000,00	0	16.593.058.000,00	1	35.065.314.142,00	1	99.824.703.142,00	100	37,13	1	99.824.703.142,00	0	0	

	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		0	00.00	0	1	6.000.000.000,00	0	15.341.906,00	0	1.372.029.583,00	0	352.854.473,00	1	4.647.001.963,00	1	6387227925	100	106,45	1	6.387.227.925,00	0	0	
	502.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan		0	00.00	0	1	6.157.083.027,00	0	1.252.263.470,00	0	236.388.659,00	0	2.439.684.311,00	1	297.762.931,00	1	4226099371	100	68,64	1	4.226.099.371,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	70,74					1=4
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang					
	502.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**300.000.000,00**	**100**	**0**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**250.000.000,00**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**133,33**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**0**	
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	300.000.000,00	0	0	1	75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	250.000.000,00	1	400.000.000,00	100	133,33	1	400.000.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	133,33					1=5
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					479,91	557,61	479.91/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

3	**502.03.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**	**%**	**100**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**800.000.000,00**	**100**	**235.073.500,00**	**100**	**130.225.900,00**	**0**	**70.140.191,00**	**100**	**607.883.320,00**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**130,42**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan data aset yang valid**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**800.000.000,00**	**0**	**235.073.500,00**	**0**	**130.225.900,00**	**0**	**70.140.191,00**	**100**	**607.883.320,00**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**130,42**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**0**	
	502.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen		0	00.00	0	2	45.638.505,00	2	19.374.850,00	0	3.843.500,00	0	0	0	17.095.500,00	2	40.313.850,00	100	88,33	2	40.313.850,00	0	0	
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	00.00	0	9	67.933.040,00	0	7.540.000,00	9	5.210.000,00	0	17.640.200,00	0	21.115.000,00	9	51505200	100	75,82	9	51.505.200,00	0	0	
	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		0	00.00	0	43	42.057.140,00	0	18.703.650,00	0	3.855.000,00	0	0	40	21.836.500,00	40	44395150	93,02	105,56	40	44.395.150,00	0	0	
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		0	00.00	0	43	109.015.335,00	0	995.000,00	0	6.750.000,00	40	15.036.991,00	0	201.516.470,00	40	224298461	93,02	205,75	40	224.298.461,00	0	0	
	502.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	00.00	0	15	159.489.215,00	5	10.800.000,00	5	62.887.400,00	0	19.606.000,00	5	39.330.000,00	15	132623400	100	83,16	15	132.623.400,00	0	0	
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		0	00.00	0	15	306.461.765,00	5	166.560.000,00	5	36.580.000,00	0	6.757.000,00	5	272.544.850,00	15	482441850	100	157,42	15	482.441.850,00	0	0	
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	00.00	0	43	69.405.000,00	40	11.100.000,00	0	11.100.000,00	0	11.100.000,00	0	34.445.000,00	40	67745000	93,02	97,61	40	67.745.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					84,88	116,24					1=1
Predikat kinerja(%)																					Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100	130,42	100/1				

																					Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
4	**502.04.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**	**%**	**11,76**	**0**	**00.00**	**0**	**11.13**	**2.274.000.000,00**	**2,92**	**341.068.830,00**	**6,14**	**282.576.600,00**	**11,31**	**801.883.766,00**	**2,67**	**1.226.908.441,00**	**23,04**	**2.652.437.637,00**	**207,01**	**116,64**	**23,04**	**2.652.437.637,00**	**195.92**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah pendapatan pajak daerah**	**Milyar**	**37.40.00**	**0**	**00.00**	**0**	**37.40.00**	**2.274.000.000,00**	**6,11**	**341.068.830,00**	**12,88**	**282.576.600,00**	**23,72**	**801.883.766,00**	**5,61**	**1.226.908.441,00**	**48,32**	**2.652.437.637,00**	**129,2**	**116,64**	**48,32**	**2.652.437.637,00**	**129.02.00**	**0**	
	502.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	12	1.207.338.500,00	3	228.654.100,00	3	83.027.600,00	3	542.560.000,00	3	418.027.000,00	12	1.272.268.700,00	100	105,38	12	1.272.268.700,00	0	0	
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	150.000.000,00	0	16.574.730,00	0	9.825.000,00	0	83.351.072,00	5	47.463.041,00	5	157213843	500	104,81	5	157.213.843,00	0	0	
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0	00.00	0	255	214.159.500,00	62	46.510.000,00	21	38.790.000,00	83	62.434.100,00	92	79.857.000,00	258	227591100	101,18	106,27	258	227.591.100,00	0	0	
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		0	00.00	0	3	300.000.000,00	0	10.780.000,00	0	53.400.000,00	0	17.112.000,00	3	322.124.400,00	3	403416400	100	134,47	3	403.416.400,00	0	0	
	502.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	646285	81.442.500,00	642.353,00	2.820.000,00	2.166,00	41.059.000,00	837	20.792.000,00	935	53.916.900,00	646.291,00	118587900	100	145,61	646.291,00	118.587.900,00	0	0	
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		0	00.00	0	646285	51.059.500,00	642.353,00	0	2.166,00	10.768.000,00	837	16.932.000,00	935	166.491.900,00	646.291,00	194191900	100	380,32	646.291,00	194.191.900,00	0	0	
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	116.340.000,00	0	25.380.000,00	0	24.640.000,00	0	29.392.594,00	1	38.090.000,00	1	117502594	100	101	1	117.502.594,00	0	0	

	502.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	3.660.000,00	0	0	0	0	0	0	1	3.660.000,00	1	3660000	100	100	1	3.660.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	11	35.000.000,00	0	4.500.000,00	0	5.238.000,00	0	4.500.000,00	11	20.761.000,00	11	34999000	100	100	11	34.999.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		0	00.00	0	1	85.000.000,00	0	5.850.000,00	0	11.869.000,00	0	24.810.000,00	1	50.823.400,00	1	93352400	100	109,83	1	93.352.400,00	0	0	
	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0	00.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	3.960.000,00	0	0	1	25.693.800,00	1	29653800	100	98,85	1	29.653.800,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					136,47	135,14					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					129,2	116,64	129.2/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					132,18	81,93					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Tinggi					
Total																					**304.666.815.877,00**			**139.331.079.857,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																									**45.73%**		
Predikat																									**Sangat Rendah**		

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel. 2.2
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD	Prosentase Pertumbuhan PAD	6,45	4,92	76,27
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,48 %	12,71%	101,84
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,74	83,75	100,01

1. Tujuan meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD

   Indikator Kinerja Prosentase Pertumbuhan PAD

   Dengan rumus :

$$\frac{PADn - PADn-1}{PADn-1} x100\%$$

$PADn$: realisasi PAD tahun berjalan

$PADn-1$: realisasi PAD tahun lalu

$Realisasi\ PAD\ tahun\ berjalan - Realisasi\ PAD\ tahun\ lalu\ Realisasi\ PAD\ tahun\ lalu\ x100\%$

$$\frac{\text{Rp. 223.800.013.868,92} - \text{Rp. 213.300.354.867,05}}{\text{Rp 213.300.354.867,05}} x\ 100\% = 4{,}92\%$$

Dari hasil pengukuran untuk tujuan dari target yang ditetapkan sebesar 6,45% tercapai sebesar 4,92% dengan tingkat capaian sebesar 76,27%.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu Strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Beberapa strategi yang perlu dilakukan, meliputi antara lain:

a. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
b. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
c. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
d. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.

2. Sasaran Meningkatnya Penerimaan Daerah

a. Indikator Kinerja Sasaran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

Dengan rumus :

$$\frac{PADn}{\text{Pendapatan Tahun } n} x100\%$$

$\frac{\text{Rp } 223.800.013.868,92}{\text{Rp } 1.760.764.804.578,92} x\ 100\% = 12,71\%$

Indikator Kinerja Sasaran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 12,48% dan realisasi yang diperoleh adalah 12,71 % dengan capaian sebesar 101,84% atau katagori capaian baik

b. Indikator Kinerja Program Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan rumus :

$\frac{\text{Pajak Daerah Tahun n}}{PA\ \ n} x100\%$

$\frac{\text{Rp } 52.335.361.284,27}{\text{Rp } 223.800.013.868,92} x\ 100\% = 23,38\%$

Indikator Kinerja Program Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 11,13% dan realisasi yang diperoleh adalah 23,38% dengan capaian sebesar 210,06% atau katagori capaian baik.

Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan/sasaran, maka ditempuh melalui :

- ✓ Meningkatnya Ketetapan Pajak Daerah
- ✓ Meningkatnya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

3. Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah

Dengan rumus :

Indikator Kinerja Opini BPK : Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Pacitan Tahun 2023

Indikator Kinerja Opini BPK pada Tahun 2024 Badan keuangan Daerah Kabupaten Pacitan menargetkan memperoleh WTP dan realisasi yang diperoleh tercapai 100% dengan capaian sebesar 100% atau kategori capaian sangat baik dalam capaian kinerja pada sasaran tersebut di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, yang hasilnya sama yaitu 100%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tercapai yaitu memperoleh WTP. Peningkatan capaian kinerja Tahun 2024, menandakan bahwa kinerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Pacitan berhasil mempertahankan opini WTP sehingga Tujuan dapat tercapai.Berbagai upaya yang dilakukan agar Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah

- ✓ Mensosialisasikan berbagai Regulasi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Dearah;
- ✓ Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian Anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang terintegrasi disemua SKPD;
- ✓ Melaksanakan sosialisasi tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ✓ Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan khususnya Petugas Akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ✓ Meningkatkan koordinasi diantara Pengelola Keuangan dan Aset di OPD, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel.

4. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah

a. Indikator kinerja sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu.

Dengan Rumus :

Jumlah penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu X100

Jumlah Perda dan Perbup APBD yang ditetapkan tahun bersangkutan

Rp 7 x 100%

Rp 7 = 100%

Indikator kinerja sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100%.

b. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu

Dengan Rumus :

Jumlah penetapan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD tepat waktu tahun n X100

Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD tepat waktu yang ditetapkan tahun bersangkutan

Rp 2 x 100%

Rp 2 = 100%

Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% .

c. Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dengan Rumus :

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 7 dan realisasi yang diperoleh adalah 7 dengan capaian sebesar 100%.

d. Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun

Dengan Rumus :

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun

$\frac{\text{Rp} \quad 2}{} x\ 100\%$

Rp 2 = 100%

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 2 dan realisasi yang diperoleh adalah 2 dengan capaian sebesar 100%.

Berbagai upaya yang dilakukan agar meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

- ✓ Mensosialisasikan berbagai Regulasi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Dearah;
- ✓ Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian Anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan khususnya Petugas Akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ✓ Meningkatkan koordinasi diantara Pengelola Keuangan di OPD, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel.

5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah

Dengan Rumus :

Jumlah OPD tertib pelaporan barang milik daerah/Jumlah OPD yang ada

$\frac{Rp \quad 40}{Rp \quad 40} x\ 100\%$

$= 100\%$

Indikator Kinerja sasaran Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% .

b. Indikator Kinerja Program Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi

Rumus : Jumlah OPD barang/aset daerahnya yang teregistrasi dibandingkan Jumlah OPD yang ada

$\frac{Rp \quad 40}{Rp \quad 40} x\ 100\%$

$= 100\%$

Indikator Kinerja Program Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada tahun 2024BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% . Berbagai upaya yang dilakukan agar terwujudnya pengelolaan aset daerah yang akuntabel:

- ✓ Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan asset daerah;
- ✓ Mengaplikasikan software pengelolaan aset daerah yang terintegrasi disemua Organisasi Perangkat Daerah;
- ✓ Melaksanakan sosialisasi tata cara Pengelolaan Barang Daerah
- ✓ Meningkatkan SDM Pengelolaan Aset Daerah khususnya Petugas Pengurus Barang;
- ✓ Rekonsiliasi, verifikasi dan penilaian serta evaluasi aset daerah

6. Sasaran terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal.

Indikator Sasaran Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 83,74 dan realisasi yang diperoleh adalah 83,75 dengan capaian sebesar 100,01% atau katagori capaian baik, Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan engan adanya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan yang baik.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 2.3
Perbandingan realisasi kenerja Tahun ini dengan tahun lalu

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	**Prosentase Pertumbuhan PAD**	**6,42**	**25,66**	**(0,21)**	**29,08**	**4,92**
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,48	12,49	10,06	12,48	12,71
	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,13	16,80	25,30%	20,36	23,38
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	7	7	9	9	7
	Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	2	2	2	2	2
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100	100	100
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100	100	100

Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,74	-	80,32	83,74	83,75
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77	-		79,60	80

1. Tujuan Meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD
   Indikator Kinerja Prosentase Pertumbuhan PAD

   a. Indikator Kinerja Prosentase Pertumbuhan PAD

   Dari hasil pengukuran untuk tujuan meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD indicator kinerja prosentase pertumbuhan PAD target yang ditetapkan sebesar 6,42% tercapai sebesar 4,92% dengan tingkat capaian sebesar 76,27%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya ada tren naik turun terkait pertumbuhan PAD.

   Penjelasan terkait pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut :

   a) Peningkatan PAD itu sendiri, baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun lain-lain PAD yang sah.
   b) Pendapatan Kapitasi Puskesmas yang semula masuk pada komponen Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah sekarang menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah pada rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah karena Puskesmas melaksanakan pengelolaan keuangan secara BLUD sehingga pendapatan kapitasinya dicatatkan sebagai Pendapatan BLUD.
   c) Regulasi :

      - Peraturan Bupati Pacitan Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan

Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 171 Tahun 2022 Tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

2. Sasaran Meningkatnya Penerimaan Daerah

a. Indikator Kinerja Sasaran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan menargetkan 12,48% dan realisasi yang diperoleh adalah 12,71% dengan capaian sebesar 101,84 % atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 12,28 % mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Dana Transfer Pusat.

b. b.Indikator Kinerja Program Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan pada tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan menargetkan 11,13% dan realisasi yang diperoleh adalah 23,28% dengan capaian sebesar 209,16% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 20,36% indikator kinerja rasio pajak daerah pada tahun 2024 mengalami Peningkatan.

3. Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah.

   Indikator Kinerja Opini BPK Pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan WTP dan realisasi yang diperoleh adalah WTP dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah WTP indikator kinerja opini BPK pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

   Komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

4. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.

   a. Indikator Kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% indikator kinerja P ersentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

   b. Indikator Kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% indikator kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2023 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2024.

   c. Indikator Kinerja Program Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 7 dan realisasi yang diperoleh

adalah 7 dengan capaian sebesar 100% Jika dibandingkan dengan capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 9 pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2 Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD.

d. Indikator Kinerja Program Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 2 dan realisasi yang diperoleh adalah 2 dengan capaian sebesar 100%.

5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a. Indikator sasaran Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

b. Indikator Program Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

7. Sasaran terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal.

Indikator Sasaran Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 83,74 dan realisasi yang diperoleh adalah 83,75 dengan capaian sebesar 100,01% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 83,74 Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada

tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan enggan adanya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan yang baik.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 2.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Target Jangka Menengah dengan Target RPJMD Akhir

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,78	83,75	99,96
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	**Prosentase Pertumbuhan PAD**	**2,82**	**4,92**	**174,46**
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,96	12,71	98,07
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100

	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100

1. Target Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 83,78. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 83,75% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 99,96 % dari target di akhir Renstra.
2. Target Prosentase Pertumbuhan PAD yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 2,82%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 4,92% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 174,46 % dari target di akhir Renstra.
3. Target Rasio PAD terhadap Total Pendapatan yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 12,96%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 12,71% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 98,07 % dari target di akhir Renstra, selain dipengaruhi oleh Dana Tranfer juga dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk mewujudkan target tersebut sampai pada akhir periode Renstra.
4. Target Opini BPK yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu WTP. Pada tahun 2024 mencapai sebesar WTP atau dengan tingkat Capaian 100% dari target di akhir Renstra. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
5. Target Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.

6. Target Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.
7. Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.
8. Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional.

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standart Nasional

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standart Nasional	Ket
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	Prosentase Pertumbuhan PAD	4,92	-	
Meningkatnya Penerimaan Daerah	*Rasio PAD terhadap Total Pendapatan*	*12,71*	-	
	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	*23,38*	-	

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	*Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu*	*100*	-	
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	*100*	-	
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah*	*100*	-	
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	*100*	-	
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah daerah yang optimal	*Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah*	*83,75*	*88,39*	

a. Indikator Kinerja Opini BPK pada tahun 2024 Kabupaten Pacitan menargetkan WTP dan realisasi yang diperoleh adalah WTP dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah WTP indikator kinerja opini BPK pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023 kemudian apabila dibandaingkan dengan standart Provinsi/Nasional realisasinya sama yaitu memperoleh WTP (Wajar Tanpa Penegecualian).

b. Indikator Sasaran Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 83,74 dan realisasi yang diperoleh adalah 83,75 dengan capaian sebesar 100,01% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 80,74 Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan dengan adanya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan yang baik, kemudian apabila capaian kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah dibandingkan dengan propinsi/Nasional capaian kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah Lebih Rendah BKD Pacitan Lebih rendah sebesar 88,14.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/ penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Tabel 2.6

Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Dilakukan
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	Prosentase Pertumbuhan PAD		
Meningkatnya Penerimaan Daerah	*Rasio PAD terhadap Total Pendapatan*	*a. Sistem pembayaran pajak daerah masih konvensional* *b. Regulasi Perda* *c. terkait Retribusi*	*a. Pembayaran pajak daerah melalui pembayaran non tunai dan digital dengan sistem online dengan perluasan*

		Daerah masih produk lama belum diperbaharui sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan dari retribusi daerah	*kanal pembayaran dan kerjasama dengan bank RKUD. Sudah dimulai tahun 2022 dengan Pembayaran PBB Secara Online bekerjasama dengan Bank Jatim* *b. Penyempurnaan payung hukum retribusi daerah baik Perda maupun Perbup disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tahun 2022 dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.*
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Opini BPK		
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	*Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu*	*Perubahan Regulasi dalam Penyusunan Laporan keuangan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat dan tidak ada cukup waktu untuk memahami implementasinya sehingga dalam*	*Sering melakukan Asistensi dan Rekonsiliasi secara rutin/inten dengan dirangkaikan pembinaan / Sosialisasi /Bintek Pengelola keuangan.*

		pelaksanaannya kurang maksimal	
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	*a. Kemampuan SDM Menyusun Laporan keuangan (Terkait Basic pendidikan bukan Akuntansi d. Perubahan Format Laporan Pertanggungjawaban* *b. Adanya Temuan Audit BPK yang harus segera dibahas/ditindaklanjuti dalam proses penyusunan perda pertanggungjawaban* *c. Adanya Hasil Evaluasi Gubernur harus segera dibahas/ditindaklanjuti dalam proses penyusunan perda pertanggungjawaban*	*a. Memanfaatkan SDM yang ada dengan tetap selalu mengingatkan serta ikut mengecek setiap transaksi yang terjadi di SKPD* *b. Berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pembenahan di Tahun 2024* *c. Bekerjasama dengan dengan Institusi Akademik (Sekolah Vokasi UNS Surakarta) untuk mnyusun Perubahan Regulasi yang akan digunakan untuk pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Kebijakan Akuntansi pemerintah* *d. Koordinasi dengan Tim Narasumber Pengembang Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pelaporan* *e. Koordinasi dengan OPD dan Inspektorat kabupaten selaku APIP dalam penyelesaian Tindak lanjut* *f. Koordinasi dengan Tim BPKAD Provisi*

			Jawa Timur Terkait Proses Evaluasi Gubernur atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Biro Hukum sekretariat Propinsi Jawa Timur Nomor Register untuk penetapan Perda
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah*	*a. Aset tetap (Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Kartu Inventaris Barang (KIB) B, Kartu Inventaris Barang (KIB) C, Kartu Inventaris Barang (KIB) D, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) E) yang tidak informatif* *b. Kode barang / register barang yang belum diisi sesuai dengan ketentuan* *c. Kapitalisasi dan penyusutan aset yang belum didukung dengan aplikasi* *d. Pelaporan barang milih daerah yang belum dilaporkan secara periodik* *e. Kepemilikan / pengamanan aset yang belum didukung dengan bukti yang kuat, yaitu sertifikat*	*a. Mengadakan monitoring dan evaluasi serta pendampingan dengan perangkat daerah untuk melengkapi informasi aset tetap di aplikasi, agar aset yang disajikan lebih valid.* *b. Menyesuaikan kodefikasi / register barang sesuai dengan nomenklatur dan kondisi aset perangkat daerah terbaru yang diimplementasikan ke dalam aplikasi sehingga perangkat daerah tinggal mencetak kodefikasi / register barang tanpa perlu menulis secara manual.* *c. Bekerjasama dengan pihak pengembang aplikasi untuk mengimplementasikan kapitalisasi dan*

		dan papan kepemilikan aset	*penyusutan aset perangkat daerah kedalam aplikasi, sehingga data aset lebih akuntabel dan handal serta pelaporan barang milik daerah selesai tepat waktu.* *d. Dalam rangka pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan selesai tepat waktu, salah satu hal yang dilakukan adalah mengadakan rekonsiliasi secara periodik (setiap tiga bulan) dengan perangkat daerah. Sehingga pelaporan / pertanggungjawaban barang selesai tepat waktu* *e. Pengajuan permohonan tertulis kepada Dinas Permukiman dan Pertanahan untuk mensertifikatkan tanah pemda di Kartu Inventaris Barang A yang belum bersertifikat dan mengalokasikan anggaran belanja papan nama tanah, agar tanah pemda jelas indentitasnya dan kepemilikannya*

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of outcome). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;

b. Kinerja organisasi makin efisien.

Untuk mencapai sasaran organsasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Analisis Efisiensi Per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	EFISIENSI
1	**Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal**				**23.272.777.563,00**	**22.228.831.282,00**	**83,74**	**83,75**	**1,0001194**	**4,50%**
		Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	23.272.777.563,00	22.228.831.282,00	83,74	83,75	1,0001194	4,50%
2	**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**				**296.362.492.363,00**	**292.087.608.080,00**	**100,00**	**100,00**	**1,0000000**	1,44%
		Prosentase penetapan perda dan perbup APBD tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	295.390.492.363,00	291.124.798.211,00	100,00	100,00	**1,0000000**	1,44%
		Prosentase penetapan perda dan perbup pertanggungjawaban APBD tepat waktu		Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	972.000.000,00	962.809.869,00	100,00	100,00	**1,0000000**	0,95%
3	**Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**1.072.000.000,00**	**1.051.007.611,00**	**100,00**	**100,00**	**1,0000000**	**1,96%**
		Prosentase tertib pelaporan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	1.072.000.000,00	1.051.007.611,00	100,00	100,00	**1,0000000**	1,96%
4	**Meningkatnya Penerimaan Daerah**				**3.112.338.500,00**	**3.106.167.637,00**	**12,48**	**12,71**	**1,0184295**	**2,04%**
		Rasio PAD terhadap total pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.112.338.500,00	3.106.167.637,00	12,48	12,71	**1,0184295**	2,04%

Tingkat efisiensi sasaran

a. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal dengan indicator kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah tercapai sebesar 83,75% dengan tingkat efisiensi 4,50%.
b. Meningkatnya Penerimaan Daerah dengan indikator kinerja Rasio PAD terhadap Total Pendapatan tercapai sebesar 12,71% tingkat efisiensi 2,04%.
c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu dan Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu, Masing-masing tercapai 100% tingkat efisiensi 1,44% .
d. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah tercapai sebesar 100% dengan tingkat efisensi sebesar 1,96 %.

7. Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis

a. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal
b. Meningkatnya Penerimaan Daerah
c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
d. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 4 (Empat) program dan 14 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**502.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**77.00**	**23.272.777.563,00**	**80**	**22.228.831.282,00**	**103,9**	**95,51**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Dok**	**23**	**180.770.000,00**	**27**	**179.895.635,00**	**117,39**	**99,52**	
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	55.945.000,00	5	55.817.270,00	250	99,77	
	502.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	1	4.942.800,00	100	98,86	
	502.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	9.980.000,00	3	9.861.400,00	300	98,81	

	502.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10.320.000,00	1	10.129.300,00	100	98,15	
	502.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	15.005.000,00	3	14.779.365,00	300	98,50	
	502.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	84.520.000,00	14	84.365.500,00	100	99,82	
	502.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dok**	**59**	**7.215.292.398,00**	**59**	**6.654.928.713,00**	**100**	**92,23**	
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	6.625.202.997,00	10	6.130.046.213,00	83,33	92,53	
	502.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	378.833.401,00	1	313.892.500,00	100	82,86	
	502.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	211.256.000,00	1	210.990.000,00	100	99,87	
	502.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**844.490.000,00**	**100**	**842.805.900,00**	**100**	**99,80**	

	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	220	31.150.000,00	110	31.100.000,00	50	99,84	
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	277.700.000,00	110	277.566.000,00	100	99,95	
	502.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	535.640.000,00	114	534.139.900,00	103,64	99,72	
	502.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**432.712.833,00**	**100**	**430.681.791,00**	**100**	**99,53**	
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	20.770.500,00	3	20.647.500,00	100	99,41	
	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.008.333,00	8	33.581.300,00	80	95,92	
	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	17.439.000,00	2	17.125.700,00	100	98,20	
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	128.880.000,00	2	128.867.500,00	100	99,99	
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	11.463.000,00	2	11.345.735,00	100	98,98	

	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	219.152.000,00	2	219.114.056,00	100	99,98	
	502.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**3.118.532.365,00**	**200**	**3.027.848.180,00**	**200**	**97,09**	
	502.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	189.006.610,00	6	188.068.180,00	100	99,50	
	502.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	12.00	2.929.525.755,00	12	2.839.780.000,00	100	96,94	
	502.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**11.146.253.967,00**	**100**	**10.759.854.125,00**	**100**	**96,53**	
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.760.651.567,00	12	10.395.257.604,00	100	96,60	

	502.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11.336.000,00	12	8.716.000,00	100	76,89	
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	374.266.400,00	12	355.880.521,00	100	95,09	
	502.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80**	**334.726.000,00**	**80**	**332.816.938,00**	**100**	**99,43**	
	502.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	201.396.000,00	56	201.045.760,00	100	99,83	
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	99.680.000,00	1	99.500.178,00	100	99,82	
	502.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	33.650.000,00	8	32.271.000,00	100	95,90	

2	**502.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**2.00**	**293.538.948.363,00**	**3**	**117.581.618.080,00**	**150**	**40,06**	**Badan Keuangan Daerah**
	.		**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**7**		**7**		**100**		**Badan Keuangan Daerah**
	502.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu**	**%**	**100**	**2.062.918.000,00**	**100**	**2.039.877.745,00**	**100**	**98,88**	
	502.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	908.862.855,00	2	900.586.900,00	100	99,09	
	502.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	70.728.005,00	2	70.246.750,00	100	99,32	
	502.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	11.788.000,00	40	11.674.150,00	93,02	99,03	
	502.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	9.991.500,00	84	9.981.000,00	195,35	99,89	
	502.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	8.892.000,00	40	8.845.100,00	93,02	99,47	
	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	5.025.500,00	84	4.792.000,00	195,35	95,35	

	502.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	497.177.690,00	2	493.326.606,00	100	99,23	
	502.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	529.452.450,00	7	525.425.239,00	350	99,24	
	502.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	21.000.000,00	1	15.000.000,00	100	71,43	
	502.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD**	**%**	**100**	**546.080.000,00**	**82,83**	**538.258.223,00**	**82,83**	**98,57**	
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	129.955.000,00	2	125.335.750,00	100	96,45	

	502.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	36.780.000,00	12	36.508.500,00	100	99,26	
	502.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	213.877.500,00	2	212.737.550,00	100	99,47	
	502.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2	13.070.000,00	2	12.555.850,00	100	96,07	
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	86	152.397.500,00	86	151.120.573,00	100	99,16	

	502.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP**	**%**	**100**	**425.920.000,00**	**100**	**424.551.646,00**	**100**	**99,68**	
	502.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	5	146.860.000,00	5	146.334.850,00	100	99,64	
	502.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	178.400.000,00	2	177.835.296,00	100	99,68	
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	100.660.000,00	5	100.381.500,00	100	99,72	
	502.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**prosentase terpenuhinya belanja transfer dan belanja tidak terduga**	**%**	**100.00**	**292.927.574.363,00**	**97,08**	**114.178.930.466,00**	**97,08**	**38,98**	
	502.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	275.498.766.300,00	1	275.192.893.142,00	100	99,89	

	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	9.915.066.238,00	1	6.387.227.925,00	100	64,42	
	502.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	7.513.741.825,00	1	7.104.799.399,00	100	94,56	
	502.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah**	**%**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**100,00**	
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	100	100,00	
3	**502.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**	**%**	**100**	**1.072.000.000,00**	**100**	**1.051.007.611,00**	**100**	**98,04**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan data aset yang valid**	**%**	**100**	**1.072.000.000,00**	**100**	**1.051.007.611,00**	**100**	**98,04**	
	502.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	45.638.505,00	2	40.313.850,00	100	88,33	
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	9	72.033.040,00	9	51.505.200,00	100	71,50	

	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	43	47.457.140,00	40	44.395.150,00	93,02	93,55	
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	43	220.817.590,00	40	224.298.461,00	93,02	101,58	
	502.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	15	140.069.215,00	15	137.813.900,00	100	98,39	
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	15	478.084.510,00	15	484.936.050,00	100	101,43	
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	43	67.900.000,00	40	67.745.000,00	93,02	99,77	
4	**502.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**	**%**	**11.13**	**3.012.338.500,00**	**23,04**	**3.106.167.637,00**	**207,01**	**103,11**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah pendapatan pajak daerah**	**Milyar**	**37.40**	**3.112.338.500,00**	**48,32**	**3.106.167.637,00**	**129,2**	**99,80**	

	502.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.616.580.000,00	12	1.615.410.700,00	100	99,93	
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	150.000.000,00	5	149.577.843,00	500	99,72	
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	255	221.622.000,00	258	221.410.100,00	101,18	99,90	
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	404.284.000,00	3	403.416.400,00	100	99,79	
	502.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	646285	114.373.000,00	646.291,00	113.367.900,00	100	99,12	
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	646285	338.559.500,00	646.291,00	336.951.900,00	100	99,53	
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	113.260.000,00	1	112.982.594,00	100	99,76	
	502.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	3.660.000,00	1	3.660.000,00	100	100,00	
	502.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	11	35.000.000,00	11	34.999.000,00	100	100,00	

	502.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	85.000.000,00	1	84.737.400,00	100	99,69	
	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	30.000.000,00	1	29.653.800,00	100	98,85	

Sasaran Strategis

a. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal dengan indikator kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah Prosentase Capaian kinerja sebesar 100,01% yang didukung oleh 1 (satu) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing program didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan, sehingga total ada 7 kegiatan untuk mencapai indikator sasaran Tersebut.
b. Meningkatnya Penerimaan Daerah dengan indikator kinerja Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Prosentase capaian kinerja sebesar 101,84 % yang didukung oleh 1 (satu) Proram Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 Kegiatan.
c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu dan Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu Prosentase Capaian Kinerja masing masing sebesar 100% didukung 1 Program dan 5 Kegiatan.
d. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah deengan Indikator Kinerja Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah Prosentase Capaian sebesar 100% didukung 1 Program dan 1 Kegiatan.

8. Analisis Capaian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah di Peroleh dari Capaian Kinerja Bawahannya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Ket
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,48	12,71	101,84	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,13	23,38	210,06	Kepala Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	7	7	100	Kepala Bidang Anggaran
	Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	2	2	100	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100	Kepala Bidang Pengeloalaan Barang Milik Daerah
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,74	83,75	100,01	Kepala Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakip Perangkat Daerah	77	80	103,89	Sekretaris Badan Keuangan Daerah

Keberhasilan dari kinerja unit kerja yang didukung oleh kinerja individu itu sangat tergantung dari leadership, pentingnya kepemimpinan dalam pengelolaan kinerja menuntut atasan untuk mampu memimpin dialog kinerja bersama bawahan, menyampaikan ekspektasi kinerja dan strategi pencapaian kinerja, dan selama pelaksanaan kinerja diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada pegawai yang dipimpinnya .

9. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Pencapaian Sasaran tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Badan Keuangan Daerah Kab.Pacitan didukung oleh 93 orang ASN 43 Orang NON ASN 50 Orang.

Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari tingkat pendidikan baik yang ASN dan NON ASN sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :

Uraian	*Laki-Laki*	*Perempuan*	*Total*
S-II	*6*	*5*	*11*
S-I/D-IV	*23*	*24*	*47*
D3	*6*	*3*	*9*
SMA	*15*	*8*	*23*
SMP	*3*		*3*
<SMP			

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah Kab.Pacitan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D IV dan Strata I berjumlah 47 orang atau 50,54%, kemudian diikuti oleh pendidikan SMA berjumlah 23 orang atau 24,73%, pendidikan S2 berjumlah 11 orang atau 11,83%, dan DIII berjumlah 9 orang atau 9,68%. Serta SMP berjumlah 3 Orang atau 3,23% Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Badan Keuangan Daerah Kab.Pacitan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai baik CPNS maupun P3K.

10. Realisasi Anggaran

Pada P-APBD tahun anggaran 2024, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.819.608.426,00 realisasi Rp. 318.473.614.610,00 dengan capaian 98,35%. Besaran alokasi dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel.2.9

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	**502.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**23.272.777.563,00**	**22.228.831.282,00**	**95,51**
	502.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**180.770.000,00**	**179.895.635,00**	**99,52**
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.945.000,00	55.817.270,00	99,77
	502.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.942.800,00	98,86
	502.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.980.000,00	9.861.400,00	98,81
	502.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.320.000,00	10.129.300,00	98,15
	502.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15.005.000,00	14.779.365,00	98,50

	502.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.520.000,00	84.365.500,00	99,82
	502.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah**	**7.215.292.398,00**	**6.654.928.713,00**	**92,23**
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.625.202.997,00	6.130.046.213,00	92,53
	502.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.833.401,00	313.892.500,00	82,86
	502.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	211.256.000,00	210.990.000,00	99,87
	502.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**844.490.000,00**	**842.805.900,00**	**99,80**
	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31.150.000,00	31.100.000,00	99,84
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	277.700.000,00	277.566.000,00	99,95
	502.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	535.640.000,00	534.139.900,00	99,72
	502.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**432.712.833,00**	**430.681.791,00**	**99,53**
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.770.500,00	20.647.500,00	99,41

	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35.008.333,00	33.581.300,00	95,92
	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17.439.000,00	17.125.700,00	98,20
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	128.880.000,00	128.867.500,00	99,99
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11.463.000,00	11.345.735,00	98,98
	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.152.000,00	219.114.056,00	99,98
	502.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**3.118.532.365,00**	**3.027.848.180,00**	**97,09**
	502.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	189.006.610,00	188.068.180,00	99,50
	502.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.929.525.755,00	2.839.780.000,00	96,94
	502.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**11.146.253.967,00**	**10.759.854.125,00**	**96,53**
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10.760.651.567,00	10.395.257.604,00	96,60
	502.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.336.000,00	8.716.000,00	76,89
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	374.266.400,00	355.880.521,00	95,09

	502.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**334.726.000,00**	**332.816.938,00**	**99,43**
	502.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	201.396.000,00	201.045.760,00	99,83
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.680.000,00	99.500.178,00	99,82
	502.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33.650.000,00	32.271.000,00	95,90
2	**502.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**296.362.492.363,00**	**292.087.608.080,00**	**98,56**
	.		**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**			
	502.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu**	**2.062.918.000,00**	**2.039.877.745,00**	**98,88**
	502.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	908.862.855,00	900.586.900,00	99,09
	502.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	70.728.005,00	70.246.750,00	99,32
	502.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	11.788.000,00	11.674.150,00	99,03
	502.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	9.991.500,00	9.981.000,00	99,89
	502.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	8.892.000,00	8.845.100,00	99,47

	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5.025.500,00	4.792.000,00	95,35
	502.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	497.177.690,00	493.326.606,00	99,23
	502.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	529.452.450,00	525.425.239,00	99,24
	502.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	21.000.000,00	15.000.000,00	71,43
	502.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD**	**546.080.000,00**	**538.258.223,00**	**98,57**
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	129.955.000,00	125.335.750,00	96,45
	502.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36.780.000,00	36.508.500,00	99,26
	502.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	213.877.500,00	212.737.550,00	99,47
	502.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.070.000,00	12.555.850,00	96,07
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	152.397.500,00	151.120.573,00	99,16

	502.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP**	**425.920.000,00**	**424.551.646,00**	**99,68**
	502.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	146.860.000,00	146.334.850,00	99,64
	502.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	178.400.000,00	177.835.296,00	99,68
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.660.000,00	100.381.500,00	99,72
	502.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**prosentase terpenuhinya belanja transfer dan belanja tidak terduga**	**292.927.574.363,00**	**288.684.920.466,00**	**98,55**
	502.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	275.498.766.300,00	275.192.893.142,00	99,89
	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.915.066.238,00	6.387.227.925,00	64,42
	502.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56
	502.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100,00**
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00

3	**502.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**	**1.072.000.000,00**	**1.051.007.611,00**	**98,04**
	502.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan data aset yang valid**	**1.072.000.000,00**	**1.051.007.611,00**	**98,04**
	502.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	45.638.505,00	40.313.850,00	88,33
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	72.033.040,00	51.505.200,00	71,50
	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	47.457.140,00	44.395.150,00	93,55
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	220.817.590,00	224.298.461,00	101,58
	502.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	140.069.215,00	137.813.900,00	98,39
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	478.084.510,00	484.936.050,00	101,43
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	67.900.000,00	67.745.000,00	99,77
4	**502.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**	**3.112.338.500,00**	**3.106.167.637,00**	**99,80**
	502.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah pendapatan pajak daerah**	**3.112.338.500,00**	**3.106.167.637,00**	**99,80**

	502.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1.616.580.000,00	1.615.410.700,00	99,93
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	150.000.000,00	149.577.843,00	99,72
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	221.622.000,00	221.410.100,00	99,90
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	404.284.000,00	403.416.400,00	99,79
	502.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	114.373.000,00	113.367.900,00	99,12
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	338.559.500,00	336.951.900,00	99,53
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	113.260.000,00	112.982.594,00	99,76
	502.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00
	502.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	35.000.000,00	34.999.000,00	100,00
	502.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	85.000.000,00	84.737.400,00	99,69

	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	30.000.000,00	29.653.800,00	98,85
	BADAN KEUANGAN DAERAH			**323.819.608.426,00**	**318.473.614.610,00**	**98,35**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Beberapa hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan antara lain :

a. Mengelola dan menggali sumber pendapatan asli daerah secara profesional dan maksimal dengan memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan wajib pajak daerah serta mengadakan pertukaran informasi antar daerah untuk mengkaji sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimungkinkan dapat dilaksanakan di Kabupaten Pacitan;
b. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap APBD;
c. Melaksanakan pengaturan dan pengoordinasiaan, penelitian dan pengesahan DPA OPD dan DPPA OPD;
d. Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdsarkan surat permintaan membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Terdapat beberapa isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah antara lain:

1. Isu Internal

    1. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
    2. Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan.
    3. Peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana.
5. Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerah demi peningkatan pendapatan pajak daerah.
6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak.
7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak asset/kekayaan yang dihasilkan/ dicapai oleh daerah itu dalam tiap-tiap tahun anggaran, oleh sebab itusecara professional, sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
8. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.
9. Mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah.
10. Penatausahaan aset daerah secara tertib

2. Isu Eksternal
   a. Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar dengan daerah lain agar daerah dapat berkembang dengan pesat.
   b. Peraturan Perundang-undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannyaberbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan

keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKD Kabupaten Pacitan , terkait program prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Berikut ini disajikan hasil review terhadap Rancangan Awal Renja BKD Kabupaten Pacitan Tahun 2026, yang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.10. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Keuangan Daerah						309.937.512.521,00							318.515.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						309.937.512.521,00							318.515.000.000,00	
	5	02				KEUANGAN						309.937.512.521,00							318.515.000.000,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.923.366.063,00						-	23.940.000.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23Dokumen 23Dokumen			-	166.933.100,00			-	-	-	23Dokumen 23Dokumen	315.000.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	63.343.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.978.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.957.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.224.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.341.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan			14 Laporan	65.088.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	14 Laporan	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59Dokumen 59Dokumen			-	6.381.118.739,00			-	-	-	59Dokumen 59Dokumen	7.700.000.000,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan			43 Orang/bulan	6.233.125.239,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	54 Orang/bulan	7.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			4 Dokumen	5.925.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	425.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	142.068.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100Prosentase 100Prosentase			-	356.335.000,00			-	-	-	100Prosentase 100Prosentase	1.125.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			100 Paket	19.755.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang			100 Orang	190.580.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	96 Orang	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang			100 Orang	146.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	96 Orang	600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100Prosen 100Prosentase			-	230.820.500,00			-	-	-	100Prosen 100Prosentase	805.000.000,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	5.211.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	29.999.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	9.969.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	56.688.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			4 Paket	14.329.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

													a							
	5	0 2	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			4 Laporan	114.624.000,0 0	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	350.000.000,0 0	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100Prosentase 100Prosen			-	38.205.700,00			-	-	-	100Prosentase 100Prosen	1.250.000.000 ,00	
	5	0 2	0 1	2.0 7	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000 ,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2.0 7	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			6 Unit	38.205.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Unit	250.000.000,0 0	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	100Prosen 100Prosentase			-	11.602.225.22 4,00			-	-	-	100Prosen 100Prosentase	12.020.000.00 0,00	

						Pemerintahan Daerah													
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	11.208.765.024,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	11.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	8.368.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	385.091.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80Prosentase 80Prosentase			-	147.727.800,00			-	-	-	80Prosentase 80Prosentase	725.000.000,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit			7 Unit	101.827.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	57 Unit	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	26.050.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Unit	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			10 Unit	19.850.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Unit	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	288.873.745.082,00						-	287.775.000.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Dalam Penyusunan APBD tepat waktu Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu	7Perda dan Perbup			0 Perda dan Perbup 100 %	1.579.480.019,00			-	-	-	7Perda dan Perbup	3.200.000.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	753.799.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	82.378.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokumen	7.832.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokumen	9.467.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

													a							
	5	0 2	0 2	2.0 1	00 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokume n	4.524.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANG AN DAERAH
	5	0 2	0 2	2.0 1	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			2 Dokume n	366.335.000,0 0	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	700.000.000,0 0	BADAN KEUANG AN DAERAH
	5	0 2	0 2	2.0 1	00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			4 Dokume n	330.141.819,0 0	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	750.000.000,0 0	BADAN KEUANG AN DAERAH
	5	0 2	0 2	2.0 1	00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen			1 Dokume n	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	-	-	-	-	2 Dokumen	150.000.000,0 0	BADAN KEUANG AN DAERAH

	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen			2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	4 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan dan pelaporan administrasi dana perimbangan dan transfer lainnya melalui aplikasi dari pusat Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD	100%			0 % 100 %	295.000.000,00			-	-	-	100%	1.325.000.000,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah													

							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen			4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	39 Dokumen			39 Dokumen	108.703.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	39 Dokumen	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen			1 Dokumen	6.297.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang			39 Orang	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	39 Orang	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	100%			-	205.000.000,00			-	-	-	100%	750.000.000,00	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen			5 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2 Dokumen	123.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen			4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100%			-	286.494.265.063,00			-	-	-	100%	282.000.000.000,00	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan			4 Laporan	265.625.981.708,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	270.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan			2 Laporan	11.055.859.161,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Laporan	6.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan			4 Laporan	9.812.424.194,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1 Laporan	6.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	100%			-	300.000.000,00			-	-	-	100%	500.000.000,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen			4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	560.445.974,00						-	1.925.000.000,00	

	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	23Laporan			-	560.445.974,00			-	-	-	23Laporan	1.925.000.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			9 Dokumen	91.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan			2 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan			2 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			2 Laporan	30.177.974,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	86.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan			8 Laporan	210.268.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang			39 Orang	85.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	39 Orang	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	1.579.955.402,00						-	4.875.000.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	11Layanan 22Dokumen			-	1.579.955.402,00			-	-	-	11Layanan 22Dokumen	4.875.000.000,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen			2 Dokumen	955.280.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen			4 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan			12 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	754 Unit			10 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	754 Unit	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			12 Laporan	83.134.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan			4 Laporan	39.699.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	646285 Obyek Pajak			100 Obyek Pajak	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	646285 Obyek Pajak	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen			646285 Dokumen	34.265.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan			646285 Layanan	68.069.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	11 Layanan	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	11 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen			12 Dokumen	64.052.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen			12 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

													a							
	5	0 2	0 4	2.0 1	00 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen			12 Dokume n	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	150.000.000,0 0	BADAN KEUANG AN DAERAH
	5	0 2	0 4	2.0 1	00 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan			12 Laporan	89.955.402,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	200.000.000,0 0	BADAN KEUANG AN DAERAH
	5	0 2	0 4	2.0 1	00 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan			4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	300.000.000,0 0	BADAN KEUANG AN DAERAH
	J U M L A H											**309.937.512.5 21,00**							**318.515.000.0 00,00**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEARAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah mengacu pada Pembangunan Transparansi dan Akuntabitas Kinerja pemerintah serta meningkatkan Partisipasi Publik. Perlunya Akuntabilitas guna untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan keuangan Badan Keuangan Daerah dapat menjadi penguatan sector keuangan. Hal tersebut diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara Prioritas pembangunan Nasional dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

3.2 Tujuan dan Sasaran

Merujuk terhadap landasan ideal normatif dalam penyusunan Renstra yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah rangkaian perumusan tujuan dan sasaran OPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang telah disusun. Tujuan dan sasaran dalam Renstra BKD merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja OPD sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Oleh karena itu, syarat utama Tujuan dan Sasaran OPD adalah *measurable* dan *tangible*. *Measurable* dalam perumusan Tujuan dan Sasaran OPD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran OPD harus dapat diukur. Hal tersebut sesuai yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja OPD yang melekat pada label Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan *Tangible* yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran OPD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD.

Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ialah target-target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ialah :

1. Meningkatnya Penerimaan Daerah
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2 *Logical Framework (Cascading)* Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan penyusunan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Telah memperhatikan proses cascading antara Perangkat daerah dengan RPJMD khususnya pada misi III dan Misi IV sebagaimana dapat diukur linearitasnya pada gambar berikut :

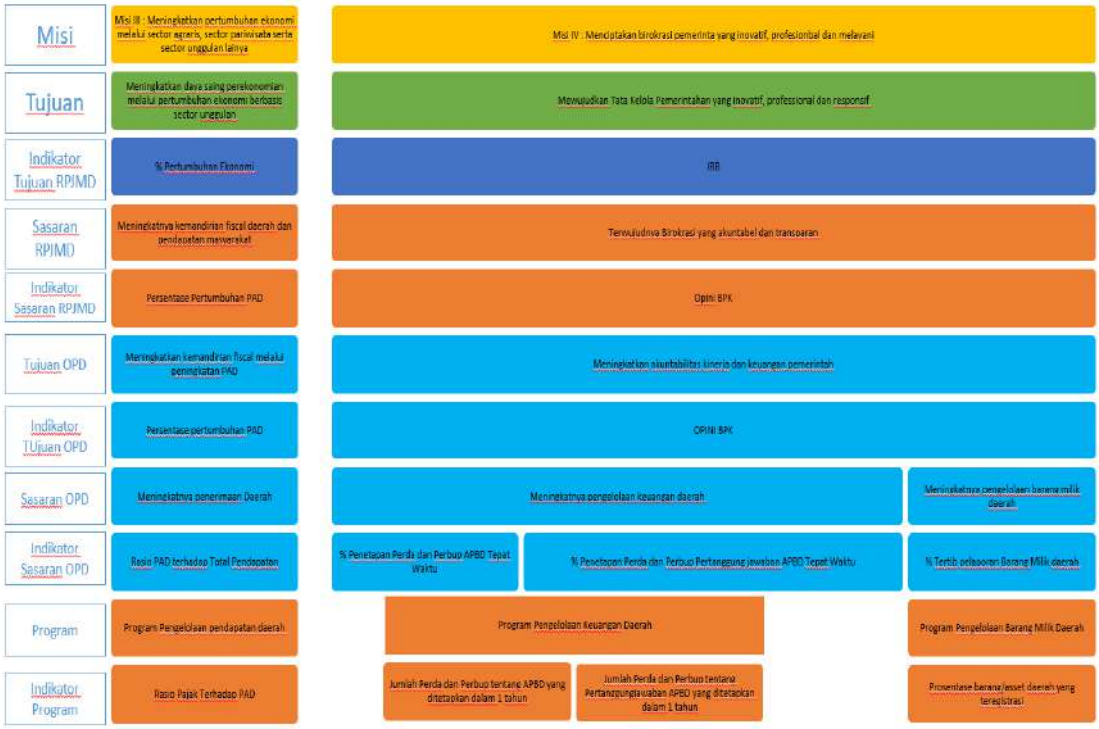
Misi
Misi III : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sector agraris, sector pariwisata serta sector unggulan lainya
Misi IV : Menciptakan birokrasi pemerinta yang inovatif, profesionbal dan melayani
Tujuan
Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sector unggulan
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang inovatif, professional dan responsif
Indikator Tujuan RPJMD
% Pertumbuhan Ekonomi
IRB
Sasaran RPJMD
Meningkatnya kemandirian fiscal daerah dan pendapatan masyarakat
Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel dan transparan
Indikator Sasaran RPJMD
Persentase Pertumbuhan PAD
Opini BPK
Tujuan OPD
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah
Indikator TUjuan OPD
Persentase pertumbuhan PAD
OPINI BPK
Sasaran OPD
Meningkatnya penerimaan Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah
Indikator Sasaran OPD
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan
% Penetapan Perda dan Perbup APBD Tepat Waktu
% Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu
% Tertib pelaporan Barang Milik daerah
Program
Program Pengelolaan pendapatan daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program
Rasio Pajak Terhadap PAD
Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun
Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun
Prosentase barang/aset daerah yang teregistrasi

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2026

Uraian		Indikator	Target KinerjaSasaranpadaTahunKe				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD		% Pertumbuhan PAD	-3,37%	4,40%	6,45%	3,55%	2,82%
	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	11,20%	11,63%	12,48%	12,66%	12,96%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas dan Fokus Pembangunan BKD dengan Peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui :

1. Penerapan dan optimalisasi pelayanan
2. Inovasi dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
3. Penyelenggaraan pelayanan dengan meningkatan upaya partisipasi publik, kolaborasi dengan stakeholder terkait dan keterbukaan informasi
4. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah meliputi :
   a) Mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai kaidah perundangan melalui program pengelolaan keuangan daerah;
   b) Mewujudkan peningkatan manajemen dan administrasi Barang Milik Daerah melalui program Pengelolaan BMD;
   c) Peningkatan kinerja dan akuntabiltas penyelenggaran pemerintahan pada perangkat daerah melalui program Penunjang Urusan pemerintahan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Dalam Rangka mendukung program sistem pemerintahan berbasis elektronik Badan Keuangan pada tahun 2026 merencanakan untuk kegiatan
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
   c. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAERAH						**309.937.512.521,00**							**318.515.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**309.937.512.521,00**							**318.515.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**309.937.512.521,00**							**318.515.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**18.923.366.063,00**						**-**	**23.940.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen 23 Dokumen			-	166.933.100,00			-	-	-	23 Dokumen 23 Dokumen	315.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	63.343.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.978.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.957.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.224.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.341.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan			14 Laporan	65.088.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	14 Laporan	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen 59 Dokumen			-	6.381.118.739,00			-	-	-	59 Dokumen 59 Dokumen	7.700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan			43 Orang/bulan	6.233.125.239,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	54 Orang/bulan	7.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			4 Dokumen	5.925.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	425.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	142.068.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Prosentase 100 Prosentase			-	356.335.000,00			-	-	-	100 Prosentase 100 Prosentase	1.125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			100 Paket	19.755.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang			100 Orang	190.580.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	96 Orang	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang			100 Orang	146.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	96 Orang	600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Prosen 100 Prosentase			-	230.820.500,00			-	-	-	100 Prosen 100 Prosentase	805.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	5.211.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	29.999.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	9.969.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	56.688.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			4 Paket	14.329.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			4 Laporan	114.624.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Prosent ase 100 Prosen			-	38.205.700,00			-	-	-	100 Prosent ase 100 Prosen	1.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			6 Unit	38.205.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Unit	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Prosen 100 Prosent ase			-	11.602.225.224,00			-	-	-	100 Prosen 100 Prosent ase	12.020.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	11.208.765.024,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	11.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	8.368.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	385.091.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 Prosentase 80 Prosentase			-	147.727.800,00			-	-	-	80 Prosentase 80 Prosentase	725.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit			7 Unit	101.827.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	57 Unit	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	26.050.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Unit	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			10 Unit	19.850.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Unit	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**288.873.745.082,00**						**-**	**287.775.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Anggaran Dalam Penyusunan APBD tepat waktu* *Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu*	7 Perda dan Perbup			0 Perda dan Perbup 100 %	1.579.480.019,00			-	-	-	7 Perda dan Perbup	3.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	753.799.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	82.378.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokumen	7.832.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokumen	9.467.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			39 Dokumen	4.524.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	39 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	366.335.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			4 Dokumen	330.141.819,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Dokumen	750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	2 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen			2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	4 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase pengelolaan dan pelaporan administrasi dana perimbangan dan transfer lainnya melalui aplikasi dari pusat* *Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD*	100 %			0 % 100 %	295.000.000,00			-	-	-	100 %	1.325.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen			4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	39 Dokumen			39 Dokumen	108.703.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	39 Dokumen	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen			1 Dokumen	6.297.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang			39 Orang	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	39 Orang	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	100 %			-	205.000.000,00			-	-	-	100 %	750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen			5 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2 Dokumen	123.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen			4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100 %			-	286.494.265.063,00			-	-	-	100 %	282.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan			4 Laporan	265.625.981.708,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	270.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan			2 Laporan	11.055.859.161,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Laporan	6.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan			4 Laporan	9.812.424.194,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1 Laporan	6.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	100 %			-	300.000.000,00			-	-	-	100 %	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen			4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**560.445.974,00**						**-**	**1.925.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	23 Laporan			-	560.445.974,00			-	-	-	23 Laporan	1.925.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			9 Dokumen	91.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan			2 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan			2 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			2 Laporan	30.177.974,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	86.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Dokumen	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan			8 Laporan	210.268.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang			39 Orang	85.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	39 Orang	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.579.955.402,00**						**-**	**4.875.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	11 Layanan 22 Dokumen			-	1.579.955.402,00			-	-	-	11 Layanan 22 Dokumen	4.875.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen			2 Dokumen	955.280.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen			4 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan			12 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	754 Unit			10 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	754 Unit	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			12 Laporan	83.134.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan			4 Laporan	39.699.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	646285 Obyek Pajak			100 Obyek Pajak	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	646285 Obyek Pajak	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen			646285 Dokumen	34.265.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan			646285 Layanan	68.069.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	11 Layanan	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	11 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen			12 Dokumen	64.052.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen			12 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen			12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan			12 Laporan	89.955.402,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan			4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H							**309.937.512.521,00**							**318.515.000.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dilakukan Rencana Kerja. Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan sub kegiatan. Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan untuk menyusun anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

a) Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
b) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan
c) Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
d) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun ;
e) Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

B. Rekomendasi.

Dengan tersusunnya Renja ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Tahun 2026 sebagai berikut :

a) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
b) Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat ;
c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing- masing bidang.

Pacitan, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs.DARYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dapat disusun dengan pedoman dan mekanisme yang ada.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja, ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan Tahun 2026, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dapat terwujud.

Pacitan, 1 Agustus 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PACITAN

Drs. RUDY HARYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196509101990031016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28

3.3. Program dan Kegiatan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 OPD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2011 dimana fungsi Renja OPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah ada perubahan dalam penyusunan program dan kegiatan apabila mengacu pada peraturan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok**

   Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi aparatur, dan penilaian kinerja aparatur.

2. **Fungsi**

Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;

b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN);

c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kompetensi aparatur;

d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penilaian kinerja aparatur; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

a. Sekretariat;

b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;

c. Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;

e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur; dan

f. UPT Badan

Adapun Susunan Organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi;
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Mutasi dan Promosi
4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang baik (*good governance)*. Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumber daya Manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
d. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang formasi PNS.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang pengadaan PNS;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012

tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang penilaian prestasi kerja PNS.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang cuti PNS.

k. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.

l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang pengurusan SK penetapan jabatan fungsional.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

n. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.

o. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun berjalan memiliki relevansi, efektif dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, terutama dalam menyikapi perubahan regulasi dan permasalahan yang dinamis.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 adalah sebagai panduan implementasi perubahan, mewujudkan tujuan organisasi secara terarah, sebagai alat monitoring dan evaluasi serta untuk memastikan bahwa dokumen tersebut menjadi dasar bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas

dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah dan gambaran umum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan ketentuan peraturan yang mengatur tentang kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari peyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD dan perkiraan capaian tahun berjalan

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi Kajian terhadap capain kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan dan solusi terhadapa pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan barang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV : Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

BAB V : Penutup

Berisikan penjelasan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan. Selain itu evaluasi juga dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan faktor-faktor penghambat atau kendala yang menyebabkan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Pacitan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	**Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**>B**	**>B**	**80,00**	**78,50**	**98,125%**	**80,00**	**80,00**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,00	29	23	23	100%	29	29	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59,00	31	59	59	100%	31	31	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang yang Disusun sesuai dengan ketentuan	890,00	-	6	6	100%	6	6	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun berjalan 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Perundangan								
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	97,99%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
					Program Kepegawaian Daerah	**Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit**	92,05%	94,32%	94%	92%	97,87%	78 Nilai	78 Nilai	100%
						Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indeks Sistem	40,07%	45,59%	47,5%	45%	**94,73%**	**74,5 Nilai**	**74,5 Nilai**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Merit								
		Rasio Penilaian Kinerja Aparatur dari Indeks Sistem Merit	68,12%	71,74%	61%	58%	**95,08%**	**117 Nilai**	**117 Nilai**	**100%**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang Diselesaikan	100%	91,95%	4947	4947	100%	4928	4928	100%
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan			2941	2941	100%	10	10	100%
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan pengembangan kompetensi	-	-	-	-	-	1	1	100%
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan			7171	7799	103,28%	212	212	100%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Rasio Nilai Aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit**			72,50%	70,00%	96,55%	30,5 Nilai	30,5 Nilai	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun berjalan 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit	**50,00%**	**51,96%**	53,95%	60,53%	**112,2%**	**72,50%**	**72,50%**	**100%**
					Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis			75	132	176%	50	50	100%
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi ASN			22	32	145,45%	13	13	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian kinerja program dan kegiatan tahun lalu, dapat dilakukan analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1) **Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan pada tahun 2024 dengan nilai 80,00 di mana telah dilaksanakan penilaian SAKIP dan mendapatkan nilai 78,50. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa indikatator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealiasi dengan Tingkat ketercapaian sebesar 98,12%. Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 29 Dokumen dan realisasi sebesar 29 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja 100%.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi keuangan diukur dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah ditargetkan tahun 2024 menyelesaikan 59 dokumen administrasi keuangan, sedangkan realisasi kinerjanya 59 dokumen sehingga tingkat ketercapaian kinera sebesar 100%.

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja Dokumen Barang Milik Daerah yang terselesaikan tahun 2024 ditargetkan menyelesaikan 6 dokumen dan realisasinya sejumlah 6 dokumen, sehingga tingkat ketercapaian kinerja sebesar 100%.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diukur dengan indikator Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target kinerja 100%, sedangkan realisasinya 100%.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur dengan indikator kinerja Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan target 100% dan realisasinya sebesar 100%.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator kinerja Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan dengan target 100%, begitu pula dengan realisasinya mencapai 100%.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator kinerja Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik dengan target 80%, dan realisasinya sebesar 80%, sehingga tingkat realisasi kinerja kegiatan tersebut adalah 100%.

2) **Realisasi Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah didukung dengan 3 (tiga) indikator antara lain :

a) Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit, pada indikator ini ditargetkan tahun 2025 adalah adalah 78,00 namun pada semester pertama belum dapat dikukur realisasinya. Indikator tiap kegiatan dan sub kegiatan telah dapat diukur namun belum menunjukkan kinerja yang maksimal, karena belum mencapai akhir tahun anggaran. Sedangkan pada tahun 2024, Rasio Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ditargetkan sebesar 94% dengan realisasi kinerja sebesar 92%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 97,87%.

b) Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indeks Sistem Merit

Selain indikator diatas Program Kepegawaian Daerah juga didukung dengan indikator Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indeks Sistem Merit yang ditargetkan sebesar 74,50. Realisasi kegiatan dan anggaran pada semester pertama masih tergolong sangat rendah karena kegiatan akan dilaksanakan di semester kedua. Sedangkan Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dan Indeks Sistem Merit pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 47,50%, sedangkan realisasi kinerjanya sebesar 45%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,73%.

c) Rasio Penilaian Kinerja Apratur dari Indeks Sistem Merit

Sedangkan indikator pendukung program kepegawaian daerah yang lain adalah Rasio Penilaian Kinerja Aparatur dari Indeks Sistem Merit. Pada aspek ini adalah pengelolaan Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 117. Pada semester pertama realisasi capaian masih sangat rendah karena penilaian Sistem Merit dilaksanakan pada Semester kedua. Sedangkan pada tahun 2024, Rasio Penilaian Kinerja Aparatur dari Indeks Sistem Merit ditargetkan sebesar 61% dengan realisasi kinerja 58%. Oleh karena itu capaian kinerjanya mencapai 95,08%.

3) **Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit ditargetkan sebesar 30,50. Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis mendapatkan predikat capaian kinerja sedang, meskipun realisasi anggarannya masih tergolong sangat rendah. Sedangkan kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional realisasi kinerja dan anggarannya masih tergolong sangat rendah, karena akan dilaksanakan pada semester kedua. Pada tahun 2024, Rasio Nilai Aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit ditargetkan sebesar 72,50% dan realisasi kinerja sebesar 70%, sehingga tingkat capaian kinerja telah mencapai 96,55%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berpedoman terhadap tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan mengemban tugas melakukan pengelolaan manajemen ASN yang efektif dan efisien yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan tugas menghadapi isu – isu strategis yang harus ditentukan arah kebijakannya agar tidak salah dalam menentukan strategi dalam menghadapi isu – isu strategis tersebut.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Adanya Kekurangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil dikarenakan setiap tahun terdapat ASN yang purna tugas.
2. Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan belum maksimal sehingga berpengaruh pada Indek Profesionalitas ASN yang rendah;
2. Penegakan disiplin PNS dan Kinerja PNS yang belum berjalan optimal karena kurangnya pembinaan PNS dan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat;
3. Pengukuran Kinerja sudah melembaga akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan optimal karena aturan yang dinamis;
4. Belum adanya manajemen talenta dan rencana suksesi untuk penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan kinerja ASN.
5. Belum terlaksananya Uji Kompetensi setiap PNS sehingga kesulitan untuk menentukan jabatan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
6. Rekonsiliasi data kepegawaian Kabupaten dengan data kepegawaian di provinsi masih menemui kendala teknis.
7. Adanya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sehingga merubah sistem kerja ASN;

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai ada beberapa hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan satuan kerja perangkat daerah:

1. Tantangan

a. Tantangan Internal

- Sumber daya manusia yang kompeten masih kurang.
- Prasarana pelayanan masih kurang.
- Terbatasnya anggaran yang dikelola.
- Kurangnya kesempatan mengikuti diklat administrasi bagi pegawai.

b. Tantangan Eksternal

- Aturan dari pemerintah pusat yang berubah secara dinamis sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan
- Pemerintah pusat masih menghandle beberapa penjadwalan kegiatan sehingga mempengaruhi pelasakaan kegiatan di daerah.

2. Peluang

a. Peluang Internal

- Adanya Sarana dan Prasana kegiatan.
- Adanya Sumber Daya Manusia yang menguasai TI
- Adanya pendanaan operasional.
- Adanya komitmen pegawai untuk dapat memberikan pelayanan yang baik.
- Terdapat sistem kerja adanya kerjasama tim kerja.

b. Peluang Eksternal

- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
- Adanya perkembangan teknologi informasi sehingga mempemudah pelaksanaan tugas dan fungsi.
-

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsi, Fungsional serta Pengembangan Kompetensi PNS dari Jalur Pendidikan serta Pembekalan CPNSD melalui Pelatihan Dasar (Latsar) serta melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sehingga ASN memenuhi Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP dalam setahun;
2. Pemenuhan jumlah ASN yang ideal secara kualitas dan kuantitas melalui Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan perhitungan formasi yang akurat;

3. Melakukan Pembinaan ASN yang dilakukan dengan sebaik–baiknya berdasarkan perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja;
4. Melaksanakan Pembinaan ASN yang bermasalah sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah kepada ASN yang bermasalah sehingga Kinerja ASN akan meningkat;
5. Rotasi PNS dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan dan formasi pegawai sehingga Formasi pegawai yang tepat akan terwujud serta kejelasan tupoksi pada masing – masing jabatan;
6. Memberikan *reward* dan *punishment* yang adil dan obyektif sehingga Kinerja Aparatur meningkat;
7. Melakukan pengangkatan PNS dalam jabatan yang memenuhi kapabilitas intelektual maupun moralitas, sedangkan persyaratan akseptabilitas berkaitan dengan dukungan lingkungan kerja terhadap calon akseptabilitas berkaitan dengan efektifitas kemampuan kepemimpinan, kemampuan membangun jejaring;
8. Melaksanakan *Asessment* pada setiap ASN sehingga bisa diketahui kemampuan teknis dan kompetensi masing – masing ASN;
9. Melaksanakan sinkronisasi data mandiri sesuai dengen petunjuk teknis serta memanfaatkan Sumber Daya Aparatur di Bidang Teknologi Informasi sehingga data kepegawaian bisa sinkron.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada dasarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan analisis Rencana Kerja. Program/ Kegiatan Prioritas pada tahun 2026 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang diampu oleh urusan Pendidikan dan Pelatihan serta Implementasi Manajemen Talenta, khususnya dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II/ JPT Pratama yang termasuk dalam Urusan Kepegawaian. Banyaknya JPT Pratama (eselon II) yang purna tugas menjadi sebab kekosongan jabatan tertinggi di lingkup perangkat daerah tersebut, sedangkan proses untuk mengisi kekosongan tersebut harus menggunakan seleksi terbuka JPT Pratama yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Seleksi terbuka

JPT Pratama dilaksanakan untuk menjamin yang terpilih menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) merupakan pilihan dari hasil seleksi terbuka yang obyektif dan transparan.

Selain itu yang menjadi salah satu tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi ASN adalah penyusunan proyeksi kebutuhan CASN . Selain KORPRI ada beberapa lembaga yang menjadi kewenangan di BKPSDM salah satunya Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). PWRI merupakan lembaga yang beranggotakan para purna/pensiunan Pegawai yang aktif melaksanakan organisasi tersebut. PWRI merupakan lembaga yang aktif mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui BKPSDM.

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap PNS yang bermasalah juga diadakan pembinaan bagi PNS sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap penilaian kinerja akan diadakan evaluasi Sasaran Kerja Pegawai untuk mengukur tingkat keberhasilan Penilaian Kinerja Pegawai. Berikut Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Pacitan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2026				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Analisis Kebutuhan Tahun 2026				Catatan Penting
	Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.270.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.270.000.000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				640.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				640.000.000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.000.000	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	20.000.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	450.000.000	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	2 Dokumen	450.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	450.000.000	
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	25.000.000	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	450 Dokumen	25.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	400 Dokumen	25.000.000	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100.000.000	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	-	100.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Lembaga	100.000.000	

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	25.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	2 Dokumen	25.000.000	
Pengelolaan Data Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	12 Dokumen	20.000.000	
Mutasi dan Promosi ASN				**260.000.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**				**260.000.000**	
Pengelolaan Mutasi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	1500 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	100 Dokumen	10.000.000	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	1900 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	1200 Dokumen	10.000.000	
Pengelolaan Promosi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	400 Dokumen	240.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	200 Dokumen	240.000.000	
Pengembangan Kompetensi ASN					**Pengembangan Kompetensi ASN**				**115.000.000**	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang	10 Orang	100.000.000	-

	diselesaikan						diselesaikan			
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	15.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang diselesaikan	100 Orang	15.000.000	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**255.000.000**	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6227 Dokume n	152.500.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	3 Dokumen	152.500.000	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	15.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	5 Orang	15.000.000	-
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	30.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	400 Orang	30.000.000	-
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	32.500.000	Pembinaan Disiplin ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	40 Orang	32.500.000	-
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	25.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	4 Laporan	25.000.000	-
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**755.000.000**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**755.000.000**	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**755.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**755.000.000**	
Pengembangan Kompetensi Teknis				**425.000.000**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**				**425.000.000**	

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	1 Dokumen	15.000.000	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	395.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	45 Orang	395.000.000	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	1 Dokumen	15.000.000	

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				**330.000.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				**330.000.000**	
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi ASN	18 Orang	50.000.000	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	280.000.000	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1233 Laporan	280.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	280.000.000	
-					-					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**4.315.661.196**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.315.661.196**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**40.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**40.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000	-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaa n dan laporan kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.000.000	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n dan laporan kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	15.000.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3.678.971.887**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.678.971.887**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang/ bulan	3.607.395.831	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	32 Orang/ bulan	3.607.395.831	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	60.576.056	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	60.576.056	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	11.000.000	-
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**20.000.000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	8 Laporan	20.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**100.000.000**	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Dokume n	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	45 Dokumen	100.000.000	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah				**98.038.509**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**98.038.509**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.889.901	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	41.889.901	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	12 Paket	41.889.901	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.787.068	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	18.787.068	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	12 Paket	18.787.068	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.361.540	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Laporan	37.361.540	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	20 Laporan	37.361.540	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**54.610.136**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**54.610.136**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.610.136	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	54.610.136	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	3 Unit	54.610.136	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**229.382.576**					**229.382.576**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.488.178	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	10.488.178	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	1 Laporan	10.488.178	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.510.400	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	95.510.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah	12 Laporan	95.510.400	-

							yang dibutuhkan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	123.384.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	12 Laporan	123.384.000	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**104.076.360**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**104.076.360**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	37.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	21 Unit	37.000.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	15 Unit	25.000.000	-
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	42.076.360	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	2 Unit	42.076.360	-
				6.340.661.196					**6.340.661.196**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Beberapa usulan dari masyarakat yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan antara lain usulan dana hibah untuk BKPSDM salah satunya Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). PWRI merupakan lembaga yang beranggotakan para purna/pensiunan Pegawai yang aktif melaksanakan organisasi tersebut. PWRI merupakan lembaga yang aktif mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui BKPSDM.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pacitan. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	- Dana Hibah untuk operasional PWRI - Fasilitasi HUT KORPRI

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio jumlah ASN terhadap jumlah penduduk 1 : 30 terealisasi. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi tantangan utama bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dalam menjalankan pengelolaan Manajemen ASN secara efektif dan efisien. Dengan manajemen sistem merit yang baik maka Profesionalisme ASN akan terwujud. Perubahan regulasi yang dinamis utamanya dengan diberlakukannya permenpan RB nomor 06 tahun 2022 harus segera disikapi dengan mengatur sistem kerja dengan diterbitkannya permenpan RB nomor 07 tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan bisa dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal	Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Sistem Merit

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya aparatur), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia tidak mengalami banyak perubahan dari tahun – tahun sebelumnya. Hal ini sehubungan dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat tidak perubahan dalam perencanaan penganggaran hanya saja menyesuaiakan pagu anggaran yang diperoleh. Terdapat beberapa kegiatan yang merupakan prioritas dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sekaligus penjabaran dari visi dan misi Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia yang belum terfasilitasi pada saat perencanaan Jangka Pendek Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut sangat perlu karena berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang lain.

Terdapat 3 Program pada rencana tahun 2026 ini dan tertuang dalam 14 Kegiatan dan 37 sub Kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan tersebar pada umumnya di Kabupaten Pacitan ada juga yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Untuk Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 ini program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan membutuhkan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 6.340.661.196,00.**

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih yaitu Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia. BKPSDM Kabupaten Pacitan mendukung misi ke empat yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, Profesional dan Melayani yang kemudian dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Pacitan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.340.661.196,00				7.609.556.265,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.340.661.196,00				7.609.556.265,00
	5	03				KEPEGAWAIAN			5.585.661.196,00				6.539.556.265,00
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.661.196,00			-	4.579.556.265,00
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00			100%	70.000.000,00
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	20.000.000,00
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	10.000.000,00
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	25.000.000,00
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.678.971.887,00			100%%	3.742.613.865,00
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.607.395.831,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang/bulan	3.627.613.865,00
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.576.056,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	75.000.000,00

	5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	10.000.000,00
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.581.728,00			100%%	15.000.000,00
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.581.728,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	15.000.000,00
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			100%%	90.000.000,00
	5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Dokumen	90.000.000,00
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	98.038.509,00			100%%	150.000.000,00
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.889.901,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	35.000.000,00
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.787.068,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	25.000.000,00
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	37.361.540,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000,00
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	54.610.136,00			100%%	90.000.000,00
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	54.610.136,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	90.000.000,00

	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	229.382.576,00			100%%	306.942.400,00
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.488.176,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	10.000.000,00
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.510.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	120.000.000,00
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.384.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	176.942.400,00
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.076.360,00			92%%	115.000.000,00
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	37.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Unit	40.000.000,00
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	25.000.000,00
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.076.360,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000,00
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	1.270.000.000,00			-	1.960.000.000,00
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	640.000.000,00			100%	1.010.000.000,00
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000,00

	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	550.000.000,00
	5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	400 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0 Dokumen	150.000.000,00
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Lembaga	165.000.000,00
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	50.000.000,00
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Dokumen	65.000.000,00
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	260.000.000,00			85%	520.000.000,00
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Dokumen	60.000.000,00
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1200 Dokumen	60.000.000,00
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Dokumen	400.000.000,00
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	115.000.000,00			15%	75.000.000,00

	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	25.000.000,00
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN							
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	50.000.000,00
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	255.000.000,00			93%	355.000.000,00
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	152.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Dokumen	120.000.000,00
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	50.000.000,00

	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai							
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Orang	50.000.000,00
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN							
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	32.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	75.000.000,00
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	60.000.000,00
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			755.000.000,00				1.070.000.000,00
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	755.000.000,00			-	1.070.000.000,00
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	425.000.000,00			20%	515.000.000,00
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							

							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	45.000.000,00
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	45 Orang	395.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75 Orang	440.000.000,00
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	30.000.000,00

							Urusan Pemerintahan Umum						
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	330.000.000,00			85%	555.000.000,00
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota							
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	18 Orang	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	55.000.000,00
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	280.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	500.000.000,00
	JUMLAH								**6.340.661.196,00**				**7.609.556.265,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan Aparatur yang Profesional. Pengeloaan Manajemen ASN yang tepat, efektif dan efisien akan menciptakan sumber daya aparatur yang tangguh, berkualitas dan berkarakter sesuai dengan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rencana Kerja merupakan instrument untuk menciptakan arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing.

Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Susunan program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun 2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan bisa dilihat pada tabel 4.1

4.2 PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendanaan Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM Kab. Pacitan

Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.340.661.196,00				7.609.556.265,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.340.661.196,00				7.609.556.265,00
	5	03				KEPEGAWAIAN			5.585.661.196,00				6.539.556.265,00
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.661.196,00			-	4.579.556.265,00
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00			100%	70.000.000,00
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	20.000.000,00
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	10.000.000,00
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	25.000.000,00
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.678.971.887,00			100%%	3.742.613.865,00
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.607.395.831,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang/bulan	3.627.613.865,00
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.576.056,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	75.000.000,00

	5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	10.000.000,00
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.581.728,00			100%%	15.000.000,00
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.581.728,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	15.000.000,00
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			100%%	90.000.000,00
	5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Dokumen	90.000.000,00
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	98.038.509,00			100%%	150.000.000,00
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.889.901,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	35.000.000,00
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.787.068,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	25.000.000,00
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	37.361.540,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000,00
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	54.610.136,00			100%%	90.000.000,00
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	54.610.136,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	90.000.000,00

	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	229.382.576,00			100%%	306.942.400,00
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.488.176,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	10.000.000,00
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.510.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	120.000.000,00
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.384.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	176.942.400,00
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.076.360,00			92%%	115.000.000,00
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	37.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Unit	40.000.000,00
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	25.000.000,00
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.076.360,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000,00
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	1.270.000.000,00			-	1.960.000.000,00
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	640.000.000,00			100%	1.010.000.000,00
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000,00

	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	550.000.000,00
	5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	400 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0 Dokumen	150.000.000,00
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Lembaga	165.000.000,00
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	50.000.000,00
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Dokumen	65.000.000,00
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	260.000.000,00			85%	520.000.000,00
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Dokumen	60.000.000,00
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1200 Dokumen	60.000.000,00
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Dokumen	400.000.000,00
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	115.000.000,00			15%	75.000.000,00

	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	25.000.000,00
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN							
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	50.000.000,00
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	255.000.000,00			93%	355.000.000,00
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	152.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Dokumen	120.000.000,00
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	50.000.000,00

	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai							
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Orang	50.000.000,00
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN							
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	32.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	75.000.000,00
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	60.000.000,00
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			755.000.000,00				1.070.000.000,00
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	755.000.000,00			-	1.070.000.000,00
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	425.000.000,00			20%	515.000.000,00
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							

							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	45.000.000,00
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	45 Orang	395.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75 Orang	440.000.000,00
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	30.000.000,00

							Urusan Pemerintahan Umum						
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	330.000.000,00			85%	555.000.000,00
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota							
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	18 Orang	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	55.000.000,00
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	280.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	500.000.000,00
	JUMLAH								**6.340.661.196,00**				**7.609.556.265,00**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini juga merupakan salah satu bentuk perencanaan atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PACITAN

Drs. RUDY HARYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196509101990031016

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Disusun oleh :
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Awal Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 serta evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Ranwal Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan disusunnya Ranwal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP19780528 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 8

2.1. Hasil evaluasi Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 0PD.....10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 0PD.....21

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 0PD 34

3.3. Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....43

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan..... 43

BAB IV PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD 2025 13

Tabel 2.2. Reviu Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026..... 24

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.....

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan..... 29

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Maju Tahun 2027. 35

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Penetapan RKPD Tahun 2026 nomor 40 Tahun 2025 tanggal10 Julitahun 2025. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dilakukan melalui pengukuran 5 indikator Sasaran yaitu :

1. Prosentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan
2. Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah
3. Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik
4. Prosentase Ormas yang mendapat predikat
5. Hasil Nilai IKM PD

Dalam kontek perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi

kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk siap dan sanggup membuat / menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011); dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Bab. V Ketentuan Peralihan Pasal 10.
22. Peraturan Bupati Pacitan No. 85 Tahun 2023 perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Cara Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
23. Perbup No. 043 tahun 2024 perubahan atas Perbup no. 92 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Pacitan
24. Penetapan RKPD Tahun 2026 nomor 40 Tahun 2025 tanggal 10 Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Adapun Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Pacitan, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gabaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tantang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja PD.

1.4. Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu (Tahun – 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n – 1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.

3.2. Tujuan Dan Sasaran renja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan / pembinaan dan evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagi bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan perencanaan program & kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2026 ;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sampai dengan akhir tahun 2025, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja PD dan pencapaian renstra PD sampai dengan Tahun 2024, terlampir.

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 Semester I terealisasi 46,78 dari yang ditargetkan pada tahun 2025. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu :

a) Efisiensi anggaran;
b) Perencanaan yang kurang optimal, sehingga penyerapan anggaran yang dialokasikan tidak sesuai waktu yang dijadwalkan (kejar tayang di belakang); dan
c) Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil

baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*development*);
5. Kesadaran akan interdepensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, memandang perlu untuk melaksanakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas personel ini.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pelaksanaan rekruitmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Penjejangan maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Dipimpin oleh

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Edaran No. 050.12/7765/SJ Tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bahwa dalam menyusun Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pembinaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya politik;
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga memperhatikan Surat Edaran Menteri ini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 Program RPJMD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan Indikator Hasil Nilai SAKIP PD
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, diukur dengan Indikator Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya diukur dengan Indikator Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial diukur dengan Indikator Prosentase potensi konflik yang ditangani.
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya diukur dengan Indikator Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik.
6. Program Prosentase pembinaan terhadap Ormas diukur dengan Indikator Prosentase pembinaan terhadap Ormas.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d akhir Juni 2025

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan (suboutput)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun (akhir periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi TW4 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan anggaran RKPD s/d TW4(n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Ralisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
	8	01				Kesatuan Bangsa dan Politik																	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,00		0,00		2.321.694.973,00		1.742.666.349,00		75,06		1.742.666.349,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Hasil nilai SAKIP perangkat daerah			0.00		76.00		36		47,37		36,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.1	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		17.000.000,00		50.000.000,00		294,12		50.000.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			0.00		23		6		26,09		6,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.1.1	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		17.000.000,00		50.000.000,00		294,12		50.000.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Renja,Renja Perubahan,Perjanjian Kinerja,Perjanjian Kinerja Perubahan,PPRG,RKA,RKA Perubahan,DPA, DPA Perubahan,LKJIP,Evaluasi Renja tribulan 1,Evaluasi Renja tribulan 2,Evaluasi Renja tribulan 3,Evaluasi Renja tribulan 4, Renaksi Pencapaian Kinerja,			0.00		12.00		5		41,67		5,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.1.2	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0.00		12.00		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.2	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0,00		0,00		1.877.910.473,00		1.340.228.453,00		71,37		1.340.228.453,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

							Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah			0.00		59		24		40,68		24,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.2.1	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		1.877.910.473,00		1.340.228.453,00		71,37		1.340.228.453,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0.00		14		6		42,86		6,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.3	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00		0,00		0,00		29.455.000,00		0,00		29.455.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase pegawai yang mendapat layanan			0.00		100		48.3		48,30		48,30		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.3.1	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00		0,00		0,00		29.455.000,00		0,00		29.455.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai			0.00		1		1		100,00		1,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00		0,00		147.858.575,00		156.300.076,00		105,71		156.300.076,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase Operasional Dasar PD yang terpebuhi			0.00		100		40.3		40,30		40,30		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.1	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		8.044.000,00		10.536.564,00		130,99		10.536.564,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pengadaan komponen listrik/penerangan kantor			0.00		1		2		200,00		2,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.2	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		33.414.575,00		23.015.800,00		68,88		23.015.800,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor			0.00		1		3		300,00		3,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.3	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		20.732.000,00		20.277.621,00		97,81		20.277.621,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			0.00		1		1		100,00		1,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.4	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0,00		0,00		16.988.000,00		18.508.672,00		108,95		18.508.672,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pengadaan logistik Kantor			0.00		1		3		300,00		3,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

1.4.5	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		19.220.000,00		11.600.000,00		60,35		11.600.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan			0.00		1		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.6	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		49.460.000,00		72.361.419,00		146,30		72.361.419,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD			0.00		12		5		41,67		5,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.5	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00		0,00		11.188.800,00		10.500.000,00		93,84		10.500.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan			0.00		100		48.3		48,30		48,30		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.5.1	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		0,00		11.188.800,00		10.500.000,00		93,84		10.500.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor			0.00		1		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00		0,00		212.122.500,00		120.678.270,00		56,89		120.678.270,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Oprasional Perangkat Daerah yang diibutuhkan			0.00		100		48.3		48,30		48,30		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6.1	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		1.100.000,00		1.300.000,00		118,18		1.300.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah penyediaan jasa surat menyurat			0.00		12		6		50,00		6,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6.2	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		44.107.000,00		23.953.270,00		54,31		23.953.270,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik			0.00		12		5		41,67		5,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6.3	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		166.915.500,00		95.425.000,00		57,17		95.425.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Aktifitas/Operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah			0.00		12		3		25,00		3,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.7	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00		0,00		55.614.625,00		35.504.550,00		63,84		35.504.550,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik			0.00		80		36.7		45,88		36,70		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.7.1	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		45.849.625,00		32.079.550,00		69,97		32.079.550,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan roda dua dan roda empat,serta jumlah pejalanan dinas dalam daerah			0.00		1		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.7.2	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		0,00		9.765.000,00		3.425.000,00		35,07		3.425.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor,bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor			0.00		1		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			0,00		0,00		580.729.000,00		103.607.500,00		17,84		103.607.500,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan			0.00		15.10		6.3		41,72		6,30		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.1	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			0,00		0,00		580.729.000,00		103.607.500,00		17,84		103.607.500,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			0.00		100		43.8		43,80		43,80		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.1.1	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0,00		0,00		580.729.000,00		103.607.500,00		17,84		103.607.500,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah dokumen bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0.00		4		3		75,00		3,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			0,00		0,00		1.176.000.000,00		1.195.962.073,00		101,70		1.195.962.073,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Persentase Pembinaan terhadap Partai Politik			0.00		100		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.1	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman			0,00		0,00		1.176.000.000,00		1.195.962.073,00		101,70		1.195.962.073,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

							Tersusunnya Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pem			0.00		100		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.1.1	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di D			0,00		0,00		1.125.000.000,00		1.195.962.073,00		106,31		1.195.962.073,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah dokumen bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasdilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pedrwakilan da Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta bpemantauan situasi politik di daerah yang			0.00		4		1		25,00		1,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.1.2	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daer			0,00		0,00		51.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Ppeningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik did			0.00		2		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemant			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.1.3	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politi, Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala daerah. Serta pemantauan situasi politik di daerah			0.00		2		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situas			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			0,00		0,00		174.836.000,00		92.384.000,00		52,84		92.384.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Persentase pembinaan terhadap Ormas			0.00		100		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4.1	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			0,00		0,00		174.836.000,00		92.384.000,00		52,84		92.384.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

							Ttersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			0.00		100		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4.1.1	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0,00		0,00		174.836.000,00		92.384.000,00		52,84		92.384.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah data Ormas yang dimutakhirkan dan fasilitasi bantuan Ormas			0.00		1		0.24		24,00		0,24		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		0,00		0,00		60.414.000,00		7.710.000,00		12,76		7.710.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase Pembinaan bidang sosial dan budaya			0.00		100		42.1		42,10		42,10		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5.1	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0,00		0,00		60.414.000,00		7.710.000,00		12,76		7.710.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			0.00		12.00		5		41,67		5,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

5.1.1	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		0,00		0,00		60.414.000,00		7.710.000,00		12,76		7.710.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerahjakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Peny			0.00		3		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			0,00		0,00		3.076.736.000,00		1.268.382.000,00		41,22		1.268.382.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Persentase potensi konflik yang ditangani			0.00		100		56		56,00		56,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6.1	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			0,00		0,00		3.076.736.000,00		1.268.382.000,00		41,22		1.268.382.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Tersusunnya Kebujakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik Sosial			0.00		100		16		16,00		16,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6.1.1	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0,00		0,00		2.526.736.000,00		1.055.080.000,00		41,76		1.055.080.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Terbatas antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0.00		7		3		42,86		3,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pe			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6.1.2	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		550.000.000,00		213.302.000,00		38,78		213.302.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Rakor Forkopimda yang dilaksanakan			0.00		6		1		16,67		1,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			0.00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Faktor internal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan, yang merupakan kekuatan organisasi adalah adanya perundangundangan di bidang Keamanan Dan ketertiban, Keormasan / Organisasi yang merupakan sumber pelaksanaan kegiatan, adanya hubungan/ koordinasi antara satuan kerja yang cukup baik dan telah berkembangnya budaya kerja (motivasi kerja yang tinggi). Disisi lain kelemahan yang ada adalah adanya keterbatasan jumlah pegawai, terbatasnya sarana pendukung kerja yang memadai serta terbatasnya keterampilan, pengetahuan dan kemampuan personil.

Kondisi Eksternal yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan yang merupakan peluang adalah adanya tuntutan organisasi yang selalu harus berkembang, adanya potensi daerah serta adanya dukungan satuan kerja lain dalam mendukung kelancaran tugas. Pada sisi ancaman/hambatan menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, adanya perubahan komitmen pihak-pihak penentu kebijakan serta adanya pengaruh kebijakan daerah sekitar. Setelah faktor- faktor internal dan eksternal dimaksud dianalisa dapat diketahui bahwa pencapaian Visi dan Misi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman/hambatan yang ada.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, beberapa upaya meminimalisir kegagalan serta mengatasi kendala atau penyebab kegagalan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja tahun mendatang, maka langkah-langkah yang diambil, antara lain:

a. Lebih mengintensifkan adanya forum–forum/silaturahmi/ pembinaan kepada tokoh agama, masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat, partai politik serta para generasi pemuda di Wilayah Kabupaten Madiun.
b. Meningkatkan koordinasi / kerjasama di 4 pilar di tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil Dan Tokoh Agama), Desa/Kel (Kades/Lurah, Babinkatibmas, Babinsa

Dan Tokoh Agama) dalam mewujudkan Stabilitas Kemanan Wilayah Kabupaten Madiun;

c. Membentuk FKDM Kabupaten Pacitan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kel serta meningkatkan sosialisasi deteksi dini terhadap stabilitas kemananan kepada masyarakat serta elemennya untuk menimbulkan kesadaran tentang Pamswakarsa;
d. Pemantauan situasi wilayah Kabupaten Pacitan dalam cipta kondisi aman, dengan mengadakan patrol gabungan dengan instansi terkait.
e. Pengawasan terhadap Faham Radikal dan Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pacitan.
f. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan elemen masyarakat , Ormas, LSM, Parpol , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Instansi terkait TNI/POLRI terhadap Penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan.
g. Peningkatan SDM terkait Deteksi Dini terdapat Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik yang timbul di Wilayah Kabupaten Pacitan.
h. Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat / elemen masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap konflik sosial di masyarakat Kabupaten Pacitan.
i. Mengadakan Pengamanan bersama TNI/Polri dalam Deteksi Dini timbulnya konflik di masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun yang memuat daftar program dan Kegiatan Seluruh PD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026 telah disusun pada akhir bulan Juni 2025. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan

review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD terdapt 6 nomenklatur program yang dicantumkan dalam Renja Bakesbangpol, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
4. Program Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Tabel 2.4 REVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PACITAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**	**Kab. Pacitan**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**76,91**	**3.589.100.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**	**Kab. Pacitan**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**76,91**	**3.589.100.000**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	75.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	75.000.000	
	Kagiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan erangkat Daerah	59 Dokumen	2.551.718.000	Kagiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan erangkat Daerah	59 Dokumen	2.551.718.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang mendapat layanan	100	29.964.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang mendapat layanan	100	29.964.000	

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	456.400.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	456.400.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100	60.499.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100	60.499.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100	321.882.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan		321.882.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80	93.637.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik		93.637.000	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**		**599.500.000**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**		**599.500.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Tesusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		599.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Tesusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter		599.500.000	

								Kebangsaan			
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik**		**1.920.344.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik**		**1.920.344.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.920.344.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.920.344.000	

4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase pembinaan terhadap Ormas**		**126.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Prosentase pembinaan terhadap Ormas**		**126.500.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Tersusunya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		126.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Tersusunya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		126.500.000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya**		**110.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya**		**110.000.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Tersusunnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		110.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Tersusunnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		110.000.000	
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase potensi konflik yang ditangani.**		**2.554.948.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**		**Prosentase potensi konflik yang ditangani.**		**2.554.948.000**	

	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					**FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2.554.948.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2.554.948.000	

2.5 Penelaaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dengan botton up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan PD.

Bakesbangpol Kabupaten Pacitan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam RKPD 2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	4	5
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**		**Hasil Nilai SAKIP PD**	**76,91**	

	Daerah Kabupaten Pacitan				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evauasi Kiner PD		***Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah***	***23 Dokume n***	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Renja, Renja Perubahan, PK,PK Perubahan, PPRG,RKA, RKA Perubahan, LkjIp, Evaluasi Renja Trib 1, Evaluasi RENJA Tri 2, Evaluasi Renja Tribulan 3, Evaluasi Renja Tribulan 4, Renaksi Pencapaian Kinerja, Renaksi Pencapaian Kinerja Perubahan, LKPJ, LPPD,PMPRB,Laporan SAKIP, SPIP, Review Probis, Inovasi Pelayanan Publik, SPM	12 Bulan	
	Kagiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Laporan Keuangan erangkat Daerah***	***59 Dokume n***	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang mendapat layanan	***100 %***	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai	1 paket	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi***	***100 %***	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah pengadaan komponen listrik/ penerangan kantor	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Pengadaan peralatan rumah tangga	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Pengadaan Logistik Perangkat Daerah	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah penyelengggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 bulan	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan***	***100 %***	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan***	***100 %***	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Aktifitas/Operasional Rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah	12 bulan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	***80 %***	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan roda dua dan roda empat, serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor, bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor	1 paket	
2.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**	**17,29%**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Tesusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	***100 %***	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika yang dicetak	4 dokumen	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik**	**100 %**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai		***Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai***	***100 %***	

	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		***Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang di cetak	4 dokumen	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 dokumen	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik , Etika Buadya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik , Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala daerah , serta pemantauan situasi politik di daerah	2 dokumen	
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Prosentase pembinaan terhadap Ormas**	**100%**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		***Tersusunya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***100 %***	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Kab. Pacitan	1. Jumlah Data Ormas yang dimutakhirkan 2. Fasilitasi bantuan ormas	1 dokumen	

	Ormas Asing di Daerah				
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya**	**100%**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		***Tersusunnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya***	***1 tahun***	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 dokumen	
6.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Prosentase potensi konflik yang ditangani.**	**100 %**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		***Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***100 %***	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pacitan	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Rakor Forkopimda yang dilaksanakan	6 kali	

3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur 2009–2014, RKPD Provinsi Jawa Timur 2012; dan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pacitan 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Tujuan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kerukunan dan Stabilitas Politik Daerah

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah: .

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwawasan kebangsaan
2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik
4. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pelayanan Prima yang baik dibidang kesbangpol	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang	**Indikator Tujuan :** IKM minimal Baik	100	100	100	100	100	100
			Indikator Sasaran : Hasil Nilai IKM PD	83	83,77	86,35	87,18	88,15	89,13

		Optimal							
2.	Meningkatnya Kerukunan dan Stabilitas Politik Daerah		**Indikator Tujuan :** Jumlah Konflik Sosial	11,69	0	0	0	0	0
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	**Indikator Sasaran** : Prosentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan		11,86	12,5	13,1	13,8	14,4
		Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat	**Indikator Sasaran** : Prosentase potensi konflik yang dapat dicegah		100	100	100	100	100
			Indikator Tujuan : Prosentase partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik	**Indikator Sasaran :** Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam Bidang Politik.		12,7 %	15,4%	19,1%	23,6%	29,1%
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	**Indikator Sasaran :** Prosentase Ormas yang mendapat predikat baik		28,4 %	30,7 %	32,9 %	35 %	36,9 %

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa **SWOT** sebagai berikut:

1. Strategi S – O (Kekuatan – Peluang) ; memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang.
2. Strategi S – T (Kekuatan – Ancaman) ; menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
3. Strategi W – O (Kelemahan – Peluang) ; memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan.
4. Strategi W – T (Kelemahan – Ancaman) ; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dapat digambarkan faktor internal dan eksternal organisasi sangat berpengaruh serta faktor kunci keberhasilan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tercermin dalam pendekatan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal Organisasi
   a. Kekuatan (strenght)
      1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja.
      2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi.
      3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja
   b. Kelemahan (Weakness)
      1. Terbatasnya sarana dan prasarana
      2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang

terbatas

3. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah

2. Faktor Lingkungan Eksternal Organisasi

a. Peluang (opportunities)

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Adanya dukungan program dari pusat maupun propinsi
3. Adanya tuntutan Keamanan sebagai kebutuhan dasar.

b. Ancaman (threats)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Laju Perkembangaan kehidupan sosial kemasyarakatan semakin komplek tidak sebanding usaha pencegahan, pemulihan keamanan masyarakat.
3. Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu peningkatan Instabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten pacitan.

MATRIK ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

	KEKUATAN (STRENGHT)	***KELEMAHAN (WEAKNESS)***

FAKTOR INTERNAL ***FAKTOR EKSTERNAL***	1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja pada BakesbangPol. 2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi pada BakesbangPol. 3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja pada BakesbangPol.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pada BakesbangPol. 2. Kuantitas dan Kualitas SDM yang terbatas pada BakesbangPol. 3. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah pada BakesbangPol.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	*SO*	*WO*
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat 2. Adanya dukungan program baik dari pusat maupun propinsi 3. Adanya tuntutan	1. Dengan adanya Peraturan perundangan Pada BakesbangPol dapat meningkatkan Kewaspadaan Dini dimasyarakat . 2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas dan fungsi pada BakesbangPol Merealisasikan tuntutan kemanan dan ketertiban sebagai	1. Masyarakat sadar atas haknya untuk menjaga keamanan dan ketertiban walaupun Dengan sarana yang terbatas pada BakesbangPol. 2. Tuntutan keamanan sebagai kebutuhan dasar dapat terwujud

Keamanan sebagai kebutuhan dasar	kebutuhan dasar 3. Adanya anggaran pada Bakesbang pol dapat merealisasikan program baik dari pusat maupun Propinsi	meskipun keterbatasan SDM pada BakesbangPol . 3. Adanya dukungan dari propinsi dan pusat dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga yang masih lemah pada BakesbangPol.
ANCAMAN (THREATS)	*ST*	*WT*
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban 2. Laju Perkembangaan kehidupan sosial kemasyarakatan semakin komplek tidak sebanding usaha pencegahan, pemulihan keamanan masyarakat.	1. Adanya peraturan perundangan dan petujuk teknis pada Badan Kesbang pol dapat menekan masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. 2. Tersedianya anggaran pada Badan Kesbang pol untuk kegiatan pengamanan dapat menghambat laju perkembangan sosial yang semakin komplek	4. Sarana dan prasaran yang terbatas pada BakesbangPol apabila dioptimalkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakan akan kemanan dan ketertiban. 5. Sumber daya manusia yang masih terbatas pada BakesbangPol

3. Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu peningkatan Instabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten pacitan.	3. Kelembagaan mandiri yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbang pol yang jelas dapat menekan instabilitas keamana dan ketertiban seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah.	apabila dipotimalkan dapat mencegah laju perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan yang semakin komplek 6. Koordinasi pada BakesbangPol tentang keamanan dan ketertiban apabila ditingkatkan dapat mengurangi peningkatan instabilitas.

3.4 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dirumuskan melalui :

3.4.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan strategi yang di dalamnya berisi kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi dilaksanakan, juga mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan serta mengarahkan pada kondisi dimana setiap pelaksana di organisasi apakah memperolah dukungan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran pada badan kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
2. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.
3. Pelaporan tepat waktu efektif, efisien, transparan dan akuntable
4. Pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan
5. Koordinasi dan komunikasi yg aktif antar instansi terkait dengan lembaga keagamaan dan kepercayaan
6. Melibatkan masyarakat dalam menentukan metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi
7. Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam pemantauan keberadaan parpol
9. Peningkatan operasional Tim Terpadu
10. Peningkatan operasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri

3.4.2 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus

dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan pngembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

3.4.3 RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan serta guna mencapai sasaran yang dituju maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana terlampir di bawah ini :

Tabel 3.3

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RANCANGAN AWAL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

PERANGKAT DAERAH : 40506 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
8	**01**	**01**	**2.01**		**Kagiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**		**23 Dokumen**	**75.000.000**	**PAD**		**23 Dokumen,**	**78.750.000,-**
8	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja,Renja Perubahan,Perjanjian Kinerja,Perjanjian Kinerja Perubahan,PPRG, RKA,RKA Perubahan,DPA, DPA Perubahan,LKJIP,		12 bulan	75.000.000			12 bulan	**78.750.000,-**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Evaluasi Renja tribulan 1,Evaluasi Renja tribulan 2,Evaluasi Renja tribulan 3,Evaluasi Renja tribulan 4, Renaksi Pencapaian Kinerja, Renaksi Pencapaian Kinerja P, LKPJ,LPPD,PMPRB,Laporan SAKIP,SPIP, Review Probis, Inovasi Pelayanan Publik,SPM							
8	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan erangkat Daerah**		**59 Dokumen**	**2.551.718.000,-**			**59 Dokumen**	**2.679.303.900,-**
8	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tnjangan(14		14 bulan	2.551.718.000,-			14 bulan	2.679.303.900,-
8	**01**	**01**	**2.05**		**KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapat layanan**		**100**	**29.964.000,-**			**100**	**31.462.200,-**
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai		1 paket	29.964.000,-			1 paket	31.462.200,-
8	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100**	**456.400.000,-**			**100**	**479.068.800,-**
8	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik/ penerangan kantor		1 paket	18.543.000,-			1 paket	19.470.000,-
8	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	76.368.000,-			1 paket	80.186.400,-

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan peralatan rumah tangga		1 paket	39.518.000,-			1 paket	41.493.900,-
8	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Logistik Perangkat Daerah		1 paket	71.044.000,-			1 paket	74.596.200,-
8	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetakan dan penggandaan		1 paket	64.619.000,-			1 paket	67.849.950,-
8	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelengggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD		12 bulan	186.307.000,-			12 bulan	195.472.350,-
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**		**100%**	**60.499.000,-**			**100%**	**63.471.450,-**
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		1 paket	60.449.000,-			1 Paket	63.471.450,-
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**		**100%**	**321.881.950,-**			**100%**	**337.975.250,-**
8	01	01	2.08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	4.505.000,-			12 bulan	4.730.250,-
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi dan Listrik		12 bulan	75.343.400,-			12 bulan	79.110.000,-
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aktifitas/Operasional rutin yang dilaksanakan PD		12 bulan	242.033.550,-			12 bulan	254.135.000,-
8	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik**	**Prosentase barang milik daerah dalam**		**100%**	**93.636.600,-**			**100 %**	**98.317.800,-**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Daerah Penunjang Urusan PD	**kondisi baik**							
8	01	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan roda dua dan roda empat, serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah		1 tahun	72.485.600,-			1 tahun	76.109.800,-
8	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor, bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor		1 paket	21.151.000,-			1 paket	22.208.000,-
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**		**14,37 %**	599.500.000,-			**15.01 %**	629.475.000,-
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tesusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**100%**	599.500.000**,-**			**100%**	629.475.000,-
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika yang dicetak		4 Dokumen	599.500.000,-			4 Dokumen	629.475.000,-
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI**	**Prosentase Pembinaan terhadap Partai**		**100**	**160.000.000,-**				

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Politik**							
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**100**	**2.020.344.000,-**			**100**	**2.121.361.200,-**
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang di cetak		4 dokumen	1.920.344.000,-			4 dokumen	2.016.361.200,-
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang	Jumlah Dokumen Kebijakan Di Bidang		360 orang	100.000.000,-			420 orang	105.000.000,-

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Politik , Etika Buadya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik , Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala daerah , serta pemantauan situasi politik di daerah		2 Dokumen	0,-			2 Dokumen	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Prosentase pembinaan terhadap Ormas**		**100**	**126.500.000,-**			**100**	**132.825.000,-**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Tersusunya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**100**	**126.500.000,-**			**100**	**132.825.000,-**
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan	1. Jumlah Data		1	126.500.0			1	132.825.0

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1	4	01	5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas yang dimutakhirkan 2. Fasilitasi bantuan ormas		Dokumen	00,-			Dokumen	00,-
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya**		**100%**	110.000.000,-			**100%**	**115.500.000,-**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Tersusunnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**		**1 tahun**	110.000.000,-			**1 tahun**	**115.500.000,-**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		485 orang	110.000.000,-			500 orang	115.500.000,-
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN**	**Prosentase potensi konflik yang ditangani.**		**100**	**2.637.448.000**			**100**	**1.806.277.179,-**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					KONFLIK SOSIAL								
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100**		**2.637.448.000,-**			**100**	**2.769.320.400,-**
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1.234 Orang	1.537.448.000,-			1.574 orang	1.614.320.400,-
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		4 laporan	0,-			0 laporan	0,-
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum	Jumlah Rakor Forkopimda yang		6 kali	1.100.000.000,-			6 kali	1.155.000.000,-

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dilaksanakan							

4 PENUTUP

Rencana Kinerja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun dan merupakan tindak lanjut dari implementasi Renstra tersebut.

Dengan adanya Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2026 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan

dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

Pacitan, Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780528 199810 1 001

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

2026

RENJA
RENCANA KERJA

JL. Jaksa Agung Suprapto No. 08 Pacitan
Website : satpolpp.pacitankab.go.id
E-mail ; satpolpp.pacitankab@gmail.com
Telp. (0357) 882113,881130

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan perumusan Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Pacitan, Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

ARDYAN WAHYUDI, S.STP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198112162000121002

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**
Kata Pengantar ..... **ii**
Daftar Isi ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **10**
2.1 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu 10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD 14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **24**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24
3.2 Tujuan dan Sasaran 25
3.3 Program dan Kegiatan 26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **33**
BAB V PENUTUP **38**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RENJA merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal OPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah dan Standar Pelayanan Minimal.

SATPOL PP Kabupaten Pacitan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah, pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat.

Dengan beban tugas dan tanggungjawab yang diemban, seiring perkembangan dinamika kegiatan masyarakat dan tuntutan era globalisasi, maka Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu meningkatkan kinerja dalam menghadapi tantangan dan hambatan-hambatan untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Perda yang berkesinambungan, efektif, efisien dan memenuhi tujuan dan sasaran yang diharapkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggungjawab untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang fungsinya sangat fundamental dalam system perencanaan daerah. Kualitas dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah tersebut sangatlah menentukan kualitas pelayanan publik.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan–peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rancana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016);
22. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

1.3. Maksud dan Tujuan

M A K S U D :

Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

T U J U A N :

Menyediakan dokumen perencanaan tahunan SATPOL PP tahun 2026 yang memuat program dan kegiatan tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan PD, serta Pedoman yang dijadikanacuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Developmen Goals).
4. Tantangan dan peluan dalam meningkatkan pelayanan PD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, yang meliputi :

1. Penjelasan mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelanggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Kabupaten Pacitan

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat :

a. catatan penting yang perlu mendapat perhatian;
b. kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis SATPOL PP pada Tahun 2021-2026, SATPOL PP Kabupaten Pacitan memiliki tujuan :

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan pada tahun 2026 melaksanakan 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
      - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
      - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
      - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Th 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**75,25**		**74,60**	**74,85**		**74,60**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD.	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen		59 Dokumen	59 Dokumen	100%	59 Dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%		100%	100%	100%	100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase penyediaan jasa penunjang perasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Th 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%		100%	100%	100%	100%		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**100%**		**100%**	**91,67%**	**91,67%**	**100%**		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	240 kasus		240 kasus	220 Kasus	91,67	240 kasus		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	45 kasus		45 kasus	45 kasus	45 kasus	45 kasus		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang		3 orang	3 orang	3 orang	3 orang		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;**	**100%**		**100%**	**300%**	**300%**	**100%**		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit		15 Menit	15 Menit	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.	Jumlah relawan kebakaran yang diberdayakan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pacitan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan pelanggaran Perda	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	91,6%	100%			
			Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	240	120	120	120	220	120			
			Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	501	220	220	220	501	220			
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	40	40	40	40	40	40			
			Jumlah Polisi Pamong Praja yang	3	3	3	3	3	3			

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			memiliki kualitas sebagai PPNS									
			Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	13	13	13	13	13	13			
			Tersedianya sarana prasarana minimal	172	172	172	172	172	172			
2.	Meningkatnya penanganan kebakaran dan kejadian membahayakan manusia non kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	300%	100%			
			Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2			

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
			Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
			Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	2	2	2	2	2	2			
			Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	101	101	101	101	101	101			

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	30	30	30	30	31	30			
			Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	20	20	20	20	20	20			
			Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	1	1	1	2	1			

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran [Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)]	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit			

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan adalah membantu kepala daerah dalam penegakan perda, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan memiliki fungsi, antara lain:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan

yaitu tahun 2026 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2026 program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada rencana kerja tahun 2026 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2026.

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PACITAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Pacitan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Pacitan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%		
			Presentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100%				Presentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100%		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	240		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	240		
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	45		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	45		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah PPNS yang dibina	25		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah PPNS yang dibina	25		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Pacitan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	100		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Pacitan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	100		
			Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	15				Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	15		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah kejadian kebakaran dan kejadian membahayakan manusia yang tertangani	45		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah kejadian kebakaran dan kejadian membahayakan manusia yang tertangani	45		
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Pacitan	Jumlah relawan kebakaran yang diberdayakan	20		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Pacitan	Jumlah relawan kebakaran yang diberdayakan	20		

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pacitan	Hasil Nilai SAKIP PD	>B		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pacitan	Hasil Nilai SAKIP PD	>B		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat diuraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Pacitan yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Pacitan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Pacitan**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**75,25**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD.	Kabupaten Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Kabupaten Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Kabupaten Pacitan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Kabupaten Pacitan	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Kabupaten Pacitan	Persentase jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Kabupaten Pacitan	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	90%	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kabupaten Pacitan**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**100%**	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kabupaten Pacitan	Jumlah Gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	100 %	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.	Kabupaten Pacitan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100 %	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.	Kabupaten Pacitan	Jumlah PPNS yang berkualitas	25 orang	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Kabupaten Pacitan**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;**	**100%**	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Kabupaten Pacitan	Persentase warga masyarakat yang memperoleh layanan kebakaran dan non kebakaran	100%	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.	Kabupaten Pacitan	Persentase warga masyarakat yang diberdayakan	100%	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148): "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja".

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan.

Sedangkan Sasaran rencana kerja merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dan sasaran SATPOL PP Kabupaten Pacitan yang akan dicapai pada perIode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KAB. PACITAN TAHUN 2022-2027

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
(1)	(2)							(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase lingkungan tentram dan tertib	75%	80%	85%	90%	90%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan pelanggaran Perda	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya penanganan kebakaran dan kejadian membahayakan manusia non kebakaran	Persentase warga masyarakat yang memperoleh layanan kebakaran dan kejadian membahayakan manusia non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang baik	Hasil Nilai IKM	83,45	83,48	85,15	85,35	85,45

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 meliputi 3 (Tiga) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dengan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan. Adapun program tersebut sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan

Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Pacitan, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – Undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Sejalan dengan Misi kedua dan keempat Kabupaten Pacitan, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2026 terdiri atas 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 10.277.179.597,00 Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN PACITAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.110.694.951**				**11.578.000.000**
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**Kab. Pacitan**		**9.110.694.951**				**11.578.000.000**
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**3.670.000.000**			**100%**	**4.145.000.000**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	**Kab. Pacitan**	**100%**	**1.000.000.000**			**100%**	**1.570.000.000**
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pacitan	12 Dokumen	100.000.000	Pajak Rokok		12 Dokumen	560.000.000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pacitan	117 Orang	200.000.000	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)		118 Orang	210.000.000,
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Pacitan	12 laporan	655.000.000	Pajak Rokok		12 laporan	655.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Pacitan	12 Laporan	35.000.000	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	140.000.000
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Pacitan	12 Laporan	10.000.000	Pajak Rokok		12 Laporan	10.000.000
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**2.400.000.000**			**100 %**	**2.540.000.000**
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pacitan	12 Laporan	600.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		12 Laporan	990.000.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kab. Pacitan	12 Laporan	1.800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		12 Laporan	1.550.000.000
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah PPNS yang berkualitas**	**Kab. Pacitan**	**25 orang**	**20.000.000**			**20 orang 25 orang**	**35.000.000**
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Pacitan	12 Laporan	20.000.000	Pajak Rokok		12 Laporan	**35.000.000**
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayananpenyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**250.000.000**			**100%**	**488.000.000**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan**	**Persentase warga masyarakat yang memperoleh layanan kebakaran dan non kebakaran**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**200.201.200**			**100 %**	**363.000.000**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Pacitan	12 Dokumen	50.201.200	Pajak Rokok		12 Dokumen	153.000.000
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pacitan	12 Dokumen	150.000.000	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	210.000.000
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase warga masyarakat yang diberdayakan**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**49.798.800**			**360 Orang 360 Orang**	**125.000.000**
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Pacitan	125 Orang	49.798.800	Pajak Rokok		87 Orang	**125.000.000**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**>B nilai**	**5.968.314.230**			**>B nilai**	**6.945.000.000,**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**24 Dokumen**	**35.000.000**			**24 Dokumen 24 Dokumen**	**70.000.000**
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	12 Dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		25 Dokumen	35.000.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	12 Laporan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		24 Laporan	35.000.000
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**59 dokumen**	**4.094.936.597**			**59 Dokumen 59 Dokumen**	**4.285.000.000**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	40 Orang/bulan	3.741.317.318	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 Orang/bulan	4.200.000.000
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kab. Pacitan	12 Dokumen	51.220.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 Dokumen	85.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**87.466.400**			**100 %**	**125.000.000**
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pacitan	117 Paket	72.466.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		120 Paket	**125.000.000**
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegeawaian	Kab. Pacitan	12 Laporan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**239.635.033**			**100 %**	**405.000.000**
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan	4 Paket	64.738.533	Dana Alokasi Umum (DAU)		17 Paket	85.000.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	12 Laporan	174.896.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	320.000.000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**1.481.042.200**			**100 % 100 %**	**2.000.000.000**
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan	12 Laporan	1.481.042.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah		12 Laporan	**2.000.000.000**
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik**	**Kab. Pacitan**	**90%**	**30.234.000**			**100 % 80 %**	**60.000.000**
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pacitan	2 Unit	30.234.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Unit	**60.000.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2027 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan Fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan instansi yang membidangi fungsi lain.

Pacitan , Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

ARDYAN WAHYUDI, S.STP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198112162000121002

2026

RENCANA KERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan
Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan

0357 886164

bpbd.pacitan@gmail.com

Copyright: wordexceltemplates.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini dilakukan sebagai penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Diharapkan Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, 01 - 08 - 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PACITAN

ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM
NIP. 19790308 199711 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	4
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	7
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	18
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB IV	PENUTUP	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Ranwal Renja) merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Ranwal Renja Pembangunan BPBD Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Pacitan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Pacitan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, target capaian program, kegiatan dan subkegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2026 dimana RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2026 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021–2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Pacitan selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Penyusunan Rencana Kerja tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Alam;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja BPBD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Pacitan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah tahapan awal penyusunan dokumen Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2026.

Tujuannya adalah sebagai pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan II dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	105.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	0	0	0.00	0	76.05	2.788.602.830,00	0	477.173.433,00	0	589.315.794,00	0	82.784.910,00	0	0	0	1.149.274.137,00	0	41,21	0	1.149.274.137,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	0.00	0	0.00	0	24.00	46.240.000,00	6	285.000,00	2	1.968.000,00	0	0	0	0	8	2.253.000,00	33,33	4,87	8	2.253.000,00	0	0	
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	0	0.00	0	9	40.620.000,00	3	285.000,00	0	1.968.000,00	0	0	0	0	3	2.253.000,00	33,33	5,55	3	2.253.000,00	0	0	
	105.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0	0.00	0	15	5.620.000,00	4	0	3	0	0	0	0	0	7	0	46,67	0	7	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				40	2,78					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	0.00	0	0.00	0	57.00	1.735.222.830,00	9	344.119.758,00	10	413.499.362,00	0	78.566.910,00	0	0	19	836.186.030,00	33,33	48,19	19	836.186.030,00	0	0	
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	0.00	0	0.00	0	13.00	1.684.282.830,00	13	333.303.508,00	13	399.954.362,00	0	78.566.910,00	0	0	13	811.824.780,00	100	48,2	13	811.824.780,00	0	0	

		ASN	Tunjangan ASN																							
	105.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.00	0	0.00	0	12	42.540.000,00	3	10.635.000,00	3	10.635.000,00	0	0	0	0	6	21.270.000,00	50	50	6	21.270.000,00	0	0	
	105.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0.00	0	0.00	0	45	8.400.000,00	9	181.250,00	9	2.910.000,00	0	0	0	0	18	3.091.250,00	40	36,8	18	3.091.250,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				63,33	45					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	105.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	0.00	0	0.00	0	100.00	126.029.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.00	0	0.00	0	1.00	126.029.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	0					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	105.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	0.00	0	0.00	0	100.00	244.060.768,00	22	56.271.548,00	18	44.337.444,00	0	0	0	0	40	100.608.992,00	40	41,22	40	100.608.992,00	0	0	
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	66.127.876,00	2	31.686.548,00	1	5.270.250,00	0	0	0	0	3	36.956.798,00	25	55,89	3	36.956.798,00	0	0	
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	41.937.892,00	3	4.833.000,00	3	10.748.950,00	0	0	0	0	6	15.581.950,00	50	37,15	6	15.581.950,00	0	0	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0	0.00	0	12.00	135.995.000,00	2	19.752.000,00	3	28.318.244,00	0	0	0	0	5	48.070.244,00	41,67	35,35	5	48.070.244,00	0	0	

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					38,89	42,8					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	0.00	0	0.00	0	100.00	411.934.332,00	12	57.552.127,00	25	106.332.988,00	0	0	0	0	37	163.885.115,00	37	39,78	37	163.885.115,00	0	0	
	105.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	248.830.332,00	3	19.608.193,00	3	64.865.302,00	0	0	0	0	6	84.473.495,00	50	33,95	6	84.473.495,00	0	0	
	105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	163.104.000,00	3	37.943.934,00	3	41.467.686,00	0	0	0	0	6	79.411.620,00	50	48,69	6	79.411.620,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					50	41,32					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	105.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	0.00	0	0.00	0	100.00	225.115.680,00	7	18.945.000,00	6	23.178.000,00	0	4.218.000,00	0	0	13	46.341.000,00	13	20,59	13	46.341.000,00	0	0	
	105.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0.00	0	0.00	0	13	83.278.145,00	3	15.845.000,00	7	22.218.000,00	0	4.218.000,00	0	0	10	42.281.000,00	76,92	50,77	10	42.281.000,00	0	0	
	105.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.00	0	0.00	0	7	9.460.000,00	7	3.100.000,00	0	960.000,00	0	0	0	0	7	4.060.000,00	100	42,92	7	4.060.000,00	0	0	
	105.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0	0.00	0	1.00	132.377.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					58,97	31,23					F
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah		3	3		

Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					26,11	25,78				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2	105.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai pengembangan sistem informasi, diklat,dan logistik	0	0	0.00	0	0.77	1.548.220.000,00	0	280.128.799,00	0	273.260.808,00	0	0	0	0	0	553.389.607,00	0	35,74	0	553.389.607,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	105.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.00	0	0.00	0	100.00	135.000.000,00	9	37.730.000,00	34	23.532.600,00	0	0	0	0	43	61.262.600,00	43	45,38	43	61.262.600,00	0	0	
	105.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	12239.00	135.000.000,00	########	37.730.000,00	########	23.532.600,00	0	0	0	0	########	61.262.600,00	45,58	45,38	########	61.262.600,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					45,58	45,38				F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1	
	105.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.00	0	0.00	0	100.00	853.596.300,00	9	171.921.095,00	34	145.161.500,00	0	0	0	0	43	317.082.595,00	43	37,15	43	317.082.595,00	0	0	
	105.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas)	0.00	0	0.00	0	1.00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			Kabupaten/Kota yang tertangani																								
	105.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0.00	0	0.00	0	24.00	10.087.125,00	13	9.948.000,00	58	0	0	0	0	0	71	9.948.000,00	295,8	98,62	71	9.948.000,00	0	0	
	105.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	0.00	0	0.00	0	300.00	1.000.000,00	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	100	0	300	0	0	0	
	105.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0.00	0	0.00	0	50.00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0.00	0	0.00	0	4.00	277.120.000,00	1	70.624.095,00	1	51.378.500,00	0	0	0	0	2	122.002.595,00	50	44,03	2	122.002.595,00	0	0	
	105.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor	0.00	0	0.00	0	20.00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana																								
	105.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	1.00	105.000.000,00	0	0	0	878.500,00	0	0	0	0	0	878.500,00	0	0,84	0	878.500,00	0	0	
	105.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	1.00	1.000.000,00	0	0	0	664.000,00	0	0	0	0	0	664.000,00	0	66,4	0	664.000,00	0	0	
	105.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0.00	0	0.00	0	1.00	390.389.175,00	2	91.349.000,00	0	92.240.500,00	0	0	0	0	2	183.589.500,00	200	47,03	2	183.589.500,00	0	0	
	105.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				64,58	25,69					F

Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah		10	10		
	105.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0.00	0	0.00	0	95.00	97.423.700,00	84	31.805.500,00	0	15.961.500,00	0	0	0	0	84	47.767.000,00	88,42	49,03	84	47.767.000,00	0	0	
	105.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0.00	0	0.00	0	1	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0.00	0	0.00	0	1	41.440.000,00	1	9.800.000,00	0	9.930.000,00	0	0	0	0	1	19.730.000,00	100	47,61	1	19.730.000,00	0	0	
	105.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	7.122.000,00	3	1.058.000,00	10	3.471.500,00	0	0	0	0	13	4.529.500,00	######	63,6	13	4.529.500,00	0	0	
	105.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0.00	0	0.00	0	180.00	42.461.700,00	21	20.947.500,00	56	0	0	0	0	0	77	20.947.500,00	42,78	49,33	77	20.947.500,00	0	0	
	105.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0.00	0	0.00	0	1.00	5.600.000,00	1	0	0	2.560.000,00	0	0	0	0	1	2.560.000,00	100	45,71	1	2.560.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					308,6	41,25					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah		5	5		
	105.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	462.200.000,00	0	38.672.204,00	0	88.605.208,00	0	0	0	0	0	127.277.412,00	0	27,54	0	127.277.412,00	0	0	

	105.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0.00	0	0.00	0	27.00	125.210.000,00	0	0	0	2.213.894,00	0	0	0	0	0	2.213.894,00	0	1,77	0	2.213.894,00	0	0	
	105.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	0.00	0	0.00	0	39.00	200.000.000,00	3	7.229.570,00	8	58.426.814,00	0	0	0	0	11	65.656.384,00	28,21	32,83	11	65.656.384,00	0	0	
	105.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	2.00	136.990.000,00	0	31.442.634,00	0	27.964.500,00	0	0	0	0	0	59.407.134,00	0	43,37	0	59.407.134,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				9,4	25,99					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				43,61	39,78					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				0	38,48					

Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Total	4.336.822.830,00			1.702.663.744,00			
Persentase Realisasi Anggaran	39.26%						
Predikat	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran yang lambat dan kurang maksimal							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran (terukur) agar tercapai target kinerja							

2.2. ANALISIS KERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintregasi mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2.2.2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

a. Pencarian (search and rescue)
b. Pertolongan pertama pada korban bencana
c. Evakuasi
d. Logistik / Dapur Umum

2.2.3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi akibat bencana
b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana
c. Mengusulkan bantuan sosial dana rehabilitasi dan rekonstruksi
d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- **Tingkat kinerja pelayanan BPBD**

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kab. Pacitan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dari pemerintah dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, diantaranya :

1. Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat desa (desa tangguh);
2. Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada;
3. Penanganan sistem informasi kebencaaan yang terpusat di BPBD Kabupaten.

- **Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya :**

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

a. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
c. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Perangkat Daerah selain BPBD;
e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan;
f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;

g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang tanggap darurat dan logistik sebagai berikut :

a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.

3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;

c. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

- **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :**
  1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
  2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
  3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
  4. Menghargai budaya lokal,
  5. Membangun pasrtisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
  6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,
  7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- **Adapun Tantangan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan :**
  1. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan;
  2. Klasifikasi Badan yang masih tipe B;
  3. Belum adanya Peraturan Bupati mengenai Penanggulangan Bencana;
  4. Minimnya anggaran;
  5. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
  6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

- **Peluang BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**
  1. Adanya proses bisnis perangkat daerah;
  2. Adanya SOP;
  3. Adanya Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;
  4. Dukungan undang-undang;
  5. Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana.

- **Formulasi isu-isu penting**

1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil (pembuatan desa tangguh);
2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana;
3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana;
4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana;
5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 (tujuh) arah kebijakan nasional tersebut yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian misi Bupati.

Adapun rumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah Terhadap Risiko Bencana

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal
   Indikator : Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah
2. Penguatan daerah dalam pengurangan risiko bencana
   Indikator : Indeks Ketahanan Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab ini di danai oleh APBD Kabupaten Pacitan tahun 2025.

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana maka wajib melaksanakan SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Program Kegiatan BPBD Kabupaten Pacitan berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Pada Rencana Kerja tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah merencanakan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.985.822.830,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran perangkat daerah pada tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan direncanakan akan melaksanakan 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) subkegiatan. Termasuk di dalamnya ada kegiatan utama dan kegiatan yang dilaksanakan rutin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			3.294.731.116,00				6.800.000.000,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.294.731.116,00				6.800.000.000,00
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.294.731.116,00				6.800.000.000,00
1	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**>B Nilai**	**2.551.005.649,00**			**>B Nilai**	**3.575.000.000,00**
	1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**24 dokumen**	**10.000.000,00**			**24 dokumen**	**20.000.000,00**
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9 Dokumen	10.000.000,00
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Dokumen	10.000.000,00
	1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah**	**57 dokumen**	**1.818.022.961,00**			**57 Dokumen**	**1.870.000.000,00**
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.771.864.561,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	16 Orang/bulan	1.770.000.000,00
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	38.160.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	12 Dokumen	85.000.000,00

							Pelaksanaan Tugas ASN			Kel/Desa	ALOKASI UMUM		
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Laporan	7.998.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	45 Laporan	15.000.000,00
	1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100 %**	**1.000.000,00**			**100%**	**5.000.000,00**
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	5.000.000,00
	1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**140.574.592,00**			**100%**	**400.000.000,00**
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.520.098,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Paket	150.000.000,00
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.005.494,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Paket	75.000.000,00
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	85.049.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	18 Laporan	175.000.000,00
	1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100 %**	**478.445.400,00**			**100%**	**930.000.000,00**
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.725.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	270.000.000,00
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	327.720.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	660.000.000,00
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**102.962.696,00**			**100%**	**350.000.000,00**
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	71.011.726,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13 Unit	175.000.000,00
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.060.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Unit	25.000.000,00
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.890.970,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000,00
2	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Nilai pengembangan sistem informasi, diklat,dan logistik**	**0,81**	**743.725.467,00**			**0,81 Nilai**	**3.225.000.000,00**
	1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**2,75 %**	**68.852.000,00**			**2,45 %**	**175.000.000,00**
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	6.525 Orang	68.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14.700 Orang	175.000.000,00
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	852.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Dokumen	0,00

	1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**2,30 %**	**340.551.277,00**			**2,20 %**	**1.575.000.000,00**
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Kegiatan	50.000.000,00
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	150 Unit	7.331.550,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Unit	100.000.000,00
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300 Orang	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	300 Orang	150.000.000,00
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	200 Keluarga	14.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Keluarga	150.000.000,00
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Menadi Kab. Pacitan, Pacitan, Purworejo Kab. Pacitan, Pacitan, Banjarsari Kab. Pacitan, Pacitan, Bolosingo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Kawasan	325.000.000,00
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24 Orang	43.895.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Orang	100.000.000,00

	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	150.000.000,00
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	94.324.727,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	475.000.000,00
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Kawasan	75.000.000,00
	1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**90 %**	**60.682.190,00**			**80,60 %**	**365.000.000,00**
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas							
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	800.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	5.000.000,00
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	25.440.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	100.000.000,00
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	7.150.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Orang	50.000.000,00
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							

							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	21.692.190,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	175 Orang	200.000.000,00
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	5.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	10.000.000,00
	1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana**	**2 dokumen**	**273.640.000,00**			**2 dokumen**	**1.110.000.000,00**
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	200.000.000,00
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	10.000.000,00
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	28 Orang	3.640.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Orang	150.000.000,00
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	27 Orang	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35 Orang	175.000.000,00
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							

							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	39 Kegiatan	94.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Kegiatan	400.000.000,00
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota							
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	175.000.000,00
	J U M L A H								**3.294.731.116,00**				**6.800.000.000,00**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan akan melaksanakan 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, 36 (tiga puluh enam) subkegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.294.731.116,,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Enam Belas Rupiah)

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan 63514
Telp/Fax (0357) 886164, Website : bpbd.pacitankab.go.id
e-mail : bpbd.pacitan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
Nomor : 900.1.1.2 / 440 / 408.57 / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
b. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.
KEDUA	:	Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
KETIGA	:	Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
KEEMPAT	:	Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19790308 199711 1 003

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2026

KECAMATAN DONOROJO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Donorojo Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Donorojo, 06 - 08 - 2025
Plt. CAMAT DONOROJO

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.
NIP. 19840320 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN .....
1.1 Latar Belakang .....
1.2 Landasan Hukum .....
1.3 Maksud dan Tujuan .....
1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB.II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....
3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Donorojo .....

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....
4.2 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2026.....

BAB V PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Perangkat Daerah harus Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja di setiap anggaran. Pada tahun 2026 ini Kecamatan Donorojo menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Donorojo tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Donorojo adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Donorojo dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Donorojo dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Donorojo adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Donorojo yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024.

2.2. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Donorojo

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA TAHUN 2025

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Sampai dengan akhir tahun 2024 penyerapan anggaran Kecamatan Donorojo termasuk kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Donorojo tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024. Adapun capaian kinerja untuk masing – masing program, kegiatan maupun sub kegiatan diuraiakan sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	CAPAIAN (%)
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.177.020.068,00**	**2.040.252.722,00**	**136.767.346,00**	**93,72**
	7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.344.000,00**	**40.277.500,00**	**65.500,00**	**99,74**
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.780.000,00	31.764.000,00	16.000,00	99,84
	7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.691.200,00	2.671.000,00	20.200,00	99,25
	7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.996.000,00	1.996.000,00	0	100,00
	7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.876.800,00	3.846.500,00	30.300,00	99,22
	7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**1.614.260.867,00**	**1.494.933.699,00**	**119.327.168,00**	**92,61**
	7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.603.965.367,00	1.484.748.199,00	119.217.168,00	92,57
	7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.599.000,00	5.584.000,00	15.000,00	99,73

	7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	613.500,00	583.500,00	30.000,00	95,11
	7.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	309.500,00	299.500,00	10.000,00	96,77
	7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.562.500,00	3.507.500,00	55.000,00	98,46
	7.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	211.000,00	211.000,00	0	100,00
	7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.590.000,00**	**10.590.000,00**	0	**100,00**
	7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.590.000,00	10.590.000,00	0	100,00
	7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**94.063.401,00**	**93.813.000,00**	250.401,00	**99,73**
	7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.646.401,00	83.396.000,00	250.401,00	99,70
	7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.577.000,00	6.577.000,00	0,00	100,00
	7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.840.000,00	3.840.000,00		100,00
	7.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**189.262.000,00**	**189.262.000,00**	**0**	**100,00**
	7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	58.366.500,00	58.366.500,00	0	100,00
	7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.101.500,00	95.101.500,00	0	100,00
	7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.794.000,00	35.794.000,00	0	100,00
	7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**156.940.300,00**	**142.912.023,00**	**14.028.277,00**	**91,06**
	7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000,00	6.410.000,00	290.000,00	95,67
	7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.894.700,00	15.307.514,00	5.587.186,00	73,26
	7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.345.600,00	121.194.509,00	8.151.091,00	93,70
	7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**71.559.500,00**	**68.464.500,00**	**3.095.000,00**	**95,67**

		Pemerintahan Daerah				
	7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.003.500,00	37.908.500,00	3.095.000,00	92,45
	7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.556.000,00	30.556.000,00	0,00	100,00
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**46.200.000,00**	**46.160.000,00**	**40.000,00**	**99,91**
	7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**46.200.000,00**	**46.160.000,00**	**40.000,00**	**99,91**
	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.200.000,00	46.160.000,00	40.000,00	99,91
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**311.954.500,00**	**311.755.250,00**	**199.250,00**	**99,94**
	7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**311.954.500,00**	**311.755.250,00**	**199.250,00**	**99,94**
	7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.204.500,00	21.154.500,00	50.000,00	99,76
	7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	290.750.000,00	290.600.750,00	149.250,00	99,95
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**88.600.000,00**	**86.100.000,00**	**2.500.000,00**	**97,18**
	7.01.04.2.03	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**88.600.000,00**	**86.100.000,00**	**2.500.000,00**	**97,18**
	7.01.04.2.03.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	88.600.000,00	86.100.000,00	2.500.000,00	97,18

5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**61.800.000,00**	**61.790.000,00**	**10.000,00**	**99,98**
	7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**61.800.000,00**	**61.790.000,00**	**10.000,00**	**99,98**
	7.01.05.2.01.05	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.800.000,00	61.790.000,00	10.000,00	99,98
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**116.920.000,00**	**116.890.000,00**	**30.000,00**	**99,97**
	7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**116.920.000,00**	**116.890.000,00**	**30.000,00**	**99,97**
	7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	65.320.000,00	65.290.000,00	30.000,00	99,95
	7.01.06.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00
	7.01.06.2.01.17	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0,00	0,00		0,00
TOTAL BELANJA			**2.802.494.568,00**	**2.662.951.110,00**	**139.546.596,00**	**95,02**

2.2 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Sampai dengan akhir bulan Triwulan II bulan Juni tahun 2025 penyerapan anggaran Kecamatan Donorojo masih rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang proses pengajuan administrasi pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Donorojo tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Adapun capaian kinerja untuk masing – masing program, kegiatan maupun sub kegiatan diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar (Rp. 2.044.302.413,00) realisasi 40,73 % sebesar (Rp. 832.548.868,00) meliputi :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar

(Rp. 43.588.800,00) realisasi sebesar 49,80 % (Rp. 21.708.600,00)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar (Rp. 1.558.112.826,00) realisasi sebesar 44,24 % (Rp. 689.349.370,00)
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar (Rp. 11.058.400,00) realisasi sebesar 0% (Rp. 0,00)
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar (Rp. 86.627.457,00) realisasi sebesar 50,02 % (Rp. 43.330.500,00)
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar (Rp. 113.925.330,00) realisasi sebesar 0% (Rp. 0,00)
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar (Rp. 160.155.600,00) realisasi sebesar 36,59 % (Rp. 58.596.898,00)
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar (Rp. 70.834.000,00) realisasi sebesar 27,62% (Rp. 19.563.500,00)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar (Rp. 48.680.000,00) realisasi 48,93 % sebesar (Rp. 23.821.364,00) meliputi :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Rp. 48.680.000,00) realisasi 48,93 % sebesar (Rp. 23.821.364,00) ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar (Rp. 302.338.500,00) realisasi 12,65 % sebesar (Rp. 31.156.500,00) meliputi :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Rp. 302.338.500,00) realisasi 12,65 % sebesar (Rp. 31.156.500,00)
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 30.680.000,00) realisasi 42,74 % sebesar (Rp. 17.568.500,00) meliputi :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum (Rp. 30.680.000,00) realisasi 42,74 % sebesar (Rp. 17.568.500,00)
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar (Rp. 36.900.000,00) realisasi 52,41 % sebesar (Rp. 19.340.000,00) meliputi :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasa Kepala Daerah (Rp. 36.900.000,00) realisasi 52,41 % sebesar (Rp. 19.340.000,00)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar (Rp. 125.270.000,00) realisasi 37,33% sebesar (Rp 46.760.000,00) meliputi :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Rp. 125.270.000,00) realisasi 37,33% sebesar (Rp 46.760.000,00)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Donorojo pada Tahun 2025 adalah ***" Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif "*** dengan indikator tujuan adalah : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan Kecamatan Donorojo adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Donorojo dengan indikator sasaran adalah *" Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan "*
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran adalah
    - Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasidalam satu tahun Bidang: Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban
    - Prosentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Tabel 3.1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Donorojo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,29	82,23	87,37	88,37	90,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Donorojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,29	82,23	87,37	88,37	90,00
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasidalam satu tahun Bidang : PemerintahanPembangunandan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, SosialKetentraman dan Ketertiban	80%	83%	100%	100%	100%
								Prosentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	80%	83%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Donorojo pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
     - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - 1.2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
     - 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
     - 1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - 1.4.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - 1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.5.1 Pengadaan Mebel
     - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     - 1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

5.1.2 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

6.1.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

4.2 ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Adalah sebagai berikut dan dapat dilihat pada Lampiran :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.083.140.250,00 meliputi :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 34.855.800,00
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.666.286.163,00
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.652.000,00
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 89.497.787,00
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 108.490.100,00
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 111.232.800,00
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 64.125.600,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 46.246.000,00 meliputi :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rp. 46.246.000,00 ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 287.221.575,00 meliputi :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp. 287.221.575,00

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 43.146.000,00 meliputi :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum Rp. 43.146.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 41.055.000,00 meliputi :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasa Kepala Daerah Rp. 41.055.000,00
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 119.006.500,00 meliputi :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 119.006.500,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kecamatan Donorojo , merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Donorojo yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2030.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah, dan acuan bagi Masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus evaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 tidak hanya ditentukan oleh Kecamatan Donorojo saja, namun juga membutuhkan dukungan Masyarakat dan stakeholder (para pemangku kepentingan). Serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pacitan terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2026-2030 yaitu ***" PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA "*** .

Donorojo, 06 - 08 - 2025

Plt. CAMAT DONOROJO

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

NIP. 19840320 200412 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0,00**	**0,00**	**70.95**	**0,00**	**73.15**	**2.177.020.068,00**	**0,00**	**373.248.438,00**	**70,60**	**605.552.846,00**	**0,00**	**408.980.998,00**	**0,00**	**652.410.440,00**	**70,60**	**2.040.192.722,00**	**96,51**	**93,71**	**141,55**	**2.040.192.722,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**7.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**7**	**40.344.000,00**	**2,00**	**4.925.750,00**	**2,00**	**4.627.750,00**	**2,00**	**21.584.000,00**	**1,00**	**9.140.000,00**	**7,00**	**40.277.500,00**	**100,00**	**99,84**	**7,00**	**40.277.500,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bahan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	31.780.000,00	1,00	1.812.500,00	3,00	3.537.500,00	5,00	19.334.000,00	3,00	7.080.000,00	12,00	31.764.000,00	100,00	99,95	12,00	31.764.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0,00	0.00	0,00	10	2.691.200,00	1,00	781.000,00	2,00	60.000,00	5,00	870.000,00	2,00	960.000,00	10,00	2.671.000,00	100,00	99,25	10,00	2.671.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0,00	0.00	0,00	10	1.996.000,00	0,00	736.000,00	3,00	900.000,00	4,00	180.000,00	3,00	180.000,00	10,00	1.996.000,00	100,00	100,00	10,00	1.996.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0,00	0.00	0,00	10	3.876.800,00	1,00	1.596.250,00	3,00	130.250,00	4,00	1.200.000,00	2,00	920.000,00	10,00	3.846.500,00	100,00	99,22	10,00	3.846.500,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	99,61					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		4	4		
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Keuangan PD**	**bulan**	**14.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14**	**1.614.260.867,00**	**3,00**	**309.272.466,00**	**5,00**	**539.486.171,00**	**3,00**	**330.959.035,00**	**3,00**	**315.156.027,00**	**14,00**	**1.494.873.699,00**	**100,00**	**92,60**	**14,00**	**1.494.873.699,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	16	1.603.965.367,00	15,00	306.111.466,00	14,00	538.453.171,00	14,00	327.679.535,00	16,00	312.504.027,00	16,00	1.484.748.199,00	100,00	92,57	16,00	1.484.748.199,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0,00	0.00	0,00	12	5.599.000,00	1,00	2.136.500,00	7,00	623.500,00	2,00	1.704.000,00	2,00	1.060.000,00	12,00	5.524.000,00	100,00	98,66	12,00	5.524.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0,00	0.00	0,00	12	613.500,00	1,00	261.000,00	2,00	0,00	5,00	0,00	4,00	322.500,00	12,00	583.500,00	100,00	95,11	12,00	583.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0,00	0.00	0,00	12	309.500,00	1,00	299.500,00	2,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	12,00	299.500,00	100,00	96,77	12,00	299.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0,00	0.00	0,00	12	3.562.500,00	1,00	417.000,00	4,00	245.500,00	4,00	1.575.500,00	3,00	1.269.500,00	12,00	3.507.500,00	100,00	98,46	12,00	3.507.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0,00	0.00	0,00	12	211.000,00	1,00	47.000,00	3,00	164.000,00	5,00	0,00	3,00	0,00	12,00	211.000,00	100,00	100,00	12,00	211.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	96,93					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		6	6		
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Paket**	**2.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.00**	**10.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**10.590.000,00**	**2,00**	**10.590.000,00**	**100,00**	**100,00**	**2,00**	**10.590.000,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang dibutuhkan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	2	10.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10.590.000,00	2,00	10.590.000,00	100,00	100,00	2,00	10.590.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	100,00					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kebutuhan dasar PD**	**Bulan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**94.063.401,00**	**3,00**	**24.504.250,00**	**3,00**	**15.082.750,00**	**3,00**	**20.016.250,00**	**3,00**	**34.209.750,00**	**12,00**	**93.813.000,00**	**100,00**	**99,73**	**12,00**	**93.813.000,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	12	83.646.401,00	3,00	21.460.500,00	3,00	14.357.500,00	3,00	17.876.500,00	3,00	29.701.500,00	12,00	83.396.000,00	100,00	99,70	12,00	83.396.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dibutuhkan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.577.000,00	3,00	1.123.750,00	3,00	725.250,00	3,00	1.239.750,00	3,00	3.488.250,00	12,00	6.577.000,00	100,00	100,00	12,00	6.577.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0,00	0.00	0,00	36	3.840.000,00	6,00	1.920.000,00	8,00	0,00	11,00	900.000,00	11,00	1.020.000,00	36,00	3.840.000,00	100,00	100,00	36,00	3.840.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	99,90					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3		
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang PD**	**Bulan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**189.262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**189.262.000,00**	**12,00**	**189.262.000,00**	**100,00**	**100,00**	**12,00**	**189.262.000,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dibutuhkan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	2	58.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	58.366.500,00	2,00	58.366.500,00	100,00	100,00	2,00	58.366.500,00	0	0	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibutuhkan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	2	35.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35.794.000,00	2,00	35.794.000,00	100,00	100,00	2,00	35.794.000,00	0	0	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	2	95.101.500,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	95.101.500,00	24,00	95.101.500,00	1.200,00	100,00	24,00	95.101.500,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	466,67	100,00					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3		
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aktivitas / Operasional Rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**156.940.300,00**	**3,00**	**30.727.472,00**	**3,00**	**32.881.675,00**	**3,00**	**27.654.713,00**	**3,00**	**51.648.163,00**	**12,00**	**142.912.023,00**	**100,00**	**91,06**	**12,00**	**142.912.023,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0,00	0.00	0,00	12	6.700.000,00	3,00	1.147.500,00	3,00	1.462.500,00	3,00	1.712.500,00	3,00	2.087.500,00	12,00	6.410.000,00	100,00	95,67	12,00	6.410.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	20.894.700,00	3,00	4.254.270,00	3,00	3.645.872,00	3,00	3.593.210,00	3,00	3.814.162,00	12,00	15.307.514,00	100,00	73,26	12,00	15.307.514,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	129.345.600,00	3,00	25.325.702,00	3,00	27.773.303,00	3,00	22.349.003,00	3,00	45.746.501,00	12,00	121.194.509,00	100,00	93,70	12,00	121.194.509,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	87,54					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Tinggi		3	3		
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aset yang dikelola**	**Bulan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**71.559.500,00**	**3,00**	**3.818.500,00**	**2,00**	**13.474.500,00**	**4,00**	**8.767.000,00**	**3,00**	**42.404.500,00**	**12,00**	**68.464.500,00**	**100,00**	**95,67**	**12,00**	**68.464.500,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		0,00	0.00	0,00	16	41.003.500,00	6,00	3.818.500,00	9,00	13.474.500,00	1,00	8.767.000,00	0,00	11.848.500,00	16,00	37.908.500,00	100,00	92,45	16,00	37.908.500,00	0	0	
	701.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0,00	0.00	0,00	3	30.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	30.556.000,00	3,00	30.556.000,00	100,00	100,00	3,00	30.556.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	96,23					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	96,99					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**46.200.000,00**	**18,22**	**3.445.000,00**	**22,91**	**5.979.500,00**	**35,37**	**25.217.000,00**	**23,50**	**11.518.500,00**	**100,00**	**46.160.000,00**	**100,00**	**99,91**	**100,00**	**46.160.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**46.200.000,00**	**3,00**	**3.445.000,00**	**0,00**	**5.979.500,00**	**6,00**	**25.217.000,00**	**3,00**	**11.518.500,00**	**12,00**	**46.160.000,00**	**100,00**	**99,91**	**12,00**	**46.160.000,00**	**100**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0,00	0.00	0,00	2	46.200.000,00	1,00	3.445.000,00	0,00	5.979.500,00	0,00	25.217.000,00	1,00	11.518.500,00	2,00	46.160.000,00	100,00	99,91	2,00	46.160.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	99,91					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	99,91					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**311.954.500,00**	**21,24**	**17.680.500,00**	**21,24**	**13.476.000,00**	**31,98**	**158.442.000,00**	**25,54**	**121.278.750,00**	**100,00**	**310.877.250,00**	**100,00**	**99,65**	**100,00**	**310.877.250,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah monitoring musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan, Jumlah Aktualisasi Kebudayaan, Jumlah Pembinaan PKK**	**Bulan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**311.954.500,00**	**1,00**	**17.680.500,00**	**1,00**	**13.476.000,00**	**6,00**	**158.442.000,00**	**12,00**	**121.278.750,00**	**12,00**	**310.877.250,00**	**100,00**	**99,65**	**12,00**	**310.877.250,00**	**100**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0.00	0,00	0.00	0,00	76	21.204.500,00	76,00	10.294.500,00	76,00	0,00	0,00	4.720.000,00	76,00	6.140.000,00	76,00	21.154.500,00	100,00	99,76	76,00	21.154.500,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0,00	0.00	0,00	18	290.750.000,00	6,00	7.386.000,00	6,00	13.476.000,00	3,00	153.722.000,00	3,00	115.138.750,00	18,00	289.722.750,00	100,00	99,65	18,00	289.722.750,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	99,71					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	99,65					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**88.600.000,00**	**21,24**	**10.848.000,00**	**21,24**	**12.000.000,00**	**23,62**	**42.812.000,00**	**33,90**	**20.440.000,00**	**100,00**	**86.100.000,00**	**100,00**	**97,18**	**100,00**	**86.100.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**88.600.000,00**	**3,00**	**10.848.000,00**	**3,00**	**12.000.000,00**	**3,00**	**42.812.000,00**	**3,00**	**20.440.000,00**	**12,00**	**86.100.000,00**	**100,00**	**97,18**	**12,00**	**86.100.000,00**	**100**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0,00	0.00	0,00	12	88.600.000,00	3,00	10.848.000,00	3,00	12.000.000,00	3,00	42.812.000,00	3,00	20.440.000,00	12,00	86.100.000,00	100,00	97,18	12,00	86.100.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	97,18					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	97,18					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**61.800.000,00**	**21,24**	**4.710.000,00**	**21,24**	**10.680.000,00**	**32,04**	**20.780.000,00**	**25,48**	**25.440.000,00**	**100,00**	**61.610.000,00**	**100,00**	**99,69**	**100,00**	**61.610.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**61.800.000,00**	**3,00**	**4.710.000,00**	**3,00**	**10.680.000,00**	**3,00**	**20.780.000,00**	**3,00**	**25.440.000,00**	**12,00**	**61.610.000,00**	**100,00**	**99,69**	**12,00**	**61.610.000,00**	**100**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0,00	0.00	0,00	8	61.800.000,00	1,00	4.710.000,00	1,00	10.680.000,00	4,00	20.780.000,00	2,00	25.440.000,00	8,00	61.610.000,00	100,00	99,69	8,00	61.610.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	99,69					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	99,69					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase desa yang termonitoring**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**116.920.000,00**	**21,24**	**10.300.000,00**	**21,24**	**12.270.000,00**	**20,50**	**34.360.000,00**	**37,02**	**59.720.000,00**	**100,00**	**116.650.000,00**	**100,00**	**99,77**	**100,00**	**116.650.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Desa**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**116.920.000,00**	**3,00**	**10.300.000,00**	**9,08**	**12.270.000,00**	**0,00**	**34.360.000,00**	**0,00**	**59.720.000,00**	**12,08**	**116.650.000,00**	**100,67**	**99,77**	**12,08**	**116.650.000,00**	**100.67**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0,00	0.00	0,00	5	65.320.000,00	0,00	5.860.000,00	1,00	11.850.000,00	2,00	17.220.000,00	2,00	30.120.000,00	5,00	65.050.000,00	100,00	99,59	5,00	65.050.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		0,00	0.00	0,00	2	51.600.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	420.000,00	1,00	17.140.000,00	1,00	29.600.000,00	2,00	51.600.000,00	100,00	100,00	2,00	51.600.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	99,80					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,67	99,77					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					99,42	98,32					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Total																					**2.802.494.568,00**			**2.661.589.972,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																					**94.97%**						
Predikat																					**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber dana, Prioritas Kinerja, Komitmen antar pegawai dalam melaksanakan tugas, kondisi lingkungan kerja baik, dukungan atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, sarana prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Pacitan, 10 Agustus 2025

PLT. CAMAT DONOROJO

KABUPATEN PACITAN

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19840320 200412 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74.15**	**2.064.517.527,00**	**0,00**	**391.932.289,00**	**74,75**	**440.616.579,00**	**0,00**	**72.338.358,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75**	**904.887.226,00**	**100,81**	**43,83**	**74,75**	**904.887.226,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**7**	**43.588.800,00**	**1,00**	**6.965.400,00**	**2,00**	**14.743.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**21.708.600,00**	**42,86**	**49,80**	**3,00**	**21.708.600,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	7.00	35.025.000,00	4,00	4.585.200,00	2,00	9.519.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14.104.800,00	85,71	40,27	6,00	14.104.800,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	2.691.000,00	1,00	647.400,00	0,00	1.563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.211.000,00	50,00	82,16	1,00	2.211.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	1.996.000,00	1,00	256.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.996.000,00	50,00	100,00	1,00	1.996.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	6.00	3.876.800,00	2,00	1.476.800,00	2,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.396.800,00	66,67	87,62	4,00	3.396.800,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	63,10	77,51					F
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Tinggi		4	4		
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14**	**1.558.112.826,00**	**2,00**	**319.649.497,00**	**12,00**	**369.699.873,00**	**0,00**	**72.338.358,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**761.687.728,00**	**100,00**	**48,89**	**14,00**	**761.687.728,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	14	1.547.801.926,00	4,00	315.537.297,00	3,00	367.951.173,00	0,00	72.338.358,00	0,00	0,00	7,00	755.826.828,00	50,00	48,83	7,00	755.826.828,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	5.613.400,00	3,00	2.736.600,00	3,00	451.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.188.400,00	50,00	56,80	6,00	3.188.400,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	614.500,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	80,47	0,00	494.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	309.500,00	2,00	309.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	309.500,00	150,00	100,00	3,00	309.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	3.562.500,00	3,00	435.100,00	3,00	1.247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.682.500,00	50,00	47,23	6,00	1.682.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Proknosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	211.000,00	3,00	136.500,00	3,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	186.000,00	50,00	88,15	6,00	186.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	58,33	70,25					F
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sedang		6	6		
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Pegawai**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**13.00**	**11.058.400,00**	**1,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	2	11.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0,00	0,00					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**87.490.761,00**	**25,00**	**23.334.800,00**	**41,66**	**19.995.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,66**	**43.330.500,00**	**66,66**	**49,53**	**66,66**	**43.330.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	77.130.261,00	3,00	20.303.300,00	3,00	17.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	38.210.500,00	50,00	49,54	6,00	38.210.500,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.520.500,00	3,00	1.711.500,00	3,00	1.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.260.000,00	50,00	50,00	6,00	3.260.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	3.840.000,00	3,00	1.320.000,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.860.000,00	50,00	48,44	6,00	1.860.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	49,33					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**133.277.140,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Fasilitas Kerja	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	55.926.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Fasilitasi Perangkat Daerah	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	35.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	41.556.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	0,00					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemenuhan Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**160.155.600,00**	**30,00**	**30.952.592,00**	**16,66**	**27.644.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,66**	**58.596.898,00**	**46,66**	**36,59**	**46,66**	**58.596.898,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.698.000,00	3,00	1.145.000,00	3,00	1.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.525.600,00	50,00	37,71	6,00	2.525.600,00	0	0	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jumlah Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	18.912.000,00	3,00	4.472.942,00	3,00	3.638.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8.111.848,00	50,00	42,89	6,00	8.111.848,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	134.545.600,00	3,00	25.334.650,00	3,00	22.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	47.959.450,00	50,00	35,65	6,00	47.959.450,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	38,75					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah yang dipelihara sehingga tetap masih dalam kondisi baik**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**70.834.000,00**	**25,00**	**11.030.000,00**	**16,66**	**8.533.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,66**	**19.563.500,00**	**41,66**	**27,62**	**41,66**	**19.563.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	42.147.700,00	3,00	11.030.000,00	3,00	8.533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	19.563.500,00	50,00	46,42	6,00	19.563.500,00	0	0	
	701.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	28.686.300,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	23,21					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	58,02	30,35					
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**8.33**	**0,00**	**100**	**54.300.000,00**	**24,99**	**1.087.500,00**	**24,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,99**	**23.821.364,00**	**48,99**	**43,87**	**57,32**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**54.300.000,00**	**3,00**	**1.087.500,00**	**3,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**23.821.364,00**	**50,00**	**43,87**	**6,00**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Donorojo	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	54.300.000,00	3,00	1.087.500,00	3,00	22.733.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	23.821.364,00	50,00	43,87	6,00	23.821.364,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	43,87					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50,00	43,87					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**362.138.500,00**	**24,99**	**19.860.500,00**	**24,99**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**37.100.500,00**	**49,98**	**10,24**	**49,98**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang DiFasilitasi**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**362.138.500,00**	**1,00**	**19.860.500,00**	**12,00**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**37.100.500,00**	**100,00**	**10,24**	**12,00**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	13	21.204.500,00	3,00	8.004.500,00	3,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8.724.500,00	46,15	41,14	6,00	8.724.500,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	340.934.000,00	4,00	11.856.000,00	2,00	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	28.376.000,00	50,00	8,32	6,00	28.376.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	48,08	24,73					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	10,24					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**32.600.000,00**	**24,99**	**12.571.500,00**	**24,99**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**13.111.500,00**	**49,98**	**40,22**	**49,98**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**32.600.000,00**	**1,00**	**12.571.500,00**	**12,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**13.111.500,00**	**100,00**	**40,22**	**12,00**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	32.600.000,00	3,00	12.571.500,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13.111.500,00	50,00	40,22	6,00	13.111.500,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	40,22					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	40,22					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**64.200.000,00**	**24,99**	**5.240.000,00**	**24,99**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**19.340.000,00**	**49,98**	**30,12**	**49,98**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**64.200.000,00**	**3,00**	**5.240.000,00**	**3,00**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**19.340.000,00**	**50,00**	**30,12**	**6,00**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	64.200.000,00	1,00	5.240.000,00	12,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19.340.000,00	100,00	30,12	12,00	19.340.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	30,12					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50,00	30,12					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**152.930.000,00**	**24,99**	**12.620.000,00**	**24,99**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**46.760.000,00**	**49,98**	**30,58**	**49,98**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**152.930.000,00**	**3,00**	**12.620.000,00**	**3,00**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**46.760.000,00**	**50,00**	**30,58**	**6,00**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	87.830.000,00	3,00	8.580.000,00	3,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	27.300.000,00	50,00	31,08	6,00	27.300.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Linmas Desa	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	65.100.000,00	1,00	4.040.000,00	12,00	15.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19.460.000,00	100,00	29,89	12,00	19.460.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					75,00	30,49					F
Predikat kinerja(%)																					Sedang	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	30,58					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					58,29	33,14					
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah					
Total																					**2.730.686.027,00**			**1.045.020.590,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																					**38.27%**						
Predikat																					**Sangat Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber dana, Prioritas Kinerja, Komitmen antar pegawai dalam melaksanakan tugas, kondisi lingkungan kerja baik, dukungan atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, sarana prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Pacitan, 19 Juli 2025

PLT. CAMAT DONOROJO

KABUPATEN PACITAN

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

Penata TK. I

NIP. 19840320 200412 1 001

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN DONOROJO
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**74.15**	**2.047.162.627,00**	**74.75**	**832.548.868,00**	**100.81%**	**40.67%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**7**	**43.588.800,00**	**3.00**	**21.708.600,00**	**42.86%**	**49.8%**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7.00	35.025.000,00	6.00	14.104.800,00	85.71%	40.27%
			0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2.00	2.691.000,00	1.00	2.211.000,00	50%	82.16%
			0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2.00	1.996.000,00	1.00	1.996.000,00	50%	100%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	6.00	3.876.800,00	4.00	3.396.800,00	66.67%	87.62%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											63,10	77,51
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Tinggi
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**14**	**1.558.112.826,00**	**14.00**	**689.349.370,00**	**100%**	**44.24%**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.547.801.926,00	7.00	683.488.470,00	50%	44.16%
			0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	5.613.400,00	6.00	3.188.400,00	50%	56.8%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1.00	614.500,00	0.00	494.500,00	0%	80.47%
			0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2.00	309.500,00	3.00	309.500,00	150%	100%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12.00	3.562.500,00	6.00	1.682.500,00	50%	47.23%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Proknosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	12	211.000,00	6.00	186.000,00	50%	88.15%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											58,33	69,47
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sedang
701	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Pegawai**	**13.00**	**11.058.400,00**	**13.00**	**0,00**	**100%**	**0%**
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	2	11.058.400,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**87.490.761,00**	**66.66**	**43.330.500,00**	**66.66%**	**49.53%**
701	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	77.130.261,00	6.00	38.210.500,00	50%	49.54%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	6.520.500,00	6.00	3.260.000,00	50%	50%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12	3.840.000,00	6.00	1.860.000,00	50%	48.44%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	49,33
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100.00**	**133.277.140,00**	**8.33**	**0,00**	**8.33%**	**0%**
701	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Fasilitas Kerja	Unit	2.00	55.926.400,00	1.00	0,00	50%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	1.00	41.556.740,00	0.00	0,00	0%	0%
			0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Fasilitasi Perangkat Daerah	Unit	1.00	35.794.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											16,67	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemenuhan Daerah**	**%**	**100.00**	**160.155.600,00**	**46.66**	**58.596.898,00**	**46.66%**	**36.59%**
701	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	6.698.000,00	6.00	2.525.600,00	50%	37.71%
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jumlah Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	18.912.000,00	6.00	8.111.848,00	50%	42.89%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	134.545.600,00	6.00	47.959.450,00	50%	35.65%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	38,75
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah yang dipelihara sehingga tetap masih dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**70.834.000,00**	**41.66**	**19.563.500,00**	**41.66%**	**27.62%**
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Bulan	12	42.147.700,00	6.00	19.563.500,00	50%	46.42%
			0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12.00	28.686.300,00	6.00	0,00	50%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	23,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**54.300.000,00**	**48.99**	**23.821.364,00**	**48.99%**	**43.87%**
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**12**	**54.300.000,00**	**6.00**	**23.821.364,00**	**50%**	**43.87%**
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Donorojo	Bulan	12.00	54.300.000,00	6.00	23.821.364,00	50%	43.87%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	43,87
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,00	43,87
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**362.138.500,00**	**49.98**	**37.100.500,00**	**49.98%**	**10.24%**
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang DiFasilitasi**	**Desa**	**12**	**362.138.500,00**	**12.00**	**37.100.500,00**	**100%**	**10.24%**
701	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa	Bulan	13	21.204.500,00	6.00	8.724.500,00	46.15%	41.14%
			0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	340.934.000,00	6.00	28.376.000,00	50%	8.32%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											48,08	24,73
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	10,24
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**32.600.000,00**	**49.98**	**13.111.500,00**	**49.98%**	**40.22%**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**12**	**32.600.000,00**	**12.00**	**13.111.500,00**	**100%**	**40.22%**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	12	32.600.000,00	6.00	13.111.500,00	50%	40.22%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	40,22
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	40,22
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**64.200.000,00**	**49.98**	**19.340.000,00**	**49.98%**	**30.12%**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**12**	**64.200.000,00**	**6.00**	**19.340.000,00**	**50%**	**30.12%**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Desa	12	64.200.000,00	12.00	19.340.000,00	100%	30.12%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	30,12
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,00	30,12
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**152.930.000,00**	**49.98**	**46.760.000,00**	**49.98%**	**30.58%**
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Bulan**	**12**	**152.930.000,00**	**6.00**	**46.760.000,00**	**50%**	**30.58%**
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	87.830.000,00	6.00	27.300.000,00	50%	31.08%
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Linmas Desa	Desa	12	65.100.000,00	12.00	19.460.000,00	100%	29.89%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											75,00	30,49
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,00	30,58
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											58,29	32,62
Predikat kinerja seluruh program(%)											Rendah	Sangat Rendah
Total								**2.730.686.027,00**		**972.682.232,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**35.62%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

Pacitan, 19 Juli 2025

PLT. CAMAT DONOROJO

KABUPATEN PACITAN

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

Penata TK. I

NIP. 19840320 200412 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan 2 Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74.15**	**2.064.517.527,00**	**0,00**	**391.932.289,00**	**74,75**	**440.616.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75**	**832.548.868,00**	**100,81**	**40,33**	**74,75**	**832.548.868,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**7**	**43.588.800,00**	**1,00**	**6.965.400,00**	**2,00**	**14.743.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**21.708.600,00**	**42,86**	**49,80**	**3,00**	**21.708.600,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	7.00	35.025.000,00	4,00	4.585.200,00	2,00	9.519.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14.104.800,00	85,71	40,27	6,00	14.104.800,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	2.691.000,00	1,00	647.400,00	0,00	1.563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2211000	50,00	82,16	1,00	2.211.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	1.996.000,00	1,00	256.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1996000	50,00	100,00	1,00	1.996.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	6.00	3.876.800,00	2,00	1.476.800,00	2,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3396800	66,67	87,62	4,00	3.396.800,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=1
																					Predikat kinerja(%)	Rendah	Tinggi				
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14**	**1.558.112.826,00**	**2,00**	**319.649.497,00**	**12,00**	**369.699.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**689.349.370,00**	**100,00**	**44,24**	**14,00**	**689.349.370,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	14	1.547.801.926,00	4,00	315.537.297,00	3,00	367.951.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	683.488.470,00	50,00	44,16	7,00	683.488.470,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	5.613.400,00	3,00	2.736.600,00	3,00	451.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3188400	50,00	56,80	6,00	3.188.400,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	614.500,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494500	0,00	80,47	0,00	494.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	309.500,00	2,00	309.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	309500	150,00	100,00	3,00	309.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	3.562.500,00	3,00	435.100,00	3,00	1.247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1682500	50,00	47,23	6,00	1.682.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Proknosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	211.000,00	3,00	136.500,00	3,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	186000	50,00	88,15	6,00	186.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=2
																					Predikat kinerja(%)	Rendah	Sedang				
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Pegawai**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**13.00**	**11.058.400,00**	**1,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	2	11.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=3
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**87.490.761,00**	**25,00**	**23.334.800,00**	**41,66**	**19.995.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,66**	**43.330.500,00**	**66,66**	**49,53**	**66,66**	**43.330.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	77.130.261,00	3,00	20.303.300,00	3,00	17.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	38.210.500,00	50,00	49,54	6,00	38.210.500,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.520.500,00	3,00	1.711.500,00	3,00	1.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3260000	50,00	50,00	6,00	3.260.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	3.840.000,00	3,00	1.320.000,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1860000	50,00	48,44	6,00	1.860.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=4
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**133.277.140,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Fasilitas Kerja	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	55.926.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	41.556.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Fasilitasi Perangkat Daerah	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	35.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=5
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemenuhan Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**160.155.600,00**	**30,00**	**30.952.592,00**	**16,66**	**27.644.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,66**	**58.596.898,00**	**46,66**	**36,59**	**46,66**	**58.596.898,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.698.000,00	3,00	1.145.000,00	3,00	1.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.525.600,00	50,00	37,71	6,00	2.525.600,00	0	0	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terpenuhinya Jumlah Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	18.912.000,00	3,00	4.472.942,00	3,00	3.638.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8111848	50,00	42,89	6,00	8.111.848,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	134.545.600,00	3,00	25.334.650,00	3,00	22.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	47959450	50,00	35,65	6,00	47.959.450,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=6
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah yang dipelihara sehingga tetap masih dalam kondisi baik**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**70.834.000,00**	**25,00**	**11.030.000,00**	**16,66**	**8.533.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,66**	**19.563.500,00**	**41,66**	**27,62**	**41,66**	**19.563.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	42.147.700,00	3,00	11.030.000,00	3,00	8.533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	19.563.500,00	50,00	46,42	6,00	19.563.500,00	0	0	
	701.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	28.686.300,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0	50,00	0,00	6,00	0,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=7
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	406,17	207,78	406.17/1			
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua pihak

Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perubahan mind set dan culture set aparaturnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**8.33**	**0,00**	**100**	**54.300.000,00**	**24,99**	**1.087.500,00**	**24,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,99**	**23.821.364,00**	**48,99**	**43,87**	**57,32**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**54.300.000,00**	**3,00**	**1.087.500,00**	**3,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**23.821.364,00**	**50,00**	**43,87**	**6,00**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Donorojo	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	54.300.000,00	3,00	1.087.500,00	3,00	22.733.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	23.821.364,00	50,00	43,87	6,00	23.821.364,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					50,00	43,87					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	43,87	50/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan tanggungjawab dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan pelayanan publik melalui perubahan mind set																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Evaluasi Secara berkala																											
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**362.138.500,00**	**24,99**	**19.860.500,00**	**24,99**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**37.100.500,00**	**49,98**	**10,24**	**49,98**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang DiFasilitasi**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**362.138.500,00**	**1,00**	**19.860.500,00**	**12,00**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**37.100.500,00**	**100,00**	**10,24**	**12,00**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	13	21.204.500,00	3,00	8.004.500,00	3,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8.724.500,00	46,15	41,14	6,00	8.724.500,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	340.934.000,00	4,00	11.856.000,00	2,00	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	28376000	50,00	8,32	6,00	28.376.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					48,08	24,73					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	10,24	100/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tanggungjawab dan Komitmen dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**32.600.000,00**	**24,99**	**12.571.500,00**	**24,99**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**13.111.500,00**	**49,98**	**40,22**	**49,98**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**32.600.000,00**	**1,00**	**12.571.500,00**	**12,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**13.111.500,00**	**100,00**	**40,22**	**12,00**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	32.600.000,00	3,00	12.571.500,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13.111.500,00	50,00	40,22	6,00	13.111.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					50,00	40,22					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	40,22	100/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua Pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**64.200.000,00**	**24,99**	**5.240.000,00**	**24,99**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**19.340.000,00**	**49,98**	**30,12**	**49,98**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**64.200.000,00**	**3,00**	**5.240.000,00**	**3,00**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**19.340.000,00**	**50,00**	**30,12**	**6,00**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	64.200.000,00	1,00	5.240.000,00	12,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19.340.000,00	100,00	30,12	12,00	19.340.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	30,12					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	30,12	50/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**152.930.000,00**	**24,99**	**12.620.000,00**	**24,99**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**46.760.000,00**	**49,98**	**30,58**	**49,98**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**152.930.000,00**	**3,00**	**12.620.000,00**	**3,00**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**46.760.000,00**	**50,00**	**30,58**	**6,00**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	87.830.000,00	3,00	8.580.000,00	3,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	27.300.000,00	50,00	31,08	6,00	27.300.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Linmas Desa	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	65.100.000,00	1,00	4.040.000,00	12,00	15.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19460000	100,00	29,89	12,00	19.460.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					75,00	30,49					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sedang	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	30,58	50/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					58,29	32,56					
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah					
Total																						**2.730.686.027,00**				**972.682.232,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																										**35.62%**	
Predikat																										**Sangat Rendah**	

Pacitan, 19 Juli 2025

PLT. CAMAT DONOROJO

KABUPATEN PACITAN

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

Penata TK. I

NIP. 19840320 200412 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DONOROJO KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DONOROJO						**2.619.815.325,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.619.815.325,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.619.815.325,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.083.140.250,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24 Dokumen			-	34.855.800,00			-	-	-	24 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen			8 Dokumen	26.354.500,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen			8 Dokumen	2.740.200,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan			8 Laporan	2.031.200,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan			15 Laporan	3.729.900,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	53 Dokumen			-	1.666.286.163,00			-	-	-	53 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14/17 Orang/bulan	1.656.639.763,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	5.025.100,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	605.400,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	314.100,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	3.491.800,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	210.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2 Paket			-	8.652.000,00			-	-	-	2 Paket	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			2 Paket	8.652.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	89.497.787,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	79.205.887,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	6.451.900,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	3.840.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	108.490.100,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	55.620.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	17.870.100,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	111.232.800,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	6.728.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	18.912.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	85.592.800,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	64.125.600,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit			16 Unit	42.503.600,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	16 Unit	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	21.622.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	0,00	KECAMATAN DONOROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan***	**100 %**			**0 % 100 %**	**46.246.000,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Bulan			-	46.246.000,00			-	-	-	12 Bulan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	46.246.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**287.221.575,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	12 Desa			-	287.221.575,00			-	-	-	12 Desa	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	32 Dokumen			32 Dokumen	27.753.400,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	32 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	259.468.175,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**43.146.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Bulan			-	43.146.000,00			-	-	-	12 Bulan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	19.146.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**41.055.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	12 Desa			-	41.055.000,00			-	-	-	12 Desa	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	18.855.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**119.006.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	12 Desa			-	119.006.500,00			-	-	-	12 Desa	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen			4 Dokumen	35.650.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24 Laporan			24 Laporan	35.356.500,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	0,00	KECAMATAN DONOROJO
	J U M L A H							**2.619.815.325,00**							**0,00**	

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN PUNUNG
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PUNUNG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Punung Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Punung, 01 Agustus 2025
CAMAT PUNUNG

PUDJI HARYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690216 199003 1 005

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 2
I.3. Maksud dan Tujuan 5
1.1 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PUNUNG TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Punung 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Rkpd 17
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PUNUNG 22
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 22
3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Punung 23
3.1 Program dan Kegiatan 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUNUNG 30
BAB V PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua Stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan. Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Secara garis besar bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat daerah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Punung Tahun 2025 dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi,

sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Desa. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing) , komprehensif, mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah. Kecamatan selaku Perangkat Daerah kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani desa dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Punung disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang baik, handal dan prima guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Punung selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manuaia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perubahan PD Kecamatan Punung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perengkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Punung adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Punung dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Punung dapat

dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Punung adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Punung yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya renja PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

1.1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PUNUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUNUNG

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PUNUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Punung Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Punung adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah Desa.
3. Melakukan pegawasan terhadap pelansanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas /instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Kecamatan Punung tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Punung, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Punung antaran lain :

2.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program ini memiliki indikator kinerja berupa nilai SAKIP perangkat daerah,

dengan target capaian nilai sebesar 71 dan realisasi mencapai 72,6. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program melebihi target, dengan capaian kinerja mencapai 102,25%. Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp2.077.446.738,00 telah terealisasi sebesar Rp1.978.325.820,00 atau sekitar 95,23%. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh disiplin pelaksanaan kegiatan, penguatan perencanaan, serta komitmen terhadap pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan didukung oleh kegiatan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**71**	**2.077.446.738**	**72.6**	**1.978.325.820**	**102.25%**	**95.23%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja PD	Dokumen	9	36.992.000	9	36.962.200	100%	99.92%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	14	1.604.472.311	14	1.531.959.593	100%	95.48%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	11.447.430	2	11.257.065	100%	98.34%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	100	194.454.297	100	193.803.520	100%	99.67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	168.287.700	100	144.009.442	100%	85.57%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	61.793.000	100	60.334.000	100%	97.64%

Berdasarkan analisis data, Program dan Kegiatan Penunjang menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam pencapaian target kinerja fisik. Namun, terdapat beberapa celah pada sisi realisasi keuangan yang menjadi dasar untuk perumusan faktor penghambat dan strategi perbaikan

Faktor Penghambat

Secara umum, tidak ditemukan faktor penghambat yang signifikan dalam hal pencapaian target kinerja (fisik). Laporan menunjukkan bahwa hampir seluruh

indikator kinerja berhasil dicapai dengan rasio 100% hingga 102,25%. Nilai SAKIP bahkan melampaui target yang ditetapkan. Faktor penghambat yang teridentifikasi lebih bersifat administratif dan finansial, yaitu ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi belanja. Hal ini terlihat dari beberapa poin:

- **Efisiensi yang Belum Terpetakan:** Adanya sisa anggaran pada hampir semua kegiatan menunjukkan adanya efisiensi, namun belum tentu ini hasil dari perencanaan. Hal ini bisa menjadi penghambat jika sisa anggaran disebabkan oleh proses pengadaan atau pembayaran yang tidak tuntas.

- **Penyerapan Anggaran Terendah:** Celah terbesar terdapat pada "Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah", di mana penyerapan anggarannya hanya mencapai 85,57%. Ini merupakan faktor penghambat utama karena menunjukkan adanya potensi masalah dalam perencanaan kebutuhan atau pelaksanaan belanja jasa.

Strategi Perbaikan Ke Depan

Strategi ke depan tidak berfokus pada perbaikan kegagalan, melainkan pada optimalisasi keberhasilan dan efisiensi anggaran.

- **Analisis Belanja dan Optimalisasi Anggaran:** Melakukan analisis mendalam pada kegiatan dengan selisih realisasi anggaran terbesar, terutama pada Penyediaan Jasa Penunjang. Tujuannya adalah untuk memahami penyebab sisa anggaran—apakah karena keberhasilan negosiasi harga (efisiensi) atau karena ada komponen belanja yang tidak terlaksana. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menyusun pagu anggaran yang lebih akurat dan efisien di tahun berikutnya.
- **Mempertahankan Kinerja Fisik yang Tinggi:** Mengingat semua target kinerja fisik tercapai, strategi utamanya adalah menstandarkan proses dan alur kerja yang sudah berjalan efektif. Dokumentasikan praktik-praktik baik (*best practices*) yang ada untuk memastikan kinerja tinggi ini dapat dipertahankan secara konsisten di masa mendatang.
- **Peningkatan Berkelanjutan Nilai SAKIP:** Meskipun target Nilai SAKIP sudah terlampaui dari 71 menjadi 72,6, strategi ke depan adalah melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi komponen penilaian yang

masih bisa ditingkatkan. Dengan realisasi keuangan program sebesar 95,23%, ada ruang untuk mengaitkan efisiensi anggaran dengan akuntabilitas kinerja untuk meraih nilai SAKIP yang lebih tinggi lagi.

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

   Indikator keberhasilan program ini adalah persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan, dengan target dan realisasi kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp48.441.700,00 telah direalisasikan sebesar Rp47.651.700,00 atau setara 98,37%. Program ini berjalan dengan baik dan efektif dalam melayani kebutuhan administrasi serta pelayanan publik. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal, meskipun terdapat sedikit selisih anggaran yang dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi. Ke depan, tantangan terbesarnya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi pelayanan, khususnya yang berbasis digital.

2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

   Program ini menargetkan persentase penyelenggaraan kegiatan sebesar 100% dan berhasil memenuhi target tersebut. Alokasi anggaran sebesar Rp246.658.690,00 telah terealisasi sebesar Rp246.487.690,00 atau 99,93%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berjalan secara efektif, partisipatif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat di desa dan kelurahan. Tingginya capaian ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan perangkat desa dalam mendukung program. Namun, agar dampak dari pemberdayaan dapat berkelanjutan, ke depan perlu difokuskan pada program-program yang memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan pembangunan sosial yang inklusif.

3. **PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

   Program ini menunjukkan kinerja maksimal dengan capaian 100% sesuai target. Dari sisi anggaran Rp87.400.000,00 dialokasikan dan terealisasi sebesar Rp87.200.000,00 atau sekitar 99,77%. Pelaksanaan program ini

menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pihak kecamatan dengan unsur keamanan dan masyarakat. Kegiatan berjalan lancar dan berkontribusi terhadap kondisi sosial yang tertib dan aman. Faktor keberhasilannya meliputi komunikasi lintas sektor yang terbangun dengan baik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.

4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
   Indikator kinerja berupa persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum berhasil mencapai 100% sesuai target. Dari sisi keuangan, Rp41.409.360,00 dialokasikan dan Rp41.242.860,00 telah terealisasi atau sekitar 99,60%. Program ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendukung kelancaran administrasi pemerintahan umum di kecamatan. Keberhasilan ini ditopang oleh penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang telah terintegrasi dan terstruktur. Ke depan, perlu didorong inovasi administratif seperti digitalisasi layanan dan pelaporan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
   Program ini bertujuan untuk memantau seluruh desa di wilayah Kecamatan Punung, dengan indikator berupa persentase desa yang termonitoring. Target 100% berhasil dicapai, dan dari sisi anggaran, Rp178.427.710,00 dialokasikan serta terealisasi sebesar Rp178.361.110,00 atau 99,96%. Capaian ini menandakan bahwa fungsi pengawasan berjalan secara menyeluruh dan sistematis. Keberhasilan program ini ditunjang oleh sistem monitoring yang telah terstruktur dan pelibatan aktif perangkat desa. Untuk tahun mendatang, penguatan substansi pengawasan dan pemberian tindak lanjut dari hasil monitoring menjadi tantangan utama agar tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas pengawasan dapat terus ditingkatkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Punung berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kriteria)

dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

Kantor Kecamatan Punung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat / melayani masyarakat Kantor Kecamatan Punung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mengingat jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Punung hanya bersifat legalisasi, maka penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya menggunakan kuesioner (pendapat responden tentang Pelayanan Publik) yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayananan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Tabel 2.2 Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan Pelayanan	3.47
2	Prosedur Pelayanan	3.56
3	Waktu Pelayanan	3.37
4	Tarif/Biaya Pelayanan	3.98
5	Kualitas Produk Pelayanan	3.51
6	Ketrampilan Petugas Pelayanan	3.52
7	Sikap Petugas Pelayanan	3.57
8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3.96
9	Sarana Pengaduan	3.46
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25		89.10

Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Kantor Kecamatan Punung, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Hal ini terbukti dari ke-9 unsur pelayanan dengan Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Punung setelah dikonversikan (89,10) Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Punung adalah BAIK. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, gratis, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Punung

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan

eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Punung. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Punung sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Punung masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain: (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Punung ditentukan, isu- isu penting yaitu sebagai berikut;

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;

(2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

(3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

(4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

(5). Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Rkpd

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
b). Program prioritas pembangunan daerah dan
c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Punung berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Punung.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026. Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rkpd Tahun 2026 Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026			
No.	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Pagu (Rp)**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Pagu (Rp)**
	Kecamatan Punung			**2.479.929.347**	**Kecamatan Punung**			**2.479.929.347**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.233.821.747**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.233.821.747**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**49.910.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**49.910.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	13.990.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	13.990.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.920.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.920.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**1.919.976.209**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.919.976.209**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.906.736.209	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.906.736.209
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.240.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.240.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**11.496.936**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**11.496.936**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	11.496.936	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	11.496.936
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**95.362.064**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**95.362.064**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.934.108	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.934.108
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	71.427.956	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	71.427.956
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**139.651.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**139.651.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.689.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.689.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.962.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.962.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**17.425.538**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**17.425.538**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	12.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	12.400.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.025.538	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.025.538
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**45.363.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**45.363.200**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			**45.363.200**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**45.363.200**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45.363.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45.363.200
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**107.284.400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**107.284.400**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**107.284.400**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**107.284.400**
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27 Dokumen	55.203.400	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27 Dokumen	55.203.400
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	52.081.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	52.081.000
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**29.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**29.500.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**29.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**29.500.000**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.400.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.400.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	14.100.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	14.100.000
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**17.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**17.400.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**17.400.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**17.400.000**

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	17.400.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	17.400.000
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**46.560.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**46.560.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**46.560.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**46.560.000**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	39 Dokumen	19.080.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	39 Dokumen	19.080.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	27.480.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	27.480.000

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Punung merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD provinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PUNUNG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas pelayanan publik.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Punung dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian urusan otomoni daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan,fasilitasi,penetapan,penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Punung dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Punung yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi,industri, jasa dan pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Punung

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Punung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yaitu **Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima**, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Punung dalam jangka 1 tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Punung dalam setiap tahunnya adalah **"Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Punung"**. Tujuan dan sasaran Kecamatan Punung beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Punung

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujud-nya Layanan Kecamatan yang Prima		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6
	Meningkat-nya Pelayanan Kecamatan Punung	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Punung	91	92	93	94	95	96

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Punung merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Punung sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
  b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
  c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
  d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi;
  a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
  b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
  a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;
    a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
    b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
    c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Camat Punung, selain menjalankan tugas pokoknya, juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Punung berpedoman pada visi Bupati Pacitan yaitu ”Masyarakat Semakin SEJAHTERA BAHAGIA”, misi ke-4 tentang penguatan birokrasi profesional, serta tema RKPD 2026 mengenai “Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial”.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, setiap program dirancang untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat, serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, yang diimplementasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Fokus pembangunan juga diarahkan pada aspek sosial-ekonomi

masyarakat. Ini diwujudkan melalui upaya menjaga ekosistem ekonomi lokal di sektor pariwisata dan kerajinan, mendukung percepatan penurunan stunting secara terintegrasi, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Upaya-upaya ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Secara keseluruhan, untuk tahun 2026 diusulkan sebanyak 6 program yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Punung. Rencana kerja untuk tingkat kelurahan telah diintegrasikan ke dalam rencana kerja kecamatan, dengan rincian pendanaan yang tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Kecamatan Punung				2.479.929.347			2.592.089.203
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.479.929.347			2.592.089.203
	7	01				KECAMATAN PUNUNG				2.479.929.347			2.592.089.203
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.233.821.747		-	2.244.589.203
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12Dokumen	-	49.910.000		12Dokumen	22.000.000
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	13.990.000	Kab. Pacitan, Punung,	6 Dokumen	15.000.000
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	35.920.000	Kab. Pacitan, Punung,	4 Laporan	7.000.000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12Laporan	-	1.919.976.209		12Laporan	1.898.039.203
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.906.736.209	Kab. Pacitan, Punung,	18 Orang/bulan	1.880.039.203
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	13.240.000	Kab. Pacitan, Punung,	12 Dokumen	18.000.000
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Dokumen	-	11.496.936		18 Dokumen	12.000.000
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	11.496.936	Kab. Pacitan, Punung,	2 Paket	12.000.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	95.362.064		100%	117.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	17.934.108	Kab. Pacitan, Punung,	6 Paket	30.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	71.427.956	Kab. Pacitan, Punung,	8 Paket	80.000.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	Kab. Pacitan, Punung,	12 Laporan	7.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	139.651.000		100%	183.000.000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.689.000	Kab. Pacitan, Punung,	12 Laporan	23.000.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.962.000	Kab. Pacitan, Punung,	12 Laporan	160.000.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	17.425.538		100%	12.550.000
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	12.400.000	Kab. Pacitan, Punung,	8 Unit	12.550.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.025.538	Kab. Pacitan, Punung,	1 Unit	0
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	45.363.200		-	48.500.000
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12Bulan	-	45.363.200		12Bulan	48.500.000
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	45.363.200	Kab. Pacitan, Pacitan,	12 Laporan	48.500.000
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	107.284.400		-	180.000.000
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	13Desa	-	107.284.400		13Desa	180.000.000
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27 Dokumen	27 Dokumen	55.203.400	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	27 Dokumen	50.000.000
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	52.081.000	Kab. Pacitan, Punung,	4 Laporan	130.000.000

4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	29.500.000		-	58.000.000
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12Bulan	-	29.500.000		12Bulan	58.000.000
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15.400.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	12 Laporan	18.000.000
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	14.100.000	Kab. Pacitan, Punung,	4 Laporan	40.000.000
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	17.400.000		-	15.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	13Desa	-	17.400.000		13Desa	15.000.000
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal							
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	17.400.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	12 Dokumen	15.000.000
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	46.560.000		-	46.000.000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	13Desa	-	46.560.000		13Desa	46.000.000
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	39 Dokumen	39 Dokumen	19.080.000	Kab. Pacitan, Punung,	39 Dokumen	12.000.000
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	13 Laporan	27.480.000	Kab. Pacitan, Punung,	13 Laporan	34.000.000
									J U M L A H	**2.479.929.347**			**2.592.089.203**

-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUNUNG

Seluruh Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Punung untuk periode 2026 - 2030 secara fundamental disusun sebagai instrumen untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi Bupati, yaitu **"Masyarakat Semakin SEJAHTERA BAHAGIA"**. Dengan demikian, Renja berfungsi sebagai peta jalan strategis yang menerjemahkan visi tersebut ke dalam aksi yang nyata dan terarah di tingkat kecamatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Rencana Kerja dijabarkan secara sistematis menjadi kumpulan kegiatan yang terpadu dan terukur. Setiap kegiatan dirancang dengan komponen yang jelas, meliputi indikator kinerja spesifik, kelompok sasaran yang tepat, serta alokasi anggaran yang terencana. Penggunaan indikator kinerja menjadi sangat penting sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan, mengelola pelaksanaan secara efektif, dan mempermudah identifikasi serta penyelesaian masalah yang mungkin timbul di lapangan.

Kelompok sasaran dari seluruh kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Punung mencakup tiga elemen utama, yaitu aparatur internal kecamatan, instansi atau UPT sektoral terkait, serta berbagai elemen masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan. Salah satu poin yang menjadi prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Punung adalah upaya untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga komitmen terhadap sistem dan prosedur yang berlaku dapat terus ditingkatkan.

Adapun skema pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Punung bersumber utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan. Di samping itu, instansi vertikal lain yang beroperasi di wilayah kecamatan dapat memperoleh pendanaan dari sumber lain, seperti APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari kementerian atau lembaga induk masing-masing.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Punung memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Kidah-kaidah dalam penyusunan Renja Perubahan mempertimbangkan upaya yang harus ditempuh dengan tidak mudah dan akan mendapat banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Punung sebgaai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana kerja ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Punung , tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan Punung.

Rencana tindak lanjut Renja Perubahan ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Punung, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Punung telah mempunyai pedoman/acuan/arahan yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, sehingga bisa terukur dan terprogram dengan baik.

Punung, 01 Agustus 2025

CAMAT PUNUNG

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN PUNUNG

PUDJI HARYONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690216 199003 1 005

RENCANA KERJA
TAHUN 2026

KECAMATAN PRINGKUKU
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN PRINGKUKU

Jl. Raya Pacitan Solo Nomor. 24 Pringkuku Jawa Timur 63552

Telp. (0357) 511093 E-mail : Camat_pringkuku@pacitankab.go.id

PENETAPAN KINERJA

KANTOR CAMAT PRINGKUKU

KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Kantor Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan, merupakan ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2026.

Pringkuku, Agustus 2025

MENYETUJUI	
BUPATI PACITAN	**CAMAT PRINGKUKU**
INDRATA NUR BAYUAJI	**Drs. SUWOTO,MH**
	Pembina Tk I
	NIP. 19671002 199403 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga Rencana Kinerja Kecamatan Pringkuku dapat tersusun sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kinerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai amanat pasal 138 ayat (1) bahwa Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada RKPD.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan recana kinerja tahunan dimaksud.

Semoga rencana kinerja tahunan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pringkuku, Agustus 2025

CAMAT PRINGKUKU

Drs. SUWOTO,MH

Pembina Tk I

NIP. 19671002 199403 1 006

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN KINERJA i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG 1
I.2 LANDASAN HUKUM 2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD..... 6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PRINGKUKU 10
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PRINGKUKU 22
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 23
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 25
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD 25
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. .28
BAB V PENUTUP 30

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Pringkuku tahun 2026 merupakan rencana Kinerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pringkuku tahun 2025 – 2029. Dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , sebagai amanat pasal 138 ayat (1) bahwa Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada RKPD.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja Pembangunan pada kantor Kecamatan Pringkuku dilakukan melalui pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran yaitu:

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun
2. Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun;
3. Prosentase Desa Yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai Dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pringkuku dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani

kebutuhan masyarakat. Di sisi lain Kecamatan Pringkuku dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Pringkuku didasarkan kepada Renstra Kecamatan Pringkuku tahun 2025 – 2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Perangkat daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menyajikan data evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2026 dan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan penetapan program sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Tahun 2026.

Adapun tujuan sesuai Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku sebagai berikut:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan Kegiatan Kecamatan Pringkuku tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya misi dan visi kepala daerah;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

   Disamping itu, penyusunan Rencana Kinerja ini ditujukan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pringkuku dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASIPELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, setiap Dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Karena itu kantor Kecamatan Pringkuku juga harus melaksanakan evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pringkuku tahun 2024 meliputi tiga (3) hal, yaitu: Kebijakan program dan kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan Kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Pada tahun 2024 belanja Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terbagi atas belanja langsung dan tidak langsung. Untuk tahun 2024 dan seterusnya belanja Kantor kecamatan Pringkuku dibagi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terbagi enam program 12 kegiatan, di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun alokasi dan realisasi anggaran tahun 2024 dapat di uraikan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	DANA	REALISASI	EFISIENSI	CAPAIAN (%)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**2.089.804.536**	**2.004.746.661**	**85.057.875**	**95,93%**
1.1	Perencanan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	15.430.000	15.430.000	0	100%
1.2	Administrasi Keuangan PD	1.676.375.036	1.594.720.725	81.654.311	95,13%
1.3	Administrasi Kepegawaian PD	18.207.000	18.207.000	0	100%
1.4	Administrasi Umum PD	166.145.000	166.145.000	0	100%

1.5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.601.500	165.726.486	1.875.014	98,88 %
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	46.046.000	44.517.450	1.528.550	96,68%
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**44.741.500**	**44.741.500**	**0**	**100%**
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.007.000	21.007.000	0	**100%**
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	23.734.500	23.734.500	0	**100%**
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**154.484.500**	**154.484.500**	**0**	**100%**
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	154.484.500	154.484.500	0	100%
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**410.340.000**	**408.840.000**	**1.500.000**	**99,63%**
4.1	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	410.340.000	408.840.000	1.500.000	99,63%
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**28.287.500**	**28.287.500**	**0**	**100%**
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	28.287.500	28.287.500	0	100%
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**82.324.226**	**82.324.226**	**0**	**100%**
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.324.226	82.324.226	0	100%
JUMLAH		**2.809.982.262**	**2.723.424.161**	**86.558.101**	**96,92%**

Dari data di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan dana yang dipergunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pringkuku Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi Belanja sebesar Rp. 2.809.982.262 yang terealisasi Rp. 2.723.424.161 atau sebesar 96,92%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	DANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**1.977.507.299**	**823.284.381**	**41,63%**
1.1	Perencanan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	14.575.600	5.255.500	36,05%
1.2	Administrasi Keuangan PD	1.553.734.273	678.295.885	43,65%
1.3	Administrasi Kepegawaian PD	26.550.000	0	0%
1.4	Administrasi Umum PD	149.259.230	55.453.500	37,15%
1.5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.916.200	69.703.096	37,90%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	49.471.996	14.576.400	29,46%
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**28.665.700**	**19.421.900**	**67,75%**
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.611.200	13.611.200	100%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	15.054.500	5.810.700	38,60%
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**89.735.300**	**22.895.600**	**25,51%**
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.735.300	22.895.600	25,51%
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan**	**89.940.000**	**54.315.000**	**60,39%**

	Ketertiban			
4.1	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	89.940.000	54.315.000	60,39%
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**16.724.400**	**9.835.900**	**58,81%**
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	16.724.400	9.835.900	58,81%
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**36.043.600**	**14.815.800**	**41,10%**
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.043.600	14.815.800	41,10%
	JUMLAH	**2.238.616.299**	**944.568.581**	**42,20%**

Faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu fasilitas yang belum memadai. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah Perubahan anggaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing PD.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran. Organisasi Perangkat Daerah berusaha melaksanakan agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Forum Perangkat daerah, Musrenbang OPD Tahun 2025 dan Rencana Kinerja (Renja) PD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan rencana kinerja melibatkan semua komponen Perangkat Daerah agar perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tujuan dan indikator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringkuku

Adapun kinerja Kantor Kecamatan Pringkuku berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kreteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten Pacitan .

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan dipimpin oleh Camat Kecamatan Pringkuku membawahi wilayah kerja sebagai berikut:
    1. Desa Dersono
    2. Desa Sugihwaras
    3. Desa Watukarung
    4. Desa Jlubang
    5. Desa Candi
    6. Desa Poko
    7. Desa Dadapan
    8. Desa Pringkuku
    9. Desa Sobo
    10. Desa Ngadirejan
    11. Desa Glinggangan
    12. Desa Pelem
    13. Desa Tamanasri

2. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
3. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;

      Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi;
      1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
      2. Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
      3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
      4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
      2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
      3. Pelaporan Pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
      1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

f. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

g. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

4. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
5. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di Kecamatan adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
c. Melakukan pengelolaan data;
d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
b. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;

c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;
j. Memfasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
k. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
l. Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

m. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
n. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
o. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
p. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
d. Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
e. Mengoordinir Pendampingan Desa di wilayahnya;
f. Mengoordinir Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

g. Mengoordinir Kegiatan Pemberdayaan Desa;
h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaaan;
j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
n. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Desa dan/ atau Kelurahan;
o. Meningkakan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan/ atau Kelurahan;
p. Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana desa dan/ atau Kelurahan;
q. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di desa dan/ atau Kelurahan;
r. Melaksanakan Evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan;
s. Melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
t. Menyelenggarakan Lembaga Kemasyarakatan;
u. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
v. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
w. Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
x. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pengelolaan sumber daya alam;
y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
(4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional;
(5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kantor Kecamatan Pringkuku merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat / melayani masyarakat Kantor Kecamatan Pringkuku terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Mengingat jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Pringkuku hanya bersifat legalisasi, maka penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya menggunakan kuesioner (pendapat responden tentang Pelayanan Publik) yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayananan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Tahun 2024

Unsur ke	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan Pelayanan	3,59
2	Prosedur Pelayanan	3,60
3	Waktu Pelayanan	3,31
4	Tarif/Biaya Pelayanan	4,00
5	Kualitas Produk Pelayanan	3,32
6	Ketrampilan Petugas Pelayanan	3.49
7	Sikap Petugas Pelayanan	3,57
8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,99
9	Sarana Pengaduan	3,31
	NILAI KEPUASAN MASYARAKAT	88,52

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Pringkuku, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata 3,54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat).

1. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Pringkuku setelah dikonversikan (88,52) Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pringkuku adalah BAIK.
2. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

Kecamatan Pringkuku tahun 2024 melaksanakan 2 program RPJMD yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tolok ukur
   - Tingkat pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan, dengan tolok ukur:
   - Nilai indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan
   - Presentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pringkuku

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Pringkuku yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing–masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi;
b. Belum tersedianya data–data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas
e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan.
f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.
g. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan
h. Belum terintegrasinya sistem pelayanan umum dengan SKPD terkait
i. Belum tertibnya manajemen PBB

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu :

1. Program pengelolaan dan administrasi perkantoran
   - Pemenuhan pengelolaan operasional administrasi perkantoran;
2. Pemenuhan sarana prasarana kegiatan pelayanan publik;
   - Meningkatkan pembinaan administrasi desa dan perangkat desa;
   - Meningkatkan Pembinaan permasalahan PBB;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja PD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026 telah disusun pada akhir Desember 2024. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dari hasil review rancangan awal RKPD, program dan Kegiatan untuk Kecamatan masih tetap. Dalam RKPD Kecamatan Pringkuku, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini meliputi 6 kegitan yaitu:
   - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Program ini meliputi 2 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan ini berasal dari usulan desa melalui musrenbang desa yang belum dapat diusulkan melalui dana DD, ADD dan dana BK ,usulan tersebut merupakan usulan RKP Desa pada Tahun 2026.

Usulan kegiatan Musrenbang umumnya merupakan unsur penunjang untuk peningkatan pelayanan publik/masyarakat. Hal ini dikarenakan usulan pada Musrenbang merupakan usulan lebih berbentuk infrastruktur, sarana prasarana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Pringkuku merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi, serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu Renja Kecamatan Pringkuku berpedoman pada Renstra Kecamatan Pringkuku dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Pringkuku bersinergi dengan dokumen perencaanaan lain, baik nasional maupun tingkat provinsi, RPJMD Kabupaten Pacitan 2025 – 2029, dan RKPD Kabupaten Pacitan 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Pringkuku.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Kecamatan Pringkuku tahun 2025 – 2029 adalah " Terwujudnya Layanan Kecamatan Yang Prima"

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pringkuku dalam jangka waktu satu tahun, sampai dengan lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu Khusus (*Spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai *(attainable*), Nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kecamatan Pringkuku sesuai dengan tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku;
2. Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di desa.

Dengan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Pringkuku memiliki indikator sasaran/kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun;
2. Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun;
3. Prosentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Pringkuku, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini meliputi 6 kegitan yaitu:

   - Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pringkuku pada tahun 2026 akan mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 2.119.136.047,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk 6 program dan 11 kegiatan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Rp. 1.878.896.947,00

   Program ini meliputi 6 kegiatan yaitu:

   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp. 18.193.800,00
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Rp. 1.505.353.771,00
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Rp. 18.385.500,00
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Rp. 110.240.686,00
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 161.612.580,00
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 65.110.610,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Rp. 15.163.500,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Rp. 15.163.500,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Rp. 99.895.800,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Rp. 99.895.800,00

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Rp. 39.420.000,00

Program ini meliputi 1 kegiatan:

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Rp. 39.420.000,00

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Rp. 27.076.700,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Rp. 27.076.700,00

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, Rp. 58.683.100,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Rp. 58.683.100,00

Secara rinci program dan kegiatan Kecamatan Pringkuku tahun 2026 (Terlampir)

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2026 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Pringkuku dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja tahun 2026 ini diperlukan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringkuku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Pringkuku ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan berkelanjutan.

Demikian Rencana Kinerja Kecamatan Pringkuku Tahun 2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

CAMAT PRINGKUKU

Drs.SUWOTO,MH

Pembina Tk I

NIP. 19671002 199403 1 006

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PRINGKUKU KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PRINGKUKU						**2.119.136.047,00**							**12.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.119.136.047,00**							**12.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.119.136.047,00**							**12.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**1.878.896.947,00**						-	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	23 Dokumen			23 Dokumen	18.193.800,00			-	-	-	23 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen			19 Dokumen	11.499.700,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	6.694.100,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	59 Dokumen			59 Dokumen	1.505.353.771,00			-	-	-	59 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			15 Orang/bulan	1.486.106.771,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	14 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Laporan			45 Laporan	19.247.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	18.385.500,00			-	-	-	100 Persen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			3 Paket	18.385.500,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	110.240.686,00			-	-	-	100 Persen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	51.497.987,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Paket	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			6 Paket	47.959.299,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Paket	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	7.183.400,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100`Persen			-	161.612.580,00			-	-	-	100`Persen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	16.062.180,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	145.550.400,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100`Persen			-	65.110.610,00			-	-	-	100`Persen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit			9 Unit	46.589.100,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	18.521.510,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan***	**100 %**			**100 %**	**15.163.500,00**						**100 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan*	12 Bulan			12 Bulan	15.163.500,00			-	-	-	12 Bulan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	15.163.500,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan***	**100 %**			**100 %**	**99.895.800,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang difasilitasi*	13 Desa			13 Desa	99.895.800,00			-	-	-	13 Desa	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	33 Dokumen			33 Dokumen	23.700.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	33 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	76.195.800,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan***	**100 %**			**100 %**	**39.420.000,00**						**100 %**	**12.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	12 Bulan			12 Bulan	39.420.000,00			-	-	-	12 Bulan	12.000.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	27.420.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan***	**100 %**			**100 %**	**27.076.700,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*	13 Desa			13 Desa	27.076.700,00			-	-	-	13 Desa	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan	16.216.700,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	10.860.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Prosentase Desa yang termonitoring***	**100 %**			**100 %**	**58.683.100,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang termonitoring*	13 Desa			13 Desa	58.683.100,00			-	-	-	13 Desa	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26 Dokumen			26 Dokumen	9.120.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	26 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	18.303.100,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen			1 Dokumen	7.260.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	J U M L A H							**2.119.136.047,00**							**12.000.000,00**	

2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PACITAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PACITAN
Jl. Letjend Suprapto No. 44 Pacitan
www.pacitan.pacitankab.go.id
Camat_pacitan@pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun.

Renja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan di Tahun 2024 dan Tahun berjalan 2025 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Agustus 2025

CAMAT PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN PACITAN

SUGIYEM, AP., M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740808 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Pacitan adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pacitan sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Pacitan, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **”*Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia*”,** Kecamatan Pacitan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Pacitan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan Tahun 2026 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pacitan guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Pacitan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2020- 2024
n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
q. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2026.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacitan;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pacitan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pacitan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pacitan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PACITAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pacitan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PACITAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PACITAN TAHUN LALU (2024) DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PACITAN.

Rencana Kerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025 KABUPATEN PACITAN

NAMA OPD **: KECAMATAN PACITAN**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Derah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Dengan Tahun 2023 atau (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaiaan Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kecamatan Pacitan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B(70)	BB (70,95)	>B(74,25)	BB(70,60)	95%	>B(74,35)	>B(72,75)	98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	23 Dokumen	23 Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen	100%	59 Dokumen	59 Dokumen	100%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	100%	20 Desa	20 Desa	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	100%	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	100%	20 Desa	20 Desa	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PACITAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan dapat Dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pacitan			86.60	86.70	87.5	88	86.60	86.70	87.5	88	-

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PACITAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Pacitan yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi;
b. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
c. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas
e. Kesadaran Masyarakat terhadap ketertiban umum masih rendah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangka Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN

No.	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	**Kecamatan Pacitan**				**5.448.485.060,00**	**Kecamatan Pacitan**				**5.448.485.060,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**5.012.946.660,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.012.946.660,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**26.902.200,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**26.902.200,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.679.700,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.679.700,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.650.400,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.650.400,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.280.400,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.280.400,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.151.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.151.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.140.200,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.140.200,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.480.504.013,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.480.504.013,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Laporan	4.473.748.213,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Laporan	4.473.748.213,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen	4.154.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen	4.154.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.243.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.243.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	1.357.800,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	1.357.800,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**25.590.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**25.590.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	23.590.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	23.590.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**114.309.539,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**114.309.539,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.366.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.366.000,00
		Kab. Pacitan,	Jumlah Paket Peralatan dan	2 Paket	30.855.700,00		Kab. Pacitan,	Jumlah Paket Peralatan dan	2 Paket	30.855.700,00

		Pacitan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Pacitan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.547.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.547.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.534.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.534.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	28.206.839,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	28.206.839,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.800.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.800.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**108.183.708,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**108.183.708,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	48.572.712,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	48.572.712,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	48.177.996,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	48.177.996,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.433.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.433.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**216.099.400,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**216.099.400,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.892.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.892.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.400.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.400.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.807.400,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.807.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**41.357.800,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**41.357.800,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	18.300.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	18.300.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.180.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.180.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.877.800,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.877.800,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**34.899.200,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**34.899.200,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**34.899.200,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**34.899.200,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.899.200,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.899.200,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**211.317.300,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**211.317.300,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**209.517.300,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**209.517.300,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24 Dokumen	24.311.300,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24 Dokumen	24.311.300,00

		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	185.206.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	185.206.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**1.800.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1.800.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	1.800.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	1.800.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**44.400.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**44.400.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**44.400.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**44.400.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.800.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.800.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	15.600.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	15.600.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**61.275.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**61.275.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**61.275.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**61.275.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	27.075.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	27.075.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	34.200.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	34.200.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**83.646.900,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**83.646.900,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**83.646.900,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**83.646.900,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	15.600.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	15.600.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	32.350.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	32.350.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	4.200.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	4.200.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	9.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	9.000.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	22.496.400,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	22.496.400,00
2	**Kelurahan Sidoharjo**				**1.148.892.000,00**	**Kelurahan Sidoharjo**				**1.148.892.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**203.892.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**203.892.000,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**28.502.500,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**28.502.500,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.016.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.016.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.983.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.983.000,00

		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	883.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	883.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	620.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	620.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.298.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.298.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.545.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.545.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	753.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	753.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**157.143.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**157.143.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.516.400,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.516.400,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	142.026.600,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	142.026.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**15.948.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**15.948.500,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.200.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.200.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.150.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.150.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.598.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.598.500,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**8.500.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**8.500.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**8.500.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**8.500.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.500.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.500.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**936.500.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**936.500.000,00**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**936.500.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**936.500.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	736.500.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	736.500.000,00
3	**Kelurahan Ploso**				**1.138.248.000,00**	**Kelurahan Ploso**				**1.138.248.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**153.248.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**153.248.000,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**3.800.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**3.800.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3.800.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3.800.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**22.660.100,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**22.660.100,00**
		Kab. Pacitan,	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	2.500.000,00		Kab. Pacitan,	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	2.500.000,00

		Pacitan, Ploso	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Pacitan, Ploso	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.233.100,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.233.100,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.400.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.400.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.527.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.527.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**4.821.300,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.821.300,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	3.173.300,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	3.173.300,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.648.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.648.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**115.398.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**115.398.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.248.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.248.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**6.568.600,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**6.568.600,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1.428.600,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1.428.600,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.140.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.140.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**10.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**10.000.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**10.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**10.000.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**975.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**975.000.000,00**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**975.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**975.000.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.139.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.139.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	774.861.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	774.861.000,00
4	**Kelurahan Baleharjo**				**949.624.000,00**	**Kelurahan Baleharjo**				**949.624.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**105.439.722,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**105.439.722,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**2.142.400,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2.142.400,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	2.142.400,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	2.142.400,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**34.845.322,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**34.845.322,00**
		Kab. Pacitan,	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	4.324.800,00		Kab. Pacitan,	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	4.324.800,00

		Pacitan, Baleharjo	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Pacitan, Baleharjo	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.774.822,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.774.822,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.124.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.124.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	621.700,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	621.700,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**65.072.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**65.072.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.815.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.815.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.663.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.663.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.594.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.594.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**3.380.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.380.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1.960.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1.960.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.420.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.420.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**9.184.278,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**9.184.278,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**9.184.278,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**9.184.278,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.184.278,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.184.278,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**835.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**835.000.000,00**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**835.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**835.000.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	348.833.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	348.833.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	486.167.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	486.167.000,00
5	**Kelurahan Pucangsewu**				**959.224.000,00**	**Kelurahan Pucangsewu**				**959.224.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**114.224.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**114.224.000,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**28.002.200,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**28.002.200,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.171.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.171.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.538.600,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.538.600,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5.292.600,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5.292.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**66.634.600,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**66.634.600,00**
		Kab. Pacitan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	20.500.000,00		Kab. Pacitan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	20.500.000,00

		Pacitan, Pucangsewu	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Pacitan, Pucangsewu	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.134.600,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.134.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**19.587.200,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**19.587.200,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.557.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.557.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.619.700,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.619.700,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.410.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.410.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**10.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**10.000.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**10.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**10.000.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**835.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**835.000.000,00**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**835.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**835.000.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370.554.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370.554.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	464.446.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	464.446.000,00
6	**Kelurahan Pacitan**				**955.624.000,00**	**Kelurahan Pacitan**				**955.624.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**107.846.500,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**107.846.500,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**23.391.400,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**23.391.400,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.910.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.910.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.370.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.370.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.043.100,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.043.100,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	11.067.800,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	11.067.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**8.677.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**8.677.500,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8.677.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8.677.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**58.018.500,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**58.018.500,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.998.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.998.500,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.620.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.620.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.400.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.400.000,00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**17.759.100,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**17.759.100,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	11.550.200,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	11.550.200,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.100.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.100.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.108.900,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.108.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**7.164.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7.164.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**7.164.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**7.164.000,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.164.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.164.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**840.613.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**840.613.500,00**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**840.613.500,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**840.613.500,00**
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	256.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	256.000.000,00
		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	584.613.500,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	584.613.500,00
					10.600.097.060,00					**10.600.097.060,00**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang ditetapkan tidak terlepas dari Usulan Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting. Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PACITAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Pacitan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan periode tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- Kebudayaan;
- Kreativitas dan inovasi;
- Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
- Perekonomian;
- Kesejahteraan rakyat;
- Pemberdayaan Mayarakat;
- Sarana dan Prasarana;

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Pacitan sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Pacitan memiliki ruang lingkup tugas: meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyrakat Desa dan/atau Kelurahan.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Pacitan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan

Pacitan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Pacitan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PACITAN

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Pacitan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yaitu **Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima**, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pacitan dalam jangka 1 stahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Pacitan dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Pacitan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Pacitan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pacitan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL					
		TAHUN								TAHUN					
		2025	026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3						4	5	6					
Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.0	3.3	3.5	4.0	4.3	4.5	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Pacitan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pacitan	87.5	88.00	88.5	89.00	90.00	91.00

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Pacitan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pacitan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
    3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
   3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
   3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekreataris Daerah

g. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

a) **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- ***Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah***

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pacitan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pacitan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu **"*Masyarakat Semakin SEJAHTERA BAHAGIA*",** sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu *Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani*, yang

menjadi acuan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Pacitan. Selain Itu Kecamatan Pacitan juga mengacu Tema Prioritas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan 2026 dengan tema "***Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial***"

- **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pacitan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan yang ada di kecamatan Pacitan diukur dari hasil Survey Kepuasan masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik.

- **Menjaga Ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal**

Kecamatan Pacitan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil di bidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah

maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pacitan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini sehingga Ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal terus terjaga dan berkelanjutan. Program terkait dengan ini yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- **SPBE**

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektorinik (SPBE) dalam rangka percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu Kecamatan pacitan mendukung pelaksanaan sistem SPBE agar mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta mendorong sistem pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Program terkait dengan ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- **Percepatan Penurunan Stunting**

  Bahwa dala rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistic, integrative dan berkualitas melalui Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan mulai dari Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten hingga Pemeintah Desa. Oleh sebab itu Kecamatan Pacitan dalam menyelenggarakan Pemerintahan mendukung dalam percepatan penurunan stunting melalui Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

- **Ketentraman dan Ketertiban Umum**

  Bahwa dala rangka mewujudkan Lingkungan yang nyaman aman tentram dan tertib, Kecamatan Pacitan mencanangkan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dilakukan sabagai upaya dalam menjaga kententraman dan Ketertiban Umum di wilayah sehingga tercipta suasana yang kondusif.

b) **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pacitan Tahun 2026 adalah 6 Program dimana Kecamatan Pacitan melaksanakan kegiatan bersama sama dengan 5 Kelurahan sebagai Sub Unit Organisasi Kecamatan Pacitan. Adapun rincian program dan kegiatan tercantum pada lampiran ini.

- **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.**

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pacitan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pacitan dan melingkupi semua Desa. Adapun untuk Kelurahan Rencana Kerja Tergabung dalam Rencana Kerja Kecamatan Pacitan.

- **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.**

  Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2026 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PACITAN						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.012.946.660,00**						**-**	**5.047.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen			23 Dokumen	26.902.200,00			-	-	-	23 Dokumen	76.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	10.679.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	52.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.650.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	4.280.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			12 Laporan	1.151.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	5.140.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen			59 Dokumen	4.480.504.013,00			-	-	-	59 Dokumen	4.408.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Laporan			40 Orang/Laporan	4.473.748.213,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	40 Orang/Laporan	4.400.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen			34 Dokumen	4.154.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	34 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1.243.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan			24 Laporan	1.357.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%			100%	25.590.000,00			-	-	-	100%	36.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			4 Paket	23.590.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	33.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen			6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			100%	114.309.539,00			-	-	-	100%	153.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	7.366.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	30.855.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	31.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	33.547.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	48.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	3.534.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	9.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	28.206.839,00	Kab. Pacitan, Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	28.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

									Semua Kel/Desa							
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%			100%	108.183.708,00			-	-	-	100%	87.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			5 Unit	48.572.712,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			4 Unit	48.177.996,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	54.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	11.433.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	23.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			100%	216.099.400,00			-	-	-	100%	242.900.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	52.892.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	48.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	3.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	159.807.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	188.900.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%			80%	41.357.800,00			-	-	-	80%	44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			9 Unit	18.300.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	18.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			18 Unit	12.180.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor	1 Unit			1 Unit	10.877.800,00	Kab.	PENDAPATAN	-	-	-	1 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN

			dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)						PACITAN
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**34.899.200,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	34.899.200,00			-	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	34.899.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**211.317.300,00**						**-**	**195.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	20 Desa			-	209.517.300,00			-	-	-	20 Desa	193.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24 Dokumen			24 Dokumen	24.311.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Dokumen	31.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	185.206.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	162.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.02	5 Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	1.800.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.02.0004	5 Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan			5 Laporan	1.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**44.400.000,00**						**-**	**29.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Laporan			12 Laporan	44.400.000,00			-	-	-	12 Laporan	29.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	28.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	15.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**61.275.000,00**						**-**	**57.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	25 Desa / Kelurahan			25 Desa / Kelurahan	61.275.000,00			-	-	-	25 Desa / Kelurahan	57.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan	27.075.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	34.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**83.646.900,00**						**-**	**112.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	20 Desa			20 Desa	83.646.900,00			-	-	-	20 Desa	112.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	32.350.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	53.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen			12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			12 Laporan	22.496.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	28.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
		KELURAHAN SIDOHARJO						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**203.892.000,00**						**-**	**272.300.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			100%	28.502.500,00			-	-	-	100%	63.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	1.016.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			12 Paket	13.983.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	29.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	25.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	883.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	620.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	0,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%			100%	2.298.000,00			-	-	-	100%	30.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			2 Unit	1.545.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	753.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			100%	157.143.000,00			-	-	-	100%	161.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	14.516.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	17.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	142.026.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	142.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%			80%	15.948.500,00			-	-	-	80%	18.300.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	8.300.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			7 Unit	2.150.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	6.598.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	7.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**8.500.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	8.500.000,00			-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**936.500.000,00**						**-**	**1.045.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	936.500.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.045.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	265.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	736.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	780.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
		KELURAHAN PLOSO						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**153.248.000,00**						**-**	**230.500.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%			100%	3.800.000,00			-	-	-	100%	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	3.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			100%	22.660.100,00			-	-	-	100%	58.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			4 Paket	10.233.100,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	26.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	8.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	21.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	1.527.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%			100%	4.821.300,00			-	-	-	100%	37.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	3.173.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			2 Unit	1.648.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	115.398.000,00			-	-	-	100%	118.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	13.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	150.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	103.248.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	104.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%			80%	6.568.600,00			-	-	-	80 %	11.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	9 Unit			4 Unit	1.428.600,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	9 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN PLOSO

			Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Pacitan, Ploso	(PAD)						
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			4 Unit	1.140.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	4.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**9.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00			-	-	-	12 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**975.000.000,00**						**-**	**1.150.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Keluraha	975.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.150.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			8 Unit	200.139.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			10 Pokmas / Ormas	774.861.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	900.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
		KELURAHAN BALEHARJO						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**105.439.722,00**						**-**	**128.200.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%			-	2.142.400,00			-	-	-	100%	6.200.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	2.142.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	6.200.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			100%	34.845.322,00			-	-	-	100%	40.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	4.324.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			12 Paket	18.774.822,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	11.124.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	621.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			100%	65.072.000,00			-	-	-	100%	78.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	20.815.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.663.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	42.594.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	55.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%			80%	3.380.000,00			-	-	-	80%	3.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			3 Unit	1.960.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			8 Unit	1.420.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**9.184.278,00**						**-**	**10.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	9.184.278,00			-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan	12 Laporan			12 Laporan	9.184.278,00	Kab.	PENDAPATAN	-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Pacitan, Pacitan, Baleharjo	ASLI DAERAH (PAD)						BALEHARJO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**835.000.000,00**						**-**	**955.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	835.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	955.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			5 Unit	348.833.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	486.167.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	555.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
		KELURAHAN PUCANGSEWU						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**114.224.000,00**						**-**	**126.500.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			-	28.002.200,00			-	-	-	100 % 100 %	24.500.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	15.171.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	7.538.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	14.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	5.292.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			100%	66.634.600,00			-	-	-	100%	87.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	46.134.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	66.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	80%			80%	19.587.200,00			-	-	-	80%	15.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU

		Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	7.557.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			13 Unit	1.619.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	10.410.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00			-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**835.000.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	835.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			6 Unit	370.554.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	464.446.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	600.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
		KELURAHAN PACITAN						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**107.846.500,00**						**-**	**124.800.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			-	23.391.400,00			-	-	-	100%	31.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket			12 Paket	1.910.500,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN PACITAN

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Pacitan, Pacitan	(PAD)						
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	7.370.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	3.043.100,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	11.067.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%			-	8.677.500,00			-	-	-	100%	2.800.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	8.677.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	2.800.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			-	58.018.500,00			-	-	-	100%	73.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	17.998.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	19.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.620.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	38.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	52.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%			80%	17.759.100,00			-	-	-	80%	18.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			6 Unit	11.550.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			8 Unit	3.100.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	4.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	3.108.900,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN PACITAN

2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**7.164.000,00**						**-**	**14.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			-	7.164.000,00			-	-	-	12 Laporan	14.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	7.164.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	14.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**840.613.500,00**						**-**	**950.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			-	840.613.500,00			-	-	-	5 Kelurahan	950.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			7 Unit	256.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			10 Pokmas / Ormas	584.613.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	700.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	J U M L A H							**10.600.097.060,00**							**11.503.200.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PACITAN

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PACITAN						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.012.946.660,00**						**-**	**5.047.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen			23 Dokumen	26.902.200,00			-	-	-	23 Dokumen	76.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	10.679.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	52.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.650.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	4.280.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			12 Laporan	1.151.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	5.140.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	-	59 Dokumen			59 Dokumen	4.480.504.013,00			-	-	-	59 Dokumen	4.408.500.000,00	KECAMATAN

		Perangkat Daerah														PACITAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Laporan			40 Orang/Laporan	4.473.748.213,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	40 Orang/Laporan	4.400.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen			34 Dokumen	4.154.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	34 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1.243.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	24 Laporan			24 Laporan	1.357.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	25.590.000,00			-	-	-	100 %	36.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			4 Paket	23.590.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	33.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen			6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	114.309.539,00			-	-	-	100 %	153.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	7.366.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	30.855.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	31.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	33.547.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	48.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	3.534.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	9.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	28.206.839,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	28.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	108.183.708,00			-	-	-	100 %	87.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			5 Unit	48.572.712,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			4 Unit	48.177.996,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	54.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	11.433.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	23.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	216.099.400,00			-	-	-	100 %	242.900.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	52.892.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	48.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	3.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	159.807.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	188.900.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	41.357.800,00			-	-	-	80 %	44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			9 Unit	18.300.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	18.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			18 Unit	12.180.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit			1 Unit	10.877.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	1 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

			yang Dipelihara/Direhabilitasi						Semua Kel/Desa	(PAD)						
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**34.899.200,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	34.899.200,00			-	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	34.899.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**211.317.300,00**						**-**	**195.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	20 Desa			20 Desa	209.517.300,00			-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	20 Desa	193.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24 Dokumen			24 Dokumen	24.311.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	24 Dokumen	31.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	185.206.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	162.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	1.800.000,00			-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	5 Kelurahan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan			5 Laporan	1.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,	-	5 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

												Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif				
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**44.400.000,00**						**-**	**29.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Laporan			12 Laporan	44.400.000,00			-	-	-	12 Laporan	29.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	28.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	15.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	-	12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**61.275.000,00**						**-**	**57.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	25 Desa/Kelurahan			25 Desa/Kelurahan	61.275.000,00			-	-	-	25 Desa/Kelurahan	57.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan	27.075.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	34.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**83.646.900,00**						**-**	**112.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	20 Desa			-	83.646.900,00			-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	20 Desa	112.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	12 Dokumen			12 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	JATIM BER KAH-AMANAH	-	12 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

			rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Semua Kel/Desa	(PAD)		Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	32.350.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	53.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen			12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			12 Laporan	22.496.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	28.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
		KELURAHAN SIDOHARJO						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**203.892.000,00**						**-**	**272.300.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	28.502.500,00			-	-	-	100 %	63.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	1.016.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			12 Paket	13.983.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	29.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	25.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	883.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	620.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	0,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	2.298.000,00			-	-	-	100 %	30.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			2 Unit	1.545.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	753.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	157.143.000,00			-	-	-	100 %	161.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	14.516.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	17.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	142.026.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	142.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	15.948.500,00			-	-	-	80 %	18.300.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	8.300.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			7 Unit	2.150.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	6.598.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	7.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**8.500.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	-	12 Laporan			-	8.500.000,00			-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN

		Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														SIDOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**936.500.000,00**						**-**	**1.045.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	936.500.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.045.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	265.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	736.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	780.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
		KELURAHAN PLOSO						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**153.248.000,00**						**-**	**230.500.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	3.800.000,00			-	-	-	100 %	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	3.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	22.660.100,00			-	-	-	100 %	58.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			4 Paket	10.233.100,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	26.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	8.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	21.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang	2 Paket			2 Paket	1.527.000,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN	-	-	-	2 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN

			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						Pacitan, Ploso	ASLI DAERAH (PAD)						PLOSO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	4.821.300,00			-	-	-	100 %	37.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	3.173.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			2 Unit	1.648.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	115.398.000,00			-	-	-	100 %	118.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	13.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	150.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	103.248.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	104.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80%	6.568.600,00			-	-	-	80 %	11.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	1.428.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			4 Unit	1.140.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	4.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**9.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00			-	-	-	12 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN	-	-	-	12 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Pacitan, Ploso	ASLI DAERAH (PAD)						PLOSO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**975.000.000,00**						**-**	**1.150.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	975.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.150.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			8 Unit	200.139.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			10 Pokmas / Ormas	774.861.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	900.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
		KELURAHAN BALEHARJO						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**105.439.722,00**						**-**	**128.200.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	2.142.400,00			-	-	-	100 %	6.200.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	2.142.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	6.200.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	34.845.322,00			-	-	-	100 %	40.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	4.324.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			12 Paket	18.774.822,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	11.124.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	621.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	65.072.000,00			-	-	-	100 %	78.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	20.815.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.663.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	42.594.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	55.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	3.380.000,00			-	-	-	80 %	3.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			3 Unit	1.960.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			8 Unit	1.420.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**9.184.278,00**						**-**	**10.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	9.184.278,00			-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	9.184.278,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**835.000.000,00**						**-**	**955.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	835.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	955.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			5 Unit	348.833.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	486.167.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	555.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO

			Masyarakat di Kelurahan							DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN						
		KELURAHAN PUCANGSEWU						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**114.224.000,00**						**-**	**126.500.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	28.002.200,00			-	-	-	100 %	24.500.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	15.171.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	7.538.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	14.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	5.292.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	66.634.600,00			-	-	-	100 %	87.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	46.134.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	66.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	19.587.200,00			-	-	-	80 %	15.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	7.557.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			13 Unit	1.619.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	10.410.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	-	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00			-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN

		Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														PUCANGSEWU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**835.000.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	835.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			6 Unit	370.554.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	464.446.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	600.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
		KELURAHAN PACITAN						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**107.846.500,00**						**-**	**124.800.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	23.391.400,00			-	-	-	100 % 100 %	31.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	1.910.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	7.370.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	3.043.100,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	11.067.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	8.677.500,00			-	-	-	100 %	2.800.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	8.677.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	2.800.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	58.018.500,00			-	-	-	100 %	73.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	17.998.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	19.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.620.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	38.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	52.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	17.759.100,00			-	-	-	80 %	18.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			6 Unit	11.550.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			8 Unit	3.100.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	4.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	3.108.900,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**7.164.000,00**						**-**	**14.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	7.164.000,00			-	-	-	12 Laporan	14.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	7.164.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	14.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**840.613.500,00**						**-**	**950.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			-	840.613.500,00			-	-	-	5 Kelurahan	950.000.000,00	KELURAHAN PACITAN

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			7 Unit	256.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			10 Pokmas / Ormas	584.613.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	700.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	J U M L A H							**10.600.097.060,00**							**11.503.200.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan **"Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 serta Evaluasi RKPD Kabupaten Pacitan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Pacitan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pacitan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
   b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pacitan Tahun 2026 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pacitan.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Pacitan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.

3) Rencana Tindak Lanjut.

   Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pacitan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Pacitan Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Kecamatan Pacitan juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Renja Kecamatan Pacitan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Pacitan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Agustus 2025

CAMAT PACITAN

SUGIYEM, AP., M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740808 199311 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN KEBONAGUNG

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN KEBONAGUNG
Jln. Raya Kebonagung No. 10 Kebonagung
https://kebonagung.pacitankab.go.id
camatkebonagung.pacitankab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun.

Renja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 memaparkan tentang evaluasi kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan di Tahun 2024 dan Tahun berjalan 2025 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Kebonagung, 23 Juli 2025
Plt. CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN KEBONAGUNG

UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19691119 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024) **6**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun Lalu (2024) Dan Capaian Renstra Kecamatan Kebonagung 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung 10
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kebonagung 17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEBONAGUNG **27**
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kebonagung 28
3.3 Program dan Kegiatan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **47**
BAB V PENUTUP **50**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Pacitan 7
Tabel 2.2 Analis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung 17
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Kebonagung 20
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebonagung 28
Tabel 3.2 Pemerintah Kabupaten Pacitan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pacitan 35
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan..... 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Kebonagung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Kebonagung sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Kebonagung, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu ***"Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"*,** Kecamatan Kebonagung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten

Pacitan Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Kebonagung Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Tahun 2026 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kebonagung guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Kebonagung.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2020- 2024
n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

q. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2026.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebonagung;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2026, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kebonagung

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebonagung

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEBONAGUNG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kebonagung

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBONAGUNG

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEBONAGUNG TAHUN LALU (2024) DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KEBONAGUNG.

Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025 KABUPATEN PACITAN

NAMA OPD : KECAMATAN KEBONAGUNG

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Derah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Dengan Tahun 2023 atau (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaiaan Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kecamatan Kebonagung									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B(70)	BB (75,15)	>B(70)	BB(70,20)	100%	>B(70)	>B(71,65)	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	21 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	23 Dokumen	23 Dokumen	100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	784 Dokumen	432 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	59 Dokumen	59 Dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan barang milik daerah yang dicukupi	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	93%	93%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80%	85%	85%	85%	80%	80%	100%
Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Daerah yang ada di Kecamatan									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%

Analisis rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Pacitan akan mencakup penilaian terhadap pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja, serta sejauh mana Renja tersebut berhasil mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang termuat dalam Renstra.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEBONAGUNG

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebonagung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kebonagung sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta pogram, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

1) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
2) Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
3) Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan
4) Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan
5) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan earsipan di lingkungan Kecamatan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Program, Evalausi, Pelaporan dan keuangan, mempunyai tugas :

1) Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
3) Melakukan pengelolaan data;
4) Melakukan menyusunan laporan kinerja;
5) Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan
6) Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan ;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Sub Bagaian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1) menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
2) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
3) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
4) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
5) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
6) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian
7) memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
2) Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan;
3) Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingakat Desa/Kelurahan ;
4) Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
5) Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
6) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
8) Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya.
9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
2) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
3) Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan;

4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
5) Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wiayah kecamatan;
6) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan.
7) Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;
9) Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
10) Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan
11) Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ;
12) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
14) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
15) Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
16) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
17) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
18) Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19) Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
20) Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
21) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
22) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3) Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
4) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
5) Mengkoordinir pendampingan Desa di wilayahnya
6) Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
7) Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
8) Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
9) Meningkatkan partisipatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
10) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
11) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
12) Memfasilitasi penatapan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
13) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
14) Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
15) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan atau Kelurahan;
16) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan atau Kelurahan;
17) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan atau Kelurahan ;
18) Melaksanakan evaluasi Desa dan atau Kelurahan
19) Melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat

kecamatan.

20) Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
21) Memfasilitasi sarana dan prasarna Lembaga kemasyarakatan
22) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
23) Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
24) Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya.
25) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaannya.
26) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepda Camat melalui Sekretaris Kecamatan
27) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban.
2) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
3) Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
5) Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
6) Memfasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7) Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan- Undangan.
8) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan.

9) Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam.
10) Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban.
11) Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya.
12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabapaten Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kebonagung terdiri dari :

a. Satu (1) orang Camat Eselon III a
b. Satu (1) orang Sekretaris Kecamatan Eselon III b
c. Lima (5) orang Kepala Seksi Eselon IV a terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Pelayanan Umum
    2. Kepala Seksi Pemerintahan
    3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
    4. Kepala Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.
d. Dua (2) orang Kepala Sub Bagian Eselon IV b terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya pada aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebonagung	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	86	86.05	86,45	86,50	86.52	90,17	94.76	91,44	Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025

Analisis kinerja Pelayanan pada table diatas sangat penting untuk memastikan bahwa Kecamatan Kebonagung dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkontribusi pada pembangunan wilayah. Dengan melakukan analisis antara Target Renstra dan Realisasi, terdapat kelemahan-kelemahan yang ada dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga kinerja kecamatan dapat terus ditingkatkan.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KEBONAGUNG

Kecamatan Kebonagung sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya Kecamatan Kebonagung masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan antara lain;

1. Belum optimalnya sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas
2. Terbatasnya kompetensi sumber daya di kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
4. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa

5. Kesadaran Masyarakat terhadap ketertiban umum masih rendah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung ditentukan, isu-isu penting yaitu sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunaan segenap potensi yang ada di wilayah.
2. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan;
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh- sungguh memperhatikan *Company / Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
5. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapan dengan pelayanan prima akan, memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya

dinamika aktivitas masyarakat.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
7. Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangka Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN PACITAN

No	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KINERJA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	**KECAMATAN KEBONAGUNG**				**2.487.394.786,00**	**KECAMATAN KEBONAGUNG**				**2.487.394.786,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.218.482.631,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.218.482.631,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**6.482.900,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6.482.900,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	1.120.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	1.120.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.091.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.091.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.354.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.354.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	454.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	454.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	591.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	591.800,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	390.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	390.500,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	480.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	480.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.801.344.704,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.801.344.704,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	1.678.219.304,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	1.678.219.304,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	111.760.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	111.760.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22 Dokumen	480.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22 Dokumen	480.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.825.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.825.400,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	22 Dokumen	2.900.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	22 Dokumen	2.900.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.160.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.160.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**12.417.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**12.417.000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	10.617.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	10.617.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	360.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	360.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	1.440.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	1.440.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**269.754.777,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**269.754.777,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	753.900,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	753.900,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.502.115,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.502.115,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.777.394,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.777.394,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	2.100.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	2.100.000,00	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	20.401.368,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	20.401.368,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178.220.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178.220.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**6.690.636,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6.690.636,00**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	6.690.636,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	6.690.636,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**79.503.480,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**79.503.480,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	23.103.480,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	23.103.480,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56.400.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56.400.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**41.299.134,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**41.299.134,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	35.029.634,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	35.029.634,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.269.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.269.500,00	
	Penataan Organisasi				**990.000,00**	**Penataan Organisasi**				**990.000,00**	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja	5 Dokumen	990.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja	5 Dokumen	990.000,00	

			dan Reformasi Birokrasi					dan Reformasi Birokrasi			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**12.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**12.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**12.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**12.000.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**117.666.775,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**117.666.775,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**117.666.775,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**117.666.775,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	19 Desa	26.132.600,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	19 Desa	26.132.600,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah PKK Desa yang di bina	19 Desa	91.534.175,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah PKK Desa yang di bina	19 Desa	91.534.175,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**72.000.180,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**72.000.180,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**72.000.180,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**72.000.180,00**	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	72.000.180,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	72.000.180,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**54.985.200,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**54.985.200,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**54.985.200,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**54.985.200,00**	

	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	24.385.200,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	24.385.200,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	30.600.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	30.600.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**12.260.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**12.260.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**12.260.000,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**12.260.000,00**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	95 Laporan	4.380.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	95 Laporan	4.380.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	95 Laporan	7.880.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kab. Pacitan, Kebonagung Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	95 Laporan	7.880.000,00	

Analisis terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 melibatkan evaluasi keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD), identifikasi isu-isu strategis daerah, serta penelaahan rencana program dan kegiatan yang diusulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, serta dapat menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) perangkat daerah.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang ditetapkan tidak terlepas dari Usulan Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting. Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEBONAGUNG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas public.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan kebonagung dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian urusan otomoni daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Kebonagung dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Kebonagung yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KEBONAGUNG

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Kebonagung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan yaitu **Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima**, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kebonagung dalam jangka 1 stahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Kebonagung dalam setiap tahunnya adalah **Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Kebonagung**.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kebonagung beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebonagung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL					
		TAHUN								TAHUN					
		1 2025	2 2026	3 (2027	4 2028	5 2029	6 2030			1 (2025)	2 2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	6 (2030)
1	2	3						4	5	6					
Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.0	3.5	3.75	4.0	4.5	4.75	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebonagung	86.96	87.00	87.5	88.00	88.50	89.00

Dengan merumuskan tujuan dan sasaran, serta melaksanakan program-program pembangunan yang terencana dan terukur, Kecamatan Kebonagung diharapkan dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kebonagung merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kebonagung sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
    3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
   3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
   3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekreataris Daerah

g. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

a) **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- ***Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah***

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kebonagung diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kebonagung merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu ***"Pacitan Semakin SEJAHTERA BAHAGIA",*** sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu *Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani*, yang menjadi acuan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Kebonagung. Selain Itu Kecamatan Kebonagung juga mengacu Tema Prioritas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan 2026 dengan tema "***Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial***"

- **Pencapaian SPM**

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

  Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi

Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kebonagung diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan yang ada di Kecamatan Kebonagung diukur dari hasil Survey Kepuasan masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik

- **Menjaga Ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal**

  Kecamatan Kebonagung sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil di bidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kebonagung melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini sehingga Ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal terus terjaga dan berkelanjutan. Program terkait dengan ini yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- **SPBE**

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektorinik (SPBE) dalam rangka percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu Kecamatan Kebonagung mendukung pelaksanaan sistem SPBE agar mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta mendorong sistem pemerintahan yang terbuka,

partisipatif, inovatif dan akuntabel. Program terkait dengan ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Percepatan Penurunan Stunting**

  Bahwa dala rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistic, integrative dan berkualitas melalui Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan mulai dari Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten hingga Pemeintah Desa. Oleh sebab itu Kecamatan Kebonagung dalam menyelenggarakan Pemerintahan mendukung dalam percepatan penurunan stunting melalui Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- **Ketentraman dan Ketertiban Umum**

  Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang nyaman aman tentram dan tertib, Kecamatan Kebonagung mencanangkan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dilakukan sabagai upaya dalam menjaga kententraman dan Ketertiban Umum di wilayah sehingga tercipta suasana yang kondusif.

b) **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung Tahun 2026 adalah 6 Program. Adapun rincian program dan kegiatan tercantum pada lampiran ini

- **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.**

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kebonagung dan melingkupi semua Desa.

- **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.**

Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2026 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KEBONAGUNG						**2.347.191.000,00**							**2.908.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.347.191.000,00**							**2.908.700.000,00**	
	7,01	**KECAMATAN**						**2.347.191.000,00**							**2.908.700.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP perangkat daerah***	**-**			**>B Nilai (72.50)**	**2.126.050.219,00**						**>B Nilai (73.00)**	**2.673.200.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*	23 dokumen			23 dokumen	16.500.000,00			-	-	-	23 dokumen	20.100.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	2.600.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah*	-			59 dokumen	1.689.852.996,00			-	-	-	59 dokumen	2.122.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.591.522.996,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	16 Orang/bulan	1.980.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen	82.930.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22 Dokumen	125.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				22 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				22 Dokumen	2.900.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	18 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian*	-			100%	15.000.000,00			-	-	-	100%	17.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	11.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

			Informasi Kepegawaian													
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	-			100%	212.027.723,00			-	-	-	100%	282.700.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	1.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	44.775.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Paket	51.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	22.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Paket	23.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	240 Dokumen	2.200.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	117.152.723,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	180.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah*	100%			100%	21.000.000,00			-	-	-	100%	37.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	7.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan*	-			100%	74.400.000,00			-	-	-	100%	86.400.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	44.400.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	56.400.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*	-			80%	52.269.500,00			-	-	-	80%	58.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	11 Unit	36.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6.269.500,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	7.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	31.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	-			5 Dokumen	45.000.000,00			-	-	-	5 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Presentase***	**-**			**100 %**	**12.000.000,00**						**100 %**	**12.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan*	-			12 bulan	12.000.000,00			-	-	-	12 bulan	12.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase cakupan desa yang difasilitasi***	**100%**			**100%**	**84.915.781,00**						**100%**	**95.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang difasilitasi*	19 desa			19 desa	84.915.781,00			-	-	-	19 desa	95.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				39 Dokumen	20.732.600,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	39 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	64.183.181,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	92.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Presentase jumlah koordinasi ketentraman dan ketetiban umum***	**100%**			**100%**	**96.225.000,00**						**100%**	**85.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	12 bulan			12 bulan	96.225.000,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	12 bulan	85.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan				12 Laporan	65.625.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

			Tokoh Masyarakat													
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100%**			**100%**	**14.000.000,00**						**100%**	**16.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum*	19 desa			19 desa	14.000.000,00			-	JATIM AKSES Me mperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-	19 desa	16.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AKSES Me mperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-	12 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	-	12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Prosentase desa yang termonitoring***	**100%**			**100%**	**14.000.000,00**						**100%**	**27.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang termonitoring*	19 desa			19 desa	14.000.000,00			-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	-	19 desa	27.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	-	12 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AKSES Me mperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	-	12 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	-	12 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	-	12 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

Analisis terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 merupakan langkah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis yang luas diharapkan rancangan RKPD dapat menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemarintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**Kecamatan Kebonagung**	**71,8**	**2.218.482.631,00**	**PAD**		**72,5**	**2.423.850.000,00**
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, dan laporan kinerja perangkat Daerah	Kecamatan Kebonagung	23 Dokumen	6.482.900,00	PAD		23 Dokumen	7.000.000,00
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Keuangan PD	Kecamatan Kebonagung	59 Dokumen	1.801.344.704,00	PAD		59 Dokumen	1.958.000.000,00
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Kecamatan Kebonagung	100%	12.417.000,00	PAD		100%	29.500.000,00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kecamatan Kebonagung	100%	269.754.777,00	PAD		100%	266.350.000,00

7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Kecamatan Kebonagung	100%	6.690.636,00	PAD		100%	15.000.000,00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	Kecamatan Kebonagung	100%	79.503.480,00	PAD		100%	85.000.000,00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Kebonagung	80%	41.299.134,00	PAD		80%	58.000.000,00
7.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Jumlah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kebonagung	5 Dokumen	990.000,00	PAD		5 Dokumen	5.000.000,00
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**12.000.000,00**	**PAD**		**100%**	**16.500.000,00**
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Kecamatan Kebonagung	12 Bulan	12.000.000,00	PAD		12 Bulan	16.500.000,00
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase cakupan Desa yang difasilitasi**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**117.666.775,00**	**PAD**		**100%**	**110.000.000,00**
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kecamatan Kebonagung	19 Desa	117.666.775,00	PAD		19 Desa	110.000.000,00
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**72.000.180,00**	**PAD**		**100%**	**27.000.000,00**
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kebonagung	12 Bulan	72.000.180,00	PAD		12 Bulan	27.000.000,00
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**54.985.200,00**	**PAD**		**100%**	**83.000.000,00**
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Kecamatan Kebonagung	19 Desa	54.985.200,00	PAD		19 Desa	83.000.000,00
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase desa yang termonitoring**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**12.260.000,00**	**PAD**		**100%**	**13.000.000,00**

7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	Kecamatan Kebonagung	19 Desa	12.260.000,00	PAD		19 Desa	13.000.000,00

Analisis terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 melibatkan evaluasi keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD), identifikasi isu-isu strategis daerah, serta penelaahan rencana program dan kegiatan yang diusulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, serta dapat menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) perangkat daerah.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan **"Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 serta Evaluasi RKPD Kabupaten Pacitan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kebonagung. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kebonagung didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
   b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kebonagung Tahun 2026 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pacitan.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.

3) Rencana Tindak Lanjut.

   Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kebonagung. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber

pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Kecamatan Kebonagung juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Renja Kecamatan Kebonagung ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kebonagung serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Kebonagung, 23 Juli 2025
Plt. CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN KEBONAGUNG

UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19691119 199602 1 001

RENCANA KERJA
TAHUN 2026

KECAMATAN ARJOSARI

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ARJOSARI
Jl. Raya Arjosari- Nawangan Nomor. 14 Arjosari Jawa Timur 63581
E-mail : kecamatan.arjosari@gmail.com

PENETAPAN RENCANA KERJA

KANTOR CAMAT ARJOSARI

KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Rencana Kerja Kantor Camat Arjosari Kabupaten Pacitan, merupakan ikhtisar Rencana Kerja yang akan dicapai pada tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Rencana Kerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2026.

Arjosari, 01 Agustus 2025

MENYETUJUI	**CAMAT ARJOSARI**
BUPATI PACITAN	
INDRATA NUR BAYUAJI	**DIDIK DARMAWAN,S.STP,MM**
	Pembina Tk I
	NIP. 198105022000121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga Rencana Kerja Kecamatan Arjosari dapat tersusun sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai amanat pasal 138 ayat (1) bahwa Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada RKPD.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan recana kinerja tahunan dimaksud.

Semoga rencana kerja tahunan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Arjosari, 01 Agustus 2025

CAMAT ARJOSARI

DIDIK DARMAWAN,S.STP,MM

Pembina Tk I

NIP. 198105022000121001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN KERJA 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG..... 4
I.2 LANDASAN HUKUM..... 5
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD..... 8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD 11
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD..... 21
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 22
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONA 24
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD 24
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 27

BAB V PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjosari tahun 2026 merupakan rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Arjosari tahun 2021–2026. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai amanat pasal 138 ayat (1) bahwa Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada RKPD.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja Pembangunan pada kantor Kecamatan Arjosari dilakukan melalui pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran yaitu:

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun
2. Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun
3. Prosentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Arjosar dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani kebutuhan masyarakat. Di sisi lain Kecamatan Arjosari dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Arjosari didasarkan kepada Renstra Kecamatan Arjosari tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
17. Surat Edaran Nomor 000.7.6.1/843/408.53/2024 Tentang Pedoman Oenyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.
18. Surat Edaran Nomor 000.7.6.1/095/408.53/2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menyajikan data evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2026 dan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan penetapan program sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Tahun 2026.

Adapun tujuan sesuai Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Arjosari sebagai berikut:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan Kegiatan Kecamatan Arjosari tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya misi dan visi kepala daerah;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja ini ditujukan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Arjosari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASIPELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancanagan Peraturan Daerah tentang rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Karena itu kantor Kecamatan Arjosari juga harus melaksanakan evaluasi terhadap Renja Kecamatan Arjosari tahun 2024 meliputi tiga (3) hal, yaitu: Kebijakan program dan kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan Kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Pada tahun 2024 belanja Kantor Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terbagi atas belanja langsung dan tidak langsung. Untuk tahun 2024 dan seterusnya belanja Kantor kecamatan Arjosari dibagi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terbagi enam program 13 kegiatan, di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun alokasi dan realisasi anggaran tahun 2024 dapat di uraikan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	DANA	REALISASI	EFISIENSI	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	2.330.764.315	2.162.926.253	167.838.062	92,80%

	daerah				
1.1	Perencanan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	35.651.000	32.392.301	3.258.699	90,86%
1.2	Administrasi Keuangan PD	1.922.222.554	1.774.181.377	148.041.177	92,34%
1.3	Administrasi Kepegawaian PD	35.227.500	34.900.500	327.000	99,07%
1.4	Administrasi Umum PD	120.789.761	142.260.930	21.471.169	117,78%
1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	19.985.000	19.985.000	0	100,00%
1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	170.638.000	137.193.550	33.444.450	80,40%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.407.000	32.898.920	1.508.080	95,62%

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.229.500	16.033.550	195.950	98,79%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	18.177.500	16.865.370	1.312.130	92,78%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	147.552.500	147.091.650	460.850	99,69%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	147.552.500	147.091.650	460.850	99,69%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	54.075.000	51.922.551	2.082.449	96,02%
4.1	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman	54.075.000	51.922..551	2.082.449	96,02%

	dan Ketertiban umum				
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.470.000	41.407.175	1.062.825	97,50%
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	42.470.000	41.407.175	1.062.825	97,50%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	444.320.000	428.321.700	15.998.300	96,40%
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	444.320.000	428.321.700	15.998.300	96,40%
JUMLAH		5.392.509.630	5.038.380.827	397.001.141	96,43%

Dari data di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan dana yang dipergunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan

Arjosari Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi Belanja sebesar Rp. **5.392.509.630** yang terealisasi Rp. **5.038.380.827** atau sebesar **96,43%**.

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	DANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**2.173.780.668**	**2.053.085.241**	**56,12%**
1.1	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	35.434.000	20.576.100	67,16%
1.2	Administrasi Keuangan PD	1.815.518.407	1.738.382.412	57,65%
1.3	Administrasi Kepegawaian PD	11.593.400	11.593.400	0%
1.4	Administrasi Umum PD	127.713.661	107.556.329	52,06%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.632.000	4.587.800	53,83%
1.6	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.079.000	157.579.000	47,84%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	12.810.200	12.810.200	44,87%

	Pemerintahan Daerah			
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**33.471.100**	**8.458.100**	**26,07%**
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.052.600	6.226.600	40,74%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	17.418.500	2.231.500	12,56%
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**213.455.500**	**302.829.500**	**65,96%**
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	213.455.500	302.829.500	65,96%
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**53.237.000**	**40.795.500**	**44,24%**
4.1	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan	53.237.000	40.795.500	44,24%

	Ketertiban umum			
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**42.534.500**	**35.652.500**	**37,10%**
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	42.534.500	35.652.500	37,10%
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**71.796.500**	**49.531.200**	**31,84%**
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.796.500	49.531.200	**31,84%**
	JUMLAH	**4.795.527.036**	**4.551.895.382**	**42%**

Faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu fasilitas yang belum memadai. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah Perubahan anggaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing PD.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab belum terpenuhinya

target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran. Organisasi Perangkat Daerah berusaha melaksanakan agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, Forum Perangkat daerah, Musrenbang OPD Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan rencana kerja melibatkan semua komponen Perangkat Daerah agar perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tujuan dan indikator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun kinerja Kantor Kecamatan Arjosari berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kreteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten Pacitan .

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan dipimpin oleh Camat Kecamatan Arjosari membawahi wilayah kerja sebagai berikut:
    1. Desa Mlati
    2. Desa Sedayu
    3. Desa Tremas
    4. Desa Arjosari
    5. Desa Pagutan
    6. Desa Gunungsari
    7. Desa Gembong
    8. Desa Borang

9. Desa Gegeran
10. Desa Kedungbendo
11. Desa Jetiskidul
12. Desa Mangunharjo
13. Desa Jatimalang
14. Desa Temon
15. Desa Gayuhan
16. Desa Karangrejo
17. Desa Karanggede

2. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
3. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
      Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi;
      1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
      2. Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
      3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
      4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
      2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan

3. Pelaporan Pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

f. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

g. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

4. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
5. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
c. Melakukan pengelolaan data;
d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
b. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;
j. Memfasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
k. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
l. Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
m. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
n. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
o. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
p. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

d. Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Mengoordinir Pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Mengoordinir Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

g. Mengoordinir Kegiatan Pemberdayaan Desa;

h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaaan;

j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;

m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

n. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Desa dan/ atau Kelurahan;

o. Meningkakan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan/ atau Kelurahan;

p. Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana desa dan/ atau Kelurahan;

q. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di desa dan/ atau Kelurahan;

r. Melaksanakan Evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan;

s. Melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

t. Menyelenggarakan Lembaga Kemasyarakatan;

u. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

v. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;

w. Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

x. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pengelolaan sumber daya alam;

y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
(4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional;
(5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kantor Kecamatan Arjosari merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang Pemerintahan.

Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat/melayani masyarakat Kantor Kecamatan Arjosari terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Mengingat jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Arjosari hanya bersifat legalisasi, maka penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya menggunakan kuesioner (pendapat responden tentang Pelayanan Publik) yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayananan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Tahun 2023

Unsur ke	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan Pelayanan	3,32
2	Prosedur Pelayanan	3,31
3	Waktu Pelayanan	3,18
4	Tarif/Biaya Pelayanan	3,81
5	Kualitas Produk Pelayanan	3,28
6	Ketrampilan Petugas Pelayanan	3.30
7	Sikap Petugas Pelayanan	3,32
8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,82
9	Sarana Pengaduan	3,23
	NILAI KEPUASAN MASYARAKAT	84,08

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Arjosari, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata 3,39 (Tiga koma tiga sembilan). Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Arjosari setelah

dikonversikan (84,08) Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Arjosari adalah BAIK .

1. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

   Kecamatan Arjosari tahun 2023 melaksanakan 2 program RPJMD yaitu:

   1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tolok ukur
      - Tingkat pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD
   2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan, dengan tolok ukur:
      - Nilai indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan
      - Presentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayanan OPD dalam hal ini pelayanan publik pengantar KK, KTP dan surat legalitas lainnya berjalan dengan lancar. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya :

1. Kurang optimalnya sarana dan prasarana komunikasi (Wifi/ internet) guna menunjang lancarnya pelayanan publik;
2. Manajemen administrasi pemerintahan desa belum tertib;
3. Belum tertibnya manajemen PBB contoh: salah kelas di SPPT, kenaikan kelas PBB tidak sesuai di lapangan, SPPT double, SPPT ada tetapi tidak ada obyek tanah;

Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional yaitu standart pelayanan minimal tidak akan tercapai sesuai tujuan dan sasaran program dan kegiatan.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

TANTANGAN		1.	Penyediaan sarana dan prasarana perangkat lunak dan keras pada kantor Kecamatan	1.	Pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan tepat.
1.	Adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
2.	Persepsi dari masyarakat bahwa sampai saat ini kinerja aparatur pemerintah masih rendah	2.	Peningkatan disiplin dari segenap aparatur pemerintah	2.	Peningkatan kualitas ketrampilan bagi aparatur Kecamatan yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informatika (TI)
3.	Pelayanan Birokrasi yang masih tidak efektif	3.	Mewujudkan clean goverment dan good goverment	3.	Peningkatan kinerja PNS dalam pelayanan publik pada masyarakat.
4.	Belum terwujudnya clean govermen dan good goverment				
PELUANG					
1.	Kehidupan	1.	Adanya dukungan	1.	Penguatan

	demokrasi dan partisipasi masyarakat yang sudah berkembang		dari masyarakat untuk mewujudkan program otonomi daerah dan otonomi desa dalam kerangka demokrasi		fungsi koordinasi Kepala Desa dan Instansi tingkat Kecamatan
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah	2.	Memantapkan fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi OPD Kecamatan,Kepala desa dan Instansi tingkat kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas	2.	Peningkatan program sosialisasi kepada masyarakat tentang Administrasi Kependudukan,PKK,PBB,APBDes, Rastra dan Linmas.
3.	Mengelola potensi SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.	Pengelolaan potensi SDA secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	3.	Peningkatan anggaran operasional Kecamatan untuk memperlancar pelaksanaan tugas

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu :

1. Program pengelolaan dan administrasi perkantoran
   - Pemenuhan pengelolaan operasional administrasi perkantoran;
2. Pemenuhan sarana prasarana kegiatan pelayanan publik;

- Meningkatkan pembinaan administrasi desa dan perangkat desa;
- Meningkatkan Pembinaan permasalahan PBB;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja PD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026 telah disusun pada akhir Desember 2024. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dari hasil review rancangan awal RKPD, program dan Kegiatan untuk Kecamatan masih tetap. Dalam RKPD Kecamatan Arjosari, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini meliputi 6 kegitan yaitu:

   - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan ini berasal dari usulan desa melalui musrenbang desa yang belum dapat diusulkan melalui dana DD, ADD, dan dana BK, usulan tersebut merupakan usulan RKP Desa pada Tahun 2024.

Usulan kegiatan Musrenbang umumnya merupakan unsur penunjang untuk peningkatan pelayanan publik/masyarakat. Hal ini dikarenakan usulan pada Musrenbang merupakan usulan lebih berbentuk infrastruktur, sarana prasarana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Arjosari merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi, serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu Renja Kecamatan Arjosari berpedoman pada Renstra Kecamatan Arjosari dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Arjosari bersinergi dengan dokumen perencaanaan lain, baik nasional maupun tingkat provinsi, RPJMD Kabupaten Pacitan 2021–2026, dan RKPD Kabupaten Pacitan 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Arjosari.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Kecamatan Arjosari tahun 2021–2026 adalah “Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Arjosari dalam jangka waktu satu tahun, sampai dengan lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu Khusus (*Spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai *(attainable*), Nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kecamatan Arjosari sesuai dengan tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Arjosari;
2. Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di desa.

Dengan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Arjosari memiliki indikator sasaran/kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun;
2. Prosentase Terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun;
3. Prosentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Arjosari, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini meliputi 6 kegitan yaitu:

   - Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Arjosari pada tahun 2026 akan mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 2.313.521.973,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk 6 program dan 11 kegiatan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Rp. 2.008.215.673,00

   Program ini meliputi 6 kegiatan yaitu:

   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp. 12.313.800,00
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Rp. 1.734.549.673,00
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Rp. 18.732.000,00
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Rp. 88.231.800,00
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 144.071.000,00
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.317.400,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Rp. 26.143.000,00

   Program ini meliputi 2 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Rp. 26.143.000,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Rp. 124.864.900,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Rp. 124.864.900,00

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Rp. 66.022.000,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Rp. 566.022.000,00

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Rp. 31.662.300,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Rp. 31.662.300,00

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, Rp. 54.614.100,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Rp. 54.614.100,00

Secara rinci program dan kegiatan Kecamatan Arjosari tahun 2026 (Terlampir)

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2026 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Arjosari dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini diperlukan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arjosari.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Arjosari ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan berkelanjutan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Tahun 2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

CAMAT ARJOSARI

DIDIK DARMAWAN,S.STP,MM
Pembina Tk I
NIP. 198105022000121001

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN ARJOSARI KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN ARJOSARI						**2.313.521.973,00**							**2.736.865.268,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.313.521.973,00**							**2.736.865.268,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.313.521.973,00**							**2.736.865.268,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.008.215.673,00**						**-**	**2.273.534.268,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen			-	12.313.800,00			-	-	-	23 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	9.888.300,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	2.425.500,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen			-	1.734.549.673,00			-	-	-	59 Dokumen	1.904.509.007,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			14 Orang/bulan	1.732.310.684,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14 Orang/bulan	1.901.909.007,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Laporan			45 Laporan	2.238.989,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45 Laporan	2.600.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	18.732.000,00			-	-	-	100 %	15.325.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	18.732.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.325.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	88.231.800,00			-	-	-	-	138.854.761,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	34.235.800,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.031.761,00	KECAMATAN ARJOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.036.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	43.960.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	84.823.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	144.071.000,00			-	-	-	-	188.035.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	22.795.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	38.035.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	121.276.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.317.400,00			-	-	-	-	11.810.500,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit			14 Unit	10.317.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14 Unit	11.810.500,00	KECAMATAN ARJOSARI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**26.143.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 bulan			-	26.143.000,00			-	-	-	12 bulan	20.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	26.143.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**124.864.900,00**						**-**	**207.241.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	17 desa			-	124.864.900,00			-	-	-	17 desa	207.241.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37 Dokumen			37 Dokumen	23.337.900,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	87.241.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	101.527.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**66.022.000,00**						**-**	**80.512.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 bulan			-	66.022.000,00			-	-	-	12 bulan	80.512.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	32.000.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	25.275.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	34.022.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	55.237.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**31.662.300,00**						**-**	**68.534.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	17 desa			-	31.662.300,00			-	-	-	17 desa	68.534.500,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.534.500,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	19.662.300,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**56.614.100,00**						**-**	**87.043.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	17 desa			-	56.614.100,00			-	-	-	17 desa	87.043.500,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				34 Dokumen	7.377.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	11.414.500,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.043.500,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				5 Dokumen	4.563.600,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	4.209.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	29.050.000,00	Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.000.000,00	KECAMATAN ARJOSARI
	J U M L A H							**2.313.521.973,00**							**2.736.865.268,00**	

2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TEGALOMBO

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TEGALOMBO
Jalan Ponorogo Nomor 1 Tegalombo
Email:camat_tegalombo@pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun.

Renja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan di Tahun 2024 dan Tahun berjalan 2025 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Tegalombo, 01 Agustus 2025

Plt. CAMAT TEGALOMBO

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN TEGALOMBO

EDY WASANA,SE
Pembina
NIP 196805051989031013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Tegalombo adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pacitan sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Tegalombo , maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu ***"Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"*****,** Kecamatan Tegalombo dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Pacitan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo Tahun 2026 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pacitan guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Tegalombo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2020- 2024
n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
q. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2026.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalombo ;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pacitan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pacitan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pacitan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEGALOMBO

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pacitan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEGALOMBO

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEGALOMBO TAHUN LALU (2024) DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PACITAN.

Rencana Kerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025 KABUPATEN PACITAN

NAMA OPD : KECAMATAN TEGALOMBO

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Derah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Dengan Tahun 2023 atau (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaiaan Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kecamatan Pacitan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>BB (80,61)	BB (80,61)	79,81	72,20	90,46%	72,20	72,20	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	23 Dokumen	23 Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen	100%	59 Dokumen	59 Dokumen	100%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEGALOMBO

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing– masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanTegalombo dapat Dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pacitan			82,83	83,11	96	97	82,93	82,75	88,79	97	-

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TEGALOMBO

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tegalombo yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi;
b. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
c. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas
e. Kesadaran Masyarakat terhadap ketertiban umum masih rendah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangka Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN PACITAN

No.	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	**Kecamatan Tegalombo**				**2.135.022.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**				2.135.022.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.843.879.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				1.843.879.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.000.000		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.000.000
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	1 dokumen	1.000.000		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	1 dokum3n	1.000.000
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.547.645.003,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.547.645.003,00

		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32.280.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32.280.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.025.176,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.025.176,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	1.500.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Laporan	1.500.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.175.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.175.000,00
	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah					**Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**25.590.000,00**
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.600.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.600.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket	17.494.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket	17.494.000,00
	Administrasi Umum Perangkat daerah					**Administrasi Umum Perangkat daerah**				
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	40.704.491,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	40.704.491,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	40.010.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 oaket	40.010.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50.000.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	50.000.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**108.183.708,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**108.183.708,00**
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	31.605.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	31.605.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	79.182.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	79.182.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**216.099.400,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**216.099.400,00**
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.892.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.892.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.400.000,00		Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.400.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**41.357.800,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**41.357.800,00**
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	10.519.600,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	10.519.600,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	28.862.500,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	28.862.500,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				72.997.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				72.997.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				72.997.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				72.997.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	72.997.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	72.997.000,00

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	31 Dokumen	20.438.500,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	31 Dokumen	20.438.500,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata	12 laporan	26.799.142,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata	12 laporan	26.799.142,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN** PEMERINTAHAN UMUM			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.477.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.477.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	9.000.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	9.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	66 dokumen	20.000.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	66 dokumen	20.000.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	15.590.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	15.590.000,00

		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 dok	15.590.000,00		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 dok	15.590.000,00
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 dok	10.000.000		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 dok	10.000.000
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 dok	10.000.000		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 dok	10.000.000
		Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			Kab. Pacitan, Tegalombo Semua Kel /Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang ditetapkan tidak terlepas dari Usulan Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting. Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEGALOMBO

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Pacitan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan periode tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- Kebudayaan;
- Kreativitas dan inovasi;
- Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
- Perekonomian;
- Kesejahteraan rakyat;
- Pemberdayaan Mayarakat;
- Sarana dan Prasarana;

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Tegalombo sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Pacitan memiliki ruang lingkup tugas: meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyrakat Desa dan/atau Kelurahan.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Pacitan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan

Tegalombo yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Pacitan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TEGALOMBO

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Tegalombo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yaitu **Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima**, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pacitan dalam jangka 1 stahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Tegalombo dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Tegalombo.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Pacitan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tegalombo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL					
		TAHUN								TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3						4	5	6					
Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.31	3.35	3.3	3,45	3,50	3,55	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Pacitan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegalombo	85	87	88	89	90	91

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Tegalombo merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pacitan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
    3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
   3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
   3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekreataris Daerah

g. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

a) **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- ***Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah***

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pacitan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pacitan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu **"*Masyarakat Semakin SEJAHTERA BAHAGIA*"**, sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu *Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani*, yang

menjadi acuan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Pacitan. Selain Itu Kecamatan Tegalombo juga mengacu Tema Prioritas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan 2026 dengan tema "***Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial***"

- **Pencapaian SPM**

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

  Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

  Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pacitan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan yang ada di kecamatan Pacitan diukur dari hasil Survey Kepuasan masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik.

- **Menjaga Ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal**

  Kecamatan Pacitan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil di bidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah

maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pacitan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini sehingga Ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal terus terjaga dan berkelanjutan. Program terkait dengan ini yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- **SPBE**

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektorinik (SPBE) dalam rangka percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu Kecamatan pacitan mendukung pelaksanaan sistem SPBE agar mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta mendorong sistem pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Program terkait dengan ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- **Percepatan Penurunan Stunting**

  Bahwa dala rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistic, integrative dan berkualitas melalui Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan mulai dari Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten hingga Pemeintah Desa. Oleh sebab itu Kecamatan Pacitan dalam menyelenggarakan Pemerintahan mendukung dalam percepatan penurunan stunting melalui Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

- **Ketentraman dan Ketertiban Umum**

  Bahwa dala rangka mewujudkan Lingkungan yang nyaman aman tentram dan tertib, Kecamatan Pacitan mencanangkan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dilakukan sabagai upaya dalam menjaga kententraman dan Ketertiban Umum di wilayah sehingga tercipta suasana yang kondusif.

b) **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tegalombo Tahun 2026 adalah 6 Program dimana Kecamatan Tegalombo .

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tegalombo sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tegalombo dan melingkupi semua Desa. Adapun untuk Kelurahan Rencana Kerja Tergabung dalam Rencana Kerja Kecamatan Tegalombo .

- **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.**

  Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2026 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN TEGALOMBO KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN TEGALOMBO						2.135.022.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.135.022.000,00				
	7.01	KECAMATAN						2.135.022.000,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.843.879.000,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.100.000,00			-	-
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.535.879.000,00			-	-
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAI TARGI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dok
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Lapo
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Doku
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Lap
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 bul
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Pak
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAI TARGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Pak
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lap
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Uni
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	100 %			-
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	72.997.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	38.384.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	38.384.000,00		
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				31 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	23.384.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	94.695.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	94.695.000,00		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	49.695.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	19.477.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	19.477.000,00		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PACITAN

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PACITAN						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.448.485.060,00**							**5.465.400.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.012.946.660,00**						**-**	**5.047.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen			23 Dokumen	26.902.200,00			-	-	-	23 Dokumen	76.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	10.679.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	52.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.650.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	4.280.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			12 Laporan	1.151.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	5.140.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	-	59 Dokumen			59 Dokumen	4.480.504.013,00			-	-	-	59 Dokumen	4.408.500.000,00	KECAMATAN

		Perangkat Daerah														PACITAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Laporan			40 Orang/Laporan	4.473.748.213,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	40 Orang/Laporan	4.400.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen			34 Dokumen	4.154.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	34 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1.243.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Laporanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	24 Laporan			24 Laporan	1.357.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	25.590.000,00			-	-	-	100 %	36.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			4 Paket	23.590.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	33.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen			6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	114.309.539,00			-	-	-	100 %	153.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	7.366.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	30.855.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	31.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	33.547.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	48.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	3.534.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	9.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	28.206.839,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	28.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	108.183.708,00			-	-	-	100 %	87.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			5 Unit	48.572.712,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			4 Unit	48.177.996,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	54.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	11.433.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	23.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	216.099.400,00			-	-	-	100 %	242.900.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	52.892.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	48.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	3.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	159.807.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	188.900.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	41.357.800,00			-	-	-	80 %	44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			9 Unit	18.300.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	18.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			18 Unit	12.180.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit			1 Unit	10.877.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	1 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

			yang Dipelihara/Direhabilitasi						Semua Kel/Desa	(PAD)						
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**34.899.200,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	34.899.200,00			-	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	34.899.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**211.317.300,00**						**-**	**195.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	20 Desa			20 Desa	209.517.300,00			-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	20 Desa	193.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24 Dokumen			24 Dokumen	24.311.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	24 Dokumen	31.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	185.206.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	162.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	1.800.000,00			-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	5 Kelurahan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan			5 Laporan	1.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,	-	5 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

												Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif				
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**44.400.000,00**						**-**	**29.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Laporan			12 Laporan	44.400.000,00			-	-	-	12 Laporan	29.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	28.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	15.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	-	12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**61.275.000,00**						**-**	**57.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	25 Desa/Kel urahan			25 Desa/Kel urahan	61.275.000,00			-	-	-	25 Desa/Kel urahan	57.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan	27.075.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	34.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**83.646.900,00**						**-**	**112.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	20 Desa			-	83.646.900,00			-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	20 Desa	112.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	12 Dokumen			12 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	JATIM BER KAH-AMANAH	-	12 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

			rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Semua Kel/Desa	(PAD)		Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	32.350.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	53.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen			12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BER KAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			12 Laporan	22.496.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	28.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
		KELURAHAN SIDOHARJO						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.148.892.000,00**							**1.328.800.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**203.892.000,00**						**-**	**272.300.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	28.502.500,00			-	-	-	100 %	63.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	1.016.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			12 Paket	13.983.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	29.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	25.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	883.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	620.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	0,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	2.298.000,00			-	-	-	100 %	30.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			2 Unit	1.545.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	753.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	157.143.000,00			-	-	-	100 %	161.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	14.516.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	17.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	142.026.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	142.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	15.948.500,00			-	-	-	80 %	18.300.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	7.200.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	8.300.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			7 Unit	2.150.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	6.598.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	7.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**8.500.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	-	12 Laporan			-	8.500.000,00			-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN

		Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														SIDOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**936.500.000,00**						**-**	**1.045.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	936.500.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.045.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	265.000.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	736.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	780.500.000,00	KELURAHAN SIDOHARJO
		KELURAHAN PLOSO						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.138.248.000,00**							**1.389.500.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**153.248.000,00**						**-**	**230.500.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	3.800.000,00			-	-	-	100 %	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	3.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	22.660.100,00			-	-	-	100 %	58.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			4 Paket	10.233.100,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	26.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	8.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	21.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang	2 Paket			2 Paket	1.527.000,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN	-	-	-	2 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN

			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						Pacitan, Ploso	ASLI DAERAH (PAD)						PLOSO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	4.821.300,00			-	-	-	100 %	37.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	3.173.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			2 Unit	1.648.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	115.398.000,00			-	-	-	100 %	118.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	13.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	150.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	103.248.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	104.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80%	6.568.600,00			-	-	-	80 %	11.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	1.428.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			4 Unit	1.140.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	4.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**9.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00			-	-	-	12 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN	-	-	-	12 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Pacitan, Ploso	ASLI DAERAH (PAD)						PLOSO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**975.000.000,00**						**-**	**1.150.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	975.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.150.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			8 Unit	200.139.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			10 Pokmas / Ormas	774.861.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	900.000.000,00	KELURAHAN PLOSO
		KELURAHAN BALEHARJO						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**949.624.000,00**							**1.093.200.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**105.439.722,00**						**-**	**128.200.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	2.142.400,00			-	-	-	100 %	6.200.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	2.142.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	6.200.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	34.845.322,00			-	-	-	100 %	40.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	4.324.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			12 Paket	18.774.822,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	11.124.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	621.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	65.072.000,00			-	-	-	100 %	78.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	20.815.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.663.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	42.594.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	55.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	3.380.000,00			-	-	-	80 %	3.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			3 Unit	1.960.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			8 Unit	1.420.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**9.184.278,00**						**-**	**10.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	9.184.278,00			-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	9.184.278,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**835.000.000,00**						**-**	**955.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	835.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	955.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			5 Unit	348.833.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	486.167.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	555.000.000,00	KELURAHAN BALEHARJO

			Masyarakat di Kelurahan							DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN						
		KELURAHAN PUCANGSEWU						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**959.224.000,00**							**1.137.500.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**114.224.000,00**						**-**	**126.500.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			100 %	28.002.200,00			-	-	-	100 %	24.500.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	15.171.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	7.538.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	14.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	5.292.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	66.634.600,00			-	-	-	100 %	87.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	46.134.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	66.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	19.587.200,00			-	-	-	80 %	15.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			4 Unit	7.557.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			13 Unit	1.619.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	10.410.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	-	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00			-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN

		Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														PUCANGSEWU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**835.000.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			5 Kelurahan	835.000.000,00			-	-	-	5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			6 Unit	370.554.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	464.446.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	600.000.000,00	KELURAHAN PUCANGSEWU
		KELURAHAN PACITAN						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**955.624.000,00**							**1.088.800.000,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**107.846.500,00**						**-**	**124.800.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	23.391.400,00			-	-	-	100 % 100 %	31.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	1.910.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	7.370.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	3.043.100,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	11.067.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			100 %	8.677.500,00			-	-	-	100 %	2.800.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	8.677.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	2.800.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			100 %	58.018.500,00			-	-	-	100 %	73.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	17.998.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	19.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.620.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	38.400.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Laporan	52.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			80 %	17.759.100,00			-	-	-	80 %	18.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			6 Unit	11.550.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	11.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			8 Unit	3.100.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	4.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	3.108.900,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**7.164.000,00**						**-**	**14.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Laporan			12 Laporan	7.164.000,00			-	-	-	12 Laporan	14.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	7.164.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	14.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**840.613.500,00**						**-**	**950.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	5 Kelurahan			-	840.613.500,00			-	-	-	5 Kelurahan	950.000.000,00	KELURAHAN PACITAN

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			7 Unit	256.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			10 Pokmas / Ormas	584.613.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	700.000.000,00	KELURAHAN PACITAN
	J U M L A H							**10.600.097.060,00**							**11.503.200.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan **"Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 serta Evaluasi RKPD Kabupaten Pacitan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Tegalombo . Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pacitan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
   b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tegalombo Tahun 2026 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pacitan.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalombo Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.

3) Rencana Tindak Lanjut.
   Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pacitan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Tegalombo Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Kecamatan Tegalombo juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Renja Kecamatan Tegalombo ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Tegalombo serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Pacitan,01 Agustus 2025

PLT. CAMAT TEGALOMBO

EDY WASANA,SE

Pembina

NIP. 196805051989031013

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN NAWANGAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NAWANGAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Nawangan Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Nawangan, 10 Agustus 2025
CAMAT NAWANGAN

SUKARWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690603 199102 1 006

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 2
I.3. Maksud dan Tujuan 5
1.1 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NAWANGAN TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Nawangan 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Rkpd 17
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN NAWANGAN 20
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Nawangan 21
3.1 Program dan Kegiatan 21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NAWANGAN 35
BAB V PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua Stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan. Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Secara garis besar bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat daerah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nawangan Tahun 2025 dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi,

sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Desa. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing) , komprehensif, mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah. Kecamatan selaku Perangkat Daerah kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani desa dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Nawangan disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang baik, handal dan prima guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Nawangan selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manuaia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perubahan PD Kecamatan Nawangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan

1

Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

1

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

1

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perengkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Nawangan adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Nawangan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Rencana Kerja Kecamatan

1

Nawangan dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Nawangan adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Nawangan yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya renja PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

1

1.1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NAWANGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NAWANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NAWANGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Nawangan Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Nawangan adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah Desa.
3. Melakukan pegawasan terhadap pelansanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas /instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Kecamatan Nawangan tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Nawangan, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nawangan antaran lain :

2.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program ini memiliki indikator kinerja berupa nilai SAKIP perangkat daerah,

1

dengan target capaian nilai sebesar 73,65 dan realisasi mencapai 71.85. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program belum mencapai target, dengan capaian kinerja mencapai 97,55%. Dari sisi anggaran, alokasi sebesar 2.044.810.983,00 telah terealisasi sebesar 1.966.719.511,00 atau sekitar 96.18%. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh disiplin pelaksanaan kegiatan, penguatan perencanaan, serta komitmen terhadap pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan didukung oleh kegiatan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**73.65**	**2.044.810.983**	**71.85**	**1.966.719.511**	**97,55**	**96.18**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja PD	Dokumen	24	6.019.000,00	24	6.019.000,00	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59	**1.562.044.701**	59	1.491.325.361	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	3.454.875,00	2	3.454.875,00	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	100	195.481.642,00	100	195.481.642,00	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah	%	100	102.860.165,00	100	102.860.165,00	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	157.201.600,00	100	150.525.468,00	100%	**95.75%**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	80	**17.749.000,00**	80	**17.059.000,00**	100%	96.11%

Berdasarkan analisis data, Program dan Kegiatan Penunjang menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam pencapaian target kinerja fisik. Namun, terdapat beberapa celah pada sisi realisasi keuangan yang menjadi dasar untuk perumusan faktor penghambat dan strategi perbaikan

1

Faktor Penghambat

Secara umum, ditemukan faktor penghambat yang signifikan dalam hal pencapaian target kinerja (fisik). Laporan menunjukkan bahwa ada indikator kinerja yang belum dicapai dengan rasio 96,18. Nilai SAKIP bahkan belum melampaui target yang ditetapkan. Faktor penghambat yang teridentifikasi lebih bersifat administratif dan finansial, yaitu ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi belanja. Hal ini terlihat dari beberapa poin:

- **Efisiensi yang Belum Terpetakan:** Adanya sisa anggaran pada hampir semua kegiatan menunjukkan adanya efisiensi, namun belum tentu ini hasil dari perencanaan. Hal ini bisa menjadi penghambat jika sisa anggaran disebabkan oleh proses pengadaan atau pembayaran yang tidak tuntas.

- **Hasil Kinerja Internal:** Celah terbesar terdapat pada "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota", di mana Pencapainnya hanya mencapai 96,18%. Ini merupakan faktor penghambat utama karena menunjukkan adanya potensi masalah dalam perencanaan, kurang nya kontrol dan pemahaman dalam administrasi di lingkungkan kerja.

Strategi Perbaikan Ke Depan

Strategi ke depan tidak berfokus pada perbaikan kegagalan, melainkan pada optimalisasi keberhasilan dan efisiensi anggaran.

- **Analisis Belanja dan Optimalisasi Anggaran:** Melakukan analisis mendalam pada kegiatan dengan selisih realisasi anggaran terbesar, terutama pada Penyediaan Jasa Penunjang. Tujuannya adalah untuk memahami penyebab sisa anggaran—apakah karena keberhasilan negosiasi harga (efisiensi) atau karena ada komponen belanja yang tidak terlaksana. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menyusun pagu anggaran yang lebih akurat dan efisien di tahun berikutnya.
- **Mempertahankan Kinerja Fisik yang Tinggi:** Mengingat semua target kinerja fisik tercapai, strategi utamanya adalah menstandarkan proses dan alur kerja yang sudah berjalan efektif. Dokumentasikan praktik-praktik baik (*best practices*) yang ada untuk memastikan kinerja tinggi ini dapat dipertahankan secara konsisten di masa mendatang.

1

- **Peningkatan Berkelanjutan Nilai SAKIP:** dengan target Nilai SAKIP yang belum maksimal dari target 73,65 dengan capaian 71,85, strategi ke depan adalah melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi komponen penilaian yang masih bisa ditingkatkan. Dengan realisasi keuangan program sebesar 96,18%, ada ruang untuk mengaitkan efisiensi anggaran dengan akuntabilitas kinerja untuk meraih nilai SAKIP yang lebih tinggi lagi.

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

   Indikator keberhasilan program ini adalah persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan, dengan target dan realisasi kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar 110.000.000,00 telah direalisasikan sebesar 109.992.000,00 atau setara 99.99%. Program ini berjalan dengan baik dan efektif dalam melayani kebutuhan administrasi serta pelayanan publik. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal, meskipun terdapat sedikit selisih anggaran yang dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi. Ke depan, tantangan terbesarnya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi pelayanan, khususnya yang berbasis digital.

2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

   Program ini menargetkan persentase penyelenggaraan kegiatan sebesar 100% dan berhasil memenuhi target tersebut. Alokasi anggaran sebesar 215.300.000,00 telah terealisasi sebesar 215.300.000,00 atau 100%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berjalan secara efektif, partisipatif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat di desa dan kelurahan. Tingginya capaian ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan perangkat desa dalam mendukung program. Namun, agar dampak dari pemberdayaan dapat berkelanjutan, ke depan perlu difokuskan pada program-program yang memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan pembangunan sosial yang inklusif.

1

3. **PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
Program ini menunjukkan kinerja maksimal dengan capaian 100% sesuai target. Dari sisi anggaran Rp94.000.000,00dialokasikan dan terealisasi sebesar Rp93.997.000,00 atau sekitar 100%. Pelaksanaan program ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pihak kecamatan dengan unsur keamanan dan masyarakat. Kegiatan berjalan lancar dan berkontribusi terhadap kondisi sosial yang tertib dan aman. Faktor keberhasilannya meliputi komunikasi lintas sektor yang terbangun dengan baik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.

4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
Indikator kinerja berupa persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum berhasil mencapai 100% sesuai target. Dari sisi keuangan, Rp62.000.000,00 dialokasikan dan Rp61.996.000,00 telah terealisasi atau sekitar 99,99%. Program ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendukung kelancaran administrasi pemerintahan umum di kecamatan. Keberhasilan ini ditopang oleh penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang telah terintegrasi dan terstruktur. Ke depan, perlu didorong inovasi administratif seperti digitalisasi layanan dan pelaporan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
Program ini bertujuan untuk memantau seluruh desa di wilayah Kecamatan Nawangan, dengan indikator berupa persentase desa yang termonitoring. Target 100% berhasil dicapai, dan dari sisi anggaran, Rp117.930.655,00 dialokasikan serta terealisasi sebesar 117.927.655,00 atau 100%. Capaian ini menandakan bahwa fungsi pengawasan berjalan secara menyeluruh dan sistematis. Keberhasilan program ini ditunjang oleh sistem monitoring yang telah terstruktur dan pelibatan aktif perangkat desa. Untuk tahun mendatang, penguatan substansi pengawasan dan pemberian tindak lanjut dari hasil monitoring menjadi tantangan utama agar tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas pengawasan dapat terus ditingkatkan.

1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Nawangan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

Kantor Kecamatan Nawangan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat / melayani masyarakat Kantor Kecamatan Nawangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mengingat jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Nawangan hanya bersifat legalisasi, maka penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya menggunakan kuesioner (pendapat responden tentang Pelayanan Publik) yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayananan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

1

Tabel 2.2 Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian Pelayanan	3,49
2	Prosedur Pelayanan	3,43
3	Waktu Pelayanan	3,34
4	Tarif/Biaya Pelayanan	3,91
5	Kualitas Produk Pelayanan	3,53
6	Ketrampilan Petugas Pelayanan	3,55
7	Sikap Petugas Pelayanan	3,6
8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3.96
9	Sarana Pengaduan	3.4
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25		88,59

Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Kantor Kecamatan Nawangan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Hal ini terbukti dari ke-9 unsur pelayanan dengan Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Nawangan setelah dikonversikan (88,59) Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Nawangan adalah BAIK. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, gratis, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Nawangan

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan

1

eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Nawangan. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Nawangan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Nawangan masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain: (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nawangan ditentukan, isu- isu penting yaitu sebagai berikut;

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian

1

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;

(2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

(3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

(4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

(5). Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

1

2.4 Review Terhadap Rancangan Rkpd

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

b). Program prioritas pembangunan daerah dan

c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Nawangan berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Nawangan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026. Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

1

Tabel 2.3

Review Terhadap Rkpd Tahun 2026 Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

1

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Nawangan merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD provinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN NAWANGAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas pelayanan publik.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Nawangan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian urusan otomoni daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan,fasilitasi,penetapan,penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Nawangan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Nawangan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi,industri, jasa dan pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Nawangan

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Nawangan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan yaitu **Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima**, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Nawangan dalam jangka 1 tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Nawangan dalam setiap tahunnya adalah **"Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Nawangan"**. Tujuan dan sasaran Kecamatan Nawangan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Nawangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujud-nya Layanan Kecamatan yang Prima		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,20
	Meningkat-nya Pelayanan Kecamatan Nawangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nawangan	85	88	92	94	95	95

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Nawangan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Nawangan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
  b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
  c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
  d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi;
  a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
  b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
  a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;
  a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
  b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
  c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Camat Nawangan, selain menjalankan tugas pokoknya, juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Nawangan berpedoman pada visi Bupati Pacitan yaitu ”Masyarakat Semakin SEJAHTERA BAHAGIA”, misi ke-4 tentang penguatan birokrasi profesional, serta tema RKPD 2026 mengenai “Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial”.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, setiap program dirancang untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat, serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, yang diimplementasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Fokus pembangunan juga diarahkan pada aspek sosial-ekonomi

masyarakat. Ini diwujudkan melalui upaya menjaga ekosistem ekonomi lokal di sektor pariwisata dan kerajinan, mendukung percepatan penurunan stunting secara terintegrasi, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Upaya-upaya ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Secara keseluruhan, untuk tahun 2026 diusulkan sebanyak 6 program yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Nawangan. Rencana kerja untuk tingkat kelurahan telah diintegrasikan ke dalam rencana kerja kecamatan, dengan rincian pendanaan yang tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	15	16,00
		KECAMATAN NAWANGAN				**2.206.071.801,00**			**-**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.206.071.801,00**			**-**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.206.071.801,00**			**-**
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.973.873.201,00**		**-**	**-**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24 Dokumen	-	6.585.300,00		24 Dokumen	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	19 Dokumen	5.080.500,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	8.400.000,00
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	1.504.800,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	4.800.000,00

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	53 Dokumen	-	1.685.627.001,00		53 Dokumen	-
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.683.201.738,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	16 Orang/bulan	1.526.345.445,00
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	45 Laporan	2.425.263,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	16 Laporan	1.000.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	-	6.120.000,00		100%	-
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	1 Paket	13.200.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	96.309.600,00		100%	-
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	6.362.800,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	1 Paket	Rp13.200.000
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM /**	**TARGET AKHIR**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**	

		/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD					
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	15	16,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	70.275.800,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Rp72.500.000
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.671.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	2 Paket	Rp6.900.000
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp21.000.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	-	13.819.400,00		100%	-
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	13.819.400,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.890.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	142.043.100,00		100%	Rp144.150.000
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.114.700,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp9.150.000
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.792.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp10.000.000
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.136.400,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp125.000.000
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%	-	23.368.800,00		80%	Rp24.700.000
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	23.368.800,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	13 Unit	Rp24.700.000
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**	
					TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
1	2	3	4	5	8	9	10	15	16,00

2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**20.000.000,00**		**-**	**Rp75.750.000**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 Bulan	-	20.000.000,00		12 Bulan	Rp75.750.000
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp75.750.000
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**62.478.200,00**		**-**	**Rp46.056.000**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100%	-	62.478.200,00		100%	Rp46.056.000
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29 Dokumen	29 Dokumen	15.469.900,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	29 Dokumen	Rp18.856.000
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	47.008.300,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp27.200.000
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**50.798.600,00**		**-**	**Rp56.307.500**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Bulan	-	50.798.600,00		12 Bulan	Rp56.307.500
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	23.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp36.207.500
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**	
					TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
1	2	3	4	5	8	9	10	15	16,00
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	27.198.600,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp20.100.000

5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**53.774.800,00**		**-**	**43.238.000,00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	9 Desa	-	53.774.800,00		9 Desa	43.238.000,00
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	38.610.300,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20.100.000,00
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal							
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	15.164.500,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp23.138.000
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**45.147.000,00**		**-**	**-**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	9 Desa	-	45.147.000,00		9 Desa	-
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							

			0	18 Dokumen	18 Dokumen 0	3.240.000,00	-	18 Dokumen	12.150.000,00
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	21.890.500,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	19.118.962,00
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	17.000.000,00
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa							
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**	
					TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
1	2	3	4	5	8	9	10	15	16,00
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.700.000,00
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	15.816.500,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.600.000,00

	J U M L A H	**2.206.071.801,00**		**-**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	15	16,00
		KECAMATAN NAWANGAN				**2.206.071.801,00**			**-**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.206.071.801,00**			**-**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.206.071.801,00**			**-**
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.973.873.201,00**		**-**	**-**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24 Dokumen	-	6.585.300,00		24 Dokumen	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	19 Dokumen	5.080.500,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	8.400.000,00
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	4 Laporan	1.504.800,00	Kab. Pacitan, Nawangan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	4.800.000,00

			Perangkat Daerah						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	53 Dokumen	-	1.685.627.001,00		53 Dokumen	-

-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NAWANGAN

Seluruh Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nawangan untuk periode 2026 - 2030 secara fundamental disusun sebagai instrumen untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi Bupati, yaitu **"Masyarakat Semakin SEJAHTERA BAHAGIA"**. Dengan demikian, Renja berfungsi sebagai peta jalan strategis yang menerjemahkan visi tersebut ke dalam aksi yang nyata dan terarah di tingkat kecamatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Rencana Kerja dijabarkan secara sistematis menjadi kumpulan kegiatan yang terpadu dan terukur. Setiap kegiatan dirancang dengan komponen yang jelas, meliputi indikator kinerja spesifik, kelompok sasaran yang tepat, serta alokasi anggaran yang terencana. Penggunaan indikator kinerja menjadi sangat penting sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan, mengelola pelaksanaan secara efektif, dan mempermudah identifikasi serta penyelesaian masalah yang mungkin timbul di lapangan.

Kelompok sasaran dari seluruh kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Nawangan mencakup tiga elemen utama, yaitu aparatur internal kecamatan, instansi atau UPT sektoral terkait, serta berbagai elemen masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan. Salah satu poin yang menjadi prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nawangan adalah upaya untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga komitmen terhadap sistem dan prosedur yang berlaku dapat terus ditingkatkan.

Adapun skema pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nawangan bersumber utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan. Di samping itu, instansi vertikal lain yang beroperasi di wilayah kecamatan dapat memperoleh pendanaan dari sumber lain, seperti APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari kementerian atau lembaga induk masing-masing.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Nawangan memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Kidah-kaidah dalam penyusunan Renja Perubahan mempertimbangkan upaya yang harus ditempuh dengan tidak mudah dan akan mendapat banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Nawangan sebgaai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana kerja ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Nawangan , tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan Nawangan.

Rencana tindak lanjut Renja Perubahan ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Nawangan, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Nawangan telah mempunyai pedoman/acuan/arahan yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, sehingga bisa terukur dan terprogram dengan baik.

Nawangan, 10 Agustus 2025
CAMAT NAWANGAN

SUKARWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690602 199103 1 006

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BANDAR
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
TAHUN 2025

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BANDAR
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang – undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut jugamengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Program Kerja Kecamatan Bandar Tahun 2026 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Bandar dengan kemampuan untuk menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandar .

Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Bandar sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2021 – 2026 dan Renstra Kecamatan Bandar, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati PacitanTerpilihyaitu ***"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"***, Kecamatan Bandar dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang keempat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Renstra Kecamatan Bandar memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstraini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Tahun 2026 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bandar .

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

b. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

c. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

d. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2020- 2025

n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitantahun 2021 Nomor 10);

r. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1) Sebagai acuan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2) Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan

Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bandar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bandar

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bandar

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANDAR

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bandar

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANDAR

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Transparansi pemerintahan merupakan awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan tranparansi pemerintahan maka akan mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif, efisien dan hasil yang maksimal, sehingga keberhasilan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab akan dapat dicapai. Oleh karena itu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu keharusan bagi instansi pemerintah ditengah – tengah tuntutan publik saat ini, mengingat laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja yang dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja kegiatan, program maupun kebijakan yang dilaksanakan.

Kecamatan Bandar merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan mempunyai tugas menigkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan .

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANDAR TAHUN LALU (2024) DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANDAR .

Rencana Kerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tahun 2021 - 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran

dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil – hasil yang telah dicapai maka perlu di lakukan evaluasi secara menyeluruh.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 KABUPATEN PACITAN

NAMA OPD : KECAMATAN BANDAR

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Dengan Tahun 2023 atau (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2024 atau (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/8)
Unsur Kewilayahan									
Kecamatan Bandar									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah	>B	B/72,6	>B / 87.50	BB / 70,95	81,09	>B/87,50	BB/74,70	85,37 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	100%	23 dokumen	23 dokumen	100%

	Daerah								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	100%	59 dokumen	59 dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	1000%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	80%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang di laksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah layanan yang dilaksanakan**	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	dilaksanakan								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Desa yang di fasilitasi**	8 desa	9 Laporan	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentrraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan**	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa

	umum								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase desa yang termonitoring**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah desa yang termonitoring**	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANDAR

Pengukuran Kinerja Kegiatandan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat Kecamatan. Oleh karenanya Capaian Kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANDAR

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandar, maka permasalahan berdasarkan tugasdan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Bandar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
b. Belum tersedianya data –datayang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendaladalam perencanaan program dan kegiatan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan,sehingga sulitdalam pengukuran capaian kinerja;
d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaandari Pemerintah Daerah maupun legislatif;
e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangka Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan disusun melalui tahapan – tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses *Buttom-up* dan*Top-down*).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2024 yang diusulkan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebesar **Rp.2.599.457.595,00** dengan realisasi anggaran **Rp.2.502.207.148`,00** persentase realisasi anggaran sebesar **96.26 %.** Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehinggadapatsegera dilakukan koreksi terhadap penyimpanganarah pelaksanaan.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2026 Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan mengusulkan 6 Program dengan 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dan pada tahun 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan melaksanakan 6 Program dan 12 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan.

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13				
	KECAMATAN BANDAR						**2.142.289.000,00**							**152.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.142.289.000,00**							**152.000.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**2.142.289.000,00**							**152.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah***	**-**			**74,7**	**1.833.948.000,00**						**-**	**0,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	*Jumlah dokumen*	23 Dokumen			23 Dokumen	15.185.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*													
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.185.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	*Jumlah Dokume*	59 Dokum			59 Doku	1.564.939.900,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN

	Perangkat Daerah	*n Laporan Keuangan Perangkat Daerah*	en			men									BANDAR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.533.598.528,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				45 Laporan	31.341.372,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.05	Administrasi	*Prosentase*	10			100 %	21.210.800,00			-	-	-	-	0,0	KECAMATA

		Kepegawaian Perangkat Daerah	*pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian*	0 %											0	N BANDAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	21.210.800,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						70.500.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	27.500.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.072.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.340.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.732.800,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	-	-			-	54.039.500,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR

		n Daerah														
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	40.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Pemnuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan				4 Unit	14.039.500,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan***	**100 %**			**100%**	**33.356.000,00**						**-**	**42.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	*Pemenuhan Layanan Administrasi*	-			-	33.356.000,00			-	-	-	-	42.000.000,00	KECAMATAN BANDAR

		yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Kecamatan yang diselenggarakan*													
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	33.356.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi***	**100 %**			**100%**	**87.529.000,00**						-	**110.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang difasilitasi*	8 Desa			9 Desa	87.529.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen				28 Dokum	30.000.000,00	Kab. Pacitan,	DANA ALOKA	-	-	-		0,00	KECAMATAN

			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				en		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SI UMUM (DAU)						BANDAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	57.529.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan***	**100 %**			**100%**	**86.419.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya	*Pemenuhan*	12			12	86.419.000			-	-	-	-	0,00	KECAMAT

		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	bulan			bulan	,00								AN BANDAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13.892.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan				12 Laporan	72.527.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

			Tokoh Masyarakat													
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan***	**100 %**			**100%**	**30.407.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum*	8 Desa			8 Desa	30.407.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	15.407.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua	DANA ALOKASI	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

			Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)						
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa yang termonitoring***	**100 %**			**100%**	**70.630.000 ,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang termonitoring*	8 Desa			8 Desa	70.630.000 ,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				16 Dokumen	10.000.000 ,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	27.930.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	6.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANDAR

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan – kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Bandar guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut:

- Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Infrastruktur;
- Iklim investasi dan Iklim usaha;
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- Kebudayaan dan Pariwisata;
- Kreativitas daninovasi;
- Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
- Perekonomian;
- Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Bandar sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan memiliki peranyang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Bandar memiliki ruang lingkup tugas: Melaksanakan koordinasi menyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan dikecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban Kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Bandar didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas

pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Bandar yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Bandar telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANDAR

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Bandar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yaitu meningkatkan pelayanan publik yang inovatif, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun. Sehingga dalam Rencana Kerja Kecamatan Bandar Tahun 2026 ini yang diukur adalah Nilai Indek Kepuasan Masyarakat tahun lalu 2025 dan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat tahun berjalan tahun 2026 dan target yang akan dicapai pada tahun 2026.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bandar dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Bandar dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar , dan.
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Bandar beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bandar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2025)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2025)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif	Nilai Indek Pelayanan Publik Kecamatan	86,08	87,00	87,50	4,51	4,51	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlajh Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,08	87	87,50	96,00	96,00
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	80%	100%	100%	100%	100%
								Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan	80%	100%	100%	100%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Bandar merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah Kerja tertentu. Kecamatan Bandar sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas – tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a) **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- ***Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah***

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Bandar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Bandar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"**, sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, yang menjadi acuan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Bandar .

- ***Pencapaian MDGs***

  Millinium Development Golds merupakan kesepakatan dari negara – negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara – negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs.

  Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target – target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Bandar diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan Bandar melalui program **"Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum"**, dengan **"kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Sesuai Penugasan Kepala Daerah" dengan sub kegiatan **"Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan PerUndang - undang an".**

- ***Berantas Kemiskinan***

Sejalan dengan upaya negara - negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsidan Kabupaten sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandar. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun angggaran 2024 dan 2025 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- ***Pencapaian SPM***

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit Kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bandar diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan

yang ada di Kecamatan Bandar diukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah **"Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik"**.

- ***Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah***

  Kecamatan Bandar sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek – obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapat anasli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan Kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Bandar melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- ***Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.***

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bandar Tahun 2026 adalah 6 Program dengan 11 Kegiatan, adapun rincian program dan kegiatan tercantum pada lampiran ini

- ***Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.***

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bandar sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bandar dan melingkupi semua Desa / Kelurahan.

- ***Total Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.***

  Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2025 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13				
	KECAMATAN BANDAR						2.142.289.000,00							152.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.142.289.000,00							152.000.000,00	
7,01	KECAMATAN						2.142.289.000,00							152.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah*	-			74,7	1.833.948.000,00						-	0,00	

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*	23 Dokumen			23 Dokumen	15.185.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				4 Laporan	4.185.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

		Daerah						Desa								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah*	59 Dokumen			59 Dokumen	1.564.939.900,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.533.598.528,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				45 Laporan	31.341.372,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

			Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD													
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian*	100 %			100 %	21.210.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	21.210.800,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						70.500.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	27.500.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.072.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.340.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

	004															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.732.800,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.039.500,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	40.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Pemnuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan				4 Unit	14.039.500,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan***	**100 %**			**100%**	**33.356.000,00**						**-**	**42.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan*	-			-	33.356.000,00			-	-	-	-	42.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	33.356.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi***	**100 %**			**100%**	**87.529.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang difasilitasi*	8 Desa			9 Desa	87.529.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang				28 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

			Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	57.529.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan***	**100 %**			**100%**	**86.419.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa	*Pemenuhan Upaya Penyelengga*	12 bulan			12 bulan	86.419.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR

		n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum*													
	7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Lapor an	13.892.00 0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMA TAN BANDAR
	7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh				12 Lapor an	72.527.00 0,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMA TAN BANDAR

			Agama dan Tokoh Masyarakat													
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan***	**100 %**			**100%**	**30.407.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum*	8 Desa			8 Desa	30.407.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	15.407.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa yang termonitoring***	**100 %**			**100%**	**70.630.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang termonitoring*	8 Desa			8 Desa	70.630.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen				16 Doku	10.000.000,00	Kab. Pacitan,	DANA ALOK	-	-	-		0,00	KECAMATAN

			yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				men		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASI UMUM (DAU)						BANDAR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	27.930.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan				2 Dokumen	6.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

			Perangkat Desa													
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BANDAR

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Bandar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan **"Masyarakat Pacitan BAHAGIA dan SEJAHTERA"** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar yangmemuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bandar . Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bandar didalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan satu tahunkedepan, makaperlu diperhatikan hal-hal sebagaiberikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dank etersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Kecamatan Bandar berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran,program dan kegiatanyang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
   b. Kecamatan Bandar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bandar Tahun 2026 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bandar Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.
3) RencanaTindak Lanjut.

   Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar selainsebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 jugaberfungsisebagaisarana peningkatan kinerja Kecamatan Bandar .Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bandar Tahun 2026 tentu juga di pengaruhi oleh sumbe rpembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuaidengan anggaranyang tersedia.Disamping itu Renja Kecamatan Bandar juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Bandar ini dapat menjadi acuan Rencana Pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Bandar serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 01 Agustus 2025
CAMAT BANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN BANDAR

WURIYANTO,S.Pd.M.Sc
Pembina TK I
NIP.19700720 199803 1 007

2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN TULAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN TULAKAN

Alamat : Jalan Raya Tulakan No. 06 ,Ponsel 0821 3270 6274
laman : www.tulakan.pacitankab.go.id E-mail : camat_tulakan@pacitankab.go.id

PENETAPAN RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, merupakan ikhtisar Rencana Kerja yang akan dicapai pada tahun 2026 sebagaimana terlamapir.

Rencana Kerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kineja pada akhir tahun anggaran 2026.

Tulakan, 01 Agustus 2025
CAMAT TULAKAN

MENYETUJUI
BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

DJOKO HARIJANTO, SP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681222 199703 1 001

PARAF HIERARKI		
JPT PRATAMA	**PARAF**	**TANGGAL**
1.		
2.		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
1.		
2.		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga Rencana Kinerja Kecamatan Tulakan dapat tersusun sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kinerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai amanat pasal 138 ayat (1) bahwa Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada RKPD.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan recana kinerja tahunan dimaksud.

Semoga rencana kinerja tahunan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tulakan, 01 Agustus 2025
Camat Tulakan
Kabupaten Pacitan

DJOKO HARIJANTO, SP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681222 199703 1 001

PARAF HIERARKI		
JPT PRATAMA	**PARAF**	**TANGGAL**
1.		
2.		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
1.		
2.		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN KERJA I

KATA PENGANTAR Ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tulakan 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan 17

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulakan 29

2.4. Review terhadap RKPD 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN 41

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tulakan 42

3.3. Program dan Kegiatan 44

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TULAKAN ... 55

4.1. Rencana Kerja dan Kegiatan..... 55

4.2. Indikator Kinerja..... 55

4.3. Kelompok Sasaran 55

4.4 Pendanaan Indikatif 56

BAB V PENUTUP 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Tulakan adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Tulakan, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tulakan sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Tulakan, maka

untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu ***"Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"***, Kecamatan Tulakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Tulakan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Tahun 2026 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tulakan guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Tulakan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2020- 2024
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2026.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulakan;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Tulakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Kecamatan Tulakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tulakan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TULAKAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TULAKAN TAHUN LALU (2024) DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TULAKAN.

Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat s/d Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/ Kegiatan (*Output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat) Daerah Tahun 2026
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**2.707.011.785,00**	**2.578.583.745,00**	**95,26%**	**2.428.950.073**	**980.886.588,00**	**40.38%**	**2.409.015.000,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD**	**13.573.635,00**	**12.058.965,00**	**88,84%**	**15.247.011,00**	**3.121.818,00**	**20.47%**	**17.143.710,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.124.985,00	1.106.500,00	96,36%	13.479.336,00	-	-	14.576.035,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	397.380,00	319.000,00	80,28%		-	-	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	392.940,00				-	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	374.625,00	319.000,00	85,15%		-	-	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	368.520,00				-	-	-

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.471.185,00	10.314.465,00	98,50%		-	-	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	444.000,00			1.767.675,00	0	0	2.567.675,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**1.993.678.968,00**	**1.918.363.786**	**96,22%**	**1.906.404.579,00**	**847.844.679,00**	**44.48%**	**1.901.404.579,00**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.974.632.334,00	1.903.057.226,00	96,38%	1.890.811.767,00	244.332.722	44.65%	1.890.811.767,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	722.722,00				0	0	10.592.812,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.323.880,00	15.306.560,00	83,53%	15.592.812,00	3.551.957,00	22.78%	-
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**41.558.400,00**	**41.540.640,00**	**99,96%**	**47.541.633,00**	**0**	**0**	**48.156.590,00**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	41.558.400,00	41.540.640,00	99,96%	47.541.633,00	0	0	48.156.590,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**282.433.140,00**	**249.514.309,00**	**88,34%**	**145.987.889,00**	**38.309.200,00**	**26.24%**	**142.937.374,00**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	213.478.200,00	210.984.198,00	98,83%	87.273.953,00	21.314.190,00	24.42%	93.273.953,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	15.486.720,00	15.484.500,00	99,99%	15.520.686,00	5.141.010,00	33.12%	15.520.686,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	13.433.220,00	12.300.611,00	91,57%	10.073.250,00	5.814.000,00	57.72%	8.812.735,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.035.000,00	10.745.000,00	26,84%	33.120.000,00	6.040.000,00	18.24%	25.330.000,00

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan**	**208.321.190,00**	**194.878.775,00**	**93,55%**	**219.122.290,00**	**76.834.711,00**	**35.06%**	**220.623.390,00**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.662.590,00	20.112.399,00	72,71%	21.938.890,00	8.177.836,00	37.28%	23.439.990,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	180.658.600,00	174.766.376,00	96,74%	197.183.400,00	68.656.875,00	34.82%	197.183.400,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**149.571.045,00**	**144.345.170,00**	**96,51%**	**94.646.671,00**	**14.736.180,00**	**15.57%**	**78.749.357,00**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.438.315,00	30.240.755,00	85,33%	37.277.582,00	6.352.350,00	17.04%	35.136.311,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	114.132.730,00	114.104.415,00	99,98%	57.369.089,00	8.383.830,00	14.61%	43.613.046,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan**	**46.196.980,00**	**35.809.520,00**	**77,51%**	**23.918.556,00**	**2.813.970,00**	**11.76%**	**17.439.000,00**

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**46.196.980,00**	**35.809.520,00**	**77,51%**	**23.918.556,00**	**2.813.970,00**	**11.76%**	**17.438.556,00**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP, dan Surat Legalitas lainnya	46.196.980,00	35.809.520,00	77,51%	23.918.556,00	2.813.970,00	11.76%	17.439.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Cakupan Desa yang difasilitasi**	**198.737.205,00**	**174.168.035,00**	**87,64%**	**176.549.948,00**	**20.789.810,00**	**11.78%**	**137.700.000,00**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**198.737.205,00**	**174.168.035,00**	**87,64%**	**176.549.848,00**	**20.789.810,00**	**11.78%**	**137.700.000,00**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	12.569.970,00	11.342.500,00	90,23%	9.635.241,00	6.365.000,00	66.06%	-
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	13.635.241,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Aktualisasi kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Jumlah Pembinaan PKK Desa	186.167.235,00	162.825.535,00	87,46%	166.914.607,00	14.424.810,00	8.64%	124.064.759,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**109.922.795,00**	**94.030.700,00**	**85,54%**	**77.844.506,00**	**9.480.000,00**	**12.18%**	**64.885.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Rapat/Pembinaan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat**	**109.922.795,00**	**94.030.700,00**	**85,54%**	**77.844.506,00**	**9.480.000,00**	**12.18%**	**64.885.000,00**

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	32.885.000,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat/Pembinaan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	109.922.795,00	94.030.700,00	85,54%	77.844.506,00	9.480.000,00	12.18%	32.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentse Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**133.661.830,00**	**128.165.005,00**	**95,89%**	**41.058.937,00**	**15.890.000,00**	**38.70%**	**33.139.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**133.661.830,00**	**128.165.005,00**	**95,89%**	**41.058.937,00**	**15.890.000,00**	**38.70%**	**33.139.000,00**
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Seusai Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan	133.661.830,00	128.165.005,00	95,89%	41.058.937,00	15.890.000,00	38.70%	17.139.000,00
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0,00		0,00%	0,00	0,00	0	16.000.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Persentase Desa yang Termonitoring**	**116.844.045,00**	**99.496.450,00**	**85,15%**	**45.232.154,00**	**6.000.000,00**	**13.26%**	**45.232.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**116.844.045,00**	**99.496.450,00**	**85,15%**	**45.232.154,00**	**6.000.000,00**	**13.26%**	**45.232.000,00**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000.000,00**

	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes perubahan dan Penarikan PBB	116.844.045,00	99.496.450,00	85,15%	45.232.154,00	6.000.000,00	13.26%	10.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0**	**9.232.000,00**
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0**	**8.000.000,00**
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	8.000.000,00

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat diketahuai terhadap Hasil Renja Kecamatan Tulakan 2025, berikut analisis dari tabel tersebut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Program ini mencatat capaian tertinggi di antara seluruh program yang ada. Meskipun belum mencapai 50%, ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dan penyerapan anggaran relatif lebih baik dibandingkan program lainnya. Hal ini dikarenakan realisasi baru berjalan di semester 1.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :

   Hampir setara dengan program penunjang, program ini juga menunjukkan pelaksanaan yang cukup progresif. Capaian mendekati 40% menunjukkan adanya upaya pelaksanaan yang baik diawal tahun.

3. Selain kedua Program tersebut diatas Capaian Kecamatan Tulakan masih dalam kategori rendah. Dikarenakan kegiatan baru berjalan di awal tahun. Untuk mempercepat realisasi kegiatan akan dilaksanakan dipertengahan tahun sd akhir tahun.

   Faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu fasilitasi yang belum memadai. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah Perubahan anggaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.

   Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran.

   Organisasi Perangkat Daerah berusaha melaksanakan agenda kerja penyusunan RKPD tahun 2026, forum perangkat daerah, Musrenbang SKPD tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2026 dengan sebaik-baiknya .

   Kecamatan Tulakan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi ditentukanlah beberapa hal antara lain adalah:

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company / Coorperate Social Resposipilioty (CSR) , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya kualitas pelayanan secara prima adalah faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang akan mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pelayanan di daerah Kecamatan Tulakan. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Mengenai arah kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat dan Aset Pertanahan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TULAKAN

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Tulakan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Tulakan membawahi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Desa Jetak
2. Desa Nglaran
3. Desa Wonoanti

4. Desa Padi
5. Desa Jatigunung
6. Desa Kalikuning
7. Desa Gasang
8. Desa Ngile
9. Desa Bubakan
10. Desa Losari
11. Desa Tulakan
12. Desa Bungur
13. Desa Kluwih
14. Desa Ngumbul
15. Desa Wonosidi
16. Desa Ketro
17. Desa Ketro Harjo

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
2. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.

4. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
3. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
4. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
5. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
6. melaksanakan pengelolaan anggaran;
7. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
8. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
9. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
2. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
3. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
4. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
5. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
6. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
2. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
3. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;

4. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
5. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
3. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
5. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
7. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;

8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
9. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
10. Melaksanakan urusan yang di limpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
11. Fasilitasi Kerja sama antar kecamatan;
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
13. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
14. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
15. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
16. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
18. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
19. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
20. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
21. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
22. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
23. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
24. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
25. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
8. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
9. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
10. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
3. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
4. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
6. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
9. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
10. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
14. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
15. Evaluasi Kelurahan;

16. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
20. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
21. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
22. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
23. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Kelompok jabatan fungsional dapat di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kantor Kecamatan Tulakan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang

Pemerintahan. Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat / melayani masyarakat Kantor Kecamatan Tulakan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan dapat Dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tulakan	Peningkat-an kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Layanan Kecamatan Yang Prima	85.9	86.4	86.9	87.4	88.68	86.44	90.00	92.00	

Selama periode tahun 2022 hingga 2025, kinerja pelayanan kecamatan Tulakan menunjukkan tren positif yang ditandai dengan peningkatan capaian dalam pelayanan publik. Pelayanan administrasi pemerintahan secara umum mengalami perbaikan dari sisi kuantitas dan kualitas, yang tercermin dari meningkatnya jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu serta adanya konsistensi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun-tahun terakhir.

Inovasi pelayanan mulai tumbuh di kecamatan Tulakan, meskipun masih bersifat sporadis dan belum terstandarisasi. Upaya jemput bola serta pengembangan layanan langsung kepada masyarakat juga menunjukkan intensifikasi kegiatan, yang memperkuat aksesibilitas layanan, terutama di wilayah terpencil.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Tulakan secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Menghadapi tahun 2026, arah kebijakan pelayanan kecamatan Tulakan perlu difokuskan pada penguatan layanan dasar berbasis digital, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pelayanan, replikasi inovasi unggulan yang terukur dan aplikatif, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.

Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kecamatan Tulakan dapat semakin adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan tujuan

pembangunan daerah yang menekankan pelayanan publik yang prima dan merata.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TULAKAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tulakan yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Optimal
   Masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan administratif yang lambat, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi
   Jumlah dan kapasitas ASN belum sepenuhnya memadai, terutama dalam aspek penguasaan teknologi, analisis data perencanaan, dan pelayanan berbasis digital.
3. Belum Optimalnya Koordinasi dengan Pemerintah Desa
   Fungsi kecamatan sebagai koordinator pembangunan desa belum berjalan maksimal. Monitoring, pembinaan, dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa masih sporadis.
4. Minimnya Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi
   Pelayanan publik di Kecamatan Tulakan masih bersifat konvensional, belum berbasis digital atau integrasi aplikasi pelayanan, yang menghambat efektivitas dan efisiensi kerja.
5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
   Forum Musrenbang masih bersifat formalitas. Keterlibatan masyarakat dalam pengusulan program/kegiatan belum mencerminkan kebutuhan riil dan kontekstual wilayah.
6. Kesiapan Kelembagaan Menghadapi Transformasi Digital
   Kecenderungan ke depan mengarah pada digitalisasi administrasi pemerintahan, sementara kesiapan sistem,

SDM, dan budaya kerja di tingkat kecamatan masih rendah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangka Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN TULAKAN KAB. PACITAN

TAHUN 2026

RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**2026**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**2026**	**LOKASI**
	KECAMATAN			**Rp 2.707.410.000,00**	**KECAMATAN**			**Rp 2.707.410.000,00**	**KEC. TULAKAN**
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	**Rp 17.439.000,00**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	**Rp 17.439.000,00**	**KEC. TULAKAN**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan	Rp 17.439.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan	Rp 17.439.000,00	KEC. TULAKAN
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 17.439.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 17.439.000,00	KEC. TULAKAN
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase cakupan desa yang difasilitasi	100 %	**Rp 137.700.000,00**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase cakupan desa yang difasilitasi	100 %	**Rp 137.700.000,00**	**KEC. TULAKAN**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	17 Desa	Rp 137.700.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	17 Desa	Rp 137.700.000,00	KEC. TULAKAN
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37 Dokumen	Rp 13.635.241,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37 Dokumen	Rp 13.635.241,00	KEC. TULAKAN
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**12 Laporan**	**Rp 124.064.759,00**	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**12 Laporan**	**Rp 124.064.759,00**	**KEC. TULAKAN**
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	presentase Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	**Rp 64.885.000,00**	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	presentase Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	**Rp 64.885.000,00**	**KEC. TULAKAN**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp 64.885.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp 64.885.000,00	KEC. TULAKAN
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 32.885.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 32.885.000,00	KEC. TULAKAN
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Rp 32.000.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Rp 32.000.000,00	KEC. TULAKAN

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Rp	33.139.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Rp	33.139.000,00	KEC. TULAKAN
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	17 Desa	Rp	33.139.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	17 Desa	Rp	33.139.000,00	KEC. TULAKAN
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	Rp	17.139.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	Rp	17.139.000,00	KEC. TULAKAN
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Rp	16.000.000,00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Rp	16.000.000,00	KEC. TULAKAN
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100 %	Rp	45.232.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100 %	Rp	45.232.000,00	KEC. TULAKAN
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	17 Desa	Rp	45.232.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	17 Desa	Rp	45.232.000,00	KEC. TULAKAN
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	Rp	10.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	Rp	10.000.000,00	KEC. TULAKAN
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Rp	10.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Rp	10.000.000,00	KEC. TULAKAN
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	Rp	9.232.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	Rp	9.232.000,00	KEC. TULAKAN
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Rp	8.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Rp	8.000.000,00	KEC. TULAKAN
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	Rp	8.000.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	Rp	8.000.000,00	KEC. TULAKAN
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	73,45	Rp	2.409.015.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	73,45	Rp	2.409.015.000,00	KEC. TULAKAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Rp	17.143.710	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Rp	17.143.710	KEC. TULAKAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Rp	14.576.035	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Rp	14.576.035	KEC. TULAKAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp	2.567.675	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp	2.567.675	KEC. TULAKAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	53 Dokumen		1.901.404.579	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	53 Dokumen		1.901.404.579	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	Rp	1.890.811.767	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	Rp	1.890.811.767	KEC. TULAKAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	Rp	10.592.812	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	Rp	10.592.812	KEC. TULAKAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	Rp	48.156.590	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	Rp	48.156.590	KEC. TULAKAN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp	48.156.590	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp	48.156.590	KEC. TULAKAN

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	Rp	142.937.374	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	Rp	142.937.374	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Rp	93.273.953	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Rp	93.273.953	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	15.520.686	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	15.520.686	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	8.812.735	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	8.812.735	KEC. TULAKAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	25.330.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	25.330.000	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	Rp	220.623.390	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	Rp	220.623.390	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp	23.439.990	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp	23.439.990	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	197.183.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	197.183.400	KEC. TULAKAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80 %	Rp	78.749.357	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80 %	Rp	78.749.357	KEC. TULAKAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Rp	35.136.311	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Rp	35.136.311	KEC. TULAKAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Rp	43.613.046	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Rp	43.613.046	KEC. TULAKAN

Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Tahun 2026 disusun untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja kecamatan melalui berbagai program dan kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta koordinasi lintas sektor.

Secara umum, rencana kerja tahun 2026 mencakup enam program yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Setiap program telah dirinci dengan indikator kinerja, target capaian, dan alokasi anggaran yang terukur. Jumlah total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung seluruh kegiatan mencapai Rp 2.707.410.000. Sebagian besar kegiatan ditujukan untuk memastikan kualitas administrasi pemerintahan desa, sinergitas kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, pelayanan surat menyurat, dan fasilitasi penyusunan perencanaan desa mendapat prioritas penuh, yang tercermin dari frekuensi laporan bulanan dan target kepuasan masyarakat sebesar 100%. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan kelembagaan desa dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi pembangunan.

Dalam bidang ketertiban umum, kegiatan bersifat koordinatif dengan instansi vertikal seperti Kepolisian dan TNI untuk menciptakan keamanan wilayah. Hal ini juga diimbangi dengan kegiatan pengawasan aset, pendataan kependudukan, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah secara akuntabel dan berkala.

Terdapat pula penguatan fungsi perencanaan, pelaporan, penyediaan logistik, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi dasar operasionalisasi kegiatan perangkat daerah kecamatan.

Dengan struktur perencanaan yang terukur dan responsif terhadap kebutuhan lokal, rencana kerja ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan Kecamatan Tulakan serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan secara keseluruhan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tulakan merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah ditingkat dusun. Hasil dari Musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
3. Menyepakato pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 17 (tujuh belas) desa di wilayah Kecamatan Tulakan tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan

Tulakan Tahun 2026 seperti nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2026
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01 KECAMATAN										
1	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73.95								
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD	24 Dokumen					
							7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	53 Dokumen					
							7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	19 orang/bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%					
							7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi

				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%					
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%					
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%					
							7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 unit	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	Kecamatan Tulakan	Tinggi
2	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100%								

				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan					
							7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase cakupan desa yang difasilitasi	100%								
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	17Desa					
							7.01.03.2.01.01 Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%								
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan					
							7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi

	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%								
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	17 Desa					
							7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang termonitoring	100%								
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	17 Desa					
							7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Tulakan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan periode tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Infrastruktur;
- Iklim investasi dan Iklim usaha;
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- Kebudayaan dan Pariwisata;
- Kreativitas dan inovasi;
- Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
- Perekonomian;
- Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Tulakan sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah

Kecamatan Tulakan memiliki ruang lingkup tugas: meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyrakat Desa dan/atau Kelurahan.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Tulakan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Tulakan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Tulakan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TULAKAN

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Tulakan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu **Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima**, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tulakan dalam jangka 1 stahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Tulakan dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Tulakan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Tulakan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tulakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya layanan Kecamatan yang Prima		Indeks Pelayanan Publik	3.80	3.90	4.00	4.20	4.40	4.50	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan, Kecamatan Tulakan menetapkan visi untuk "Terwujudnya Kecamatan yang Prima" melalui peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan yang relevan.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, digunakan dua indikator utama, yaitu **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Target IPP menunjukkan tren peningkatan dari **3,80 pada tahun 2025 hingga 4,50 pada tahun 2030**, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam perbaikan sistem, prosedur, dan kualitas layanan. Sementara itu, IKM juga ditargetkan mengalami peningkatan signifikan dari **90 pada tahun 2025 menjadi 96 pada tahun 2030**, menandakan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tulakan.

Secara keseluruhan, sasaran ini menggambarkan komitmen Kecamatan Tulakan untuk memberikan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan berkualitas, demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan casecading RPJMD (Desain Logical Framework) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah

Kecamatan dan pohon kinerja Kecamatan Tulakan. Berikut ini disajikan gambaran, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Tulakan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tulakan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
    2. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
    2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;

1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
   3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekreataris Daerah
g. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- ***Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah***

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Tulakan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tulakan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu **"PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA",** sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani, yang menjadi acuan program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tulakan.

- ***Pencapaian MDGs***

  Millinium Development Golds merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih di bawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs.

- ***Berantas Kemiskinan***

  Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh

kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tulakan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2025 dan 2026 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi di mana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- ***Pencapaian SPM***

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari

dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Tulakan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan yang ada di Kecamatan Tulakan diukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah **"Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik"**.

- ***Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah***

  Kecamatan Tulakan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Tulakan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- ***Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.***

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tulakan Tahun 2026 adalah 6 Program dengan 11 Kegiatan, adapun rincian program dan kegiatan tercantum pada lampiran ini.

- ***Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.***

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tulakan sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Tulakan dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

- ***Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.***

Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2025 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
	Kecamatan Tulakan						**2.707.410.000**		
	UNSUR KEWILAYAHAN						**2.707.410.000**		
	KECAMATAN						**2.707.410.000**		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	73,45			73,45	2.409.015.000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen			24 Dokumen	17.143.710		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	14.576.035	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2.567.675	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen			53 Dokumen	1.901.404.579		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 orang/bulan	1.890.811.767	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				31 Laporan	10.592.812	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %			100 %	48.156.590		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	48.156.590	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %			100 %	142.937.374		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	93.273.953	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.520.686	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.812.735	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25.330.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %			100 %	220.623.390		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.439.990	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	197.183.400	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80 %			80 %	78.749.357		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	35.136.311	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	43.613.046	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100 %			100 %	17.439.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan			12 Bulan	17.439.000		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	17.439.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase cakupan desa yang difasilitasi	100 %			100 %	137.700.000		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	17 Desa			17 Desa	137.700.000		
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				37 Dokumen	13.635.241	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	124.064.759	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	64.885.000		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan			12 Bulan	64.885.000		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	32.885.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	32.000.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 %			100 %	33.139.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	17 Desa			17 Desa	33.139.000		
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				12 Laporan	17.139.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	16.000.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100 %			100 %	45.232.000		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	17 Desa			17 Desa	45.232.000		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				34 Dokumen	10.000.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
		Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	9.232.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
		Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	8.000.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	8.000.000	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
							2.707.410.000		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TULAKAN

4.1. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Tulakan selama 5 tahun dari tahun(2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun ke depan .

Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya .

4.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tulakan adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan

Kecamatan. Dan salah satu poin pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra Kecamatan Tulakan tahun 2025-2029.

4.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tulakan bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan, UPT TK/SD, UPT kegunaan bisa mendapatkan dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari instansi induknya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulakan Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan **"Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 serta Evaluasi RKPD Kabupaten Pacitan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Tulakan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Tulakan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
   b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tulakan Tahun 2026 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pacitan.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.
3) Rencana Tindak Lanjut.

   Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tulakan.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Tulakan Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Kecamatan Tulakan juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Renja Kecamatan Tulakan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Tulakan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Tulakan, 01 Agustus 2025
Camat Tulakan
Kabupaten Pacitan

DJOKO HARIJANTO, SP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681222 199703 1 001

PARAF HIERARKI		
JPT PRATAMA	PARAF	TANGGAL
1.		
2.		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
1.		
2.		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN NGADIROJO

(2 0 2 6)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jalan Raya Ngadirojo Nomor 50 Telepon (0357) 441149
N G A D I R O J O

PENETAPAN KINERJA

KANTOR CAMAT NGADIROJO

KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Kantor Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan, merupakan ikhtisar Rancangan Awal Rencana Kerja yang akan di capai pada tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Rancangan Awal Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2026.

Ngadirojo, 01 Agustus 2025
CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIJONO, S.Sos. M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19720520 199203 1 020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan tindak lanjut surat edaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 188/3259/408.53/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 kabupaten Pacitan .

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Ngadirojo . Apabila dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ngadirojo, 01 Agustus 2025

CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19720520 199203 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	3
DAFTAR ISI		.....	4
BAB I	PENDAHULUAN		
	I.1 LATAR BELAKANG	.....	5
	1.2 LANDASAN HUKUM	.....	6
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	.....	8
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN		9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
	2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	.....	10
	2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD	.....	19
	2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	.....	28
	2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	.....	29
	2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	.....	38
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	.....	42
	3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD	.....	43
	3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	.....	43
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	48
BAB V	PENUTUP	.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 126 ayat (1) dan (2) tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perwujudan akuntabilitas pemerintah tersebut merupakan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, cepat dan legitimate dapat terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sehingga dapat tercipta sebuah *Good Governance.*

Adapun wujud akuntabilitas pemerintahan dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah terdapat suatu tahapan yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah yaitu perencanaan kinerja yang merupakan penyusunan rencana kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang bersifat tahunan. Pada kinerja rencana tahunan menetapkan pula rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan dan penyusunan kebijakan anggaran.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Ranwal Renja Perangkat daerah Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
   1. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
   2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
   3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
   4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024, tentang Pemerintah Daerah ; (Lembaran Negara RI tahun 204 Nomor : 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
   5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ;
   6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaranan Negara RI Nomor 4817);
   8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara RI tahun 2026 Nomor 114);
   9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2027 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2027 Nomor 73, Tambahan Lembarab Negara RI Nomor 6041);
   10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2028 Tentang Standar Pelyanan Minimal (SPM) Lembaran Neraga RI Tahun 2028 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178;
   11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 22029 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2029 Nomor 42, Tambahan lembaran negara RI Nomor 6322;
   12. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026;

13. Permendangri Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 tahun 2027 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat aerah provisni dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penylenggaraan Urusan pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangaunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah entang Rancanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2028, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Sireta Negara RI Tahun 2028 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2029, tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
18. Peraturan Meenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2029, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2029, tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2029-2026 sebagaimanq di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2026 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2021;

27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Nomor : 188/3002/408.53/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat daerah tahun 2026 Kabupaten Pacitan

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja) Kecamatan Ngadirojo Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Kecamatan Ngadirojo ini merupakan pedoman evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngadirojo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan sesuai Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengelolaan Operasional Administrasi Perkantoran;
2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK, KTP dan surat legalisasi lainnya;
3. Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah , Pemuda dan Olah Raga sesuai jumlah pagelaran yang difasilitasi;
4. Pemenuhan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK;
5. Terlaksananya Rapat Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa ke 18 Desa;
6. Terlaksananya Pelayanan bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Terpenuhinya Pendampingan Penyusunan APBDes , APBDes Perubahan dan Penarikan PBB ke 18 Desa;
8. Terlaksananya Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan terpenuhinya Pembinaan LINMAS ke 18 Desa.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Ngadirojo Tahun 2026 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Ngadirojo adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;
2. Pengoorinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
   b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
   c. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
   d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
   a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masayarakat, dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenyraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
4. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum :
   a. Sinegitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b. Pelaksanaan pemeliharan prasrana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilyah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
   a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
   b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
   c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Ngadirojo tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ngadirojo, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2025 – 2029. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirojo antaran lain :

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN NGADIROJO
PERIODE : JULI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**72.85**	**2.654.783.919,00**	**72.00**	**1.466.089.238,00**	**98.83%**	**55.22%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**23.00**	**29.163.423,00**	**12.00**	**653.775,00**	**52.17%**	**2.24%**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Laporan Keuangan dan Capaian kinerja perangkat daerah	19.00	27.994.827,00	11.00	473.775,00	57.89%	1.69%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	1.168.596,00	2.00	180.000,00	50%	15.4%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										53,95	8,55
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59.00**	**1.946.611.926,00**	**22.00**	**1.175.709.867,00**	**37.29%**	**60.4%**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	1.922.705.822,00	0.00	1.173.789.867,00	0%	61.05%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	21.239.920,00	8.00	1.920.000,00	33.33%	9.04%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	2.666.184,00	5.00	0,00	41.67%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										25,00	23,36
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100.00**	**160.337.000,00**	**0.00**	**137.606.700,00**	**0%**	**85.82%**
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	160.337.000,00	1.00	137.606.700,00	50%	85.82%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										50,00	85,82
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Tinggi
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100.00**	**40.036.900,00**	**10.00**	**4.056.400,00**	**10%**	**10.13%**
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	16.549.400,00	1.00	4.056.400,00	100%	24.51%
			0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	11.809.700,00	1.00	0,00	100%	0%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	11.677.800,00	1.00	0,00	100%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100,00	8,17
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
701	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD**	**100.00**	**118.681.500,00**	**60.00**	**68.100.000,00**	**60%**	**57.38%**
701	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	118.681.500,00	1.00	68.100.000,00	50%	57.38%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										50,00	57,38
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Rendah
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan**	**100.00**	**193.181.670,00**	**42.00**	**78.775.996,00**	**42%**	**40.78%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintahan Daerah	**Operasional PD**						
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	21.596.070,00	3.00	9.875.996,00	25%	45.73%
			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	7.700.000,00	3.00	0,00	50%	0%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	163.885.600,00	3.00	68.900.000,00	25%	42.04%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										33,33	29,26
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD**	**100.00**	**166.771.500,00**	**41.00**	**1.186.500,00**	**41%**	**0.71%**
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	133.178.700,00	0.00	1.186.500,00	0%	0.89%
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	33.592.800,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										0,00	0,45
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**96.00**	**31.317.760,00**	**0.00**	**11.390.250,00**	**0%**	**36.37%**
701	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal**	**12.00**	**15.515.752,00**	**0.00**	**7.190.000,00**	**0%**	**46.34%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	15.515.752,00	0.00	7.190.000,00	0%	46.34%
									Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0,00	46,34
									Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**12.00**	**15.802.008,00**	**2.00**	**4.200.250,00**	**16.67%**	**26.58%**
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	15.802.008,00	0.00	4.200.250,00	0%	26.58%
									Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0,00	26,58
									Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**100.00**	**249.398.496,00**	**18.00**	**167.288.572,00**	**18%**	**67.08%**
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**18.00**	**249.398.496,00**	**18.00**	**167.288.572,00**	**100%**	**67.08%**
701	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.00	35.369.884,00	0.00	15.325.472,00	0%	43.33%
			0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	214.028.612,00	20.00	151.963.100,00	166.67%	71%
									Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	83,34	57,17
									Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Tinggi	Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										100,00	67,08
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Tinggi	Sedang
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**100.00**	**203.517.152,00**	**0.00**	**74.844.000,00**	**0%**	**36.78%**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12.00**	**203.517.152,00**	**2.00**	**74.844.000,00**	**16.67%**	**36.78%**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	203.517.152,00	2.00	74.844.000,00	11.11%	36.78%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										11,11	36,78
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										16,67	36,78
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**100.00**	**14.920.300,00**	**0.00**	**3.231.169,00**	**0%**	**21.66%**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**100.00**	**14.920.300,00**	**18.00**	**3.231.169,00**	**18%**	**21.66%**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12	14.920.300,00	2.00	3.231.169,00	16.67%	21.66%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										16,67	21,66
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										18,00	21,66
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**100.00**	**167.428.576,00**	**0.00**	**58.153.932,00**	**0%**	**34.73%**
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Desa yang Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan**	**100.00**	**167.428.576,00**	**18.00**	**58.153.932,00**	**18%**	**34.73%**
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	54	35.272.852,00	18.00	8.694.000,00	33.33%	24.65%
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	36.031.968,00	2.00	3.042.000,00	16.67%	8.44%
			0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	96.123.756,00	3.00	46.417.932,00	25%	48.29%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										25,00	27,13
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										18,00	34,73
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)										19,47	41,97
Predikat kinerja seluruh program(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total							**3.321.366.203,00**		**1.780.997.161,00**		
Persentase Realisasi Anggaran									**53.62%**		
Predikat									**Rendah**		

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021. Pada tahun anggaran 2025, Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 3.321.366.203,00 dari jumlah anggaran yang disediakan tersebut, sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 telah terealisasi sebesar Rp. atau 53.62% dengan rincian sebagai berikut:

No.	**Uraian**	Anggaran	Realisasi		Sisa Dana
			Jumlah	%	
02.01	**BELANJA OPERASI**	Rp3.145.660.921,00	**Rp1.601.802.084,00**	**50,92%**	**Rp 1.543.858.837,00**
02.01.01	1. Belanja Pegawai	Rp1.922.705.822,00	Rp1.054.693.548,00	**54,85%**	Rp 868.012.274,00
02.01.02	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp1.222.955.099,00	Rp547.108.536,00	**44,74%**	Rp 675.846.563,00
02.02	**BELANJA MODAL**	**Rp 26.741.300,00**	**Rp -**	**0,00%**	**Rp 26.741.300,00**
02.02.01	Tanah	…….	…….	…….	…….
02.02.02	Peralatan dan Mesin	Rp 26.741.300,00	Rp -	0,00%	Rp 26.741.300,00
02.02.03	Gedung dan Bangunan	…….	…….	…….	…….
02.02.05	Aset Tetap lainnya	…….	…….	…….	…….
	JUMLAH BELANJA	**Rp 3.172.402.221,00**	**Rp 1.601.802.084,00**	**50,49%**	**Rp 1.570.600.137,00**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kreteria) dan SPM ,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan .

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari:
    1. Desa Sidomulyo
    2. Desa Hadiwarno
    3. Desa Hadiluwih
    4. Desa Tanjungpuro
    5. Desa Pagerejo
    6. Desa Wiyoro
    7. Desa Ngadirojo
    8. Desa Bogoharjo
    9. Desa Cokrokembang
    10. Desa Bodag
    11. Desa Tanjunglor
    12. Desa Nogosari
    13. Desa Cangkring
    14. Desa Wonoadi Kulon
    15. Desa Wonoadi Wetan
    16. Desa Wonokarto
    17. DesaWonosobo
    18. DesaWonoasri

3. Kecamatan mempunyai tugas Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atauKelurahan

4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai peraturan perundang undangan ;
   b) Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
   c) Pengoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
   g) Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatanDesa dan/atau Kelurahan;
   h) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
   i) pelangsanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

5. Selain melaksanakan tugas , Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

6. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;

e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Program,Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;

c. Melakukan pengelolaan data;

d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;

e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan admijistrasi keuangan;

f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akutansi dan pelapoan keuangan;

g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;

b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik Daerah;

d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;

e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;

f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;

g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik Tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. Memfasilitasi percepatan pencapaiaan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instnasi fertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Melakukan koordinasi dengan ihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelaanan umum;
h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaahan kepada masayarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instnsi fertikal;
c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaragaan kegiatan pemerintahan;
e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertahanan di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah Kecamatan dan kerja sama antar kecamatan
j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;
k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa fan peraturan kepala desa;
l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;

n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

o. Memfasilitasi pelaksnaan pemilihan kepala desa

p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan permusyawaratan desa;

q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

r. Memfasilitasi singkrnisasi pernecanaan pembangunjan daerah dengan pembangunan desa;

s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya

t. Melaporkan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan; dan

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikanu oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKSI SOSIAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Uraian Tugas Seksi Sosial sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dana ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masala kesejahteraan sosial;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

f. Memfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundungan-Undangan;

h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;

i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;

j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;

k. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada Camat yang menjadi kewenangannya

l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat mealui Sektretaris Kecamatan; dan

m. Melaksakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegitan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdaya masyarakat

b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c. Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

e. Mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Mengoordinir pelaksanaan pembangunan Kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;

g. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;

h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;

i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan;

j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;

k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;

l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan / atau Kelurahan

o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan;

p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/ atau Kelurahan;

q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa dan/ atau Kelurahan ;

r. Melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan ;

s. Meksanakan pemberdyaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;

t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;

u. Meningkatkan kapasitas lemba ga kemasyarakatan;

v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemusyawarat;

w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakar;

x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam

y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangnnya;

z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan

å. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kantor Kecamatan Ngadirojo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat / melayani masyarakat Kantor Kecamatan Ngadirojo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Mengingat jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Ngadirojo hanya bersifat legalisasi, maka penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya menggunakan kuesioner (pendapat responden tentang Pelayanan Publik) yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayananan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Nilai Rata-rata per Unsur Pelayanan Tahun 2025

Unsur ke	**Unsur Pelayanan**	**Nilai Rata-rata**
1	PERSYARATAN	**3,81**
2	PROSEDUR	**3,81**
3	WAKTU	**3,81**
4	BIAYA/TARIP	**3,97**
5	PRODUK LAYANAN	**3,82**
6	KOMPENTENSI PELAKSANA	**3,86**
7	PERILAKU PELAKSANA	**3,82**
8	SARANA DAN PRASARANA	**3,95**
9	PENANGANAN PENGADUAN	**3,56**
	NILAI KEPUASAN MASYARAKAT	**88,45**

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Ngadirojo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik.

1. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Ngadirojo setelah dikonversikan (**88,45**) Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Ngadirojo adalah SANGAT BAIK.

2. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NGADIROJO

NO	Sasaran	Indikator	SPM/Standar Naional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun			86,94	88,45	89.96	91,47	86,94	88,45	100%	100%	
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan di Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Ngadirojo, 01 Agustus 2025

CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M,Si
Pembina Tk I
NIP. 19720520 199203 1 020

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (opportunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Ngadirojo. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Ngadirojo sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa hambatan, antara lain : (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif :

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirojo ditentukan, isu- isu strategis yaitu sebagai berikut :

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan; (2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company / Coorperate Social Resposipilioty (CSR) , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3). Meningkatnya kualitas pelayanan secara prima adalah faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang akan mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pelayanan di daerah Kecamatan Ngadirojo. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. (4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. (5). Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

   Kegiatan :

   - Perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   - Administrasi keuangan perangkat daerah;
   - Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   - Administrasi umum perangkat daerah;

- Pengadaan barang milik daerah penunjanag urusan pemerintah daerah;
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- Pemeliharaan barang miik daerah penunjangn ursan pemerintah daerah.

2. Program : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

   Kegiatan :

   - Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

3. Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

   Kegiatan :

   - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

4. Program : KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

   Kegiatan :

   - Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5. Program : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

   Kegiatan :

   - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

6. Program : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH

   Kegiatan :

   - Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pacitan Kecamatan Ngadirojo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec.Ngadirojo	Nilai Sakip PD		2.726.766.611,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec.Ngadirojo	Nilai Sakip PD		2.726.766.611,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Dok	20.723.423,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kec.Ngadirojo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	12 Dok	20.723.423,00	

						Perangkat Daerah		Kinerja PD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Adminitrasi Keuangan PD	100%	2.117.708.699,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Adminitrasi Keuangan PD	100%	2.117.708.699,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah pegawai yang dikelola PD	20 Pegawai	30.994.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah pegawai yang dikelola PD	100%	30.994.200,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum PD	100%	50.839.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum PD	100%	50.839.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan	100%	138.681.000,00	Pengadaan Barang	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan	100%	138.681.000,00	

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Layanan Barang Milik Daerah			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Layanan Barang Milik Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	210.273.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	210.273.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	118.861.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	118.861.400,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	100%	26.148.997,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan	100%	26.148.997,00	

			dilaksanakan			DAN PELAYANAN PUBLIK		Publik yang dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	100%	26.148.997,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	100%	26.148.997,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	218.549.366,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	218.549.366,00	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah Desa yang difasilitasi	100%	218.549.366,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah Desa yang difasilitasi	100%	218.549.366,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	158.153.178,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	158.153.178,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	158.153.178,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	158.153.178,00	
	PROGRAM PENYELENGGARA	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggara	100%	10.825.440,00	PROGRAM PENYELE	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggar	100%	10.825.440,00	

	AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		n Pemerintahan Umum yang dilaksanakan			NGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		an Pemerintahan Umum yang dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	10.825.440,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	10.825.440,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ngadirojo	Presentase desa yang termonitoring	100%	117.118.766,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ngadirojo	Presentase desa yang termonitoring	100%	117.118.766,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang termonitoring	100%	117.118.766,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang termonitoring	100%	117.118.766,00	

						dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan ini berasal dari usulan desa melalui musrenbang desa yang belum dapat diusulkan melalui Dana Desa, ADD dan Dana BK. Usulan tersebut merupakan usulan RKP desa pada tahun 2026.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN KECAMATAN NGADIROJO

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Kec.Ngadirojo	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	
	Administrasi Keuangan	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	100 %	
	Administrasi Kepegawaian	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundanagan	100 %	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Ngadirojo	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ngadirojo	Prosentase ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100%	

	DAN PELAYANAN PUBLIK		Pelayanan Publik yang dilaksanakan Pelayanan Publik yang dilaksanakan		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Ngadirojo	Jumlah layanan yang terselenggara Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	17 jenis	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Ngadirojo	Prosentase cakupan desa dan kelurahan yang difasilitasi	18 Desa	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang difasilitasi	18 Desa	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Prosentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ngadirojo	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umu	12 Laporan	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Prosentase desa yang terpenuhi	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Kec.Ngadirojo	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Urusan	18 Desa	

	Daerah		Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Ngadirojo guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut : - Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; - Pendidikan; - Kesehatan; - Penanggulangan Kemiskinan; - Ketahanan Pangan; - Infrastruktur; - Iklim investasi dan Iklim usaha; - Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; - Kebudayaan dan Pariwisata; - Kreativitas dan inovasi; - Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban; - Perekonomian; - Kesejahteraan rakyat. Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Ngadirojo sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Ngadirojo memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut di atas, maka Kecamatan Ngadirojo di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Ngadirojo yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang di laksanakan di

Kecamatan Ngadirojo telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo adalah terselenggaranya tata kelola di kecamatan Ngadirojo yang baik. Dengan sasaran meningkatnya tata kelola Kecamatan Ngadirojo yang transparan dan akuntabel.

Dengan tujuan dan sasaran Operasional Perangkat Daerah tersebut perangkat daerah memiliki indikator kinerja :

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah dengan program prioritas pembangunan program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah dengan program prioritas pembangunan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Tingkat disiplin aparatur dengan program prioritas pembangunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.3 Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yaitu :

1	2	3	4
No	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHA**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertika
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
diantaranya terkait dengan :

1. Pencapaian Visi misi kepala daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Jumlah program dan jumlah kegiatan Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 program,
12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebut menyebar di semua Seksi .
Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
Total Pagu anggaran tahun 2026 Rp 3.257.562.358 ,00 sumber pendanaan dari DAU.

c. Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal maka dilaksanakan Renja perubahan.

d. RKPD baik jenis program / kegiatan , pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dan Kegiatan

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Ngadirojo selama 5 tahun dari tahun (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun ke depan . Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya

4.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Ngadirojo adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Dan salah satu poin pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra Kecamatan Ngadirojo tahun 2025-2029

4.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngadirojo bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan, UPT TK/SD, UPT kegunaan bisa mendapatkan dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari instansi indukny

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Ngadirojo dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Ranwal Renja Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2026 di Kecamatan Ngadirojo dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Ranwal Renja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIONO, S.Sos.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19720520 199203 1 020

CS Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN NGADIROJO KAB. PACITAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN NGADIROJO						**3.257.562.358,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.257.562.358,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.257.562.358,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.726.766.611,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	20.723.423,00			-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen			19 Dokumen	18.554.827,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	2.168.596,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.117.708.699,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2.085.802.595,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	20 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47 Laporan			47 Laporan	26.239.920,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	47 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen			12 Dokumen	5.666.184,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	24 Pegawai			-	30.994.200,00			-	-	-	24 Pegawai	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			2 Paket	30.994.200,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	0,00	KECAMATAN NGADIROJO

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	89.524.489,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	28.936.989,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	21.809.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	38.777.800,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	138.681.000,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			9 Unit	138.681.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	210.273.400,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	27.355.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	42.400.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	140.518.400,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	118.861.400,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit			12 Unit	74.266.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Unit	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	44.594.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan***	**100 %**			**100 %**	**26.148.997,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah layanan yang terselenggara Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan*	17 Jenis			17 Jenis 12 Bulan	26.148.997,00			-	-	-	17 Jenis	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	26.148.997,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**218.549.366,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	18 Desa			-	218.549.366,00			-	-	-	18 Desa	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	38 Dokumen			38 Dokumen	30.293.484,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	38 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	188.255.882,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**158.153.178,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Laporan			-	158.153.178,00			-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	62.363.748,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	95.789.430,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**10.825.440,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	18 Desa			-	10.825.440,00			-	-	-	18 Desa	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan	5.424.500,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	5.400.940,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**117.118.766,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	18 Desa			-	117.118.766,00			-	-	-	18 Desa	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen			4 Dokumen	30.272.852,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	19.722.158,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			12 Laporan	49.123.756,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	J U M L A H							**3.257.562.358,00**							**0,00**	

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2026

KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN
JL. RAYA SUDIMORO No 22 SUDIMORO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Sudimoro Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Sudimoro, 25 Juli 2025
CAMAT SUDIMORO

M.TAUFIK EFFENDI,S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19830416 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB. I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB.II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan apaian Renstra PD..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi P 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27

3.1 Telaahan,sasaran,Program dan Kegiatan 27

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD 27

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 30
4.1 Rencana Kerja dan Kegiatan 30
4.2 Indikator Kinerja 30
4.3 Kelompok sasaran 30
4.4 Pendanaan Indikatif 30
BAB V PENUTUP..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Secara garis besar bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat daerah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sudimoro Tahun 2025 dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Desa. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing) , komprehensif,

mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku Perangkat Daerah kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani desa dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang baik, handal dan prima guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Sudimoro selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manuaia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja PD Kecamatan Sudimoro tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Sudimoro dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Sudimoro yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya renja PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat .

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN

4.1 Rencana Kerja dan Kegiatan

4.2 Indikator Kinerja

4.3 Kelompok sasaran

4.4 Pendanaan Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER I

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Semester 1

Renja Kecamatan Sudimoro tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sudimoro, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026.

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun berjalan 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Program ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 (sampai Triwulan II) dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2025 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2026, ada 6 (enam) program sebagai berikut :

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN SUDIMORO
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**74.87**	**1.748.087.043,00**	**74.10**	**859.044.733,00**	**98.97%**	**49.14%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**24.00**	**3.547.000,00**	**10.00**	**2.047.000,00**	**41.67%**	**57.71%**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19.00	2.047.000,00	8.00	2.047.000,00	42.11%	100%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5.00	1.500.000,00	2.00	0,00	40%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											41,06	50,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD**	**Dokumen**	**59.00**	**1.476.070.943,00**	**24.00**	**738.548.165,00**	**40.68%**	**50.03%**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11.00	1.468.864.543,00	10.00	738.129.165,00	90.91%	50.25%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2.00	2.125.500,00	1.00	0,00	50%	0%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.00	1.998.900,00	0.00	0,00	0%	0%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	27.00	3.082.000,00	10.00	419.000,00	37.04%	13.6%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											44,49	15,96
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**%**	**100.00**	**103.923.500,00**	**100.00**	**43.954.100,00**	**100%**	**42.29%**
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8.00	56.759.500,00	4.00	19.689.600,00	50%	34.69%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000,00	1.00	5.000.000,00	100%	20%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.164.000,00	1.00	1.624.500,00	50%	75.07%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000,00	6.00	17.640.000,00	50%	88.2%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											62,50	54,49
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Rendah
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100.00**	**144.599.000,00**	**100.00**	**66.170.068,00**	**100%**	**45.76%**
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25.083.000,00	6.00	16.990.068,00	50%	67.74%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	119.516.000,00	6.00	49.180.000,00	50%	41.15%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	54,45
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**100.00**	**19.946.600,00**	**100.00**	**8.325.400,00**	**100%**	**41.74%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	19.946.600,00	3.00	8.325.400,00	23.08%	41.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											23,08	41,74
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	%	**100.00**	**110.000.959,00**	**100.00**	**27.077.900,00**	**100%**	**24.62%**
701	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun**	**Bulan**	**12.00**	**30.000.959,00**	**4.00**	**12.564.000,00**	**33.33%**	**41.88%**
701	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	30.000.959,00	5.00	12.564.000,00	41.67%	41.88%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											41,67	41,88
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**80.000.000,00**	**4.00**	**14.513.900,00**	**33.33%**	**18.14%**
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80.000.000,00	6.00	14.513.900,00	50%	18.14%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kecamatan								
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	18,14
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**85.500.000,00**	**100.00**	**34.378.300,00**	**100%**	**40.21%**
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**10.00**	**85.500.000,00**	**10.00**	**34.378.300,00**	**100%**	**40.21%**
701	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	85.500.000,00	5.00	34.378.300,00	41.67%	40.21%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											41,67	40,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	40,21
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**62.473.000,00**	**100.00**	**13.052.800,00**	**100%**	**20.89%**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**62.473.000,00**	**6.00**	**13.052.800,00**	**50%**	**20.89%**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	62.473.000,00	5.00	13.052.800,00	41.67%	20.89%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											41,67	20,89
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sang	Sang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
											at Rendah	at Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	50,00	20,89
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**49.000.000,00**	**100.00**	**11.561.600,00**	**100%**	**23.6%**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**10.00**	**49.000.000,00**	**0.00**	**11.561.600,00**	**0%**	**23.6%**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	49.000.000,00	3.00	11.561.600,00	25%	23.6%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	25,00	23,60
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	0,00	23,60
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Termonitoring**	**%**	**100.00**	**104.985.500,00**	**100.00**	**10.340.200,00**	**100%**	**9.85%**
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**10.00**	**104.985.500,00**	**1.00**	**10.340.200,00**	**10%**	**9.85%**
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	30	65.000.000,00	11.00	2.337.000,00	36.67%	3.6%
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka		12	39.985.500,00	3.00	8.003.200,00	25%	20.02%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											30,84	11,81
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											10,00	9,85
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											99,83	28,05
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Total								**2.160.046.502,00**	**955.455.533,00**			
Persentase Realisasi Anggaran									**44.23%**			
Predikat									**Sangat Rendah**			

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sudimoro tahun 2026 berdasarkan program dan kegiatan ada 6 (Enam) Program yang terbagi menjadi 11 (Sebelas) kegiatan, antara lain :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SUDIMORO KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUDIMORO						**2.034.046.533,00**							**2.545.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.034.046.533,00**							**2.545.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.034.046.533,00**							**2.545.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.740.622.633,00**						-	**1.955.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24"Dokumen			-	2.153.600,00			-	-	-	24"Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen			5 Dokumen	979.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			2 Laporan	1.174.600,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	53"Dokumen			-	1.533.341.133,00			-	-	-	53"Dokumen	1.607.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			14 Orang/bulan	1.529.157.247,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14 Orang/bulan	1.600.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	1.169.900,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 Laporan			20 Laporan	3.013.986,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	21 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100"%			-	1.075.800,00			-	-	-	100"%	2.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen			16 Dokumen	1.075.800,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	16 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100"%			-	97.163.000,00			-	-	-	100"%	153.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket			8 Paket	36.421.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	34.270.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	2.472.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100"%			-	86.819.500,00			-	-	-	100"%	158.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	23.579.500,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	28.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	63.240.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	130.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100"%			-	20.069.600,00			-	-	-	100"%	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit			15 Unit	20.069.600,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**11.782.400,00**						-	**100.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12"Bulan			-	11.782.400,00			-	-	-	12"Bulan	100.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	11.782.400,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**114.000.000,00**						-	**130.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	10"Desa			-	114.000.000,00			-	-	-	10"Desa	130.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	30 Dokumen			30 Dokumen	31.883.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	82.117.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**50.000.000,00**						-	**100.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12"Bulan			-	50.000.000,00			-	-	-	12"Bulan	100.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	33.200.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**54.964.000,00**						-	**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	10"Desa			-	54.964.000,00			-	-	-	10"Desa	50.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan	12.830.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen	42.134.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**62.677.500,00**						-	**210.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	10"Desa			-	62.677.500,00			-	-	-	10"Desa	210.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 Dokumen			30 Dokumen	11.567.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen			4 Dokumen	4.876.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	80.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	16.879.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	16.856.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			12 Laporan	12.499.500,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	J U M L A H							**2.034.046.533,00**							**2.545.000.000,00**	

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi targget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Impilkasi yang timbul terhadap target capain program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam penyusunan rencana kerja melibatkan semua komponen Perangkat daerah agar perencanaan dan pengaggaran sesuai dengan tujuan dan indikator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Sudimoro membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Pagerkidul
2. Desa Pagerlor
3. Desa Sukorejo
4. Desa Sudimoro
5. Desa Ketanggung
6. Desa Klepu
7. Desa Sembowo
8. Desa Karangmulyo
9. Desa Gunungrejo
10. Desa Sumberejo

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
g. pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Sekretariat;
b. Seksi Pelayanan Umum;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Sosial;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

- ***SEKRETARIS KECAMATAN***

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI PELAYANAN UMUM***

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI PEMERINTAHAN***

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;

g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Fasilitasi Kerjasama antar kecamatan;
l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN***

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;

h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- ***SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;

d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
o. Evaluasi Kelurahan;
p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Sudimoro . Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Sudimoro sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Sudimoro masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain

: (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sudimoro ditentukan, isu- isu penting yaitu sebagai berikut;

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;

(2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

(3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

(4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur , Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

(5). Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
b). Program prioritas pembangunan daerah dan
c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju,yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS ,Rencana Kecamatan Sudimoro berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sudimoro.

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun 2021 merupakan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya,hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Sudimoro dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Sudimoro yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sudimoro merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Selain itu untuk meningkatkan dan memelihara budaya lokal terutama gotong royong, maka berdasarkan kegiatan masyarakat direncanakan adanya semenisasi yang hal lainnya akan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Desa.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang

dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah

- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.
- Kegiatan lainnya melalui semenisasi.
- Fasilitasi Kecamatan terhadap Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 10 (sembilan) desa di wilayah Kecamatan Sudimoro tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD .

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Resntra PD .

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan ;
   1. Perencanaan visi dan misi kepala daerah
   2. Pencapaian SDGS ;
   3. Pengentasan Kemiskinan
   4. Pencapaian NSPK dan SPM
   5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang terinci menurut sumber pendanaannya .

c. Jika Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagi indikatif, maupun kombinasi keduannya .
d. Tabel Rencana program dan kegiatan sebagaimana Tabel 4.1 :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Sudimoro selama 5 tahun dari tahun (2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun kedepan .

Renccana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoodinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satua atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain renccana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2 INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan . Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya .

4.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sudimoro adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan . Dan salah satu point pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra Kecamatan Sudimoro tahun 2021 - 2026 .

4.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sudimoro bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan,UPT TK/SD, UPT bisa mendapatkan dana dari APBD Propinsi maupun DAK dari instansi induknya .

BAB V PENUTUP

Catatan penting Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sudimoro memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan , merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja tahun 2026, kecamatan ini baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, berbagai bentuk strategi yang telah terpilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana kerja ini harus diimplementasikan secara tertulis dan jelas ke dalam Rencana Kerja tahun 2026. Renja ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Pacitan terpilih untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi .

Kidah-kaidah dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan mempertimbangkan upaya yang harus ditempuh dengan tidak mudah dan akan mendapat banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Sudimoro sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana kerja ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Sudimoro , tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan Sudimoro

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Sudimoro, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Sudimoro telah mempunyai pedoman/acuan/arahan yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, sehingga bisa terukur dan terprogram dengan baik .

Sudimoro, 28 Juli 2024

CAMAT SUDIMORO

M.TAUFIK EFFENDI,S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19830416 200212 1 003